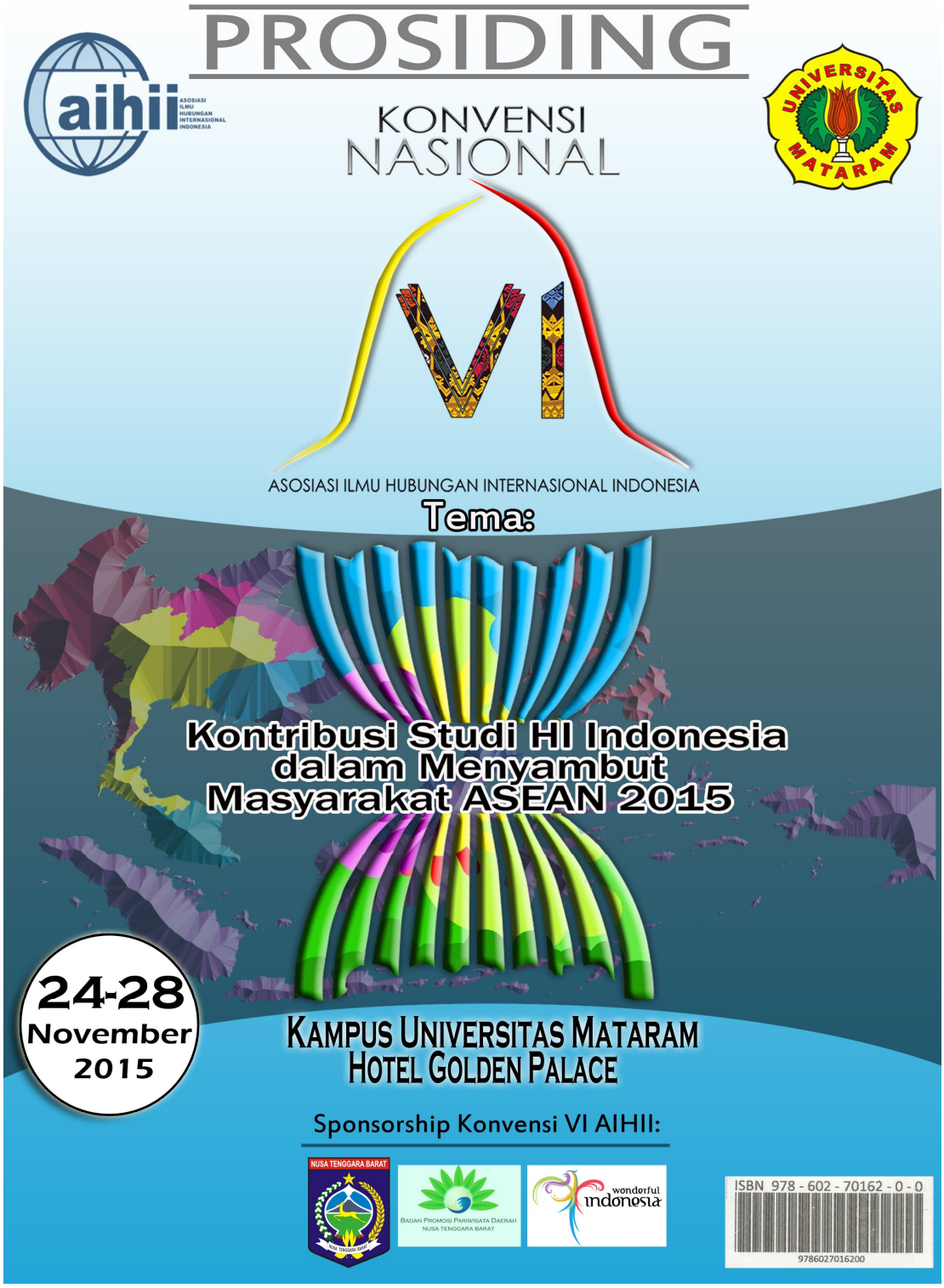
PROSIDING
KONVENSI
NASIONAL
VI
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
Tema:
Kontribusi Studi HI Indonesia
dalam Menyambut
Masyarakat ASEAN 2015
24-28
November
2015
KAMPUS UNIVERSITAS MATARAM
HOTEL GOLDEN PALACE
Sponsorship Konvensi VI AIHII:
ISBN 978 - 602 - 70162 - 0 - 0
9786027016200

DEWAN REDAKSI

Penasehat

1) Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (PP AIHII), Tirta N. Mursitama.
2) Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, Muhammad Sood.

Ketua Dewan Editor

Syaiful Anam

Editor

Mala Mardialina
Rezki Satris
Alfian Hidayat
L. Puttrawandi K.
Ismah Rustam

Desain *Layout*

Bima

Diterbitkan oleh:

Program Studi Hubungan Internasioal Universitas Mataram

bersama

Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia

SAMBUTAN

KETUA ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA 2014-2017

DALAM

KONVENSI NASIONAL VI ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA 24 – 28 NOVEMBER 2015

"KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM MENYAMBUT MASYARAKAT ASEAN 2015"

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya Konvensi Nasional (Vennas) VI Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di Lombok Mataram pada tanggal 24-28 November 2015.

Tanpa terasa perjalanan AIHII sebagai satu-satunya asosiasi yang menaungi program studi (prodi) Hubungan Internasional dan para staf pengajar/peneliti/pemerhati Hubungan Internasional Indonesia telah menginjak tahun keenam.Dalam kurun waktu ini, AIHII masih terus tumbuh dalam tahapan meletakkan landasan sebagai organisasi modern yang dikelola secara profesional.

Bila kita mengikuti dengan seksama, masing-masing konvensi yang dilaksanakan telah menjadi *milestones* bagi keberadaan AIHII hingga saat ini.Secara khusus, Vennas VI ini memiliki makna penting dan strategis karena akan berlakunya Masyarakat ASEAN 2015.

Dari niat untuk berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia, AIHII sebagai sebuah komunitas epistemik Hubungan Internasional Indonesia berupaya memberikan berbagai pemikiran dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015 yang secara resmi mulai berlaku pada 31 Desember 2015. Bahkan, beberapa hari yang lalu para pemimpin ASEAN menyepakati visi baru ASEAN paska 2015.

Dalam prosiding tercantum tiga puluh karya ilmiah dari para anggota AIHII yang membahas tentang kontribusi Hubungan Internasional menyambut Masyarakat ASEAN 2015 dan isu-isu lain yang berkembang dalam perspektif analisis Hubungan Internasional. Untuk itu, salah satu sumbangan penting dari Vennas VI ini adalah pemikiran tentang bagaimana studi Hubungan Internasional tetap relevan dalam Masyarakat ASEAN 2015.

Mataram, 24 – 28 November 2015

Melanjutkan tradisi-tradisi yang baik dalam Vennas, pada Vennas VI kali pun tidak hanya berupa pertemuan ilmiah tetapi juga pertemuan organisasi yang akan menentukan masa depan AIHII sebagai sebuah organisasi profesi yang semakin profesional. Untuk itu, sebagai ketua AIHII saya mengajak kita semua untuk berpikir secara konstruktif menjadikan AIHII semakin kuat secara organisasi dan memberikan manfaat konkrit kepada para anggota dan masyarakat luas khususnya dalam memajukan Hubungan Internasional di Indonesia.

Saya berharap akan muncul terobosan inovatif dalam pengelolaan organisasi dan program kerja yang selama ini telah mulai dibangun dengan susah payah oleh para aktifis, ketua dan pengurus AIHII terdahulu. Beberapa agenda organisasi yang dapat dibahas antara lain adalah struktur organisasi, penyempurnaan AD/ART, KKNI, penerbitan jurnal asosiasi, program pertukaran mahasiswa, Lembaga Akreditasi Mandiri, Akreditasi, *resource sharing* diantara prodi di seluruh Indonesia dan program kerjasama penelitian dan publikasi bersama dan lain-lain.

Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya yang telah menjadi mitra strategis AIHII selama ini, Universitas Mataram sebagai tuan rumah dan para panitia penyelenggara yang dipimpin Sdri Mala yang telah mempersiapkan segalanya dengan dukungan yang luar biasa. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada para pengelola program studi Hubungan Internasional seluruh Indonesia (anggota AIHII) serta individu yang berjasa, anggota SC dan OC sehingga Vennas VI ini dapat berlangsung dengan baik.Saya mohon maaf bila masih banyak terjadi kekurangan.

Selamat berkonvensi, selamat berkontribusi bagi kemajuan negeri!

Jakarta, 23 November 2015

Salam hangat,

Prof. Tirta N. Mursitama, PhD
Ketua AIHII 2014-2017

Daftar isi

MakalahVennas VI AIHII

Kelompok I

1. **Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Masa Pemerintahan Jokowi Terkait Pelaksanaan Konektivitas ASEAN 2015.** *(Haiyyu Darman Moenir-Universitas Andalas, Padang)*
2. **Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.** *(Rizal A. Hidayat – Universitas Al-Azhar Indonesia)*
3. **Diplomasi Pertahanan Indonesia Pada Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Strategi Enmeshing Terhadap External Power di ASEAN.***(Denik Iswardani Witarti, AnggunPuspitasari, TulusYuniasih – Universitas Budi Luhur)*
4. **Diplomasi Total dan Masyarakat ASEAN 2015 (**Sukawarsini Djelantik – Universitas Katolik Parahyangan)
5. **Agama dan Hubungan Internasional ASEAN: Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya.** *(AndiPurwono – Universitas Wahid Hasyim Semarang)*
6. **Moderate Islam, Pancasila, and ASEAN.** *(Nazaruddin Nasution – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*
7. **Meredakan Visi ke Indonesiaan Dalam Disiplin Hubungan Internasional Indonesia.** *(Andrew W. Mantong – Universitas Indonesia)*

Kelompok II

8. **Melawan Musuh Bersama: KerjaSama ASEAN dalam Menangani Kejahatan Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang.** *(Adrianus Bintang Hanto Nugroho – Universitas Kristen SatyaWacana)*
9. **Kapitalisme VS Teori Hijau: Studi Kasus Asap Lintas-Batas Negara di Wilayah ASEAN.** *(RiskiBaskoro – Universitas President)*
10. **Terorisme dan Tantangan *ASEAN Political and Security Community* (APSC).** *(Gonda Yumitro – Universitas Muhammadiyah Malang)*
11. **ASEAN Regional Forum dan Kritik Kontra-Terorisme di Asia Tenggara.** *(Badrus Sholeh dan M. Adian Firnas – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)*
12. **Kajian Gender dalam Kriminal: Keikutsertaan Perempuan dalam Bisnis Peredaran Narkoba di Indonesia Sebuah Studi Deskriptif Kuantitatif** *(Randhi Satria – Universitas Sebelas Maret Surakarta)*
13. **Islam Nusantara: *Why Now*? Sebuah Tinjauan terhadap Wacana Islam Nusantara sebagai Produk Pengetahuan dan Kekuasaan dan Relevansinya terhadap Kebijakan Indonesia di Asia Tenggara.** *(Witri Elvianti – Universitas President)*

14. **Kajian Komparatif Kerangka Keamanan Pangan Regional ASEAN dan Uni Eropa (2007-*2014)* (**Andre Ardi – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
15. **Mengapa Identitas Kolektif Penting Bagi ASEAN? Strategi Riset Konstruktivis Dalam Menyediakan Rekomendasi Kebijakan Terkait Masalah Ketiadaan Peran ASEAN Dalam Isu Rohingya** (Mohamad Rosyidin – Universitas Diponegoro)
16. **ASEAN, China dan Stabilitas Kawasan** (Ignatius Ismanto – Universitas Pelita Harapan)
17. **Konflik Sosietal Indonesia- Malaysia dan Potensi Pengaruhnya Terhadap Proses Pembangunan Integrasi Masyarakat ASEAN 2015** (Ruli Inayah Ramadhoan – Universitas Muhammadiyah Malang)
18. **Peran Media Dalam Pemberantasan Korupsi di Asia Tenggara** (Melisa Fransiska – UPH)

Kelompok III

19. **Corporate Social Responsibility (CSR): Mendorong Peran Strategis Kelompok Bisnis Dalam Penguatan Pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN.** *(Nurullsnaeni, Asra Virgianita dan Shofwan Al-Banna Chaeruzard – Universitas Indonesia)*
20. **Politik Kesadaran sebagai Penentu Keberhasilan Pendekatan *ASEAN Way* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Asia Tenggara.** *(FlavianusD.Melsasail – Universitas Kristen SatyaWacana)*
21. **Legalisasi Perjanjian Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015.***(Imelda M.J. Sianipar – Universitas Kristen Indonesia)*
22. **"Beyond ASEAN Economic Community": Meninjau Hubungan Perdagangan ASEAN dan Amerika Latin Sebagai Mitra Baru (Studi Kasus Indonesia terhadap Chile, Meksiko dan Peru).** *(Fredy B.L. Tobing, Asra Virgianita, Erwin Indrajaja, Maisa Yudono – Universitas Indonesia)*
23. **Free Flow of Labor in ASEAN Economic Community 2015: Indonesian Perspective.** *(Susi Tekunan-UniversitasPelitaHarapan)*
24. **Peran ASEAN University Network (AUN) Dalam Memajukan Kolaborasi Perguruan Tinggi Regional (**Ratih Indraswari – Universitas Katolik Parahyangan)
25. **Peran Perguruan Tinggi di ASEAN dalam MensosialisasikanMasyarakat ASEAN 2015** *(DwiNurL.Fithriya & Harits Dwi W. – Universitas Respati Yogyakarta)*
26. **Peran Perguruan Tinggi Sebagai Agen Intelektual Dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN (**Diansari Solihah Amini – Universitas Respati, Yogyakarta)
27. **Analisa eksistensi dan kedaulatan Negara dalam dinamika hubungan Masyarakat Ekonomi ASEAN (Sebuah kajian berbasis *Complexity Theory).*** *(Tatok Djoko Sudiarto & Emil Radhiansyah – Universitas Paramadina, Jakarta)*

28. **Teori Hubungan Internasional Perspektif Indonesia Dalam Relasi Kuasa Pengetahuan Global dan Konstruksi Masyarakat ASEAN 2015 (**Virtuous Setyaka – Universitas Andalas Padang)
29. **Norm Life Cycle : Kontribusi Konstruksivisme Dalam Pembentukan Identitas ASEAN Untuk Memperkuat ASEAN (** Yusron dan Afri Asnelly – Universitas Budi Luhur)
30. **Posisi ASEAN dan Diplomasi Indonesia Terkait Isu Palestina (**Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**)**

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, West Sumatra, Indonesia
E-mail: haiyyu_darman@yahoo.com, haiyyu_darman@fisip.unand.ac.id
Phone: +62 811 66 15 99 / 853 5564 1980

Konvensi Nasional Ke-VI

Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia

Universitas Mataram – Nusa Tenggara Barat

24 – 28 N0vember 2015

Abstract

Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Masa Pemerintahan Jokowi Terkait Pelaksanaan Konektivitas ASEAN 2015

By: Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si

At the end of 2015, the ASEAN Community will be implemented, Indonesia is required to contribute to make Southeast Asia as a single region and well connected through ASEAN Connectivity. ASEAN Connectivity is a physical connectedness, institutions, and individuals that facilitate the flow of capital, goods, services, and people in the region for the achievement of the economic pillar, security-political, and social culture in the realization of the vision of ASEAN Community. In general, ASEAN connectivity is expected to reduce the development gap by enhancing good governance, integration, and competitiveness of ASEAN, as well as the welfare of the ASEAN Community.

Indonesia consists of thousands of islands, the biggest chore in linking ASEAN region is on the shoulders of Indonesia. As a nation with large natural resources and cultural richness, the implementation of the ASEAN Connectivity will be a major challenge in various fields for Indonesia. Why?

The Indonesian government has not responded to this problem properly. The change of leadership at the present time makes the direction of the readiness of come into question. In the regime of President Susilo Bambang Yudhoyono's administration, a master plan has been designed as a first step acceleration connectivity in parts of Indonesia, called Master plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI). On the other hand, newly

elected President Joko Widodo hinted not continue this program and instead he makes priority on food sovereignty and maritime policy.

This paper aims to provide a comprehensive outlook regarding the readiness of Indonesia to implement the connectivity in the era of President Jokowi, especially after the ASEAN Community in 2015. This research will examine how Jokowi's government policies can be related to the acceleration of connectivity in Indonesia, how Indonesia can benefit greatly in the integration process and how Indonesia can compete in increasing competitiveness among ASEAN countries involved.

Keywords: ASEAN Community 2015, Connectivity, Indonesia, Jokowi's government

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji tentang pelaksanaan Konektivitas ASEAN di Indonesia terutama pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Dalam masa pemerintahannya ketika menjadi presiden Indonesia pada tahun 2014, Jokowi mencanangkan kebijakan Nawacita dan kebijakan Poros Maritim sebagai bagian strategi dalam pembangunan Indonesia dalam 5 tahun kedepan.

Disatu sisi, di tingkat kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia dihadapkan kepada persoalan pelaksanaan konektivitas ASEAN 2015 sebagai bagian dari penerapan integrasi ASEAN (Komunitas ASEAN) yang akan diberlakukan pada 31 Desember 2015. Bagi Indonesia, dengan karakter geografis terdiri dari daratan dan kepulauan, konektivitas ASEAN diperlukan untuk memperkuat proses pembentukan ASEAN masyarakat berjalan sesuai dengan Rencana cetak biru Master ASEAN Connectivity (MPAC).

Berdasarkan rencana induk MPAC, ASEAN telah mengkaji setiap langkah dan tantangan yang akan dihadapi. Strategi kunci dan tindakan penting telah diadopsi dengan target dan jadwal yang jelas untuk mengatasi tantangan-tantangan untuk lebih meningkatkan konektivitas ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan seterusnya. Dengan konektivitas yang baik diharapkan menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan yang cepat untuk semua negara di ASEAN. Konektivitas menjadi sangat penting bagi negara-negara ASEAN sebagai salah satu kondisi yang diperlukan untuk proses integrasi ASEAN, dan juga memastikan sentralitas ASEAN sebagai arsitektur regional yang berkembang secara dinamis.

Upaya untuk membangun konektivitas ASEAN membutuhkan upaya bersama dari semua anggota ASEAN termasuk Indonesia. Sebagai negara terdiri dari ribuan pulau yang tugas terbesar dalam menghubungkan kawasan ASEAN adalah di pundak Indonesia.

Makalah ini dimulai dengan pengenalan pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dimana dalam salah satu tujuan adalah untuk membangun konektivitas ASEAN.

A. Perwujudan Konektifitas dalam Komunitas ASEAN 2015

ASEAN (*Association of South Asia Nation*) merupakan sebuah kerjasama kawasan yang berdiri pada 08 Agustus 1967 dengan ditanda tanganinya deklarasi ASEAN, di Bangkok, Thailand. Penandatangan deklarasi tersebut dilakukan oleh lima negara yang sekaligus menjadi pendiri ASEAN dimana lima negara tersebut diwakili dengan menteri luar negerinya. Lima negara ini adalah Indonesia (Adam Malik), Philipina (Narciso R. Ramos), Malaysia (Tun Abdul Razak), Singapura (S. Rajaratnam), dan Thailand (Thanat Khoman). ASEAN memiliki tujuan untuk mecapai kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan untuk mempromosikan keamanan dan stabilitas regional sesuai dengan piagam PBB.[1]

Dengan adanya kebutuhan negara – negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kerjasama, maka terbentuklah inisiatif untuk menciptakan komunitas ASEAN (ASEAN *Community*). Komunitas ASEAN telah mulai dibicarakan

[1]History of ASEAN, http://www.asean.org/asean/about-asean/history, diakses pada 16 Oktober 2015

pembentukannya semenjak KTT ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur, Malaysia, namun secara resmi baru terbentuk pada tahun 2003 pada KTT ASEAN ke-9 melalui *Bali Cocord* II.[2] Komunitas ASEAN semakin nyata pembentukannya dengan ditantanginya *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2012* pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007.[3]

Komunitas ASEAN 2015 atau ASEAN *Community* 2015 merupakan sebuah bentuk integrasi kawasan yang akan diberlakukan mulai tanggal 31 Desember 2015. Komunitas ASEAN 2015 ini akan membentuk masyarakat ASEAN yang telah menjadi cita-cita para pemimpin ASEAN. Lebih dari 600 juta jiwa masyarakat ASEAN yang akan dengan mudah terlibat dalam melakukan aktifitas dalam aspek ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Hal ini berasarkan tiga pilar yang mendasari Komunitas ASEAN 2015 tersebut yakni komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial-budaya

Ketiga pilar dalam Komunitas ASEAN 2015 ini akan menjadi semakin kompleks dalam pola hubungan internasional karena keterikatan dan keterkaitan satu sama lain. Pertama, Komunitas politik keamanan ASEAN dirancang untuk mendorong terciptanya pembangunan perdamaian melalui perkembangan politik yang positif, memerangi baik isu terorisme, narkoba, maupun isu-isu non-konvensional

[2] Hidayati, Ratnaningsih. *ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas: Edisi 1*. Deepublish, 2015, hal 5.
[3] *Ibid*, hal 5-6.

lainnya secara bersama serta *sharing* norma-norma serta *conflict resolution.*[4] Memperkuat ikatan dalam aspek keamanan antar sesama negara anggota ASEAN, akan membuat negara-negara ASEAN mampu meningkatkan daya tawarnya terhadap *major powers* dan meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanan yang bersifat kolektif.

Kedua, Komunitas Ekonomi ASEAN lebih mendorong kepada pergerakan modal, barang, jasa, dan sumber daya manusia kepada satu pasar dan basis produksi tunggal.[5] Kemajuan liberalisasi di bidang perdagangan dan investasi, mendorong ASEAN dalam perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan tingkat pertumbuhan kawasan. Hal ini perlu adanya keselarasan pemeliharaan integrasi kawasan dengan kepentingan nasional setiap negara-negara anggota.

Pilar ketiga, sasaran dari komunitas sosial-budaya ASEAN ini akan merepresentasikan kepentingan budaya dan sosial dari masyarakat ASEAN serta menjaga dan memajukan warisan budaya dan identitas kawasan.[6] Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena pengelolaan warisan budaya menjadi penting karena menyangkut pada nilai, norma, serta kepercayaan masyarakat. Tentu saja ASEAN tidak hanya memiliki satu budaya atau kepercayaan. Memperkokoh budaya toleransi dari masing-masing negara menjadi dasar identitas sebagai warga ASEAN.

---

[4] Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010), hal.18-19

[5] Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010), hal.20-21

[6] Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, , (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010), hal. 13-14 dan
Laurence Henry, "The ASEAN Way and Community Integration: Two Different Models of Regionalism, European Law Journal, Vol. 13, No. 6 (2007). Hlm. 874.

Identitas kawasan yang dibentuk pun tidak hanya bersifat kultural melainkan bersubstansi kepada budaya politik yang dianut dalam ASEAN.[7]

Guna mencapai sasaran di setiap pilar di dalam Komunitas ASEAN 2015 dibutuhkan sarana yang memfasilitasi realisasi dari integrasi tersebut. Sarana yang dapat menyokong terwujudnya komunitas ASEAN tersebut adalah Konektivitas ASEAN atau ASEAN *Connectivity*. Konektivitas ASEAN adalah konsep strategis pembangunan dan pengembangan kawasan yang dimunculkan pertama kali dalam ASEAN Summit ke-15 pada tanggal 24 Oktober 2009 di Thailand.[8] Dalam pertemuan tersebut, direncanakan sebuah kerangka kesepakatan megenai rencana dalam mensukseskan konektivitas ASEAN yang disebut dengan ASEAN *Master Plan on Regional Connectivity* (MPAC). Dalam menjalankan MPAC sebuah komisi yang disebut *High Level Task force on ASEAN Connectivity* (HHTF – AC) yang bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti ASEAN Development Bank (ADB), Economic Research institute for ASEAN and East ASIA (ERIA), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (SCAP), dan World Bank.[9]

Konektivitas ASEAN bertujuan untuk meningkatkan keterhubungan antara negara – negara anggota ASEAN secara fisik, institusional dan interkasi masyarakatnya. Di dalam *master plan* konektivitas ASEAN, berisi strategi *plan of action* untuk menghubungkan (*connect*) ASEAN melalui pengembangan infrastruktur

[7] Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, "Komunitas ASEAN dan Kekuatan Masyarakatnya: Menjawab Tantangan Zaman" dalam Buletin Komunitas ASEAN, Edisi 4/ Maret 2014, hal. 32.
[8] Diakses dari http://www.intelijen.co.id/konektivitas-asean-dan-konsep-strategis-kawasan-siapkah-indonesia/
[9] Das, Sanchita Basu, ed. *Enhancing ASEAN's Connectivity*. Institute of Southeast Asian Studies, 2013. Hlm. 165 - 166

fisik (*physical connectivity*), institusi yang memiliki proses dan mekanisme yang efektif (*institutional connectivity*) dan pembangunan masayarakat (*people to people connectivity*). Konektivitas ASEAN adalah istilah untuk keterhubungan fisik, lembaga, dan individu yang akan memfasilitasi arus modal, barang, jasa, dan orang-orang di wilayah tersebut untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih besar, memfasilitasi masalah keamanan dan politik, dan mendukung inisiatif sosial dan budaya dalam rangka realisasi Komunitas ASEAN 2015.[10]

[10] Fandy Meirizma Primayoga, *"Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Dukungan Terhadap ASEAN Insfrastruktur Fund Sebagai Upaya Persiapan Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015"*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, hal 2-3.

Gambar I

Interaksi Konektivitas ASEAN dan Komunitas ASEAN[11]

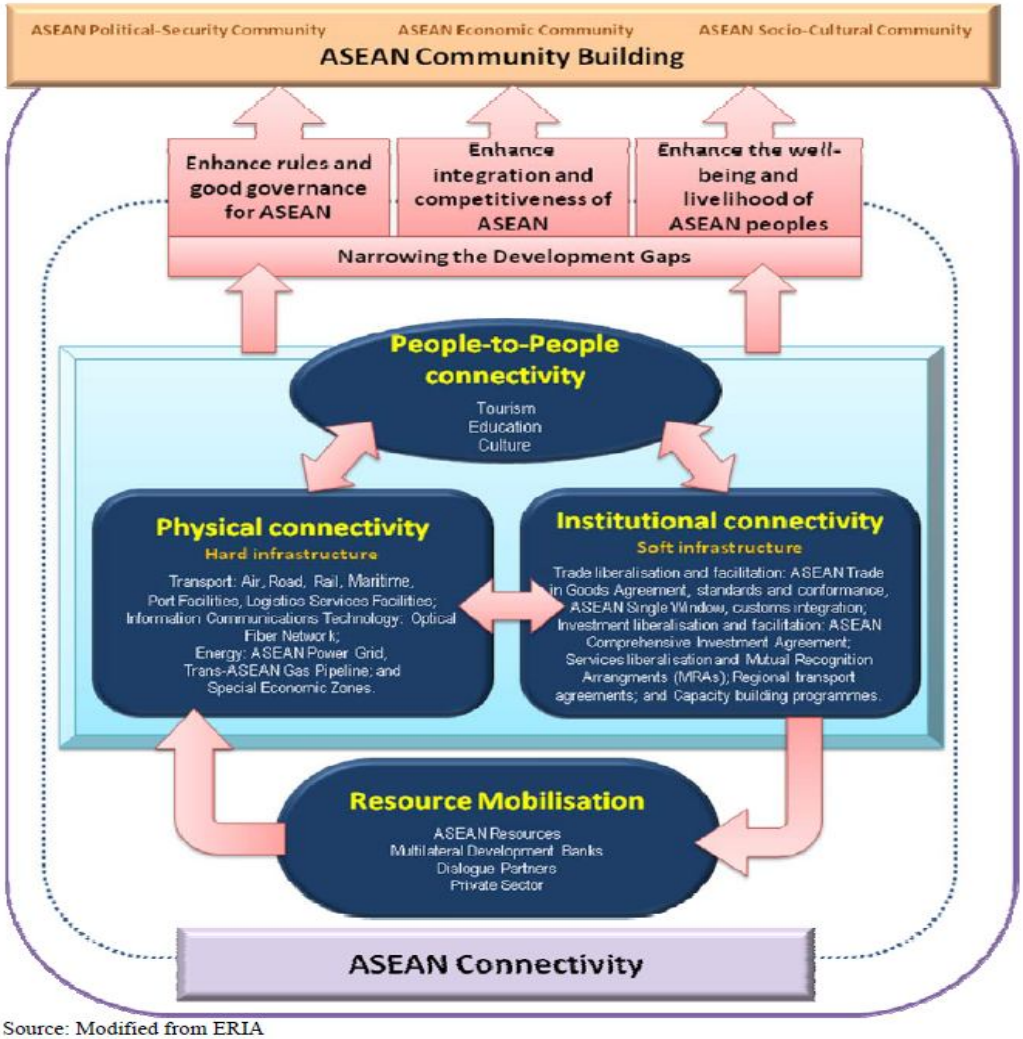

Source: Modified from ERIA

1. Konektivitas Fisik, merujuk kepada transportasi (pengakutan), Teknologi Informasi dan Komunikasi (ITC) dan Energi.

   Buruknya kualitas jalan dan keterbatasan jalan, jaringan kereta api yang masih terbatas, infrastruktur maritim yang tidak memadai temasuk pelabuhan dan jalan lintas air, fasilitas penerbangan, kesenjangan digital menjadi menjadi

[11]ASEAN, *Master Plan on ASEAN Connectivity*, , hlm.4

hambatan untuk mencapai ASEAN yang terintegrasi. Konektivitas fisik ini berusaha untuk memperbaiki keberadaan infrastruktur yang ada dan membangun infrastruktur baru dan fasilitas logistik, harmonisasi regulasi, dan memelihara kebudayaan inovatif yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Inovasi ini berusaha untuk membangun konektivitas regional yang terintegrasi melalui *multimodal transport system*, infrastruktur ICT (*information and communications technology*) **y**ang baik dan kerangka keamanan regional.

i. Pembangunan transportasi dalam konektivitas fisik terdiri dari Pengembangan Insfrastruktur Darat, Laut (maritim) dan Udara.

   a. Transportasi Darat, membangun koridor trasnsportasi yang menghubungkan negara–negara ASEAN seperti pembangunan jalan dan rel kereta api. Dalam sektor ini, ASEAN memiliki sebuah proyek bernama ASEAN *Highway Network* (AHN) dan *Singapore Kunming Rail Link* (SKRL). AHN merupakan perluasan dari *Trans-Asian Highway* diantara negara – negara ASEAN. Jalur ini memiliki panjang sekitar 5.300 km yang melalui Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Vietnam. Di dalam proyek AHN juga terdapat rute transpor transit (TTRs) yang berfungsi sebagai jalur transit pembawa barang – barang.[12]

   b. Transportasi Laut**,** ASEAN merancang sebanyak 47 pelabuhan yang dibangun untuk mengembangkan efesiensi jaringan perkapalan yang merupakan mode trasportasi paling penting dalam perdagangan

[12] Ibid, 11

internasional. Untuk menghubungkan ASEAN diperlukan rute perlayaran efektif yang dapat meningkatkan konektivitas ASEAN. Initiatif untuk membangun rute pelayaran diwujudkan melaui Roll-on/ Roll-of (RoRo) yang bertujuan untuk mengurangi biaya trasnsportasi, menciptakan jaringan baru, memperluas pasar, penganggutan barang – barang yang efisien, mempercepat pembangunan daerah dan menciptakan industri domestik yang kompetitif.

c. Transportasi udara, minat penggunaan jasa transportasi di ASEAN yang semakin meningkat membuat ASEAN bertujuan untuk lebih meningkatkan sistem naviasi udara, menigkatkan fasilitas dalam transportasi udara dan membangun rute – rute baru.

ii. Pengembangan infrastuktur ICT, pengembangan ICT bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran informasi, menghubungkan masyarakat, mengurangi biaya bisnis dan biaya dalam transaksi perdagangan. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara mengembangkan jaringan satelit komunikasi, internet, serta sofware yang dapat mendukung jaringan komunikasi ini.[13]

iii. Pengembangan Infrastruktur Energi. Energi memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Kerjasama dalam sektor energi di ASEAN dilakukan dalam beberapa periode dari ASEAN *Plan of Action for Energi Cooperation* (APAEC) pada tahun 1999-2004, APAEC 2004-2009 dan APAEC 2010-2015.

[13] Ibid, 16

a. APAEC 1999-2004, melakukan pembangunan Trans-ASEAN gas pipeline (TAGP) dan ASEAN *Interconnection* yang bertujuan untuk menjamin keamana energi kawasan dan mempromosikan efisiensi kebutuhan.

b. APAEC 2004-2009, melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* dari ASEAN *Power Grid* (APG), pembentukan APG Consultative Counciil dan ASEAN Council on Petroleum Gas Centre (AGC).

c. APAEC 2010-2015, pencepatan implementasi dari rencana peningkatan keamanan energi yang dapat menyokong program kesehatan, keamanan dan lingkungan khususnya APG, TAGP, teknologi pembersihan batu bara dan pembaharuan.

Gambar II

Status Pengembangan Jaringan APG

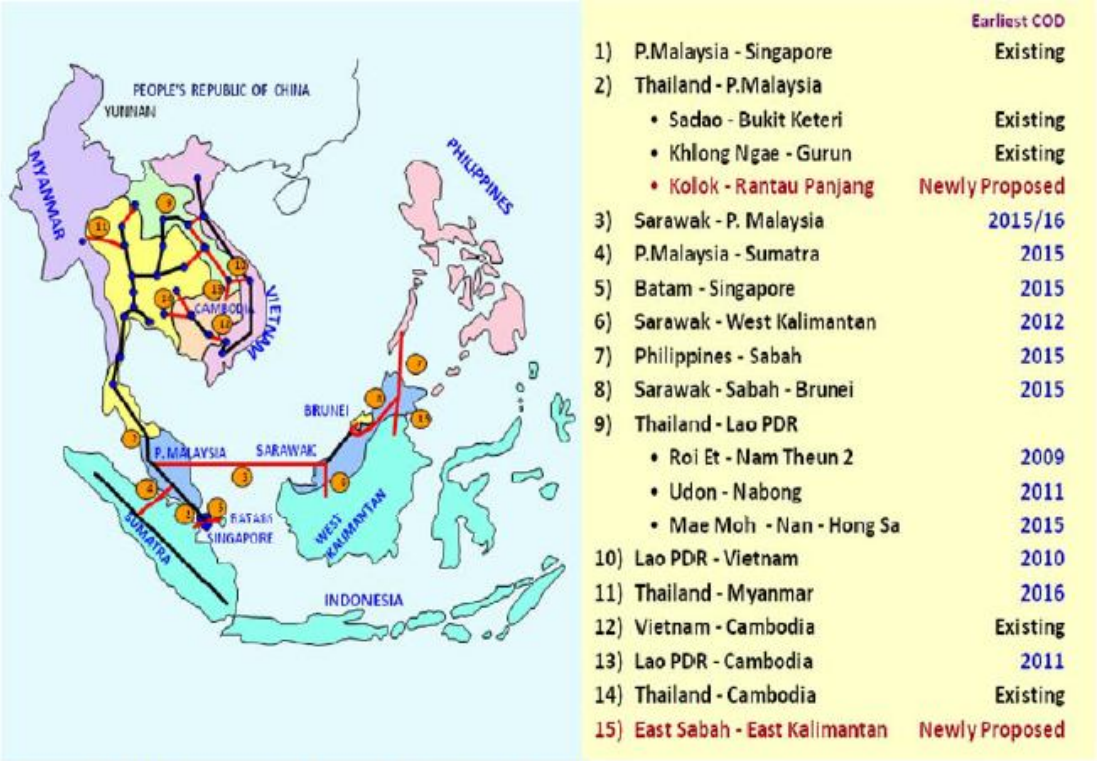

Source: HAPUA Report to 27th Senior Official on Mineral and Energy, 2009

2. Konektivitas Institusi

Di dalam konketivitas institusi terdapat Mutual Recognition Arrangements (MRA) yang memproritaskan integrasi dari segala sektor yang ada. MRA memfasilitasi aliran barang dengan mengadakan tes kelayakan barang (pengujian, inspeksi, sertifikaasi) yang diadakan oleh negara-negara pengimpor sesuai stadar yang telah ditentukan. Didalam MRA dilakukan pemerinksaan pada sektor-sektor seperti sektor pertanian, sektor otomotif, sektor farmasi, sektor elektronik, dan lain-lain. Tujuan dari konektivitas institusi yaitu untuk melakukan liberalisasi

perdagangan, liberalisasi jasa dan investasi, *mutual recognition agreements*, persetujuan transpor regional, dan c*apacity building programmes*

3. Konektivitas masyarakat (*People to People Connectivity),* yaitu dengan pendidikan dan budaya serta pariwisata. Dengan tujuan mempromosikan interaksi sosial dan budaya intra-ASEAN agar lebih mendalam serta menciptakan pemahaman melalui upaya pembangunan komunitas, dimana mobilitasnya dilakukan melalui pengendoran persyaratan pembuatan visa dan rencana pengembangan bersama (MRAs) untuk menyediakan pendorong yang dibutuhkan untuk upaya dalam mempromosikan kesadaran (*promoting awareness*)**.**

Dari uraian diatas, berikut adalah beberapa projek yang menjadi prioritas dalam rencana konektivitas ASEAN:

1. Penyelesaian ASEAN *Highway Network* (AHN) missing links dan memperbaharui rute transpor transit (TRRs)
2. Penyelesaian *Singapore Kunning Rail Link* (SKRL), missing link
3. Pembangunan ASEAN *Broadband Corridor* (ABC)
4. Melaka- Pekan Baru *Interconnection* (IMT-GT: Indonesia)
5. Kalimantan barat – Serawak *Interconnection* (BIMP-EAGA: Indonesia)
6. Jaringan Roll-on/roll-off (RoRo) dan Short-sea shipping
7. Mengembangkan dan mengoperasional rencana persetujuan bersama (MRAs) bagi industi yang terpilih dan terprioritas (pangan, otomotif, farmasi)
8. Membangun aturan bersama untuk prosedur penaksiran standar kesesuaian

9. Mengoperastionalkan *National Single Windows* (NSWs) pada 2012
10. Pengurangan dan pembersihan pembatasan atau rintangan investasi
11. Mengoperasionalisasikan perjanjian ASEAN mengenai fasilitas transport
12. Mempermudah persyaratan visa bagi warga negara ASEAN
13. Pengembangan ASEAN *Virtual Learning Reources Centres* (AVLRC)
14. Mengembangkan strandar keahlian ICT
15. ASEAN *Community Building Programme*

B. Implementasi MPAC Terhadap Posisi Geografis Indonesia

Dari 15 proyek prioritas (*priority projects*) dalam konektivitas ASEAN, tiga proyek yang terkait langsung dengan kepentingan Indonesia, yaitu: *Pekanbaru-Malaka Interconnection* berupa pengembangan jaringan listrik tegangan tinggi antara Semenanjung Malaysia dengan Sumatera, *West Kalimantan-Sarawak Interconnection* berupa pengembangan jaringan listrik bertegangan tinggi dari Kalimantan Barat hingga Serawak.[14] Dan pengembangan sistem transportasi RoRo (*roll-on-roll-off*) untuk pengembangan perkapalan jarak pendek dengan rute prioritas yaitu Dumai—Malaka, Belawan—Penang—Phuket *Triangle Route*, dan Davao/General Santos—Bitung.[15]

Menanggapi pembentukan konektivitas ASEAN, pemerintah Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono mengimplementasikannya dalam bentuk Master Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

[14]Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Mensinergikan Konektivitas Nasional dengan Konektivitas Kawasan sebagai Penunjang Integrasi Ekonomi Kawasan, halaman 8-9
[15]Ibid, halaman 9

Indonesia sebagai salah satu bagian dari anggota ASEAN menyadari pentingnya integrasi dan konektivitas antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini ditekankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan *World Economic Forum on East Asia* (WEFEA) di Bangkok tahun 2012. Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa konektivitas ASEAN akan mendukung percepatan pembangunan ekonomi kawasan ASEAN dan Asia Timur.

> "Saya ingin mengingatkan bahwa masa depan kawasan yang kita tuju sebenarnya bukan hanya sasaran ekonomi, tetapi juga kawasan yang damai dan stabil, kawasan yang ekonominya tumbuh kuat, serta memiliki harmoni dan persahabatan antar peradaban. Kalau kita bicara konektivitas regional, maka yang kita bangun ini harus memiliki pengaruh kepada tiga hal tadi, Kita sudah punya *masterplan* di ASEAN untuk mempercepat dan memperluas pembangunan konektivitas. Kami, sepuluh negara ASEAN, memadukan potensi kami, sumber daya kami agar pembangunan konektivitas ini dalam jangka 5-10 tahun sudah benar-benar bisa mengangkat ekonomi di kawasan ini."[16]

MP3EI bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berimbang, adil dan berkelanjutan.[17] Di dalam program ini terdapat tiga strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan SDM dan Iptek nasional.[18]

1. Koridor ekonomi disusun berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.[19] Dengan pembagian tersebut maka masing-masing koridor akan mengalami kemajuan ekonomi yang didasarkan pada potensi

[16] Presiden SBY Hadiri Pembukaan World Economic Forum on East Asia, http://www.demokrat.or.id/2012/06/presiden-sby-hadiri-pembukaan-world-economic-forum-on-east-asia/, diakses 24 September 2015

[17] "Konektivitas Enam Koridor Ekonomi", dalam majalah Sustaining Partnership, Edisi Khusus Konektivitas Nasional, halaman 1

[18] MP3EI dan Koridor pembangunan Ekonomi Indonesia, Halaman 6

[19] Ibid, halaman 10

yang ada. MP3EI membagi wilayah Indonesia kedalam enam koridor ekonomi yaitu koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, serta Papua-Kepulauan Maluku. Masing-masing koridor memiliki tema yang berbeda dalam pengembangannya, diantaranya :[20]

a. Koridor Ekonomi Sumatera, yang bertemakan "Pusat Produksi dan Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) dan Energi Cadangan Negara."
b. Koridor Ekonomi Jawa, yang bertemakan "Pengendali Industri Nasional dan Penyedia Layanan."
c. Koridor Ekonomi Kalimantan, yang bertemakan "Pusat Produksi dan Pengolahan Bahan Tambang dan Energi Cadangan Nasional."
d. Koridor Ekonomi Sulawesi, yang bertemakan "Pusat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, serta Minyak dan Gas Nasional."
e. Koridor Ekonomi Bali—Nusa Tenggara, yang bertemakan "Pintu Gerbang Pariwisata dan Dukungan Pangan Nasional."
f. Koridor Ekonomi Papua—Kepulauan Maluku, yang bertemakan "Pusat Pengembangan Produksi Makanan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional."

2. Konsep dasar konektivitas mencakup aspek sinergi dan kontinuitas melalui terkoneksinya pusat – pusat ekonomi, infrastruktur dan jalur distribusi yang berkesinambungan. Konektivitas ditekankan pada terkoneksinya ekonomi

[20]Ibid, halaman 10-11

Indonesia dengan pasar dunia melalui empat kebijakan nasional yaitu sistem logistik nasional (sislognas), sistem transportasi nasional (sistranas), pengembangan wilayah, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan untuk dapat mewujudkan konektivitas nasional yang efektif, efisien, dan terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. [21]

Secara umum, maksud dan tujuan penguatan nasional adalah:

i. Menghubungkan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman melalui *intermodal supply change system*.
ii. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesbilitas dari pusat – pusat pertumbuhan ekonomi kewilayah terbelakang (*hinterland*)
iii. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan melalui peningkatan konektivitas dan pelayaran dasar ke daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

[21]"Konektivitas Enam Koridor Ekonomi", dalam majalah Sustaining Partnership, Edisi Khusus Konektivitas Nasional, halaman 13

TABEL I

4 ELEMEN UTAMA PEMBENTUK KONEKTIVITAS NASIONAL

Komponen Pembentuk Postur Konektifitas Nasional			
SISLOGNAS	**SISTRANAS**	**PENGEMBANGAN WILAYAH (RPJMN dan RTRWN)**	**ICT**
1. Penentuan *Key Commodities* 2. Penguatan Jasa Logistik	1. Keselamatan Transportasi 2. Pengusaha Transportasi	1. Peningkatan Ekonomi Lokal 2. Peningkatan Kapasitas SDM	1. Migrasi Menuju Konvergensi 2. Pemerataan Akses dan Layanan
3. Jaringan Infrastruktur	3. Jarinan Transportasi	3. Pengembangan Infrastruktur	3. Pengembangan Jaringan Broadband
4. Peningkatan Kapasitas SDM 5. Peningkatan ICT 6. Harmonisasi Regulasi 7. Perlu Dewan Logistik Nasional	4. Peningkatan SDM dan Iptek 5. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan Hidup 6. Penyediaan Dana Pembangunan 7. Peningkatan Administrasi Negara	4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 5. Peningkatan Akses Modal Kerja 6. Peningkatan Fasilitas Sosial Dasar	4. Peningkatan Keamanan Jaringan & Sistem Informasi 5. Integrasi Infrastruktur, Aplikasi & data Nasional 6. Peningkatan e-Literasi, Kemandirian Industri ICT Domestik dan SDM ICT Siap Pakai 7. Peningkatan Kemandirian Industri ICT Dalam Negeri
Penguatan Konektifitas Nasional Dilakukan dengan Mengintegrasikan dan Mensinergikan Rencana Sislognas, Sistranas, Pengembangan Wilayah dan ICT			

Sumber : MP3EI 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Melalui empat elemen yang ada, diharapkan masing-masing koridor akan saling terintegrasi dan saling terhubung satu sama lain, sehingga pertumbuhan ekonomi yang cepat akan terwujud.

3. Peningkatan kemapuan SDM dan Iptek Nasional

Peningkatan produktivitas SDM didasarkan kepada inovasi dan penguasaan iptek yang diperlukan oleh Indonesia ketika memasuki tahap *inovation-driven economies*. Lembaga penyedia SDM dan iptek diharapkan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dunia industri secara langsung dan mengembangkan iptek kearah komersial dimana, hasil – hasil dari penelitian yang dilakukan oleh institusi dan lembaga pendidikan dapat memeberikan konstribusi

pada perekonomian. Program peningkatan SDM dan iptek nasional tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan penguatan sarana dan prasarana pendidikan yang dibagi sesuai dengan koridor ekonomi yang telah disebutkan di atas. Pada setiap koridor ekonomi dipilih universitas – universitas yang akan diberikan dana bantuan untuk menjalan program tersebut.

C. Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Berbeda dengan program MP3EI yang dikembangkan oleh Presiden Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo tahun 2014 lalu di dalam KTT pertama yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada KTT ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menyatakan poin penting terkait konektivitas ASEAN.

> " Mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara ASEAN, antar negara ASEAN, dan antara ASEAN dengan negara-negara mitra melalui *Masterplan on ASEAN Connectivity*"[22]

Dimasa pemerintahannya, Jokowi mengeluarkan agenda prioritas untuk dalam menjalankan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudaan, yang disebut dengan Nawa Cita. Agenda tersebut adalah:[23]

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif,

[22] Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, " KTT ASEAN Pertama Bagi Presiden Joko Widodo", dalam Buletin Masyarakat ASEAN, Edisi 6/ Desember 2014, hal. 5.
[23] Lihat di http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Dari sembilan strategi yang dicanangkan oleh Jokowi dalam Nawacita, terdapat beberapa poin yang terkait erat dengan konektivitas nasional maupun memperkuat komitmen untuk mewujudkan integrasi ASEAN. Menurut penulis, adapun poin - poin yang berkaitan adalah poin nomor 1, 2 dan 7. Ketiga poin ini kemudian penulis gunakan dalam melihat relevansinya terhadap pelaksanaan konektivitas ASEAN yang akan dihadapi Indonesia pada akhir 2015 ini.

D. Analisa Kebijakan Nawacita Dalam Mewujudkan konektivitas ASEAN

Untuk merealisasikan Nawacita maka dibentuk Agenda Pembangunan Nasional, dimana:

1) Poin Pertama (1) di dalam Nawacita pertama yang menjadi agenda pembangunan nasional adalah pelaksanaan politk luar negeri bebas aktif dimana sasaran utamanya adalah:
   a. Tersusunnya karakter kebijakan politik luar negari Indonesia bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim
   b. Menguatan diplomasi maritim untuk mencerpat penyelesaian perbatasan Indonesia denga sepuluh negara tetangga, menjamin integrasi wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/ kesejahteraan pulau – ulau terdepan, mengembangkan sumber daya alam dan ZEE.
   c. Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong penyelesaian sengketa teritorial kawasan.

2) Dari Poin Kedua (2), Indonesia telah berusaha untuk mewujudkan konektivitas ASEAN sesuai dengan tujuan konektivitas ASEAN untuk meningkatkan keterhubungan antara negara anggota ASEAN secara fisik, institusional dan interaksi masyarakatnya. Dari poin tersebut, Indonesia ingin memperkuat diplomasi denga negara – negara anggota ASEAN lainnya. Apabila diterjemahkan dari tujuan konektivitas ASEAN, maka agenda pembangunan nasional sesuai dengan Nawacita pertama berusaha untuk mewujudkan hubungan secara institusional.

   Namun pada realisasinya terdapat hambatan karena masih terjadinya sengketa perbatasan wilayah diantara negara – negara anggota ASEAN yang melibatkan Indonesia, diantaranya;

i. Persengketaan tersebut seperti perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di sembilan titik perbatasan antara Kalimantan dan negara bagian Sabah dan Serawak yang tidak terselesaikan sampai sekarang.[24]

ii. Perebutan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, China, dan Vietnam yang sampai seakrang tidak terselesaikan.[25]

iii. Perbatasan Wilayah antara Tanjung Batu Camar Wulan dan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang masih berlanjut.[26]

3) Pada Poin Nawacita Nomor Tujuh (7), tentang pemerataan pembangunan antar wilayah utama terdapat agenda pengembangan industri manufaktur, industri pangan, industri maritime, dan pariwisata.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut salah satunya adalah percepatan pembangunan konektivitas antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastuktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi, dan telekomunikasi, serta pasokan energi.

Dimana tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply chained system*; (b) memperluas

[24] Perundingan Sengketa Perbatasan RI-Malaysia 'Sulit Maju', http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150205_malaysia_indonesia_perbatasan, diakses pada 24 Oktober 2015

[25] Sengketa perbatasan Malaysia dengan berbagai negara, http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150617131338-106-60573/sengketa-perbatasan-malaysia-dengan-berbagai-negara/, diakses pada 24 Oktober 2015

[26] Ibid

pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah terbelakang (*hinterland*) (c) melakukan pembangunan secara meluas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain yaitu membangun 2000 kilometer jalan, membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang yang lama, membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang yang lama, membangun Bank Pembangunan dan Infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dari poin diatas pemerintahan Joko Widodo telah berusaha untuk mewujudkan terciptanya konektivitas di ASEAN yang dimulai dari wilayah di Indonesia terlebih dahulu. Upaya penciptaan konektivitas di Indonesia dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana untuk mendukung terciptanya konektivitas fisik antar wilayah di Indonesia. Rencana-rencana pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan, informasi, telekonomunikasi, dan pasokan energi sesuai dengan yang terdapat di dalam *Master Plan* konektivitas ASEAN pada poin konektivias fisik.

Namun dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan - hambatan yang dialami, khususnya terkait dengan poin dua dan poin enam, dimana:

1. Keterbatasan dana. Untuk dapat mencapai pembangunan infrastruktur sesuai dengan perencanaan, maka perkiraan dana yang dibutuhkan setidaknya adalah

5400 Triliun rupiah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatan oleh Dedy S. Priatna, Deputi bidang sarana dan prasarana BAPPENAS.[27]

2. Menurut Bastary P. Indra (Direktur Pengembangan Kemitraan Publik-Swasta BAPPENAS) pembangunan infrastruktur terkendala pada pembebasan lahan karena belum sadarnya masyarakat untuk mendahulukan keuntungan publik.[28]

3. Menurut Dadang Perikesit (Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia), tantangan yang dihadapi adalah buruknya koordinasi dan komunikasi dalam menjalankan proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan Palaran Samarinda.[29]

Pada poin ke-6 nawacita, upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan menciptakan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan memiliki kemiripan dengan tujuan poin nawacita ke-3 yang telah dijelaskan sebelumnya. [30] Dari kedua poin nawacita ini pemerintah memiliki program kerja yang dikenal dengan "poros maritime". Konsep negara maritim telah melekat erat dengan Indonesia sejak dahulunya, hal ini dibuktikan dengan lahirnya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya konsep wawasan nusantara.[31] Hal ini kemudian dikemukakan kembali oleh Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur yang

---

[27] RI Butuh 5400 T Buat Infrastruktur, Tantangan berat Bagi PrabowoMaupun Jokowi, http://finance.detik.com/read/2014/06/25/122216/2618784/4/ri-butuh-rp-5400-t-buat-infrastruktur-tantangan-berat-bagi-prabowo-maupun-jokowi, diakses pada 24 Oktober 2015

[28] Nih, Empat Tantangan Jokowi di Sektor Infrastruktur, http://properti.kompas.com/read/2014/09/18/111644521/Nih.Empat.Tantangan.Jokowi.di.Sektor.Infrastruktur., diakses pada 24 Oktober 2015

[29] Ibid

[30] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, hal 106-107

[31] Pusjianmar, Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasional, Halaman 2

ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar tahun 2014. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan visi Indonesia sebagai poros Maritim Dunia.[32]

Visi sebagai negara maritim ini sangat sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi serta panjang garis pantai 81.900 kilometer.[33] Dengan kondisi seperti ini, tentu Indonesia memiliki tantangan dalam pemenuhan sistem transportasi dan logistik nasional guna mewujudkan visi tersebut. Dalam bidang transportasi dan pemenuhan logistik nasional sebagai negara maritim, Indonesia haruslah memberikan perhatian khusus terhadap transportasi maritim. Perhatian ini diwujudkan melalui program aksi kinerja insfrastruktur transportasi laut sebagai berikut :[34]

- Ditetapkan pelabuhan hub. udara international di Jakarta, Kuala Namu, dan Makasar.
- Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno Hatta.
- Terwujud dan beroperasi secara terjadwal jalur pelayanan *short sea shipping* (SSS) di jalur Pantura dan Lalintim Sumatera untuk menggalakkan transportasi laut sebagai *backbone* transportasi nasional.
- Dibangunnya pelabuhan hub. laut Internasional untuk Kawasan Timur Indonsia di Bitung, dan untuk Kawasan Barat Indonesia di Kuala Tanjung.

---

[32] Kementerian Luar negeri Republik Indonesia, "Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI : Diplomasi Indonesia Akan Menonjolkan Karakter Sebagai Negara Maritim, dalam tabloid Diplomasi nomor 84 tahun viii, Januari 2015, halaman 5

[33]Goldy Evi Grace Simatupang , Konektivitas Maritim: Integrasi Nasional Dan Keterhubungan Global, Halaman 6

[34]Ibid, halaman 8-9

- Pengembangan pelabuhan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Morotai, Biak, dsb.
- Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di bandara utama.
- Terbangun dan beroperasi secara efektif dan efisien jaringan transportasi laut antar pulau dalam rangka mewujudkan transportasi laut sebagai *backbone* transportasi nasional.
- Terintegrasinya pelabuhan hub. laut internasional dengan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan serta pusat pertumbuhan ekonomi dan beroperasi secara efektif dan efisien.
- Beroperasinya secara efektif dan efisien pelabuhan kargo udara internasional.
- Transportasi laut beroperasi secara efektif dan telah berfungsi sebagai *backbone* transportasi nasional.

Didalam Poin ke-7 Nawacita mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor - sektor strategi ekonomi demestik, terdapat rencana pembangunan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Berikut data sasaran kedaulatan pangan tahun 2015-2019.

TABEL II

SASARAN KEDAULATAN PANGAN TAHUN 2015-2019

Komoditi	2014 (baseline)	2019	Rata-Rata Pertumbuhan 2015-2019 (%)
1. Produksi			
a. Padi (juta ton)	70,6	82,0	3,03
b. Jagung (juta ton)	19,13	24,1	4,7
c. Kedelai (juta ton)	0,92	1,92	16,15
d. Gula (juta ton)	2,6	3,8	8,25
e. Daging Sapi (ribu ton)	452,7	755,1	10,8
f. Ikan (di luar rumput laut) – juta ton	12,4	18,7	8,5
g. Garam (juta ton)	2,5	3,3	7,2
2. Konsumsi			
a. Konsumsi kalori (Kkal)	1.967	2.150	-
b. Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	38,0	54,5	7,4
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81,8	92,5	-

Kedaulatan pangan sesuai dengan tujuan konektivitas ASEAN untuk meningkatkan industri strategis negara anggota ASEAN yang salah satunya yaitu industri pertanian dengan tujuan untuk menghasilkan hasil pertanian yang sesuai dengan standar bersama dan dapat diterima di dalam pasar internasional. Kedaulatan pangan yang menjadi tujuan Jokowi adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menghasilkan prosuk pertanian yang dapat bersaing di pasar internasional serta membuat sektor pangan menjadi salah satu sektor strategis yang dapat menunjang pembanguna ekonomi Indonesia.[35]

[35]The ASEAN Secretariat, ASEAN Connectivity, Project Information Sheets, Agustus 2012, hlm. 24

Menurut jurnal kajian LEMHANNAS (Lembaga Pertahanan Nasional) Repulik Indonesia, hambatan dalam kedaulatan pangan adalah :

1. Implementasi kebijakan dan program kegiatan belum dilakukan secara maksimal, mulai dari perancangan pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan serta program kegiatan.

2. Belum terjadinya koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan pemerintahan lama dan pemerintahan yang baru sehingga program tidak berjalan efektif dan efisien.

3. Dalam meningkatkan produktifitas pangan, petani harus menghadapi hambatan produksi seperti distribusi pupuk, buruknya saluran irigasi dan ancaman serangan hama dan penyakit tanaman. Permasalahan yang dihadapi petani bisa dikelompokkan menjadi dua, pertama, pengaruh lingkungan bersifat global, seperti *climate change* yang menyebabkan peningkatan suhu udara serta musim hujan dan musim kemarau yang tidak tentu yang menyebabkan besarnya kemungkinan gagal panen bagi petani. Kedua, pengaruh faktor internal, yaitu kurangnya lahan pertanian untuk menutupi kebutuhan masyarakat

4. Dengan program kerja pemerintah Indonesia pada masa Jokowi seperti pembangunan infrastuktur dan pembukaan lahan industri baru membuat perluasaan lahan guna mendukung kedaulatan pangan sesuai dengan visinya menjadi sulit untuk direalisasikan. Tumpang tindihnya lahan yang akan digunakan membuat pembebasan lahan akan sulit untuk dilakukan. Sebagai contoh yaitu pembangunan waduk Jati Gede di Jawa Barat mengharuskan penghilangan sawah

produktif seluas 3200 hektar dengan kapasitas produksi 76.800 ton pertahun. Dari fakta ini dapat dilihat tidka sejalannya tujuan kedaulatan pangan dengan realitas di lapangan. Disaat kedaulatan pangan mengharuskan pemerintah untuk melakukan perluasan lahan guna untuk peningkatan produksi pertanian, pemerintah melakukan penghilangan lahan produktif pertanian yang berdampak pada jumlah pangan.

Secara umum, indikator keberhasilan dalam mencapai konektivitas nasional adalah terbukanya keterisolasian daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dengan tersedianya infrastruktur fisik yang memadai di 80% kabupaten.[36] Akses yang minim dari dan menuju wilayah seperti papua atau wilayah terpencil lainnya memberikan dampak yang signifikan dalam perdagangan dan mobilitas masyarakat. Dengan keterbatasan transportasi dan telekomunikasi harga barang dan jasa di wilayah terpencil menjadi sangat tinggi. Ditambah lagi dengan jaringan telekomunikasi dan listrik yang terbatas tentu menjadi faktor penghambat bagi daerah terpencil untuk terhubung dengan wilayah lainnya.

Kedua adalah strategi terkait dengan kemandirian ekonomi dan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Keterhubungan antar wilyah tidak hanya terkait moda transportasi tapi juga kemampuan akses listrik oleh seluruh wilyah Indonesia. Untuk mencapai hal ini, pemerintahan Presiden Jokowi berusaha memaksimalkan rasio elektrifikasi nasional sebesar 95% pada 2019 dengan pemenuhan kebutuhan listrik untuk daerah terpencil, terluar dan kepulauan. Akses

[36]Ibid.

listrik yang belum merata di wilayah Indonesia dan seringnya terjadi pemadaman listrik menjadi masalah tersendiri dalam menjalin konektivitas di Indonesia. Diharapkan jika akses listrik sudah dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata, maka konektivitas nasional akan terwujud sekaligus terintegrasi dengan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Ahmad Saebani, Beni. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, hal 57

Anonim. 2014c. "Perkenalkan Poros Maritim: Presiden Joko Widodo Dijadwalkan Jadi Pembicara Utama di APEC" dalam *Harian Kompas*, No. 126 Tahun ke-50, 6 November 2014.

Anonim. 2014e. "Di EAS, Jokowi Beberkan Lima Pilar Poros Maritim Dunia" dalam *www.antaranews.com* yang diakses pada 23 November 2014.

APCO. 2014. "A Jokowi Presidency: Politics, Government and Business Under Indonesia's Future President"dalam APCO Worldwide, 24 Juli 2014.

Aziz, Munawir. 2014. "Tantangan Poros Maritim Jokowi" dalam *Harian Suara Merdeka*, 18 Oktober 2014.

Chuvyers, Ludo dan Wisarn Pupphavesa. 1996. From ASEAN to AFTA, CAS Discussion Paper No. 46.

Das, Sanchita Basu, ed. *Enhancing ASEAN's Connectivity*. Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

Fandy Meirizma Primayoga, *"Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Dukungan Terhadap ASEAN Insfrastruktur Fund Sebagai Upaya Persiapan Pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015"*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya.

Goldy Evi Grace Simatupang , *Konektivitas Maritim: Integrasi Nasional Dan Keterhubungan Global*

Hidayati, Ratnaningsih. *ASEAN Satu Komunitas Satu Identitas: Edisi 1*. Deepublish, 2015

Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, *Mensinergikan Konektivitas Nasional dengan Konektivitas Kawasan sebagai Penunjang Integrasi Ekonomi Kawasan*

KPU. (2014b). "Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014" dalam *www.kpu.go.id*, yang diakses 23 November 2014.

Laurence Henry, "*The ASEAN Way and Community Integration: Two Different Models of Regionalism*", European Law Journal, Vol. 13, No. 6, 2007.

Marsetio. *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan. 2014.

Muhamad, Simela Victor. (2014). "Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia" dalam *Info Singkat Hubungan Internasional,* Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November/2014.

OECD. 2014. *The OECD Economic Outlook, Vol. 2014/1*. Paris: OECD Publishing.

Ripley & Franklin. 1992. Policy Implementation and Bureaucracy. The Dorsey Press, Chicago, hal 4. Dapat diakses pada http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/119393-T%2025259-Implementasi%20kebijakan-Literatur.pdf (akses 28 Januari 2014)

Rosenau, James N. 1981. *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing.

Thorson, Stuart J. 1973. "Adaptation and Foreign Policy Theory" dalam *Sage International Yearbook of Foreign Policy Studies Research Paper No. 18.*

Dokumen

ASEAN. *Master Plan on ASEAN Connectivity*. Hanoi: ASEAN, 2009.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Republik Indonesia. 2009. "Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2015", hal. 7

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. *KTT ASEAN Pertama Bagi Presiden Joko Widodo*. Buletin Masyarakat ASEAN, Edisi 6/ Desember 2014.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, *Komunitas ASEAN dan Kekuatan Masyarakatnya: Menjawab Tantangan Zaman*, Buletin Komunitas ASEAN, Edisi 4/ Maret 2014

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. "Panduan Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Penprinas Mp3ei 2011-2025)". Hal. 1

Kementerian Luar negeri Republik Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI : Diplomasi Indonesia Akan Menonjolkan Karakter Sebagai Negara Maritim*, tabloid Diplomasi nomor 84 tahun viii, Januari 2015

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*,

Konektivitas Enam Koridor Ekonomi, majalah Sustaining Partnership, Edisi Khusus Konektivitas Nasional.

MP3EI dan Koridor pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pusjianmar, Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasional.

The ASEAN Secretariat, ASEAN Connectivity, Project Information Sheets, Agustus 2012

Website

ASEAN Secretariat, ASEAN Vision 2020, ASEAN Secretariat, Jakarta, 15 December 1997 (www.aseansec.org/2357.htm)

History of ASEAN, http://www.asean.org/asean/about-asean/history, diakses pada 16 Oktober 2015

Nih, Empat Tantangan Jokowi di Sektor Infrastruktur, http://properti.kompas.com/read/2014/09/18/111644521/Nih.Empat.Tantangan.Jokowi.di.Sektor.Infrastruktur., diakses pada 24 Oktober 2015

RI Butuh 5400 T Buat Infrastruktur, Tantangan berat Bagi PrabowoMaupun Jokowi, http://finance.detik.com/read/2014/06/25/122216/2618784/4/ri-butuh-rp-5400-t-buat-infrastruktur-tantangan-berat-bagi-prabowo-maupun-jokowi, diakses pada 24 Oktober 2015

Sengketa perbatasan Malaysia dengan berbagai negara, http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150617131338-106-60573/sengketa-perbatasan-malaysia-dengan-berbagai-negara/, diakses pada 24 Oktober 2015

Perundingan Sengketa Perbatasan RI-Malaysia 'Sulit Maju', http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/02/150205_malaysia_indonesia_perbatasan, diakses pada 24 Oktober 2015

Presiden SBY Hadiri Pembukaan World Economic Forum on East Asia, http://www.demokrat.or.id/2012/06/presiden-sby-hadiri-pembukaan-world-economic-forum-on-east-asia/, diakses 24 September 2015

Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN:

Oleh:
Rizal A.Hidayat[37]
(rizal.aditya@uai.ac.id)

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan memberikan sebuah gambaran eksplorasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia yang berangkat dari fenomena pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penggunaan Strategi diplomasi ekonomiini terkait dengan rumusan masalah yang diajukan penulis yaitu Strategi apa yang diperlukan bagi diplomasi Ekonomi Indonesia dalam implementasi MEA? Pada intinya kepentingan implementasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam MEA tersebut merupakan *starting point of departure* menuju penguatan *positioning* ekonomi politik Indonesia nantinya di kawasan Asia Pasifik. Penggunaan strategi diplomasi ekonomi ini dilandasi oleh pemikiran dari teori *Open Self-Reliant Regionalism* yang dikemukakan oleh Chong Li Choy. Dengan demikian pada akhirnya akan menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari regionalism (*regionalism*) Asia Tenggara yang tetap berusaha sebagai actor tunggal untuk memenuhi kemandirian negara-bangsa terkait kebutuhan domestiknya sendiri (*self-reliance*), dengan meminimalisir ketergantungannya dengan dengan negara-negara lain. Namun tetap menjalin keterbukaan (*openness*) akan berbagai kerjasama ekonomi terhadap *region* manapun, baik secara bilateral maupun multilateral. Terutama dalam merealisasikan lima pilar Indonesia sebagai negara-bangsamaritim. Berdasarkanlandasan pemikiran *Open Self-Reliant Regionalism* inilah,maka strategi diplomasi ekonomi yang dimaksud oleh penulis dinamakan sebagai *Parallel-Complementing Diplomacy*.

Kata Kunci:

Regionalism, self-reliance, openness, parallel-complementing diplomacy

[37] Penulis adalah Kandidat DoktorProgram Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. DosenProgram StudiHubunganInternasionalUniversitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.

Pendahuluan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)[38]atau *ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan bagian dari tiga pilar Masyarakat ASEAN 2020 yang dikukuhkan eksistensinya dalam *Bali Concord* II tahun 2003. Kedua pilar masyarakat ASEAN yang lain adalah: APSC (*ASEAN Political-Security Community*) dan ASCC (ASEAN *Socio-Cultural Community*). Namun melalui KTT ASEAN ke-12 di Filipina, akselerasi *ASEAN Community* tersebut dipercepat implementasinya menjadi tahun 2015.

Sejalan dengan percepatan implementasi *ASEAN Community*menjadi tahun 2015, akselerasi Indonesia sebagai bagian dari eksistensi Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya tidak dapat dilepaskan dari visi Indonesia dalam rangka mencapai *positioning*geostrategis-nya, yaitu sebagai negara maritim.Melalui KTT *East ASEAN Summit* (EAS), Presiden Joko Widodo telah memaparkan limavisi yang menjadi pilar pembangunan kemaritiman Indonesia. Kelima pilar yang dimaksud mencakup[39]:

- Pilar pertama adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- Pilar kedua adalah Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan. Visi ini diwujudkan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

[38]Untuk penulisan berikutnya akan menggunakan MEA.

1.1 [39]Metrotvnews, "Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia", dalam http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia, diunduh pada 15 Oktober 2015.

- Pilar ketiga adalah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (*deep seaport*), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- Pilar keempat yang tak kalah penting dengan melaksanakan diplomasi maritim. Untuk itu, Jokowi mengajak semua negara untuk menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.
- Pilar kelima, ujar Jokowi, adalah membangun kekuatan pertahanan maritim. Menurut Presiden Jokowi, hal ini diperlukan sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.

Dengan demikian penyampaian visi sebagai negara maritim tersebut di atas pada hakekatnya merupakan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilakukan dalam rangka menghasilkan *output* berupa menjadi pusat suatu masyarakat yang berbangsa, berkepribadian dan bernegara maritim. Berbangsa maritim, berkepribadian maritim dan bernegara maritim dalam pusaran arus globalisasi perekonomian dan perdagangan dunia. Hal ini mengingatkan kita kembali kepada pemikiran salah satu *Founding Father* Indonesia, yaitu Ir. Sukarno yaitu berusaha mewujudkan Bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat secara politik, bermandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Dalam terminologi menjadi negara maritim dunia, pemikiran Ir. Sukarno tersebut mengimplikasikan tujuan utama Indonesia sebagai suatu negara–bangsa berporos maritim, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai: negara yang berdaulat secara politik sebagai negara-

bangsa maritim, bermandiri secara ekonomi sebagai negara-bangsa maritim, dan tentunya sebagai negara-bangsa yang berkebudayaan dengan berbasis pada budaya maritim.

MEA dan Indonesia dalam konteks negara-bangsa maritim merupakan dua wajah berbeda dalam satu peran global Indonesia dalam perubahan percaturan geostrategis dunia yang meliputi kepentingan geopolitik dan geoekonomi.Hal ini terjadi semenjak ASEAN mendeklarasikan AFTA 1992, kemudian mewujudkan dirinya ke dalam wilayah perdagangan bebas Asia Tenggara melalui ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*). Oleh karena itu kepentingan geostrategis Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran ASEAN sebagai *Southeast Asiaopen regionalism actor*.

Oleh karena itu pembentukan AFTA 1992 menunjukkan bahwa ASEAN merupakan suatu regionalisme terbuka.Walaupun dibentuk dalam rangka mengakomodisikan kepentingan internal anggotanya untuk menjadi *one community*, namun peran globalnya sebagai bagian dari komunitas dunia tetap menjadi perhatian utama ASEAN. Hal ini dengan demikian semakin menunjukkan kapabilitas dan kompetensi ASEAN mewakili region yang selalu menjadi *global-crossed entry point*pertemuan kepentingan ekonomi, politik dan sosial budaya dari berbagai kawasan lain.Di samping itu juga berfungsi sebagairegion penyeimbang kekuasaan

para *major states actor* yang ikut mewarnai kehidupan di kawasan yang paling dinamis di Asia Pasifik ini[40].

Asia Tenggara sebagai*global-crossed entry point*memberikan implikasi terhadapdua*critical points*yang dihadapi Indonesia dalam konteks MEA ini.Dua*critical points*yang merepresentasikangeneralisasi realisasi MEAdengan tujuan kemandirian ekonomi kawasan Asia Tenggara yang berangkat dari efek kepentinganpertimbangan geostrategisyang mewarnai perjalanan MEA,yaitu:

1. Kepentingan politik keamananAS dan Tiongkok yang mempengaruhipemetaan arsitektur ekonomi regional Asia Tenggara.
2. Pemetaan arsitektur ekonomi regional yang mewacanakan kemandirian ekonomi kawasan Asia Tenggara dihadapkan padaeksistensi ACFTA, RCEP (*Regional ComprehensifEconomic Partnership*),TPP(*Trans Pacific Partnership*) dan IORA (*Indian Ocean Rim Association*).

Dalam rangka implikasi pertimbangan geostrategis berdasarkan kedua *critical points*tersebut di atas, maka diperlukan sebuah strategi diplomasiekonomi yang bersifat paralel.Suatu diplomasi ekonomiIndonesia yang sejalan dengan visi *world class maritime nation-state*yang mampu mengakomodir dua kepentingan implikasi geostrategis tersebut di atas. Dantentunya harus dilakukan Indonesia agar s*urvive* sebagai negara-bangsa maritim dalam percaturan ekonomi politikAsia Pasifik, khususnnya Asia Tenggara. Penulis memberi nama strategi diplomasi ekonomi

[40] Rizal A.Hidayat, "Parallel-Complementing Diplomacy Sebagai Strategi Politik Keamanan ASEAN Dalam *ASEAN Political-Security* (APSC) 2015", *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Al Azhar*, Vol.V, No.1, Juni 2014, hlm. 1.

paralel tersebut sebagai *Parallel Complementing-Diplomacy Strategy*(PCDS).[41] Dalam konteks *ASEAN Political Security Community* (APSC), strategi ini berfungsi untuk memperkuat CBM (*Confidence Building Measure*) yang bertujuan mencapai PD (*Preventive Diplomacy*) melalui jalur ARF (*ASEAN Regional Forum*) dan ADMM (*ASEAN Defence Ministerial Meeting*).

Parallel-Complementing Diplomacy Strategy

PCDS merupakan strategi diplomasi ekonomi yang dijalankan secara paralel, mencakup diplomasi bilateral dalam konteks regional dan diplomasi multilateral. Diplomasi bilateral yang dimaksud terkait dengan relasi Indonesia dengan negara-negara intra-ASEAN dan ekstra-regional terhadap negara-negara mitra dialog utama ASEAN. Sedangkan diplomasi multilateral mencakup Indonesia sebagai bagian dari Asosiasi negara region Asia Tenggarayang berelasi ekstra-regional (ASEAN terhadap negara/kelompok negara di luar region Asia Tenggara).Esensi PCDS pada hakekatnya merefleksikan fokus pelaksanaan politik luar negeri Indonesia 2014-2019.

Fokus pelasanaan politik luar negeri Indonesia 2014-2019 yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan meningkatkan ekonomi Indonesia, serta peran Indonesia di kawasan dan dunia.Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa pilar ekonomi salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia untuk menopang kemandirian ekonomi nasional. Isu yang diangkat dalam diplomasi antara lain perluasan akses pasar produk Indonesia serta promosi investasi dan pariwisata melalui peningkatan hubungan bilateral, regional dan multilateral.[42]

---

[41] Penulisan berikutnya akan menggunakan PCDS.
[42] Kompas, 15 Oktober 2015

Dasar pemikiran penggunaan PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi Indonesia sebenarnya mengakomodir kepentingan implikasi politik keamanan AS dan Tiongkok, disampingpemetaan arsitektur ekonomi regional Asia Tenggara.PCDS mengandung relevansi pemikiran Chong Li Choytentang *Open Self Reliant Regionalism* (OSRR)[43]. OSRR mengandung tiga refleksi konseptual yang berangkat dari tiga ide mendasar yaitu:[44]

1. *Regionalism*:

Regionalisme diartikan sebagai gabungan dari beberapa negara dalam satu region yang disebut dengan koalisi.Koalisi ini bertindak sebagai aktor bersama dalam hubungan internasional dimana merupakan elemen utama dari pelaksanaan keseimbangan sistemik. Koalisi sangat penting jika harus dihadapkan dengan negara-negara atau koalisi lain yang sifatnya lebih kuat dari koalisi yang bersangkutan. Regionalism mengandung makna *cost reduction operation*. Pelaksanaan *cost reduction* menurut Choy adalah penurunan atau pengurangan tuntutan yang diberikan oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara lemah. Terjadinya penurunan atau pengurangan tuntutan disebabkan oleh adanya persamaan persepsi karena situasi mendukung atau *agreements* yang disepakati antara keduanya.

2. *Self-Reliance*:

Pengertian *self-reliance* menurut Choy adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan internal dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak luar.*Self-reliance* merupakan implementasi dari *inward-looking* pembangunan region

[43] Penulisan berikutnya akan menggunakan OSRR.
[44] Chong Li Choy, *Open Self-Reliant Regionalism: Power for ASEAN's Development*, (Singapura, Institute of Southeast Asian Studies, 1981), p.46-51.

sebagai suatu unit tunggal yang bertindak bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan sendiri tersebut.*Self-reliance* terimplikasikan pada tindakan pelaksanaan keseimbangan sistemik, yaitu *withdrawal*.*Withdrawal* adalah usaha penarikan diri dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada pihak-pihak luar, tetapi tidak secara total.Tindakan penarikan diri (*withdrawal*) terhadap hubungan eksternal harus diimbangi dengan alternatif untuk mencari dan membina hubungan baru yang lebih menguntungkan.Dengan menurunkan ketergantungan hubungan ekstra regional, maka stabilitas hubungan intra regional dapat terus dijaga.

3. *Opennes* :

Opennes merupakan kelanjutan dari tindakan *withdrawal*. Dikatakan bahwa walaupun tidak menarik diri secara total, ASEAN selalu mencari alternatif uintuk membentuk hubungan baru yang lebih menguntungkan, terutama hubungan dengan negara-negara dengan perekonomian maju. Tindakan inilah yang disebut Choy sebagai tindakan *openness* (keterbukaan).*Opennes* mengandung pelaksanaan *cost reduction operation* sebagai suatu bentuk sikap bersahabat dengan negara-negara maju, sehingga ASEAN dapat meminimalisasikan kerugiannya dalam hubungan internasional.

Relevansi OSRR Melalui PCDS Indonesia Dari Perspektif Geostrategis

PCDS melalui diplomasi bilateral (intra-regional) dan multilateral (ekstra-regional) mengakomodir dua *critical points* yang merepresentasikan generalisasi realisasi MEA berdasarkan sudut pandang geostrategis Asia Tenggara yang mencerminkan konsep *regionalism, self-reliance* dan *openness* (OSRR).

Relevansi OSRR melalui penggunaan PCDS oleh Indonesia sejatinya merefleksikan posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia dari sudut pandang Geostrategis Asia Tenggara. Sudut pandang geostrategis ini adalah bagian dari pertarungan hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok, yang berimplikasi kepada arsitektur ekonomi regional Asia Tenggara dalam ruang lingkup Asia Pasifik terkait wacana kemandirian ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Karakteristik regionalisme dari OSRR dalam wacana kemandirian kawasan Asia Tenggara telah ditunjukkan melalui pembentukan *ASEAN Community* dengan pilar MEA-nya, disamping APSC dan ASCC.Koalisi negara-negara ASEAN melalui MEA tersebut disamping bertindak sebagai koalisi aktor dalam hubungan internasional ASEAN, namun juga merupakan bentuk keseimbangan sistemik kawasan.MEA merupakan suatu bentuk pelaksanaan keseimbangan sistemik dari regionalisme ekonomi perdagangan intra-kawasan berhadapan dengan benturan kepentingan hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara ini.

Namun benturan kepentingan hegemoni politik keamanan diantara AS dan Tiongkok juga menghasilkan *cost reduction operation* mereka terhadap negara-anggota ASEAN dalam bentuk kawasan ekonomi perdagangan bebas. Dalam hal ini *cost reduction operation* dalam regionalisme terkait MEA dimaknai bahwa negara-negara anggota MEA sejatinyadisampingmerupakan bagian dari negara-negara anggota ACFTA,namun mereka juga membuka diri ke dalam keanggotaanRCEP (ASEAN + 6), TPP (Singapura, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam), dan IORA (Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand). Bagi AS maupun Tiongkok

secara logika akanmenurunkan atau mengurangi tuntutan dalam *Cost Reduction Operation*-nya terhadap negara-negara anggota ASEAN, karena adanya persamaan persepsi akan pentingnya perdagangan bebas sebagai tulang punggung kapabilitas ekonomi dan penetrasi pasar bebas mereka di Asia Tenggara.

Namun demikian, baik ACFTA, RCEP, TPP dan IORA pada hakekatnya tetap merupakan produk kepentingan ekonomi politik global Tiongkok dan AS terhadap pemetaan arsitektur ekonomi regional yang menganggu jalannya kemandirian kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara secara implisit. Produk kepentingan ekonomi politik global tersebut tidak berdiri sendiri. pemetaan arsitektur ekonomi regional di Asia Tenggara juga merupakan konsekwensi logis implikasi rivalitas stabilitas hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok terkait konflik Laut Cina Selatan (LCS)[45].

Melalui momentum di atas, PCDS Indonesia sebenarnya bermanfaat untuk menjadikan Indonesia sebagai aktor penting regionalisme (*regionalism*) Asia Tenggara yang tetap berusaha sebagai aktor tunggal untuk memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri (*self-reliance*) dengan meminimalisir ketergantungannya dengan dengan negara-negara lain. Hal ini dibuktikan dengan visualisasi lima pilar Indonesia sebagai negara maritim. Namun tetap menjalin keterbukaan (*openness*) akan berbagai kerjasama ekonomi dan perdagangan terhadap *region* manapun, baik secara bilateral maupun multilateral dalam konteks ACFTA, RCEP, TPP dan IORA. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai *buffer state actor* bagi AS dan Tiongkok dalam meluaskan jangkauan *sphere of influence*-nya di Asia Tenggara.

[45] Penulisan berikutnya akan menggunakan LCS.

Faktor lain yang menjadikan PCDS Indonesiabermanfaat adalah tidak dapat dipisahkannya posisi strategis Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain pada umumnya yang merepresentasikanrivalitas kepentingan stabilitas hegemoni politik dan ekonomi AS dan Tiongkok di Asia Tenggara dalam konflik LCS.Dalam konflik LCS, implikasi implisit rivalitas stabilitas hegemoni AS dan Tiongkok bertolakdari kepentingan eksplorasi sumber daya alam minyak dan gas bumi beserta kekayaan alam lainnya. Jalur transportasi pelayaran perdagangan, kebutuhan *off shore* maupun *on shore* yang menyuplai kebutuhan akan ketahanan energi yang membentang sepanjang gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di LCS merupakan pintu masuk strategis yang menghubungkan kedua negara tersebut ke dalam komunitas ekonomi dan perdagangan negara-negara ASEAN. Sehingga dengan demikian jika tidak ditopang dengan strategi politik keamanan yang dikembangkan tiga kekuatan hegemonis (AS-Asia Tenggara-Tiongkok) dalam kawasan LCS, maka akan menjadikan kawasan tersebut menyuburkan persemaian konflik kepentingan politik dan ekonomi yang berimbas kepada negara-negara anggota ASEAN lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sengketa klaim kepemilikan kedaulatan teritorialnya. Politik keamanan yang digunakan Tiongkok dan AS terhadap konflik kawasan LCS lebih mengutamakan pendekatan geostrategis, geopolitik dan geoekonomi terkait dengan *power interest* kedua negara tersebut terhadap kawasan Asia Tenggara. Perspektif geostrategis melalui pendekatan geopolitik dan geoekonomi terhadap LCS sebagai pintu gerbang utama ekonomi perdagangan negara-negara Asia Tenggara membuat sejauh mungkin kemungkinan konflik tersebut berdampak terhadap kemunculan isu-isu strategis keamanan nontradisional,

mengingat posisi strategis LCS sebagai jalur penting aktivitas ekonomi perdagangan dunia.

Dalam fungsi konsep *Balance Of Power* (BoP) sebagai *equilibrium*, hubungan antara AS, Asia Tenggara dan Tiongkok terkait Konflik LCS dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1:

Model Ekuilibrium Sederhana

Balance of Power

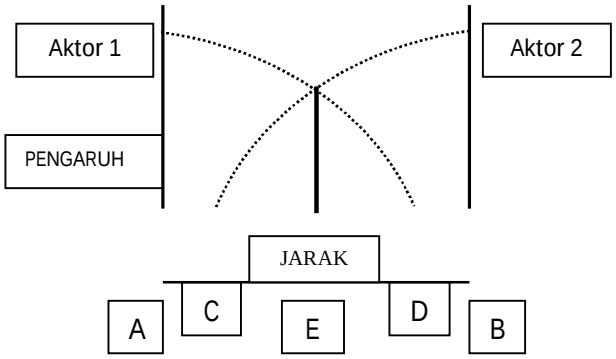

<u>Keterangan Gambar</u>:

AE : Wilayah Aktor 1 (AS)

BE : Wilayah Aktor 2 (Tiongkok)

CD : Wilayah yang diperebutkan (Asia Tenggara)

Sumber : diolah dari Mas'oed[46]

Model equilibrium BoP di atas menjadikan dasar perimbangan kekuasaan AS dan Tiongkok dalam memandang konflik LCS menjadikan perspektif geopolitik menemukan keberadaan ekuilibrium titik kepentingan/pertimbangan geostrategis AS dan Tiongkok.

Dalam studi hubungan internasional, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor : dari nasional, internasional, dan benua-kawasan, juga provinsi atau lokal. Di sini geografi membatasi atau mengarahkan aktivitas negara.[47] Geo dalam analisis geopolitik terkait dengan struktur ruang (*spatial*). Untuk memahami sistem itu harus dilihat kategori ruang yang strukturnya hirarkis. Dengan demikian memahami analisis geopolitik harus dimulai dengan pendekatan realisme mengingat pembatasan dan pengarahan pada peran negara sebagai unit analisis. Pergerakan unit analisis dalam konteks geopolitik berfungsi untuk melihat bagaimana aktivitas suatu negara berperan dalam arena regional/kawasan jika hal ini diambil sebagai level analisisnya. *Geostrategicrealms* membutuhkan konsep *shatterbelt* sebagai *crush zone* atau *shatter zone*. *Shatterbelt* adalah kawasan strategis yang secara politis terfragmentasi, menjadi wilayah

[46] Mohtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional – Teori dan Metodologi, (Jakarta: LP3ES,1994), hlm. 136.

[47] Adrianus Harsawaskita, "Great Power Politics Di Asia Tengah: Sudut Pandang Geopolitik", dalam Yulius P.Hermawan (ed.), *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hlm. 185.

persaingan antara lingkup maritim dan lingkup kontinental. Wilayah s*hatterbelt* bukan hanya wilayah penuh konflik, tetapi juga merupakan *playing field* yang seimbang dalam kerangka akses pada dua atau lebih *powers* yang bersaing, yang beroperasi dari *geostrategic realms* yang berbeda. Jadi sebenarnya Shatterbelt adalah tempat bertemunya *sea power state actor* dan *continental power state actor*.

kehadiran dua negara super power bagi kekuatan militer AS dan Tiongkok mengindikasikan dua hirarki tertinggi dari *geostrategic realms*, yaitu maritim (AS) dan Kontinental (Tiongkok). Dengan demikian Asia Tenggara merupakan *Shatterbelt* bagi bertemunya *sea power state actor* (AS) dan *continental power state actor* (Tiongkok).

Sebagai *shatterbelt* AS dan Tiongkok. Asia Tenggara sebagai Kawasan *playing field* dalam konsep BoP adalah kawasan CD (negara-negara Asia Tenggara) yang menjadi medan pertarungan ekuilibrium hegemoni AS dan Tiongkok terhadap kawasan Asia Tenggara (E). Dalam hal ini AS bisa mewakilkan para MNC dan TNC miliknya yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara yang berkepentingan terhadap eksplorasi sumber daya alam yang terkandung di LCS. Bagi Tiongkok, kekayaan sumber daya alam di LCS bisa diolah di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestic Tiongkok yang besar akan sumber energi. Oleh karena itu sekalipun pembangunan militer Tiongkok berorientasi *sea (maritime) base*, namun sebenarnya digunakan untuk menunjang pertahanan *continental*-nya. Dan bagi AS, kawasan Asia Tenggara mewakili kepentingan global AS yang semenjak Pemerintahan Obama lebih merapat ke kawasan Asia Pasifik.

Mewakili kepentingan global AS yang mendekati kawasan Asia Pasifik, Presiden Barrack Obama dalam *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities For 21st Century yang* dikeluarkan oleh *Departemen Of Defense*AS yang dirilis pada Januari 2012 menyatakan bahwa:[48]

> "*We will emphasize our existing alliances, which provide a vital foundation for Asia-Pasific Security. We will also expand our network of cooperation with emerging partner throughout the Asia-Pasific to ensure collective capability and capacity for securing common interests*."

Terkait dengan penilain AS terhadap kekuatan ekonomi dan militer China yang berada pada titik kulminasi kecemasan AS terhadap pesaing strategisnya ini di kawasan Asia Pasifik, selanjutnya oleh Obama ditegaskan bahwa:[49]

> "*The Maintenance of peace, stability, the free flow of commerce, and of U.S. influence in this dynamic region will depend in part on an underlying balance of military capability and presence. Over the long term, China's emergence as a regional power will have the potential to affect the U.S. economy and our security in a variety of ways*."

Berdasarkan perimbangan kekuasaan AS dan Tiongkok yang digambarkan dalam konsep BoP di atas, maka Indonesia harus memanfaatkan momentum *shatterbelt* tersebut untuk memaksimalkan kapabilitas *power*-nya yang mewakili kepentingan geostrategis region Asia Tenggara. Visi *MaritimeState* Indonesia yang notabene berorientasi *sea (maritime) base* merupakan negara penyangga (*buffer state*)

---

[48] Barrack Obama, "Sustaining U.S. Global Leadership : Priorities for 21st Century Defense, dalam http://www.defense.gov, diakses tanggal 9 Maret 2013.
[49] Ibid.

kepentingan hegemoni AS dan Tiongkok di Asia Pasifik. Hal ini sudah ditunjukkan keberadaan AS dan Tiongkok dalam sub regionalisme ekonomi di Asia Pasifik seperti ACFTA, RCEP, TPP dan IORA. Pemanfaatan tersebut mengharuskan Indonesia melalui PCDS setiap saat mereposisi peran strategisnya dalam geopolitik dan geoekonomi Asia Tenggara sebagai kawasan berkarakteristik OSRR. Oleh karena itu, di luar keanggotaannya dalam ACFTA, maka diplomasi paralel Indonesia berupa bilateral dan multilateral perlu dijalankan secara intensif oleh Indonesia dalam kerangka RECP, TPP dan IORA. Perkembangan aktual terkait hal tersebut di atas adalah hasil kunjungan bilateral Presiden Jokowi ke AS beberapa waktu yang lalu. Di samping diputuskan Indonesia akan bergabung dengan TPP, hasil kunjungan bilateral Presiden Jokowi tersebut juga menyepakati 12 kesepakatan bisnis di bidang energi, transportasi dan perluasan pabrik. Total nilai kesepakatan bisnis yang disetujui mencapai US$ 20,075 miliar (sekitar 274 triliun). Kesemuannya dalam bentuk investasi langsung (FDI) dan investasi keluar (*outward investment*). Menurut BKPM, realisasi investasi AS di Indonesia periode Januari-September 2015 sebesar US$ 854 juta. Total Investasi AS periode 2010-September 2015 sebesar US$ 8 miliar, menduduki peringkat ketiga setelah Singapura dan Jepang.)[50].

Kuntjoro-Jakti menggambarkan reposisi peran strategis suatu negara-bangsa sebagai suatu pemahaman atas posisi strategis dari lokasi dan wujud geografi suatu negara-bangsa di permukaan bumi. Dalam pandangannya suatu pemahaman atas posisi strategis dari lokasi dan wujud geografi suatu negara-bangsa di permukaan bumi baik pada dimensi darat, laut, maupun dimensi udaranya, pada akhirnya akan

[50] Koran Tempo, 28 Oktober 2015.

memunculkan perumusan geostrategik. Selanjutnya, berlandaskan pemahaman geostrategik tersebut akan diturunkan perumusan dari geopolitik, lalu dari geoekonomi. Dapat dipahami bahwa geopolitik adalah perumusan utama dari postur politik luar negeri suatu negara-bangsa yang dikaitkan kepada pemahaman tentang posisi strategis geografis suatu negara. Sedangkan geoekonomi adalah perumusan postur strategis dari hubungan-hubungan ekonomi dengan pihak luar dari suatu negara, yang juga dikaitkan kepada unsur-unsur geografis yang berperan penting pada kehidupan suatu negara-misalnya dalam hal kekayaan alam, keberadaan ALKI, bentangan wilayah udara, dan lainnya.[51]

Penggambaran reposisi peran strategis negara-bangsa seperti yang dijelaskan oleh Kuntjoro-jakti di atas semakin menegaskan relevansi PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi paralel Indonesia dalam mengambil keuntungan *positioning* Indonesia sebagai bagian dari komunitas ekonomi Asia Tenggara. Keuntungan *positioning* yang berefek *outward looking* orientation politik luar negeri Indonesia ke dalam instrumen diplomasi ekonomi. Keuntungan *positioning*yang mengharuskanIndonesia harus selalu mereposisi peran strategisnya dalam percaturan ekonomi politik Asia pasifik. Hal ini perlu dilakukan karena walau bagaimanapun juga Indonesia harus tetap fokus kepada MEA yang diorientasikan pada kemandirian kawasan ekonomi Asia Tenggara. PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi yang bersifat paralel bagi Indonesia sebenarnya bertujuan untuk meminimalisir kerugian ekonominya dalam arena ekonomi perdagangan internasional secara komprehensif.

[51]Dorodjatun Koentjoro-Jakti, *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*, (Jakarta: Pustaka Alvabet,2012), hlm.53.

PCDS berusaha menyeimbangkan kepentingan relasi ekonomi bilateral dan multilateral sebagai suatu bentuk simbiosis mutualisma diplomasi ekonomi Indonesia.

Perkembangan terakhir yang menunjukkan Indonesia akan bergabung dengan TPP mengindikasikan pentingnya urgensi penguatan PCDS untuk merealisasikan secara bertahap lima pilar pencapaian visi negara-bangsa maritim. Namun perlu diwaspadai juga berbagai efek politik dan ekonomi dari bergabungnya Indonesia ke dalam TPP, dimana pada momen yang sama harus fokus dengan implementasi perjalanan MEA berikutnya. Hal ini juga sama berlakunya dengan regionalisme ekonomi lain di luar MEA seperti ACFTA, RCEP dan IORA, yang melibatkan stabilitas hegemoni kepentingan AS dan Tiongkok dalam menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai *playing field* mereka. Sebagai *playing field* yang menempatkan ASEAN sebagai *buffer actor* AS dan Tiongkok dalam model equilibrium BoP di Asia Pasifik.

Ruang lingkup dan dan implikasi TPP sangat luas serta melampaui persoalan perluasan akses pasar. Selain berkaitan dengan perdagangan dan investasi, TPP juga mengatur persoalan lingkungan hidup, perburuhan dan persoalan lain yang selama ini sepenuhnya merupakan urusan domestik suatu negara. Selain itu, proses perundingan TPP juga sangat didominasi oleh kepentingan Amerika Serikat. Proses tersebut terpisah dan bukan merupakan bagian dari upaya penguatan masyarakat ekonomi ASEAN/MEA yang saat ini menjadi prioritas utama diplomasi Indonesia. Pembentukan TPP tak serta merta menjadikan perdagangan di kawasan Asia pasifik akan menjadi lebih “bebas”. Justru sebaliknya, TPP telah menerapkan aturan tentang

akses pasar yang lebih kompleks dan sulit untuk dipenuhi oleh produk dan jasa dari Indonesia. Akibatnya, berdasarkan pengalaman implementasi perjanjian perdagangan bebas sebelumnya, banyak pihak justru menghawatirkan keikutsertaan Indonesia pada TPP hanya akan menjadikan Indonesia "pasar" bagi produk dan jasa dari negara lain. Di samping itu, sebagian besar komitmen dalam TPP jauh lebih eksesif dibandingkan dengan komitmen dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) ataupun perjanjian perdagangan bebas lain. Hak negara untuk mengambil kebijakan dalam rangka melindungi kepentingan nasional yang strategis sebagaimana diberikan oleh WTO atau perjanjian perdagangan bebas lainnya (misalnya kebijakan mengenai kebijakan perpajakan dan pengaturan khusus tentang barang-barang yang sensitif) dihapuskan.[52] Hak negara dalam rangka melindungi kepentingan nasional merupakan faktor terpenting yang harus ditekankan di sini. Sebagai contoh yang paling sulit nanti adalah perubahan di dalam negeri karena ada sejumlah ketentuan TPP yang harus diterapkan. Ketentuan itu, misalnya pengurangan hak-hak eksklusif badan usaha milik negara (BUMN).[53]

Secara garis besar bagan alur pertimbangan dan kepentingan penggunaan PCDS sebagai strategi diplomasi ekonomi paralel Indonesia dapat dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini:

[52] Abdulkadir Jailani, *Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik*, (Kompas, 15 Oktober 2015).
[53] Kompas, 29 Oktober 2015.

Gambar 2:

Alur Pertimbangan dan Kepentingan

Penggunaan PCDS

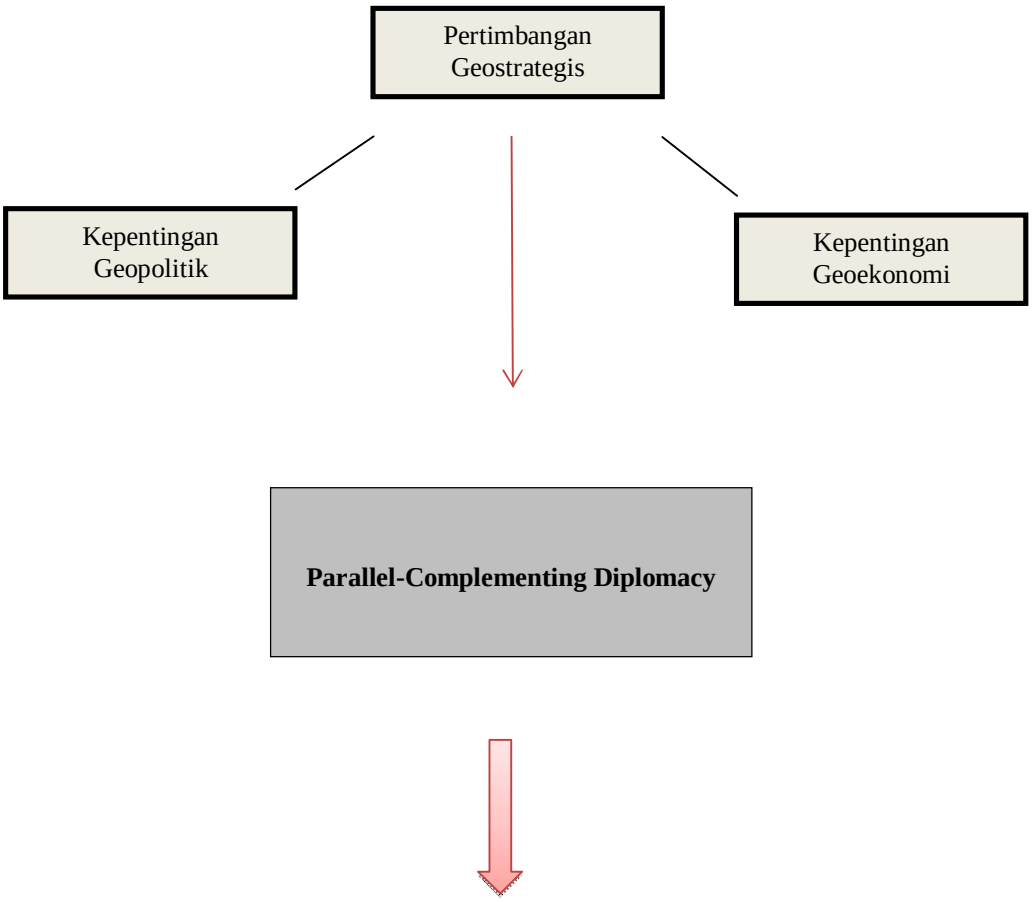

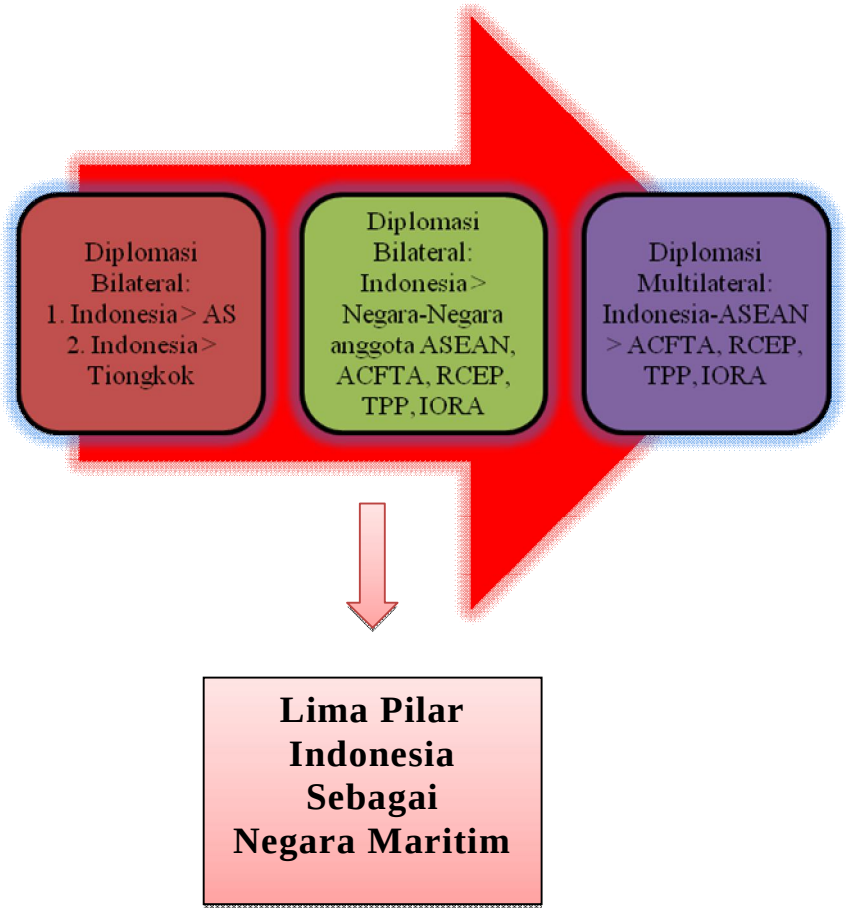

Kesimpulan

PCDS sejatinya merupakan strategi global diplomasi ekonomi Indonesia yang dilaksanakan melalui dua jalur diplomasi: diplomasi bilateral dan multilateral secara simultan. Dikatakan global karena lebih dari sekedar merepresentasikan kepentingan regional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. PCDS mencerminkan relevansi pemikiran OSRR akan berbagai tindakan Indonesia nantinya ke dalam konsep *regionalism, self-reliance dan openness* di kawasan Asia Pasifik.

Dengan demikian PCDS diperlukan Indonesia untuk memperkuat peran geostrategisnya yang melalui MEA, maka langkah berikutnya adalah mereposisi

peran geostrategis tersebut ke dalam arena pergumulan regionalisme lain di lingkup Asia Pasifik yang meliputi ACFTA, RCEP, TPP dan IORA. Dalam frame keempatnya tersebut, diplomasi bilateral terhadap negara-negara anggota keempat rezim ekonomi dan perdagangan bebas di atas perlu dimaksimalkan dalam rangka menyeimbangkan diplomasi multilateral Indonesia dalam konteks ASEAN. Hal inilah yang memungkinkan Indonesia dalam MEA, diharapkan nantinya selalu mereposisi peran strategisnya terhadap kepentingan geopolitik dan geoekonomi sebagai bagian dari pertimbagan geostrategis AS dan Tiongkok secara keseluruhan di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia dan Asia Tenggara secara implisit mengisyaratkan sebuah*buffer zone* yang berfungsi sebagai *playing field region*, yang mana menghubungkan kepentingan hegemoni politik keamanan AS dan Tiongkok melalui ekspansi global kepentingan ekonomi dan perdagangan bebas/terbuka mereka. Dalam model equilibrium BoP, dalam pandangan penulis negara-negara ASEAN khususnya Indonesia adalah kawasan *shatterbelt*, yang menjadisatelit *sphere of influence* bagi keberhasilan AS dan tiongkok. Keberhasilan yang dimaksud adalah dalam menanamkan stabilitas hegemoni politik keamanan mereka dengan memanfaatkan isu konflik LCS demi keuntungan ekonomi politik mereka dalam memberikan pengaruh hegemonis kawasan Asia Tenggara. Untuk itu PCDS berfungsi untuk memberikan payung keamanan diplomasi dalam memberikan manfaat Indonesia untuk meminimalisir kerugiannya dalam arena global ekonomi dan perdagangan bebas terkait *cost reduction operations* yang dilakukan oleh negara-negara kuat, dalam hal ini adalah AS dan Tiongkok.

PCDS juga menjustifikasikan nantinya mengenai visi lima pilar negara maritim Indonesia. Sebagai *starting point of departure*, PCDS sejatinya merupakan *grand strategy* diplomasi ekonomi Indonesia yang membangun keseimbangan sistemik kepentingan domestik, regional dan internasional Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsi aktor utama negara ASEAN. Terminal terakhir PCDS dalam memfungsikan keseimbangan sistemik ini adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik sebagai negara-bangsa maritim, bermandiri secara ekonomi sebagai negara-bangsa maritim, dan tentunya sebagai negara-bangsa yang berkebudayaan maritim. Ketiganya adalah realisasi dari lima pilar Indonesia sebagai negara maritim melalui karakter budaya maritim, membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

Dengandemikianpadaakhirnya Indonesia merupakan bagian penting dari regionalisme region Asia Tenggara yang merupakan aktor tunggal untuk memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri dengan meminimalisir ketergantungannya dengan dengan negara-negara/kawasan lain. Pada saat yang sama juga menjaga interkonektivitas keterbukaan akan berbagai kerjasama ekonomi dan perdagangan terhadap *region* manapun, baik secara bilateral maupun multilateral. Dan tentunya dalam rangka menjaga interkonektivitas keterbukaan inilah maka berbagai hasil riset, seminar kajian maupun *call for paper* terkait perkembangan MEA menjadi signifikan untuk *critical reviews* terhadap kemunculan beragam dinamika isu ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu penulis sekaligus menghaturkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M UAI dalam memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis, sehingga makalah ini bias diselesaikan sesuai dengan batas akhir waktu yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Harsawaskita, Adrianus. 2007. "Great Power Politics Di Asia Tengah : Sudut Pandang Geopolitik". Dalam Yulius P.Hermawan (ed.). *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*, hlm. 184-210. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Koentjoro-Jakti,Dorodjatun. 2012. *Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Li Choy, Chong. 1981. *Open Self-Reliant Regionalism: Power For ASEAN's Development*. Singapura: ISEAS.

Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional – Teori dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES.

Jurnal:

Hidayat, R.A. 2014. "Parallel-Complementing Diplomacy Sebagai Strategi Politik Keamanan ASEAN Dalam *ASEAN Political-Security* (APSC) 2015".*Mondial: Jurnal Hubungan Internasional Al Azhar*, Vol.V, No.1, Juni 2014: 19-36.

Sumber Elektronik:

Metrotvnews, "Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia". Melalui<www.ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/13/318161/jokowi-ada-5-pilar-wujudkan-poros-maritim-dunia,>[15 Oktober 2015].

Obama, Barrack. "Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense". Melalui <www.defense.gov>[09/03/13].

Sumber Berkala:

Jailani, Abulkadir. 2015. *Indonesia dan Traktat Kemitraan Trans-Pasifik*. Harian Kompas, 29 Oktober 2015.

Harian Kompas, 29 Oktober 2015.

Koran Tempo, 28 Oktober 2015.

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA PADA SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN: SRATEGI *ENMESHING* TERHADAP *EXTERNAL POWER* DI ASEAN

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, M.Si

Tulus Yuniasih, M.Soc.Sc

This study discusses the Indonesian defense diplomacy related to the territorial dispute over South China Sea. As a non-claimant country, Indonesia should still put the conflict as her consideration in formulating her defense diplomacy strategy in order to maintain the peace and stability in the region. The dynamic of the conflict brought in the existence of ASEAN external powers that should then also be managed well. Therefore, this research aims to analyse Indonesian defense diplomacy strategy towards those external powers. The analysis process in this qualitative research is conducted under the concept of defense diplomacy. The results show that Indonesia implements enmeshing strategy towards external powers especially towards US and China. This strategy allows Indonesia to promote the anti 'intramural hegemony' by institutionalizing the main powers through ASEAN. This strategy also allows ASEAN member countries which include the claimant states that have less power than China to perform central role in the issue.

Keywords*: Indonesia, defense diplomacy, South China Sea, territorial dispute, enmeshing strategy*

Pendahuluan

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, yang secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer, sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Hal ini menyangkut kepada fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan dan lebih dari 150 negara yang ada di dunia merupakan negara pantai dan atau negara kepulauan. Sedangkan fenomena kemaritiman dunia itu sendiri selalu berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini

berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritim.[54]

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power Upon History* yang menegaskan bahwa untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut. Mahan mencatat, bahwa kejadian-kejadian di laut sangat mempengaruhi keadaan di darat. Namun umumnya keputusan-keputusan politik yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian di darat, jarang mempertimbangkan aspek kemaritiman.[55] Doktrin Mahan ini kemudian menjadi tolak ukur pengembangan kekuatan maritim negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Dalam perkembangannya, Presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan mengenai visi maritimnya yaitu upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada lembar Nawa Cita yang berisi program aksi dan pidato perdananya sesaat setelah ia disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.[56] Dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali akan terwujud. Namun, jika merujuk pada doktrin kekuatan maritim Mahan, masih terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi *maritime power*, dan kemudian Poros Maritim Dunia. Singkatnya, Indonesia harus mampu

[54] Chandra Motik Yusuf (ed.), (2008), *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO. Hal, 95.
[55] Alfred T, Mahan, (2014), *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*, New York: Cambridge. Hal, 25.
[56] Manurung, H, (2014), *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership*, Available at SSRN 2510986.

menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia.[57]

Salah satu permasalahan paling besar yang terkait dengan keamanan maritim di kawasan adalah konflik Laut Tiongkok Selatan. Dalam kurun waktu yang cukup lama negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat sengketa yang rumit atas kepemilikan wilayah teritorial Laut Tiongkok Selatan. RRT, Vietnam, Brunei, Filipina dan Malaysia merupakan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan. Wilayah Laut Tiongkok Selatan sendiri merupakan wilayah strategis baik dari sisi sumber daya alam, ekosistem maritim, maupun sebagai salah satu jalur transportasi utama minyak dunia. Konflik persengketaan wilayah ini telah berhasil menarik perhatian sebagai obyek perdebatan regional karena sampai saat ini belum juga tercapai kesepakatan diantara pihak-pihak terkait terhadap penyelesaian konflik. Permasalahan ini merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan nasional Indonesia maupun keamanan kawasan yang selama ini sudah terjalin dengan baik diantara negara-negara dalam kawasan melalui kerjasama regional ASEAN.[58]

Indonesia pada awalnya tidak terlibat, namun Indonesia mulai terusik oleh konflik kawasan karena pada tahun 1990-an Tiongkok menerbitkan peta unilateral, yang dikenal sebagai peta *U-Shaped* atau *nine dashed line*, dan memasukkan wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna kedalam wilayah kedaulatan Tiongkok

[57] Willy F Sumakul, (2014), Poros Maritim dan ISPS Code Di Indonesia, *QUARTERDECK*, Vol. 8(2): 9.
[58] C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 345.

yang dengan ditandai sembilan garis putus-putus.[59] Hal ini tentu saja membangkitkan Indonesia untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya dan mulai terlibat dalam pengelolaan sengketa Laut Tiongkok Selatan agar tidak bertambah buruk. Indonesia cepat merespon terhadap dinamika dan potensi konflik yang diwarnai dengan aksi militer dan melibatkan berbagai pihak di kawasan Asia Timur.[60] Karena perbedaan kepentingan dari berbagai pihak yang tidak dapat disinergikan dan dilanjutkan dengan aksi militer, maka akan membuat pertikaian berkelanjutan yang semakin rumit untuk diselesaikan secara damai.

Diplomasi Pertahanan Indonesia: *Planning Framework*

Diplomasi pertahanan adalah konsep yang dinyatakan Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.[61] Terdapat beberapa definisi mengenai diplomasi pertahanan. Rajeswari Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul "*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*" mendefinisikan diplomasi pertahanan "*categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of*

[59]Gao, Z., & Jia, B. B, (2013), "The nine-dash line in the South China Sea: history, status, and implications", *American Journal of International Law*, 107(1), 98-124.
[60] Ristian Atriandi Supriyanto, (2012), *Indonesia's South China Sea Dilemma: Between Neutrality and Self Interest*, hal 10.
[61] Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), "AFRI 2002, Volume III – The "Defence Diplomacy", Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence,"
http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr diakses 5 September 2014.

foreign countries."[62] Sedangkan Matsuda Yasuhiro[63] dalam "*An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*" menyatakan diplomasi pertahanan sebagai, "*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*" Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah kegiatan diplomatik berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer yang meliputi pertukaran personil militer dan latihan bersama dalam rangka CBM dan memperkuat stabilitas kawasan.

Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidaklah berjalan sendirian, tetapi sinergi dengan kegiatan lainnya. Dengan 'meminjam' diagram Liotta-Lloyd posisi instrumen diplomasi berada dalam peta besar sebagai berikut:

Gambar 1

Strategy and Force Planning Framework

[62] Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), "*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*", hal. 1.
[63] Matsuda Yasuhiro, (2006), "*An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*", hal. 3.

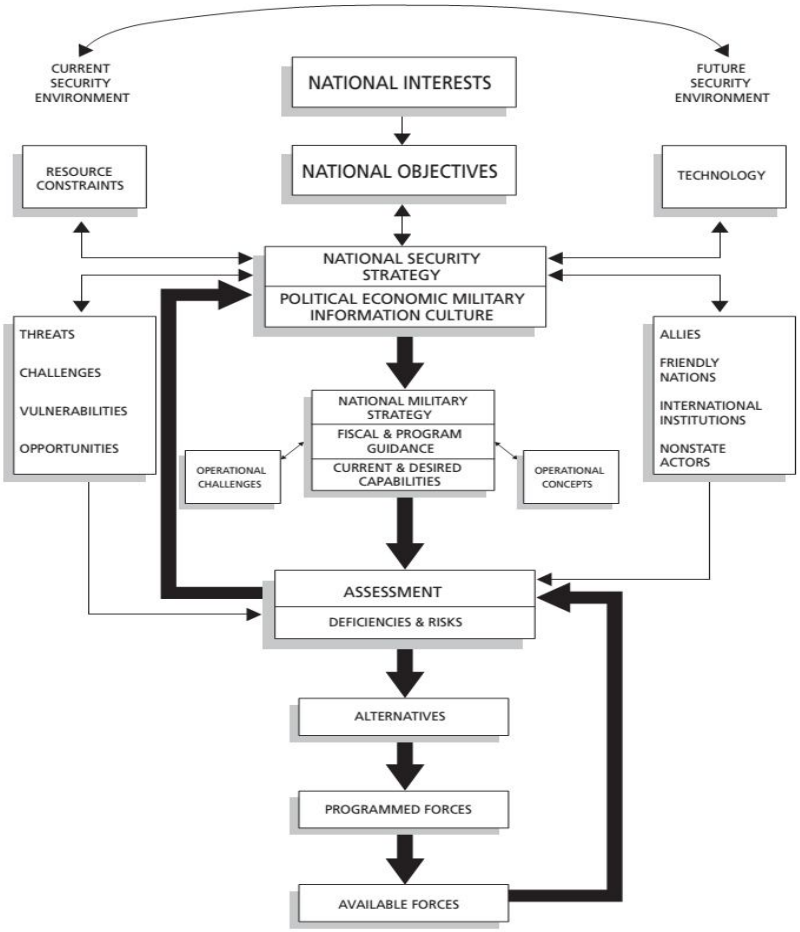

Sumber: P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd, (2005), "From Here To There:The Strategy and Force Planning Framework",*Naval War College Review, Vol. 58(2).*

Diplomasi sebagai instrumen strategi keamanan keamanan nasional, harus bersinergi dengan instrumen lainnya membentuk satu kekuatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peta tersebut mengisyaratkan bahwa instrumen operasionalnya tidak boleh bekerja sendirian, hindari tumpang tindih dan cegah tidak terjadi wilayah abu-abu.

Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi. Namun, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia terutama pada kondisi politik internasional kontemporer, dimana diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar. Dalam konteks konflik Laut Tiongkok Selatan, Indonesia perlu terlibat dalam pengelolaan potensi konflik Selatan agar tidak ada dampak yang lebih buruk bagi kedaulatan maritim Indonesia maupun stabilitas kawasan.

Penguatan diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim diharapkan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dengan mengambil peluang-peluang yang ada dari tiap ancaman yang mengemuka.Arsitektur keamanan regional yang sudah ada juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam penanganan konflik Laut Tiongkok Selatan. Dalam lingkup ASEAN dan mitra dialognya, terdapat ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Defense Minister Meeting* (ADMM), *East Asia Summit* (EAS), maupun ASEAN *Maritime Forum* yang dapat diperkuat dan dioptimalkan untuk mendorong penanganan konflik dan stabilitas kawasan. Konflik Laut Tiongkok Selatan telah mendapat perhatian khusus dari kekuatan besar di luar kawasan, seperti Amerika Serikat. Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dan peran aktif negara-negara di Asia Tenggara terhadap stabilitas kawasan agar tidak terjadi eskalasi konflik yang dapat melibatkan kekuatan militer dari luar kawasan.

Aktor Primer dan Keterlibatan *Eksternal Power* Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

Aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa ini antara lain negara-negara pengklim dan negara non pengklaim yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut. Dalam perkembangan dinamika lingkungan strategis di Asia Pasifik, pihak-pihak yang terlibat sengketa di Laut Tiongkok Selatan kembali memanas seiring imbauan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dalam ASEAN Post Ministerial Meeting di Hanoi pada Juli 2009 agar Tiongkok menyelesaikan sengketa di perairan itu secara damai dan tidak menggunakan cara-cara koersif dan ancaman.

Sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang melibatkan enam negara secara langsung, yaitu Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam terkait dengan klaim masing-masing pihak terhadap Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Secara tidak langsung, sengketa di perairan tersebut akan melibatkan pula pihak-pihak lain yang terkena *spill over*, seperti Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan bernavigasi. Dalam konteks itulah salah satu latar belakang keluarnya imbauan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton di Hanoi. Sehingga secara tidak langsung Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan polaritas utama atau aktor utama pada konflik tersebut.

Konflik ini kemudian menjadi titik tumpu geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi suatu permasalahan internasional karena menyebabkan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Hingga akhir tahun lalu, sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan

negara-negara yang bertikait. Polarisasi ini terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kedua negara tersebut sama-sama memiliki kepentingan terhadap Laut Tiongkok Selatan, keduanya saling berinteraksi dengan sekaligus membuat polarisasi di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai *regional power* harus dapat menentukan strategi bahkan sikap untuk memanfaatkan keadaan ini. Hal ini diperlukan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat tetap menjalin kerjasama diantara keduanya tanpa terpengaruh oleh polarisasi yang diciptakan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan tersebut.

Konflik di Laut Tiongkok Selatan dipastikan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik, karena pihak-pihak yang berhadapan merupakan kekuatan besar di kawasan. Dinamika di Laut Tiongkok Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan sulitnya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan di perairan tersebut, baik negara-negara pengklaim maupun negara pengguna perairan itu. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan sejak dini harus mempunyai strategi nasional untuk mengantisipasi eskalasi konflik. Indonesia meskipun bukan merupakan negara yang turut mengklaim di Laut Tiongkok Selatan, tetap mempunyai kepentingan di perairan itu. Kepentingan tersebut setidaknya ada dua, yaitu mencegah spill over ke wilayah kedaulatannya dan memperkuat klaim wilayah ZEE Indonesia di Laut Tiongkok Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna. Seperti diketahui, dalam peta yang diterbitkan oleh Tiongkok pada 1992 klaim Tiongkok sampai merambah ke wilayah ZEE Indonesia yang ditandai dengan adanya sembilan garis putus-putus.

Dinamika Pola Hubungan Amerika Serikat – Tiongkok dalam Konflik LTS

Isu politik dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dilepaskan dari bingkai persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, meskipun Amerika Serikat bukan negara yang mengklaim wilayah di perairan tersebut. Tentu menjadi pertanyaan mengapa Amerika Serikat berkepentingan dengan Laut Tiongkok Selatan? Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama dan diterbitkan pada Februari 2010 menyatakan bahwa "*Our national security strategy is, therefore, focused on renewing American leadership so that we can more effectively advance our interests in the 21st century*". Himbauan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton dalam pertemuan ASEAN di Hanoi berada dalam bingkai tersebut, yang apabila diturunkan pada tingkat mikro akan terkait dengan kebebasan bernavigasi bagi kapal perang Amerika Serikat.

Amerika memiliki kebijakan Luar Negeri tersendiri dalam keterlibatannya di konflik Laut Tiongkok Selatan, dimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ini disampaikan oleh US State Departement Spokesperson yang mencakup 5 elemen yakni :

1. *Peaceful Resolution of the Disputes : "The United States strongly opposes the use or threat of force to resolve competing claims and urges all claimants to exercise restraint and avoid destabilizing actions"*
2. *Peace and Stability : "The United States has abiding interest in maintenance of peace and stability in the South China Sea"*

3. *Freedom of Navigation : "Maintaining freedom of navigation is a fundamental interest of US. Unhindered navigation by all ships and aircraft in the South China Sea is essential for the peace and prosperity of the entire Asia- Pacific region, including the US.*
4. *Neutrality in disputes : "The United States takes no position on the legal merits of the competing claims to sovereignty over the various island, reefs, atolls, and cays in the South China Sea"*
5. *Respect of International principles : "The US would, however, view with serious concern any maritime claim or restriction on maritime activity in the South China Sea that was not consistent with international law including the 1982 UNCLOS.*[64]

Sebagai pihak yang diminta untuk turut aktif dalam penyelesaian konflik ini, Amerika Serikat yang telah memulai strategi militer "poros" menuju Asia, Amerika Serikat telah menyatakan niatnya untuk membuat "poros" gerakan - pergeseran kekuatan dan strategi mereka ke Asia, dan konflik ini menempatkan banyak tekanan pada kekuatan ekonomi yang muncul. Vietnam dan Filipina telah meminta Amerika Serikat untuk meningkatkan kehadirannya dalam rangka untuk mengimbangi naiknya kekuatan Tiongkok. Vietnam dan Filipina bahkan meningkatkan dua kali lipat anggaran pertahanan pada tahun 2014 dan dianggap sebagai rencana latihan militer gabungan lima tahun dengan Amerika Serikat Meskipun ada tekanan dari beberapa

[64] Fravel, T, (2012), *South China Sea : What Issue and Whose Core Interest* , 6th Berlin Conference on Asia Security, Berlin: Konrad Adenaurer Siftung.

negara Asia untuk kehadiran lebih Amerika Serikat. Negara-negara lain percaya bahwa Amerika Serikat harus mengurangi pengaruh mereka di wilayah tersebut.

Persaingan kedua negara ini juga tampak dalam usahanya menyebarkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Tiongkok telah memiliki peluang untuk menyebarkan pengaruhnya dikawasan Asia Tenggara dikarenakan kedekatannya baik secara geografi maupun dengan berbagai kerjasama yang dilakukan dengan kawasan ini. Untuk itu, konflik Laut Tiongkok Selatan ini dipandang Amerika serikat sebagai pintu masuk untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara, peluang Amerika Serikat ini pertama muncul karena sengketa ini kemudian menimbulkan hubungan yang kurang baik antara Tiongkok dan negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Selain itu dengan diundang turut campur dalam konflik ini, Amerika Serikat dapat memanfaatkannya. Dalam rangka memperkuat relasi keamanan, ikatan pertahanan dan membentuk aliansi serta memperoleh dukungan dari kawasan Asia Tenggara.

Amerika Serikat bahkan mendapat dukungan dari negara ASEAN lainnya yang tidak berkonflik untuk turut serta dalam penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan, dukungan ini didapat dari beberapa negara seperti Indonesia. Sayangnya keberadaan Amerika dalam konflik laut Tiongkok Selatan ini belum juga dapat membantu menyelesaikan konflik.

Adanya aktor eksternal dalam hal ini Amerika menyebabkan kepentingan yang ada didalam konflik ini semakin meluas. Amerika Serikat dengan strategi militer porosnya memiliki kepentingan tersendiri untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Hal ini juga menghambat proses mediasi yang terjadi dalam

konflik Laut Tiongkok Selatan. Karena kepentingan Amerika Serikat yang utama bukan hanya penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Selain itu sikap Tiongkok yang berubah semakin agresif dalam menghadapi konflik ini dengan meningkatkan kapabilitas militernya khususnya sejak masuknya Amerika Serikat dalam konflik ini. Bahkan kerjasama dan pelatihan militer yang dilakukan Amerika Serikat dengan Filipina dapat meningkatkan tingkat eskalasi konflik karena dapat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan negara lain yang terlibat konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Secara tidak langsung Amerika Serikat dan Tiongkok telah berupaya untuk saling menyebarkan pengaruh di kawasan (*Balance of Influence*). Oleh karena itu, sikap terbaik yang seharusnya dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara adalah dengan melakukan *hedging*. Hal ini seperti ditegaskan Goh dalam tulisannya yang berjudul *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*, menjelaskan strategi *hedging* sebagai:

"a set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivates a middle position that forestalls or avoids having to choose one side [or one straightforward policy stance] at the obvious expense of another"[65]

[65] Evelyn Goh, (2006) *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*, Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS, Honolulu, Hawai pada tanggal 31 Agustus. Hal 1.

Sebuah negara yang dapat melakukan hedging (*hedger*) secara kuat adalah negara yang mampu membangun dan mempertahankan hubungan strategis secara dekat dengan dua kekuatan besar pada saat yang bersamaan.[66] Dalam hal ini, selanjutnya perilaku *hedging* meliputi '*omni-enmeshment*' dari sejumlah kekuatan utama di kawasan yang bertujuan untuk mendorong sebuah struktur hierarkis keamanan yang dapat meningkatkan stabilitas regional.[67] Terdapat dua level dalam kebijakan *Omni-Enmeshment*. Pertama adalah Omni-Enmeshment skala kecil, dalam level ini fokus kerjasama lebih diarahkan pada segi "*security intraregional*" di mana satu negara melakukan kerjasama strategis dengan beberapa "*major power*". Kedua adalah *Omni-Enmeshment* skala berkembang, dalam skala ini ,pengambil kebijakan mencoba untuk merubah realitas geopolitik yang dimiliki oleh kekuatan besar untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara tersebut memperluas relasi hubungan bilateral untuk mengatur stabilitas regional. Tujuan dan objek enmeshment berbeda-beda di tiap negara, salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan regional leadership, dan ambisi untuk mengubah great power behavior. Omni-enmeshment berfungsi dalam 3 cara, melalui pencantuman legitimasi, yang kedua adalah hubungan institusionalisasi, yang ketiga adalah kerjasama keamanaan.[68]

Tujuan dari strategi *hedging* yang berupa *great power enmeshment* ini tidak untuk menghasilkan *a multipolar balance of power* dalam pengertian yang konvensional, karena negara-negara besar yang terlibat disini tidak berada di

---

[66] *Ibid*, hal 5.

[67] Evelyn Goh, (2005), *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, Washington: East West Center. Hal 7.

[68] Evelyn Goh, (2008), "Hierarchy and the role of the United States in the East Asian Security Order". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 8(3): 99.

perserikatan yang sama. Strategi hedging bertujuan untuk memfasilitasi sebuah transisi yang pada dasarnya tidak mengganggu distribusi kekuatan di kawasan. [69] Tujuan ini berbeda dengan strategi *balancing* atau *bandwagoning* yang bertujuan untuk mencegah transisi kekuasaan atau untuk mencapai hasil revisionis dalam distribusi kekuasaan. Idealnya diharapkan bahwa akan tercipta stabilitas yang lebih baik pada tatanan global. Tentu saja, negara-negara besar akan saling mengawasi satu sama lain dan bertindak sebagai deterrent dengan berani. Dalam pengertian ini, *enmeshment* merupakan *hedging* terhadap kemungkinan persaingan kekerasan antara kekuasan besar di kawasan dan agresi kekuatan besar terhadap negara-negara yang lebih kecil.[70]

Terdapat kekhawatiran akan terjadinya ketidakstabilan sistem multipolar di kawasan tersebut oleh negara-negara kecil dan menengah dikarenakan adanya persaingan kepentingan antara negara hegemon (Tiogkok) dan *balancer* (Amerika Serikat) di dalam kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara seharusnya menggunakan strategi *hedging* sebab tidak memungkinkan untuk menggunakan strategi *balancing* dan *bandwagoning* secara murni dengan negara-negara kuat. Namun, yang terjadi saat ini adalah negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia belum secara tegas menentukan strateginya. Hal ini kan menimbulkan kesan bandwagon ke segala pihak, baik ke negara hegemon

[69] Capie, D. (2005) 'Southeast Asia and the United States', dalam Evelyn Goh (ed), *Betwixt and Between: Southeast Asian Strategic Relations with the U.S. and China*, Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, hal. 29.

[70] Evan S. Medeiros, (2006), "Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability," *Washington Quarterly*, Vol 29(1): 8.

maupun *balancer*.[71] Hal ini tetunya akan menyulitkan negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia karena harus mengakomodir semua kepentingan Tiongkok dan Amerika Serikat yang bertentangan.

Diplomasi Pertahanan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan

Sebagai penguatan dalam diplomasi pertahanan untuk mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan, modalitas yang harus dimiliki Indonesia harus meliputi dua lingkup. *Pertama*, kualitas diplomasi. Kualitas diplomasi merupakan salah satu faktor penting dari *national power* yang dimiliki negara. Kualitas diplomasi dilihat melalui bagaimana negara dapat menggabungkan faktor-faktor yang berlainan menjadi suatu keseluruhan terpadu, memberikan arah dan bobot serta dapat memaksimalkan dari kapabilitas yang dimiliki.[72] Selain itu, diplomasi dapat dikatakan berkualitas apabila suatu negara dapat berperan dan memiliki inisiatif di dalam forum internasional terkait penyelesaian masalah. Asumsinya, semakin berkualitas diplomasi yang dimiliki, semakin besar pula kesempatan yang dimiliki negara untuk mencapai tujuannya. *Kedua*, kapabilitas militer. Kapabilitas militer merupakan instrumen penting untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu negara.[73] Adapun penilaian dari kapabilitas militer dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu teknologi militer, kepemimpinan militer, dan kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata.

---

[71] Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM), 6 Agustus 2015.
[72] Hans J. Morgenthau, (2010), *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hal. 169.
[73] Juanita elias & Peter Sutch, (2007), *The Basics International Relations*, New York: Routledge: p. 109.

Disamping itu, faktor penting terkait dengan diplomasi adalah dukungan. Adapun dukungan tidak hanya dari domestik (legislatif dan publik), melainkan juga dukungan dari negara lain. Idealnya kebijakan luar negeri tidak hanya ditempuh melalui "senjata tradisional" yaitu diplomasi dan militer, tetapi juga menggunakan "senjata lain" yaitu propaganda.[74] Karena, perebutan *power* di lingkungan internasional tidak hanya perebutan keunggulan militer dan dominasi politik, melainkan juga perebutan pemikiran manusia. Jadi, *power* negara tidak hanya tergantung pada keterampilan diplomasi dan kekuatan angkatan bersenjata, tetapi juga bagaimana suatu negara bisa mendapatkan dukungan dari negara lain terhadap kebijakan yang dibuat.

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN terkait LTS: Stretegi Enmeshing terhadap Eksternal dan Regional Power

Modalitas yang dimiliki Indonesia dalam penguatan diplomasi pertahanan dalam rangka mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan terlihat dari kualitas diplomasi yang dimilikinya. Kualitas diplomasi yang dimiliki Indonesia terlihat dari peran aktif dan inisiatif yang diberikan Indonesia dalam forum multilateral, bilateral, dan *second track*. Adapun forum tersebut meliputi ASEAN: ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Miniterial Meeting (ADMM), East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Maritime Forum. Selain itu, peran aktif Indonesia juga terlihat dari inisiatifnya dalam mendorong terbentuknya mekanisme dalam mengelola konflik di Laut Tiongkok Selatan melalui implementasi DOC dan proses pembentukan COC.

[74] *Ibid.*, hal. 180.

Perkembangan dari draft COC berlanjut melalui pertemuan *intra-ASEAN* dalam *Working Group* tahun 2012 dimana menghasilkan draft dari prinsip COC. Namun isu ini ditolak untuk dibahas oleh Kamboja. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, "*I think it is utterly irresponsible if we cannot come up with a common statement on the South China Sea*."[75] Marty kemudian menyelesaikan permasalahan *disunity* dengan melakukan kunjungan bilateral (dikenal dengan istilah *shuttle diplomacy*) ke Kamboja, Vietnam, dan Filipina untuk menyatukan posisi negara anggota ASEAN terkait Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya Indonesia membuat '*six-point plan*' yang dipublikasikan pada Juli 2012.

Indonesia dan Filipina bertemu dan sepakat pada proposal *six-point* lalu mengajukannya ke anggota negara ASEAN. Setelah itu, Indonesia menginformasikan proposal tersebut kepada Kamboja yang ketika itu menjabat sebagai Ketua ASEAN. selanjutnya, Kamboja menerbitkan *ASEAN's Six-Point Principles on the South China Sea*. Adapun isi dari poin tersebut meliputi: 1) implementasi DOC, 2) pedoman implementasi DOC, 3) konklusi COC di Laut Tiongkok Selatan, 4) penghormatan terhadap prinsip UNCLOS 1982, 5) *self-restraint* dan *non-use of force*, dan 6) resolusi damai terhadap sengketa berdasarkan prinsip UNCLOS. Terdapat dua *output* dari hasil pertemuan tersebut, yaitu 1) Semua negara anggota ASEAN menyetujui prinsip *ASEAN Common Position* dalam Laut Tiongkok Selatan, terkait komitmen terhadap DOC dan 2) Tiongkok bersedia untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk

[75] *Agence France Presse*, (12 Juli 2012), "ASEAN Struggles for Unity over South China Sea," dalam Gary Collinson & Christopher B. Roberts, (2013), *The Role of ASEAN*, Acton: Australian National University, hal. 38

mengimplementasikan DOC dan "atas dasar konsensus" mewujudkan COC. Dapat dikatakan bahwa diplomasi Indonesia berperan dalam menyatukan anggota ASEAN.

Kualitas dari diplomasi yang dimiliki Indonesia juga terlihat dalam inisiatifnya pada pertemuan AMM ke-45. Indonesia yang diwakili Menlu Marty menyatakan, "*Indonesia will circulate a non paper [on] possible and additional elements of [the] COC. It is meant to be more prescriptive and operational*."[76] Indonesia juga menerbitkan "*non-paper*" kepada menteri luar negeri negara anggota ASEAN dalam pertemuan di New York. Proposal yang dikeluarkan Indonesia berjudul, "*Zero Draft A Regional Code of Conduct in the South China Sea*."[77] Dokumen ini berdasarkan dari 3 sumber: DOC tahun 2002, Proposal ASEAN dalam *Code of Conduct*, dan Prinsip Enam-Poin ASEAN dalam Laut Tiongkok Selatan. Kontribusi Indonesia yang paling signifikan dalam dokumen ini ada pada Pasal 6 terkait implementasi COC. [78]

Pasal 6 menjelaskan tentang aturan, norma, dan prosedur terkait CBM. Selain itu, terdapat juga isi mengenai pencegahan kecelakaan dan tabrakan di laut yang diambil dari *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea* (COLREGS) tahun 1972. Di Pasal 8, Indonesia memasukkan mekanisme sengketa yang terdapat dalam *ASEAN Proposed Elements of a Regional Code of Conduct* dan *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (yang mana

[76] Carlyle A. Thayer, (2010), *The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea*, Vol. 6. hal. 7-8.
[77] *Ibid.*,
[78] *Ibid.*,

Tiongkok juga turut menandatangani).[79] Sementara itu, sebagai negara diluar kawasan yang memiliki kepentingan di Laut Tiongkok Selatan, Amerika Serikat mengharapkan COC dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa. Namun, Amerika Serikat tidak dapat banyak berperan karena Tiongkok mempersepsikan AS sebagai kompetitor, sehingga Indonesia dapat berperan lebih besar dalam mempromosikan dan mendorong terbentuknya COC. Dapat dikatakan bahwa peran dan inisiatif diplomasi Indonesia membuat Tiongkok kini menghadapi ASEAN yang lebih bersatu.

Tahun 2013 dan 2014 menjadi tahun penting dalam perkembangan kerjasama maritim antara ASEAN dan Tiongkok. Hal ini terlihat dari hasil dan potensi yang telah didiskusikan oleh kedua pihak dalam beberapa kesempatan. Pada tahun 2013 Tiongkok sepakat untuk mendiskusikan CoC. Selain itu, dalam ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the Declaration of Conduct in the South China Sea (SOM on DoC) ke-7 dan ASEAN-China Senior Officials' Consultation (ACSOC) ke-20 di Thailand pada April 2014, kedua pihak menekankan pentingnya mengimplementasikan DoC secara menyeluruh dan efektif.[80] Implementasi bukan hanya mencakup aktivitas pembangunan kepercayaan berbasis proyek, namun juga termasuk pengamalan prinsip dan norma dalam DoC. Disamping itu, kedua pihak juga mendiskusikan potensi penandatanganan *ASEAN-China treaty on good neighbourliness and friendly cooperation*, yang sebagian besarnya menekankan pembangunan pada dimensi ekonomi, meskipun juga termasuk kerjasama maritim.

---

[79] *Ibid.,*
[80] *Ibid.*

Disamping diplomasi multilateral dan bilateral, Indonesia juga menginisiasi pada *second track*. *Workshop* yang diberi nama *Managing Potential Conflicts in the South China Sea* pada tahun 1990.[81] Tawaran yang diberikan oleh *workshop* ini adalah bukan membahas tentang penyelesaian sengketa, tetapi merencanakan program kerjasama, mempromosikan dialog dan mengembangkan CBMs.[82] Intinya adalah 'mengelola' dibandingkan 'menyelesaikan' konflik. Pencapaian dari *workshop* yang diinisiasi Indonesia adalah ini adalah negara-negara pengklaim maupun bukan pengklaim memahami posisi dari masing-masing negara.

Pada sisi lain, salah satu faktor keberhasilan diplomasi adalah dukungan dari entitas domestik. Permasalahannya adalah diplomasi Indonesia di dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan tidak populer di kalangan publik domestik. Bahkan, dari hasil survei yang dilakukan oleh *Centre for Chinese Studies-Indonesia* tahun 2014 dengan 1,096 responden di 15 kota besar di Indonesia, ketika ditanya tentang isu sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Hanya 12 persen yang mengetahui isunya.[83] Mayoritas dari populasi di Indonesia (khsususnya di kota besar) tidak mengerti permasalahan di Laut Tiongkok Selatan apalagi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengurangi tensi konflik yang ada.

Namun, terlepas dari semua kendala yang dihadapi, Indonesia telah mampu melaksanakan Diplomasi pertahanan di ASEAN dengan menggunakan strategi *hedging* dalam bentuk *enmeshing* negara-negara besar yaitu Tiongkok dan Amerika

[81] (David Scott, 1023-4).
[82] Gary Collinson & Christopher B. Roberts, *Op. Cit.* hal. 52.
[83] Rene L. Pattiradjawane, (2015), *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*, Singapore: RSIS.

Serikat. Pemerintah Indonesia telah menggunakan lembaga-lembaga seperti ASEAN dan ARF untuk menjaga Amerika Serikat dan Tiongkok agar secara konstruktif terlibat di wilayah ini demi mempromosikan prinsip-prinsip anti "hegemoni intramural" yang mengancam negara-negara regional.[84] Dalam hal ini, Indonesia berusaha untuk 'melembagakan kekuatan-kekuatan utama'. Pelembagaan melalui ASEAN dapat membantu negara-negara Asia Tenggara khususnya Indonesia dalam menyeimbangkan pengaruh kekuatan-kekuatan utama tersebut.[85] Pelembagaan ini juga membantu negara-negara anggota ASEAN mendapatkan peran-peran sentral dalam lingkungan strategis dikawasan Asia Tenggara. Peran sentral tersebut digunakan demi menjalin hubungan asosiatif dengan para *external power* yang terlibat dalam konflik laut tiongkok selatan yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kesimpulan

Sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan wujud sebagai salah satu potensi ancaman bagi Indonesia dalam mencapai visi yang melibatkan unsur kemaritiman ini. Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam konflik yang melibatkan lima negara tetangga yang bersama-sama Indonesia berada di kawasan Asia Timur (Asia Timur Jauh dan Asia Tenggara). Namun, lokasi geografis yang sangat dekat dengan teritori kedaulatan Indonesia perlu mendapat perhatian besar. Dalam tumpang tindih kepentingan kekuatan besar kawasan, Indonesia nampaknya harus dapat

[84] John David Ciorciari, (2009), "The Balance of Great-Power Influence in Contemporary Southeast Asia", *International Relations of the Asia-Pacific*, 9(1): 177.
[85] Evelyn Goh, (2008), "Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies", International Security, 32(3):144.

memanfaatkan ASEAN dan ARF untuk bertahan pada sisi stabilitas kawasan. selain itu Indonesia harus bersikap *hedging* dalam bentuk strategi *enmeshing* agar tidak terpengaruh kedalam polarisasi kedua negara besar yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun hendaknya kembali dipahami bahwa upaya ASEAN selama ini untuk mencari solusi damai atas sengketa di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merupakan pendekatan informal, sebab Tiongkok menolak penggunaan pendekatan formal berlatar multilateral. Oleh karena itu, sifat-sifat pendekatan yang kooperatif melalui jalur diplomasi harus tetap digunakan. Sifat ASEAN yang *loose* dapat membuat Tiongkok dan Amerika Serikat merasa nyaman dan pada akhirnya akan membuka diri terhadap penyelesaian yag kooperatif.

Referensi

Agence France Presse. (12 Juli 2012). "ASEAN Struggles for Unity over South China Sea." dalam Gary Collinson & Christopher B. Roberts. (2013). *The Role of ASEAN*. Acton: Australian National University.

Capie. D. (2005) 'Southeast Asia and the United States'. dalam Evelyn Goh (ed). *Betwixt and Between: Southeast Asian Strategic Relations with the U.S. and China*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.

Ciorciari, John David. (2009). "The Balance of Great-Power Influence in Contemporary Southeast Asia". *International Relations of the Asia-Pacific*. 9(1): 177.

Elias, Juanita & Peter Sutch. (2007). *The Basics International Relations*. New York: Routledge: p. 109.

Fravel. T. (2012). *South China Sea : What Issue and Whose Core Interest* . 6th Berlin Conference on Asia Security. Berlin: Konrad Adenaurer Siftung.

Gao. Z.. & Jia. B. B. (2013). "The nine-dash line in the South China Sea: history. status. and implications". *American Journal of International Law*. 107(1). 98-124.

Goh, Evelyn. (2005). *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center.

Goh, Evelyn. (2006) *Understanding "hedging" in Asia-Pacific Security*. Working paper yang diajukan pada Pacific Forum CSIS. Honolulu. Hawai pada tanggal 31 Agustus.

Goh, Evelyn. (2008). "Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies". International Security. 32(3):144.

Goh, Evelyn. (2008). “Hierarchy and the role of the United States in the East Asian Security Order”. *International Relations of the Asia-Pacific.* Vol. 8(3): 99.

http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr diakses 5 September 2014.

Luhulima, C.P.F. (2011). *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Manurung. H. (2014). *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership.* Available at SSRN 2510986.

Medeiros, Evan S.. (2006). "Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacific Stability." *Washington Quarterly*. Vol 29(1): 8.

Motik Yusuf, Chandra (ed.). (2008). *Maritime Dimensions Of A New World Order*. dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim. Jakarta: IND HILL CO.

Pattiradjawane, Rene L.. (2015). *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*. Singapore: RSIS.

Rajagopalan, Rajeswari Pillai. (2008). “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*”.

Sumakul, Willy F. (2014). Poros Maritim dan ISPS Code Di Indonesia. *QUARTERDECK*. Vol. 8(2): 9.

Supriyanto, Ristian Atriandi. (2012). *Indonesia’s South China Sea Dilemma: Between Neutrality and Self Interest*.

T. Mahan, Alfred. (2014). *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*. New York: Cambridge.

Thayer, Carlyle A.. (2010). *The United States and Chinese Assertiveness in the South China Sea*.

Thucydide, Centre. (2003. 1 Januari). "AFRI 2002. Volume III – The "Defence Diplomacy". Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence."

Wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan. Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM). 6 Agustus 2015.

Yasuhiro, Matsuda. (2006). "*An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*".

Diplomasi Total dan Masyarakat ASEAN 2015

Sukawarsini Djelantik

Abstrak

Masyarakat ASEAN 2015 (MA-2015) menyisakan banyak masalah dan tantangan.Kendala utama adalah belum tersosialisasikan dan terkomunikasikannya keberadaan MA 2015.Mayoritas masyarakat belum sepenuhnya mengetahui dan menyadari implikasi MA-2015 terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional, khususnya di kawasan ASEAN.Penstudi hubungan internasional dapat memainkan peran penting melalui program diplomasi total. Diplomasi total mengajak peran serta masyarakat luas mensukseskan MA 2015. Aktor-aktor pemerintah bekerjasama dengan aktor-aktor non-pemerintah (NGO, akademisi, lembaga-lembaga penelitian, kelompok bisnis, kelompok kepentingan, individual, dan media massa. Penelitian akan membahas peran-peran yang dijalankan masing-masing aktor dalam sosialisasi dan komunikasi MA-2015. Pertanyaan penelitian adalah: “bagaimana diplomasi total diterapkan di Indonesia untuk mensukseskan MA-2015?” Penelitian juga membahas faktor-faktor sosial-ekonomi sebagai pendukung dan penghalang bagi keberhasilan diplomasi Indonesia.Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun aktor-aktor yang terlibat untuk mengefektifkan peran Indonesia dalam menghadapi MA 2015.

Kata-kata Kunci: MA-2015, diplomasi total, komunikasi internasional, media massa.

Pendahuluan

Pada akhir tahun ini 10 negara ASEAN akan memasuki babak baru dalam hubungannya dengan diterapkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA akan berfungsi sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang memungkinkan terjadinya arus bebas barang, jasa, dan investasi. Pembentukan MEA dalam perspektif global mensignifikasikan bahwa seluruh negara anggota ASEAN akan terintegrasisecara ekonomi pada tanggal 31 Desember 2015. Integrasi ekonomi semacam ini merupakan tujuan utama AEAN dibawah artikel 1 paragraf 5 dari Traktat ASEAN.Artikel itu menstipulasi bahwa tujuan organisasi untuk memfasilitasi

secara efektif perdagangan dan investasi, modal, pergerakan pelaku bisnis, orang-orang bebakat, dan tenaga kerja.

Dengan hanya 3 bulan tersisa untuk MEA diberlakukan, semua anggota ASEAN tidak diragukan lagi akan mempersiapkan diri untuk menyambut era baru ini. Akan tetapi, akankah mereka siap untuk MEA? Pertanyaan ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga masyarakat, mengingat penerapaan MEA akan sangat dirasakan baik manfaat maupun kerugiannya oleh masyarakat.

Pertanyaan penelitian adalah, apakah ASEAN siap menghadapi MEA 2015?

Selanjutnya, bagaimana mengkondisikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015?

Kesiapan Indonesia hanya pada kalangan tertentu, seperti kaum akademisi, dan kelompok terpelajar, atau yang sehari-hari bergelut dengan permasalahan di kawasan.Akan tetapi masyarakat secara umum tidak banyak yang tidak mengetahui tentang penerapam MEA tahun 2015 ini.Maka dalam kerangka inilah masyarakat hubungan internasional, baik penstudi, pemerhati maupun mahasiswa dan dosen, berperan sangat besar dalam mensosialisasikan MEA kepada masyarakat luas.

Sejarah kegagalan RI menjalankan diplomasi Publik.CAFTA 2010.Kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan China dalam rangka China ASEAN Free Trade Area (CAFTA).

CAFTA pertama kali mengemuka dalam KTT ASEAN ke 7 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada November 2001.Tiga tahun kemudian, tepatnya 4 November 2004, kerangka kesepakatan ini ditandatangai oleh para Kepala Negara anggota ASEAN dan China di Pnom Penh, Kamboja.

Sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam CAFTA (China-Asean Free Trade Agreement), maka tahun 2010 adalah saat diberlakukannya CAFTA bagi Indonesia dan lima negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina.Pada tahun 2006 China bersama negara-negara ASEAN menandatangani perjanjian yang disebut CAFTA. CAFTA berlaku mulai tahun 2010 untuk 6 negara (Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan Filipina) dan tahun 2015 untuk Kamboja, Myanmar, Laos

danVietnam.Perjanjian ini dimaksudkan untuk mendongkrak perekonomian di negara-negara ASEAN dan China dengan meluasnya perdangangan ke seluruh ASEAN dan China dengan tarif pajak yang sangat kecil.

CAFTA bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak, meliberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi, mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan Negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap kedua belah pihak.

Ketika CAFTA diberlakukan tanggal 1 Januari 2010, produksi industri nasional menurun sampai 50 persen.Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan yang menyebabkan produk usaha kecil dan menengah kalah dalam persaingan.Sektor industri pun terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 20 persen. Jumlah pengangguran akan terus meningkat dari 8.9 juta (2009) menjadi 9.2 juta (2011).[86]

Neraca perdagangan Indonesia terus mengalami penurunan. Pada tahun 2006 neraca perdagangan Indonesia surplus USD 39,7 miliar, namun tahun 2011 hanya mendapat keuntungan sebasar USD 22,1 miliar. Hal ini disebabkan oleh timpangnya neraca ekspor impor Indonesia dan China.Sedangkan pada tahun 2010, deficit perdagangan Indonesia dengan China mencapai USD 7 miliar.Data ini menunjukkan betapa derasnya arus masuk barang dari China ke Indonesia.

Kehadiran produk impor dari China telah menimbulkan dampak negative terhadap lima sector industri yaitu logam, permesinan, tekstil, elektronika, dan furnitur. Hal ini berakibat pada sejumlah pelaku usaha di lima industri tersebut terpaksa melakukan efisiensi melalui pengurangan tenaga kerja. Pemberlakukan CAFTA lebih banyak menguntungkan China daripada Indonesia.

Wacana pemberlakuan ACFTA memperoleh tantangan dari berbagai pihak di dalam negeri.Mulai dari petani, pengusaha, hingga DPR mengungkapakan keberatan dengan perjanjian perdagangan bebas ini. Hal ini tentunya tidak lepas dari

[86] https://fahrunisa10.wordpress.com/2013/03/08/dampak-china-asean-free-trade-area-cafta-dan-strategi-dalam-menghadapinya/, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

kekhawatiran bahwa perdagangan bebas dengan China akan mengakibatkan turunnya pangsa pasar produk dalam negeri, terutama dari sektor pertanian dan manufaktur. Sosialisasi dan edukasi merupakan kunci bagi Indonesia untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang mengkhawatirkan sejak berlakunya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).Melalui sosialisasi dan edukasi yang tepat, para pelaku bisnis di Indonesia dapat lebih mempersiapkan diri secara matang dan memaksimalkan potensi mereka dalam menghadapi ACFTA."Banyak pabrik kecil dan usaha-usaha yang gulung tikar akibat diberlakukannya program tersebut.Bahkan, sempat terjadi perdebatan antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan terkait hal tersebut.Salah satu program yang perlu diterapkan adalah melalui diplomasi publik.

Diplomasi Publik dan Diplomasi Total

Departemen Luar negeri AS mendefinisikan Diplomasi Publik sbb:

Mengacu pada program-program yang disponsori oleh pemerintah yang tujuannya untuk menginformasikan atau mempengaruhi opini publik di negara-negara lain, melalui instrumen-instrumen publikasi, pemutaran film, pertukaran budaya, radio dan televisi. (US DOS).

Diplomasi Publik bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional dan keamanan nasional dari Amerika Serikat melalui pemahaman, penginformasian, dan mempengaruhi masyarakat di negara lain dengan meningkatkan dialog antara warga negara AS dengan mitra-mitranya di luar negeri. (USIA).

> Diplomasi Publik merupakan upaya-upaya pemerintah untuk membentuk lingkungan komunikasi di luar negeri dimana kebijakan LN AS berjalan, untuk mengurangi tingkat salah persepsi dan kesalahpahaman yang dapat mempersiulit hubungan antara AS dan negara lainnya.(H.N. Tuch).

Diplomasi seyogyanya mengkomunikasikan isu-isu yang ada di tataran global kepada masyarakat di dalam negeri.Masyarakat didalam negeri perlu diinformasikan mengenai perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, terkait dengan pemberlakukan MEA. Maka Kemenlu memperkenalkan istilah intermestik. Maknanya adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di luar negeri akan berpengaruh baiksecara langsung

maupun tidak langsung terhadap masyarakat di dalam negeri, dan demikian pula sebaliknya. Pencerminan stuasi di dalam negeri akan mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, atau kebijakan yang “intermestik” tersebut, lazim dilakukan oleh suatu negara, termasuk di Indonesia. Politik luar negeri diimplementasikan melalui diplomasi, baik bilateral, regional, maupun global, baik yang pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah terhadap pemerintah (government to government/ G to G). Selain itu, diplomasi juga dapat dilaksanakan oleh aktor-aktor bukan negara (people to people, atau P to P), dan yang ketiga adalah diplomasi multi jalur, yang menggabungkan jalur kesatu dan kedua. Diplomasi yang dijalankan oleh banyak aktor ini dikenal juga sebagai diplomasi multijalur.Diplomasi ini dijalankan dengan jangkauan yang lebih luas, dan tujuan yang beragam, tapi pada dasarnya adalah melibatkan sebanyak mungkin aktor yang berkepentingan untuk mengejar kepentingan nasional.

Diplomasi multilajur mengasumsikan bahwa aktor-aktor yang terlibat beragam meskipun pemerintah tetap merupakan inisiator utama atau penggerak utama dari tujuan politik luar negeri.Diplomasi yang mempergunakan segala macam media juga dikenal sebagai diplomasi total.

Mengingat isi MEA ini sudah merupakan kenyataan, maka pilihan yang perlu diambil adalah pelaksanaan diplomasi total. Alasan penerapan strategi ini adalah : 1. Waktu yang sempit. 2). Jangkauan geografis yang luas. 3. Jumlah populasi yang besar yang harus dijangkau. 4. Kompleksitas masalah. Berikut ini adalah pembahasan tentang permasalahan yang terindikasi beserta upaya-upaya yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah komunikasi.

Add1. Waktu yang sempit

Add 2. Jangkauan geografis yang luas

Add3. Populasi dan Kompleksitasnya.

Kompleksitas penduduk (profesi, disparitas ekonomi, perbedaan kualitas sumber daya manusia,

SDM diukur melalui Human Development Index (HDI)[87] atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Indeks ini mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.Nilai IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir, dan untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.[88]Data terakhir posisi HDI Indonesia berada pada tingkat ke 108 dari 187 negara yang disurvey.[89]

Bandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN: Singapura (9). 30 Brunei Darussalam, 62 Malaysia. 89 Thailand.Yang berada dibawah Indonesia adalah: 117 Filipina, 121 Viet Nam, 136 Cambodia, 139 Republik Demokratik Laos, dan 150 Myanmar. Krisis finansial, fluktuasi dalam harga-harga bahan makanan, bencana alam, dan konflik serta kekerasan, akan secara signifikan berpengaruh terhadap kenaikan tingkat HDI suatu negara.

Belum lagi jika melihat HDI antar provinsi di Indonesia. Pada tahun 2011, IPM kawasan Sumatera, Jawa dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional (72.77). Sedangkan IPM kawasan di luar Jawa, Sumatera dan Bali (Indonesia Tengah dan Timur) pada umumnya dibawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Sementara itu daerah tertinggal seperti NTT, NTB dan Papua juga telah mengalami kemajuan tingkat IPM yang lebih pesat dibanding daerah lainnya.[90]

---

[87]http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[88]http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[89] UNDP: http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2014/july/HDR2014.html, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[90]https://www.selasar.com/politik/statistik-indeks-pembangunan-manusia-indonesia#, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

Hingga tahun 2013 menunjukkan bahwa IPM di kawasan timur Indonesia masih cenderung lebih banyak yang berada di bawah rata-rata nasional (73.81). Provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional dari kawasan timur adalah: Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, NTT dan NTB. [91]
Sementara itu untuk kawasan barat Indonesia Provinsi yang IPM-nya berada di bawah rata-rata nasional adalah Banten, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan Aceh.

Prioritas Nasional: Daerah Tertinggal, Terdepan dan Paskakonflik

Menurut RPJMN Secara umum pencapaian sasaran Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator utama prioritas ini, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014.

Selain itu, terdapat disparitas yang besar dalam hal kualitas dan fasilitas pendidikan.Fasilitas di provinsi-provinsi di Jawa dan Luar Jawa sangat berbeda, termasuk kesempatan untuk mengenyam kesempatan belajar di Perguruan Tinggi.Generasi tua juga masih harus bergelut dengan buta huruf.Sementara itu, generasi muda juga mengalmi kesulitan beralih dari pendidikan dasar ke menenagh.Ketidakmerataan pendidikan sangat terasa di Indonesia.[92]

Dd4. Kompleksitas Masalah

Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan diatas, maka diplomasi total merupakan salah satu pilihan yang harus diimplementasikan dalam menghadapi MEA 2015.

---

[91] https://www.selasar.com/politik/statistik-indeks-pembangunan-manusia-indonesia#, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[92] Ibid.

Add1. Menumbuhkan opini positif diantara negara-negara ASEAN

Caranya: sebagai negara pemberi bantuan→ Kerjasama Kemitraan Negara Berkembang (KNB).

Meningkatkan aktivitas kerjasama Selatan-Selatan.

Add.2. Meningkatkan aktivitas yang melibatkan Duta-duta Masyarakat (Goodwill Ambassador)

Add3, Melaksanakan diplomasi Virtual (virtual diplomacy) → era teknologi komunikasi, informasi, teknologi informasi yang bekembang, era digital.Diplomasi tanpa diplomat (diplomat without diplomacy).

Add. 4. Mengoptimalkan pemakaian informasi untuk keperluan merancang kebijakan luar negeri yang efektif. Seperti dikatakan oleh George Shulz:"*Bahan baku diplomasi adalah informasi, bagaimanamemperolehnya, menganalisis dan menempatkannya dalam sistem.*

Diplomasi Publik dan Polugri:

Add. 1. Memajukan *People to People Contact*

Add.2. Mendiseminasikan informasi mengenai kebijakan luar negeri

Add3. Mengikat dan dan mempengaruhi publik domestik maupun asing

- Mengumpulkan masukan dan saran dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri
- Publik
- Terbuka
- Interaktif
- Jangka panjang
- Komunikasi Global
- Membangun kepercayaan dan rasa percaya diri.

Mitra-Mitra Kerja:

Dalam negeri: anggota parlemen, akademisi, mahasiswa, pimpinan agama, politikus, dan pemimpin parpol, media massa, NGO dan CSOs, institusi-institusi pemerintah, seniman, dan pemangku kepentingan lainnya.

Luar negeri: INGOs, pemimpin agama, akademisi, komunitas lokal, istitusi-institusi pembentuk opini publik, (think tank, Center of Asian, Pusat-pusat Studi Indonesia) dll. Media masa, Friends of Indonesia, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya.

Aktor–aktor yang dapat dilibatkan pada aktivitas Diplomasi Multijalur secara garis besar ada 9.Berikut ini adalah aktor-aktor yang dimaksud beserta peran-peran yang dapat diamainkan dalam mensukseskan MEA. 1. 1. 1. Pemerintah

2. Kelompok Profesional

3. Kelompok Bisnis

3. Warga negara biasa

4. Penelitian, pelatihan, pendidikan

5.Aktivisme

6. Kelompok Agama → Interfaith dialogue.

7.Pendanaan→ memberikan bantuan dana.

8.Komunikasi dan media. Penyebaran informasi.Media konvensional (cetak dan elektronik), dan media sosial.

Media sosial harus menjadi fokus perhatian mengingat peran komunikasi yang sangat luar biasa pada era digital ini.

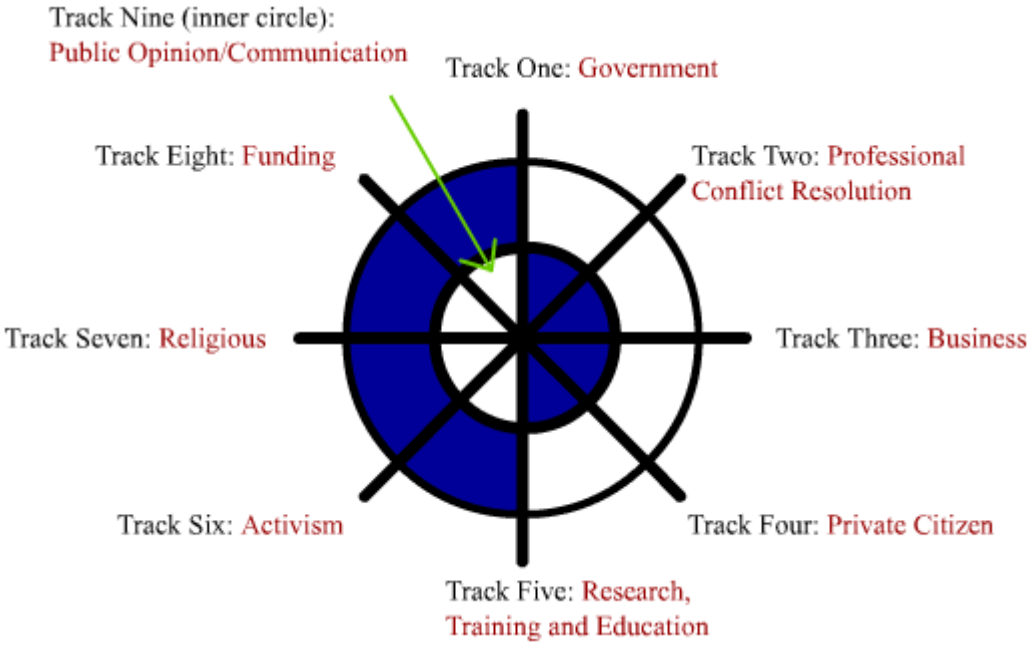

Data pemakai internet di Indonesia.

Pemakai internet di Indonesia berjumlah 139 juta orang, pada tahun 2015.[93] Sehingga komunikasi berbasis internet perlu dimanfaatkan.

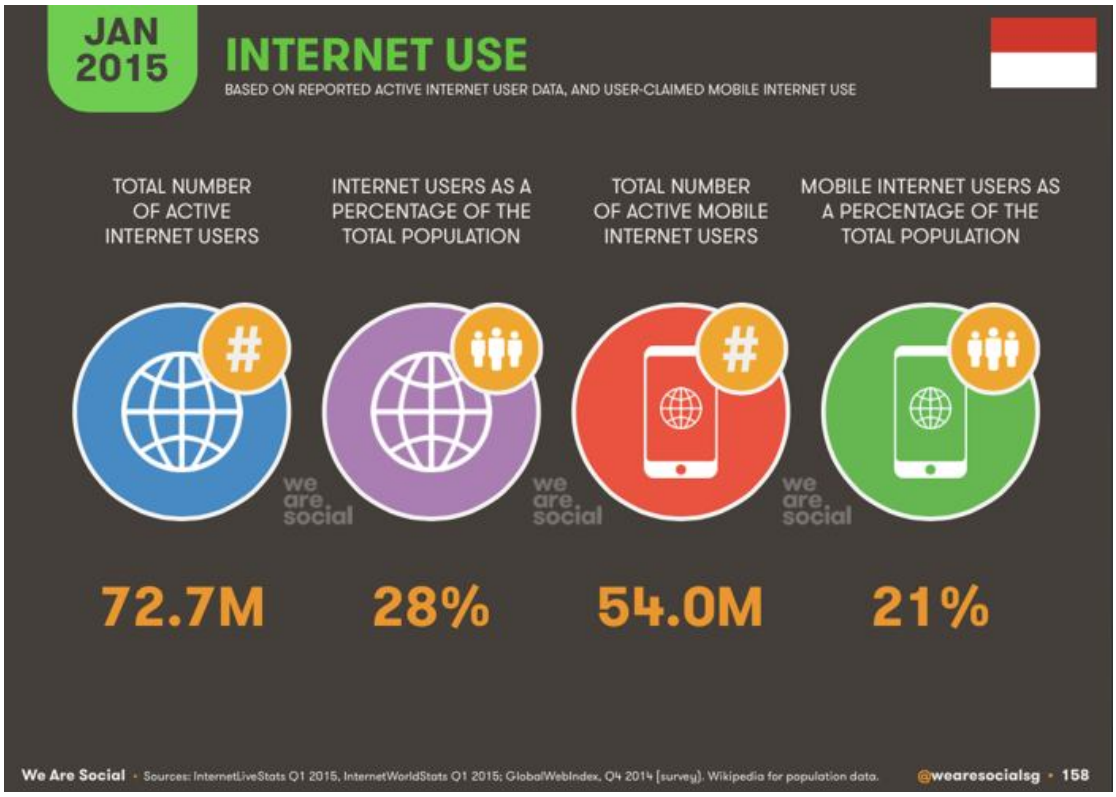

Sumber: [94]

Berikut adalah perkembangan dunia digital Indonesia:

- 72,7 juta pengguna aktif internet
- 72 juta pengguna aktif media sosial, dimana 62 penggunanya mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile
- 308,2 juta pengguna handphone

Setidaknya 30 juta orang remaja di Indonesia yang mengakses internet secara reguler.Jika masyarakat Indonesia sampai saat ini memiliki 75 juta pengguna internet, itu berarti hampir setengahnya adalah remaja.[95]

[93] http://www.toprankindonesia.com/jasa-seo-makin-banyak-bermunculan-di-indonesia/, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[94] https://id.techinasia.com/laporan-pengguna-website-mobile-media-sosial-indonesia/, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

Media-media sosial yang dipakai.

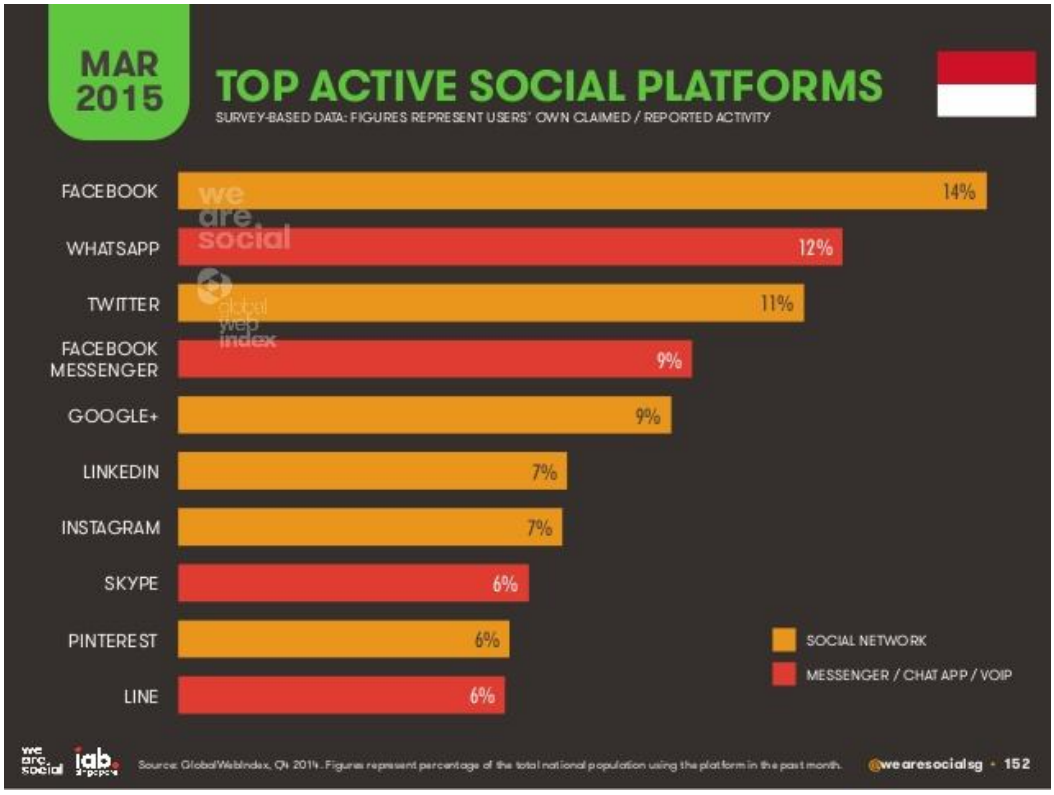

Sumber: [96]

63 juta orang Indonesia akses Facebook melalui handphone di tahun 2015, atau penetrasi tertinggi di dunia.[97]

1.1 [95]Laporan: 30 juta pengguna internet di Indonesia adalah remaja: https://id.techinasia.com/laporan-30-juta-pengguna-internet-di-indonesia-adalah-remaja/, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[96]http://www.storania.com/data-infografis-jumlah-pengguna-internet-aktif-lengkap-di-maret-2015/, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

[97]https://id.techinasia.com/jumlah-pengguna-facebook-mobile-indonesia-tertinggi-dunia/, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

Indonesia memiliki penetrasi pengguna Facebook via mobile phone tertinggi di dunia, yakni mencapai 88,1 persen di tahun 2014 dan naik menjadi 92,4 persen di tahun ini.[98]

Pengguna *Facebook* via perangkat mobile yang tinggi di Indonesia berbanding lurus dengan penetrasi pengguna smartphone yang juga tinggi. Indonesia masih menempati peringkat keenam negara dengan jumlah pengguna smartphone terbanyak di dunia dengan 52,2 juta pengguna. Namun, penetrasi pengguna smartphone di negara ini diproyeksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 nanti, Indonesia akan berada di peringkat keempat dunia di belakang China, Amerika Serikat, dan India; dengan jumlah pengguna smartphone mencapai lebih dari 100 juta pengguna.[99]

Indonesia Urutan Pertama Pengguna Twitter di Asia.Peringkat pertama pengguna Twitter di Asia diduduki oleh Indonesia dengan 2.34%, diikuti Jepang 1.47% dan India 0.97%.[100]

Aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan:

- PUBLIC DIPLOMACY CAMPAIGN
- REGIONAL INTERFAITH DIALOGUE
- GLOBAL INTERMEDIA DIALOGUE
- ASIA DEMOCRACY FORUM
- BILATERAL INTERFAITH DIALOGUE
- PROMOTION ISLAM AND DEMOCRACRY
- BEASISWA SENI DAN BUDAYA INDONESIA
- Etc…

[98] Ibid.
[99] Ibid.

[100] http://www.lpmpjateng.go.id/web/index.php/arsip/info-teknologi/321-indonesia-urutan-pertama-pengguna-twitter-di-asia, diakses tanggal 22 Oktober 2015.

Diplomasi total adalah:

- Diplomasi yang mempergunakan segala macam media.
- Mengkomunikasikan isu-isu yang ada di tataran global kepada masyarakat di dalam negeri. Masyarakat di dalam negeri perlu diinformasikan mengenai perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, terkait dengan pemberlakukan MEA.
- “intermestik”.

Tentang MEA

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing.Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

Apa keuntungan MEA bagi negara-negara Asia Tenggara?

Pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar.Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.

Pada 2015 mendatang, permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta.Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Diprediksikan bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.

Masalah-masalah yang dihadapi anggota-anggota ASEAN

Banyak negara anggota yang saat ini menghadapi masalah-masalah internaldan regional.Tiga diantaranya adalah kemiskinan, kelebihan jumlah penduduk *(over population),* dan inflasi.Beberapa negara anggota ASEAN menghadapi tiga masalah ini dalam kenyataansehari-harinya.

Masalah lainnya yaitu depresiasi mata uang nasional terhadap USD merupakan masalah lainnya yang dihadapi negara-negara di ASEAN, seperti Indoensia.Selain itu, perebutan wilayah di Laut tiongkok selatan yang melibatkan Tiongkok dan beberapa engara anggota ASEAN, spt Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Baru2 ini, ASEAN juga harus menyelesaikan krisis di Rohingya, dan selain itu masih banyak kemungkinan lainnya bahwa krisis kemanusiaan ini akan terjadi lagi di masa mendatang. Lebih jauh, situasi keamanan di Bangkok dan bom yang meledak mengkomunikasikan bahwa masalah terorisme di Asia Tenggara belums elasai. Semua masalah-masalah ini membuat negara-negara ASEAN khawatir bahwa ketidaksiapan menghadapi MEA.

Tidak terkecuali Indonesia, sebagai negara yang paling besar dan penduduk paling banyak, tidak diragukan lagi memainkan peran kunci dalam membuat kawasan yang stabil secara ekonomis dan berdaya saing. Menurut HDI, Indonssia rankingke 5 di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Akan tetapi, kondisi sosio-ekonomis Indonesia lebih baik daripada Filipina, Vietnam, Laos, Kambodia dan Myanmar. Menghadapi MEA pada akhir tahun ini, Indonesia perlu mengantisipasi bahwa banyak warga negara asing dariseluruh dunia akan datanguntuk mencari lapangan kerja. Utuk ini, tenaga kerja kita harus berkompetisi dengan para tenaga kerja sing lainnya yang mencari kerja di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian:

“Bagaimana diplomasi total diterapkan di Indonesia untuk mensukseskan MA-2015?”

3. Faktor-faktor sosial-ekonomi sebagai pendukung dan penghalang bagi keberhasilan diplomasi Indonesia.

a. Faktor pendukung

Optimisme Indonesia?

Ketahanan perekonomian Indonesia cukup kuat dalam menghadapi krisis. Kunci kekuatan Indonesia tersebut antara lain adalah stabilitas politik dan reformasi, ekonomi, SDM yang produktif dan masih muda, sumber daya alam yang melimpah dan kelas konsumen yang meningkat, iklim investasi dan menjaga ekonomi seperti harmonisasi dan penyerder-hanaan pengaturan bidang usaha.

Selain itu, kebijakan stabilisasi eko-nomi yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah telah mem-bawa peningkatan stabilitas dalam transaksi berjalan.Dalam rangka meningkatkan iklim investasi menjaga pertumbuhan eko-nomi, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia, Pemerintah Indo-nesia telah menyelesaikan proses revisi dan meluncurkan daftar investasi negatif yang telah direvisi lebih terbuka dan memberikan kepastian kepada investor. Indonesia juga menawarkan peluang besar untuk investasi terutama di bidang infrastruktur dan perkembangan industri melalui pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E) 2011-2025.

AGAMA DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL ASEAN:

Islam dalam Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya

Andi Purwono[101]

Abstrak

Riset tentang agama dalam ranah *interstate, intersociety,* maupun *society-state relations* di ASEAN masih jarang dibuat. Padahal berkaca pada konflik Moro dan Thailand Selatan, isu agama juga berpotensi menjadi tantangan serius bagi kohesi ASEAN. Paper ini mengupas agama dalam HI ASEAN dan secara khusus Islam dalam politik luar negeri Indonesia (PLNRI). Riset- riset terdahulu menyebut Islam tidak berpengaruh, tidak signifikan dan kalah oleh pertimbangan material kepentingan nasional, atau tidak ada substansi Islam dalam PNRI. Mereka cenderung mendekati Islam sebagai identitas. Dengan pendekatan berbeda yaitu *worldview* dan institusi Islam, tulisan ini menunjukkan bahwa Islam berpengaruh dalam PLNRI. Urutan kejadian peristiwa menunjukkan tekanan institusi- institusi Islam sehingga muncul respon pemerintah. Meski PLNRI tidak secara formal menyebut alasan Islam, aktifitas banyak institusi Islam dalam melakukan aksi kemanusiaan juga memperkuat bukti peran mereka.

Kata kunci: Islam, Politik Luar Negeri Indonesia, ASEAN, Worldview, Institusi.

[101] Mahasiswa doktoral Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dosen Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang

Permasalahan

Meski banyak tantangan, ASEAN semakin diperhitungkan secara politik maupun ekonomi oleh banyak kawasan dan negara besar.[102] Tantangan di bidang ekonomi telah banyak ditulis,[103] berbeda di bidang sosial lainnya. Salah satu tantangan itu muncul dari aspek agama. Riset tentang agama dalam ranah *interstate, intersociety,* maupun *society-state relations* di ASEAN masih jarang dibuat. Berkaca pada konflik Moro maupun Thailand Selatan misalnya, isu agama juga berpotensi menjadi tantangan serius bagi kohesi ASEAN. Ini karena agama adalah fenomena transnasional dengan potensi harmoni dan konflik[104], yang gampang menyebar.

Kekhawatiran yang sama juga berlaku pada krisis kemanusiaan Rohingya. Bagi sebagian, ia berdimensi kemanusiaan, sementara bagi lainnya ada dimensi Islam di sana. Oleh karenanya menarik, pandangan yang menyebut masalah konflik etnis Rohingya di Burma/Myanmar harus lekas diselesaikan supaya tidak menjadi sumber keresahan kelompok radikal termasuk di kalangan Muslim.[105] Apalagi negara-negara di Asia Tenggara punya pengalaman buruk sehubungan dengan konflik internal yang berlarut-larut. Ini tentu dapat berfungsi sebagai pendorong radikalisasi dan ekstremisme.

Dalam pengalaman Indonesia, pada kasus- kasus berdimensi Islam sebelumnya artikulasi publik juga ditujukan kepada pemerintah. Mereka menyampaikan tuntutan dan dukungan politik tertentu kepada pemerintah untuk segera bertindak melalui

[102] Andi Purwono, Tantangan Politik Ekonomi ASEAN, Suara Merdeka 19 Maret 2009
[103] Andi Purwono, Urgensi KTT ASEAN, Harian Suara Merdeka, 15 November 2011
[104] Charles W. Kegley Jr. And Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation 6th edition* (New York: St. Martin's Press, 1997)
[105] Rizal Panggabean, Resolusi Konflik Sebagai "Counter-Radicalization" dalam Institute of International Studies UGM, August 2012, Volume 9, Issue 3, Commentaries.

saluran politik luar negerinya. Sejauh mana peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia terhadap krisis Rohingya ? Mengapa muslim Indonesia tidak mempersoalkan ketidakhadiran alasan Islam dalam pernyataan resmi politik luar negeri Indonesia ?

Peran Islam Menurut Riset Terdahulu

Secara historis, Islam memang telah memainkan peran penting dalam diplomasi kemerdekaan Indonesia.[106] Artinya dalam sejarah awal republik Islam memainkan peran penting. Namun pada etape sejarah berikutnya, jarang sekali peneliti yang menyebut peran signifikan Islam dalam politik luar negeri Indonesia.

Riset- riset terdahulu tentang Islam dan politik luar negeri Indonesia berada di area analisa pengaruh dan menggunakan pendekatan Islam sebagai identitas. Leo Suryadinata menyebut bahwa Islam bukanlah faktor penting dan tidak pernah menjadi pertimbangan utama dalam politik luar negeri Indonesia era Soeharto.[107] Retorika Islam pun tidak digunakan karena nasionalisme dan antikolonialisme menjadi pondasi politik luar negeri bebas aktif.[108] Ketidakhadiran Islam itu disebabkan karena para elit Indonesia, terutama elit politik luar negeri, yang *abangan* dan bukan santri. Ia menggunakan perspektif berbasis agen terutama pendekatan karakter pemimpin (leader personal traits).

---

[106] Lihat misalnya tulisan Suranta Abd. Rahman, Diplomasi RI di Mesir dan Negara- negara Arab Tahun 1947 dalam *Wacana*, Vol. 2, Oktober 2007, h. 154.

[107] Leo Suryadinata, *Indonesia's Foreign Policy Under Suharto: Aspiring to International Leadership* (Singapore: Times Academic Press, 1997), h. 160. Buku ini juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 1998).

[108]Leo Suryadhinata, "Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia" dalam *Asian Survey* Vol. 35, No. 3 (2009): 303. Artikel ini juga menjadi bab 10 dari buku Leo Suryadinata, *Op.Cit*. h. 201-218.

Studi kedua menggunakan pendekatan berbasis perspektif struktural dengan beberapa variasi. Pertama adalah pendekatan kepentingan nasional material dengan mengasumsikan para pembuat kebijakan sebagai aktor rasional yang mengedepankan kepentingan nasional. Anak Agung Banyu Perwita menyebut bahwa politik luar negeri Indonesia sebenarnya *trumping* dari alasan agama ke kepentingan realis dan normatif bebas aktif. Artinya, politik luar negeri lebih dipengaruhi faktor kepentingan nasional dan bukan alasan agama.[109] Penulis lain, Dewi Fortuna Anwar menilai bahwa peran Islam dalam politik luar negeri Soeharto mulai terlihat pada akhir tahun 1980-an dengan perhatian yang meningkat terhadap negara-negara atau isu-isu yang terkait dengan Islam. Namun hal ini dilakukan untuk mengamankan posisi domestiknya, serta lebih karena alasan kepentingan nasional (*national interest*), bukan Islam.[110] Sebelumnya perpolitikan era Soeharto benar-benar dibatasi akibat oleh banyaknya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia di rentang tahun 1950-60-an.[111] Penegasan atas dominasi alasan kepentingan nasional itu juga disebutkan dalam tulisannya yang lain tentang Islam di era reformasi.[112]

I Gede Wahyu Wicaksana menyebut bahwa Islam bukan merupakan konsideran utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Posisi Islam marginal di antara pelbagai agenda ekonomi dan politik material dalam

---

[109] Anak Agung Banyu Perwita, *Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond* (Copenhagen: NIAS, 2007)

[110]Dewi Fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", dalam *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanitites* Vol. 3, (2010a): 39

[111]*Ibid*., h. 49.

[112] Dewi Fortuna Anwar , The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy dalam Southeast Asian Affairs 2010b, 126-141.

hubungan internasional Indonesia.[113] Dimensi material lebih krusial dari pada ide Islamis dan relasi solidaritas atas nama agama dalam hubungan luar negeri Indonesia.[114] Di tulisan yang lain ia menyebut bahwa peran Islam termarginalisasi dalam politik luar negeri Indonesia karena kombinasi sifat sekuler identitas negara, kepentingan material para elite, dan dari lingkungan luar.[115]

Kelompok kedua dalam perspektif struktural menggunakan pendekatan identitas negara (state identity approach) terutama karya Leifer dan Rizal Sukma yang menyebut peran sekunder Islam dalam politik luar negeri Indonesia sangat terkait dengan fakta bahwa Islam tidak dijadikan sebagai dasar negara. Michael Leifer menyebut bahwa Islam bukan lah basis politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati agar politik luar negerinya tidak dikendalikan oleh pertimbangan Islam. Islam tidak pernah menjadi cara pandang internasional dari negara Indonesia, dan tidak pernah digunakan sebagai retorika resmi dalam politik luar negeri Indonesia.[116] Fakta ini disebabkan oleh situasi domestik terutama identitas negara. Ia melihat politik luar negeri berdasar *formal charge* dari departemen pemerintah.[117] Ia menunjukkan hal itu dengan menggunakan kasus Israel- Palestina, OKI, dan Timur Tengah lain. Namun sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, faktor Islam bukannya tidak berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia,

[113]I G Wahyu Wicaksana, *Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia*
[114]Wicaksana, I. G. W., *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations* (University of Western Australia, 2012).
[115] IG Wahyu Wicaksana, Islamic Identity, Elite Interest and Foreign Policy in Indonesia dalam *Indonesian Journal of Social Sciences* Volume 4 Nomer 2.
[116]Michael Leifer, Islamic Factor in Indonesia's Foreign Policy: A Case of Functional Ambiguitydalam Adeed Dawisha, *Islam in Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983), h. 148 dan 157.
[117] *Ibid*., h. 150.

pengaruh itu ada dalam berbagai variasi dan bentuk informal, serta lebih berwujud sebagai *constrain* dan bukan motivasi positif.[118]

Senada dengan karya Leifer itu, Rizal Sukma mengatakan bahwa meski negara mayoritas muslim, namun Islam tidak pernah menempati peran dominan dalam politik luar negeri Indonesia.[119] Di era reformasi, Islam memang menjadi kekuatan politik potensial yang mempengaruhi politik dan pengambilan keputusan. Meski demikian peran Islam dalam poltik luar negeri tetap bukan penentu utama. Peran Islam selalu sekunder karena identitas ganda negara yang bukan negara teokrasi dan juga bukan sekuler, serta kelemahan domestik yang membatasi peran Islam dalam politik luar negeri.

Selain itu, ia mengemukakan hal yang menarik bahwa Islam masuk ke dalam politik luar negeri Indonesia hanya dalam bentuk dan bukan substansinya.[120] Sejumlah kebijakan menurutnya seakan- akan berbentuk Islami tetapi substansinya tidak. Artinya secara substansi, Islam absen dalam politik luar negeri Indonesia karena pemerintah berupaya menjaga substansi politik luar negeri pada dimensi non agama. Relasi Islam dan politik luar negeri Indonesia yang khas ditentukan oleh pertimbangan utama berupa prioritas domestik dan kepentingan negara dan rezim. Meski Islam tidak menjadi sumber, tetapi politik luar negeri tidak kontradiktif dan bertentangan dengan kepentingan Islam. Isu utama politik luar negeri bagi kelompok-kelompok Islam adalah kebutuhan meningkatkan hubungan dengan negara muslim

[118]*Ibid*., h. 144.
[119]Rizal Sukma, *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and Dilemma of Dual Identity* (London: Routledge Curzon, 2003), lihat bagian preface dan introduction.
[120] Ibid.,bagian conclusion h. 140.

lain, perhatian lebih pada isu-isu dunia Islam, dan memberi inisiatif pada isu- isu tersebut.[121] Wirajuda juga mengungkapkan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak dipandu oleh *Islamic precepts.*[122] Hal itu disebabkan karena ide politik Islam tidak populer dan karena kekuatan politik partai Islam di parlemen lemah.

Harus diakui, studi- studi tentang Islam dalam politik luar negeri Indonesia terdahulu telah memberi kontribusi yang sangat besar terutama dalam mengidentifikasi sejumlah variabel yang diduga mempengaruhi berperan atau tidaknya Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Namun demikian, ada beberapa kritik yang patut disampaikan berkaitan dengan keterbatasan teori politik luar negeri yang digunakan dan juga pendekatan dalam melihat Islam.

Peneliti sebelumnya melihat Islam sebagai identitas. Padahal ada peran- peran lain dari agama dalam politik internasional, sebagaimana akan dijelaskan kemudian dalam tulisan ini. Mereka mencoba menemukan Islam dalam retorika dan jargon yang tersurat secara formal dalam ucapan maupun tulisan dari para pejabat dan pembuat kebijakan luar negeri seperti terminologi solidaritas keagamaan.

Wicaksana secara eksplisit dalam dua tulisannya mengemukakan itu bahwa ia melihat peran Islam sebagai identitas. Suryadinata juga demikian ketika dengan eksplisit menyebut solidaritas Islam tidak pernah menjadi dasar dan pertimbangan politik luar negeri Indonesia. Anak Agung, Anwar, Leifer, Sukma dan Wirajuda meski tidak secara eksplisit namun bisa dibaca bahwa mereka melihat Islam dalam

---

[121] *Ibid*.

[122] Hasan Wirajuda, *The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management* (The London School of Economics and Political Science, 2014), h.107-110.

peran itu terutama ketika menunjukkan bahwa bukan solidaritas keislaman yang menjadi alasan politik luar negeri. Dari riset mereka kita sulit menemukan kehadiran dan peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia. Ketika tidak ditemukan Islam dalam bentuk formal, mereka menyimpulkan Islam tidak berpengaruh dalam politik luar negeri Indonesia.

Selain itu ada pola yang terlihat dan diakui para peneliti sebelumnya bahwa ada kesengajaan politik di era Orde Lama dan Orde Baru untuk menghindari penyebutan identitas Islam sebagai sumber prinsip, norma, dan nilai yang membimbing hubungan luar negeri dan diplomasi kita.[123] Artinya, sebenarnya Islam sebenarnya patut diduga berpengaruh signifikan, namun secara sengaja ditutupi. Hal ini membuka peluang riset untuk membuktikan bahwa sebenarnya ide Islam hadir hanya saja dimanipulasi dalam bahasa yang lain.

Analisa Alternatif

Ada empat pengaruh dasar agama dalam hubungan internasional yang diyakini oleh Fox dan Sandler.[124] **Pertama**, agama dipandang sebagai aspek identitas (aspect of identity). Agama diyakini mempengaruhi jati diri seseorang. Ini memberi mereka perasaan senasib (feeling of affinity) dengan sesama pemeluknya. Akibatnya, muncul rasa peduli dan tangung jawab terhadap sauara seagama dengan basis solidaritas keagamaan (co- religion). Ini juga bisa menjelaskan mengapa negara dengan agama

[123] Rizal Sukma, *Op. Cit.*, h. 46.
[124] Jonathan Fox and Shmuel Shandler, *Bringing Religion Into International Relations* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), H. 2.

yang sama punya kecenderungan tidak saling berperang.[125] Selain itu, hal ini juga bisa menjelaskan mengapa konflik di suatu tempat bisa menyebar melalui jalur agama ke negara tetangga dan bahkan tempat lain di bumi.

Kedua, agama bisa mempengaruhi pandangan dunia (worldview) individu dan kelompok yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola pikir dan perilakunya. Apakah kita menyebut worldview, kepercayaan (belief), norma, atau nama lain, ia adalah cara yang kuat dimana agama berkaitan dengan perilaku individu dan masyarakat. Kekuatan agama di aspek ini bisa dilihat ketika ia mengarahkan dan membatasi politik luar negeri melalui kepercayaan pembuat kebijakan dan kepercayaan serta harapan (expectations) konstituennya.

Oleh karena itu, politik luar negeri juga bisa dimotivasi oleh pertimbangan-pertimbangan keagamaan.[126] Hal ini berlangsung melalui pandangan dunia berbasis keagamaan (religious world view) dari para pembuat kebijakan baik di negara sekuler maupun negara agama. Selain itu politik luar negeri juga bisa dipengaruhi melalui pandangan dunia berbasis keagamaan dari rakyat yang membatasi pilihan para pembuat kebijakan. Jika kebijakan dipandu oleh keyakinan agama maka otomatis hal itu akan memiliki legitimasi keagamaan bagi rakyat yang berkeyakinan sama. Sehingga di titik ini legitimasi keagamaan dan pandangan dunia keagamaan adalah *inexorably intertwined*.

---

[125] Errol A. Henderson, Culture or Contiguity: Ethnic Conflict, the Similarity of States, and the Onsetof War, 1820-1989 dalam Journal of Conflict Resolution, 41 (5), October 1997, h. 649-668. Pernyataan ini juga bisa dibaca dalam Errol A. Henderson, The Democratic Peace Through the Lens of Culture 1820-1989 dalam *International Studies Quarterly*, 42 (3), September 1989, h. 461-484.
[126] Fox and Sandler, *Op. Cit.*, h. 163.

Ketiga, agama adalah sumber legitimasi (source of legitimacy) untuk mendukung maupun mengkritisi pembuat kebijakan. Sebagai sumber legitimasi agama bisa digunakan untuk mempersuasi pihak lain.[127] Kekuatan mempersuasi ini sangat esensial bagi pembuat kebijakan. Agama bisa dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan luar negeri untuk mencari dukungan bagi kebijakan mereka dari rakyat termasuk politisi lain, pemilih, serta pembuat kebijakan dan rakyat di negara lain. Sebaliknya, mereka juga bisa menggunakan agama untuk menentang kebijakan itu atau mendukung alternatif kebijakan lainnya.

Beberapa tokoh yang menekankan hal ini misalnya Joseph Nye yang mengemukakan konsep soft power pada 1990 yang memandang agama dalam hubungan internasional sebagai *persuasive power* bagi kelompok yang sama. Tokoh lain seperti Shireen T. Hunter juga menyebut bahwa agama mempengaruhi hubungan internasional salah satu caranya dengan melegitimasi keputusan kebijakan dan mengumpulkan dukungan populer bagi kebijakan itu. [128]

Keempat, agama diasosiasikan dengan institusi-institusi formal yang bisa mempengaruhi proses politik. Dalam beberapa kasus institusi-institusi ini adalah aktor internasional. Dalam ranah domestik institusi-institusi ini memainkan peran dalam mendukung rezim, menentang rezim dan melobi rezim. Institusi-institusi itu juga bisa memainkan peran dalam mobilisasi politik.

---

[127] Fox and Sandler, *Op. Cit.*, h. 169.

[128] Shireen Hunter, Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis. Written on April 7, 2010 – 9:32 pm Artikel bisa dilihat di http://www.e-ir.info/2010/04/07/religion-and-international-affairs-from-neglect-to-over-emphasis/ Diakses 14 Mei 2013 jam 16.36 WIB.

Ini lah yang dikatakan Haynes bahwa ada hal yang jarang dicatat tentang upaya agama mempengaruhi politik luar negeri melalui *soft power* dengan mendorong pemerintah untuk mengaplikasikan prisnip- prinsip, nilai- nilai, dan cita- cita agama.[129] Bahkan Fox dan Sandler dengan tegas menyebut bahwa pengaruh terbesar agama pada sistem internasional adalah melalui pengaruh signifikannya pada politik domestik sehingga agama menjadi kekuatan motivasi yang membimbing banyak pembuat kebijakan.[130] Shireen Hunter juga menyebutkan bahwa pegaruh agama bisa dilacak pada aktivititas kelompok agama, yang ditujukan untuk mempengaruhi perilaku negara dalam sistem demokratis.[131]

PLNRI Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya

Persoalan Rohingya sebenarnya sudah sejak lama beralngsung.[132] Namun krisis Juni 2012 kemudian mendapat sorotan yang luas di dunia internasional. Hal yang sama terjadi pada awal tahun 2015 ini, ketika ratusan warga Rohingya terlunta di laut lepas ASEAN. Di Indonesia, respon bermunculan terutama dari kelompok Islam dengan melakukan aksi kemanusiaan maupun diplomasi kemanusiaan[133] kepada pemerintah.

---

[129] Jeffrey Haynes, Religion and Foreign Policy Making in the USA, India and Iran: Towards a Research Agenda
Third World Quarterly Vol. 29, No. 1 (2008) (pp. 143-165).
[130] Fox and Sandler, *Op.Cit*., h. 168.
[131] Shireen Hunter, *Loc.Cit*.
[132] Jason Szep, Andrew C. Marshall and Reuters Staff, *Ethnic War in Myanmar* (2013 Sopa Awards Nomination For Reporting Breaking News: Reuters, June 9 & November 11, 2012) atau Roomana Hukil & Nayantara Shaunik, *The Rohingyas of Myanmar* (New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies, Issue Brief 222, June 2013), atau Kim Jolliffe, *Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar's Contested Regions* (Asia Foundations, June 2014)
[133] diplomasi kemanusiaan adalah proses mempersuasi para pembuat keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak sepanjang waktu demi kepentingan masyarakat yang rentan krisis kemanusiaan, dan

Berbeda dengan tulisan peneliti sebelumnya yang melihat Islam sebagai identitas melalui apa pernyataan resmi yang dikeluarkan pemerintah, tulisan ini menyatakan gagasan bahwa Islam berperan penting dalam politik luar negeri Indonesia terhadap krisis kemanusiaan Rohingya. Argumennya didasarkan pada tiga pemikiran. Pertama, dari sisi urutan kejadian peristiwa terlihat bahwa respon pemerintah muncul setelah desakan domestik dari kelompok Islam merebak. Kedua, *worldview* dan peran institusi Islam menonjol dalam hal ini. Ketiga, dari area implementasi, kontribusi institusi Islam juga terlihat kuat.

Tekanan Institusi Islam dan Respon Pemerintah

Kalau kita cermati dari urutan waktu kejadian kemunculan krisis Rohingya dan respon serta tekanan muslim Indonesia, maka kita melihat bahwa sikap pemerintah tidak bisa dilepaskan sebagai respon terhadap tuntutan domestik tersebut. Mendengar krisis Rohingya, masyarakat Indonesia terutama kaum muslim bereaksi memberi respon. Institusi- institusi Islam juga berperan. Organisasi Islam, partai Islam, media Islam, pesantren, dan ulama- intelektual (tokoh) terlibat.

Mereka melakukan aksi kemanusiaan dengan menyosialisasikan krisis dan menggalang solidaritas serta mendesak respon pemerintah terhadap krisis Rohingya. Hal itu diartikulasikan melalui pernyataan sikap hingga aksi demonstrasi di hampir

---

dengan penghormatan penuh pada prinsip- prinsip kemanusiaan. Lihat International Federation of Red Cross and Rred Crescent Societies dalam http://www.ifrc.org/en/get-involved/learning/opportunities/humanitarian-diplomacy/
Atau Larry Minear and Hazel Smith(eds), *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft* (Tokyo,
United Nations Press: 2007) atau Philippe Regnier, The Emerging Concept of Humanitarian Diplomacy: Identification of a Community of Practice and Prospects for International Recognition dalam *International Review of the Red Cross*, Volume 93 Number 884 December 2011.

seluruh provinsi di Indonesia. Langkah tersebut ditempuh untuk mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah strategis untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya. Mereka menganggap ada upaya pembantaian Etnis Rohingya dalam konflik tersebut yang dilakukan oleh Etnis Arakan dan pemerintah Myanmar.[134] Mereka juga meminta agar Indonesia tidak boleh tinggal diam menyikapi pembantaian terhadap kaum minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Jalur diplomasi harus diambil pemerintah Indonesia, agar kasus ini tidak semakin meluas lagi dan memakan lebih banyak korban jiwa.[135] Organisasi NU sebagai ormas Islam terbesar meminta pemerintah memberi dukungan terhadap nasib muslim Rohingnya di Myamar.[136] NU juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan upaya-upaya diplomatis dalam penyelesaain derita berkepanjangan komunitas Muslim Rohingya. PBNU bahkan SBY mengambil inisiatif untuk menolong dan membantu etnis Rohingnya yang makin memprihatinkan dari bahaya pembersihan etnis.[137]

Sikap Muhamamdiyah juga senada dengan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas untuk mengecam konflik etnis yang membuat etnis Rohingya menjadi korban. Harapan agar pemerintah Indonesia turut serta aktif

---

[134]"Muslim Rohingya Ditindas, Inilah Sikap MUI," Republika Online, 25 Juli 2012, diakses pada 19 Juni 2014.

1.2 [135]" Menghentikan Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar" Voice of Indonesia siaran luar negeri RRI. 3 Agustus 2013. (diakses pada 19 Juni 2014)

[136]http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,38956-lang,id-c,nasional-t,PBNU+Minta+Pemerintah+Dukung+Muslim+Rohingya-.phpx diakses 28-10-2015 jam 10.52.

2.1 [137] PBNU: Presiden Mesti Ambil Inisiatif Bantu Rohingnya, Senin, 30 Juli 2012 - 10:36 WIB http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/07/30/61192/pbnu-presiden-mesti-ambil-inisiatif-bantu-rohingnya.html diakses 17 Oktober 2015

menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga warga Rohingya bisa merasakan kedamaian dan bisa hidup berdampingan dengan warga Myanmar lainya juga diserukan Muhammadiyah di Surabaya[138]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendesak pemerintah SBY dapat menolong kaum Muslim Rohingya..[139] Organisasi Islam lainnya, Persatuan Islam (Persis) juga melakukan aksi solidaritas untuk muslim Rohingya dengan mendesak pemerintah agar mengambil sikap terhadap aksi pembantaian Umat Islam Rohingya di Myanmar yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa disana.[140] Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyatakan bahwa sebagai seorang muslim yang besar, kepemimpinan di Indonesia seharusnya bisa mempengaruhi kebijakan bilateral negara lain dengan kekuatan diplomatiknya. Aksi massa ini juga dikerahkan ke arah Istana Negara guna menuntut pemerintah agar tidak diam diri atas kesengsaraan dan derita tak berkesudahan muslim Rohingya. HTI juga memobilisir aktifis mereka di berbagai kota di Indonesia seperti Aceh dan Makasar. Bahkan gerakan massa HTI ini siap mengirimkan tenaga langsung ke Myanmar.[141]

Selain itu sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) juga berkumpul di Bunderan Hotel Indonesia (HI) dan bergerak menuju Kedubes Myanmar di Jalan Agus Salim, kantor PBB di Jl. MH. Thamrin, dan

---

[138]http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/1561/ramadhanholic-dan-aksi-solidaritas-bagi-muslimrohingya-pdm-surabaya.html (diakses pada tanggal 17 Oktober 2015)

[139]http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/22/mlnbuo-mui-harapkan-sby-tolong-muslim-rohingya. (diakses pada tanggal 26 januari 2015)

3.1 [140] Aksi Solidaritas Persis Bandung Untuk Muslim Rohingya, Senin, 06/08/2012 02:23:03 http://www.suara-islam.com/read/index/5096/Aksi-Solidaritas-Persis-Bandung-Untuk-Muslim-Rohingya diakses 17 Oktober 2015

[141]http://www.republika.co.id/berita/internasional/tragedy-rohingya/12/08/01m825d3-hti-akan-gelar-aksi-besar-untuk-rohingya. (diakses pada tanggal 26 Januari 2015)

Kedubes Suriah di kawasan Rasunan Said, Jakarta. FUI mengecam keras atas kebrutalan Rezim Suriah Basyar Asad dan Pemerintah Myanmar yang membantai umat Islam Rohingya secara keji.[142] Bahkan Front Pembela Islam (FPI) menyatakan mendapat visa untuk berjihad membantu muslim rohingya.

Sikap organisasi- organisasi Islam tersebut diikuti partai- partai Islam. Partai Islam juga mendesak pemerintah bersikap terhadap krisis kemanusiaan Rohingya. PKS[143], PPP,[144] PKB[145], dan PAN.[146] Kombinasi desakan dari ormas dan partai Islam ini tidak bisa dinafikan sebagai *domestic setting* bagi munculnya sikap pemerintah.

Terhadap desakan masyarakat agar pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait konflik yang melibatkan Etnis Rohingya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirya menyampaikan sikap pemerintah pada Sabtu 4 Agustus 2012 sore di Cikeas Bogor Jawa Barat.[147] Bahkan karena sering disebut tak responsif menanggapi konflik Rohingya di Myanmar, Presiden SBY kemudian menjawab dalam Pidato Kenegaraan di Hari Ulang Tahun ke-67 Kemerdekaan Republik Indonesia di depan sidang bersama DPR dan DPD pada 15 Agustus 2012.[148] Menurut SBY, pemerintah bukan hanya prihatin, melainkan juga telah, sedang, dan terus

---

[142] http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/14/19882/fpi-mendapat-visa-untuk-berjihad-bantu-muslim-rohingya/#sthash.hf3doITl.dpbs diakses 17 Oktober 2015

[143] http://www.salam-online.com/2012/07/jusuf-kalla-dan-pks-minta-pemerintah-indonesia-tidak-diam-dalam-masalah-muslim-rohingya.html diakses 28-10-2015

[144] http://www.antarajatim.com/lihat/berita/92400/ppp-harapkan-tetangga-myanmar-tampung-pengungsi-rohingya diakses 28-10-2015

[145] http://m.tribunnews.com/nasional/2012/08/05/pkb-mengutuk-keras-pembantaian-muslim-rohingya diakses 28-10-2015

[146] http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/28/m7un2w-kasus-rohingnya-bukti-barat-tak-adil-pada-islam atau http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/28/presiden-sby-diminta-selamatkan-muslim-rohingya diakses 28-10-2015

[147] http://www.demokrat.or.id/2012/08/indonesia-terus-lakukan-diplomasi-untuk-selesaikan-kasus-rohingya/ diakses 28-10-2015

[148] http://www.tribunnews.com/nasional/2012/08/16/sby-jawab-keraguan-soal-rohingya-lewat-surat

melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk penyelesaian kasus etnis Rohingya. Presiden SBY berharap rakyat Indonesia mengetahui apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Presiden juga mengirim surat kepada Presiden Myanmar Thein Sein, yang mengungkapkan harapan Indonesia kepada pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan sebaik-baiknya.[149] Pemerintah Indonesia juga mengusulkan kepada PBB dan Myanmar untuk mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Harapan Pemerintah OKI, PBB, ASEAN, tentu juga Indonesia, bersama Myanmar bisa kerja sama untuk mencari solusi yang baik. Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahwa peran pemerintah Indonesia dalam konflik etnis di negara bagian Rakhine, Myanmar, khususnya untuk terus mendorong pemerintah Myanmar agar memperhatikan etnis Muslim Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan.[150] Melalui Menteri Luar Negeri, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi untuk mendorong rekonsiliasi nasional dan penyelesaian konflik di Myanmar yang melibatkan Etnis Rohingya dengan menemui Menteri Luar Negeri Myanmar, Wunna Maung Lwin, pada tanggal 7 Agustus 2012 di Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Marty menganjurkan agar Myanmar membuka dan memberi akses bagi bantuan kemanusiaan dan OKI untuk meninjau situasi faktual pasca konflik di Negara Bagian Rakhine. Anjuran ini

[149]http://www.BandarLampungnews-Presiden-SBY-Surati-Presiden-Myanmar-Terkait-Rohingya-html. (Diunduh pada tanggal 1 febuari 2015)

[150]"Menlu: Kasus Rohingya Adalah Isu Kemanusiaan," VIVA News, 6 Agustus 2012, diakses pada 19 Juni 2014.

ditindak lanjuti oleh Pemerintah Myanmar dengan membuka tapal batasnya bagi bantuan-bantuan asing dan OKI.[151]

Sebagai bentuk komitmennya, Indonesia juga memberikan bantuan *capacity building*, termasuk di dalamnya *sharing* dan bertukar pandangan serta pelatihan bagi beberapa elemen masyarakat sipil di Myanmar, antara lain; Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum, Penasehat Presiden dan Lembaga Swadaya di Myanmar dalam melanjutkan proses transformasi politik dalam rangka demokratisasi dan rekonsiliasi nasionalnya. Langkah selanjutnya Kementerian Luar Negeri Indonesia juga tengah menyusun 'Blue Book' 2013-2015 yang akan menjadi panduan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan Myanmar di empat bidang, yakni: demokratisasi, rekonsiliasi nasional, good governance, dan HAM, serta pembangunan sosial ekonomi.

Di ranah regional, atas usul dan inisiatif Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 17 Agustus 2012 telah menyepakati pernyataan bersama ASEAN dalam menyikapi perkembangan terakhir di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Pernyataan bersama tersebut disepakati setelah Menteri Luar Negeri RI berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Luar Negeri Myanmar sebelumnya di Myanmar. Pernyataan tersebut terangkum dalam 4 poin.[152] Secara garis besar, dalam pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri ASEAN mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar untuk mengembalikan situasi yang kondusif

[151] "Myanmar May Allow Rakhine Probe," JakartaGlobe, 8 Agustus 2012. Lihat pula Paparan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri, 10 Oktober 2012.

[152] Statement of ASEAN Foreign Ministers on the Recent Developments in the Rakhine State, Myanmar, Phnom Penh, Kamboja, 17 Agustus 2012.

khususnya mengatasi situasi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar. Negara ASEAN senantiasa siap atas permintaan pemerintah Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar untuk mengatasi situasi di Rakhine.

Indonesia juga turut mengangkat wacana mengenai etnis rohingya melalui kerangka multilateral. Ini dapat dilihat dalam upaya Marty Natalegawa yang mendorong OKI untuk tetapkan agenda dan langkah konkrit guna menyelesaikan permasalahan umat secara umum, dan menempuh tindakan-tindakan konstruktif terhadap Etnis Rohingya secara khusus saat berlangsungnya Pertemuan ke-4 Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Mekkah pada bulan Agustus 2012. Dalam konteks ini, terkait dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam diplomasi bilateral antara Menteri Luar Negeri Myanmar dan Menteri Luar Negeri Indonesia mengenai dibukanya akses oleh pemerintah Myanmar bagi OKI untuk meninjau langsung kondisi Etnis Rohingya; Marty Natalegawa meminta OKI untuk melakukan kunjungan ke Myanmar, terutama sekali Rakhine agar dapat memahami situasi sebenarnya, khususnya kebutuhan bantuan kemanusiaan yang diperlukan oleh Etnis Muslim Rohingya. Sebagai tanggapan atas dorongan ini, negara-negara anggota OKI kemudian menyatakan sikap; mengutuk kekerasan yang terjadi di Rakhine yang melibatkan Etnis Rohingya. Lebih jauh, OKI memutuskan untuk; mengirimkan delegasi untuk memantau langsung kondisi faktual di Rakhine; memberikan bantuan dana untuk mendukung proses demokratisasi di Myanmar.[153]

[153] "Islamic Body to take Rohingya Issue to United Nations," Democratic Voice of Burma, 16 Agustus 2012.

Selain langkah diplomatik, pemerintah Indonesia juga memberi bantuan kepada muslim Rohingya di Myanmar salah satunya pemberian dana sebesar US $ 1 juta dolar.[154] Secara khusus, pemerintah Myanmar yang diwakili Chief Minister Rakhine U Maung Maung Ohn menyampaikan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang telah terlibat dalam proses penyelesaian konflik komunal di Rakhine melalui pendekatan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia terus mengedepankan pendekatan keterlibatan konstruktif terhadap Myanmar dengan berbagi pengalaman serta memberikan bantuan teknis dan nonteknis.[155] Ia juga menyampaikan keinginan untuk bisa belajar dari pengalaman Pemerintah Indonesia, yang dianggap sukses dalam mengelola kehidupan masyarakat yang harmonis.[156]

Worldview dan Peran Institusi Islam

Bagaimana cara pandang para institusi Islam terhadap krisis kemanusiaan Rohingya ? Pandangan mereka sendiri bisa diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, beberapa institusi Islam memandang bahwa apa yang terjadi adalah kezaliman dan diskriminasi terhadap muslim Rohingya. [157] Ada saudara muslim yang teraniaya dan oleh karenanya mereka merasa ada kewajiban agama untuk membantu

[154] *Tempo*, Rabu, 10 Desember 2014
[155] http://www.Indonesia-Bangun-Sekolah-Rohingya-diMyanmar-dunia-Tempo.co.html. (diunduh tanggal 1 januari 2015)
[156] http://www.vivanews-Myanmar–Ingin-Belajar-Penyelesaian-Konflik-dari-Indonesia.htm. (diakses tanggal 30 januari 2015)
[157]http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,dtail-ids,44-id,39010-lang,id-c,nasional t,PBNU+Desak+Presiden+SBY+bantu+Rohingya-,Phpx

saudara muslim yang membutuhkan pertolongan. Artinya mereka melihat ada persoalan agama sehingga muncul solidaritas keagamaann dalam tindakan mereka.[158]

Di lain pihak ada yang melihatnya dari aspek kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan lah yang memaksa mereka untuk merasa terpanggil dalam membantu dengan alasan kemanusiaan ini. Artinya, solidaritas kemanusiaan lah yang lebih ditonjolkan.[159]

Yang perlu dicermati dalam konteks ini adalah aktornya, bahwa kedua kelompok adalah aktor- aktor Islam. Perbedaan keduanya bukan mengurangi atau bahkan menafikan peran Islam, namun justru menandakan "ikhtilaf" yang menunjukkan kekayaan khazanah. Diakui sebagaimana studi Marie Juul Petersen misalnya, ia membedakan dua tipe *faith based organiations* (FBOs) Islam yaitu yang berorientasi ummat dan kemanusiaan ('umma-oriented' organisations and 'humanity-oriented' ones).[160] Ada aktor kemanusiaan Islam yang selalu bergerak dalam bingkai formalisme Islam sementara ada yang dalam terminologi universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan lainnya.

---

[158]Untuk membaca alsan solidaritas keislaman ini lihat misalnya http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150520094352-106-54411/bantuan-untuk-rohingya-dari-warga-aceh-menggunung/ atau http://hizbut-tahrir.or.id/2015/05/19/hizbut-tahrir-indonesia-hti-buka-donasi-peduli-rohingya/ atau http://mirajnews.com/id/artikel/opini/kepedulian-umat-untuk-rohingya-lampaui-nurani-pemerintah/ atau

[159] Lihat misalnya Diskusi Publik #SaveRohingya: Momentum Indonesia Menegakkan Kemanusiaan Global di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jum'at (22/5) http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,59711-lang,id-c,nasional-t,Kiai+Masdar++Tragedi+Rohingya+Akibat+Ketidakadilan+Global-.phpx atau http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/05/23/nost78-ansor-jatim-putuskan-hubungan-dengan-myanmar atau http://khazanah.topmetro.co/2015/05/imigran-rohingya-bukan-masalah-agama-tapi-kewarganegaraan.html atau http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150520_trensosial_warga_bantu_rohingya

[160] Marie Juul Petersen, *For humanity or for the umma? Ideologies of aid in four transnational Muslim NGOs* (2011) diakses dari http://www.diis.dk/graphics/_staff/mape/marie%20juul%20petersen%20%20for%20humanity%20or%20for%20the%20umma%20.pdf at 10 February 2013

Dalam spektrum yang lebih luas, karakter dan kecenderungan formalistik dan substansialistik dalam kajian Islam di Indonesia memang juga diakui ada. Meminjam pemikiran KH Achmad Sidiq, ulama penggali dan perumus khittah Nahdlatul Ulama, selain persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah) dan persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathaniyah/ nasionalisme), persaudaraan sesama manusia (ukhuwah basyariyah/ humanitarianisme) dalam Islam juga sangat ditekankan.[161] Artinya, ketika alasan yang dimunculkan adalah kemanusiaan, maka bukan berarti itu tidak Islami atau harus dipertentangkan dengan Islam. Dalam perspektif Islam, Tuhan memang menghargai dan memuliakan manusia.[162]

Di ranah peran, selain di tingkat domestik dengan upaya mempengaruhi politik luar negeri, lembaga- lembaga Islam juga melakukan aksi kemanusiaan ke Rohingya. Dhompet Dhuafa (DD) misalnya melakukan aksi serupa dengan menggalang bantuan dan dana untuk meringankan beban derita komunitas Rohingya dan memberikan dana guna membantu mereka. DD menyerukan agar perlindungan minoritas sungguh diberikan dan pembangunan kampung yang rusak bisa dilakukan.[163] Langkah yang sama juga dilakukan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah NU (Lazisnu), Muhammadiyah (Lazismu) dan lainnya.

---

[161] Lihat KH Achmad Siddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista, 2005) atau Lajnah Bahtsul Masail PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)* (Surabaya: Khalista, 2004).

[162]Lihat misalnya penjelasan panjang lebar tentang hal ini dalam Ameur Zemmali, *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan, 2012) atau lihat penjelasannya dalam Abdul Muhaimin, *Pandangan Islam tentang Perlindungan Terhadap Kelompok Marjinal dan Korban Konflik: Membangun Kesadaran Kemanusiaan Berbasis Pesantren* (Yogyakarta:Paper dalam International Workshop on Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeas Asia (held by ICRC dan UMY June 26-27, 2013.

[163] http://www.dompetdhuafa.org/bantu-minoritas-muslim-rohingya/.(diakses pada tanggal 26 januari 2015)

Terkait imigran yang terlunta di laut tahun 2015, misalnya PWNU Aceh menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti keinginan PBNU yang hendak menampung ribuan pengungsi asal Myanmar itu di pesantren jika pemerintah mengizinkan. Penempatan di pesantren, menurutnya, akan memudahkan mereka untuk menjalankan ajaran syariat secara baik juga agar mendapat pengetahuan agama dan umum, terutama terkait dengan bahasa Indonesia.[164] Yang juga menarik, Muhammadiyah mengingatkan pemerintah untuk tidak mencampakkan pengungsi Rohingya dan jika perlu, pemerintah menyediakan sebuah pulau khusus bagi mereka.[165] Ormas dan partai Islam yang lain juga berpartisipasi aktif membantu muslim Rohingya melalui bantuan yang dikirim ke Myanmar maupun di dalam negeri Indonesia.

Peran aktif dalam aksi kemanusiaan ini bisa kita maknai sebagai partisipasi dalam implementasi politik luar negeri Indonesia. Presiden SBY sendiri dalam pidatonya juga mengapresiasi solidaritas dan bantuan dari komponen masyarakat ini.[166] Artinya, di ranah implementasi mereka diakui membantu diplomasi pemerintah. Faktor Islam ini juga bisa dilihat dalam kasus Doddy C Hidayat, seorang relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menghadapi berbagai kesulitan untuk masuk ke Myanmar namun akhirnya berhasil memberikan bantuan salah satunya

[164]http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61133-lang,id-c,nasional-t,Salurkan+Bantuan++NU+Aceh+Siap+Pesantrenkan+Pengungsi+Rohingya-.phpx diakses 28-10-2015

[165] http://nasional.news.viva.co.id/news/read/635992-muhammadiyah--pinjamkan-pulau-bagi-rohingya diakses 28-10-2015

[166]http://www.demokrat.or.id/2012/08/indonesia-terus-lakukan-diplomasi-untuk-selesaikan-kasus-rohingya/ diakses 28-10-2015

berkat bantuan seorang ulama.[167] Bahkan ada organisasi Islam dengan jaringannya lebih dahulu bisa memperoleh *humanitarian space* ketika blokade kemanusiaan masih terjadi. Ini artinya mereka menjadi *fasilitating agent* bagi bantuan kemanusiaan Indonesia.

Penutup: PLNRI "tidak Islami" ?

Paparan di atas menunjukkan bahwa Islam menjadi faktor penting penting dalam politik luar negeri Indonesia. Aktifitas mereka melakukan diplomasi kemanusiaan hingga menyampaikan tuntutan dan tekanan kepada pemerintah serta kemunculan respon pemerintah terhadapnya menjadi bukti. Selain itu partisipasi mereka dalam memberi bantuan kemanusiaan juga tidak bisa diabaikan.

Meski pemerintah menyebut krisis Rohingya sebagai persoalan kemanusiaan dan konflik antar etnis (bukan antaragama), serta secara formal tidak menyebut alasan Islam dalam politik luar negerinya terhadap masalah Rohingya, hal itu bukan berarti Islam tidak hadir dalam politik luar negeri Indonesia. Itu juga bukan berarti politik luar negeri Indonesia tidak islami sebagaimana pandangan peneliti sebelumnya.

Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar sejak lama lebih menginginkan agar nilai-nilai universal dari Islam itu masuk di negara, kemudian dikemas di dalam sebuah ideologi negara dan konstitusi yang melindungi semua agama tanpa harus secara formal berlabel Islam. Konsep ini sudah berjalan lama di kalangan NU tetapi baru mendapat bentuk ketika Muktamar NU ke-27 di Situbondo.

[167] http://news.detik.com/berita/2008108/kisah-relawan-act-menembus-pengungsi-rohingya-lewat-bantuan-ulama diakses 28-10-2015

Hal itu karena yang digunakan oleh NU dalam hubungan agama dan negara, yakni bukan hubungan *harfiah tathbiqiyah* (formal dan ekslusif) tetapi hubungan yang *dzimmiyah maknawiyah limashalihil ummah*.[168] Bahkan KH Ahmad Siddiq menyatakan bahwa penerimaan Pancasila bukanlah penerimaan taktis dan politis melainkan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i menurut ajaran Nabi Muhammad.[169] Karena pemikiran *dzimmiyah maknawiyah* tadi bisa dikemukakan pada sebuah negara yang beraneka ragam bahasa dan agamanya. Dalam khutbah iftitah pada Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, Rais 'Aam PBNU KH Sahal Mahfuz juga menegaskan kembali bahwa NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealiasikan institusi. NKRI dengan dasar Pancasila juga sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia.[170] Organisasi Islam mainstream lainnya juga tampaknya memiliki pandangan senada.

Paparan tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan alasan Islam bahkan dalam politik luar negeri Indonesia terhadap kasus- kasus yang berdimensi Islam tidak menjadi persoalan bagi sebagian besar muslim Indonesia. Selagi aspirasinya tersalur, maka tanpa "embel- embel" Islam pun, politik luar negeri itu sudah dinilai Islami. Inilah politik "garam" dan bukan "gincu", substansi dan bukan simbol/ bentuk yang lebih dipentingkan mereka.

---

[168] Hasyim Muzadi, Memperkuat NU Memperkuat NKRI dalam Majalah NU Aula No. 4 Tahun XXXIII April 2011 halaman 34-39.
[169] Ibid., h. 39.
[170] Majalah NU Aula Nomor 03 tahun XXXII Maret 2010 halaman 13-16.

Daftar Pustaka

Buku

Ayoob, M. 2000. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World* (Michigan: University of Michigan)

Dawisha, Adeed. *Islam in Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983)

Fox, Jonathan and Shmuel Shandler. 2004. *Bringing Religion Into International Relations* (New York: Palgrave Macmillan)

Kegley Jr., Charles W. And Eugene R. Wittkopf. 1997. *World Politics: Trend and Transformation 6th edition* (New York: St. Martin's Press)

Lajnah Bahtsul Masail PBNU, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)* (Surabaya: Khalista, 2004)

Leifer, Michael. 1983. Islamic Factor in Indonesia's Foreign Policy: A Case of Functional Ambiguity dalam

Minear, Larry and Smith, Hazel (eds.) 2007. *Humanitarian Diplomacy: Practitioners and Their Craft* (Tokyo:United Nations Press)

Perwita, Anak Agung Banyu, 2007. *Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond* (Copenhagen: NIAS)

Siddiq, Achmad KH. 2005. *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista)

Sukma, Rizal. 2003. *Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and Dilemma of Dual Identity* (London: Routledge Curzon)

Suryadinata, Leo. 1997. *Indonesia's Foreign Policy Under Suharto: Aspiring to International Leadership* (Singapore: Times Academic Press)

----------. 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 1998).

Wicaksana, I. G. W. 2012. *Islam and Indonesia's Foreign Policy, with Special Focus on Jakarta-Islamabad Relations* (University of Western Australia, 2012).

Wirajuda, Hasan. 2014. *The Impact of Democratisation on Indonesia's Foreign Policy: Regional Cooperation, Promotion of Political Values, and Conflict Management* (The London School of Economics and Political

Zemmali, Ameur. 2012. *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan)

Jurnal dan Laporan

Abd. Rahman, Suranta. 2007. Diplomasi RI di Mesir dan Negara- negara Arab Tahun 1947 dalam *Wacana*, Vol. 2, Oktober 2007.

Anwar, Dewi Fortuna. 2010a. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", dalam *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanitites* Vol. 3, (2010)

----------*2010b.* , The Impact of Domestic and Asian Regional Changes on Indonesian Foreign Policy dalam Southeast Asian Affairs 2010.

Jolliffe, Kim.2014. *Ethnic Conflict and Social Services in Myanmar's Contested Regions* (Asia Foundations, June 2014)

Haynes, Jeffrey, Religion and Foreign Policy Making in the USA, India and Iran: Towards a Research Agenda dalam Third World Quarterly Vol. 29, No. 1 (2008)

Hukil, Roomana and Shaunik, Nayantara. 2013. *The Rohingyas of Myanmar* (New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies, Issue Brief 222, June 2013),

Henderson, Erol A. 1997. Culture or Contiguity: Ethnic Conflict, the Similarity of States, and the Onsetof War, 1820-1989 dalam Journal of Conflict Resolution, 41 (5), October 1997

----------, The Democratic Peace Through the Lens of Culture 1820-1989 dalam *International Studies Quarterly*, 42 (3), September 1989

Panggabean, Rizal. 2012. *Resolusi Konflik Sebagai "Counter-Radicalization"* dalam Institute of International Studies UGM, August 2012, Volume 9, Issue 3, Commentaries.

Philippe Regnier, Philippe. 2011. The Emerging Concept of Humanitarian Diplomacy: Identification of a Community of Practice and Prospects for International Recognition dalam *International Review of the Red Cross*, Volume 93 Number 884 December 2011.

Suryadinata, Leo.2009, "Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East, and Bosnia" dalam *Asian Survey* Vol. 35, No. 3 (2009)

Szep, Jason, Marshall, Andrew C. and Reuters Staff. 2012. *Ethnic War in Myanmar* (2013 Sopa Awards Nomination For Reporting Breaking News: Reuters, June 9 & November 11, 2012)

Wicaksana, IG Wahyu. *Islam Dalam Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Malaysia*

----------, Islamic Identity, Elite Interest and Foreign Policy in Indonesia dalam *Indonesian Journal of Social Sciences* Volume 4 Nomer 2.

Majalah

Hasyim Muzadi, Memperkuat NU Memperkuat NKRI dalam Majalah NU Aula No. 4 Tahun XXXIII April 2011 halaman 34-39.

Majalah NU Aula Nomor 03 tahun XXXII Maret 2010 halaman 13-16.

Tempo, Rabu, 10 Desember 2014

Koran

Andi Purwono, Urgensi KTT ASEAN, Harian Suara Merdeka, 15 November 2011

"Myanmar May Allow Rakhine Probe," JakartaGlobe, 8 Agustus 2012.

Makalah

Muhaimin, Abdul. *Pandangan Islam tentang Perlindungan Terhadap Kelompok Marjinal dan Korban Konflik: Membangun Kesadaran Kemanusiaan Berbasis Pesantren* (Yogyakarta:Paper dalam International Workshop on Islam and Humanitarian Affairs: Views and Experiences from Southeas Asia (held by ICRC dan UMY June 26-27, 2013.

Internet

Hunter, Shireen. Religion and International Affairs: From Neglect to Over-Emphasis. Written on April 7, 2010 – 9:32 pm Artikel bisa dilihat di http://www.e-

ir.info/2010/04/07/religion-and-international-affairs-from-neglect-to-over-emphasis/ Diakses 14 Mei 2013 jam 16.36 WIB.

"Muslim Rohingya Ditindas, Inilah Sikap MUI," Republika Online, 25 Juli 2012, diakses pada 19 Juni 2014.

1. " Menghentikan Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya di Myanmar" Voice of Indonesia siaran luar negeri RRI. 3 Agustus 2013. (diakses pada 19 Juni 2014)

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,38956-lang,id-c,nasional-t,PBNU+Minta+Pemerintah+Dukung+Muslim+Rohingya-.phpx diakses 28-10-2015 jam 10.52.

2. PBNU: Presiden Mesti Ambil Inisiatif Bantu Rohingnya, Senin, 30 Juli 2012 - 10:36 WIB pbnu-presiden-mesti-ambil-inisiatif-bantu-rohingnya.html diakses 17 Oktober 2015

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/07/30/61192/

http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/1561/ramadhanholic-dan-aksi-solidaritas-bagi-muslimrohingya-pdm-surabaya.html (diakses pada tanggal 17 Oktober 2015)

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/22/mlnbuo-mui-harapkan-sby-tolong-muslim-rohingya. (diakses pada tanggal 26 januari 2015)

http://www.suara-islam.com/read/index/5096/Aksi-Solidaritas-Persis-Bandung-Untuk-Muslim-Rohingya diakses 17 Oktober 2015

http://www.republika.co.id/berita/internasional/tragedy-rohingya/12/08/01m825d3-hti-akan-gelar-aksi-besar-untuk-rohingya. (diakses pada tanggal 26 Januari 2015)

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/14/19882/fpi-mendapat-visa-untuk-berjihad-bantu-muslim-rohingya/#sthash.hf3doITl.dpbs diakses 17 Oktober 2015

http://www.salam-online.com/2012/07/jusuf-kalla-dan-pks-minta-pemerintah-indonesia-tidak-diam-dalam-masalah-muslim-rohingya.html diakses 28-10-2015

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/92400/ppp-harapkan-tetangga-myanmar-tampung-pengungsi-rohingya diakses 28-10-2015

http://m.tribunnews.com/nasional/2012/08/05/pkb-mengutuk-keras-pembantaian-muslim-rohingya diakses 28-10-2015

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/07/28/m7un2w-kasus-rohingnya-bukti-barat-tak-adil-pada-islam

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/07/28/presiden-sby-diminta-selamatkan-muslim-rohingya diakses 28-10-2015

http://www.demokrat.or.id/2012/08/indonesia-terus-lakukan-diplomasi-untuk-selesaikan-kasus-rohingya/ diakses 28-10-2015

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/08/16/sby-jawab-keraguan-soal-rohingya-lewat-surat

http://www.BandarLampungnews-Presiden-SBY-Surati-Presiden-Myanmar-Terkait-Rohingya-html. (Diunduh pada tanggal 1 febuari 2015)

"Menlu: Kasus Rohingya Adalah Isu Kemanusiaan," VIVA News, 6 Agustus 2012, diakses pada 19 Juni 2014.

"Islamic Body to take Rohingya Issue to United Nations," Democratic Voice of Burma, 16 Agustus 2012.

http://www.Indonesia-Bangun-Sekolah-Rohingya-diMyanmar-dunia-Tempo.co.html. (diunduh tanggal 1 januari 2015)

http://www.vivanews-Myanmar–Ingin-Belajar-Penyelesaian-Konflik-dari-Indonesia.htm. (diakses tanggal 30 januari 2015)

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,dtail-ids,44-id,39010-lang,id-c,nasional t,PBNU+Desak+Presiden+SBY+bantu+Rohingya-,Phpx

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150520094352-106-54411/bantuan-untuk-rohingya-dari-warga-aceh-menggunung/

http://hizbut-tahrir.or.id/2015/05/19/hizbut-tahrir-indonesia-hti-buka-donasi-peduli-rohingya/ http://mirajnews.com/id/artikel/opini/kepedulian-umat-untuk-rohingya-lampaui-nurani-pemerintah/

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,59711-lang,id-c,nasional-t,Kiai+Masdar++Tragedi+Rohingya+Akibat+Ketidakadilan+Global-.phpx

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/05/23/nost78-ansor-jatim-putuskan-hubungan-dengan-myanmar

http://khazanah.topmetro.co/2015/05/imigran-rohingya-bukan-masalah-agama-tapi-kewarganegaraan.html atau

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150520_trensosial_warga_bantu_rohingya

Marie Juul Petersen, *For humanity or for the umma? Ideologies of aid in four transnational Muslim NGOs* (2011) diakses dari http://www.diis.dk/graphics/_staff/mape/marie%20juul%20petersen%20%20for%20humanity%20or%20for%20the%20umma%20.pdf at 10 February 2013

http://www.dompetdhuafa.org/bantu-minoritas-muslim-rohingya/.(diakses pada tanggal 26 januari 2015)

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,61133-lang,id-c,nasional-t,Salurkan+Bantuan++NU+Aceh+Siap+Pesantrenkan+Pengungsi+Rohingya-.phpx diakses 28-10-2015

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/635992-muhammadiyah--pinjamkan-pulau-bagi-rohingya diakses 28-10-2015

http://news.detik.com/berita/2008108/kisah-relawan-act-menembus-pengungsi-rohingya-lewat-bantuan-ulama diakses 28-10-2015

http://www.ifrc.org/en/get-involved/learning/opportunities/humanitarian-diplomacy/

MODERATE ISLAM, PANCASILA AND ASEAN

NAZARUDDIN NASUTION, M.A

Lecturer, International Relations Department

Faculty of Social and Political Sciences

Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta

It is an urgently need, in the framework of "ASEAN Community 2015 and Beyond", to observe two interesting topics, first about *Moderate Islam*, the terminology used in a number of muslim countries all over the world, and secondly about *Pancasila*, the philosophical foundation of Indonesia. More importantly, to link both topics to the issue of the implementation of "*ASEAN Community 2015*".

The terminology of Moderate Islam is inter-relatedwith the terminology of Radical Islam.In the Asian region, based on socio-cultural configuration, the prominent religions and faiths are Islam, Christianity (Catholic or Protestant), Hinduism, Buddhism and Confucianism. In South-East Asia alone, significant Muslim populations are found in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. In Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos and Cambodia most people practice Buddhism, while in the Philippines and Singapore, most are Christians.

Moderate Islam

What is the meaning of Moderate Islam? This word is very popular after the 9/11 Terrorist Attacks in New York and Washington. Moderate Islam is a terminology opposite to the terminology of Radical Islam. In South-East Asia,

particularly in the three Muslim majority countries, namely Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam there exists both the Moderate Islam and the Radical Islam. In East Java, Indonesia, the majority of Muslim first belong to traditionalism, which incorporates strong elements of Sufi mysticism and Javanese traditions. Traditionalists adhere to the Syafii (Shafi'i in Arabic) *mazhab* (school of jurisprudence) within Sunni Islam. The second one is modernism. Indonesian modernism is part of movement that began at the turn of the twentieth century, influenced by the ideas of Jamal al-din al-Afghani and Muhammad Abduh, with the air of purifying Islam from what were considered to be heterodox practices. Modernists are largely drawn from the urban population and professionals. (Rabasa, 2012). Who is a "true Muslim" and who is a "deviant Muslim" becomes a matter of determining social and political inclusion or being subjected to social ostracism. The debate is thus not about abstract issues of theology, but about the allocation of real power and status within the political order of Islamic society. (Means, 2009).

In the wake of the 9/11 tragedy, the world soon became very familiar with jargons such as *radical Islam, fundamentalist, extremist* and *terrorist*. It signifies the violent tragedy employed by its actors using Islamic jargon such as *jihad* (holy war) intended to the *kafirs* (infidel). In Indonesia, Neo-Fundamentalists/Radical Fundamentalists who prefer to Violence are, according to Rabasa*inter-alia*: MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) and Laskar Jihad, while in Malaysia: KKM (Kumpulan Militan Malaysia) and Jamaah Islamiyah. Those who belong to Conservative Fundamentalists prefer nonviolence are : Jamaah Tabligh and Darul Arqam. The action is very much intended toward civilians rather than waging war

within the real troop. Soon thereafter, the world is so informed that those who commit violence were called as *bad Muslims* to distinguish with those who prefer democratic means in their way of changing political and social circumstances into their own. Some scholars note that even though the events of violence virtually were huge but the actors and groupscommited to them are small minority compared with *the huge numbers of moderate Muslims* who prefer democratic means. Nahdlatul Ulama are belong to *Traditionalists,* PAS (Pan Malay Islamic Party) and Prosperous Juctice Party (Indonesia) are belong to *Islamist Modernists*, while Muhammadiyah are belong to *Liberalist Modernist*s. The reason is the radical Muslim network has been well established, whereas the moderate as the majority are *silent* (e.gEliraz 2004, Rabasa et.al 2007). The Rand Report on *The Muslims Wold After* 9/*11* concluded that the preexisting moderate traditions of Islam are being challenged by Islamic radicalism that has acquired a significant foothold in the region but remains a relatively small minority among the mass-based traditional and modernist Islamic groups and institutions of Southeast Asia.

The argument mentioned that moderate Muslim as silent majority is not quite appropriate. The moderate Muslim remains the majority in Indonesia ever since Islam gained followers. They established schools, charity institutions and groups of religious activities. NahdatulUlama (NU) and Muhammadiyah are the two main religious groups that consist of 35-40 million and 25-30 million members respectively (Fealy& Hooker 2006: 40-41). Outside of that, there are similar organizations that share similar ideologies and views on Islam such as Persis(Persatuan Islam/Islamic Union) which was founded by Haji Zamzam and Haji

Muhammad Yunus, that exist mainly in West and East Java and has official boards in nine provinces. It can be said that the Persis is a modernist organizations which is similar to Muhammadiyah to some extent. The other is NahdatulWathan (NW), which is a traditionalist organization founded by Muhammad Zainuddin Abdul Madjid in Lombok, West Nusa Tenggara. Emerging as the biggest organization in the province, NW focuses mainly on education, from elementary schools to higher education. Again, it can be said that NW shares some similarities with NU in some extent. In Indonesia, the effort of building moderate Muslim network cannot be separated with the government's support and at the same time the government's initiatives to hinder the threat of radical extremist which will not be successfully without the support of moderate Muslims. At this point in time when the world witnesses violent actions. It gives raise to the massive consolidation among civil society in Indonesia. It is not intended exclusively to the Muslims, but with the insertion of cross-cultural and religious sense to include other religious believers. This cannot be separated with the factors from within and without Indonesia which is one of them is the changing face of the global security signified by the threat of radical Islamist groups (Yudhiyansyah, 2012)

Angel Rabasa and other think tankers from RAND Corporation designed precise definitions of moderate Muslims along with the road map to connect those *moderate Islam institutions and Muslims* around the world (Rabasa et.al, 2007). Moderate and Liberal Muslims are those who prefer democracy, pluralism and human right within their ideals, whereas the radicals are those who prefer forces, intolerant and often with the tendency of using Islam in their violent action. This

conceptualization is very much dealt with the political atmosphere that concern on the security issues. Again, the massive bombings and violent attacks around the world employing Islamic jargon have featured those think tankers conceptualizations about moderation. The co-existence of Islam and democracy lay upon the principles such as freedom, tolerance and human right. It is "moderate Muslims" who differs themselves with the extremists that can be representative of Islam. The fact that the majority of Muslims in the world fit with the branch of "moderate Islam" signifies that Muslims eagerly combine their Islamic tenets with modern democratic values.

Fundamentalist Islam presents itself, on the one hand, as an intensified reaffirmation of faith in a transcendent God. But on the other hand, it is a militant ideology, demanding political action now.Islam must have power in this world. It is the true religion—the religion of God—and its truth is manifest in its power. When Muslims believed, they were powerful. Their power has been lost in modern times because true Islam has abandoned. But if Muslims now return to the original Islam, they can preserve and even restore their power.(Discovered the Network)

In Indonesia, degrees of Islamic observance range from orthodox forms of Islam practiced by the *santri*Muslims to the more diluted form known as Kejawen in parts of Java. A great many Indonesians are *abangan,* or non-practicing Muslims. The Republic emerged not exactly as a secular state, but not as a religiously-based state either (the national philosophy, Pancasila, or five principles, acknowledge belief in one God as a national principle but did not discriminate among the recognized religions-Islam, Catholic Christianity, Protestant Christianity, Hinduism, Buddhism and Confucianism). (Rabasa, 2012)

Politically, Islam in Indonesia is part of rich multi-cultural mix. Religious tolerance is seen as the cornerstone of relations between different faiths – and moderation is built into the country's constitutional framework. However, the advent of democracy coupled with the impact of the South-East Asian economic collapse in 1997, and the arrival of a tough new breed of Middle Eastern Islamic preachers, sowed the seeds of the current challenge to Indonesia's traditionally moderate form of Islam (Azra and Hudson, 2008)

Indonesian Islam is essentially a tolerant, moderate and "*middle way*" (ummahwasat) Islam, and differs significantly from the Islam found in the Middle East. In Indonesia, Islam is spread peacefully, and in forms which took account of diverse ethnic, cultural and social realities of the region. Further, the vast majority of Indonesian Muslims belong to moderate mainstream organizations such as the NahdatulUlama, Muhammadiyah and many other regional organizations throughout the country which support modernity and democracy, and oppose the establishment of an Islamic state. It is true that there are small and fringe groups of radical Muslim which have captured a lot of media attention, such as the Islamic Defence Front (FPI), the Jihad Troops (Laskar Jihad), the Council of Jihad Fighters (Majelis Mujahidin Indonesia) and the Party Liberations (Hisb al-Tahrir), but these groups, which are mainly led by non-native Muslim, have limited influenced in Indonesia as a whole (Azra, 2008).

Besides *religious conflicts* between *the Muslims and Christians* took placein Ambon and in Poso in the 2000s, a number of ethnic conflicts have also occurred in Indonesia. The form of clashes between one *ethnic group* and another ethnic group,

was happened between the Maduranese with the Dayaks in West Kalimantan in the 1990s. While conflicts among Muslims followers have also taken place, namely between *Sunni and Syiah* in Madura as well as between *Sunni and Ahmadiyah* in Banten, both in the 2000s.

From a socio-economic point of view, the cause for ethnic conflicts as well as for religious conflicts were motivated mainly by socio-economic causes rather than political or ideological causes. New inhabitants are relatively more economically prosperous than native inhabitants. These conflicts were triggered by the sentiment and the emotions of the native people to the new inhabitants which then instigatedby the radical elements of those groups. The communities have to be aware that those with a radical, fundamentalist or violent attitude in the community were the dominant elements who influenced the groups to raise the issues of *Suku, Agama, Ras* and *Antar Golongan* or SARA (ethnic, religion, race and social level). Based on one of the principle of Pancasila, "*the unity of Indonesia*",the Indonesian people preferred to settle down their disputes or differences by promoting "unity" instead of "separation" among those ethnic, religion, race and social groups. On top of that, since Indonesia is a state who respect law, then it is the responsibility of the authorities to implement law enforcement to create a harmony and stability in the community. It is unwise for the government or law enforcement institutions to enact *omission* instead of *law enforcement* for human rights' violations done by majority (dominant) groups toward minority groups or if there is tyranny from a minority group towards the majority group.

In connection with the recent changes in Indonesian foreign policy, the declaration of Indonesia's new identity as a democracy and moderate Islam country have attracted considerable attention. It is under President SusiloBambangYudhoyono, who won first direct presidential election in 2004, the new identity has begun. In his first foreign policy speech Yudhoyono introduced his metaphor "*navigating a turbulent ocean*" to describe the challenges facing Indonesian foreign policy. He also underlined the importance of Indonesia's international identity as "a country where *democracy, Islam and modernity* go hand in hand". (Nugraha, 2012).

Indonesia's two largest Islamic organizations – NahdlatulUlama (NU) and Muhammadiyah – have recently elected new leaders and executive board members for the 2015-2020 period through their *muktamar*(congresses) in Jombang, East Java, and Makassar, South Sulawesi, respectively. The NU reelected Said Aqil Siradj as its leader while MuhammadiyahchosedHaedarNashir as its new chairman in place of two-time chief Din Syamsuddin. Observers welcomed the election and reelection of the two figures, who they say will guide the two influential Muslim groups to overcome future challenges, notably the quest for shaping *moderate Islam* amid the global trend of radicalism. By shunning practical politics, both the NU and Muhammadiyah have managed to focus on addressing various national issues, raging from poverty to *religious intolerance*, and thereby maintain their relevance.Indonesian President Joko Widodo has urged the country's two biggest Islamic groups to continue their brand of moderate Islam, amid growing religious intolerance and radicalism. Mr Widodo, who spoke at the opening of the congresses

of the two groups, also paid tribute to their contributions in alleviating poverty.In one of its recommendations that wrapped up its congress, the NU asked the governments to review all legislation related to political life so as to promote ethics in politics. The call was made in response to recent Constitutional Court rulings that endorse the practice of building political dynastics rulings as an impediment to efforts to uphold morality and ethics in politics. Said Aqil promised after his reelection not to drag the NU into the political arena but instead focus on developing a democratic economy and education for the poor, " I don't have any political agenda. My agenda is the NU's, nothing else, " he said. "Therefore, we have to become the platform for nationhood,*the big protect the small* and *the small is in synergy with the big*," he said. He recalled that from the beginning, all groups in Indonesia embraced *the culture of harmony*, adding that he would help Muslims youths fight radical ideology. " We will make the NU a more *moderate* and *tolerant*jam'iyah (organization), which will be beneficial for NU members, the nation and the world," he said.

Islam Nusantara is Islam practiced in the context of Indonesian culture. There are many cultural practices that are Islamic, but at the same time, Indonesian. The core teachings of Islam are fixed; teachings about the nature of God, the prophecy and so on are the same here and in Egypt. But many practices differ from country to country. Islam adopts different tones in each place it develops. There is Arabic Islam, Turkish Islam, Afghanistan, Islam Nusantara. There is also Sufism, especially strong in Indonesia, India and Turkey. Some Sufism practices are Islamicized. NU, but also Muhammadiyah [the country's second-largest Muslim organization], represent Islam Nusantara. Most people, especially those from the NU, accept difference. This is

important. They disagree with Ahmadiyah, Shiites, Christians — but you have the right to live here. They are relatively tolerant. Is the promotion of Islam Nusantara a reaction to the increasing influence of Wahabiism, religious-based violence and conflicts in the Middle East? Islam Nusantara is different from transnational Islam. For a long time, the government has not carried out its obligation to protect its citizens. No matter what you think of their religion, the Ahmadiyah are citizens and need to be protected. The police have even forged links with some vigilante groups. When the late Abdurrahman Wahid, the country's fourth president and onetime NU chairman was president, NU systematically protected threatened churches. The Banser [NU militia] has protected churches [and] the Ahmadiyah community. Domestically, NahdlatulUlama, the largest Muslim organisation in the world, has been the most active and vocal proponent of religious acceptance.For example, GP Ansor, NU's youth wing, patrols churches on Christmas Eve to look out for any imminent terror threats.

Meanwhile, Muhammadiyah Congress' theme is: "Enlightenment Movement toward Progressive Indonesia". "The theme (of the Congress) is to revitalize the religious vision of Muhammadiyah, the Progressive Islam, "said the Muhammadiyah Chairman, Din Syamsuddin. Syamsuddin said, the Muhammadiyah founder KH Ahmad Dahlan had long initiated the enlightenment movement. Muhammadiyah, according to Syamsuddin, would want to keep such spirit. The Muhammadiah progressive Islamic movement is in line with the character and ideals of the Indonesian nation. Syamsuddin said, progressive Islam would lead to the fulfillment of progress of the people and the nation as mandated by the 1945 Constitution.

“Although not specifically the same, but Muhammadiyah wants to realize Indonesia which is advanced, fair, prosperous, sovereign and dignified, “he said. Muhammadiyah, Syamsuddin said was also responsible for the future of this nation. One important issue to be discussed in the congress is *Pancasila* as the state’s joint agreement and testimony (darul andi wa syahadah). "We want this issue to be resolved," said Din.

The new Muhammadiyah leader Haedar said that one of the keys to success in managing *harmony* in relations is communication and in order to reach that he would pay attention to the aegis extended by *the majority to minority* groups. Haeder said such construction should provide a platform for Indonesia to maintain *security and harmony* among various etnic groups. He further said that good *inter-ethnic relations* would be benefical in settling any conflict arising in a region. Efforts to mediate will be made to overcome conflict and localize information, thereby reducing skepticism by the internatonal world toward Indonesia, he said.

Members of the international community often wonder about *the silence* exhibited by the majority of moderate Muslim countries. This provides opportunity for Indonesia to step up and become the leader of this quiet group. A similar problem is faced in Indonesia, where many feel the latest outbreaks of *religious intolerance* compromise the nation’s national philosophical foundation, Pancasila, which proclaims peaceful coexistence.

In comparison, in Malaysia, Datuk Saifuddin Abdullah, the chief of the Global Movement of Moderates (GMM), said that Putrajaya’s two ministers in charge of religious affairs should take the lead and organise a joint dialogue as soon as possible

to address issues affecting *interfaith relations* in the country. He said that current *religious conflict* in Malaysia had already affected its international standing, seen in comments made by the UN Special Repporteur late last year. ”That is why interfaith dialogues should be mooted. We have to show that Malaysians are capable of discussing issues in a civil manner. ”*Interfaith dialogue* is not about trying to say one religion is better or the best, but for each other to listen and understand the other person’s perspective,” Saifuddin added.

Pancasila

Pancasila, pronounced Panchaseela, is the philosophical basis of the state. Pancasila consists of two Sanskrit words, “panca” meaning five and “sila” meaning principle. It comprises five inseparable and interrelated principles. They are: 1) Belief in the One and Only God; 2) Just and Civilized Humanity; 3) The Unity of Indonesia; 4) Democracy Guided By The Inner Wisdom in the Unanimity Arising Out Of Deliberations Amongst Representatives; 5) Social Justice for the Whole of the People Indonesia.

The philosophical basis of Indonesia, Pancasila, which are the "*Five Moral Principles*" of Indonesian life and society, embrace humanitarian ideals that are mutually interlinked and inseparable. In the words of President Soeharto, "Pancasila is the sole, basic principle of our life as a society, nation and state."

Draft Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 (hereinafter referred to as the 1945 Constitution) reflects a compromise between the Islamic groups and the Nationalists. The common point between the two parties are

bonded inthe third paragraph "In the grace of Allah Almighty and withinspired by the noble desire to be an independent nationalism". This paragraph reflects the view of the Nationalists group – advocated to be an independent nationalism, and the Muslims group--- which based on its struggle for the grace of God . (Latif , 2011) .

After 1945 and until the 1970s, some Muslim activists were still reluctant to accept, or even rejected, the very form of Indonesia-the idea of nationalism, and Pancasila as the ideology of the Indonesian state. Some, such as those participating in Darul Islam (DI), were involved in armed resistance againts the establishment of government in order to create an Islamic state. A number of activists engaged in a constitutional struggle to make Pancasila more Islamic and to fight for the re-inclusion of the seven words *"dengankewajibanmenjalankansyariat Islam kepadapemeluknya"* (with the obligaton for Muslims to carry out Islamic law), which were removed from the Jakarta Charter (Piagam Jakarta) on 18 August 1945, into the first of the five principles of Pancasila; *Ketuhanan Yang MahaEsa* (Believe in the One and only God). (Burhanudin and Dijk, 2013).

*Belief in the One and Only God,*reaffirms the Indonesian people's belief that God does exist. It also implies that the Indonesian people believe in life after death. It emphasizes that the pursuit of sacred values will lead the people to a better life in the hereafter. The principle is embodied in article 29, Section 1 of the 1945 Constitution and reads; "The state shall be based on belief in the One and Only God". "*Belief in the one and only God*, " which means every Indonesian citizen, no matter which religious denomination or faith they follow, should respect each other's belief for the sake of the harmony and peace of mankind. This Principle contains the precept of

religious tolerance and freedom of all to adhere to the religion or faith of his or her choice.

While Just and Civilized Humanity requires that human beings be treated with due regard to their dignity as God's creatures, it emphasizes that Indonesian people do not tolerate physical or spiritual oppression of human beings by their own people or by any nations."*Just and civilized humanity*, " which is closely identified with balancing fundamental individual human rights and freedoms with the individual's obligation toward society and state. This Principle highlights the idea that relationships within society and state be based on a just and civilized morality.

The Unity of Indonesia embodies the concept of nationalism, of love for one's nation and motherland. It envisages the need to always foster national unity and integrity. Pancasila nationalism demands that Indonesian avoid superiority feelings on ethnical grounds, for reasons of ancestry and color of the skin. In 1928, Indonesian youth pledged to have one country, one nation and one language, while the Indonesian coat of arms enshrines the symbol of "Bhinneka Tunggal Ika" which means "*unity in diversity*". Social differences in daily life should never affect national unity and integrity. Referring to this questions, President Soeharto once remarked; "What we should do is to have these differences blend us together in perfect harmony like the beautiful spectrum of the rainbow."

The principle *Democracy Guided by the inner Wisdom in the Unanimity Arising Out of Deliberations Amongst Representatives* reflected Pancasila democracy call for decision-making through deliberations, or musyawarah, to reach a consensus, or mufakat. It is democracy that lives up to the principles of Pancasila. This implies that

democratic right must always be exercised with a deep sense of responsibility to God Almighty according to one's own conviction and religious belief, with respect for humanitarian values of man's dignity and integrity, and with a view to preserving and strengthening national unity and the pursuit of social justice. "*Democracy,* " which within Pancasila connotes democracy in the formal sense and in the material sense as well. It is a democracy imbued with belief in the One, Supreme God, with the morality of a just and civilized humanity and directed toward the goal of social justice for the entire people. It is a democracy conceived in consonance with Indonesia's own traditional and social values, which emphasize consensus and imply not only political equality, but economic, social and cultural equality.

The fifth principle *Social Justice for the whole of the people of Indonesia* calls for the equitable spread of welfare to the entire population, not in a static but in a dynamic and progressive way. This means that all the country's natural resources and the national potentials should be utilized for the greatest possible good and happiness of the people. Social justice implies protection of the weak. But protection should not deny their work. On the contrary, they should work according to their abilities and fields of activity. Protection should prevent willful treatment by the strong and ensure the rule of justice. These are the sacred values of Pancasila which, as a cultural principle, should always be respected by every Indonesian because it is now the ideology of the state and the life philosophy of the Indonesian people."*Social justice,* " which contains the basic principle that in the common endeavor to attain a just and prosperous society, materially as well as spiritually, any form of exploitation of human beings is prohibited. This Principle points to the necessity to create conditions

whereby all groups of Indonesians have an equal and just opportunity to earn their livelihood and secure a life with human dignity.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is based upon Pancasila, also contains humanitarian precepts and basic principles of human rights. These principles have been incorporated into a number of national laws and regulations that serve to protect and promote the well-being of the Indonesian people. Moreover, it is also important to note that the 1945 Constitution has many principles that are similar to those contained in the 1948 Universal Declaration of Human Rights.

We have to relate the terminology of Moderate Muslim with those five principles of the Indonesian doctrine and national philosophy (Pancasila). Particularly the first, the second and the fourth principle of Pancasila namely *"Belief in the One and Only God". Just and Civilized Humanity" and "Democracy Guided by the Inner Wisdom in the Unanimity Arising Out of Deliberations Amongst Representatives"*.

Pancasila certainly reflects Indonesia's recognition of religion and God. The state upholds the rights of the believers of the six-state recognized religions to perform their "duties" according to their religion. The principle of "*Just and Civilized Humanity"* state that human beings are required to be treated with due regard to their dignity as God's creatures. It emphasizesthat the Indonesian people do not tolerate physical or spiritual oppression of human beings by their own people or by any nation. It is in line and also confirmed with the very important principle contained in the Universal Declarations of Human Rights (article 2) that : "Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any

kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status". The democratic right must always be exercised with a deep sense of responsibility to God Almighty according to one's own conviction and religious belief, with respect for humanitarian values of man's dignity and integrity, and with a view to preserving and strengthening national unity and the pursuit of social justice. Thirdly, the dividing line between Muslim moderates and radicals goes to fundamental question at the root of Indonesia's foundation as a nation: whether it should be a secular or an Islamic state. The June 1999 parliamentary elections gave the regular and moderate Muslim parties a large majority in the Parliament—the two largest secular parties, PDI-P and Golkar, received a combined vote of 57 percent. (Usindo, 1999). These results reinforced the perception of political analysts and Indonesian scholars that the majority of Indonesians do not support the establishment of an Islamic state. This was confirmed by the failure of the Islamic parties to gain parliamentary approval in 2002 of a measure establishing Islamic law-the so call Jakarta Charter. The measure was opposed not only by the secular parties but by the two major Muslim organizations, NahdlatulUlama and Muhammadiyah. (Rabasa, 2013)

Even though Indonesia is a majority-Muslim country, apparently there was almost no place for Islam and Indonesian mass-organizations in Indonesian diplomacy. This old paradigm of diplomacy that was called as the 'policy of ambiguity' has been changing significantly with the rise of Indonesia as the third largest democracy as well as the most populous Muslim Country inthe post-Soeharto period since 1998. The conduct of Indonesian public diplomacy through Interfaith

Dialogues is obvious since it includes mostly non-state actors. Generally those who play leading roles in such dialogues are leaders of the six-state recognized religion in Indonesia. In addition, a number of non-afiliated public intellectuals, and social activists have also been involved (Azra, 2014)

Rising intolerance toward religious minorities in Indonesia is a product of the spread of sunnitakfiri (extremist) ideologies, as well as the increasing activism of Sunni hardliners in Indonesia's democratis politics. State laws and regulations also facilitate intolerance and religiously motivated violence (Fauzi-Hilman, 2015). The conduct of Indonesian public diplomacy through InterfaithDialogues is obvious since it includes mostly non-state actors. Generally those who play leading roles in such dialogues are leaders of six-state recognized religions in Indonesia; Islam, Protestanism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. In addition, a number of non-affliated public intellectuals, and social activists have also been involved (Azra, 2014). Muslims population, as the majority in Indonesia, can live in tolerance and harmony side-by-side with other religions.

ASEAN

The study of culture and international relations is closely identified with constructivism. By culture, constructivists generally mean social and legal norms and the ways in which these are deployed, thought argument and communication, to constitute actors' identities and interests. The events of September 11 have, however, thrust culture, in this more expansive sense, on to international agenda, creating an opening and an obligation for constructivists. Samuel Huntington's 'clash of

civilizations' thesis has gained a new lease of life, with commentators, from diverse quarters, no longer inhibited in attributing essentialist characteristics to '*The West*' and '*Islam*' (Scott Burchill et al, 2005).

In the framework of ASEAN Integration and the ASEAN Community 2015, the issues of ethnic conflicts, religious conflicts as well as socio-economic conflicts have to be addressed by ASEAN. In Indonesia, Moderate Islam and the ideals contained within Pancasila set the foundation to resolving various issues involving ethnic, religion, race and social level, known as SARA (*suku, agama, ras, antargolongan*). This same model can be applied within ASEAN to solve disputes and differences in the local and regional level, through similar principles recognized by the ASEAN Charter.

In the ASEAN Charter, the *Preamble* mandates, "adhering to the principles of *democracy, the rule of law* and *good governance*, respect for and protection of *human rights* and fundamental freedoms." Article 1 of the Charter on *Purposes* in point 7 states "to strengthen democracy, enhance good governance and the rule of law, and to promote and protect human rights and fundamental freedoms, with due regard to the rights and responsibilities of the Member States of ASEAN." Article 2 on *Principles* in point 2 (1) of the Charter states "respect for the different cultures, languages and religions of the people of ASEAN, while emphasizing their common values in the spirit of unity in diversity." On the Settlement of Disputes, article 22 stipulates that "member states shall endeavour to resolve peacefully all disputes in a timely manner through dialogue, consultation, and negotiation".

ASEAN countries have different concepts of and approaches to democracy and human rights and the timing involved. However, common values and norms might encompass the collective rejection of acts that are generally considered as inhuman and abhorrent – genocide, "ethnic cleansing," torture, the worst forms of child labor, the abuse of children, rape as an instrument of warfare or state power, restrictions on the peaceful practice of religion, denial of health care or education by reason of gender, religion, race or ethnicity, and other acts prohibited by existing UN conventions, as well as the overthrow of legitimate governments by military force. Some of the values and norms could derive from such documents as *the Universal Declaration of Human Rights* and the 1993 Vienna Declaration and Programme of Action. According to Severino, all this would be true only if the ASEAN member-nations take the substance of the charter to heart and genuinely believe that regionalism is good for them and that the interests of the region are their own (Severino, 2006).

In the past, states have often proven reluctant to speak out on human rights violations by others, fearing interruption of "business as usual"- not only on business but also on other important matters like security cooperation. It is very clear, as Forsyite mentioned, that states do not like to sue each other about human rights in the International Court of Justice, the number of cases on human rights being very small (Forsyite, 2005).

The role of *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rigths* (AICHR) is then very important to promote and protect human rights and fundamental freedoms of the people of ASEAN; to uphold the right of the people of ASEAN to

live in peace,dignity and prosperity; to contribute to the realisation of the purposes of ASEAN as set out in the ASEAN Charter in order to promote stability and harmony in the region, friendship and cooperation amongASEAN Member States, as well as the well-being, livelihood, welfare and participation of ASEAN people in the ASEAN Community building process.

With regard to the situation of human rights in Indonesia and Malaysia, it is an advantage point that both Indonesia and Malaysia have a national commission of human rights. Both national commissions deal with many domestic cases of ethnic conflicts, religious conflicts as well as socio-economic conflicts. The National Commission of Human Rights of Indonesia (Komnas HAM Indonesia) is an independent agency established by the Government of Indonesia through Presidential Decree No. 50 of 1993, shortly after The United Nations Commission on Human Rights resolution 1993/97 expressed grave concern over allegations of serious human rights violations by the government of Indonesia.The mandate of Komnas HAM is to: (I) Develop conditions conducive to the promotion, recognition, protection, and enforcement of human rights in accordance with Pancasila, the 1945 Constitution, the United Nations Charter, and the Universal Declaration of Human Rights; and (II) Improve the protection and upholding of human rights in the interest of the personal development of the Indonesian people as a whole and their ability to fully participate in life as members of the Republic of Indonesia.Komnas HAM established special task forces to investigate the case of conflict between the Sunni and Syiah in Madura as well as between the Sunni and Ahmadiyah in West Java. The conflicts between the

radical Islamic groups and Christian groupsrelated to the establishment of churches or mosques in Indonesia was also observed by Komnas HAM.

While the Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) was established by Parliament under the Human Rights Commission of Malaysia Act 1999, Act 597. The Act was gazetted on 9 September 1999. The mandate of SUHAKAM among others, are: promoting awareness of human rights and undertaking research and conducting programmes, seminars and workshops and to disseminate and distribute the results of such research; advising the Government and/or relevant authorities of complaints against them and to recommend appropriate measures to be taken;Investigating and verifying any infringement of human rights;Working with civil society organizations and human rights defenders for the promotion and protection of human rights;Conducting Public Inquiries on major infringements of human rights;Visiting places of detention in accordance with procedures as prescribed by laws relating to places of detention and to make necessary recommendations;Issuing public statements on human rights as and when necessary;Undertaking appropriate activities as are necessary.In Malaysia,SUHAKAM, inter alia, deals with the case of Orang Asli of Peninsular Malaysia as well as natives of the States of Sabah and Sarawak, collectively known as Indigenous Peoples or Orang Asal of Malaysia, pertaining to their rights, in particular, allegations of violations to indigenous customary rights to land, with a view of having a better understanding of the issue and how best to resolve the issue in the interest of promoting and protecting the human rights of the indigenous communities in the country.

To achieve peace and stability in South East Asia region, all member countries of ASEAN, taking into account all the ethnic, religious as well as socio-economic groups, should go hand-in-hand, to create harmony in the community in line with the principles of democracy, human rights, good governance and rule of law contained in the ASEAN Charter.

Based on the experience of Indonesia, with the role of Moderate Islam within the muslim communities in Indonesia together with the philosophical foundation of Pancasila, Indonesia alone will contribute significantly to the implementation of ASEAN Community 2015.

In conclusion, to address the ASEAN Community 2015, all governments, civil society organizations as well as the people of ASEAN must finallyseek maximum efforts to resolve their differences or disputesto createpeace, harmony and stability in each ASEAN member countrywhile at the same time, maintain the good relationship between one ASEAN member country to another.

References

Angel M. Rabasa et al, 2004. *The Muslim World after 9/11*. Arlington, VA: Rand Corporation.

Scott Burchill et al, 2005. *Theories of International Relations*. New York: Palgrave Mac Millan.

David P. Forsythe. 2005. *Human Rights in International Relations*. Nebraska, Lincoln: Cambridge University Press.

Gordon P. Means, 2009. *Political Islam in Southeast Asia*. Lynne Rienner Publishers, Inc.

Azyumardi Azra, 2012. Socio-Cultural Pluralism and Interfaith Dialogue: An Indonesian Islamic Perspective Parliamentary Union of OIC Member States.

Azyumardi Azra, 2014. "The Expression of Moderation in Foreign Policy", seminar jointly organized by Global Movement of Moderates Foundation (GMMF) Malaysia-Indonesia Council on World Affairs (ICWA) & Faculty of Social and Political Sciences (FISIP) UIN, Jakarta.

Internets/Websites

The Jakarta Post, August 09, 2015. Moderate Islam in Indonsia.

The Jakarta Post, August 07, 2015. Deny Hamdani "The Rise of Nusantara Islam".

The Jakarta Post, August 04, 2015. Martin Van Bruinessen "Islam Nusantara, a creed of tolerance and diversity".

Republika, July 27, 2015. Muhammadiyah Congress promotes Progressive Islam.

Aryanta Nugraha, 2012. *Moderate Islam as New Identity in Indonesian Foreign Policy*.

Angga Yudhiyansyah, 2012. *The Wave of Moderate Muslim Engagement in Indonesia* http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/indonesia-s-islamic/2026228.html

http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/09/the-week-review-moderate-islam-indonesia.html

http://www.themalaysianinsider.com/sideviews/article/indonesia-has-to-speak-out-for-moderate-islam-rizvi-shihab

http://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-really-the-worlds-most-tolerant-muslim-country/

http://www.indonesianembassy.org.uk/human_right-2.htm

http://www.pacta.fi/national-human-rights-commission-indonesia-komnas-

http://www.suhakam.org.my/

MEREDAKAN VISI KEINDONESIAAN

DALAM DISIPLIN HUBUNGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Andrew W. Mantong[171]

Universitas Indonesia

Pada tahun 2014, melalui prakarsa Program Studi Sarjana Reguler Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, sejumlah penyelenggara program studi Hubungan Internasional (HI) yang mewakili hampir seluruh perguruan tinggi yang membuka jurusan HI berkumpul di Depok untuk membahas dan merumuskan standar kompetensi lulusan program studi HI tingkat sarjana sesuai dengan permintaan pemerintah Indonesia. Standar Kompetensi, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk "capaian pembelajaran yang diharapkan (*expected learning outcomes*) merupakan suatu bentuk acuan yang dapat dijadikan gambaran kurang lebih mengenai keterampilan dan keahlian apa yang dikuasai oleh lulusan program studi HI di seluruh Indonesia. Standardisasi ini merupakan salah satu konsekuensi yang harus diambil oleh seluruh program studi setiap jenjang pendidikan di Indonesia untuk memastikan keahlian minumum lulusan, yang juga dibutuhkan oleh rezim perdagangan bebas yang berlaku yang membutuhkan semacam acuan baku untuk

[171]Penulis berterima kasih atas masukan berharga dari Mireille Marcia Karman mengenai pemahaman atas Teori Politik Internasional (*International Political Theory*) dan Tradisi Inggris (English School) dan asistensi yang cakap dan cermat dari Ali Wahyu Imanullah dalam penulisan *draft* ini. Versi lebih populer dari artikel ini telah dipublikasikan oleh Jakarta Post yang dapat dilihat pada laman http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/23/disclosing-international-indonesian-minds.html.

memastikan kemudahan pertukaran tenaga kerja dan tenaga ahli lintas batas yang memerlukan keahlian yang dapat ditransfer lintas batas negara.

Terlepas dari basis normatif apakah program-program studi HI di Indonesia perlu untuk menerapkan "standardisasi" yang sering kali dinilai sebagai bentuk manifestasi tata kelola neoliberal yang tentunya dapat menghadirkan perdebatan politik tertentu, lokakarya yang bertema "Memperkuat Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Prodi HI Se-Indonesia dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berintegritas dan Berdayasaing" menunjukkan suatu corak tertentu. Dalam Lokakarya yang diselenggarakan selama dua hari, tanggal 3-4 Juni 2014, peserta forum menyepakati rumusan capaian pembelajaran jenjang Sarjana (S1) untuk program-program studi HI di Indonesia. Rumusan tersebut terdiri dari daftar capaian pembelajaran yang dirancang ke dalam sub-sub capaian meliputi indikator *sikap*, *penguasaan pengetahuan*, *keterampilamn khusus* dan *keterampilan umum*.Dalam aspek *sikap*, nampak bahwa standar pendidikan yang diarah oleh penyelenggaraan program studi HI di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari retorika dasar ke-Indonesiaan dalam sistem pendidikan yang mencakup nilai ketuhanan, nasionalisme dan Pancasila. Dalam aspek *penguasaan pengetahuan*, lulusan HI diharapkan menguasai pemahaman dasar ilmu serta cabang-cabang bahasan ilmu. Sementara itu, ketika aspek *keterampilan umum* berupata mengarahkan lulusan HI agar mendapatkan sesuatu yang dapat menyamakan keahlian mereka dengan apa yang dapat dilakukan oleh lulusan-lulusan program studi lain, aspek *keterampilan khusus* secara menarik

mengetengahkan kata "kepentingan nasional," mengelaborasi visi *official* dalam tujuan penyelenggaraan program studi.

Memperhatikan corak-corak tersebut, tulisan ini berupaya memaparkan sebuah argumen bahwa corak nasionalistik dalam visi penyelenggaraan program studi HI di Indonesia perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan akademik yang lebih meyakinkan. Dengan kata lain, tulisan ini berupaya untuk menawarkan suatu arah di mana penyelenggaraan program studi HI tidak hanya harus memperhatikan karakter, semangat dan muatan teoretik yang bersifat ke-Indonesiaan, melainkan pula harus memperhatikan cara-cara bagaimana argumen dan perhatian yang lebih nasionalistik dipaparkan dengan lebih baik. Tulisan ini tidak berupaya menggugat nasionalisme dalam visi pendidikan, melainkan berupaya untuk menekankan pentingnya metodologi, alih-alih ideologi eksplisit, dalam pengajaran dan telaah terkait apa yang disebut dengan disiplin HI di Indonesia.

Visi Nasionalistik-*Official* dalam HI di Indonesia

Lokakarya tersebut di atas diselenggarakan demi menjawab kebutuhan asosiasi ilmu HI di Indonesia untuk merumuskan capaian pembelajaran program-program studi HI di Indonesia yang dapat dicatatkan di level nasional sebagai "Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia" (KKNI). Di tengah-tengah situasi di mana HI merupakan suatu program studi yang banyak diminati oleh para pelajar di Indonesia, dan di saat banyak universitas mungkin berupaya untuk menemukan ceruknya yang dapat digunakan sebagai nilai lebih untuk mengundang lebih banyak lagi pelajar yang berminat menimba ilmu di lembaga mereka, kesepakatan yang dihasilkan dalam

lokakarya tersebut cukup menarik. Dalam rumusan tersebut, pada aspek *penguasaan pengetahuan,* lulusan-lulusan HI di Indonesia diharapkan dapat (1) mengusai teori, konsep, dan metodologi ilmu hubungan internasional, (2) menguasai aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya serta keterkaitan antara aspek-aspek dalam konteks hubungan internasional, (3) menguasai dinamika kawasan dan globalisasi, dan (4) menguasai isu-isu, aktor dan proses dalam hubungan internasional.

Pada butir-butir tersebut tercermin bahwa para penyelenggara program studi HI di Indonesia percaya bahwa HI merupakan suatu "disiplin" yang memiliki "teori," "konsep," dan "metodologi"-nya sendiri. Selain itu tercermin pula bahwa hubungan internasional terkait dengan elemen politik, ekonomi dan sosial budaya – yang tentunya mengingatkan kita ke dalam konsentrasi-konsentrasi yang dibangun oleh banyak program studi HI di Indonesia serta juga bagaimana pilar-pilar kerjasama dalam Komunitas ASEAN dibentuk. Yang juga dapat disimpulkan dari butir-butir tersebut adalah HI di Indonesia dianggap pula sebagai suatu disiplin yang memiliki muatan "studi kawasan" serta pengakuan atas "globalisasi" sebagai suatu kondisi yang pemahaman terhadapnya harus dikuasai oleh lulusan-lulusan HI di Indonesia.

Sebagai perbandingan, di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat, studi kawasan mungkin berada dalam disiplin lain, yakni studi kawasan (*area studies*) di mana pemahaman "kawasan" membutuhkan kajian yang lebih bersifat multidisiplin – tidak hanya menyangkut HI sebagai suatu sub disiplin ilmu politik, melainkan pula menyangkut pemahaman sosioantropologi serta sosioekonomi untuk menangkap tidak hanya dimensi kasat mata dari suatu kawasan, melainkan pula sisi-sisi halus seperti nilai, budaya, dan kekhasan kawasan tersebut yang membentuk pemaknaan

tersendiri akan “dinamika kawasan.” Dalam kerangka tersebut, “Studi Internasional” (*International Studies*) mungkin memiliki artian yang cenderung berbeda dengan “Hubungan Internasional”(*International Relations*). Di Indonesia, nampaknya, program-program studi HI cenderungmenggabungkan pemahaman HI sebagai suatu disiplin dengan semacam kombinasi antara studi kawasan dan politik global sebagai bentuk *penguasaan pengetahuan* dalam KKNI.

Jati diri disiplin HI di Indonesia tersebut kemudian dalam KKNI disandingkan dengan rumusan mengenai keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan HI yang membedakannya dengan lulusan lain, termasuk lulusan dari program studi terdekatnya, yakni ilmu politik. Setelah menyelesaikan keseluruhan perkulian di program studi HI di universitas mana pun di Indonesia, seorang lulusan diharapkan (1) mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global, (2) mampu mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesiaserta memahami posisinya dalam menganalisis fenomena internasional, (3) mampu menganalisis dinamika kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, (4) mampu mengelola penelitian ilmiah tentang isu-isu hubungan internasional, (5) mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dan teknik negosiasi dan diplomasi, (6) mampu menggunakan teknologi informasi dalam menganalisisisu-isu internasional, (7) mampu mengekspresikan pemikiran dan argumentasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris, dan (8) mampu menggunakan minimal satu bahasa resmi internasional.

Dalam upaya untuk menghadirkan suatu standardisasi pendidikan program studi HI di Indonesia, mengeset kualifikasi dalam terminologi “kepentingan nasional

Indonesia," "kebijakan luar negeri Indonesia" dan "diplomasi Indonesia" sebagai salah satu bingkai bagaimana "HI" dipelajari, sekaligus menjajarkannya (*juxtaposed*) kebutuhan untuk melakukan "analisis," "penelitian ilmiah," "teknik negosiasi dan diplomasi," dan penguasaan bahasa serta teknologi informasi, penyelenggaran program studi HI di Indonesia dapat dikatakan memiliki visi nasionalistik yang cenderung berpusat pada karakter *official* ditinjau dari apa yang mereka harapkan dari para lulusannya. Hal ini dapat dipahami, misalnya, dengan membayangkan bahwa setiap lulusan mampu menguasai "teknik," "bahasa," dan "penelitian" yang terkait dengan HI dari manapun mereka berasal dan meletakkannya dalam konteks kepentingan Indonesia. Hal ini, dengan demikian, membuat seorang mahasiswa HI asal Korea Selatan harus mampu membayangkan keahliannya untuk dapat diterapkan seolah-olah ia merupakan seorang yang akan berdiplomasi dan bernegosiasi untuk kepentingan Indonesia. Setiap mahasiswa yang belajar di program studi HI mana pun di Indonesia, dengan demikian, harus "mampu mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesiaserta memahami posisinya dalam menganalisis fenomena internasional."

Kandungan Corak Nasional dalam Disiplin HI

Bagaimanapun pula, karakter nasional dalam penyelenggaraan pendidikan HI di berbagai universitas di dunia bukan lah suatu hal yang mengejutkan. Di Amerika Serikat, HI, sebagai bentuk sub kajian disiplin ilmu politik yang keterbentukannya tidak bisa dilepaskan dari kelahirannya pada "Era Progresif sebagai suatu profesi non-partisan dan terspesialisasi untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam

rangka memahami dan membantu menjaga kesinambungan rezim politik liberal,"[172] liberalisme tidak dapat dielakkan dalam kandungan disiplin HI yang menyangkut perhatian mengenai "bagaimana rezim-rezim liberal dan demokratik dapat berkembang dalam dunia yang anarkis."[173] Sebagai suatu disiplin, HI dengan demikian dipercaya pula memiliki konsep-konsep pokok dan perangkat metodologis yang dapat bekerja untuk sejumlah masalah-masalah inti yang spesifik.[174]

Sementara itu di Inggris, berdirinya *Chair* politik internasional pertama kali di UniversitasAberyswyth menandai berdirinya HI sebagai suatu disiplin. Di Inggris, menurut William Wallace, melalui dunia akademik para calon diplomat dilatih dengan pemahaman-pemahaman *klasik* yang diharapkan memberikan keahlian yang bersifat generik untuk mengurai serta memberikan jawaban terhadap tantangan situasi-situasi politik yang berubah-ubah.[175] Dalam hal ini, pengenalan teori-teori HI diharapkan dapat menumbukan *sense* yang dibutuhkan untuk membantu para calon diplomat merefleksikan situasi mereka sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa karakter studi HI di Inggris lebih menekankan pada aspek klasik baik dalam hal pemikiran maupun sejarah, dibandingkan di Amerika Serikat yang lebih menekankan pada aspek metodologis.

Dalam konteks perbandingan ini, yang dilakukan oleh Indonesia bukan lah sesuatu yang mengherankan. Melalui perumusan KKNI program sarjana, nampaknya

---

[172]Ira Katznelson dan Helen V. Milner, "American Political Science: The Discipline's State and the State of the Discipline," dalam *Political Science: The State of Discipline*, ed. Ira Karznelson dan Helem V. Milner (New York: W.W. Norton & Company, 2002), 4.
[173]*Ibid.*
[174]*Ibid.*, 3.
[175]William Wallace, "Truth and Power; Monks and Technocrats: Theory and Practice in International Relations," *Review of International Studies* 22, no. 4 (1996): 317.

penyelenggaraan program studi HI di Indonesia pula bertujuan untuk mengembangkan corak khas nya sendiri. Ketika perguruan-perguruan tinggi ini mungkin berkompetisi satu sama lain untuk mengundang para pelajar baik dari domestik maupun mancanegara, mereka tampaknya sepakat bahwa pengajaran teori, konsep, metodologi, aspek politik, ekonomi dan sosial-budaya dalam konteks hubungan internasional, dinamika kawasan, globalisasi, serta isu-isu, aktor dan proses dalam hubungan internasional harus lah memiliki fitur-fitur nasionalistik. Sebagai catatan, nampaknya KKNI tersebut perlu ditinjau kembali karena paling tidak sampai saat ini buku-buku teks HI masih memaparkan bahwa alih-alih "teori" HI, yang eksis adalah "teori-teori HI" yang tersebar sesuai paradigma. Kenyataan ini dianggap memberikan "gambaran diri" sebagai suatu HI[176]yang sering kali membuatnya dideskripsikan sebagai konsekuensi dari serangkaian perdebatan, atau *great debates*.

Alih-alih sedikit kealpaaan tersebut, disiplin HI dan teori-teorinya dapat dianggap memiliki nilai guna, atau relevansi, bagi praktik, semisal praktik diplomat. Meskipun sebagai sebuah *field*, HI nampak secara berkepanjangan ditelan oleh serangkaian krisis identitas[177] – misalnya *vis-a-vis* ilmu politik, teori politik, hukum internasional, dan seterusnya – pembelajaran terhadap teori-teori yang bersifar multiparadigmatik ini dapat menguntungkan pembelajar karena hal tersebut dapat membentuk kemampuan lulusan untuk meninjai pelbagai argumen serta masing-masing *merit*-nya sehingga kemampuan mereka untuk terlibat dalam perdebatan

[176]Steve Smith, "The Self-Images of a Discipline: A Genealogy of International Relations Theory," dalam *International Relations Theory,* ed. Ken Booth dan Steve Smith (University Park: Pennsylvania State University Press, 1995), 1-37.

[177]Brian C. Schmidt, "On the History and Historiography of International Relations," dalam *Handbook of International Relations,* Edisi Kedua, ed. Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), 21.

politik sehari-hari menjadi lebih dapat terasah. Bagi Stefano Guzzini, pembelajaran terhadap teori-teori HI memiliki signifikasi dan peran dalam hal : (1) seluruh analisis empiris pastilah mengimplikasikan konsepsi teoretik tertentu dan kesadaran terhadap hal ini tidak saja hanya memiliki nilai akademis, namun juga nilai politis; (2) pengajaran teori yang baik dapat mendorong refleksi diri yang cenderung tidak terikat dengan konteks waktu yang terlampau spesifik serta kesadaran kontekstual yang pada gilirannya membentuk kedewasaan intelektual yang berguna bagi pemahaman, komunikasi, dan negosiasi yang bersifat *cross-national*; dan (3) pengajaran dan riset teori, termasuk riset fundamental, merupakan bahan utama untuk mengangkat suatu komunitas akademik dari area pinggiran dan semi-pinggiran ke dalam area sentral yang menjadi kancah utama perdebatan epistemik.[178]

Memperhatikan alur berpikir demikian, di saat refleksi diri merupakan hal yang penting bagi suatu komunitas akademik, berbicara dalam bahasa-bahasa dan konsepsi-konsepsi yang dapat diterima oleh publik secara general juga adalah suatu hal yang penting. Menekankan visi nasionalistik dalam rancangan kurikulum adalah sesuatu yang *legitimate,* namun mencanangkannya secara eksplisit dapat menimbulkan suatu kekhawatiran. Dalam hal ini, butir kedua dari keterampilan khusus yang menyatakan bahwa lulusan HI harus “mampu mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesiaserta memahami posisinya dalam menganalisis fenomena internasional” menjadi pernyataan yang terlalu eksplisit untuk ditekankan

[178]Stefano Guzzini, “The Significance and Roles of Teaching Theory in International Relations,” *Journal of International Relations and Development* 4, no. 2 (2001): 111.

sebagai bentuk kompetensi dasar karena boleh jadi kebutuhan untuk reflektif jauh lebih penting bagi kebutuhan Indonesia.

Dalam konteks ini, karakter pengajaran HI di Indonesia, dan juga di kawasan Asia Tenggara, memiliki kandungan masalah tertentu. Alan Chong dan Natasha Hamilton-Hart memaparkan bahwa telaah terhadap bagaimana disiplin HI diselenggarakan di Asia Tenggara menunjukkan bagaimana mitos-mitos yang meligitimasi "nasional" tertentu direproduksi, bagaimana memori-memori kolektif historis ditransmisikan, bagaimana *school of thought* tertentu mendominasi pembelajarab, serta bagaimana masyarakat sipil berperan dalam produksi pengetahuan di Asia Tenggara.[179] Dalam situasi tersebut,

while scholars rarely, if ever, decisively affect national policy, in many countries they face incentives to reflect certain national policy parameters and priorities. Most Southeast Asian institutions of higher learning receive some form of official patronage, and several institutions involved in the teaching of IR have developed close relations with parts of the official foreign policy establishment. Through executive training programmes and seminars, graduate courses aimed specifically at foreign policy officials, consultancy projects, and the region's numerous 'Track II' circuits, there are multiple links connecting officials in the foreign policy community and scholars and teachers of IR, although the degree of closeness varies from one country to another.[180]

[179]Alan Chong dan Natasha Hamilton-Hartz, "Teaching International Relations in Southeast Asia: Historical Memory, Academic Context, and Politics – An Introduction," *International Relations of the Asia-Pacific* 9, no. 1 (2009): 1-18.
[180]*Ibid*., 7.

[di saat para sarjana jarang, kalaupun pernah secara meyakinkan memengaruhi kebijakan nasional, di banyak negeri mereka menghadapi insentif untuk merefleksikan parameter-parameter dan prioritas-prioritas kebijakan nasional tertentu. Kebanyakan institusi-institusi pendidikan tinggi di Asia Tenggara menerima beberapa bentuk patronasi resmi, dan beberapa institusi yang terlibat dalam pengajaran HI telah membangun hubungan yang dekat dengan bagian-bagian dari *establishment* kebijakan luar negeri resmi. Melalui program-program pelatihan dan seminar-seminar eksekutif, mata kuliah-mata kuliah *graduate* yang bertujuan secara spesifik pada pejabat-pejabat kebijakan luar negeri, proyek konsultasi, dan sekian banyak sirkuit "*Track II,*" terdapat banyak saluran yang menghubungkan para pejabat dalam komunitas kebijakan luar negeri dan para sarjana dan dosen-dosen HI, meskipun derajat kedekatan hubungannya berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lainnya.]

Hal ini bergaung dengan peringatan Benedict Anderson yang ditayangkan dalam media Bangkok Post mengenai masalah potensial yang ditimbulkan dari ketiadaan profesi akademik sejati di negara-negara Asia Tenggara yang dinyatakan Anderson sebagai kondisi di mana

…forexample, the top universities are usually owned by the state, andtheir staffs are civil servants of one sort or another. There is along tradition of respect for learning, based on both pre-colonial andcolonial-era social orders. This respect for learning is fortified bythe strong connection to the state. Professors have access to

thepolitical elite and the mass media in a way almost unthinkable in theUSA. On the other hand their social status has usually not beenparalleled by comparable financial support. In the US professors arevery highly paid, many senior professors earning US$100,000 (3.2million baht) plus every year. In Southeast Asia, in contrast,professors are badly paid, so end up working on useless state researchprojects, moonlighting at other universities, speculating in realestate, and various kinds of mass media opportunities such as becomingcolumnists in newspapers, TV personalities and so forth. Students areoften neglected or ignored, or treated in a bureaucratic manner.A good many academics prefer not to teach at all, but sit in researchinstitutes which is rarely very productive. This is why so many of thebest students are largely autodidacts and despise their nominalteachers.[181]

[... sebagai contoh, universitas-universitas papan atas biasanya dimiliki oleh negara, dan staf-staf mereka merupakan pegawai negeri atau sejenisnya. Terdapat tradisi yang panjang mengenai penghargaan terhadap pembelajaran, berdasarkan tatanan sosial pra- dan selama era-kolonial. Penghargaan terhadap pelbelajaran ini dibentengi dengan koneksi kuat dengan negara. Para profesor memiliki akses ke dalam elit politik dan media masa dalam cara yang tidak terbayangkan di Amerika Serikat. Di lain pihak, status sosial mereka biasanya tidak disertai dengan dukungan finansial yang setara. Di Amerika Serikat, profesor dibayar amat tinggi, banyak profesor senior berpenghasilan 100.000 juta dolar (setara dengan 3.2 baht) lebih per tahun. Di Asia Tenggara, sebagai kontras, profesor dibayar dengan tidak layak,

[181]Benedict Anderson, "Few Intellectuals In Court Of Public Opinion," *Bangkok Post*, 28 Juni 2010.

sehingga mereka berakhir dengan mengerjakan proyek-proyek negara yang tidak berguna, mengajar di banyak universitas pada saat yang bersamaan, berspekulasi di *real estate*, serta berbagai bentuk kesempatan media massa seperti menjadi kolumnis di surat-surat kabar, personalitas televisi, dan sebagainya. Mahasiswa-mahasiswa sering kali dibaikan atau tidak diharukan, atau diperlakukan dengan cara-cara birokrat. Banyak akademisi yang (berkualitas) baik memilih untuk tidak mengajar sama sekali, namun duduk dalam lembaga riset yang jarang sekali produktif. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa murid-murid terbaik merupakan mereka yang otodidak dan yang muak akan guru-guru mereka.]

Kondisi ini tentunya bukan kondisi yang menguntungkan bagi masa depan komunitas akademik HI di Indonesia yang pada gilirannya, mengikuti logika berpikir Guzzini, akan membawa dampak terhadap keandalan praktik HI di Indonesia, terutama memperhatikan kedekatan akademik dan pejabat di Indonesia. Dalam kondisi demikian, "kebanyakan akademisi secara pragmatis bersekutu dengan elit politik atau berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan hibah-hibah yang disediakan oleh berbagai agensi dari negara-negara kaya yang tentunya memiliki agenda mereka sendiri."[182] Dengan demikian, kualitas pembelajaran HI di perguruan-perguruan tinggi dapat berujung kepada apa yang dibayangkan Anderson sebagai kondisi di mana setiap akademisi cenderung mengulang-ulang perkataannya sendiri di media masa, tidak memiliki waktu untuk melakukan riset yang riil dan menulis

[182]*Ibid*.

karya yang signifikan sehingga sebagai dampaknya komunitas akademik terisolasi dengan sendirinya.[183] Leonard Sebastian

Kekhawatiran ini juga tercermin dari refleksi diri yang dilakukan oleh salah seorang profesor HI di Indonesia, Bob S. Hadiwinata. Beliau menilai bahwa warisan historis[184], kaitan politis serta komersialisasi pendidikan tinggi telah menimbulkan masalah bagi HI sebagai disiplin di Indonesia.[185] Masalah-masalah ini terkait dengan dominansi pandangan *state-centric* yang hanya membuka sedikit ruang bagi aktor-aktor lain dalam HI yang masalahnya kini tersisa di universitas-universitas yang memiliki akses terbatas pada perkembangan ilmu HI yang terbaru. Absennya diskusi mengenai Marxisme yang merupakan warisan dari Orde Baru juga mendatangkan permasalahan karena dengan demikian para pembelajar tidak dapat memahami diskusi yang komplit mengenai seluruh elemen dalam politik internasional, dan juga politik global. Pandangan Hadiwinata ini dapat dipahami mengingat sebetulnya, lepas dari muatan etis dan ideologisnya, pandangan Marxisme telah menghadirkan pentingnya elemen ekonomi dalam tatanan kuasa global serta aspek-aspek kekerasan yang penting selain perang, yakni revolusi, yang sebetulnya lebih relevan dengan kondisi negara-negara pascakolonial. Dalam situasi demikian, tata kelola yang dihadirkan bersamaan dengan komersialisasi pendidikan melalui standardisasi,

[183]*Ibid.*

[184]Leonard Sebastian dan Irman G. Lanti menyebutkan bahwa terdapat realitas sosial dan historis Indonesia yang membentuk pandangan Indonesia terhadap HI, yakni (i) negara kepulauan, (ii) penjajahan, (iii) multi-etnis, dan (iv) pembentukkan identitas nasional. Lihat Leonard Sebastian dan Irman G. Lanti, "Perceiving Indonesian Approaches to International Relations Theory," dalam *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia,* ed. Barry Buzan dan Amitav Acharya (New York: Routledge, 2010), 148-73.

[185]Bob Sugeng Hadiwinata, "International Relations in Indonesia: Historical Legacy, Political Intrusion, and Commercialization," *International Relations of the Asia-Pacific* 9, no. 1 (2009): 55-81.

manajemen konten berbasis akreditasi dan performa tenaga pendidik, atau dengan kata lain, bagaimana suatu program studi dievaluasi, cenderung berpotensi mereproduksi gambaran demikian atau memperlambat perubahan mengingat beban yang harus diemban oleh dosen-dosen muda yang mulai meniti karir di masing-masing universitas, terlepas pendidikan luar negeri yang mungkin mereka nikmati di level Master dan Doktoral sebelum mengabdi menjadi pengajar.

Penutup:

Mengangkat Posisi Indonesia dari Area Pinggiran dalam Perdebatan Akademik

Memperhatikan problematika di atas, terdapat kebutuhan untuk menegaskan kembali karakter akademik dalam disiplin HI agar upaya-upaya intelektual yang dilakukan dalam penyelenggaraan program studi HI dapat mendatangkan manfaat pada dunia akademik. Secara pasti, hal ini menegaskan pentingnya jarak antara akademik dan praktik tidak dalam cara-cara mengisolir kedua belah pihak atau dalam jalan di mana akademik harus selalu menjadi suara alternatif yang senantiasa mengkritisi pemerintah dalam aspek-aspek yang berkenaan dengan kebijakan luar negeri. Guzzini mengingatkan bahwa terdapat suatu resiko di mana komunitas akademik di negara berkembang memiliki kenyamanan tersendiri yang cenderung membatasi ruang gerak mereka pada pengetahuan-pengetahuan spesifik tentang kawasan yang mereka diami seraya secara pasif mengandalkan teori-teori yang ditemukan oleh orang lain yang membuat mereka tidak mampu menghubungkan asumsi-asumsi teori tersebut dengan fenomena yang mereka angkat. Dalam hal ini

keahlian mengenai "kawasan" merupakan potensi masalah tersendiri bagi pengembangan disiplin HI di negara-negara seperti Indonesia. Dalam hal ini, Guzzini menyampaikan bahwa "tanpa mengakui kebutuhan akan teori, dan tanpa membangun kemungkinan untuk studi-studi teoretik dikembangkan, komunitas akademik beresiko untuk semata-mata menjadi *theory-takers*, yakni konsumen pengetahuan pasif, dan semata-mata menjadi *data-providers*."[186]

Dalam kaitannya dengan hal ini, KKNI dan beberapa penyelenggara program studi nampaknya berpretensi untuk memberikan "rekomendasi kebijakan," sementara yang lainnya mengikuti jalan yang mengarah kepada upaya mengetengahkan ide dan visi dengan jalan membangkitkan elemen seperti norma, narasi, dan identitas dalam HI. Bagi Gerard van der Ree, bagaimana pengetahuan tentang HI terbentuk amat dipengaruhi oleh bagaimana "internasional" terungkap bagi orang-orang yang hidup dalam suatu komunitas.[187]Namun demikian, hal ini lebih mudah dilakukan oleh mereka yang hidup di negara-negara maju karena mereka mampu membayangkan bahwa dunia merupakan *playground* mereka sejak negeri mereka mampu untuk memastikan mobilitas, cara pandang, dan bahkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Memperhatikan kesepakatan dalam rumusan KKNI, para akademisi di Indonesia menggabungkan konten nasional dengan tujuan-tujuan *official* yang nampaknya biasanya terkait dengan "negara," "perusahaan," "lembaga," dan "organisasi.

[186]Guzzini, ""The Significance and Roles of Teaching Theory," 108.
[187]Gerard van der Ree, "Being-in-the-world of the International," *Review of International Studies* 41, no. 4 (2015): 781-98.

Bila memperhatikan gagasan van der Ree, terkait dengan visi nasionalistik-*official* Indonesia dalam penyelenggaraan studi HI berpotensi mengandung dua masalah. *Potensi pertama* berkaitan dengan upaya untuk mengungkap "internasional" sebagai suatu hal yang *given* dan memiliki realitas obyektif. Dalam rangka untuk memberikan solusi teknokratik untuk pengambilan kebijakan dan untuk terlibat dalam perdebatan teoretis-empiris dalam dunia akademis, sarjana HI perlu dibekali dengan keahlian numerik dan verbal yang cukup kuat. Tendensi HI di Indonesia untuk mengambil jarak dari statistik dan model-model *game theory* di satu sisi dengan kebutuhan parokial untuk mendiferensiasi ilmu HI dari disiplin lain seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, literatur, atau bahkan ilmu politik sendiri dapat menimbulkan masalah bagi studi HI. "Kebijakan" adalah isu yang amat kompleks dan semata-mata memandang HI dalam gambaran diri "multiparadigmatik" tidak akan memberikan pandangan yang berguna baik bagi kepentingan akademik maupun kepentingan praktis. Dengan kata lain, apabila kementerian luar negeri bertanya kepada akademisi mengenai situasi yang mereka hadapi, kalangan akademik tidak bisa hanya sekedar menawarkan solusi yang kira-kira berbunyi : "tergantung dari perspektif mana Anda melihat."

Potensi kedua berkaitan dengan upaya mengungkap "internasional" sebagai bagian dari apa yang disebut oleh van der Ree sebagai "*for-the-sake-of-which*" untuk memungkinkan akademisi melibatkan masyarakat keseluruhan dalam melihat dan membayangkan jati diri mereka sendiri dalam pertemuan mereka dengan masyarakat global. Tendensi untuk mengutamakan pengalaman "*official*" dibandingkan dengan"*everyday,*" yakni dengan jalan yang hanya berfokus pada "kebijakan" dan

"diplomasi" serta "internasional" dibandingkan "domestik" dapat menghalangi potensi akademisi Indonesia untuk memproyeksikan pengalaman khas Indonesia yang sering kali bersifat lokal dan domestik sebagai suatu pengalaman "internasional." Seperti layaknya pengembangan disiplin HI sebagai upaya untuk mencari cara agar rezim liberal mampu bertahan dan sejahtera dalam tatanan dunia yang anarkis yang juga berisi rezim-rezim non-liberal, banyak akademisi HI mancanegara memproteksikan anaologi domestik mereka dalam menganalisis HI. Analogi tersebut meresap ke dalam wacana akademik dan praktik dalam cara-cara yang memastikan posisi mereka dalam banyak isu pada urusan-urusan global. Dalam hal ini, pengalaman Indonesia, baik dalam masalah-masalah yang dihadapi, maupun kearifan lokal, sebetulnya cukup kaya untuk mensubstansiasikan berbagai terminologi seperti "order," "otoritas," "kekuasaan," dan "tanggung jawab" yang sering kali digunakan tanpa didefinisikan dengan baik oleh para akademisi HI yang kemudian menjadi fondasi asumsi di mana teori-teori mereka dibentuk.

Banyak orang Indonesia berpikir bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda dan unik yang memiliki pengalaman-pengalamannya sendiri yang kemudian tidak dapat ditangkap oleh perangkat berpikir masyarakat Barat. Dalam hal ini, Amitav Acharya dan Barry Buzan mengungkap alasan mengapa tidak ada konsepsi non-Barat dalam teori-teori HI berkaitan dengan gagasan "*good-life*" non-Barat seperti Asian Values yang tidak terdengar dalam muatan teoretik HI yang ada selama ini.[188] Dalam kondisi dunia yang dinilai berubah, kalangan yang disebut sebagai English School,

[188]Amitav Acharya dan Barry Buzan, "Why is There No Non-Western International Relations Theory? An Introduction," dalam *Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia*, ed. Barry Buzan dan Amitav Acharya (New York: Routledge, 2010), 10.

sementara itu, berupaya untuk memecah pemisahan yang ketat antara politik domestik dan politik internasional dengan jalan menempatkan pertimbangan normatif dan moral. Dalam kondisi demikian, teori politik internasional dianggap sebagai kepanjangan logis dari teori politik dan teori hubungan internasional yang bertujuan untuk mencapai "*good life*" bagi umat manusia.[189]

Namun demikian, dalam visi tersebut, sering kali komunitas akademik Indonesia gagal untuk mengungkap pengalaman-pengalaman khas mereka atau menawarkan rekomendasi kebijakan yang obyektif karena mereka gagal untuk mengidentifikasi perangkat berpikir yang tepat untuk serta cara yang tepat untuk menawarkan pengalaman "internasional" baik kepada masyarakat Indonesia maupun komunitas akademik yang lebih luas.Dengan demikian, jawaban dari potensi masalah ini adalah metodologi. Upaya menegaskan pandangan khas memang penting, namun dalam rangka untuk mengangkat suara-suara ini dalam perdebatan akademik, ada baiknya disiplin HI di Indonesia memperhatikan usulan kalangan komparatif mengenai metodologi bagi ilmu politik: menerapkan perhatian yang dirangkai pada variabel-variabel atau mekanisme general untuk melihat variasi mana yang dapat menyuling penjelasan teoretik sehingga dapat menghasilkan akumulasi pengetahuan.[190]

---

[189]Schmidt, Brian C. "Together Again: Reuniting Political Theory and International Relations Theory." *British Journal of Politics and International Relations.* Vol. 4. No. 1 (2002): 121.
[190]Dan Slater dan Daniel Ziblatt, "The Enduring Indispensability of the Controlled Comparison," *Comparative Political Studies* 46, no. 10 (2013): 1322.

Melawan Musuh Bersama: Kerja Sama ASEAN dalam Menangani Kejahatan Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang

Adrianus Bintang Hanto Nugroho

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Kristen Satya Wacana

adrianusbintang@yahoo.com

Abstrak

Pasca Perang Dingin, negara-negara ASEAN menghadapi ancaman keamanan baru yang bersifat non-tradisional yaitu kejahatan transnasional peredaran narkotika dan obat terlarang. Berbagai kerja sama di tingkat regional telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Meskipun demikian angka pengguna obat terlarang di kawasan Asia Tenggara masih tinggi. Penyebabnya adalah tipe rezim kerja sama regional yang kurang mengikat. Rezim tipe ini hanya berwenang untuk mendorong negara-negara ASEAN mengadopsi prinsip anti-narkotika dan obat terlarang di wilayah nasional masing-masing. Respons parsial yang bersifat domestik ini tidaklah efektif. Diperlukan kerja sama regional yang lebih mengikat sehingga mendapatkan hasil secara kolektif. Perspektif neoliberal institusionalisme dipakai sebagai landasan berpikir dalam tulisan ini. Perbaikan institusional dapat berupa penegakan hukum skala regional oleh badan tertentu yang diberi mandat khusus untuk menangani kejahatan narkotika dan obat terlarang. Perbaikan itu kemudian dapat diikuti dengan pembangunan infrastruktur hukum regional yang khusus mengatur peredaran narkotika dan obat terlarang yang dapat diadopsi dan didomestifikasi ke dalam sistem

peradilan hukum semua negara ASEAN. Beberapa hambatan yang ditemui adalah masalah kedaulatan, *trust*, dan konsensus mengenai struktur kerja sama regional yang baru.

Kata kunci: *ASEAN, kejahatan transnasional narkotika dan obat terlarang, neoliberal institusionalisme, kerja sama regional, rezim internasional*

I. Pengantar

Setelah masa Perang Dingin usai, bangsa-bangsa di Asia Tenggara dihadapkan pada satu ancaman keamanan baru non-tradisional untuk diselesaikan: peredaran narkotika dan obat terlarang.[191] Produksi, distribusi, dan perdagangan narkotika dan obat terlarang ini bersifat transnasional, artinya melibatkan banyak aktor di berbagai wilayah teritorial negara yang berbeda di kawasan itu. Jaringan ini bekerja dengan cara memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh institusi pemerintah dan penegak hukum domestik yang lemah dan korup. Selain itu, kerja jaringan ini juga terbantu dengan ketiadaan institusi kerja sama regional yang kuat di Asia Tenggara.

Berbeda dengan kawasan lain di dunia, di mana Afrika yang umumnya menghadapi ancaman peredaran *cannabis* dan Amerika yang menghadapi peredaran *cocaine*, kawasan Asia Tenggara menghadapi ancaman peredaran hasil olahan bunga *poppy* seperti yang terlihat dari peta mengenai permintaan obat terlarang dunia di bawah ini:

[191] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) membagi narkotika dan obat terlarang dalam empat jenis, yaitu *cannabis*, *cocaine*, *opioid* (termasuk di dalamnya *opium*, *heroin*, dan *morphine*) dan kelompok obat sintetis *amphetamine* (termasuk di dalamnya *ecstasy*).

Tabel 1. Peta Permintaan Obat Terlarang Dunia

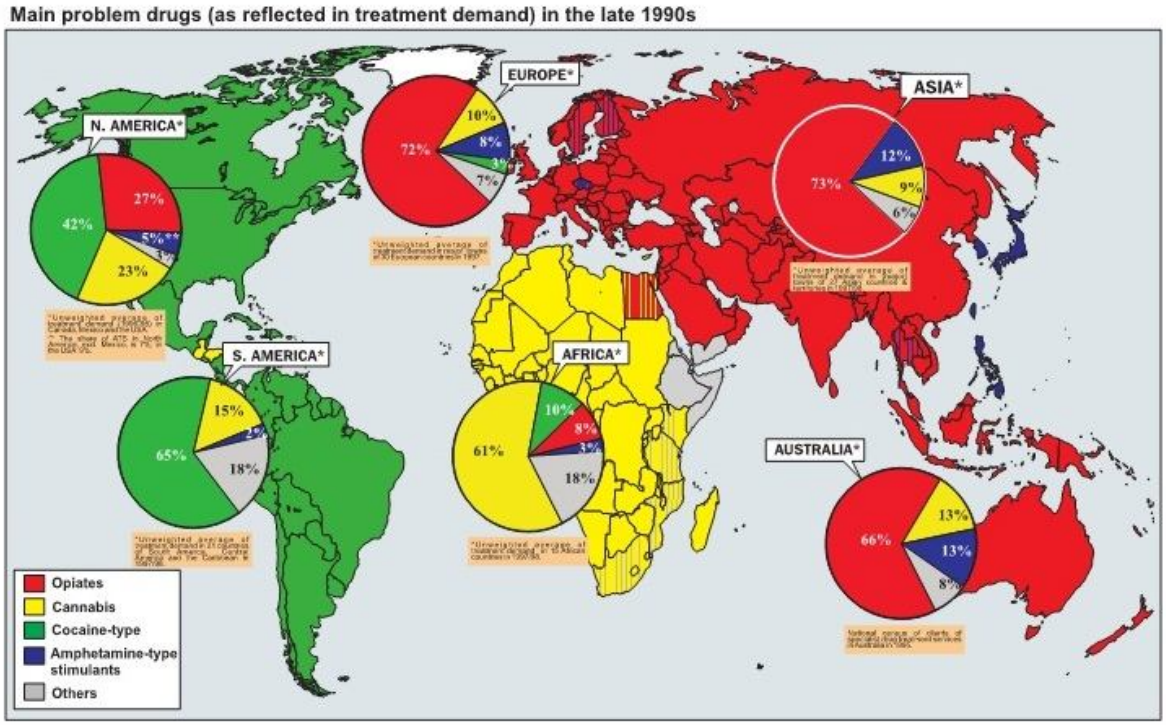

Sumber: "Global Illicit Drug Trends 2001", halaman 275

Menurut data estimasi dari United Nations International Drug Control Programme (UNDCP) seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini, kawasan Asia Tenggara menjadi lahan penanaman bunga *poppy* yang terbesar di seluruh dunia. Luas areanya bertambah 23,65% dari 159.411 hektar pada tahun 1988 menjadi 197.106 hektar pada tahun 1993. Namun luas area ini menyusut hingga 19,30% menjadi 128.642 hektar pada akhir milenium kedua.

Tabel 2. Luas Area Penanaman Bunga *Poppy* Dunia dalam Kurun 1988–2000

Berdasarkan Kawasan (dalam hektar)

OPIUM

GLOBAL ILLICIT CULTIVATION OF OPIUM POPPY AND PRODUCTION OF OPIUM, 1988-2000

(UNDCP estimates)

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
CULTIVATION[1] IN HECTARES													
SOUTH-WEST ASIA													
Afghanistan	32,000	34,300	41,300	50,800	49,300	58,300	71,470	53,759	56,824	58,416	63,674	90,583	82,171
Pakistan	6,519	7,464	7,488	7,962	9,493	7,329	5,759	5,091	873	874	950	284	260
Subtotal	38,519	41,764	48,788	58,762	58,793	65,629	77,229	58,850	57,697	59,290	64,624	90,867	82,431
SOUTH-EAST ASIA													
Lao PDR	40,400	42,130	30,580	29,625	19,190	26,040	18,520	19,650	21,601	24,082	26,837	22,543	19,052
Myanmar	104,200	143,000	150,100	160,000	153,700	165,800	146,600	154,070	163,000	155,150	130,300	89,500	108,700
Thailand	2,811	2,982	1,782	3,727	3,016	998	478	168	368	352	716	702	890
Viet Nam [2]	12,000	14,000	18,000	17,000	12,199	4,268	3,066	1,880	1,743	340	442	442	
Subtotal	159,411	202,112	200,462	210,352	188,105	197,106	168,664	175,768	186,712	179,924	158,295	113,187	128,642
OTHER ASIAN COUNTRIES													
Combined	8,093	10,750	8,054	7,521	2,900	5,704	5,700	5,025	3,190	2,050	2,050	2,050	2,479
Total Asia	206,023	254,626	257,304	276,635	249,798	268,439	251,593	239,643	247,599	241,264	224,969	206,104	213,552
LATIN AMERICA													
Colombia [3]				1,160	6,578	5,008	15,091	5,226	4,916	6,584	7,350	6,500	6,500
Mexico [4]	5,001	6,600	5,450	3,765	3,310	3,960	5,795	5,050	5,100	4,000	5,500	3,600	1,900
Total Latin America	5,001	6,600	5,450	4,925	9,888	8,968	20,886	10,276	10,016	10,584	12,850	10,100	8,400
GRAND TOTAL	**211,024**	**261,226**	**262,754**	**281,560**	**259,686**	**277,407**	**272,479**	**249,919**	**257,615**	**251,848**	**237,819**	**216,204**	**221,952**

Sumber: “Global Illicit Drug Trends 2001” halaman 60 (dengan modifikasi)

Sebagai tempat penanaman bunga *poppy* terbesar di dunia, kawasan Asia Tenggara juga memproduksi *opium* dalam jumlah yang besar, setidaknya sejak 1988 menurut data estimasi dari UNDCP. Mengikuti pertambahan luas area, sejak 1988 hingga 1993, Asia Tenggara mengalami peningkatan jumlah produksi *opium* dari 1.469 ton menjadi 1.998 ton. Sementara pada akhir dekade 1990-an jumlah produksi *opium* di Asia Tenggara tersebut menurun hingga 1.260 ton.

Tabel 3. Jumlah Produksi *Opium* Dunia Berdasarkan Kawasan (dalam ton)

PRODUCTION IN METRIC TONS													
SOUTH-WEST ASIA													
Afghanistan	1,120	1,200	1,570	1,980	1,970	2,330	3,416	2,335	2,248	2,804	2,693	4,565	3,276
Pakistan	130	149	150	160	181	161	128	112	24	24	26	9	8
Subtotal	1,250	1,349	1,720	2,140	2,151	2,491	3,544	2,447	2,272	2,828	2,719	4,574	3,284
SOUTH-EAST ASIA													
Lao PDR	267	278	202	196	127	169	120	128	140	147	124	124	167
Myanmar	1,125	1,544	1,621	1,728	1,660	1,791	1,583	1,664	1,760	1,676	1,303	895	1,087
Thailand	17	31	20	23	14	17	3	2	5	4	8	8	6
Viet Nam	60	70	90	85	61	21	15	9	9	2	2	2	
Subtotal	1,469	1,923	1,933	2,032	1,862	1,998	1,721	1,803	1,914	1,829	1,437	1,029	1,260
OTHER ASIAN COUNTRIES													
Combined	8	57	45	45	-	4	90	78	48	30	30	30	38
Total Asia	2,727	3,329	3,698	4,217	4,013	4,493	5,355	4,328	4,234	4,687	4,186	5,633	4,582
LATIN AMERICA													
Colombia [3]				16	90	68	205	71	67	90	100	88	88
Mexico	67	66	62	41	40	49	60	53	54	46	60	43	21
Total Latin America	67	66	62	57	130	117	265	124	121	136	160	131	109
GRAND TOTAL	**2,794**	**3,395**	**3,760**	**4,274**	**4,143**	**4,610**	**5,620**	**4,452**	**4,355**	**4,823**	**4,346**	**5,764**	**4,691**
Potential HEROIN	**279**	**340**	**376**	**427**	**414**	**461**	**562**	**445**	**436**	**482**	**435**	**576**	**469**

Sumber: "Global Illicit Drug Trends 2001" halaman 60 (dengan modifikasi)

Jika kita melihat hasil dari peredaran narkotika dan obat terlarang secara umum (tidak terbatas pada obat terlarang hasil olahan bunga *poppy* saja) sampai tahun 2012, maka secara global diperkirakan ada 162 juta sampai 324 juta manusia berumur antara 15 sampai 64 tahun yang telah menggunakan obat-obatan terlarang setidaknya sekali dalam setahun.[192] Pada tahun 2012 sendiri diperkirakan ada 12,69 juta manusia yang menggunakan obat terlarang seperti yang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4. Jumlah Perkiraan Pengguna Obat Terlarang Berusia 15-64 Tahun pada 2012

[192] Lihat United Nations Office on Drugs and Crime. *World Drug Report 2014*. New York: United Nations. 2014.

Estimated number and prevalence (percentage) of people who inject drugs among the general population aged 15-64 years, 2012

Region	Subregion	People who inject drugs					
		Estimated Number			Prevalence (percentage)		
		Low	Best	High	Low	Best	High
Africa		**300,000**	**1,020,000**	**6,240,000**	**0.05**	**0.17**	**1.05**
America		**2,470,000**	**3,130,000**	**3,910,000**	**0.39**	**0.49**	**0.61**
	North America	1,770,000	2,060,000	2,360,000	0.56	0.66	0.75
	Latin America and the Caribbean	700,000	1,070,000	1,540,000	0.22	0.33	0.48
Asia		**3,480,000**	**4,650,000**	**6,190,000**	**0.12**	**0.16**	**0.22**
	Central Asia and Transcaucasia	360,000	410,000	470,000	0.67	0.76	0.87
	East and South-East Asia	2,450,000	3,260,000	4,420,000	0.16	0.21	0.28
	South-West Asia	390,000	650,000	920,000	0.22	0.37	0.51
	Near and Middle East	30,000	70,000	130,000	0.03	0.08	0.13
	South Asia	250,000	250,000	260,000	0.03	0.03	0.03
Europe		**2,530,000**	**3,760,000**	**5,850,000**	**0.46**	**0.68**	**1.06**
	Eastern and South-Eastern Europe	1,800,000	2,900,000	4,750,000	0.78	1.26	2.07
	Western and Central Europe	740,000	870,000	1,100,000	0.23	0.27	0.34
Oceania		**120,000**	**130,000**	**160,000**	**0.49**	**0.53**	**0.66**
Global		**8,910,000**	**12,690,000**	**22,350,000**	**0.19**	**0.27**	**0.48**

Sumber: "World Drug Report 2014" halaman 6, dengan modifikasi.

Bila dilihat dari tabel 4 di atas, Benua Asia menyumbang proporsi angka yang paling besar dengan 4,65 juta penduduknya menggunakan obat terlarang. Dari angka tersebut, Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi kawasan yang paling banyak mengontribusikan angka pengguna obat terlarang di seluruh Asia, yakni sebanyak 3,26 juta jiwa.[193] Proporsi angka ini lebih besar dari total angka di Benua Amerika yaitu 3,13 juta jiwa dan sedikit lebih rendah dari total angka di benua Eropa sebesar 3,76 juta jiwa.

Semua angka tersebut dapat diartikan bahwa kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan pasar yang potensial bagi berbagai produk narkotika dan obat

[193] UNODC mengelompokkan Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai satu kawasan yang terdiri dari sepuluh negara anggota ASEAN ditambah dengan Timor Leste, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Mongolia.

terlarang. Bahkan menurut UNODC, selain sebagai pasar tradisional peredaran *ecstasy*, kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara juga merupakan pasar baru bagi *heroin* yang berasal dari Afghanistan.[194] Berdasarkan data tersebut, maka kejahatan transnasional peredaran narkotika dan obat terlarang menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena sifatnya yang transnasional, maka kejahatan peredaran narkotika dan obat terlarang tidak akan efektif jika ditangani secara parsial dalam wilayah domestik masing-masing negara. Sebaliknya dibutuhkan respons kolektif untuk menanganinya. Gagasan ini nyatanya disambut secara positif. Buktinya, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN telah mendorong pembentukan rezim kerja sama regional melalui capaian kesepahaman prinsip anti-peredaran narkotika dan obat terlarang serta serangkaian kerja sama *Government to Government* yang mengiringinya.

Tulisan ini akan memaparkan kerja sama regional apa saja yang telah dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi kejahatan transnasional narkotika dan obat terlarang melalui institusi regional ASEAN. Selain itu, tulisan ini juga akan mengusulkan beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan untuk menambah keefektifan kerja sama regional tersebut beserta dengan hambatan-hambatan yang dihadapinya.

[194] Menurut Mitchel P. Roth dalam *Global Organized Crime* (2010: 25) narkotika jenis heroin diproduksi di tiga lokasi utama lain selain Afghanistan yaitu Amerika Selatan, Meksiko, dan Asia Tenggara (Segitiga Emas). Heroin Afghanistan biasanya diedarkan di Eropa melalui Timur Tengah namun belakangan Asia Timur dan Asia Tenggara menjadi pasar baru yang berkembang.

II. Kejahatan Transnasional

Untuk menggambarkan istilah kejahatan transnasional secara spesifik, diperlukan pembatasan definisi bagi istilah itu. Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk spesifik dari relasi-relasi umum yang bersifat transnasional. Relasi transnasional ini bekerja melintasi batas-batas negara dan menciptakan jaringan di antara individu dan kelompok individu yang berada di negara-negara yang berbeda. (*"... those networks, associations or interactions which cut across national societies, creating linkages between individuals, groups, organizations and communities with different nation-states."*)[195] Wilayah kerja yang lintas batas serta kecenderungan menciptakan sistem jaringan inilah yang juga menjadi ciri dari kejahatan transnasional.

Menurut United Nations Convention on Transnational Organized Crime 2000, yang dimaksudkan dengan istilah kejahatan transnasional yaitu tindakan kejahatan yang melibatkan setidaknya dua negara. UNODC selanjutnya menjabarkan definisi tersebut dengan mengatakan bahwa suatu kejahatan bisa disebut transnasional jika misalnya suatu tindakan kriminal dilakukan di lebih dari satu negara, atau jika perencanaan dan perintah suatu tindakan kriminal dilakukan di Negara A tetapi tindakannya dilakukan di Negara B, atau jika suatu tindakan kriminal dilakukan di satu negara namun dampaknya terasa sampai ke setidaknya satu negara lain.

PBB membagi kejahatan transnasional ke dalam 18 kategori yang umumnya melibatkan aktor dan aktivitas di lebih dari satu negara. Hal ini termasuk pencucian

[195] Anthony G. McGrew, Paul G. Lewis, *et al*. *Global Politics.* Cambridge: Polity Press. 1993. Halaman 7.

uang; aktivitas terorisme; pencurian benda-benda seni, budaya, dan aset intelektual; penjualan senjata ilegal; pembajakan pesawat terbang; perompakan di laut; penipuan asuransi; kejahatan lingkungan dan komputer; perdagangan manusia dan bagian tubuh manusia; penjualan obat-obatan terlarang; kebangkrutan yang curang; penyusupan ke bisnis pihak lain, serta korupsi dan penyuapan petugas publik atau partai (UNODC 2000).[196]

III. Rezim Internasional

Demi mendudukkan kerja sama regional yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat terlarang di tempat yang tepat maka terlebih dahulu diperlukan penjelasan mengenai apa itu rezim internasional. Penjelasan ini menjadi penting sebab penjelasan mengenai rezim internasional memungkinkan kita untuk menggambarkan pola dan bentuk kerja sama regional yang telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN.

John Ruggie mendefinisikan rezim internasional sebagai *"a set of mutual expectations, rules and regulations, plans, organizational energies and financial commitments, which have been accepted by a group of states."*[197]

Sedangkan Stephen Krasner menjelaskan rezim internasional sebagai suatu *"sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision-making procedures around which actors' expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are*

[196] Mitchel P. Roth. *Global Organized Crime*. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2010. Halaman 12.
[197] Lihat Robert O. Keohane. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press. 1984. Halaman 57.

standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are spesific prescriptions of proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice."[198]

Definisi rezim internasional, yang dipinjam dari Ruggie dan Krasner, akan lebih dipertajam dengan melihatnya menurut dua hal utama yaitu norma (*norms*) dan prosedur pembuatan keputusan (*decision making procedures*), seperti yang didefinisikan oleh Jack Donelly sebagai *"norms and decision making procedures accepted by international actors to regulate an issue."*[199]

Berdasarkan definisi rezim internasional yang memberi penekanan pada norma dan prosedur pembuatan keputusan tersebut, lebih lanjut Donnelly membagi norma menjadi empat tipe:[200]

1. *Authoritative international norms* yaitu standar internasional yang mengikat dan diterima secara umum oleh negara-negara.

2. *International standards with self-selected national exemptions* yaitu aturan yang mengikat secara umum, meskipun demikian masing-masing negara dapat memilih untuk terikat atau tidak terikat oleh satu atau beberapa aturan.

3. *International guidelines* yaitu standar-standar internasional yang tidak mengikat meskipun dihormati dan dipercayai oleh negara-negara. Standar-standar ini

---

[198] Stephen D. Krasner. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables", dalam Stephen D. Krasner (ed.). *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press. 1983. Halaman 2.

[199] Jack Donnelly. "International Human Rights: A Regime Analysis", dalam *International Organization 40, 3,* Summer 1986. Massachusetts Institute of Technology and the World Peace Foundation.

[200] Ibid.

bervariasi mulai dari aturan yang kuat, eksplisit, dan detail hingga aturan yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang samar tentang aspirasi yang tidak jelas bentuknya.

4. *National standards* yaitu berupa ketiadaan norma internasional yang bersifat substantif.

Selain membagi norma menjadi empat tipe, Donnelly juga membagi prosedur pembuatan keputusan menjadi enam tipe, yaitu[201]:

1. *Authoritative international decision making*, merupakan pembuatan norma yang bersifat mengikat dan terlembagakan, termasuk di dalamnya kemampuan untuk turut menegakkan norma itu secara efektif.

2. *International monitoring*, merupakan peninjauan resmi secara internasional terhadap tindakan pelaksanaan norma di suatu negara namun tanpa disertai wewenang untuk melakukan prosedur penegakan norma tersebut. Aktivitas monitoring dapat dikategorikan berdasarkan ada tidaknya wewenang untuk melakukan penyelidikan independen dan membuat penilaian mengenai apakah suatu negara telah mematuhi norma internasional.

3. *International policy coordination*, merupakan penggunaan secara berkala dan terencana dari forum internasional untuk melakukan koordinasi antara kebijakan nasional suatu negara dengan norma internasional namun tanpa disertai dengan peninjauan internasional yang signifikan terhadap pelaksanaan norma internasional di negara tersebut.

[201] Ibid.

4. *International information exchange*, merupakan penggunaan saluran-saluran internasional secara terencana untuk saling bertukar dan memberi informasi pada negara-negara lain tentang pelaksanaan norma internasional di satu negara.

5. *International promotion or assistance*, merupakan promosi atau pendampingan internasional yang terlembagakan terhadap implementasi norma internasional di suatu negara.

6. *National decision making* yang berarti bahwa suatu negara memiliki kedaulatan penuh untuk membuat keputusan mengenai suatu isu yang terkait dengan norma internasional tertentu.

Berdasarkan tipe-tipe prosedur pembuatan keputusan, menurut Donnelly, rezim internasional dapat digolongkan menjadi empat tipe rezim, yaitu *promotional*, *implementational*, *enforcement*, dan *declaratory*. Rezim *promotional* terdiri dari beberapa aktivitas seperti pertukaran informasi antarnegara, promosi norma internasional dan pendampingan terhadap suatu negara, dan mungkin pengawasan secara lemah terhadap pelaksanaan norma internasional di suatu negara. Rezim *implementational* mencakup prosedur pengawasan yang lebih lemah, koordinasi kebijakan, dan beberapa bentuk pertukaran informasi. Rezim *enforcement* melibatkan pembuatan keputusan secara internasional dan bentuk-bentuk pengawasan internasional yang lebih kuat. Sedangkan rezim *declaratory* hanya menghasilkan norma internasional saja tanpa ada kewenangan pembuatan keputusan secara internasional (kecuali pembuatan norma itu sendiri).

IV. Kerja Sama ASEAN dalam Menangani Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang

Bahan pembuatan narkotika dan obat terlarang banyak ditemukan di Asia Tenggara terutama di daerah Segitiga Emas yang meliputi Myanmar bagian timur, Laos bagian barat, dan Thailand bagian utara. Terdorong oleh mudahnya menemukan bahan mentah yang melimpah dan sistem hukum yang korup maka beberapa negara di kawasan ini bahkan menjadi produsen narkotika dan obat terlarang selain juga menjadi tempat transit sebelum barang-barang tersebut dikirim ke negara-negara di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur.

Daerah Segitiga Emas adalah salah satu dari tempat-tempat penghasil narkotika yang terkemuka di dunia. Myanmar dan Laos bahkan menjadi negara terbesar pertama dan ketiga penanam bunga *poppy* yang nantinya akan diolah menjadi *heroin*.[202] Hasilnya diperkirakan dua per tiga dari total *opium* dunia diolah di Asia Tenggara.[203] Selain itu Segitiga Emas juga dikenal sebagai daerah penghasil *amphetamine-type stimulants* (ATS), atau lebih populer dengan sebutan '*shabu*' atau '*ice*', yang angka produksinya terus meningkat sejak 1990-an.

Peningkatan produksi ATS ini terutama disebabkan oleh murahnya biaya produksi barang tersebut di Myanmar sehingga di negara itu ATS dapat diproduksi secara besar-besaran. Jenis obat terlarang seperti *heroin* dan ATS diselundupkan keluar dari daerah Segitiga Emas ke kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Ho Chi Minh City, Manila, dan Phnom Penh sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar

[202] Ralf Emmers. "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy". UNISCI Discussion Papers. Mayo de 2003. Halaman 3.
[203] Ibid. Halaman 3.

global. Khususnya di Asia Tenggara, kota-kota tersebut berfungsi sebagai daerah perantara yang menjadi penghubung Segitiga Emas dengan kawasan-kawasan lainnya.

A. Prinsip-Prinsip Kerja Sama

Demi melihat fakta dan angka tentang peredaran narkotika dan obat terlarang yang mengkhawatirkan itu maka sejak pertengahan 1970-an negara-negara anggota ASEAN telah mencapai kesepakatan untuk bersama-sama melawan kejahatan peredaran narkotika dan obat terlarang. Usaha ini dimulai dengan penandatanganan Declaration of ASEAN Concord pada bulan Februari 1976 oleh kepala-kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara pendiri ASEAN. Isi deklarasi itu adalah dorongan untuk melakukan intensifikasi kerja sama di antara negara-negara anggota, selain juga dengan badan-badan internasional yang relevan, dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat terlarang secara ilegal.[204]

Deklarasi tersebut kemudian mendorong disepakatinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs yang menyediakan kerangka kerja bagi program-aksi dalam konteks kerja sama memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Deklarasi ini mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mencegah dan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan obat terlarang. Selain itu negara-negara anggota juga

[204] http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime

didorong untuk melakukan kerja sama dalam bidang penelitian dan pendidikan demi meningkatkan perlawanan terhadap penyalahgunaan obat dan segala konsekuensi yang menyertainya. Perlawanan melalui penelitian dan pendidikan ini hendaknya juga diperkuat dengan mengintensifkan kerja sama badan-badan nasional di masing-masing negara dengan Colombo Plan Bureau, Perserikatan Bangsa-bangsa dan badan-badan yang ada di bawahnya, INTERPOL, dan badan-badan lain yang turut terlibat dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.[205]

Deklarasi tersebut segera direspons dengan adanya ASEAN Drug Experts Meeting yang pertama di Singapura pada tahun 1976 yang menghasilkan rekomendasi terkait empat bidang yaitu pembuatan dan penegakan hukum, perawatan dan rehabilitasi, pencegahan dan informasi, serta pelatihan dan penelitian. Pertemuan di Singapura itu juga berhasil memformulasikan strategi untuk semakin mempererat kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka implementasi ASEAN Declaration of Principles.

Kerja sama regional ASEAN semakin dipererat dengan pengadopsian dokumen ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking pada ASEAN Drug Experts Meeting kedelapan pada 1984. Dokumen kerja sama itu memperlihatkan perkembangan yang signifikan mengenai perubahan pandangan terhadap masalah obat terlarang. Dalam dokumen itu, obat terlarang juga turut dipandang sebagai suatu permasalahan sosial dan kesehatan yang berdampak tidak hanya pada keamanan dan stabilitas melainkan juga kesejahteraan

[205] http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview

dan kebahagiaan nasional. Rencana kerja sama regional tersebut mendorong negara-negara ASEAN untuk memiliki pandangan, pendekatan, dan strategi yang sama agar dapat dikoordinasikan secara efektif, tidak hanya di tingkat nasional melainkan juga di tingkat regional dan internasional.[206] Dokumen kerja sama itu memuat rekomendasi langkah-langkah pengurangan di sisi *supply* dan *demand* obat terlarang dan peningkatan sistem pengawasan hukum.

Kerja sama regional semakin diperkuat setelah ASEAN menyatakan kembali kebutuhan untuk bertindak menanggulangi ancaman penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang yang semakin meningkat. Pada ASEAN Informal Summit kedua tahun 1997, para pemimpin ASEAN pertama kali menyuarakan ide tentang Asia Tenggara yang bebas dari produksi, pengolahan, peredaran, dan pemakaian obat terlarang. Ide ini semakin dipertegas saat ASEAN Ministerial Meeting ke-31 pada Juli 1998. Saat itu para menteri luar negeri ASEAN menandatangani Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN pada 2020. Penandatanganan deklarasi itu menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk memberantas peredaran obat terlarang. Ide untuk bebas dari produksi, pengolahan, peredaran, dan pemakaian obat terlarang pada 2020 dimajukan menjadi 2015 setelah disetujui oleh para menteri luar negeri ASEAN pada Juli 2000.

B. Kerangka Kerja Sama Institusional

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)

Institusi ini dibentuk pertama kali pada 1997 dengan tujuan menaruh perhatian yang lebih besar pada organisasi-organisasi kriminal yang sudah menjadi sangat

[206] Ibid.

beragam. Pada pertemuan kedua tahun 1999, AMMTC mengadopsi ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime. Rencana aksi ini berisi mekanisme dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperluas usaha negara-negara anggota ASEAN untuk melawan kejahatan transnasional termasuk peredaran narkotika dan obat terlarang. Mekanisme dan kegiatan yang dimaksudkan berada dalam skala nasional, maupun dalam skala bilateral dan regional.

Rencana aksi tersebut berisi strategi regional yang bersifat kohesif untuk memberantas kejahatan transnasional dengan beberapa cara, yaitu: pertukaran informasi, kerja sama dalam bidang hukum dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas institusional, pelatihan dan kerja sama ekstra regional.[207] Rencana aksi itu juga mendorong terjadinya kesepakatan-kesepakatan hukum bilateral dan multilateral untuk memfasilitasi terjadinya penahanan, investigasi, penuntutan dan ekstradisi, pertukaran saksi, peminjaman barang bukti, penyelidikan, penyitaan yang berkaitan dengan kejahatan untuk meningkatkan kerja sama hukum dan administrasi di antara negara-negara anggota ASEAN.[208] Selain itu rencana aksi juga mendorong terjadinya program pertukaran dalam bidang kebijakan, hukum dan penegakannya, serta akademik di antara negara anggota ASEAN. Rencana aksi lebih jauh juga berusaha mengimplementasikan langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap

[207] Ibid.
[208] Zurie Karina. ”The ASEAN’s Fight Against Drug Trafficking in the Golden Triangle: An International Regime Perspective”, master thesis in Graduate School of International Affairs, Ming Chuan University. Juni 2009. Halaman 108-109.

para hakim, jaksa, saksi, dan aparat penegak hukum dari aksi pembalasan oleh organisasi-organisasi kejahatan transnasional.[209]

Selain itu AMMTC juga dapat berkoordinasi dengan ASEAN Senior Law Officials' Meeting untuk mengimplementasikan ASEAN Legal Information Network System. Menurut rencana aksi yang sebelumnya telah diadopsi, AMMTC juga didorong untuk melakukan kerja sama dengan beberapa badan ASEAN lain seperti ASEAN Law Ministers and Attorneys-General, ASEAN Chief of National Police, ASEAN Finance Ministers, para Director-General of Immigration, para Director General of Customs dalam hal investigasi, penuntutan dan rehabilitasi para pelaku kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM)

Pada pertemuan pertama tahun 1997, AFMM menandatangani ASEAN Agreement on Customs. Kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama negara-negara ASEAN dalam hal aktivitas kepabeanan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkotika dan obat terlarang serta memfasilitasi usaha bersama untuk mereduksi penyelundupan.

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)

ASOD didirikan pada 1984. Tugas kerjanya adalah berdasarkan ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Control yang diadopsi oleh ASOD pada pertemuan ke-17

[209] Ibid. Halaman 109.

badan itu bulan Oktober 1994.[210] Tugas dari ASOD adalah meningkatkan implementasi ASEAN Declaration of Principles to Combat the Drug Problem yang dicanangkan pada 1976.

Peningkatan itu dapat diraih melalui beberapa cara yaitu mengonsolidasikan dan memperkuat usaha bersama dalam mengawasi dan mencegah masalah obat terlarang di kawasan Asia Tenggara, secara berkala mengurangi penanaman dan pengolahan tanaman bahan narkotika di kawasan, serta mendesain, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi semua program aksi ASEAN dalam hal pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan obat terlarang.

ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)

ASEANAPOL bertugas menangani aspek pencegahan, penegakan, dan operasional dalam kerja sama melawan kejahatan transnasional.[211] Institusi ini telah sering kali saling berbagi pengetahuan dan keahlian dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian seperti penegakan hukum dan penanganan kejahatan transnasional.

ASEANAPOL memiliki tiga komisi *ad hoc* yang salah satunya menangani peredaran ilegal narkotika dan obat terlarang. Selain itu ASEANAPOL juga memiliki sistem penyimpanan data sendiri yang memungkinkan negara-negara angota untuk saling bertukar informasi secara cepat, aman, dan nyaman. Sistem penyimpanan data

[210] http://www.asean.org/news/item/managing-transnational-crime-in-asean-by-s-pushpanathan-2
[211] Zurie Karina, op.cit., halaman 110.

ASEANAPOL ini juga menyediakan sarana untuk mengakses sistem komputer di Sekretariat Jenderal INTERPOL.

V. Kemungkinan Peningkatan Kerja Sama ASEAN

Kejahatan transnasional peredaran narkotika dan obat terlarang rupanya menjadi ancaman yang serius bagi ASEAN. Menurut UNODC, Asia Tenggara dijadikan oleh berbagai organisasi kriminal sebagai daerah perantara utama dalam perdagangan barang-barang itu.[212] Asia Tenggara merupakan pasar narkotika dan obat terlarang yang terus berkembang. Permintaan akan barang-barang tersebut terutama berasal dari populasi anak muda yang terus bertumbuh. Pertumbuhan permintaan itu juga didorong oleh seiring membaiknya keadaan perekonomian regional.

Situasi ini disikapi serius oleh negara-negara ASEAN dengan mengadakan berbagai kerja sama. Meskipun demikian masih ada lebih dari dua juta pengguna narkotika dan obat terlarang di masing-masing dari keempat negara ASEAN; Indonesia, Thailand, Laos, dan Filipina.[213] Sedangkan di Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar ada sekitar 200.000 sampai satu juta pengguna narkotika dan obat terlarang.[214]

Angka-angka di atas menuntun kita semua pada satu pertanyaan: sudah efektifkah model kerja sama regional ASEAN dalam memberantas kejahatan

[212] www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a-18231494
[213] Nick Crofts. “Drug Treatment in East and South East Asia: The Need for Effective Approaches”. UNODC Technical Resource Centre for Drug Treatment and Rehabilitation. Melbourne, Australia.
[214] Ibid.

peredaran narkotika dan obat terlarang? Pertanyaan tersebut memicu pertanyaan lanjutan: kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh ASEAN untuk memerangi kejahatan tersebut? Apa saja hambatannya?

Angka-angka yang menunjukkan jumlah pengguna obat terlarang di negara-negara Asia Tenggara tersebut mengisyaratkan bahwa rezim kerja sama regional ASEAN belum efektif dalam memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang. Rezim anti-narkotika dan obat terlarang yang dibangun oleh negara-negara ASEAN merupakan rezim yang masih sebatas bersifat *promotional* dan *implementational* selain tentunya *declaratory*.

Rezim kerja sama regional ASEAN pada mulanya bersifat *declaratory* karena awalnya ASEAN hanya menghasilkan norma internasional saja tanpa ada kewenangan pembuatan keputusan secara internasional. Hal ini tampak pada berbagai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip anti-penyalahgunaan obat terlarang yang telah disetujui oleh negara-negara ASEAN seperti pada Declaration of ASEAN Concord dan ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs pada 1976. Dalam kedua deklarasi tersebut, negara-negara ASEAN hanya bersama-sama didorong untuk melakukan kerja sama secara intensif dalam rangka memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang, tanpa ada kejelasan mengenai struktur kerja sama yang akan digunakan.

Rezim kerja sama regional ASEAN yang telah dibangun selama ini juga merupakan rezim yang bersifat *promotional* dan *implementational*. Bersifat *promotional* artinya ada beberapa aktivitas bersama yang bisa dilakukan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi pertukaran informasi antarnegara, promosi norma

internasional dan pendampingan terhadap suatu negara, dan mungkin pengawasan secara lemah terhadap pelaksanaan norma internasional di suatu negara. Sedangkan bersifat *implementational* berarti ada prosedur pengawasan yang lebih lemah, koordinasi kebijakan, dan beberapa bentuk pertukaran informasi di antara negara anggota.

Bentuk rezim kerja sama regional yang bersifat *promotional* dan *implementational* ini dapat dilihat dari kesepakatan ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking pada 1984 yang menjadi dasar bagi kerja sama yang lebih luas termasuk pertukaran informasi terbatas dan koordinasi strategi yang lebih efektif.

Pertukaran informasi di antara negara-negara ASEAN dilakukan dalam kerangka kerja sama institusional ASEANAPOL. Institusi kerja sama antar kepolisian se-ASEAN ini merupakan sarana untuk saling berbagi pengetahuan maupun keahlian yang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum dan penanganan kejahatan transnasional. Untuk mendukung kinerjanya, ASEANAPOL juga memiliki sistem penyimpanan data sendiri yang memungkinkan negara-negara angota untuk saling bertukar informasi dengan cepat dan aman.

Meskipun ASEAN telah berusaha membangun rezim kerja sama regional untuk mengatasi kejahatan transnasional peredaran narkotika dan obat terlarang, namun apa yang telah dilakukan oleh ASEAN tersebut belumlah efektif. Ketidakefektifan itu disebabkan oleh model kerja sama yang tidak bersifat *enforcement* di mana negara-negara ASEAN hanya menyetujui adanya kesepakatan prinsip yang nantinya menjadi

landasan bagi serangkaian kerja sama. Wewenang yang dimiliki oleh institusi-institusi kerja sama itu hanya kewenangan yang bersifat mendorong agar prinsip dan segala kesepakatan yang disetujui dilakukan secara konsisten di wilayah masing-masing negara.

Penanganan yang masih bersifat parsial tidak akan efektif dalam mengatasi kejahatan yang bersifat transnasional. Ketiadaan institusi regional yang memiliki wewenang penegakan hukum justru akan membuat kejahatan ini semakin berkembang. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh perbedaan hukum dan mekanisme penanganan kejahatan di masing-masing negara ASEAN.

Organisasi-organisasi kriminal transnasional akan cenderung memilih negara-negara yang penegakan hukumnya lemah untuk melakukan berbagai operasinya, mulai dari menjadikan negara itu sebagai tempat produksi, tempat penyimpanan atau gudang sementara, tempat distribusi ke pasar global, atau malah membuat negara itu menjadi pasar bagi obat terlarang yang mereka produksi. Hal itu bisa terjadi jika suatu negara memiliki institusi kepolisian dan peradilan yang lemah dan korup, masa hukuman bagi produsen dan pengedar obat terlarang yang relatif ringan, dan bahkan ketiadaan perangkat hukum khusus untuk menjerat organisasi pengedar narkotika dan obat terlarang seperti undang-undang anti-narkotika dan obat terlarang dan/atau badan khusus yang menangani kejahatan peredaran narkotika dan obat terlarang.

Jika suatu negara di ASEAN memiliki kecenderungan seperti yang sudah dipaparkan di atas maka ada kemungkinan negara tersebut akan menjadi sentra produksi dan *hub* distribusi ke pasar global dan regional. Sudah pasti, jika hal itu terjadi, hal ini akan menimbulkan ancaman keamanan regional di Asia Tenggara.

Demi memastikan keamanan dan perdamaian regional, negara-negara ASEAN dapat mendorong keefektifan rezim kerja sama regional dalam bentuk institusi multilateral. Institusi formal yang bersifat multilateral ini diandaikan memiliki kewenangan yang dengannya institusi tersebut dapat mencapai hasil kolektif secara internasional atau regional.[215] Perbaikan institusional ini diharapkan mampu membuat kerja sama regional menjadi semakin efektif.

Bentuk perbaikan institusional untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional peredaran obat terlarang tersebut misalnya adalah kerja sama regional yang lebih serius dan mengikat dengan memanfaatkan institusi yang telah ada yaitu di antara institusi-institusi kepolisian se-Asia Tenggara, ASEANAPOL.

Dalam derajat yang paling moderat, ASEANAPOL dapat menjadi sarana dan sentra untuk melakukan koordinasi terhadap strategi penanganan kejahatan peredaran obat terlarang, termasuk koordinasi langkah-langkah penegakan hukum. Dalam derajat yang lebih kuat, misalnya, institusi tersebut dapat didorong untuk melakukan penegakan hukum khusus terhadap kasus peredaran obat terlarang dalam wilayah kerja yang bersifat regional.

Untuk melakukan hal ini maka, pertama, ASEANAPOL mesti membentuk biro khusus yang menangani masalah kejahatan transnasional peredaran narkotika dan obat terlarang. Kemudian negara-negara ASEAN mesti memberikan kewenangan khusus pada institusi kepolisiannya masing-masing untuk bergabung dalam biro khusus tersebut. Berikutnya ASEANAPOL, melalui biro khusus itu, harus diberi

[215] Jennifer Sterling-Folker. "Neoliberalism", dalam Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith (eds.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity, Third Edition.* Oxford: Oxford University Press. 2013. Halaman 114-115.

mandat khusus yang berisi tugas dan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum regional dalam kasus peredaran obat terlarang. Mandat khusus itu diberikan oleh semua negara anggota ASEAN melalui mekanisme tertentu dalam ASEAN. Setelah itu negara-negara tersebut diharuskan membuka wilayah hukumnya untuk dimasuki oleh ASEANAPOL dalam kasus khusus peredaran obat terlarang. ASEANAPOL melalui biro khususnya dapat melakukan langkah-langkah penegakan hukum termasuk pencarian bukti-bukti kejahatan, penyelidikan, dan penuntutan di pengadilan.

Meskipun demikian, perbaikan institusional dalam kerangka penegakan hukum ini akan menjadi sia-sia jika sistem hukum masing-masing negara berbeda satu dengan lainnya. Misalnya seseorang yang bersalah karena memproduksi seratus kilogram heroin bisa jadi dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada di negara lain. Oleh karena alasan inilah maka perbaikan institusional dalam hal sistem peradilan hukum juga diperlukan.

Perbaikan institusional dalam hal sistem peradilan hukum yang paling mungkin dilakukan, misalnya, ASEAN melalui ASEAN Law Ministers and Attorneys-General dapat membentuk satu badan yang bertugas melakukan koordinasi sistem peradilan hukum di Asia Tenggara. Badan ini bertugas melakukan koordinasi melalui asistensi dan supervisi di berbagai lembaga peradilan di Asia Tenggara demi mendorong terjadinya kesetaraan sistem peradilan yang khusus terkait dengan peredaran narkotika dan obat terlarang di seluruh kawasan. Tujuannya: perbedaan hukuman untuk kejahatan yang sama terkait peredaran obat terlarang dapat diatasi.

Dalam derajat yang lebih ekstrem, misalnya, negara-negara ASEAN memberi mandat khusus melalui mekanisme tertentu pada badan yang dibentuk oleh ASEAN Law Ministers and Attorneys-General tersebut. Mandat itu berisi tugas dan kewenangan untuk membangun infrastruktur hukum baru yang khusus mengatur mengenai peredaran narkotika dan obat terlarang. Infrastruktur hukum baru yang khusus berbicara mengenai peredaran obat terlarang tersebut kemudian diadopsi dan didomestifikasi ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negara.

Sementara usaha yang paling ekstrem, misalnya, negara-negara ASEAN dapat membentuk peradilan regional, dapat bersifat *ad hoc* selama beberapa waktu untuk kemudian dipermanenkan, yang khusus menangani kasus peredaran narkotika dan obat terlarang. Peradilan regional ini didukung oleh infrastruktur hukum regional yang telah dibangun oleh badan khusus seperti yang disebutkan di atas. Penuntutan dan pengadilan atas semua kasus peredaran obat terlarang di seluruh penjuru Asia Tenggara dilakukan di peradilan regional tersebut.

VI. Penutup

Kejahatan transnasional peredaran narkotika dan obat terlarang merupakan bentuk kejahatan yang harus ditangani secara regional. Penanganan yang bersifat parsial akan menjadi tidak efektif. Negara-negara mesti melakukan lompatan ke depan untuk menemukan konsensus mengenai bentuk kerja sama institusional yang lebih mengikat untuk mengatasi ancaman kemanan non-tradisional tersebut.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi tantangan bagi usaha perbaikan institusional di kawasan Asia Tenggara. Pertama, ASEAN didirikan pada masa

Perang Dingin sehingga prinsip kedaulatan dan prinsip non-intervensi menjadi landasan yang disepakati bersama. Ide mengenai kemungkinan perkembangan kerja sama regional yang lebih mengikat seperti yang ditunjukkan di atas mensyaratkan negara untuk lebih terbuka pada intervensi oleh badan kerja sama regional. Hal ini tentu saja akan mengorbankan kedaulatan negara dalam bidang politik dan hukum. Pengorbanan ini yang hampir pasti tidak disukai oleh negara-negara ASEAN. Maka kerja sama regional yang lebih mengikat mengharuskan negara-negara tersebut untuk terlebih dahulu mencapai konsensus baru yang melampaui prinsip-prinsip yang dibangun saat Perang Dingin itu.

Kedua, untuk melakukan kerja sama regional yang lebih mengikat diperlukan kepercayaan, *trust*, di antara berbagai pihak yang terlibat. Masalahnya, meskipun negara-negara di Asia Tenggara menyadari pentingnya kerja sama namun mereka tetap tidak mampu menghilangkan sepenuhnya anggapan bahwa negara lain akan mengambil keuntungan di balik kerja sama yang mereka lakukan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah dengan memperjelas aturan main, *rule of the game*, dari kerja sama tersebut sehingga tercipta transparansi mengenai hasil (*outcome*) dan keuntungan (*gain*) apa yang akan didapat masing-masing pihak dari kerja sama itu.

Ketiga, masing-masing negara ASEAN memiliki agenda kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan sulitnya menemukan konsensus bersama tentang struktur kerja sama regional yang akan dicapai. Masing-masing negara cenderung akan didorong oleh kepentingan mereka masing-masing. Selama peredaran narkotika dan obat terlarang di wilayah nasional mereka tidak dianggap sebagai ancaman keamanan non-tradisional yang mendesak untuk ditangani, dan oleh karenanya bukan

menjadi prioritas, maka selama itu pula sebuah negara cenderung untuk enggan melangkah lebih jauh ke dalam satu bentuk kerja sama regional yang lebih mengikat. Perbedaan prioritas inilah yang akhirnya membuat negara-negara ASEAN akan sulit menemukan struktur kerja sama regional yang akan dicapai bersama.

Bibliografi

Buku dan Artikel

Anthony G. McGrew, Paul G. Lewis, *et al*. *Global Politics*. Cambridge: Polity Press. 1993.

Jack Donnelly. "International Human Rights: A Regime Analysis", dalam *International Organization 40, 3,* Summer 1986. Massachusetts Institute of Technology and the World Peace Foundation

Jennifer Sterling-Folker. "Neoliberalism", dalam Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith (eds.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity, Third Edition*. Oxford: Oxford University Press. 2013.

Mitchel P. Roth. *Global Organized Crime*. Santa Barbara: ABC-CLIO. 2010.

Nick Crofts. "Drug Treatment in East and South East Asia: The Need for Effective Approaches". UNODC Technical Resource Centre for Drug Treatment and Rehabilitation. Melbourne, Australia.

Ralf Emmers. "The Threat of Transnational Crime in Southeast Asia: Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy". UNISCI Discussion Papers. Mayo de 2003.

Robert O. Keohane. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press. 1984.

Stephen D. Krasner. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables", dalam Stephen D. Krasner (ed.). *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press. 1983.

Zurie Karina. ”The ASEAN’s Fight Against Drug Trafficking in the Golden Triangle: An International Regime Perspective”, master thesis in Graduate School of International Affairs, Ming Chuan University. Juni 2009.

http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime

http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview

http://www.asean.org/news/item/managing-transnational-crime-in-asean-by-s-pushpanathan-2

www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a-18231494

Dokumen

Global Illicit Drug Trends 2001

World Drug Report 2014

Kapitalisme VS Teori Hijau:

Studi Kasus Asap Lintas-Batas Negara di Wilayah ASEAN

Riski Baskoro

(Universitas Presiden)

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan suatu elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Akan tetapi, lingkungan juga bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan manusia ketika sekelompok masyarakat tidak menghargai lingkungan. Beberapa akademisi dari ilmu HI, membawa kajian ini sebagai suatu kajian yang dikategorikan ke dalam *environmental security,* dimana perdebatannya dapat melebar dari aktor-aktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan sampai implikasinya terhadap kehidupan global.

Environmental security seringkali "didengungkan" oleh Singapura dan Malaysia ketika permasalahan kebakaran hutan terjadi di pulau Sumatra dan pulau Kalimantan, dimana kedua pulau besar ini masuk kedalam wilayah sah NKRI. Hal ini dapat dilihat ketika negara tetangga terancam, khususnya ancaman terhadap kesehatan makhluk hidup dan ancaman terhadap sendi-sendi ekonomi di kawasan ASEAN akibat dari polusi asap lintas batas yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Dalam tingkat regional sekalipun, Indonesia juga telah meratifikasi AATHP (*ASEAN Agreement on Trans boundary Pollution*) untuk memerangi kabut asap. Kendati demikian, permasalahan kebakaran hutan ini masih menghadapi kendala dikarenakan

masih banyak para pelaku usaha agri bisnis yang masih mengutamakan sistem *slash and burn* yang dinilai lebih efisien dan efektif untuk membuka lahan baru.

Dalam studi ini, kajian *environmental security* timbul akibat adanya persinggungan antara *green theory* dan prinsip-prinsip kapitalisme yang dituangkan kedalam suatu studi kasus kebakaran hutan di Indonesia yang mungkin saja bisa menimbulkan sengketa antar negara ataupun pertentangan penduduk sipil. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperkaya studi hubungan internasional, dengan mengkaji praktek kapitalisme dan teori hijau yang didukung oleh studi kasus yang terjadi di kawasan ASEAN, dalam menghadapi kasus kebakaran hutan yang menimbulkan asap lintas batas dan ancamannya terhadap manusia.

Kata kunci: *Environmental security*, *Capitalism*, *Green Theory*, ancaman dan stabilitas.

Pendahuluan

Isu lingkungan tidak pernah menjadi perhatian dalam studi Hubungan Internasional (HI). Kendati demikian, dimulai dari tahun 1970-an hingga saat ini, para akademisi HI mulai banyak memperhatikan isu lingkungan sebagai suatu fenomena global dalam studi HI. Isu lingkungan senyatanya telah dimasukan kedalam sub-bidang studi HI yang penekanannya terhadap kerjasama internasional terhadap isu lingkungan, seperti halnya; perubahan iklim, erosi dan menipisnya lapisan ozon. Kerangka teoritis dalam kajian HI mengenai permasalahan lingkungan dapat dimasukan kedalam payung Neoliberalisme (Eckersley 2010:258-276).

Salah satu isu lingkungan yang dapat berdampak global adalah asap lintas batas yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Masalah ini dapat berimplikasi terhadap situasi politik pada suatu negara, hal ini disebabkan suatu negara dapat terancam akibat dari adanya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut lintas-batas negara (Koe, Arellano dan McGregor 2001; Garnaut 2009). Ditambah lagi, asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dapat menghasilkan CO2 dan gas beracun lainnya yang kemudian akan merusak kemampuan hutan sebagai penyerap karbon, menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global (Browner 1997). Dampak lainnya dari kebakaran hutan adalah bahaya kesehatan pernapasan yang ditimbulkan dari asap dan CO2, ketidak keseimbangan lingkungan dan banyak lagi (Posa 2011).

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menyumbang gas emisi terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Gas emisi tersebut pada umumnya disebabkan oleh kebakaran hutan yang menimbulkan asap pekat. Pembakaran hutan dengan tujuan untuk membuka lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit merupakan hal yang sudah sekian lama dilakukan para pengusaha agribisnis, hal ini disebabkan membuka lahan baru dengan cara membakar hutan ataupun lahan gambut merupakan cara yang sangat efektif dan efisien untuk kepentingan ekonomi sekelompok orang. Dalam lima puluh terakhir, lebih dari dua puluh juta hektar dari wilayah hutan di Indonesia telah rusak fungsinya. Hal ini bisa mengancam bagi suku-suku pedalaman maupun masyarakat yang tinggal disekitar hutan, karena selama ini suku-suku pedalaman yang tinggal sangat bergantung dengan alam, khususnya hutan. Rupanya, isu ini tidak hanya mengancam kehidupan sekelompok masyarakat saja, melainkan juga mengancam kehidupan di kawasan

ASEAN, khususnya ancaman nasional terhadap Malaysia dan Singapura ketika teknik *slash and burn* terjadi di Indonesia yang pada akhirnya berkontribusi untuk membawa dampak buruk bagi kehidupan global (VOA News 2009).

Tulisan ini akan membahas masalah kebakaran hutan di Indonesia yang dapat menimbulkan asap lintas-batas yang akan mengancam keamanan nasional negara, khususnya adalah Singapura dan Malaysia. Dari tulisan ini, Saya akan mencoba untuk menjelaskan keterkaitan studi kasus kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di wilayah Indonesia dengan Teori Hijau (*Green Theory*) VS Kapitalisme dalam studi Hubungan Internasional (HI).

Kerangka Teori: Green Theory VS Kapitalisme

Eckersley (2010:258-276) berpendapat, *Green theory* lahir ketika degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia telah terjadi sekian lama. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di banyak negara, lonjakan jumlah populasi manusia, permintaan akan sumber daya energi, penemuan teknologi yang canggih serta meningkatnya konsumsi terhadap sumber daya, secara langsung mengakibatkan meningkatnya kadar polusi dan limbah produksi, hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pada lingkungan. Oleh sebab itu, sekelompok warga dunia membentuk gerakan yang mendukung akan kesadaran lingkungan untuk menyelamatkan generasi penerus mereka serta gerakan ini juga dianggap sebagai gerakan modern dan kelahiran teori hijau.

Gerakan lingkungan ini, menitikberatkan perubahan pesat ekonomi, tentu saja juga memiliki implikasi yang sangat besar terhadap lingkungan. Senyatanya, gerakan ini memfokuskan krisis ekologi ini membutuhkan peranan global, termasuk semua negara diharuskan berperan aktif untuk lebih menyadari dan saling bekerjasama dalam mengurangi dampak degradasi tehadap ekologi. Krisis terhadap lingkungan ini, melibatkan berbagai aktor-aktor lintas batas yang memerlukan proses, seperti negosiasi, yang panjang dikarenakan banyak aktor dalam jumlah besar yang memiliki kepentingan tersendiri. Teori hijau juga menekankan; meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, banyaknya industri-industri yang beroperasi, meledaknya populasi manusia, harus diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga, melestarikan dan melindungi lingkungan untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya (2010: 258-276).

Pada tahun 70an, diskusi tentang isu lingkungan menjadi populer semenjak teori hijau mengkritisi efek buruk perkembangan ekonomi terhadap lingkungan dan isu ini menjadi perhatian juga bagi kalangan pemerhati lingkungan hidup, melalui tulisan-tulisan di majalah yang mengecam ledakan industri yang berdampak langsung dengan krisis terhadap lingkungan hidup (2009: 258-276). Pada dasarnya, teori hijau juga muncul karena adanya empat hal, yaitu; kesadaran terhadap ekologi, keadilan sosial tanpa jalan kekerasan (*hard power*) dan demokrasi. Selanjutnya, teori hijau bisa dikatakan sebagai pesaing terbesar kapitalisme sehubungan kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hal ini karena unsur inti teori hijau adalah untuk mengurangi masalah risiko ekologi secara global yang juga meliputi tidak hanya masyarakat, generasi penerus dan spesies bukan manusia (2009: 258-276).

Kendati demikian, pemikiran Thurow (1996) tentang kapitalisme, dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan produksi sarana dimiliki sepenuhnya oleh sektor swasta dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam kegiatan ekonomi. Semangat kapitalisme cenderung membuat pengusaha mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, sering tanpa memperhatikan masalah ekologi. Kapitalisme dapat dilihat dari industrialisasi di banyak negara yang sedang berkembang sebagai upaya pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Pembangunan industri membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di beberapa negara melalui perdagangan dan pertukaran produk. Namun, dalam kasus pembakaran hutan di Indonesia, hal ini bertentangan dengan teori hijau, karena teori hijau seperti yang disebutkan di atas adalah upaya untuk menghambat krisis lingkungan. Teori hijau dan kapitalisme, secara khusus memiliki tujuan yang berbeda; dan keduanya saling bersinggungan dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Eckersley (2009: 258-276) berpendapat, teori hijau sejak awal abad dua puluh satu telah difokuskan pada pengembangan teknologi maju di bidang pertanian yang meningkatkan hubungan dengan alam yang non-manusia agar kemajuan teknologi dalam pertanian juga memperhatikan dan dapat membantu mengurangi dampak degradasi ekologi.

Indonesia memiliki lebih dari 800.000 Km2 kawasan hutan (Statistik Indonesia 2014) dan beberapa wilayah dari kawasan hutan tersebut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini disebabkan oleh, pendapatan ekonomi Indonesia salah satunya bergantung dari perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat

terlihat dari data sekunder yang saya dapatkan dari The Seattle Globalis (2012) yang menyatakan; Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit, pada tahun 2010 saja, negara ini melalui para pelaku agribisnis menghasilkan sekitar sembilan puluh juta ton kelapa sawit dimana terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 1997 sampai 2012. Industri kelapa sawit di Indonesia mendapatkan banyak pesanan besar dari mitra bisnis mereka di Amerika Serikat dan banyak negara di kawasan Eropa. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pemerintah Indonesia terus mengedepankan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu ujung tombak pendapatan negara, yang umumnya perkebunan tersebut tersebar di pulau Sumatera dan Kalimantan.

Namun demikian, perusahaan-perusahaan agribisnis yang diberikan wewenang oleh pemerintah, membuka lahan dengan cara membakar lahan gambut yang dianggap tidak produktif dalam skala yang sangat besar. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan aspek keuntungan yang memaksa deforestasi setiap tahunnya, lalu mengkonversi dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas ekspor. Teknik yang dipraktekan oleh pelaku agribisnis, yaitu *slash and burn* tentunya tidak hanya menghasilkan asap tebal yang akan mengancam kesehatan masyarakat sekitar, tetapi juga bisa menyebabkan ancaman penduduk negara lain yang diakibatkan oleh asap lintas batas.

Sejak tahun 1990, pengembangan kelapa sawit di Indonesia, menurut Carlson et el. (2012), telah mengalami perluasan perkebunan paling cepat di seluruh dunia. Pada tahun 2010, perkebunan kelapa sawit (Elaeisguineensis) telah meningkat menjadi 7,8 meter hektar (Mha), di mana 90% dari ekspansi yang cepat ini terjadi di Sumatera dan

Kalimantan. Akibatnya, emisi per tahun di Indonesia mencapai puncaknya dan menjadikan Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia menurut VOA News (2009) dan Seattle Globalis (2012). Deforestasi ini, dipengaruhi oleh tuntutan global terhadap *biofuel* dan produk makanan ringan yang menyebabkan sektor pertanian dikapitalisasi, terutama di perkebunan kelapa sawit.

Berkembang pesatnya sektor agribisnis di Indonesia didorong terutama oleh teori kapitalisme. Seperti disebutkan di atas, dalam teori hijau, kapitalisme menetapkan berbagai industri yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan (Borneo). Saya percaya, di dalam kapitalisme ada persaingan bebas dalam bisnis yang memungkinkan individu terbaik untuk sukses. Jika seorang individu gagal untuk bertahan hidup, ia akan menjadi miskin atau tidak berhasil. Ini memaksa kondisi pengusaha untuk berpikir kreatif dan bergerak cepat untuk mendapatkan mitra dagang mereka. Pengusaha juga harus bersaing satu sama lain untuk mendominasi orang lain atau untuk membuat perusahaan mereka bertahan hidup. Kondisi ini merangsang orang-orang yang terlibat dalam agribisnis untuk melakukan cara yang dianggap oleh mereka efisien dan praktis, guna mempercepat proses produksi.

Untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, memangkas dan membakar (*slash and burn*) adalah teknik yang dianggap paling mudah, paling murah dan cara tercepat. Sebenarnya teknik ini adalah cara tradisional, yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal dalam skala yang sangat kecil, namun dalam tiga puluh tahun terakhir, cara tradisional ini juga digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam skala yang sangat besar. Kondisi ini, sebenarnya, bisa membawa

perkembangan pesat terhadap industrialisasi di bidang pertanian (kelapa sawit) dan juga membawa devisa bagi Indonesia. Perkebunan kelapa sawit, benar-benar membawa dampak positif di sisi ekonomi pemerintah Indonesia. Akan tetapi, selalu ada harga yang harus dibayar terhadap perkebunan kelapa sawit tersebut, yakni; kerusakan lingkungan.

Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, karena penggunaan teknik membakar ini, terjadi pada musim panas tahun 1997. Hutan di Kalimantan Barat secara historis rentan terhadap kebakaran, penggunaan teknik memangkas dan membakar, ditambah lagi dengan kondisi cuaca yang luar biasa kering kemudian adanya iklim El Nino dapat menyebabkan hutan terbakar dengan cakupan mencapai jutaan hektar area. Secara kumulatif, kerusakan hutan terparah terjadi pada tahun 1997 di Kalimantan Barat Indonesia (Varma 2003).

Dari persinggungan antara kapitalisme dan teori hijau dalam studi kasus asap-lintas batas ini, maka muncul juga keamanan nasional negara, yang agendanya adalah keamanan lingkungan. Ancaman keamanan lingkungan, menurut Sheehan (2005: 101), mungkin terjadi karena adanya dua kemungkinan. Pertama; ancaman yang terjadi karena gejala lingkungan yang sifatnya alamiah, seperti gunung meletus dan gempa bumi. Kedua; ancaman terhadap lingkungan yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti gas emisi dan kerusakan pada lapisan ozon. Nampaknya, telah ada kesepakatan bahwa kategori yang kedua merupakan hal yang menjadi perhatian bagi keamanan lingkungan. Permasalahan kabut asap lintas negara ini tidak bisa dipisahkan dari keamanan lingkungan jika mengacu pada perspektif Sheehan (2005: 101-103). Karena menurutnya, salah satu agenda keamanan lingkungan adalah yang

berasal dari gangguan ekosistem seperti deforestasi, polusi udara dan penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dimana semua gangguan terhadap ekosistem ini berasal dari perusahaan agrikultur maupun industri. Ini sama halnya dengan kebakaran hutan maupun lahan yang terjadi di Indonesia, dimana aktivitas pelaku usaha agrikultur menggunakan teknik pembakaran untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit yang lebih menguntungkan karena banyaknya permintaan global terhadap minyak goreng. Pembakaran lahan tersebut terjadi secara massal dalam jumlah yang besar, sehingga menimbulkan kabut asap yang pekat dan asap tersebut dikarenakan adanya pergerakan angin secara alamiah, membawa kabut asap tersebut menuju negara lain, dan mengancam kehidupan masyarakat negara tersebut.

Dampak Kebakaran Hutan di Indonesia

Ada begitu banyak implikasi dari kebakaran hutan di Indonesia, tidak hanya untuk negara-negara ASEAN, tetapi juga untuk perubahan iklim global. Pada awalnya, kebakaran hutan di Indonesia berdampak ke negara-negara tetangga mereka di ASEAN. Hal ini bisa memberikan dampak negatif terhadap hubungan antara negara-negara ASEAN, terutama dengan Singapura dan Malaysia. Karena kedua negara tersebut lokasinya sangat dekat dengan Sumatera dan Kalimantan yang menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit. Dalam beberapa tahun belakangan kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran lahan, melintas sampai ke negeri tetangga, sehingga membuat keamanan nasional mereka terancam.

Hampir setiap tahunnya kebakaran lahan dan hutan terjadi di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stolle et el. (2002), kebakaran tersebut umumnya disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit. Para pelaku usaha kelapa sawit tersebut membakar hutan maupun lahan dengan tujuan untuk membersihkan lahan guna memperluas perkebunan kelapa sawitnya. Di pulau Sumatera, kabut asap dari dampak kebakaran hutan dan lahan gambut dapat menutupi beberapa wilayah di Indonesia yang tersebar hingga tiga juta kilometer kubik. Stolle et el. (2002) menyatakan, kabut asap ini bergerak dan dapat menyelimuti negara lain karena cuaca kering yang disebabkan oleh El Nino dan juga pembakaran lahan secara sengaja untuk perkebunan kelapa sawit.

Menurut Stolle et el. (2002) dan Varma (2003), seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan ini, teknik membakar lahan merupakan hal yang paling efektif dan efisien. Namun, hal ini berdampak pada negara-negara tetangga. Berdasarkan data yang telah dilakukan oleh Koe, Arellano dan McGregor (2001), pada tahun 1997, hutan yang terbakar di Sumatera telah menciptakan kabut asap yang pekat dan dua negara yang paling terkena dampak adalah Singapura dan Malaysia. Sebagian besar, Singapura mengalami dampak yang signifikan karena pergeseran dari angin musim di Kalimantan. Transisi dari musim hujan yang dihasilkan angin tingkat rendah yang memiliki dorongan yang lemah. Setelah itu, kabut asap yang dihasilkan dari pembakaran lahan akan bergeser ke tenggara dari Semenanjung Malaysia. Pada periode yang sama, bersama dengan reaktivitas besar dan kekeringan yang parah, transisi *monsoon* memiliki pengaruh besar dan kumulatif yang menyebar ke wilayah terdekat.

Selain itu, Indeks Standard Polutan (PSI) di Singapura mencapai tingkat risiko tertinggi yang akan mengancam kesehatan penduduk sehingga mengharuskan pemerintah Singapura untuk memberikan peringatan kepada warga mereka tentang penyakit dan masalah pernapasan yang diakibatkan oleh asap lintas-batas. Dengan demikian, mereka memperingatkan warganya untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan. Kebakaran lahan dan hutan di Indonesia memproduksi kabut asap yang sangat berbahaya dan mengancam keamanan negara Singapura dan Malaysia. Tercatat bahwa kabut telah melanda negara-negara tetangga pada tahun 1991, 1994, 1997, 1998 dan 1999. kabut tersebut sangat berbahaya di periode Juli-Oktober tahun 1997. Kemudian, implikasi dari kebakaran hutan yang tak terkendali di Indonesia telah mendesak pemerintah Singapura untuk menutup Bandara internasional mereka (Bandara Internasional Changi) selama kabut menyelimuti langit Singapura (Choo 2002; Quah 2002).

Di tahun 2013, pemerintah Singapura dan Malaysia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah kabut asap. Hal ini tentu saja dipicu oleh kualitas udara di Singapura dan Johor Bahru (Malaysia) jatuh ke level sangat tidak sehat, dan mencapai level tertinggi pada Indeks Standard Polutan (PSI). Perdana menteri Singapura, Lee Hsien Loong mengatakan, ‘negara Singapura nyaris tak terlihat karena kabut yang membuat pemerintah kami kewalahan’. Dia menaruh perhatian yang sangat serius pada masalah kabut asap lintas negara. Dia juga menyarankan rakyatnya untuk tetap berada di ruangan dan tidak perlu untuk pergi keluar jika tidak dalam keadaan yang mendesak. Terutama bagi mereka yang telah

mengalami penyakit pernapasan, serta orang tua dan anak-anak. Secara gamblang, mereka menyalahkan dan menekan pemerintah Indonesia yang tidak bisa mengatasi masalah ini. Jelas, ini adalah ancaman nasional terhadap Singapura dan Malaysia (Aljazeera 2013).

Namun, respon Indonesia terhadap kabut asap lintas negara justru ditanggapi sinis pada masa pemerintahan SBY, melalui Mentri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menyatakan; Singapura berperilaku seperti anak kecil terhadap krisis ini. Dia juga mengatakan 'Singapura tidak perlu membuat komentar terhadap hal ini, karena ini bukan apa yang diinginkan oleh Indonesia; ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah karena kabut lintas negara ini terjadi secara alamiah (selama musim El Nino, asap menyebar ke utara atau ke Singapura dan Malaysia). Pendapat Agung Laksono direspon langsung oleh menteri lingkungan dari Singapura, Vivian Balakhrisnan, dia bersikeras agar Indonesia 'untuk mengambil tindakan segera untuk mengatasi masalah pada sumbernya. Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura juga ikut menanggapinya. Dia mengatakan, ‘kami ingin membantu pemerintah Indonesia, bekerja sama untuk memecahkan masalah secepat mungkin dengan memberikan bantuan darurat dan meyakinkan rakyat kami bahwa mereka akan baik-baik saja daripada berperang kata-kata antara Singapura dan Indonesia’. Di sisi lain, Agung Laksono terus menjawab bahwa 'Indonesia tidak ingin bantuan keuangan dari Singapura atau bahkan Malaysia untuk mengatasi masalah kabut asap ini. Indonesia lebih suka menggunakan anggaran nasional sendiri (Asia News Channel 2013).

Sesuai dengan pernyataan Agung Laksono, mantan menteri lingkungan hidup di Indonesia, Rachmat Witoelar, juga menyalahkan akan kondisi alam. Dia juga khawatir, bahwa yang merusak dan melakukan pembakaran justru perusahaan perkebunan Singapura dan Malaysia yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Plitschka (2012), Rachmat Witoelar mengatakan 'banyak perkebunan kami yang disewa oleh Singapura dan Malaysia, saya tidak menyalahkan mereka tapi tolong jangan salahkan Indonesia sendirian. Karena di Sabah-Malaysia, mereka memiliki sejumlah besar perkebunan kelapa sawit juga. Mereka melakukan hal yang sama seperti kita, memangkas dan membakar adalah teknik untuk membersihkan lahan. Jangan arahkan jari hanya pada kita sebagaimana mungkin anda juga salah'.

Perang kata-kata antara pemerintah Indonesia dan Singapura seringkali terjadi dalam masalah ini. Selain itu, berita-berita media lokal bisa membuat situasi menjadi buruk. Kemudian, hal itu bisa merusak hubungan baik antara negara-negara di ASEAN. Ini adalah salah satu contoh bagaimana krisis lingkungan bisa membuat hubungan diplomatik antara negara-negara menjadi lebih buruk. Padahal, Indonesia, Singapura dan Malaysia adalah anggota ASEAN dan akan menjalin kerjasama masyarakat ASEAN pada tahun 2015. Setiap anggota ASEAN bersatu dan bersama-sama melaksanakan tiga pilar, yaitu: keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Masalah seperti kebakaran hutan, sebenarnya dapat mengganggu tujuan komunitas ASEAN pada tahun 2015 (Ravichandran dan Guido 2012).

Jika merefleksi kembali kepada pemikiran Sheehan (2005: 101-104), dan mengaitkannya dengan polusi udara lintas batas negara, maka hal ini dapat

mengancam bukan hanya ancaman terhadap lingkungan tetapi juga ancaman nasional terhadap Singapura ataupun Malaysia. Seperti yang telah pemerintah Malaysia dan Singapura harapkan, mereka secara jelas mendesak pemerintah Indonesia agar menyelesaikan masalah ini dengan segera, bahkan Singapura sendiri sampai rela untuk membantu mendanai pemerintah Indonesia agar dapat menyelesaikan masalah kabut asap ini. Tentu saja, ini mengancam sendi utama perekonomian Singapura karena bandara Changi ditutup akibat kabut asap. Tidak hanya itu, bahkan banyak juga masyarakat singapura yang harus terkena penyakit dan gangguan pernapasan dan penyakit mata akibat dari tebalnya kabut asap, serta dapat mengganggu kesehatan anak-anak yang masih rentan terhadap penyakit.

Selain dapat mengancam keamanan nasional, kebakaran hutan di Indnesia, tentu saja, dapat membawa dampak negatif terhadap perubahan iklim dan juga efek terhadap keamanan global, karena Indonesia dianggap sebagai produsen ketiga terbesar emisi gas pada tahun 1997 (Permadi dan Oanh 2013). Saat ini, tidak hanya dilihat dari perspektif ekonomi, kebakaran hutan secara sengaja dalam skala besar juga akan merusak keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan berkontribusi dalam menghasilkan emisi karbon. Pada tahun yang sama, kebakaran hutan di Indonesia, pada kenyataannya, menghasilkan lebih dari tujuh ratus juta metrik ton CO2 ke atmosfer. Hal ini dapat merusak ozon dan juga dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim secara global menyebabkan bumi menjadi tempat tinggal yang semakin panas sebagai satu-satunya planet yang dihuni umat manusia dan tentu saja merugikan keseimbangan lingkungan (Estrellan dan Lino 2010).

Diperkirakan bahwa dalam 10 tahun ke depan, suhu di Indonesia akan meningkat dari 0,2°C hingga 0,3°C; fenomena ini akan terjadi dalam dekade berikutnya. Ini akan membawa efek, seperti perubahan sumber daya air, naiknya permukaan air laut, dan isu-isu ekosistem. Dampak besar dari meningkatnya permukaan air laut ini, bisa menenggelamkan negara-negara kepulauan seperti Maladewa, Indonesia, Pilipina yang kemudian akan membahayakan orang-orang yang tinggal di negara-negara tersebut, terutama yang tinggal di pulau-pulau kecil. Selanjutnya, karena kebakaran lahan dalam skala besar orang yang tinggal di pulau-pulau kecil berada pada risiko tinggi terkena dampak banjir (Wirawan 2010).

Menurut Wirawan (2010), perubahan iklim yang disebabkan oleh kebakaran hutan akan membawa pengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat dan meningkat beberapa masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan. Selain itu, juga membahayakan air layak minum dan suplai makanan. Selain itu, penyakit yang terbawa air seperti diare dan kolera akan menyebar ke daerah-daerah lainnya secara lebih meluas. Perubahan iklim, bahkan, mungkin mengakibatkan kelangkaan air dan kurangnya pasokan air layak minum.

Skala besar konversi ke lahan perkebunan kelapa sawit, jika mengacu pada pandangan Sheehan (101-104), dapat pula mengancam mengancam penduduk lokal yang hidupnya bergantung pada hutan. Konversi dari hutan ke lahan perkebunan sawit ini akan mengurangi ketahanan pangan penduduk lokal dan kondisi ini akan memberikan kontribusi langsung terhadap kemiskinan atau bahkan malnutrisi. Selain itu, Penduduk yang tinggal di lokasi perkebunan sawit juga akan kehilangan tempat tinggal, makanan atau bahkan mata pencaharian mereka (VOA News 2009).

Setelah itu, pembakaran hutan juga dapat mengancam kehidupan fauna, Neil Renwick (2014), meyakinkan bahwa salah satu implikasi dari krisis lingkungan adalah kepunahan spesies. Sejalan dengan Renwick (2014), Russon, Erma dan Dennis (2001) menunjukkan, The IUCN (International Union for Conservation of Nature) telah mengklasifikasikan Orang Utan (Pongo Pygmaeus) hidup sangat rentan dan berisiko tinggi terhadap kepunahan di masa mendatang. Mereka mengklaim 'eksploitasi yang dilakukan oleh kegiatan manusia dapat menyebabkan kehancuran dan ancaman yang tidak disadari merupakan hasil dari perilaku mereka sendiri'. Deforestasi dan kebakaran hutan di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera, adalah perhatian utama mengapa habitat ini akan punah.

Implikasi dari kebakaran hutan di Indonesia sangat besar. Pertama, ini bisa mengakibatkan pada retaknya hubungan diplomatik beberapa negara anggota ASEAN, yang disebabkan oleh asap lintas-batas negara yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan kesehatan masyarakatnya. Kedua, kebakaran hutan dapat memicu perubahan iklim atau pemanasan global yang menyebabkan munculnya permukaan laut dan mungkin dapat menenggelamkan banyak kepulauan atau pulau-pulau kecil di masa depan. Ketiga, membawa dampak negatif, terutama bagi kehidupan umat manusia. Keempat, mengancam orang-orang yang tinggal dan bergantung pada hutan. Kelima, akan merusak habitat spesies, misalnya, Orang Utan. Kesimpulannya, semua efek ini sebenarnya disebabkan oleh perusahaan ilegal yang melanggar aturan dengan membakar hutan untuk kepentingan ekonomi mereka.

AATHP: Sebagai upaya Indonesia Memerangi Kabut Asap?

Ketika menelaah kembali ke dalam kerangka teori yang dibahas dalam tulisan ini, kapitalisme membentuk industrialisasi di sektor agribisnis di Indonesia adalah pemicu utama terhadap masalah lingkungan. Semangat kapitalisme membuat pemilik tanah, pengusaha atau sektor swasta berupaya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, akan tetapi seringkali tanpa memperhatikan kesadaran lingkungan (Thurow 1996). Dalam studi kasus ini, pelaku usaha perkebunan sawit melakukan cara murah, termudah dan terefektif, yakni dengan membakar hutan ataupun lahan untuk membuka lahan ketika mereka ingin memperluas perkebunan mereka. Situasi ini memaksa negara-negara ASEAN untuk mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini karena menjadi isu utama dengan Singapura dan Malaysia (Elliott 2011).

Secara tidak langsung, negara-negara ASEAN berharap bahwa Indonesia bisa mengimplementasikan teori hijau meskipun teori ini menentang prinsip kapitalisme. Indonesia, sebenarnya dalam dilema, apakah akan tetap mempraktekan kapitalisme di bidang pertanian dan mendapatkan keuntungan dari menjual minyak sawit ke AS dan Eropa atau mepraktekan teori hijau (*Green theory*) untuk menekan para pemilik modal dalam memperluas lahan mereka atau dalam membuat lahan baru melalui peraturan yang akan mengurangi keuntungan mereka. Namun, Indonesia sedang mencoba untuk mempraktekkan teori hijau dimana negara ini sedang berusaha untuk menghormati alam dan memperketat peraturan dalam perluasan lahan perkebunan kelapa sawit yang akan berakibat langsung kepada negara-negara lain. Para anggota negara ASEAN takut jika kebakaran hutan masih terus berlanjut di Indonesia, tidak

hanya mengancam keamanan nasional Singapura saja, akan tetapi hal ini juga akan memicu perubahan iklim di seluruh dunia (Elliot 2011).

Semenjak Indonesia dianggap memberikan kontribusi negatif dalam menghasilkan gas emisi yang kemudian mengancam keamanan negara lain, pemerintah Indonesia meratifikasi *ASEAN Agreement on Trans boundary Haze Pollution* (AATHP), untuk mengatur para pembuka lahan baru agar tidak dengan cara membakar lahan gambut atau hutan secara masal. Ditambah lagi, melalui menteri lingkungan harus mengatur strategi untuk mencegah perubahan iklim di masa depan. Salah satu program untuk menghambat perubahan iklim, yaitu dengan penanaman satu miliar pohon setiap tahun. Program lain bahwa pemerintah Indonesia memiliki adalah dengan mendesak sektor swasta untuk menggunakan CSR mereka (Corporate Social Responsibility) untuk penghijauan dan penanaman pohon juga. Terakhir, pemerintah Indonesia memiliki program dalam hal mengatur daerah kehutanan. Indonesia harus berhadapan dengan kebakaran hutan karena ini merupakan kontribusi utama dari ancaman terhadap negara lain akibat dari kabut asap lintas batas dan juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Dengan demikian, pemerintah harus menghentikan penebangan liar dan mulai menanam lebih banyak pohon. Ini bukan hanya untuk menyelamatkan lingkungan, tetapi juga untuk menyelamatkan manusia (Rachmat Witoelar 2012).

Di sisi lain, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan program-program mereka dalam hal untuk menghentikan kabut lintas batas negara. Salah satu masalah terbesar di Indonesia adalah perusahaan ilegal masih menggunakan cara yang dianggap mereka sangat efisien dan efektif, yaitu; membakar

lahan gambut ataupun hutan. Mereka akan membayar orang lokal untuk memangkas kayu dan membakar lahan; jika tidak, mereka akan menyuap pejabat pemerintah untuk menghindari jeratan hukum (Rachmat Witoelar 2012). Namun, setidaknya ada kesadaran dari anggota ASEAN untuk melindungi lingkungan dari perubahan iklim melalui program-program pemerintah dan pertemuan ASEAN mengenai perubahan iklim (Jordan dan O'Riordan 2000).

Kesimpulan

Singkatnya, Indonesia memiliki masalah yang seringkali muncul hamper setiap tahunnya, yakni kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan tercatat melalui beberapa penelitian memiliki dampak buruk perubahan iklim juga ancaman terhadap negara lain akibat kabut asap lintas batas negara ataupun wilayah. Hal ini juga dapat mengganggu hubungan diplomatik antara negara-negara tetangga, membawa dampak negatif terhadap masalah kesehatan dan juga ancaman yang paling parah, akan menenggelamkan beberapa pulau kecil, bangsa atau negara. Implikasi dari kabut asap di Indonesia terutama disebabkan oleh kebakaran hutan. Upaya pemerintah untuk mengurangi bencana kabut asap tentu saja masih menghadapi banyak kendala. Dengan kata lain, telah terjadi dilema antara kapitalisme yang mendorong industri di bidang pertanian dan juga teori hijau yang terus berjuang mempertahankan lingkungan.

REFERENSI

Aljazeera (2013) *Indonesia Forest Fires Smoke Chokes Singapore* [online] available from <http://www.youtube.com/watch?v=th_MX9wgtu8> [8 October 2015]

Browner, C.M. (1997) 'Global Climate Change: Threats and Solutions' *Journal of Environmental* 13 (1), 273-278

Carlson, K.M., Curran, L.M., Ratnasari, D., Pittman, A.M., Soares-Filho, B.S., Asner, G.P., Trigg, S.N., Gaveau, D.A., Lawrence, D., and Rodrigues, H.O. (2012) 'Commited Carbon Emmisions, Deforestation and Community Land Conversion from Oil Palm Plantation Expantion in West Kalimantan, Indonesia' *PNAS* 109 (19), 7559-7564.

Channel News Asia (2013) *Indonesia minister accused Singapore of acting 'like a child' over haze* [online] available from < https://youtu.be/pXJVehrkgJw> [8 October 2015]

Choo, V. (2002) 'Fires from Indonesia Pollute Neighbouring Countries Again' *Lancet Journal* 360, 1310-1317

Eckersley, R. (2010) 'Green Theory' in *International Relations Theories*. Ed. by Dunne, T., Kurki, M., Smith, S. New York: Oxford University Press.

Elliot, L. (2011) 'ASEAN and Environmental Governance: Rethinking Networked Regionalism in Southeast Asia' *Procedia Social and Behavioral Sciences* 14, 61-64

Estrellan, C.R., and Lino, F. (2010) 'Toxic Emissions from Open Burning' *Chemosphere Journal* 80, 193-207

Garnaut, S. (2009) 'Climate Change and Indonesia: In Honor of Panglaykim' *Indonesia Economic Studies* 45 (1), 107-116

Jordan, A. and Riordan, E. (2000) 'Institution for Global Environmental Change' *Elsevier Science* 10, 237-240

Koe, L.C.C., Arellano, A.F., McGregor, J.L. (2001) 'Investigating the Haze Transport from 1997 Biomass Burning in Southeast Asia: Its Impact Upon Singapore' *Athmospheric Environment* 35, 2723-2734

Permadi, D.A., and Oanh, N.T.K. (2013) 'Assesment of Biomass Open Burning Emission in Indonesia and Potential Climate Forcing Impact' *Atmospheric Environment* 78, 250-258

Posa, M.R.C. (2011) 'Peat Swamp Forest Avifauna of Central Kalimantan, Indonesia: Effects of Habitat Loss and Degradation' *Biological Conservation* 144, 2548-2556

Quah, E. (2002) 'Transboundary Pollution in Southeast Asia: The Indonesian Forest Fires' *World Development* 30 (3), 429-441

Ravichandran, M., and Guido, B. (2012) 'Is an Asean Community Achieveable?' *Asian Survey* 52 (6), 1043-1066

Renwick, N. (2014) *Environmental Security: Climate Change* [lecture] Module M24ISS, March 2014. Coventry: Coventry University.

Russon, A.E., Erman, A., and Dennis, R. (2001) 'The Populations and the Distributions of Orangutans in West Kalimantan-Indonesia' *Biological Conservation* 97, 21-28

Seattle Globalist (2012) *Paradise for Palm Oil: The Greenwashing of Indonesia Deforestation* [online] available from <https://youtu.be/OrCqjtpJxOc> [6 April 2014]

Sheehan, M. (2005) 'Environmental Security' In *International Security* Ed. By Sheehan, M. Colorado: Lynne Rienner, 99-114

Statistics Indonesia (2014) *Area of Forest Consession Estates by Provinces.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Stolle, F., Chomitz, K.M., Lambin, E.F., and Tomich, T.P. (2002) 'Land Use and Vegetation Fires in Jambi, Sumatra, Indonesia ' *Forest Ecology and Management* 179, 277-292.

Thurow, L. (1996) *The Future of Capitalism*. Finland: WSOY.

Varma, A. (2003) 'The Economics of Slash and Burn: A case Study of the Indonesia 1997-1998 Forest Fires' *Ecological Economics* 46, 159-171.

VOA News (2009) *Activists Say Forest Fires in Indonesia Threaten the World* [online] available from <https://youtu.be/WoHRvfqGLnc> [6 April 2014]

Wirawan, M.A. (2010) 'Public Health Responses to Climate Change Health Impacts in Indonesia'*Asia-Pacific Journal of Public Health* 22 (1), 25-31

Witoelar, R. (2012) 'Progress and Challenges of Combating Climate Change in Indonesia' [interview by T. Plitschka and I. Radjawali] in Plitschka and Radjawali, I. (2012) *In Dialogue.* Jakarta: ASEAS: 345-351

Terorisme dan Tantangan *ASEAN Political and Security Community* (APSC)

Gonda Yumitro[216]

Abstrak

ASEAN Political and Security Community (APSC) sudah akan diimplementasikan pada bulan Desember 2015. Namun demikian, berbagai persoalan yang berpeluang menjadi tantangan pelaksanaan agenda ini belum sepenuhnya bisa diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan terorisme, dimana beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan menjadi target utama dalam *global war on terrorisme* yang dikomandoi oleh Amerika pasca serangan 11 September 2001. Persoalan terorisme menjadi semakin serius dikarenakan pada era globalisasi ini berbagai media yang tersedia telah menghasilkan formulasi serangan terorisme yang lebih canggih, misalnya dengan melakukan *cyber crime*, penyebaran *drug* untuk membiayai gerakan mereka, dan berbagai gerakan transnasional membahayakan lainnya. Oleh karena itu, jika isu terorisme di kawasan ASEAN ini tidak segera diselesaikan melalui *multilateral cooperation*, maka hal tersebut akan menjadi tantangan serius bagi implementasi APSC ke depan.

Keywords: MEA, Terorisme, Global War on Terrorisme, Multilateral Cooperation

[216] Dosen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Pendahuluan

Salah satu tujuan dari dibentuknya ASEAN adalah sebagai upaya peningkatan kerjasama antar sesama negara kawasan. Melalui kerjasama tersebut maka diharapkan agar terwujud suasana perdamaian dimana tidak ada konflik antara satu dengan lainnya dalam artian yang bersifat besar. Hal ini pun sudah terlihat, dimana sejak didirikan pada tahun 1967, konflik yang terjadi antara sesama negara anggota ASEAN tidak sampai pada level terbuka[217].

Apalagi sejak tahun 1997, para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur. Pada saat itu mereka merencanakan untuk mengembangkan visi ASEAN tahun 2020. Kemudian setelah itu diadakan *Hanoi Action Plan* (1999-2003) yang kemudian dilanjutkan dengan *Bali Concord II* pada tahun 2003. Pada saat itulah mereka merencakan untuk semakin memantapkan visi tersebut dengan membentuk *ASEAN Community* tahun 2020.

Dalam pertemuan ini pula disepakati bahwa *ASEAN Community* mempunyai tiga pilar penting yaitu *the ASEAN Political Security Community* (APSC), *the ASEAN Economic Community* (AEC) dan *the ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). Akhirnya pada *ASEAN Summit* ke 12 di Cebu, Filipina tahun 2007, rencana tersebut dipercepat menjadi tahun 2015 karena perkembangan ekonomi ASEAN yang cukup menjanjikan.

Dalam makalah ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada pilar APSC. Hal ini menarik karena semangat yang diinginkan dari APSC adalah dalam upaya untuk menjamin bahwa negara-negara di kawasan bisa hidup berdampingan satu dengan

[217] http://thediplomat.com/2015/03/asean-is-not-a-security-community-yet/

lainnya dalam keadaan yang adil, demokratis dan lingkungan yang harmonis[218]. Hanya dengan terwujudnya keamanan di kawasan maka kerjasama pada berbagai bidang yang lainnya akan dapat dilakukan dengan baik, seperti kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini bersesuaian dengan struktur kebutuhan manusia yang meletakkan keamanan sebagai salah satu fundasi mendasar bagi hidup manusia.

Melalui APSC diharapkan akan ada solidaritas antara sesama negara ASEAN dalam menangani persoalan bersama khususnya dalam bidang politik dan keamanan. Dengan terbentuknya APSC ini maka diharapkan stabilitas keamanan di kawasan bisa diwujudkan. Padahal dalam realitanya kawasan ASEAN masih menghadapi berbagai masalah politik dan keamanan yang serius seperti isu perlombaan senjata, korupsi, kesenjangan pembangunan, konflik etnis, *human trafficking*, pelanggaran ham, *drug trade*, pencucuian uang, konflik perbatasan, terorisme, dll. APSC dimaksudkan untuk bisa mengkondisikan berbagai persoalan yang dihadapi tersebut[219].

Mengingat APSC yang akan segera diimplementasikan pada tahun 2015, maka ASEAN telah membuat *roadmap* berkaitan dengan berbagai hal yang perlu dilakukan dalam merespon berbagai persoalan tersebut. Di antaranya adalah kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk mempersiapkan instrumen politik seperti halnya *the Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), the Treaty of Amity and Co-operation in South East Asia (TAC)* dan *the Treaty on the Southeast*

[218] http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community
[219] http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/05/building-asean-political-security-community.html

Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)[220]. Selain itu, ASEAN juga telah mempersiapkan berbagai upaya untuk menangani isu keamanan non tradisional.

Secara sederhana, implementasi APSC ini mempunyai beberapa karakter berikut:

a. Adanya aturan berdasarkan komunitas yang mempunyai persamaan nilai dan norma
b. Wilayah yang kohesif, damai, stabil dan aman dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan yang komprehensif.
c. Wilayah yang dimanis dan melihat ke luar dalam mewujudkan dunia yang semakin terintegrasi dan terhubung satu dengan lainnya.[221]

Dalam makalah ini pembahasan akan difokuskan pada isu terorisme mengingat seriusnya isu ini di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa kawasan Asia Tenggara menjadi front ke dua gerakan terorisme setelah mereka mulai dilumpuhkan dari kawasan Afghanistan. Hal ini terjadi karena di kawasan ASEAN terdapat beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan kawasan selatan Thailand dan Selatan Filipina yang merupakan meyoritas penduduk muslim. Selama ini, beberapa negara anggota ASEAN termasuk penduduk mayoritas muslim seringkali diindikasikan mempunyai keterkaitan dengan isu terorisme. Melalui makalah ini, diharapkan menjadi kontribusi penting dalam memperluas dan memperkaya beberapa kajian yang sudah dilakukan sebelumnya.

4.1 [220]Kohm Kheng-Lian. 2009. *Asean Environmental Law, Policy and Governance: Selected Documents*. Singapore: World Scientific Publishing. Page 594

5.1 [221] Berman, Evan and M. Shamsul Haque. 2015. *Asian Leadership in Policy and Governance*. UK: Emerald Group Publishing Limited. Page 74

Berkaitan dengan kondisi tersebut tersebut, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah **bagaimana terorisme menjadi tantangan implementasi APSC 2015?.** Dalam asumsi penulis, terorisme yang berkembang di ASEAN sudah cukup kompleks karena jaringannya pun bersifat transnasional. Selain itu, isu terorisme tidak lagi sekedar menjadi isu ideologi melainkan sudah masuk pada ranah politik, termasuk berbagai kepentignan dalam *global war on terrorism*. Oleh karena itu, penyelesaian isu terorisme sebagai tantangan implementasi APSC juga perlu diselesaikan secara politik melalui *common agenda* negara-negara ASEAN.

Untuk menjelaskan masalah tersebut, maka tulisan ini akan diuraikan menjadi tiga bagian utama. Awal pembahasan akan difokuskan pada diskusi tentang seberapa besar isu dan intensitas gerakan terorisme di kawasan ASEAN. Kemudian setelah itu akan diuraikan berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk penanganan isu terorisme ini, baik pada level internasional, interregional, bilateral maupun pernegara di kawasan. Terakhir akan diuraikan tentang penting keamanan dalam membangun aliansi regional dan bagaimana terorisme menjadi tantangan bagi implementasi APSC. Sebelumnya terlebih dahulu akan dijelaskan kajian konseptual terorisme dan regionalisme.

Konsep Teroris dan Regionalisme

Untuk memudahkan analisa tentang posisi terorisme dalam APSC, maka digunakan dua konsep penting dalam makalah ini, yaitu konsep teroris dan konsep regionalisme. Konsep teroris digunakan sebagai dasar untuk memahami karakter dan pola yang muncul dalam kekerasan ini, sementara regionalisme dalam upaya melihat

posisi masing-masing negara dalam melakukan kerjasama, utamanya dalam penanganan isu-isu penting seperti halnya terorisme.

Pertama, berkaitan dengan terorisme sebenarnya seperti membahas ancaman yang tidak memiliki pengancam. Siapa mereka yang disebut sebagai teroris terkadang seperti bicara tentang perkara imaginir. Hal ini pula yang menjadi sebab mengapa isu terorisme seringkali menjadi isu politik atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan definisi teroris sendiri belum mempunyai kesepahaman yang kuat. Antara satu kelompok dengan lainnya masih berbeda dalam mendefinisikan makna terorisme.

Meskipun demikian, paling tidak ada beberapa elemen penting dalam memahami karakteristik terorisme, di antaranya adalah bahwa terorisme merupakan tindakan kekerasan yang serius, berusaha untuk mempengaruhi publik atau institusi, biasa dengan cara intimidasi terhadap penduduk sipil dan dilakukan oleh aktor non negara[222]. Adapun beberapa hal yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak dikategorikan sebagai terorisme dan bisa disebut sebagai tindak kriminalitas.

Adapun kekerasan dalam terorisme bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti pembunuhan, penculikan, penembakan, pengrusakan, dan sejenisnya. Metode ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan tidak mempunyai sangkut paut dengan agama tertentu. Namun demikian pasca dikumandangkannya *global war on terrorism* di bawa komando Amerika Serikat pasca peristiwa 11 september 2001, terorisme menjadi semakin terkenal dan menjadi elemen penting dalam perubahan peta politik

[222] Rose, Gregory And Diana Nestorovska. 2005. *Towards An Asean Counter-Terrorism Treaty*. Singapore: Syibil. Page159

internasional. Apalagi isu terorisme sekarang ini cenderung menempatkan islam sebagai *the actor behind the gun*.

Melalui pidato yang disampaikan oleh G.W Bush, Amerika mengumandangkan perang global melawan terorisme. Dengan demikian karena posisi Amerika yang cukup kuat dalam politik internasional, dunia seakan dibagi hanya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung Amerika, dan kelompok pendukung teroris. Siapapun negara atau kawasan yang tidak mendukung perang melawan terorisme, maka mereka pun dikategorikan sebagai teroris. Padahal dalam implementasinya, perang melawan teroris sangat kental dengan muatan politik yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Meskipun demikian, karena semangat menentang terorisme ini – tentu dengan definisi Amerika – sudah mengglobal di era globalisasi, maka berbagai kawasan pun termasuk ASEAN mulai melibatkan diri. Apalagi beberapa kasus serangan terlepas apakah hal itu murni dari teroris atau *sponsored terrorism*, memang dihadapi dan dialami ril oleh ASEAN dan berbagai kawasan lainnya. Hal ini misalnya terlihat dari beberapa kali serangan teroris yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Belum lagi beberapa hasil penelitian yang menunjukkan adanya jaringan dan latihan militer para teroris yang dilakukan di beberapa kawasan konflik ASEAN seperti Filipina Selatan dan Thailand Selatan.

Lebih lanjut, beberapa sumber menyebutkan bahwa gerakan terorisme di era ini perlu semakin diwaspadai karena sudah mulai menggunakan berbagai teknologi yang canggih. Gerakan mereka sering dikenal dengan istilah *cyber terrorism.* Melalui penguasaan terhadap media online dengan cara ilegal, gerakan terorisme tadi

mengorganisasi diri. Bahkan tidak jarang mereka melakukan *hacking* atau melakukan penjualan barang-barang terlarang seperti obat-obat terlarang yang dilakukan oleh Al Qaeda[223]. Lebih mengkhawatirkan lagi jika jaringan tersebut membuat mereka mampu membangun gerakan yang semakin sistematis dan mengintensifkan berbagai tindak kriminal[224].

Kondisi seperti ini dinilai sebagai ancaman serius, termasuk dalam upaya membangun *ASEAN Political Security Community* (APSC). Gerakan terorisme tidak lagi hanya sekedar dalam negeri atau antar negara di kawasan, tetapi melalui berbagai fasilitas yang tersedia di era globalisasi, mereka semakin mudah untuk membangun jaringan transnasional yang semakin kuat. Mereka dengan berbagai kepentingannya seringkali melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap penduduk sipil.

Singkatnya, dengan perkembangan yang terjadi dalam gerakan terorisme di era ini, *regional security* semakin sulit untuk diwujudkan. Apalagi secara bebas para teroris bekerja dengan cara yang berbeda dari misi yang diinginkan oleh masyarakat regional. Jika dalam regionalisme yang diinginkan adalah perlindungan terhadap HAM, justru terorisme secara bebas melakukan pelanggaran HAM. Jika regionalisme berusaha untuk membangun kerja bersama dalam mewujudkan perdamaian, justru terorisme menghilangkan rasa damai bagi setiap masyarakat yang hidup di kawasan.

Hal inilah yang menjadi alasan kuat APSC menempatkan pembangunan politik dan berbagai norma dalam memerangi terorisme sebagai salah satu dari *blue print* regionalisme. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang regionalisme di kawasan

---

6.1 [223] Smith, Paul J. *Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to States*. Page 12

[224] https://www.griffith.edu.au/data/assets/pdf_file/0009/169254/michael-wesley-paper.pdf

maka posisi keamanan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Regionalisme yang sekarang menjadi tren dalam hubungan Internasional, hanya bisa diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan. Tanpa perasaan aman, kerjasama multilateral dari negara-negara yang mereka berada pada satu kawasan geopolitik dan ekonomi dengan keinginan untuk meraih kepentingan bersama melalui kerjasama kawasan akan sulit diwujudkan.

Kedua, adapun isu regionalisme sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, bahkan sejak tahun 1960an semangat untuk bekerjasama dengan sesama negara satu kawasan ini sudah mulai terbentuk. Hal ini misalnya bisa dilihat dari sejarah *European Union* dan ASEAN. Urgensi kerjasama regional ini dikarenakan berkembangnya kajian ekonomi politik yang berkeyakinan bahwa kohesitas politik akan bisa diwujudkan dengan adanya kohesitas dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu, berbagai konflik yang selama ini sering terjadi terutama berkaitan dengan hubungan negara yang satu dengan negara lainnya dalam satu kawasan diharapkan bisa diselesaikan melalui kerjasama regional. Hal ini dikarenakan regionalisme sebenarnya jelmaan dari ideologi liberal yang berkeyakinan bahwa konflik hanya bisa diselesaikan melalui interaksi, utamanya dalam bidang perdagangan. Maknanya adalah bahwa ketika terjadi konflik, maka keran-keran komunikasi antara sesama negara yang berkonflik harus segera dibuka.

Dalam perkembangan selanjutnya, regionalisme ini bahwa tidak hanya sekedar bicara tentang kepentingan negara secara individu, melainkan sudah mulai membangun identitas sebagai kawasan. Hal inilah yang seringkali menjadi kritik bagi regionalisme yang dinilai melemahkan kedaulatan suatu bangsa. Kritik lain terhadap

regionalisme muncul karena eksistensinya yang mendukung ideologi liberal sehingga peran negara untuk melindungi kelompok yang lemah semakin melemah. Pada akhirnya kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat semakin meluas. Hal ini dikarena regionalisme memberikan hak dan peluang yang besar terhadap mereka yang menjadi kelompok kuat karena penguasaan mereka terhadap modal.

Perdebatan sisi positif dan negatif dari regionalisme inilah yang sampai sekarang belum tuntas. Ada sebagian yang begitu mendukung integrasi kawasan secara utuh, tetapi ada juga kelompok yang menilai bahwa regionalisme telah memunculkan hegemoni dari kelompok yang kuat. Maknanya adalah bahwa sebenarnya tujuan untuk kesejahteraan bersama hanya sekedar tulisan di atas kertas dan masih jauh dari upaya yang implementatif.

Dalam kaitannya dengan isu terorisme, para ilmuwan bersepakat bahwa regionalisme yang mampu memperjuangkan kepentingan bersama hanya akan bisa terwujud ketika faktor keamanan terjamin. Karena itu, disamping berbagai persoalan serius dalam bidang politik dan keamanan lainnya, maka penanganan isu terorisme perlu semakin diintensifkan. Dalam hal ini tentu upaya yang dilakukan harus memperhatikan berbagai aspek yang mempunyai keterkaitan dengan penyebab munculnya isu terorisme tersebut.

Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

Bicara tentang terorisme di era globalisasi ini tidak lagi sekedar isu domistik negara tertentu. Hal ini dikarenakan berbagai fasilitas yang ada sudah memungkinkan bagi berbagai gerakan terorisme untuk melakukan pola hubungan yang lebih rapi dan

terhubung antara satu dengan yang lainnya meskipun keberadaan mereka lintas kawasan.

Gerakan Terorisme Di Kawasan ASEAN

Isu terorisme dianggap sebagai perkara yang sangat serius di kawasan ASEAN, utamanya setelah perang global melawan terorisme dikumandangkan. Hal ini dikarenakan pasca serangan 11 September 2001, indikasi kuat gerakan terorisme dilakukan oleh kelompok Islam Alqaeda. Setelah Amerika melakukan serangkaian serangan terhadap Thaliban di Afghanistan, muncul indikasi kuat bahwa jaringan Al Qaeda bergerak menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai salah satu basis perjuangan mereka.

Masuknya gerakan terorisme ke kawasan ini dipandang oleh para pengamat menjadi lebih mudah dengan semakin berkembangnya politik Islam di beberapa negara kawasan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya gerakan Islam baru, utamanya yang bersifat transnasional yang berkembang di empat negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan. Meskipun demikian sebenarnya masing-masing gerakan tersebut juga tidak satu dalam pemahaman, malah antara satu dengan lainnya terjadi *misunderstanding* dalam memahami politik islam itu sendiri.

Hanya saja karena Amerika menjadi aktor penting dalam perang melawan terorisme, maka terjadi simplifikasi pemahaman terorisme yang tidak selalu sesuai dengan fakta di lapangan. Akhirnya terjadi generalisasi dalam memandang perkembang terorisme di kawasan Asia Tenggara dengan aktor utama berasal dari

kelompok Islam. Hal ini pula yang akhirnya menjadikan perang melawan terorisme tidak bisa dilepaskan dengan beberapa negara dengan penduduk mayoritas Islam. Pandangan bahwa Indonesia dan Malaysia dianggap punya masalah serius dengan jaringan terorisme karena mayoritas penduduk di kedua negara adalah muslim pun berkembang.

Selain itu, gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara mempunyai pola yang hampir sama antara satu dengan lainnya. Di Filipina terdapat gerakan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf. Keduanya punya keinginan untuk mendirikan negara Islam di bagian selatan provinsi Mindanau. Karena tekanan yang diberikan oleh negara, mereka pun akhirnya melakukan berbagai tindak kekerasan. Hal ini misalnya terlihat dari beberapa serangan bom yang mereka lakukan pada tahun 2003.

Demikian juga dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, gerakan terorisme cukup kuat. Sebagian menilai bahwa mereka punya keterikatan dengan beberapa daerah yang ingin memerdekakan diri baik di Aceh maupun Papua. Namun ada pula yang menilai bahwa sebenarnya mereka tersebar di berbagai kawasan dan bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan pesan politik dan ideologi mereka. Hal ini misalnya terlihat dari peledakan bom Bali yang mereka lakukan pada tanggal 12 Oktober 2002. Selain itu pada tanggal 5 Agustus 2003 juga terjadi serangan di hotel Marriot Jakarta yang merupakan simbolisasi bagi perlawasan terhadap Amerika.

Adapun di Malaysia, indikasi kuat menunjukkan bahwa negara ini dijadikan sebagai salah satu pusat bagi jaringan terorisme untuk memperkuat ideologilisasi

mereka. Hal ini misalnya bisa terlihat dari beberapa alumni jaringan Malaysia seperti Abu Bakar Ba'ashir dan Abdullah Sungkar yang dinilai sebagai tokoh sentral gerakan teroris di Indonesia.

Sebenarnya masih banyak jaringan dan serangan terorisme yang lain meskipun baru bersifat pernegara dan berskala kecil. Yang menjadikan isu terorisme cukup mencuat adalah karena ketakutan ideologilisasi gerakan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini misalnya terlihat dari adanya upaya mereka untuk membangun daulah Islamiah yang meliputi semua wilayah ASEAN. Menurut laporan yang dibuat oleh pemerintah Singapora pada bulan Januari 2003, Jama'ah Islamiyah mempunyai hubungan yang erat dengan Negara Islam Indonesia. Orientasi mereka tidak hanya mendirikan negara Islam pada satu negara, tetapi melalui tahapan pada level negara tadi akan menuju pada Daulah Islamiyah Nusantara[225]

Di sinilah terlihat bahwa berbagai gerakan terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya mempunyai keterikatan antara satu dengan lainnya. Pada revel regional mereka membentuk ikatan yang disebut dengan Rabitatul Mujahidin yang dibentuk pada tahun 1999 di Kuala Lumpur Malaysia. Jaringan ini sebenarnya merupakan perwakilan dari berbagai gerakan lainnya yang terdiri dari Kumpulan Militan Malaysia (KMM); Laskar Jundullah, Darul Islam, Gerakan Aceh Merdeka, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dari selatan Filipina, the *Rohingya Solidarity Organization* (RSO) dan *the Arakanese Rohingya Nationalist Organization* (ARNO)

[225] Ramakrishna, Kumar. 2004. *Terrorism In Southeast Asia: The Ideological and Political Dimensions.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Page 55

dari Myanmar, serta *the Pattani United Liberation Organization* (PULO) dari Thailand Selatan.[226]

Gerakan yang mereka lakukan pun juga cukup massif karena eksistensi mereka didukung oleh dasar ideologi yang kuat. Di mana ideologi akan membuat orang bergerak dengan semangat. Menurut mereka, apa yang sedang dilakukan tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki umat ini dengan mengajak mereka melakukan hijrah dari *Darul Kufr* menuju Darul Islam[227]. Dengan semangat dan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan untuk kepentingan Islam, akhirnya banyak mereka yang kurang mempunyai keluasan dalam berfikir masuk ke dalam perangkap terorisme. Mereka merasa bahwa apa yang ia lakukan sebagai ibadah untuk menegakkan ajaran agama, tetapi pada saat yang sama mereka sudah terjebak dengan ideologilisasi yang berlebihan.

War on Terrorisme di Kawasan ASEAN

Berdasarkan perkembangan isu terorisme sebagaimana diuraikan di atas, terorisme merupakan salah satu ancaman yang perlu diwaspadai di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang berada di kawasan ini pun perlu memberikan sikap serius dan tegas berkaitan dengan isu terorisme dalam upaya untuk membangun stabilitas kawasan.

Apalagi isu terorisme sudah menjadi isu global yang tidak terlepas dari kebijakan yang dikumandangkan oleh *Bush Administration*. Pasca serangan 11

[226] idem 55
[227] Wah, Chin Kin. 2004. *Southeast Asian Affairs 20014.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Page 56

September 2001, dengan cepat presiden Bush mengumumkan kalimat yang selama ini juga digunakan pada saat perang dingin, hanya mengganti kata Soviet Union dengan terorisme, *either you are with us or your are with terrorists*[228]. Upaya ini menggambarkan bahwa Amerika dalam perang melawan terorisme menunjukkan hegemoninya dalam politik Internasional, termasuk penguatan dari eksistensi metode *pre-emptive strike* dalam kebijakan keamanannya.

Karena kebijakan Amerika ini, maka pengaruhnya terhadap kawasan Asia Tenggara sangat terasa. Bersama Amerika Serikat, negara-negara ASEAN akhirnya secara bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk memerangi terorisme. Dalam beberapa hal, kebijakan yang diambil oleh Amerika cukup pragmatis yaitu dengan melibatkan *intelligence* yang dibantu oleh polisi lokal negara-negara ASEAN serta memperkuat *capacity building*, dll[229]. Amerika pun akhirnya berhasil mengajak 10 negara ASEAN untuk menandatangani *Counter Terrorism Pact* yang berisi kewajiban masing-masing negara untuk memonitor aset kelompok teroris, melakukan sharing intelligence, dan mengawasi daerah perbatasan[230]. Dalam jumlah banyak, Amerika juga mengirimkan dana untuk membantu perang melawan terorisme kepada negara-negara anggota ASEAN. Di antaranya adalah bantuan kepada pemerintah

7.1 [228] German, Mike. 2007. *Thinking Like a Terrorist: Insights of a Former FBI Undercover Agent.* Washington: Potomomac Books

[229] Caballero, Mely and Anthony.2005. *Regional Security in Southeast Asia: Beyond The ASEAN way*. Singapore: ISEAS. Page 218

8.1 [230] Tellis, Ashley J.and Michael Will. 2005. *Military Modernization in an Era of Uncertainty*. UK: The National Bureau of Asian Research. Page 271

Palestina yang berjumlah lebih dari $ 100 juta dollar dalam upaya penguatan kapasitas polisi Filipina[231].

Dalam hal ini pemerintah Filipina sebenarnya sangat antusias untuk memerangi terorisme karena adanya persoalan politik di kawasan selatan negeri ini. Namun demikian secara kapasitas, Filipina termasuk negara yang lemah. Karena itu, cara yang paling strategis dilakukan adalah dengan beraliansi bersama Amerika dalam perang melawan terorisme. Bagi negara ini, gerakan Abu Sayyap dan *Moro Islamic Liberalization Front* (MILF) merupakan gerakan terorisme yang perlu segera dimusnahkan.

Amerika juga menawarkan bantuan keamanan kepada pemerintah Indonesia dengan mengadakan *training counter terrorism* dan penguatan penegakan hukum kepada militer Indonesia. Namun karena militer dinilai punya kasus dalam penegakan HAM di Timur Leste dan Papua, akhirnya penanganan isu terorisme ditangani oleh lembaga khusus yang disebut sebagai Dansus 88. Lembaga ini pula yang kemudian dalam perkembangannya menjadi isu kontroversial di Indonesia mengingat cara penangkapan terhadap para tersangka teroris di Indonesia yang dinilai kurang bersahabat. Bahkan tidak jarang ada indikasi bahwa terjadi upaya untuk memojokkan posisi gerakan Islam.

Adapun di Malaysia, meskipun negara ini juga melakukan pelatihan bersama dengan tentara Amerika, tetapi sikapnya tidak terlalu terbuka. Bahkan Malaysia mengkritik kebijakan pemerintah Amerika dalam melakukan serangan terhadap

---

9.1 [231]Dillon, Dana R. 2007. *The China Challenge: Standing Strong Against the Military, Economic, and Political Threats That Imperil America.* USA: Rowman and Littlefield Publisher. Page 47

Thaliban di Afghanistan. Menurut pemerintah Malaysia, beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika dalam perang melawan terorisme seringkali kental dan sarat dengan kepentingan politik. Justru terdapat kecenderungan bahwa perang melawan teroris sebagai upaya untuk memerangi Islam.

Sementara Singapora secara penuh mendukung program yang ditawarkan oleh Amerika dikarenakan posisinya yang memang tidak cukup aman. Hal ini mengingat keberadaan Singapora sebagai negara dengan wilayah yang kecil dan dikelilingi oleh beberapa negara besar, seperti Indonesia dan Malaysia. Senada dengan itu, pemerintah Thailand cukup mendukung posisi Amerika. Namun demikian, ada indikasi bahwa upaya ini justru akan memperlemah kelompok islam yang ada di kawasan Thailand Selatan. Posisi ini terlihat dari ijin yang mereka berikan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah Thailand sebagai basis penyerangan terorisme di Afghanistan.

Bagi Amerika, respon positif dari sebagian besar pemerintah di negara-negara Asia Tenggara tadi tentu menguntungkan. Dalam pandangan mereka, kawasan Asia Tenggara sudah menjadi wilayah kedua dalam perang melawan teroris. Meskipun demikian, Amerika masih menghadapi beberapa kendala dalam melancarkan operasinya di kawasan Asia Tenggara ini. Di antaranya adalah karena Amerika belum cukup detail dalam memahami berbagai bentuk politik Islam yang berkembang. Karenanya terkadang terjadi generalisasi terhadap semua gerakan Islam yang ada sebagai bagian dari gerakan teroris. Padahal realitanya, sebagian besar dari gerakan Islam tidak mendukung gerakan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Penyelesaian masalah teroris seharusnya dilihat secara komprehensif pada berbagai

aspek kehidupan seperti analisa bidang sosial, ekonomi, masalah pembangunan, dan sejenisnya[232].

Oleh karena itu, simplifikasi kelompok islam di balik terorisme sebagaimana dikembangkan oleh Amerika tidak sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan Amerika memandang seakan semua Islam adalah pendukung Al Qaeda dan terorisme. Padahal realitanya justru banyak di antara gerakan Islam yang menentang terorisme. Di Indonesia misalnya, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama merupakan dua gerakan besar yang selalu mempromosikan Islam tanpa kekerasan dan menentang terorisme. Kedua gerakan ini merupakan dua organisasi besar Islam di Indonesia yang cukup moderat.

Adapun ASEAN sebagai regional, maka ketika mengambil kebijakan dalam penanganan isu terorisme, semangat yang dibangun senantiasa berkaitan dengan persepsi ancaman bersama dan semangat bahwa perang melawan terorisme akan tetap menghargai kedaulatan dari negara yang sedang mengalami persoalan dengan terorisme[233]. Pada satu sisi hal ini merupakan cara yang paling *feasible*, tetapi di sisi lain juga bisa mempersulit level implementasi kebijakan karena masing-masing negara meskipun dalam naungan regionalisme hakikatnya masih berfikir tentang kepentingan nasional masing-masing.

Meskipun demikian, hal yang cukup menggembirakan adalah ketika ASEAN telah melahirkan *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) pada tahun

[232] Gershman, John. 2002. *Is Southeast Asia the Second Front?*. Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 (Jul. - Aug). Published by: Council on Foreign Relations Page 63

[233] Chowm Jonathan T. *ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11. Asian Survey*, Vol. 45, No. 2 (March/April 2005), pp. 304. Published by: University of California Press

2009. Dimana dalam upaya memerangi terorisme, negara-negara ASEAN bersepakat untuk menggunakan instrumen yang selama ini sudah diimplementasikan secara internasional. Selain itu, ASEAN juga sudah mempunyai *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter-Terrorism*. Lebih dari itu, berbagai hal yang menjadi akar persoalan terorisme juga perlu dipetakan.

Sayang sejauh ini upaya untuk mengefektifkan implementasi APSC ini masih mengalami beberapa kendala. Termasuk di dalamnya adalah belum semua negara ASEAN meratifikasi kesepakatan yang telah diambil. Juga berkaitan dengan posisi sekretarian ASEAN yang kurang mempunyai *power* dari sekedar bertugas menjadi koordinator. Belum lagi persoalan dalam hal pendanaan yang terbatas[234]. Akhirnya perang melawan terorisme di kawasan ASEAN lebih banyak sekedar kesepakatan politik, dan belum secara optimal diimplementasikan.

Selain beberapa hal tersebut baik dalam kerjasama dengan Amerika maupun kerjasama regional, negara-negara ASEAN juga melakukan berbagai upaya lain baik yang sifatnya interregional maupun pernegara. Di antara kerjasama interregional terlihat dari kerjasama penanganan isu terorisme ASEAN dan India. Ada juga kerjasama ASEAN dengan Australia. Namun selain intervensi Amerika, upaya yang sifatnya domistik pada masing-masing negara anggota ASEAN jauh lebih terlihat. Meskipun demikian sebagai negara-negara yang bertetangga dan mempunyai misi untuk membangun APSC, masing-masing negara ASEAN tadi mempunyai komitmen untuk melakukan sharing inteligen, memperkuat network yang sudah berjalan dan kapasitas dari masing-masing negara.

[234] Siddique, Sharon and Sree Kuma. 2003. *The 2nd ASEAN Reader*. Singapore: ISEAS Page 511

Hasil dari berbagai upaya tersebut di atas sudah mulai terlihat. Di antaranya dengan keberhasilan negara-negara ASEAN tadi baik secara individu maupun dalam kerjasama regional untuk Mereka berhasil melakukan penangkapan terhadamenangkap beberapa tokoh serangan terorisme. Pada bulan Februari 2003, Polisi Indonesia bekerjasama dengan polisi Singapora berhasil menangkap Mas Selamat Kastari yang merupakan pimpinan jaringan Jama'ah Islamia Singapora. Demikian juga dengan penangkapan tokoh-tokoh lainnya seperti Abu Rusin, Abu Bakar Ba'asyir, Hambali, dst. Penangkapan beberapa tokoh ini dinilai mampu meredam isu terorisme yang berkembang di kawasan Asia Tenggara.

Tantangan Terorisme Dalam APSC

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka terlihat bahwa terorisme merupakan salah satu isu serius yang dihadapi oleh ASEAN dalam membangun APSC. Berbagai upaya pun sudah dilakukan baik yang sifatnya melalui kerjasama internasional, antarregional, regional, maupun secara individu pada masing-masing negara di kawasan ASEAN. Beberapa hasil pun sudah terlihat dengan ditangkapnya beberapa tokoh yang diindikasikan kuat terlibat dalam berbagai serangan terorisme. Namun demikian, berbagai persoalan masih dihadapi yang akhirnya membuat masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya bisa diselesaikan.

Di antara beberapa masalah yang banyak terlihat adalah bahwa penangan masalah ini masih lebih banyak sebatas pernyataan sikap organisasi, sementara dalam hal implementasi hal tersebut belum secara optimal di lakukan. Apalagi ketika ingin bergerak secara regional, masing-masing negara masih mempunyai ego yang kuat

karena perasaan nasionalisme dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Negara-negara tadi terkadang masing bergerak sendiri atau bekerjasama secara bilateral dengan negara-negara yang berada di luar kawasan. Apalagi ada indikasi kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari beberapa aktor yang terlibat dalam *global war on terrorisme*.

Selain itu, meskipun masyarakat sebenarnya juga menentang segala macam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terorisme, terkadang sikap yang dilakukan oleh para agen yang secara langsung memerangi terorisme kurang mampu menarik simpati masyarakat. Hal ini misalnya terlihat dari belum adanya transparansi dalam proses penangkapan atau penanganan pasca penangkapan yang selama ini dilakukan. Secara tiba-tiba misalnya para teroris tadi dibunuh. Hal ini akhirnya memunculkan banyak pandangan yang justru mulai menaruh ketidakpercayaan pada sebagian masyarakat berkaitan dengan perang melawan terorisme.

Demikian juga dengan berbagai upaya yang terlihat belum dilakukan secara terorganisir pada level regionalisme tadi. Melihat berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan perang melawan teroris sebagaimana di jelaskan di atas, ada kekhawatiran bahwa sikap yang masih berbeda antara satu dengan negara lain dalam penanganan isu terorisme justru akan menjadi bumerang bagi implementasi APSC. Padahal Alexander Wend jelas sudah mengatakan bahwa upaya penanganan isu ini perlu dilakukan berdasarkan kepentingan bersama[235]. Maknanya bahwa upaya tadi tidak hanya sekedar sikap politik, melainkan betul-betul dalam aksi nyata.

[235] Chow, Jonathan T. *ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11*. Asian Survey, Vol. 45, No. 2 (March/April 2005). USA: University of California Press. Page 308

Dengan cara ini maka kohesitas dan upaya untuk membangun APSC akan menjadi lebih mudah dilakukan. Paling tidak karena ada perasaan dan kesadaran bahwa persoalan yang muncul harus dan bisa diselesaikan secara bersama, tanpa bergerak sendiri-sendiri.

Memang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sudah menandatangani persepsi yang sama tentang terorisme pada bulan November 2001 yang mereka sebut sebagai *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*. Namun nyatanya komitmen untuk mengimplementasikan aksi bersama tersebut belum sepenuhnya bisa diwujudkan, melainkan lebih banyak terpengaruh dengan kepentingan politik domistik atau pengaruh dari Amerika sebagai salah satu *major power* dunia. Selama ini yang terjadi adalah bahwa pada level regionalisme, perang melawan terorisme lebih banyak pada level pernyataan, dan belum turut pada level yang ril.

Para pengamat menilai bahwa salah satu masalah mendasar yang melatar belakangi persoalan ini adalah karena masih kuatnya rasa nasionalisme pada masing-masing negara. Pada akhirnya mereka kesulitan untuk betul-betul membangun langka konkrit bersama. Apalagi beberapa negara seperti Indonesia sudah menerapkan sistem desentralisasi dalam politik domistiknya. Hal ini tentu akan memperkuat posisi opini publik dengan jangkauan yang lebih luas. Karena itu, sikap satu negara dalam regionalisme relatif membutuhkan proses yang panjang.

Disamping itu, persoalan intervensi yang selama ini cukup kuat dilakukan oleh Amerika dalam perang melawan terorisme juga mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Pemerintah Malaysia misalnya menilai bahwa upaya terbaik untuk menyelesaikan persoalan terorisme seharusnya dilakukan secara internal oleh negara-

negara yang berada dalam kawasan tanpa perlu adanya intervensi dari kekuatan di luar regional. Hal ini dikarenakan banyaknya internvensi Amerika dalam perang melawan teroris di kawasan, misalnya di Filipina dan Indonesia. Dalam pandangan Malaysia, keterlibatan Amerika justru akan mengundang berbagai gerakan Islam radikal untuk masuk ke kawasan ini.[236]

Fakta menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya tadi sudah dilakukan, nyatanya serangan terorisme masih banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara. Satu tahun setelah dikumandangkannya *join action* untuk perang melawan teroris bagi negara-negara ASEAN ternyata kembali terjadi serang di Bali pada tahun 2002. Belum termasuk berbagai serangan lainnya. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa sebenarnya perang melawan terorisme tidak cukup efektif dengan kekuatan militer, melainkan dengan membangun ketahanan nasional. Maksudnya adalah bahwa berbagai persoalan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi dan politik yang bisa menyebabkan munculnya gerakan terorisme perlu segera diselesaikan.

Inilah makna pemahamanan bahwa terorisme sebenarnya bukan sekedar tindak kriminal, melainkan mempunyai motif politik. Setiap serangan yang mereka lakukan sebenarnya bukan merupakan tujuan, melainkan hanya sebagai cara untuk meraih kepentingan mereka. Ketika mereka melakukan berbagai tindak kekerasan sebenarnya mereka sedang menyampaikan pesan kepada publik dan pemerintah untuk

10.1 [236] Ciorciari, John D. 2010. *The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975*. USA: Georgetown University Press. Page 150

menangkap kepentingan politik yang mereka sampaikan[237]. Tanpa kepentingan politik ini bisa diartikulasikan atau diagregasi dalam kebijakan pemerintah domistik atau regional, maka ancaman ini akan tetap berlangsung. Pada akhirnya, keinginan untuk membangun APSC akan semakin sulit untuk diwujudkan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas terlihat bahwa APSC yang akan segera diimplementasikan pada Desember 2015 merupakan perubahan penting dalam struktur regionalisme di kawasan ASEAN. Upaya untuk membangun kohesitas dengan nilai dan norma bersama ini perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah dengan menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul, seperti halnya isu terorisme. Apalagi di kawasan ASEAN dimana terorisme telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu basis penting pasca invasi Amerika di Afghanistan. Paling tidak ada beberapa negara yang dinilai rawan dengan gerakan terorisme, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand Selatan.

Para pemimpin ASEAN sebenarnya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini, baik secara regional, bilateral, maupun domistik pada masing-masing negara. Berbagai kesepakatan dan *joint action* juga sudah dikumandangkan. Namun sayang dalam implementasinya beberapa hal tersebut belum sepenuhnya sukses dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya intervensi yang kuat dari Amerika, struktur ASEAN yang belum cukup kuat secara organisasi, dan

[237] Castro, Renato Croz De. 2004. *Adressing International Terrorism in Southeast Asia: A Matter of Strategic or Functional Approach?.* Contemporary Southeast Asia. Vol 26 no 2. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Page 195

nasionalisme serta kepentingan masing-masing negara yang melemahkan upaya regional dalam penyelesaian masalah teroris.

Akhirnya, persoalan terorisme yang masih menjadi isu penting di kawasan ini dikhawatirkan akan menghambat implementasi APSC. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi berbagai upaya yang telah direncanakan dan diimplementasikan tadi sehingga kohesitas sebagai satu kesatuan di wilayah ASEAN utamanya pada bidang politik keamanan akan bisa diwujudkan.

Daftar Pustaka

Berman, Evan and M. Shamsul Haque. 2015. Asian Leadership in Policy and Governance. UK: Emerald Group Publishing Limited. Page 74

Caballero, Mely and Anthony.2005. *Regional Security in Southeast Asia: Beyond The ASEAN way*. Singapore: ISEAS. Page 218

Castro, Renato Croz De. 2004. *Adressing International Terrorism in Southeast Asia: A Matter of Strategic or Functional Approach?*. Contemporary Southeast Asia. Vol 26 no 2. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Page 195

Chow, Jonathan T. *ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11*. Asian Survey, Vol. 45, No. 2 (March/April 2005). USA: University of California Press. Page 308

Ciorciari, John D. 2010. *The Limits of Alignment: Southeast Asia and the Great Powers Since 1975*. USA: Georgetown University Press. Page 150

Dillon, Dana R. 2007. *The China Challenge: Standing Strong Against the Military, Economic, and Political Threats That Imperil America*. USA: Rowman and Littlefield Publisher. Page 47

German, Mike. 2007. *Thinking Like a Terrorist: Insights of a Former FBI Undercover Agent*. Washington: Potomomac Books

Gershman, John. 2002. *Is Southeast Asia the Second Front?*. Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4 (Jul. - Aug). Published by: Council on Foreign Relations Page 63

Kohm, Kheng-Lian. 2009. Asean Environmental Law, Policy and Governance: Selected Documents. Singapore: World Scientific Publishing. Page 594

Ramakrishna, Kumar. 2004. *Terrorism In Southeast Asia: The Ideological and Political Dimensions.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). Page 55

Rose, Gregory And Diana Nestorovska. 2005. *Towards An Asean Counter-Terrorism Treaty.* Singapore: Syibil.

Siddique, Sharon and Sree Kuma. 2003. *The 2nd ASEAN Reader*. Singapore: ISEAS Page 511

Smith, Paul J. *Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to States*.

Tellis, Ashley J.and Michael Will. 2005. *Military Modernization in an Era of Uncertainty*. UK: The National Bureau of Asian Research.

Wah, Chin Kin. 2004. *Southeast Asian Affairs 20014.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community

https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0009/169254/michael-wesley-paper.pdf

http://thediplomat.com/2015/03/asean-is-not-a-security-community-yet/

http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/05/building-asean-political-security community.html

ASEAN Regional Forum dan Kritik Kontra-Terorisme di Asia Tenggara

Dr. Badrus Sholeh dan M. Adian Firnas, M.Si

(Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Abstrak:

ASEAN Regional Forum membuat evaluasi dan upaya memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme selama kurun 2014-2015, termasuk kontra-terorisme dan kontra-radikalisasi sebagai kelanjutan dari "ARF Cooperation Framework on Counter-Terrorism and Transnational Crime" sejak 2012. Beberapa negara anggota ASEAN berhasil melakukan kebijakan kontra-terorisme dan deradikalisasi, tetapi beberapa yang lain tidak berhasil bahkan jumlah, kapasitas dan pengaruh transnasional terorisme makin kuat. Metode John Horgan (2014) dengan memisahkan individu dan kelompok teroris dan kriminal ternyata berdampak sebaliknya, terjadi radikalisasi di penjara. Artikel ini akan menganalisis ASEAN Regional Forum dalam kontra terorisme dan bagaimana negara-negara ASEAN mengantisipasi tantangan keamanan regional. Artikel ini melalui wawancara mendalam di Indonesia, Singapura dan Malaysia 2014-2015. Argumen artikel ini adalah bahwa ASEAN telah berhasil memperkokoh kerjasama keamanan antar negara baik di Asia Tenggara maupun kerjasama bilateral dan multilateral dengan beberapa negara dan organisasi internasional dalam menangani ancaman terorisme. Tetapi makin meningkatnya kualitas dan kuantitas gerakan terorisme yang melewati batas-batas negara

membutuhkan pendekatan lain, yaitu dialogis dan persuasif yang telah diterapkan di Indonesia atas beberapa pelaku terorisme.

Kata Kunci: ARF, Kontra-Terorisme, Deradikalisasi, Asia Tenggara

Pendahuluan

Gerakan transnasional terorisme melibatkan indivdu dan kelompok lokal dan global yag mengancam keamanan nasional dan internasional. Islamic State (IS), dikenal juga dengan istilah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) misalnya kini menjadi perhatian negara-negara dunia setelah lebih dari tujuh puluh ribu pasukannya yang kini berada di Irak dan Suriah berasal dari sekitar 40 negara berbeda. Ribuan diantaranya berasal dari Eropa Barat, Eropa Timur, Asia Selatan, Australia, Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Kristin Archick et.al. menyatakan bahwa terdapat sekitar 4000 sampai dengan 5000 jihadist berasal dari Eropa (Archick et.al. 2015). Daya tarik dan dinamika konflik Suriah lebih kuat dibandingkan konflik Afghanistan tahun 1979-1989. Jihadis dari Asia Tenggara yang datang ke Suriah jauh lebih banyak dibandingkan keterlibatan mereka dalam konflik Afghanistan. Ancaman IS jauh lebih dahsyat dibandingkan Al-Qaidah. Deklarasi pendirian IS yang “resonates within the hearts of many Muslims, infiltration of Muslim communities worldwide through its robust propaganda, and the group’s financial, material and human resources” (Gunaratna 2015: 4).

JIhadis dari Indonesia yang berangkat dan kini terlibat dalam konflik Suriah sekitar 500-700 orang antara 2012-2015. Indonesia memimpin Katibah Nusantara menyatukan jihadis IS dari Asia Tenggara. Adalah Bahrumsyah aka Abu Muhammad

al Indonesi yang mendirikan IS Indonesia dan memimpin propaganda IS di Asia Tenggara. Diperkirakan anggota IS dari Asia Tenggara sekitar 1000 orang dan mereka akan menjadi ancaman serius ketika kembali ke Asia Tenggara. ASEAN Regional Forum (ARF) mengantisipasi ancaman IS baik bagi mereka yang akan kembali dari Suriah dan Irak, juga yang kini berkembang di beberapa Negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Isu terorisme menjadi perhatian penting pada pertemuan ARF di Kuala Lumpur Agustus 2015. Sikap ini memperkuat tujuan awal dibentuknya ARF pada 1994 yakni "to foster constructive dialogue and consultation on political and security issues of common interest and concern; and to make significant contributions to efforts towards confidence-building and preventive diplomacy in the Asia-Pacific region". Keterlibatan dan kehadiran Negara-negara Asia Pacific menjadikan ARF forum penting bagi diplomasi regional. Dukungan dan masukan Negara-negara di luar ASEAN akan memperkuat kontribusi ASEAN bagi keamanan, stabilitas dan kemakmuran global.

ARF mengalami perkembangan lebih substansial sejak 2010 ketika the Hanoi Plan of Action to Implement the ARF Vision Statement dilakukan sebagai kebijakan anggota ARF dalam menangani terorisme dan kejahatan transnasional (CTTC, Counter Terrorism and Transnational Crime). Pada tahun 2010, ARF menekankan kerjasama mengatasi ancaman terorisme dan deradikalisasi yang dievaluasi setiap tahun dalam pertemuan antar menteri. Ancaman terorisme menghantui Negara-negara anggota ARF dan upaya deradikalisasi dilakukan secara bersama dan saling memperkuat antar anggota. Sayang sekali upaya deradikalisasi tidak membuahkan

hasil maksimal dibeberapa Negara. Singapura, melakukan deradikalisasi dengan melibatkan masyarakat sipil dan pemerintah. Kerjasama Negara dan masyarakat sipil menjadi perpaduan kuat untuk mengatasi terorisme di Singapura. Sementara Indonesia masih mengalami tantangan lebih serius akibat gagalnya deradikalisasi di beberapa penjara di Indonesia. Radikalisme berkembang justru di penjara.

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian Counter-Terrorism and Deradicalism in Southeast Asia: Comparing Indonesia, Singapore and Malaysia 2015-2016 yang didanai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa wawancara dilakukan dibeberapa penjara di Jakarta, Cilacap dan Porong, Jawa Timur, serta lembaga dan ahli kontra terorisme seperti BNPT, Densus 88 dan ASEAN Sekretariat. Argumen riset ini adalah kerjasama komprehensif Negara dan masyarakat sipil menjadi factor krusial dalam mengatasi terorisme bagi anggota ARF melalui pendekatan sesuai dengan potensi dan kekuatan masing-masing Negara. Hubungan ARF dan komunitas regional dunia serta kerjasama antar negara dibutuhkan untuk mengantisipasi gerakan transnasional terorisme yang makin kuat.

Terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara

ISIS merupakan ancaman paling serius di kawasan Asia Tenggara saat ini, sesuai dengan perhatian pertemuan ARF Agustus 2015. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull yang mengikuti ASEAN summit di Kuala Lumpur pada November 2015 menyatakan bahwa pertemuan kesepakatan ekonomi ASEAN di bayang-bayangi akan ancaman terorisme. Turnbull menyatakan bahwa: “we need to be sharing our experience, and seeing what works and what doesn’t work, and making

sure that the right messages are out there to counter these extremist narratives which regrettably are luring, or drawing a lot of young people" (ABC, 22 November 2015).

IS di Indonesia berkembang pesat dan menjadi ancaman paling serius bagi keamanan nasional dengan beberapa alasan. Pertama, mereka menantang negara dengan mengajak masyarakat Muslim Indonesia untuk keluar dari warga negara Indonesia, dan berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi. Bagi mereka Al-Baghdadi adalah khalifah dan imam tertinggi yang wajib ditaati, bukan pemerintah. Kedua, kembalinya mereka yang ikut berperang di Suriah akan menjadi ancaman langsung bagi kehidupan Bangsa baik dari aspek keamanan maupun kehidupan Berbangsa dan Beragama. Belajar dari para alumni Afghanistan, Mindanao, Maluku dan Poso tiga wilayah konflik yang membentuk para alumninya memengaruhi masyarakat dengan semakin kuatnya mereka untuk melawan kelompok dan agama lain dengan kekerasan (Sholeh 2007).

Bunzel memahami ideologi ISIS pada dua tingkat, pertama ISIS sebagaimana Al-Qaidah adalah gerakan Jihadi-Salafi. Pada tahun 2007, Abu 'Umar al-Baghdadi menyatakan bahwa "to all Sunnis, and to the young men of Jihadi-Salafism (*al-Salafiyya al-Jihadiyya)* in particular, across the entire world." (Bunzel 2015: 7). Pada level kedua, orientasi ideologi ISIS terpisah dari al-Qaidah saat ini. Gerakan ISIS terletak dikanan, sedangkan al-Qaidah sisi kiri. Ideologi ISIS mengacu pada gerakan. Kritik terhadap ISIS dilakukan oleh pengikut JI dan al-Qaidah. Perbedaan langkah JI dan ISIS adalah bahwa JI melaui tiga proses: *I'dad* (persiapan), qital (perang) dan ribath. Sedangkan ISIS dianggap tidak memiliki waktu dan kesempatan cukup untuk persiapan tapi langsung Qital (perang) dan ribath. Akibatnya, terjadi perbedaan yang

mencolok pada pola ideologi dan gerakan kedua kelompok Jihadi-Salafi. Pengikut ISIS Indonesia dianggap terlalu tergesa-gesa dalam melakukan langkah. Tetapi pengikut ISIS Indonesia merasa memiliki kebanggaan atas pesatnya perkembangan ISIS di Suriah dan Iraq. Daya tarik perang melawan rejim Basyar As'ad dan penegakan Khilafah Islamiyah menjadi alasan penting bagaimana para Mujahidin seluruh dunia bergabung dengan ISIS. Tetapi operasi Jihad yang dilakukan ISIS banyak menyisir kelompok sesama Muslim juga yang mendapat kritik tajam Mujahidin seluruh dunia. Diantaranya membunuh utusan Jabhat al-Nusra, organisasi Jihadi-Salafi yang secara resmi berafiliasi dengan Al-Qaidah.

Khilafah yang diklaim oleh al-Baghdadi mendapat tantangan dari banyak Jihadis, termasuk dari Al-Qaidah, Jama'ah Islamiah dan gerakan Jihadis lainnya. Tetapi al-Baghdadi telah berhasil menarik perhatian Mujahidin seluruh dunia melalui kepemimpinan Khilafahnya. Barangkali karena terjadi kekosongan icon pasca meninggalnya Osamah bin Laden. Jika lebih dari 170 ribu Mujahidin yang berasal dari lebih dari 40 negara asing berada dibelakang al-Baghdadi di Suriah dan Iraq sangat jelas besarnya kekuatan dan daya tarik al-Baghdadi. Abu Bakar al-Baghdadi mengajak seluruh mujahidin termasuk Jabhat al-Nusra untuk mengakui dia sebagai Amir Khalifah. Ajakan al-Bagdadi ditanggapi oleh Aiman al-Zawahiri, Al Qaidah pusat dengan menyatakan bahwa Jabhat al-Nusra adalah organisasi resmi Al-Qaidah di Suriah. Tetapi ajakan Al-Baghdadi memengaruhi para elit dan anggota Jabhat al-Nusra dan organisasi Jihadis seluruh dunia, termasuk di Indonesia Abu Bakar Ba'asyir beserta JAT menyatakan berbai'at dengan Al-Baghdadi. Orientasi gerakan Jihad di Indonesia dan dunia di Suriah juga berubah. Afiliasi elit dan anggota Jihadis

yang tergabung dalam Jama'ah Islamiyah tetap taat atas perintah Al-Zawahiri, pemimpin tertinggi Al-Qaidah. Karena itu, jalur berangkatnya JI ke Suriah masuk ke kelompok Jabhat al-Nusra. Menurut JI bahwa perilaku Jihad ISIS lebih mengarah ke Syubhat melalui mengambilan dan menyebaran video pembunuhan dan pembantaian lawan-lawan mereka yang disebarkan melalui dunia maya. Pertarungan ideologi dan pengaruh atas Mujahidin internasional menjadi menarik karena kedua organisasi seolah ingin membuktikan bahwa mereka yang paling layak menjadi kiblat internasional dalam berjihad di Suriah. Di Indonesia, alumni Afghanistan dan Morro yang mengendalikan JI masih dominan baik dalam rekrutmen Jihadis dan mengirim mereka ke Suriah, maupun dalam memengaruhi masyarakat Mujahidin di Indonesia. Mereka menyayangkan aksi Abu Bakar Ba'asyir dan JAT yang menyatakan diri berbaiat kepada Al-Baghdadi. Friksi organisasi Jihad ini membuat agenda mereka terbelah. Perpecahan ini bisa berdampak pada bagaimana para Jihadis dari faksi bereda ini kembali ke Indonesia. Persaingan pengaruh antar radikal-jihadi membuat gerakan mereka semakin masif terutama upaya mereka memengaruhi komunitas masyarakat melalui pengajian rutin, bedah buku dan diskusi yang mereka lakukan. Dalam kajian keamanan, friksi diantara Jihadis melemahkan soliditas kekuatan mereka. Tetapi sebaliknya dalam gerakan Jihad mereka seolah bersaing menunjukkan bahwa diantara mereka mewakili jihad global.

Di Asia Tenggara beberapa kelompok separatis Muslim dan jihadis menyatakan bergabung dan mendukung Al Baghdadi. Diantaranya adalah Abu Sayaf dan BIFF (Bangsamoro Islamic Freedom Fighters). Di Malaysia, beberapa kelompok Mujahidin kelanjutan dari pendidikan yang digerakkan oleh alumni Afghanistan dan mujahidin

lokal juga menyatakan mendukung IS. Karena itu, pergerakan ini menjadi ancaman bagi keamanan di Asia Tenggara yang harus menjadi perhatian ARF dalam pertemuan 2015 dan agenda penting agar masyarakat ekonomi ASEAN tidak terganggu oleh gerakan terorisme.

ARF dan Kebijakan Kontra-Terorisme

Pada Chairman's statement ARF yang ke 22 di Kuala Lumpur, Malaysia 6 Agustus 2015, Dato' Sri Anifah Hj. Aman, Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa:

The ministers condemned the violent and barbaric acts of the self-proclaimed Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and called for concerned efforts to counter this threat. The ministers reiterated their strong support and commitment to implementing UNSC Resolutions 2170, 2178 and 2199 and recalled the issuance of the ASEAN Foreign Ministers' statement on the Violence and Brutality Committed by Extremist Organisations in Iraq and Syria on 28 January 2015. Efforts must be increased to counter violent extremism by collaborating closely with stakeholders and strengthening intelligence and security cooperation (ARF 2015).

Dalam pertemuan ARF 2015 ini perhatian preventive diplomacy menjadi lebih efektif karena fokus pada kasus-kasus di daerah konflik dan tetap komitmen dalam mengatasi negara pasca konflik, Antara lain Afganistan dan Irak. Kesepakatan ARF dalam membantu transisi demokrasi Afghanistan menjadi relevan bagi misi dan visi ARF dalam menciptakan dunia global yang demokratis, damai dan sejahtera.

Dibicarakan juga bagaimana ARF penting untuk memerhatikan perkembangan konflik Suriah yang kini menjadi daya tarik bagi individu dan kelompok teroris global. ASEAN memang tidak secara langsung terlibat dalam memerangi IS di Suriah, tetapi memiliki kontribusi dalam peningkatan dan penguatan IS di Suriah akibat pergerakan jihadis dari Asia Tenggara ke Suriah dan Irak.

Perkembangan konflik di Suriah menjadi penting akibat berkembangnya kelompok teroris IS yang mengancam banyak negara. Perhatian ARF saat ini adalah upaya kerjasama regional melalui pelatihan bersama penyelamatan dan kontra terorisme. Selama ini beberapa pergerakan IS dari Indonesia berhasil digagalkan di Malaysia dan Singapura ketika mereka akan bersangkat ke Suriah. Misalnya satu keluarga dari Jawa Timur pada Desember 2014 ditangkap d Kuala Lumpur melalui laporan Interpol dan dideportasi di Indonesia. Tetapi karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang menjerat pengikut IS dengan UU Kontra Terorisme, maka hakim hanya menjerat 3 tahun dengan dakwahan pelanggaran dokumen imigrasi. Penguatan Law Enforcement dan pemahaman yang merata dari masyarakat atas bahayanya IS akan membantu dalam membendung perkembangan dan ancaman IS di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Kesimpulan

ARF yang didirikan pada 1994 dengan tujuan membangun dialog konstruktif khususnya dibidang politik dan keamanan menjadi gerakan penting dalam preventive diplomacy di wilayah Asia Pacifik. Sejak konflik Suriah tahun 2011 dengan berkembangnya IS yang mengancam keamanan internasional, ARF membahas

ancaman terorisme ini dan membangun kerjasama regional baik pada level ASEAN maupun dengan negara-negara yang terlibat dalam pertemuan ARF. Australia dan Amerika adalah diantara yang aktif dalam bekerjasama dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan teorisme di Asia Tenggara.

Berkembangya terorisme di Asia Tenggara melalui keterlibatnnya ribuan jihadis asal Asia Tenggara menjadi ancaman serius terutama bagaimana mereka yang kini terlibat dalam konflik Suriah kembali ke negara masing-masing, terutama kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Target generasi muda yang menjadi sasaran IS mengkhawatirkan banyak negara termasuk Eropa, Australia dan Amerika karena beberapa diantara anak muda belasan tahun berusaha ke Suriah tanpa konsultasi dengan orang tua mereka. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ingin meyakinkan ARF bahwa perhatian atas potensi generasi muda ini sangat serius terutama bagaimana penting dilakukan kontra naratif dalam kebijakan kontra terorisme yang menjadi pembahasan ARF pada November 2015.

Kerjasama komprehensif antar negara-negara dalam ARF, negara dan masyarakat sipil sangat penting karena karakter transnasional IS dan gerakan transnasional teroris lainnya telah menghancurkan sendi-sendi ideologi negara dan hubungan multicultural Bangsa. Kebijakan persuasif di Indonesia dan gagalnya deradikalisasi melalui penjara menjadi contoh bagaimana pentingnya upaya komprehensif yang melibatkan negara dan masyarakat sipil dalam kontra terorisme di Asia Tenggara dan Asia Pasifik melalui wadah ARF.

Saat ini pemerintah koalisi internasional yang menyerang IS menjadi target ancaman pembalasan. Serangan Paris yang menewaskan lebih dari seratus orang yang

mirip dengan pola serangan Mumbai sebagai bukti pernyataan IS bahwa mereka akan menyerang siapapun negara yang terlibat dan mendukung gerakan menghambat dan melawan IS. Serangan berikutnya Hotel Mali yang menewaskan 19 orang. Dalam sirkulasi diskusi terbatas melalui BBM dan social media yang dikelola oleh IS, mereka memperkuat barisan untuk menyerang kembali melalui jaringan internasional.

Daftar Pustaka

Archick, Kristin et.al. 2015. *European Fighters in Syria and Iraq: Assessment, Responses, and Issues for the United States.* 27 April. Congressional Research Service. Https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44003.pdf, diakses 20 November 2015.

Bunzel, Cole. 2015.*From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State.* The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Analysis Paper No. 19, March.

Gunaratna, Rohan. 2015. "Countering Violent Extremism: Revisiting Rehabilitation and Community Engagement", *A Journal of the International Centre for Political Violence and Terrorism Research,* Vol. 7, Issue 3: 3-11.

Sholeh, Badrus. 2007. "Jihad in Maluku", dalam Andrew T.H. Tan (ed.).*Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia.* Cheltenham, UK: Edward Elgar Publisher.

Weiss, Michael & Hassan, Hassan. 2015. *ISIS Inside the Army of Terror.* New York: Regan Arts.

Kajian Gender dalam Kriminal: Keikutsertaan Perempuan dalam Bisnis Peredaran Narkoba di Indonesia

(Sebuah Studi Deskriptif Kuantitatif)

Randhi Satria, S.IP, M.A

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: ranbandit@gmail.com

dearnypha@gmail.com

Abstrak

Pandangan mengenai kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan merupakan sebuah pandangan yang tidak lagi relevan. Persepsi mengenai perempuan yang selalu ditempatkan dalam posisi sebagai korban dalam tindakan-tindakan kriminal juga sudah tidak lagi relevan. Secara faktual perempuan juga banyak terlibat dalam bisnis peredaran narkoba di Indonesia, sekaligus mengambil keuntungan yang cukup besar di dalamnya. Perempuan memiliki gaya yang berbeda dalam peredaran narkoba jika dibandingkan dengan laki-laki. Di samping itu perempuan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki laki-laki dalam mengedarkan narkoba seperti misalnya kemampuan merayu yang ditujukan kepada *client* sebagai pendekatan halus untuk mendapatkan konsumen. Sebagai kurir, perempuan dapat melakukan transaksi dengan cara lebih rapi daripada yang dilakukan oleh laki-laki, selain itu laki-laki juga lebih gampang dicurigai sebagai kurir narkoba dibandingkan perempuan. Tingginya tingkat keikutsertaan dan keterlibatan perempuan dalam matai rantai peredadaran narkoba di Indonesia tidak terlepas darri tingginya volume perdagangan narkoba di Indonesia. Sedangkan tingginya volume peredaran narkoba tersebut tidak dapat

dipisahkan dari tingginya permintaan yang datang dari dalam negeri. Fenomena tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi pada derasnya aliran narkoba dari luar negeri yang diselundupkan ke Indonesia.

Paper ini akan menjabarkan bagaimana perempuan ikut serta dan terlibat dalam bisnis peredaran narkoba di Indonesia. Paper ini akan mengeksplorasi bagai mana peranan wanita sebagai pelaku kriminal baik itu sebagai produsen, distributor, maupun konsumen. Penulis ingin melihat sejauh apa peran perempuan sebagai actor dalam peredaran narkoba yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengingat banyaknya peredaran narkoba di Indonesia.

Keywords: Perempuan, peredaran narkoba, gender, kesetaraan, permintaan dalam negeri

Pendahuluan

Sebagai sebuah kawasan yang terus mengalami pembangunan dan perkembangan, Indonesia tidak hanya mengalami kemajuan-kemajuan yang berdampak postif saja, akan tetapi seiring dengan pembangunan dan perkembangan tersebut Indonesia juga terus bergulat dengan permasalhan-permasalahan pelik multidimensional. Salah satu permasalhan multidimensional yang sekarang telah menjadi agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah mengenai pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Dijadikannya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia oleh pemerintah sebagai salah ialah satu agenda prioritas disebabkan oleh tingginya tingkat sirkulasi peredaran narkoba di Indonesia dan volumenya yang sudah sangat mengkhawatirka.

Indonesia merupakan sebuah market yang sangat prospektif untuk berbagai macam narkoba seperti ekstasi, ganja, sabu-sabu, heroin, morfin, dan jenis-jenis lainnya. Peranan Indonesia yang menjadi market yang sangat prospektif tadi telah menjadikan Indonesia sebagai target dari produksi narkoba dalam negeri maupun penyeludupan dari luar negeri. Fenomena inidapat dianalisis secara sederhana menggunakan dengan hukum penawaran dan permintaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingginya tinkat sirkulasi perdagangan narkoba di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tingginya permintaan narkoba di Indonesia itu sendiri.

Selain dipengaruhi oleh tingginya permintaan dalam negeri, tinggi tingkat peredaran narkoba di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi ekternal seberti derasnya arus globalisasi dan *free trade*. Derasnya arus globalisasi dan *free trade* yang menerjang Indonesia membuat banyak sekali penganut paham liberalisme mendesak pemerintah untuk menjalankan kebijakan deregulasi peran negara.Diimplementasinyannya kebijakan deregulasi petan negara tersebut telah dimanfaatkan sebagai celah untuk menyeludupkan narkoba ke Indonesia. Deregulasi peran negara tadi juga telah menempatkan Indonesia ke dalam posisi yang sangat sulit untuk melacak dan menelusuri jejak peredaran narkoba yang masuk dari luar negeri. Kemajuan Teknologi komunikasi dan informasi juga turut berkontribusi terhadap tingginya tingkat peredaran narkoba di Indonesia. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tadi sangat mempermudah para pengedar narkoba dalam memperjualbelikan narkoba. Tidak heran jika dalam era sekarang ini, peredaran narkoba sudah sangat mudah dijumpai melalui internet dan media sosial. Pemenafaatan internet sebagai media pemasaran narkoba tadi tidak terlepas dari

keunggulannya yang mampu menjaring konsumen dengan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih banyak jika dibandingkan dengan transaksi-transaksi yang dilaksanakan secara tradisional.

Peredaran narkoba yang ada di Indonesia tentu berimplikasi pada seluruh lapisan masyarakat termasuk jika dilihat dari strata pendidikan, strata sosial, pekerjaan, usia maupun jenis kelaminnya.Perempuan dalam hal ini juga ikut berkontribusi dalam peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia sama halnya dengan laki-laki. Dengan demikian maka bagi penulis anggapan yang menyatakan perempuan yang hanya dijadikan objek eksploitasi semata sudah tidak relevan lagi. Perempuan dalam hal ini juga mampu keluar dari “nilai-nilai kelemahan” yang dimilikinya untuk kemudian disetarakan dengan laki-laki jika dilihat dari jenis kegiatan yang mereka lakukan khususnya dalam hal peredaran narkoba yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.Hal yang akandianalisis dalam paper ini berangkat dari sebuah pemikiran yang sederhana yaitu keinginan untuk melihat bagaimana wanita turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam sirkulasi perdagangan narkoba di Indonesia.

Kerangka Konseptual

Keberadaan kerangka konseptual dalam sebuah tulisan ilmiah merupakan sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kerangka koseptual akan membantu penulis dalam menganalisis kajian yang sedang dibahasnya, sehingga tulisan yang dihasilkan nangtinya tidak akan keluar dari Kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Kerangka konseptual ini juga akan membantu pembaca untuk lebih memahami arah

bahasan yang dikonstruksikan oleh penulis . Mohtar Mas'oed menjelaskan bahwasanya konsep merupakan sebuah kata yang melambangkan sebuah gagasan, penggunaannya dalam keseharian berfungsi untuk menyederhanakan fakta-fakta kompleks dengan kategorisasi hal-hal yang ditemui berdasarkan cirinya yang relevan bagi kita, fungsinya yang *pertama* adalah untuk mengkomunikasikan suatu pemikiran yang sama antar ilmuan, *kedua*adalah untuk memperkenalkan suatu sudut pandang dan *ketiga* adalah sebagai sarana pengorganisasian suatu gagasan, persepsi, dan symbol(Mas'oed, 1990). Untuk itu penulis juga akan mengungkapkan beberapa konsep yang telah mendasari penulisan artikel ini tentunya agar para pembaca mampu menganalisis konten yang tertulis dalam artikel ini.

1. **Konsep kesetaraan gender**

Ketika melakukan penilitian maupun pembuatan tulisan ilmiah yang berkaitan erat dengan studi-studi gender, penggunaan konsep kesetaraan gender dalam kerangka konseptualnya merupakan sesuatu hal yang wajib adanya. Secara sederhana asumsi dasar dari kesetaraan gender ialah bahwasanya perempuan memiliki hak, kesempatan dan kemampuan yang dianggap setara dengan lawan jenisnya. Untuk itu kegiatan ataupun hal-hal yang dapat dilakukan oleh kaum adam dianggap mampu pula jika dilakukan oleh perempuan.Namun demikian, United Nations Economic and Social Comission for Asia and Pasific mendefinisikan kesetaraan gender sebagai usaha pencapaian keseimbangan antara peran dan hubungan dari pria dan wanita. Hal ini merupakan suatu konstruksi sosial dimana kedua jenis kelamin dapat membuat pilihan tanpa dikomentari/diprotes atau dibatasi oleh suatu pandangan umum yang

sudah terbentuk, peran gender yang kaku dan segala prasangka yang mengikutinya. Kesetaraan gender berasal dari budaya, agama, kondisi ekonomi sosial, hukum dan peraturan kebijakan, pendidikan, media dan interaksinya. Topik ini adalah masalah universal dan menindaklanjuti segala penyebabnya tergantung pada konsensus pendidikan dan sosia (UNESCAP 2015). Konsep ini kemudian digabungkan dengan konsep lain yang relevan untuk mendukung analisis dalam artikel ini.

2. Konsep *organized crime*

Untuk lebih memahami mengenai bagaimana peran wanita dalam peredaran narkoba maka penulis akan menggunakan konsep *organized crime*. *Organized Crime* itu sendiri merupakan salah satu bagian darikejahatan transnasional, nasional, maupun local yang secara pelaksanaannya disentralkan pada kelompok kriminal tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan uang atau laba yang sebesar-besarnya(Macionis&John).Konsep ini digunakan untuk menganalisis jenis kejahatan yang akan dikaji dalam artikel ini yaitu perdagangan narkoba. Kejahatan jenis ini tergolong jenis kejahatan tingkat tinggi dengan konsekuensi yang bisa sampai pada hukuman mati. Untuk itu aktor yang terlibat dalam perdagangan narkoba sudah selayaknya memperhatikan hal yang mereka geluti. Tindak kejahatan ini membutuhkan kerja yang terorganisir untuk menutupi secara baik segala jejak yang sekiranya dapat ditelusuri oleh pihak aparat keamanan.

Dalam hal pengorganisasian tentunya perempuan memiliki keunggulan yang tidak dapat dibantahkah oleh para laki-laki dan membuat perempuan berada dalam posisi yang lebih unggul. Penulis berpendapat bahwa perempuan dapat bekerja secara

multitasking dan tertata dengan rapi seperti dalam system patron-client (Abadinsky, 2010). Jika kemudian hal ini diadopsi dalam konteks bisnis narkoba, maka perempuan dapat mengorganisir suatu kejahatan yang lebih tertata rapi sekaligus bersembunyi dibalik pencitraan akan ketidakberdayaan yang mereka miliki untuk menutupi segala kecurigaan ataupun mengelabui musuh-musuhnya.

3. Konsep *supply and demand*

Konsep dasar dalam kajian ekonomi ini penulis anggap relevan untuk dimasukkan dalam salah satu konsep yang digunakan untuk menulis artikel ini mengingat peredaran narkoba tidak terlepas dari hal yang bersifat ekonomi seperti permintaan dan penawaran serta kebijakan pemerintah terhadap suatu barang yang didagangkan (Mankiw, 2012). Permintaan yang muncul dari bawah kemudian direspon dengan pemenuhan kebutuhan terhadap permintaan tersebut berupa penawaran barang yang disediakan. Distribusi kemudian dijalankan oleh distributor untuk mempertemukan konsumen selaku pihak yang melakukan permintaan terhadap produsen selaku pihak yang memenuhi dengan memberikan penawaran. Penggabungan dari tiga rantai ekonomi tersebut penulis gunakan untuk mendeskripsikan peranan perempuan dalam masing-masing rantai yaitu produsen, distributor dan konsumen.

Ketiga konsep yang telah disebutkan di atas akan penulis gabungkan dalam analisis yang kemudian dideskripsikan dalam artikel ini. Perempuan, sebagaimana diyakini oleh para aktivis gender, dianggap setara dengan laki-laki. Dengan kata lain perempuan pun memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki

dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang bisnis narkoba ini. Dengan segala keunggulannya bahkan perempuan memiliki potensi lebih jika dibandingkan dengan laki-laki untuk mengorganisir suatu kegiatan yang memang membutuhkan keuletan yang tinggi seperti dalam menjalankan bisnis narkoba. Mulai dari posisi mata rantai teratas hingga ke mata rantai terbawah dari kegiatan ekonomi tersebut mampu digeluti oleh perempuan.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu mekanisme yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan menjelaskan suatu permasalahan yang akan dibahas dari penelitian. Penulisan artikel ini juga menggunakan metode untuk menjelaskan secara urut proses analisis yang dilakukan oleh penulis dalam memaparkan artikel ini.

Artikel ini menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan dalam (Silalahi, 2012) bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan secara rinci untuk menghasilkan sebuah pemahaman tentang suatu hal melalui pemaparan yang disampaikan dalam tulisan.

Kemudian penulis juga menggunakan metode kuantitatif yang pada dasarnya menggunakan data-data statistika yang telah berhasil dikumpulkan untuk kemudian mengambil suatu kesimpulan dari data yang tersedia. Ketersediaan data tentu akan berpengaruh pada analisis deskriptif-kuantitatif karena dalam pikiran penulis permasalahan yang penulis ambil tidak hanya cukup bila menggunakan metode

deskriptif untuk menjabarkan rumusan masalah tersebut tetapi juga membutuhkan metode kuantitatif untuk memperkuat konten dari artikel ini.

Analisis

Turut ikut sertanya dan kontribusi wanita dalam kasus-kasus kriminal bukan lagi menjadi sebuah fenomena yang luar biasa maupun mengagetkan. Peranandan kontribusi wanita dalam dunia kriminal di era globalisasi seperti saat ini sudah menjadi fenomena yang wajar. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Steffensmeier dan Allan melalui risetnya menjelaskan bahwasanya keterlibatan perempuan dalam kejahatan kriminal memang benar adanya sebagaimana yang terjadi di Negara Amerika Serikat, hanya saja kedua penulis tersebut tidak secara spesifik mengarahkan penelitiannya kearah peredaran narkoba. Tetapi hal yang menarik dari penelitian tersebut adalah Steffensmeier dan Allan memaparkan data yang menjelaskan bahwa terdapat *gap* antara pelaku criminal berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan sebagai pelaku criminal menurut data tersebut berjumlah jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki (Steffensmeier dan Allan, 1996).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Steffensmeier dan Allan tentang keterlibatan wanita dalam kejahatan dan kriminal di Amerika Serikat sekiranya masih sangat relevan apabila dijadikan sebuah *comparative case* untuk menganalisis keterlibatan wanita dalam kejahatan dan kriminal di Indonesia.Kejahatan criminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tetapi juga oleh perempuan. Dalam konteks kasus peredaran narkoba hal yang sama pun terjadi meskipun jika dilihat dari

segi kuantitas, keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Indonesia masih kalah jumlah dari lawan jenisnya.

Peredaran Narkoba di Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui situs resminya mengeluarkan sebuah data resmi yang menunjukkan bahwakasus tindak pidana narkoba di Indonesia sejak tahun 2009 sampai 2013 tidak hanya melibatkan laki-laki saja, melainkan juga melibatkan perempuan (BNN 2013). Dari data itu dapat kita ketahui bahwa fakta dilapangan telah terjadi kenaikan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana kejahatan narkoba pada tahun 2013 jika dibandingkan 2012. Dari data tersebut dari tahun 2012 ke tahun 2013 telah terjadi kenaikan keterlibatan perempuan dalam kejahatan tindak pidana narkoba sebesar 30,93%. Data tersebut dapat dilihat lebih detail pada tabel yang dipublikasikan oleh BNN melalui situs resminya sebagai berikut:

Tabel 1

Trend Tersangka Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2009-2013

o.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Laki-Laki	35.286	30.635	33.030	32.358	39.715
	Trend		**-**	**7,8**	**-**	**22,**

			13,18%	**2%**	**2,03%**	**74%**
	Perempuan	3.119	2.862	3.702	3.282	4.297
	Trend		**-8,24%**	**29,35%**	**-11,35%**	**30,93%**

Sumber: Polri dan BNN, Maret 2014, dikutip dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba diakses pada 8 April 2015

Tabel diatas dapat dijadikan sebagai bukti nyata adanay relevansi penelitian yang telah diselenggarakan oleh Steffensmeier dan Allan dengan kondisi saat ini. Selai tabel diatas, pihak kepolisian melalui BNN juga telah melakukan klasifikasi pengedar narkoba berdasarakan gender dan kewarganegaraannya. Adapun data tersebut adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba baik dari Jenis Kelamin maupun Kewarganegaraan Rentang Tahun 2007-2011

o.	**Tahun**	**WNI**		**WNA**		**Jumlah**
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
	2007	33.067	3.034	67	1	1.179
	2008	41.2	3.356	88	10	795

		57				
	2009	35.193	3.102	91	17	810
	2010	30.479	2.809	111	23	779
	2011	32.810	3.659	105	15	847
Jumlah		**172.806**	**15.960**	**462**	**66**	**189.294**

Sumber: DIrektorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012, dikutip dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba diakses pada 8 April 2015

Tabel 2 menunjukkan jumlah tersangka kasus narkoba dengan pembagian jenis kelamin dan kewarganegaraannya, data ini diambil dalam skala nasional yang dipublikasi oleh BNN melalui websitenya. Sebanyak 8,47% dari tersangka dalam peredaran narkoba rentang tahun 2009-2011 tersebut merupakan perempuan baik yang merupakan WNI maupun yang WNA. Tetapi apakah perempuan yang tergabung dalam tersangka di atas merambah pada tiga elemen rantai distribusi narkoba yang meliputi produsen, distributor dan konsumen? Peneliti kemudian menemukan data pendukung yang dapat memberikan gambaran kepada pembaca artikel tentang keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkoba.

Tabel 3

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Peran Rentang Tahun 2007-2011

o.	**Tahun**	**Peran**				**Jumlah**
		Kultivasi	**Produksi**	**Distribusi**	**Konsumsi**	
	2007	60	35	19.177	16.897	36.169
	2008	44	61	29.121	15.485	44.711
	2009	52	107	24.060	14.184	38.403
	2010	35	112	20.189	13.086	33.422
	2011	35	39	22.810	13.705	36.589
Jumlah		**226**	**354**	**115.357**	**73.357**	**189.294**
%		**0,1%**	**0,2%**	**60,9%**	**38,8%**	**100,0%**

Sumber: DIrektorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012, dikutip dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba diakses pada 8 April 2015

Pada Tabel sebelumnya (Tabel 2) telah dijelaskan seberapa besar peran perempuan dalam peredaran narkoba yang ada di Indonesia baik yang melibatkan WNI maupun WNA. Sedangkan pada Tabel III di atas ini dipaparkan volume kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi dari narkoba yang terjadi di Indonesia. Tidak dapat dipastikan memang berapa jumlah pastinya, tetapi penulis mengambil kesimpulan bahwasanya perempuan juga ikut ambil andil dalam peredaran yang ada di Indonesia khususnya dalam hal distribusi dan konsumsi. Kedua hal tersebut diungkap penulis karena menurut penulis jika dilihat dari prosentase pada Tabel 3lebih rasional jika perempuan berkontribusi pada dua ranah ini (distributor dan konsumen).

Meskipun hal ini tentunya masih dapat dianalisis jauh lebih dalam. Mengingat jenis tindakan kriminal ini merupakan tindakan yang terorganisir dengan rapi sehingga masih sangat memungkinkan belum ditemukannya pelaku-pelaku lain yang berkeliaran di luar sana dan belum tertangkap oleh pihak aparat keamanan.

Berdasarkan temuan pada Tabel 3 dapat dianalisis bahwasanya perdagangan narkoba yang ada di Indonesia memiliki volume produksi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa menarik suatu pembahasan lain untuk dibahas yaitu dari mana datangnya narkoba yang ada di Indonesia selain dari faktor produksi dalam negeri? Ya jawabanya tentu saja penyelundupan yang dilakukan dari luar Negara ke level domestik Indonesia yang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Untuk itu

penulis akan membahas volume perdagangan narkoba di Indonesia berdasarkan data yang didapat dari BNN. Perhatikan tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Penggolongan Rentang Tahun 2007-2011

o.	**Tahun**	**Kasus**			**Jumlah**	**% Penurunan/Peningkatan**
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif		
	2007	17.955	14.206	4.008	36.169	
	2008	13.420	13.113	18.178	44.711	23,62%
	2009	15.081	11.687	11.635	38.403	-14,11%
	2010	23.900	1.502	8.020	33.422	-12,97%
	2011	25.154	1.997	9.438	36.589	9,48%
Jumlah		95.510	42.505	51.279	189.294	

Sumber: DIrektorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012, dikutip dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba diakses pada 8 April 2015

Berdasarkan data pada tabel di atas bukan hal yang mengherankan jika kemudian Indonesia menjadi salah satu target perdagangan narkoba level Internasional karena masing-masing jenis narkoba berdasarkan penggolongannya hampir memiliki volume yang setara satu sama lain. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa perempuan yang tergangkap sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana narkoba seperti yang tertera pada Tabel 2 juga secara tidak langsung terlibat dalam perdagangan narkoba yang melibatkan tiga golongan narkoba di atas.

Sedangkan untuk besar volume yang dari masing-masing narkoba yang beredar di domestic Indonesia, penulis kemudian mencoba meringkas datanya dengan menggabungkan setiap data yang didapat dan hanya mengutamakan total transaksi yang terjadi dari rentang tahun 2007-2011, hasil ringkasan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5

Jenis Barang Bukti Yang Disita Rentang Tahun 2007-2011

o.	**Jenis Barang Bukti**	**Tahun**	**Total**	**Satuan**
	Ganja	(2009-2011)	329.718.677,60	gram
	Pohon Ganja	(2009	5.297.946	stalks

		-2011)		
	Luas Area (Ganja)	(2009 -2011)	1.096,23	Hectare
	Biji Ganja	(2009 -2011)	2.001,08	gram
	Heroine	(2009 -2011)	103.212,55	Gram
	Cocaine	(2009 -2011)	1.151,40	Gram
	Hanish	(2009 -2011)	5.544,54	Gram
	Ekstasi	(2009 -2011)	3.846.503,75	Tablet
	Shabu	(2009 -2011)	3.634.344,33	Gram
0	Miras Botol	(2009 -2011)	10.946.997,60	Botol
1	Miras Liter	(2009 -2011)	427.625,24	liter
2	Benzodiazepine	(2009 -2011)	1.485.407,75	Tablet
	Barbiturate	(2009	468.174,50	Tablet

3		-2011)		
4	Ketamine	(2009 -2011)	284.258,80	gram

Sumber: DIrektorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012, dikutip dari http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba diakses pada 8 April 2015

Data pada Tabel 5 memberikan bukti bahwa volume perdagangan narkoba yang ada di Indonesia sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Peran perempuan dalam hal tersebut yaitu jelas bahwa merujuk pada angka 8,47% yang telah dijabarkan pada tabel 2 bahwasanya perempuan juga ikut menyentuh barang haram tersebut baik sebagai konsumen maupun sebagai distributor.

Peran perempuan dalam peredaran narkoba

Setelah memahami mengenai empat mata rantai peredaran, kini saatnya memahami bagaimana wanita terlibat dalam setiap mata rantainya.Yang *pertama*, perempuan sebagai konsumen dari narkoba. Pada awalnya perempuan memang menjadi objek pemasaran narkoba, tetapi pada era sekarang ini penulis meyakini bahwa perempuan telah memahami betul keunggulan sosoknya dibandingkan laki-laki. Dalam hal mengkonsumsi narkoba, perempuan menurut penulis mampu memanfaatkan sisi lemahnya sebagai pihak yang rentan dieksploitasi untuk berbalik melakukan eksploitasi terhadap kaum laki-laki untuk mendapatkan narkoba dengan gratis. Asumsi ini relevan rasanya jika kita benar-benar memahami bahwa ketika laki-

laki mengadakan pesta narkoba tentu akan mengundang perempuan untuk memeriahkan pestanya. Dari fenomena semacam itu penulis kemudian meyakini bahwa perempuan dengan menggunakan sisi kelemahannya justru mampu memperdayai dan melakukan eksploitasi terhadap lawan jenisnya. Dari sudut pandang dunia criminal yang demikian ini wajar terjadi. Motif perempuan melakukannya adalah untuk mendapatkan kesenangan dan barang tersebut tanpa harus mengalami kerugian secara ekonomi karena harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Menurut (Walkate, 2014) menjelaskan perempuan yang agresive tidak lagi melihat laki-laki sebagai ancaman. Sama halnya dengan masalah pekerjaan, tidak hanya laki-laki yang mampu memainkan permainan mengeksploitasi lawan jenisnya untuk menggunakan narkoba, perempuan pun mampu melakukan yang sebaliknya (eksploitasi).

Yang *kedua*, perempuan sebagai distributor dalam peredaran narkoba. Untuk kasus yang satu ini penulis mencoba mengambil data yang tersedia dari tabel yang telah dijelaskan. Peran distributor dalam perdagangan narkoba menempati urutan pertama kasus tindak pidana narkoba dengn jumlah tersangka yang ditangkap dengan peran sebagai distributor mencapai angka paling tinggi yaitu 60,9% (lihat tabel 3). Penulis merasa yakin bahwa perempuan juga terlibat dalam aktivitas distribusi narkoba. Perempuan memiliki keunggulan dalam hal mendistribusikan anarkoba yang menurut penulis hal tersebut muncul dari pandangan bahwa perempuan adalah sosok yang rentan dan perlu dilindungi. Yang pada kenyataannya hal tersebut memberikan peluang lebih kepada mereka untuk tidak dicurigai sebagai distributor narkoba. Berbeda dengan laki-laki yang cenderung terlihat mencolok dengan kesan "*show-*

off", perempuan justru lebih cenderung bersifat penuh ketenangan dan kehati-hatian dalam setiap langkah yang dibuat. Keunggulan tersebut menurut penulis kembali pada sosok perempuan yang dianggap seolah pihak yang lemah yang harus dilindungi, seolah-olah menempatkan mereka pada level jenis kelamin yang tidak dicurigai sebagai pengedar narkoba di tanah air ini. Sungguh suatu keunggulan yang menguntungkan bagi perempuan.

Yang *ketiga*, perempuan sebagai produsen narkoba. Minimnya produsen narkoba di Indonesia (lihat tabel 3) serta angka keterlibatan perempuan yang masih kalah jauh dibandingkan para laki-laki (lihat tabel 2) membuat penulis tidak mampu memaksakan analisis pada tahap ini. Hanya saja jika bersandar pada tiga konsep yang diutarakan dalam penulisan artikel (kesetaraan gender, organized crime dan konsep ekonomi tentangpermintaan dan penawaran), penulis tetap memiliki keyakinan bahwasanya perempuan pun mampu mengambil posisi sebagai produsen narkoba.

Berikut ini penulis mencoba menggunakan tiga konsep dalam penulisan artikel ini untuk mendeskripsikan sejauh apa perempuan mampu berperan dalam bisnis peredaran narkoba. Konsep kesetaraan gender menempatkan perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki dalam hal menjadi produsen narkoba. Konsep organized crime menempatkan para pelaku bisnis illegal ini khususnya perempuan mampu mengelabui aparat keaman dan menjaga keamanan bisnis dan diri mereka dari deteksi aparat keamanan yang dapat berujung pada eksekusi hukuman mati. Sedangkan dengan konsep ekonomi tentang permintaan dan penawaran, perempuan diyakini mampu memenuhi permintaan serta penawaran terhadap barang haram tersebut.

Menurut Walkate (2004) dalam salah satu pembahasan di bab bukunya dia menjelaskan terdapat tipe perempuan memiliki kecenderungan untuk agresive seperti misalnya dengan mencoba tantangan-tantangan yang sifatnya memiliki resiko yang tinggi. Beberapa kegiatan yang sering diidentikkan dengan laki-laki seperti contohnya gym, mendaki gunung, sepak bola dan hal-hal yang pada dasarnya memiliki elemen maskulinitas tidak lantas membuat para perempuan takut untuk mencobanya. Demikian halnya dalam hal criminal seperti perdagangan narkoba ini. Perempuan justru bisa merasa tertantang secara naluriah untuk menaklukkan hal yang selama ini identic dengan lawan jenisnya, dengan kata lain perempuan pun mampu melakukan hal tersebut seperti layaknya laki-laki.

Penulis berasumsi bahwa perempuan mengidentifikasi kejahatan criminal perdagangan narkoba di sini sebagai sesuatu yang memiliki *element of fear* dan juga *high risk activity*, yang dalam pendapat penulis justru hal tersebut menjadi salah satu dorongan kuat pada perempuan untuk terlepas dari suatu resiko yang memposisikannya sebagai objek materi semata dalam perdagangan narkoba menjadi aktor ataupun pelaku dari perdagangan tersebut yang mampu melakukan eksploitasi terhadap lawan maupun sesama jenisnya.

Selain asusmsi yang dapat dikembangkan dari penjabaran Walkate diatas, penulis juga akan menjabarkan beberapa asumsi lain yang menjelaskan mengenai keterlibatan perempuan dalam tindak pidana perdagangan narkoba. Asumsi-asumsi tersebut antara lain ialah pertama keterlibatan perempuan yang disebabkan oleh posisinya sebagai istri dari anggota jaringan kejahatan narkoba. Penelitian yang dilakukan Van San menyebutkan bahwa, istri-istri anggota mafia memang cenderung

terlihat pasif dan tidak tahu menahu mengenai kegiatan yang dilakukan sang suami. Observasi awal dari penelitian Van San menunjukkan tidak adanya bukti keterlibatan istri dalam kartel yang bersangkutan. Akan tetapi setelah ditelusur lebih jauh, ternyata kebanyakan istri dari mafia narkoba merupakan pemeran kunci yang mendukung berjalannya operasi. Istri-istri tersebut melakukan berbagai kegiatan seperti pencucian uang, menyembunyikan uang tunai, melakukan penjualan narkoba secara mandiri, dan bahkan melakukan pendidikan terhadap anak-anak mereka agar tumbuh seperti sang ayah (Rosemary, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan terdekatnya yaitu, keluarga.

Kedua terjeratnya perempuan dalam jaringan narkoba seringkali juga disebabkan oleh human trafficking(Taufik, 2015). Hingga saat ini perdagangan manusia masih menjadi ancaman yang cukup serius, bahkan beberapa tahun terakhir, perempuan menjadi korban mayoritas selain anak. Perempuan-perempuan tersebut selain dijual dalam jaringan industri prostitusi, juga acap kali didistribusikan ke kartel-kartel narkoba untuk kemudian dipekerjakan paksa dalam kultivasi dan produksi narkoba.

Ketiga faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perempuan terlibat dalam jaringan narkoba utamanya, dalam hal peredaran narkoba. Kemiskinan telah banyak membuat orang-orang, termasuk perempuan mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak kejahatan seperti menjadi kurir narkoba dan pengedar. Dengan adanya konsumen yang semakin adiktif terhadap narkoba, maka produsen pun akan semakin diuntungkan. Kurir narkoba selalui ditawari upah yang

menggiurkan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk terjun dalam lingkungan kejahatan yang demikian. Apalagi dengan jumlah permintaan yang semakin bertambah, harga komoditas pun juga akan semakin meningkat, sehingga upah yang dapat diterima oleh kurir dan pengedar pun semakin besar. Kebanyakan perempuan, yang terjebak dalam kemiskinan memilih jalan sebagai pengedar guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Terlebih lagi apabila perempuan telah mengalami ketergantungan finansial (Fajrin, 2013). Lebih jauh lagi, jika tingkat pendidikan perempuan masih berada dalam tingkat rendah, mereka akan lebih mudah untuk terjerat dalam lingkup kejahatan yang demikian. Tingkat pendidikan rendah juga menyebabkan perempuan tidak memiliki pekerjaan yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka, sehingga jaringan narkoba menjadi solusi yang paling baik bagi mereka untuk keluar dari taraf kemiskinan.

Kesimpulan

Pesona yang dipancarkan oleh bisnis perdagangan di Indonesia selalu mampu menarik banyak orang untuk ikut terlibat didalamnya, tidak dipeduli jenjang pendidikan, strata sosial, maupun gender. Kontribusi dan keikutsertaan wanita dalam peredaran dan perdagangan narkoba di Indonesia yang pada tiap tahunnya mengalami peningkatan telah menjadi sebuah masalah tersendiri yang harus segera dicarikan solusinya. Luputnya permasalahan keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba di Indonesia dari para penstudi gender dan para pembuat kebijakan telah memberikan ruang gerak yang semakin luas bagi wanita untuk terus terlibat dalam setiap aktifitas ilegal dalam mata rantai peredaran narkoba di Indonesia.

keikutsertaan dan kontribusi yang disumbangkan oleh wanita dalam menyuuurkan bisnis perdagangan narkoba di Indonesia menjadi sebuah bukti bahwa wanita tetap mampu bersaing dengan laki-laki, kususunya dalam kasus peredaran narkoba.Fenomena tersebut dapat dipandang bahwasanya keterlibatan perempuan dalam perdagangan narkoba dianggap sebagai bagian dari perjuangan kaum feminis untuk terus berupaya mempengaruhi system pemerintahan agar terhindar dari suatu system yang gagal (Fakih, 2002).Sistem yang dimaksud harus mampu memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas bermakna serta untuk mencegah atau bahkan mengurangi angka keterlibatan perempuan dalam bisnis illegal tersebut, mencari solusi yang relevan untuk kemudian diaplikasikan oleh pemerintah hingga ke masyarakat pada lapisan bawah. Dengan mengambil kekuasaan yang ada dalam system pemerintahan diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap perempuan Indonesia dalam melindungi kaumnya untuk keluar dari kondisi buruk berkecimpung dalam kegiatan bisnis narkoba. Satu hal yang perlu dijadikan catatan terakhir dari paper ini ialah kesetaraan wanita dalam hal peredaraan narkoba tersebut tidaklah pantas untuk dibanggakan apalagi dianggap sebagai prestasi.

Daftar Pustaka

BNN. 2013. *Analisa Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, diakses pada 18 Oktober 2015. http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba

BNN. 2012. *Data Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2007-2011*, diakses pada 18 Oktober 2015 (http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/deputi-pemberantasan/data-kasus-narkoba)

Fakih, Mansour. 2002.*Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

A. Muh. Fajrin, A. Muh. 2013. *Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin, Makassar

Fatkhurohman Taufik, 2015. *Surat Terbuka untuk Jokowi: Hukuman Mati Rugikan Pecandu Narkoba*, diakses pada 24 Oktober 2015, (http://www.suarasurabaya.net/print_news/Kelana%20Kota/2015/146160-Surat-Terbuka-Untuk-Jokowi-:-Hukuman-Mati-Rugikan-Pecandu-Narkotika)

Mankiw, Gregory. 2012. *Principles of Economics*. Nashville: Southwestern Publishing

Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional. DIsiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Macionis, Gerber, John, Linda .2010. *Sociology 7th Canadian Ed*. Toronto, Ontario: Pearson Canada Inc.

Rosemary L, Barberet. 2014*Women, Crime, and Criminal Justice*: *A Global Inquiry*, London: Routledge

Silalahi, Ulber. 2012.*Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Steffensmeier, Darrel and Allan, Emilie. 1996. Gender and Crime: Toward a Gendered Theory of Female Offending. *Annual Review Inc*. 22:459-87

UNECAP 2015. "Development Through Education." Diakses pada 22 Oktober 2015 (http://www.unescap.org/speeches/development-through-education)

Walkate, Sandra. 2004. *Gender, Crime and Criminal Justice*. Oregon US: Willan Publishin.

Islam Nusantara: *Why Now*? Sebuah Tinjauan terhadap Wacana Islam Nusantara sebagai Produk Pengetahuan dan Kekuasaan dan Relevansinya terhadap Kebijakan Indonesia di Asia Tenggara

Oleh Witri Elvianti, M.A. President University, Kota Jababeka.

Abstrak

Presiden Jokowi semakin gencar menancapkan identitasnya sebagai pengawal lokomotif percaturan politik [Islam] Indonesia yang dapat dilihat dari menguatnya wacana Islam nusantara di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hassan Wirajuda (2015) dalam *The indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs: Strategic Review*, bahwa. toleransi dan harmoni yang dicontohkan oleh penganut Islam dan masyarakat lintas agama lainnya merupakan manifestasi dari kemampuan menerima tradisi dan ajaran Islam, yang kental dengan nuansa Timur Tengah, dan kemampuan menyesuaikan Islam dengan warisan khasanah masyarakat Indonesia. Anggaplah penjelasan tersebut benar, lalu penting mempertanyakan mengapa wacana Islam nusantara justru sekarang menguat. Jokowi seolah percaya bahwa wacana Islam nusantara merupakan pendekatan efektif untuk menguatkan peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Ibarat melihat oase di gurun sahara, wacana Islam Nusantara barangkali mampu menjanjikan peran yang lebih menguntungkan bagi rezim Jokowi. Oleh karena itu, merujuk pada data sekunder dan desain penelitian kualitatif, artikel ini akan menelaah dua pertanyaan penting. Pertama, dengan mengacu pada pendekatan post-structuralist yang menekankan relasi antara wacana dan kekuasaan (power), makalah ini akan menjawab mengapa wacana

Islam nusantara muncul lebih masif di era Jokowi. Kedua, tulisan ini juga ingin membaca relevansi wacana Islam Nusantara terhadap peran strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Argumentasi yang ingin dibangun dalam tulisan ini adalah kehadiran wacana Islam nusantara bukan sesuatu yang *given* dan berdiri sendiri namun manifestasi dari kekuasaan dan pengetahuan. Dengan mengacu pada penguatan Islam nusantara, maka Indonesia tetap pada kedudukannya semula bahwa nilai-nilai kemajemukan yang melekat erat di masyarakat Asia Tenggara yang dapat mengokohkan kerjasama antar negara adalah prioritas utama.

Kata Kunci: Islam Nusantara, wacana, toleransi, post-structuralist, Jokowi, Politik Islam, Indonesia, Asia Tenggara

"Although no society is innocent of collective notions about itself, some countries have made more of ideology than others. For ideology, like history, is less thing than process" Carol Gluck (1985)

Di tengah hiruk pikuk euforia yang mewarnai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung April 2015 lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan kebanggaannya atas kesan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara Arab, seperti Iran, Iraq, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan lain-lain.[238] Kesan yang disampaikan saat itu sangat positif mengingat para pemimpin tersebut mengakui kekagumannya terhadap peleburan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai

[238] Dapat dilihat di http://nujateng.com/2015/08/presiden-jokowi-para-pemimpin-islam-dunia-kagumi-islam-nusantara/ diakses pada 4 Oktober 2015.

kemanusiaan universal, seperti toleransi, yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia yang notabenenya adalah pemeluk Islam terbesar di Asia bahkan di dunia. Para pemimpin negara-negara Arab tersebut menegaskan ini sangat berbeda dengan realita yang terjadi di beberapa negara Arab di mana selalu terdapat gesekan politis atau diferensiasi ideologis yang sangat mengakar antar kelompok Islam.

Pasca serangan teroris Al-Qaeda September 2001, ancaman radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam semakin meningkatkan ketakutan masyarakat internasional terhadap komunitas Muslim terlebih lagi yang memperjuangkan solidaritas dan fondasi bangunan politik berlandaskan Islam yang tumbuh subur di kawasan Timur Tengah. Segelintir kelompok Islam membangun kesadaran untuk membangun umat dalam bingkai kepemimpinan Islam global atau kalifah Islam. Perang melawan terorisme global yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya dapat dikatakan tidak seutuhnya berhasil dalam menekan laju fundamentalisme (Saleh 2001: 280). Alih-alih meredakan fundamentalisme dan ancaman terorisme, deklarasi perang melawan terorisme justru memicu semakin meluasnya rasa anti-Amerika oleh beberapa kelompok Islam yang memang telah lama memupuk bibit kebencian terhadap modernitas yang dibawa dan diperkenalkan oleh kemajuan peradaban dunia Barat. Pada akhirnya, politik anti-Amerika berkembang di kelompok Islam fundamentalis sejalan dnegan sentiment Islamo-phobia yang juga menyebar luas di Amerika Serikat dan di banyak negara di kawasan Eropa.

Meskipun gelombang anti-Amerika telah ada jauh sebelum terjadinya serangan Al-Qaeda tersebut tepatnya sejak meletusnya Revolusi Iran tahun 1979, sentimen anti-Amerika dan aksi radikalisme pasca peristiwa 9/11 semakin diperparah oleh aksi Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah dan Asia Selatan. Pada 2001, Amerika Serikat dan sekutunya menyerang Afghanistan dalam rangka *Operation Enduring Freedom*. Dua tahun berikutnya AS dan kawan-kawan meneruskan serangannya hingga melumpuhkan Iraq yang dimulai pada 20 Maret 2003. Mencari legitimasi untuk serangan militer AS, Presiden Bush dan Perdana Menteri Tony Blair menyebarluaskan dugaan perluasan senjata pemusnah masal oleh Saddam Hussein yang sangat mungkin disalahgunakan oleh kelompok teroris di Iraq. Merujuk pada aksi sepihak tersebut ditambah dengan tidak ditemukan bukti yang valid atas tuduhan tersebut, Amerika Serikat justru menuai pil pahit. Alih-alih memetik pujian dan dukungan dari masyarakat internasional khususnya dunia Islam, AS dan sekutunya justru dianggap sebagai *aggressor* (Bond and Simons 2009: 3-4).

Realita tersebut semakin memperparah jurang ideologis dan politik antara kelompok Islam fundamentalis – yang tumbuh subur di beberapa negara mayoritas Muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Selatan – dan Amerika Serikat yang mewakili dunia Barat. Agresi militer Amerika Serikat dengan tujuan melawan terorisme tersebut telah menimbulkan semangat revitalisasi kekuatan politik kelompok Islam militant fundamentalis di beberapa negara Arab. Reformulasi hubungan antar kelompok Islam militan fundamentalis dapat dilihat ketika Jamaah Islamiyah (JI) telah bermasil memperbaiki hubungan politik dengan rezim Pakistan yang selama ini mendukung perjuangan politik Taliban di Afghanistan dan kelompok

Islamis lainnya. Reformulasi ikatan politik antara JI dan Taliban di Afghanistan, misalnya, diperkuat demi sebuah agenda politis bersama yaitu menyingkirkan partai politik nasionalis sekuler yang telah lama menjadi musuh politik mereka antara lain *Pakistan People's Party* (PPP) yang dipimpin oleh Benazir Bhutto dan *Muslim League* yang dibawah kepemimpinan Nawaz Sharif. Kolaborasi politik ini berawal dari strategi JI yang telah berhasil melakukan Islamisasi para elit politik dan masyarakat Pakistan (Ayoob 2008: 76-77). Revitalisasi aliansi politik antara JI dan Taliban memperuncing segregasi politik dan segmentasi ideologis di tanah Arab.

Aliansi politik antara JI dan Taliban tidak hanya memperdalam segregasi politik – yang akhirnya mnghasilkan eskalasi konflik ideologis tidak hanya di level elit namun juga di level akar rumput – di Pakistan namun juga di negara di Timur Tengah khususnya Mesir. Mesir merupakan salah satu ladang basah bagi pertumbuhan kelompok Islamis di Timur Tengah. Meskipun gerakan Islamis fenomenal di Mesir yaitu Muslim Brotherhood (MB) telah mengalami pasang surut di kancah perpolitikan domestik terlebih lagi ancaman depolitisasi oleh rezim sekuler, gerakan politis ini tetap mendapat tempat di hati para konstituen terbukti dengan keberhasilannya memperoleh suara di beberapa pemilihan umum Mesir. MB telah lama terlibat dalam demokratisasi dimana ia terlibat langsung dalam proses pemilihan umum dan parlemen Mesir.

Sayangnya, partisipasi politik MB di demokrasi elektoral Mesir tidak selamanya membuahkan citra yang positif. Pada satu sisi, keterlibatan MB dalam demokratisasi Mesir tidak secara otomatis meningkatkan simpati masyarakat global terhadap keberadaan kelompok Islamis. Hal ini ditulis oleh Ayoob (2008:82) bahwa

"*…the Muslim Brotherhood's success at the ballot box does not merely reflect the growing popularity of the Islamist group"*. Pada sisi lainnya, proses moderasi yang dialami MB tidak serta merta menginspirasi gerakan islamis lainnya untuk melakukan hal yang sama. Krisis politik di Mesir pun diperparah dengan kekhawatiran pemerintah Mesir atas perkembangan pengaruh MB yang secara masif mengubah tatanan sosial masyarakat Mesir. Hal ini menimbulkan usulan untuk mencari dukungan negara Barat agar membantu rezim sekuler Mesir dalam melumpuhkan pengaruh politik dan simpati masyarakat terhadap MB. Berbeda dengan nasib politik JI di Pakistan yang secara perlahan mampu bertahan dalam bingkai koalisi politik dengan pemerintahan Pakistan, MB menuai banyak rintangan politik yang akhirnya selalu berujung pada pembekuan aset dan pembatasan jalur politik.

Meskipun awalnya JI di Pakistan terlihat lebih beruntung daripada MB di Mesir, JI pun menghadapi kompetisi politik dengan kelompok nasionalis berbasis etnis di Pakistan. Peristiwa ini menggarisbawahi sebuah asumsi bahwa kondisi dunia Islam semakin buruk dikarenakan percampuran antara politik dan agama. Di Pakistan, JI – yang awalnya mampu membangun aliansi poltik dengan rezim berkuasa – mengalami perolehan dukungan di pemilihan umum yang diadakan tahun 2002. Tidak hanya di Mesir, kompetisi politik pun semakin menjadi di Pakistan yang berakibat pada pertumbuhan kelompok radikal Islam dan aksi terorisme lainnya.

Merujuk pada masalah tersebut, maka sangatlah wajar jika para pemimpin negara dengan Muslim sebagai mayoritas penduduk menyampaikan keprihatinannya atas situasi sosial politik di kawasan Timur Tengah dan di negara lainnya. Sangat dapat dimaklumi jika akhirnya mereka menyampaikan simpati dan kekaguman atas

toleransi dan moderasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Di banyak negara Islam lainnya, Mesir dan Pakistan sebagai contoh, partisipasi politik kelompok Islamis di demokrasi elektoral tidak berbanding lurus dengan penyerapan nilai-nilai demokrasi dalam skala yang lebih luas. Justru sebaliknya, pada saat kelompok Islamis yang menamakan dirinya sebagai kaum moderat mulai berpartisipasi aktif di politik praktis nasional; aksi teroris dan radikalisme pun meningkat. Oleh karena itu, menurut Jokowi, pandangan para pemimpin negara Islam tersebut perlu diapresiasi mengingat Indonesia dianggap sebagai model implementasi dan perkawinan antara Islam dan demokrasi.

Citra Baik itu Muncul karena Islam Nusantara (?)

Mengingat kesan dan citra yang dipetik dari keseharian umat Islam di Indonesia tersebut, maka NU, sebagai salah satu komponen terbesar umat Islam di Indonesia, menggaris-bawahi kepentingan NU dan masyarakat Indonesia yang lebih luas dalam memainkan peran dan fungsinya sebagai punggawa model Islam nusantara. Meski belum jelas maksud dan bagaimana korelasinya, namun seolah-olah Islam nusantara adalah model atau corak yang harus ditanam dan digaungkan sebagai konsep kehidupan Muslim di Indonesia. Hal ini disebabkan karena citra positif tentang Islam di Indonesia hadir sebagai akibat dari menyatunya ajaran Islam dengan budaya leluhur.

Sejak Presiden Joko Widodo (selanjutnya ditulis Jokowi) terpilih, wacana Islam Indonesia atau Islam nusantara kembali menguat. Menurut beberapa pihak antara lain cendekiawan Muslim Indonesia, Azyumardi Azra, dan beberapa tokoh Nahdlatul

Ulama (NU) lainnya, Islam nusantara mewakili tradisi Islam yang toleran dan menghormati pengayaan nilai-nilai tradisional sebagai warisan leluhur bangsa jauh sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Islam nusantara diyakini mampu mewakili image atau citra Indonesia sebagai "friends" dan bukan "enemies" bagi masyarakat internasional. Hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan usaha yang pernah digencarkan oleh presiden Indonesia sebelumnya. Sebagai contoh, pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, wacana Islam moderat sempat menguat dan diupayakan menjadi citra dari bangsa Indonesia yang senantiasa mencari teman bukan lawan. Hal ini menandakan bahwa Islam dan karakter kebangsaan perlu dibahas terkait dengan kepentingan negara yang lebih luas terlebih lagi citra positif Indonesia sebagai negara-bangsa. Oleh karena itu, menurut beberapa pihak Islam nusantara mampu merepresentasikan karakter bangsa Indonesia khususnya para pemeluk Islam di Indonesia yang toleran dan menghargai keberagaman.

Ancaman bagi ideologi toleransi

Meskipun Presiden Jokowi dan para cendekiawan Islam Indonesia lainnya perlu berbangga hati atas citra dan pujian yang dipetik selama KAA 2015 berlangsung, pada dasarnya perlu pula diingat bahwa Indonesia sedang berada di tengah radikalisasi umat. Pasca serangan teroris global 2001, beberapa peristiwa terjadi di Indonesia tengah mengancam toleransi yang selama ini sangat kental meresap di tengah masyarakat. Toleransi telah menjadi sebuah ideologi yang kemudian dilestarikan sebagai karakter bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, Pancasila adalah landasan ideologis dan fondasi

utama pendirian negara Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia milik semua rakyat terlepas dari latar belakang agama,etnis dan basis kedaerahan. Begitupun dengan pemerintahan rezim Suharto dimana ideologi toleransi sangat dijaga sebagai batas pemisah Islam dari negara. Pengkultusan pancasila dan toleransi terjadi karena desakan kelompok Islam yang mempertanyakan legitimasi Pancasila sebagai basis filosofi negara dan mengutamakan Islam sebagai basis utama pendirian Indonesia sebagai negara. Walaupun toleransi dijaga sebagai sebuah ideologi negara melalui proses yang sangat panjang, beberapa usaha untuk menggoyahkan dan menggantikannya dengan nilai Islamisme yang dianggap lebih sakral masih kerap terjadi terlebih lagi pasca bergulirnya era reformasi. Indonesia dan ideologi toleransi yang merupakan kebanggaannya berada dalam ancaman (Ramage 1995:3).

Citra positif masyarakat Indonesia yang toleran sangat harus dipertahankan. Indonesia telah lahir sebagai bangsa dan negara yang majemuk serta kaya akan warisan budaya lokal. Beberapa pihak menyatakan secara tegas bahwa penting untuk tetap menjaga jarak antara negara dan agama. Oleh karena itu, negara Indonesia perlu memandang penting proses seleksi dan prevensi pencampuran ideologi khususnya yang mengandung unsur radikalisme dan ektremisme dalam beragama yang mampu mengikis toleransi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Islam nusantara perlu diperkaya dan diperkenalkan kepada masyarakat luas.

Rumusan Masalah

Jika bangsa Indonesia menolak infiltrasi ideologis yang marak dikampanyekan oleh kelompok Islam fundamentalis dan tradisionalis yang mengakar kuat di Arab,

maka pertanyaan berikutnya adalah apakah benar Islam nusantara mampu melakukan fungsi seleksi sehingga corak Indonesia yang otentik dan orisinil mampu dipertahankan. Euforia Presiden Jokowi atas kekaguman pemimpin beberapa negara Arab tentang toleransi keagamaan di Indonesia secara tidak langsung menjadi dalil untuk mendukung lahirnya Islam Nusantara. Hal ini menimbulkan pertanyaan berikutnya yaitu apakah benar Islam nusantara layak mewakili karakter kebangsaan dan dianggap sebagai sebuah pengetahuan baru. Selanjutnya, jika memang mayoritas masyarakat Indonesia, atau para cendekiawan Islam reformis, beranggapan pribumisasi Islam lebih baik daripada Islamisasi pribumi, maka adalah perlu merenungkan kembali siapa dan bagaimana pribumi Indonesia sebenarnya.

Menilai wacana Islam nusantara penting untuk dilindungi, pertanyaannya adalah mengapa sekarang islam nusantara baru muncul dan dianggap seperti demikian? Jika sekarang Islam nusantara dilestarikan keberadaannya dikarenakan anggapan bahwa wacana ini mampu menjaga nilai toleransi ke-Indonesia-an atau ke-bhineka-an, maka hal ini seolah-olah menandakan bahwa selama ini aplikasi ajaran Islam masih sangat jauh dari nilai-nilai toleransi. Jika harus ada penekanan bahwa Islam nusantara yang sekarang digaungkan secara masif oleh beberapa organisasi masyarakat Islam di Indonesia adalah Islam yang memandang negosiasi sebagai jalan tengah memecahkan masalah kebangsaan dan anti represif, maka bukankah hal ini bisa saja mengartikan bahwa Islam itu sendiri mengakui unsur pemaksaan dalam beragama. Jika ada anggapan Islam nusantara perlu digencarkan maka apakah ini mengandung arti bahwa penyebaran Islam di Indonesia sejak kali pertama hingga di masa sekarang tidak melalui jalan yang damai. Oleh karena itu, adalah penting untuk

mempertanyakan mengapa sekarang wacana Islam nusantara baru diperbincangkan secara masif.

Untuk menjawab sekelumit pertanyaan di atas maka tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian selanjutnya akan membahas pendekatan teoritis yang menjadi kerangka analisis dari tulisan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis merujuk pada cara berpikir teorisi post-strukturalis yang mulai marak diperbincangkan dalam studi Hubungan Internasional. Dengan merujuk pada pemikiran utama post-strukturalis, tulisan ini berkeyakinan bahwa wacana Islam nusantara tidaklah berdiri sendiri dan lahir sebagai pengetahuan yang bebas nilai dan bebas dari tekanan politis. Wacana ini bukanlah *given*. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan atau kuasa mempengaruhi secara kuat lahirnya dan menguatnya wacana Islam nusantara sebagai sebuah pengetahuan. Terkait dengan pertanyaan mengapa sekarang istilah Islam nusantara dikuatkan kembali, makalah ini berpendapat kekuasaan yang melekat pada Presiden Jokowi memberikan stimulus bagi penguatan istilah tersebut.

Landasan Teori

Relasi antara Kuasa dan Pengetahuan

Menurut kajian Hubungan Internasional konservatif, pengetahuan dianggap kebal dari pengaruh kekuasaan karena pengetahuan berdiri sendiri dan memisahkan diri dari lingkaran kekuasaan. Para ilmuwan HI yang berkiblat ke dasar pemikiran ini mengenyampingkan nilai-nilai, kepentingan, dan hubungan kekuasaan agar terwujud pengetahuan dan informasi yang objektif – bahwa ilmu pengetahuan tidak terikat oleh

faktor eksternal dari pengetahuan itu sendiri dan didasarkan pada logika murni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Immanuel Kant (1970) bahwa kepemilikan kekuasaan dapat dengan mudah menyebabkan iritiasi objektivitas dan independensi pengetahuan

Hal ini mengundang perhatian dari aliran pemikiran post-strukturalisme di Hubungan Internasional, salah satu diantaranya adalah Michel Foucault. Menurut pemikiran yang meyakini praktik diskursif sebagai akar ontologis, ilmu pengetahuan dan wacana yang beredar luas di masyarakat merupakan hasil dari proses produksi dan reproduksi pengetahuan yang bersifat normatif dan politis (Saphiro 1991:1). Hal ini merupakan premis utama dalam teorisasi dari relasi dan kekuasaan. Merujuk pada premis tersebut, menjadi penting untuk mempertanyakan bagaimana akar epistemologi dari pemikiran tersebut sehingga dapat dihasilkan sebuah struktur analisa yang solid. Foucault menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat konsistensi secara umum antara mode interpretasi dan mode operasionalisasi kekuasaan dan keduanya tidak dapat direduksi menjadi satu karakter. Foucault menegaskan bahwa "*...power and knowledge are mutually supportive; they directly imply one another*" (1977:27). Pemahaman epistemologis yang sistematis dapat dicapai apabila tugas-tugas berikutnya dapat diselesaikan dan ditemukan penjelasannya lebih lanjut. Tugas tersebut antara lain tentang upaya yang dilakukan oleh pemikir post-strukturalisme dalam studi Hubungan Internasional agar dapat menguraikan secara detil bagaimana operasionalisasi kekuasaan mampu bekerja seiring sejalan dengan konteks sosial dan politik dunia kontemporer.

Merujuk pada interpretasi Foucault, ilmuwan Hubungan Internasional yang menganut paham post-strukturalisme lainnya mulai melakukan hal yang serupa yaitu melakukan investigasi teoritis dan pengayaan data empiris seperti inisiatif yang disampaikan oleh Richard Ashley. Ashley menerjemahkan hubungan kekuasaan dan pengetahuan dengan memperjelas apa yang disebut oleh Foucault sebagai "*...the rule of immanance between knowledge of the state and knowledge of man*" (Ashley 1989). Meminjam kalimat Ashley bahwa "*...modern statecraft is modern mancraft...*", pemikiran post-strukturalisme berpendapat bahwa bangunan pengetahuan yang diyakini secara formal oleh suatu negara merupakan hasil atau bentukan dari bangunan pengetahuan yang diyakini oleh sekelompok individu di negara tersebut. Sehingga nilai dan kepentingan yang melekat pada diri individu maupun sekelompok individu serta kekuasaan yang mengitarinya secara eksplisit dapat mempengaruhi cara pandang negara terhadap sebuah pengetahuan (ibid).

Satu contoh yang dapat membantu pemahaman lebih rinci yaitu paradigma 'berdaulat' atau *sovereignty*. Paradigma ini secara terus menerus memberikan ruang untuk penelusuran epistemologi dan kehidupan politik moderen. Pada satu sisi, pengetahuan dianggap bergantung pada kedaulatan dari sosok 'heroik' yang melekat pada individu yang berakal yang mengetahui atau mampu menjelaskan struktur tatanan politik dunia. Menurut individu tersebut tatanan politik dunia tidaklah *God-given* sehingga ilmu pengetahuan lahir dari manusia yang berpikir. Tanggung jawab seorang manusia terletak pada kemampuannya menyediakan argumentasi dan alasan atas suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dengan demikian maka manusia mampu meraih "*...total knowledge, total autonomy, and total power...*"(Ashley 1989:

264-5). Pada sisi yang lainnya paradigma kedaulatan juga menemukan kesamaan prinsip di dunia perpolitikan kontemporer. Richard Devetak menyatakan pendapatnya tentang hal ini

"the state is conceived by analogy with sovereign man as a pre-given, bounded entity which enters into relations with other sovereign presences.... Both man and the state are marked by the presence of sovereignty, which contrasts with international relations which is marked, and violently so, by the absence of sovereignty.... In short both the theory and practice of international relations are conditioned by the constitutive principle of sovereignty" (Devetak 2005: 163).

Pengetahuan dan Kebenaran

Tambahan pula, pembahasan Foucault dan pegiat post-strukturalisme lainnya tidak hanya berpusat pada pentingnya relasi kekuasaan (power) dan pengetahuan (knowledge), namun juga tentang irisan antara pengetahuan dan kebenaran (truth). Kemampuan seorang individu dalam menghasilkan sebuah analisa dengan rangkaian argumentasi yang kuat dan sistematis dapat menggiring individu tersebut menuju sumber kekuasaan dan atau kedaulatan. Merujuk dari pernyataan ini maka pertanyaannya adalah apakah dengan kemampuan menghasilkan total knowledge seorang manusia senantiasa menghasilkan *total truth*. Hal ini berpotensi mengakibatkan lahirnya *problem of knowledge*. Seringkali kemampuan berpikir atau berargumentasi (*modes of reasoning*) menimbulkan kontroversi. Alih-alih memperjelas suatu permasalahan, *the reasoning man* ini justru menghasilkan polemik. Menurut Foucault, polemik justru tidak dapat dikesampingkan dari

perkembangan pengetahuan. Hal ini dikarenakan … "*a polemic can be a factor of attraction*…" (Foucault, 64).

Dari polemik ini, formulasi pengetahuan dapat berkembang menjadi *problem of knowledge*. Demi mempertahankan kedaulatannya di tengah hiruk pikuk kekuasaan pengetahuan, the reasoning man tersebut memutuskan untuk terlibat dalam polemik yang berkembang. Sehingga, pengetahuan pun bisa saja menjadi kabur atau bahkan hilang dari kebenaran yang mutlak. Mengingat hal ini pula, Foucault menegaskan betapa pentingnya bagi para pemikir atau filsuf untuk mempertanyakan akar epistemologis dari pengetahuan. Dengan mempertanyakan apa itu pengetahuan dan apa itu kebenaran, maka dapat ditemukan garis merah antara pengetahuan dan kekuasaan. Kadang kala, pengetahuan membentuk jalan menuju kebenaran, sementara itu kedaulatan sebuah pengetahuan seringkali dipengaruhi oleh karisma dari para pemikir. Di balik kedaulatan yang melekat pada diri para pemikir terdapat rangkaian sejarah dan warisan masa lampau yang pada akhirnya menentukan arah dan jalan menuju kebenaran yang diyakini oleh masyarakat dewasa ini. Dengan demikian, menurut Foucault, kekuasaan sangat identik dengan pengetahuan. Partisipasi seorang individu dalam sebuah polemik bisa saja meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kemampuan berargumentasi sehingga memberikan sumber legitimasi atas kemampuan berfikirnya dan kemudian meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan pola perilaku masyarakat.

Salah satu pengamatan Foucault yang menjadi fondasi aliran post-structuralist ini adalah tentang wacana seks di abad pertengahan. Pada masa ini, teologi moral mengatur persoalan nafsu dan mewajibkan pengakuan dosa secara tegas. Tidak hanya

itu, teologi moral juga melibatkan institusi kerajaan dalam melegalisasikan aturan yang diyakini benar. Teologi moral mengatur wilayah personal mulai dari area biologis hingga pengekangan kebebasan seks dan perilaku manusia. Lahirnya pengekangan oleh kaum moralitas ini tidak serta merta lahir dengan sendirinya melainkan dikarenakan dukungan dari pemegang sumber kekuasaan utama sehingga menjadikan teologi moral lebih superior daripada objektivitas dan rasionalitas. Hal ini terbukti pada saat kekuasaan rejim Ratu Viktoria I (1819-1910). Mengendalikan secara penuh tidak hanya urusan rumah tangga kerajaan namun juga rumah tangga anggota masyarakat. Kerajaan sangat dominan dalam hal menentukan pola tingkah laku, etika dan sopan santun termasuk perilaku seksual (Wirawan 2012).

Namun sejalan dengan perkembangan diskursif di beberapa aspek mulai dari psikiatri hingga kritik politis, kekuasaan diskursus moralitas pelan-pelan melonggar. Di tengah hiruk pikuk polemik pengaturan tingkah laku dan batasan perilaku seksual masyarakat, kaum intelektual pun tak urung diam. Fenomena ini pun menghasilkan antithesis dari kebenaran moralitas bahwa tata kelola perilaku tidak serta merta mewakili kebenaran itu sendiri. Pengaturan tingkah laku dan seksualitas manusia merupakan manifestasi pengamanan kekuasaan (Wirawan 2012: 255). Gebrakan pemikiran ini menggarisbawahi bahwa seluk-beluk privat atau personal dari seorang individu tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial politik yang mengitari kehidupannya. Dengan demikian, Foucault menekankan bahwa gejala dan peristiwa sosial tidak lebih dari sebuah arena diskursif yang sangat kompetitif. Dalam ilustrasi tersebut, terdapat dua aliran yang berlawanan yang keduanya mewakili poros kekuasaan yang berbeda. Di satu sisi terdapat kaum moralis/agamis yang mendapat

back up secara penuh dari kerajaan. Pihak pertama ini menggunakan kekuasaannya mengontrol institusi sacral seperti kerajaan dan gereja untuk melanggengkan norma atau nilai yang mereka yakini benar (Wirawan 2012: 567). Di sisi lainnya, terdapat kebangkitan kaum intelektual atau para filsuf yang mencoba menerobos batasan imaginasi manusia dan mendekonstruksi wacana yang sudah ada dengan pengetahuan tandingan bahwa perilaku seksual manusia tidak perlu mendapat batasan yang kaku.

Jika Foucault membangun fondasi awal pemikiran post-strukturalisme melalui gejala sosial masyarakat seperti yang dijelaskan di atas, beberapa ilmuwan lainnya, mulai melakukan dekonstruksi pengetahuan yang mempengaruhi cara berpikir terhadap masalah politik internasional (Campbell 1992; Sylvester 1994; Walker 1993; Weber 1995). Rekonstruksi pengetahuan, seperti tentang David Campbell yang mempertanyakan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat memproduksi ulang bentuk spesifik dari karakter politiknya atau tentang konstruksi yang dilakukan oleh Christine Sylvester atas pembahasan isu gender dalam kacamata teori konvensional HI – dimulai dengan mempertanyakan asal usul sebuah istilah, konsep, wacana dan pengetahuan tentang suatu objek.

Genealogi

Proses pencarian dan mempertanyakan nilai dibalik nilai-nilai yang telah diyakini oleh masyarakat pada umumnya, dalam literatur post-strukturalisme, dikenal dengan istilah genealogi. Aliran pemikiran post-strukturalis memandang bahwa semangat mencaritahu dan memahami ‘asal usul’ suatu objek pengetahuan tidak hanya tentang pencarian sejarah, awal mula atau sumber yang dapat ditelusuri keberadaannya. Namun, ‘origin’ dalam pandangan genealogis berperan penting

dalam memahami proses terbangunnya makna dari masa lalu hingga menjadi sebuah peristiwa yang terjadi pada saat ini. Fokus dari genealogi adalah untuk mengungkapkan sistem subyeksi dan kendali kekuasaan atas suatu pengetahuan atau wacana.

Dengan merujuk pada pendekatan post-strukturalis yang menekankan relasi kekuasaan dan pengetahuan, maka makalah ini akan melakukan dua tahapan analisis yaitu pertama, pembacaan terhadap nilai yang melekat pada asal usul wacana atau pengetahuan tersebut dan, kedua, pembahasan atas struktur negara yang melekatkan wacana tersebut sehingga menjadi polemic umum dan diterima sebagai pengetahuan baru. Pada bagian berikutnya, tulisan ini akan melakukan *reading* yang pertama yaitu tentang asal usul diskursus Islam nusantara dan penerjemahannya yang oleh sebagian kalangan dianggap mencerminkan penerapan Islam yang harmonis dan toleran. Oleh karena itu, pembahasan akan fokus pada bagaimana perkembangan Islam di nusantara, apakah adaptif atau agresif. Dalam bagian ini pula akan dibahas mengenai sejarah lahirnya Islam secara umum dan dinamika nya di Asia Tenggara, yang menurut beberapa pengamat sejarah bahwa sebagian besar kerajaan kecil di Asia Tenggara pernah berada di bawah kendali dan masuk dalam kawasan nusantara. Selanjutnya, *reading* yang kedua menitikberatkan pembahasan mengenai lapisan negara dan pertimbangan yang dikeluarkan sehingga mendorong negara untuk melekatkan wacana tersebut dalam kebijakan populisnya yang pada akhirnya melahirkan sebuah polemik baru di tengah masyarakat.

Kompetisi diskursif ini pada akhirnya akan semakin memperkuat diferensiasi politik antara pemegang kuasa dan kaum oposisinya. Selain itu kompetisi diskursif ini

dapat juga memaksa pihak oposisi atau ideologis yang bertentangan menjadi melunak dan akhirnya menerima diskursus yang pemerintah canangkan. Dengan demikian maka tulisan ini berpendapat bahwa Islam nusantara bukanlah suatu pengetahuan yang baru. Pada praktiknya, penyebaran Islam di nusantara telah lama menisbatkan dirinya dalam konteks toleran dan keberagaman. Islam telah lama dipahami sebagai ajaran yang mengedepankan toleransi, moderasi atau garis tengah, dan pluralisme (Abuza 2007).

Meski diwarnai beberapa kekerasan dalam prosesnya, perlu juga diingat dan digaris-bawahi bahwa peleburan ajaran Islam, yang seringkali diidentikkan dengan Arab, dengan nilai-nilai lokal justru telah hadir sejak awal perkembangan Islam di Indonesia atau nusantara. Islam nusantara bukan sekedar pengetahuan baru yang mulai marak diperdebatkan oleh banyak pihak. Namun ada unsur kekuasaan yang melekat dan dianggap dapat membantu menguatkan citra positf bangsa Indonesia di kawasan terlebih lagi di Asia Tenggara di mana Indonesia memainkan peranan yang strategis. Selain itu pula Islam nusantara bisa saja menjadi diferensiasi karakter politik rejim Jokowi dari rejim yang berlaku sebelumnya. Melekatnya unsur kekuasaan negara pada eksistensi Islam nusantara sebagai sebuah pengetahuan maka hal ini membuktikan bahwa knowledge dan power senantiasa berkaitan.

Pembahasan

Genealogi Islam Nusantara

Untuk memudahkan pemahaman otentik atas diskursus Islam nusantara yang toleran, maka bagian selanjutnya akan; pertama, membahas arti dari istilah nusantara

yang ternyata masih menjadi perdebatan; *kedua, membahas secara singkat kedatangan Islam di wilayah Indonesia; ketiga, membahas proses dekonstruksi pemaknaan Islam nusantara yang oleh rezim saat ini dianggap hadir dalam konteks bebas nilai dan murni representasi dari orisinalitas toleransi di nusantara.*

Asal usul makna yang terdapat di balik istilah Islam nusantara ternyata masih diselimuti perbedaan pendapat di antara cendekiawan Islam Indonesia. Pada satu sisi, menurut Saiq Aqil Siradj, yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Indonesia, istilah Islam nusantara merujuk pada fakta sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara.[239] Sementara itu, beberapa literatur lainnya mencatat bahwa Nusantara adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan wilayah kepulauan yang membentang sepanjang wilayah tropis mulai dari Sumatera di sebelah barat hingga Papua di sebelah ujung timur. Istilah nusantara sendiri pertama kali disadur dari perbendaharaan kata Jawa kuno yaitu *nusa* (pulau-pulau) dan *antara* (lawan atau berseberangan dari). Dalam bukunya yang berjudul Negarakertagama, ditulis tahun 1365, Mpu Prapanca, seorang tokoh agama Budha selama Kerajaan Majapahit berkuasa, menyebutkan bahwa Nusantara mewakili seluruh wilayah yang sekarang menjadi Indonesia (seperti Sumatra, Jawa, Bali, Kepulauan Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat) ditambah dengan beberapa bagian yang masuk dalam wilayah Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina Selatan. Oleh karena itu, cendekiawan Islam Indonesia lainnya, seperti Azyumardi Azra, menambahkan lebih lanjut bahwa "…Islam nusantara mengacu

[239] Heyder Affan http://www/bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara diakses Selasa 06 Oktober 2015 pukul 23:15 WIB.

kepada gugusan kepulauan yang mencakup Malaysia, Pattani Thailand, Moro Filipina, Singapura dan Brunai….”[240] Dengan demikian, menurut Azra, Islam nusantara dapat dianggap sama artinya dengan istilah Islam Asia Tenggara.

Meskipun pemaparan Azra merujuk pada artefak sejarah, sayangnya, penjelasan ini tidak dilengkapi dengan rujukan lebih lanjut tentang batasan wilayah nusantara yang dapat diterapkan pada masa sekarang. Perihal penyederhanaan istilah Islam nusantara menjadi Islam Asia Tenggara justru menimbukan masalah baru. Masalah tersebut terdapat pada model yang mewakili nilai di balik istilah Islam nusantara dan Islam Asia Tenggara. Sebagaimana yang ditulis oleh wacananusantara.org bahwa usaha memadukan Islam dalam kehidupan sehari-hari di Nusantara merupakan proses yang terus berlanjut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang statis dan absolut.[241] Jika Islam nusantara melibatkan dimensi sejarah yang lebih luas mencakup gugusan kekuasaan nusantara sebagaimana yang disampaikan oleh Azra, ini berarti nilai toleransi beragama sesuai pemahaman Islam nusantara yang hendak diaplikasikan di Indonesia akan memuat dimensi interaksional dan praktik diskursif agama di beberapa wilayah di Asia Tenggara. Jika konsepsi kehidupan Islam di Indonesia diwakilkan dalam istilah Islam nusantara, lalu bagaimana istilah Islam nusantara itu sendiri mampu mewakili nilai normative yang terus berkembang dan berubah di setiap wilayah cakupan Asia Tenggara tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep dan batas nilai Islam nusantara masih menjadi permasalahan tersendiri.

---

[240] Dapat dilihat di http://news.merahputih.com/nasional/2015/07/19/penjelasan-azyumardi-azra-terkait-wacana-islam-nusantara/20563/ diakses Selasa 06 Oktober 2015 pukul 23:15 WIB.
[241] dapat dilihat di http://www.wacananusantara.org/islam-di-nusantara diakses Selasa 06 Oktober 2015 pukul 23:15 WIB.

Walaupun demikian, wacana Islam nusantara tetap menggarisbawahi bahwa kehadiran model Islam nusantara membedakan Islam yang berkembang di Indonesia dan Arab. Wacana ini beranggapan bahwa Islam nusantara merupakan model kehidupan ber-Islam yang mengacu pada nilai otentik masyarakat Indonesia yang jauh dari Arabisasi atau Islamisasi. Orisinalitas tersebut datang dari nilai toleransi yang kuat yang telah dicontohkan oleh para leluhur.

Islam berkembang di nusantara, yang menjadi bagian dari Indonesia saat ini, melalui cara yang adaptif dan menghargai pluralisme sebagaimana pluralisme adalah salah satu ajaran yang ditekankan dalam Islam itu sendiri. Sifat alami dari Islam di Indonesia, bagaimanapun, sangatlah berbeda dari yang ada di Timur Tengah, khususnya hal yang berkaitan dengan "…*degree of internal pluralism*..." yang pada akhirnya mempengaruhi formasi kebangsaan (Sukma 2003: 9). Penerapan Islam yang pluralis adalah jalan tengah demi mendahului kepentingan yang lebih luas yaitu Islam, sebagai agama yang menekankan *prophetic revelation*, mampu memainkan perannya sebagai "…*unifying ideology*…"(Gibson 2007: 31).[242]

Dalam perkembangannya, penyebaran Islam di nusantara merupakan hasil dari interaksi diskursif dan dialektika antara unifikasi budaya dan unifikasi politik. Masa awal kehadirannya di tanah nusantara, Islam berupaya untuk melebur dengan budaya dan tatanan sosial politik yang sudah tertanam. Sejak saat itu hingga sekarang perkawinan antara Islam dan nilai lokal masih dapat ditemukan dalam kehidupan

[242] Peranan agama kenabian sebagai faktor penyatu kekuasaan dalam bingkai monarkis tidak hanya ditemukan dalam literatur warisan sejarah Islam. Namun dapat juga dilihat dalam sejarah perkembangan agama lainnya seperti ajaran Budhism dimana Asoka (272-231 BCE), demi membagun dinastinya, memeluk agama Budha tepatnya dua abad sejak kematian Gautama yang merupakan penemu ajaran Budha (Gibson 2007: 31-320.

sehari-hari, meskipun terdapat perbedaan tafsir. Tradisi *slametan*, sebagai contoh, selama ini dianggap sebagai praktik animisme dan simbol dari pengaruh ritual primitif yang dilakukan oleh muslim *kejawen* yang secara terang benderang berlawanan dengan akar keyakinan Islam. Namun, anggapan tersebut perlu diluruskan mengingat *slametan* justru mengandung nilai Islami. *Slametan* merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas makanan dan minuman yang melimpah dengan memadukan landasan filosofis universal yang berkembang di Arab – yang tertuang dalam Quran dan hadis – dan teknik tradisional yang kental di kawasan Asia Tenggara. Sehingga dapat dikatakan bahwa *slametan* adalah simbol dari praktik yang diambil dari *"pre-Islamic tradition"* dan diterjemahkan dalam terminologi Islam (Woodward 2002: 113). Hal ini menandakan bahwa Islam di Indonesia tidak terinspirasi oleh kejayaan masa Abassid Baghdad yang mementingkan semboyan "*…one god, one empire, one emperor…*" untuk melanggengkan orientasi kekuasaan politiknya (Gibson 2007: 32).

Dengan asumsi Islam nusantara adalah simbol dari peleburan ritual Islam dan tradisi budaya, menjadi urgen untuk mempertanyakan apakah asumsi yang menyatakan peleburan tersebut mewakili simbol toleransi dapat dianggap pemikiran yang absah. Merujuk pada fakta dimana ritual agama Islam dan praktiknya dipengaruhi oleh kepercayaan lokal, pertanyaannya adalah apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai nilai toleransi. Jika Islam nusantara adalah Islam di Indonesia yang penuh toleransi maka pada saat Islam turun di tanah Arab dan disebarluaskan oleh Muhammad (SAW) aspek toleransi telah lama dipraktikkan. Lalu, pertanyaan

berikutnya adalah bagaimana landasan epistemologi dari wacana Islam nusantara yang digadangkan oleh beberapa tokoh Islam Indonesia kontemporer.

Oleh karena itu, makalah ini menegaskan bahwa pemahaman Islam Indonesia yang toleran bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya atau *given*. Jika asumsi yang mengatakan bahwa Islam nusantara yang hadir saat ini ditujukan untuk mencegah Arabisasi atau Islamisasi Indonesia, maka makalah ini berpendapat bahwa, merujuk pada rekaman sejarah, belum ada kesepakatan pasti mengenai mekasime penetrasi Islam terhadap nusantara atau Arabisasi nusantara pada saat kali pertama Islam hadir (Staquf 2015: 21). Dengan kata lain, ini menandakan bahwa Islamisasi dan Arabisasi, yang sekarang menghantui banyak pihak, tidak seutuhnya berhasil diterapkan di wilayah nusantara. Peleburan beberapa praktik ritual agama Islam dengan tradisi kepercayaan lokal tidak hadir dengan sendirinya melainkan melalui sebuah proses diskursif yang kemudian memperoleh legitimasi dari tokoh karismatik saat itu.

Residu dari interaksi diskursif saat itu berupa kesepakatan bersama dalam menjawab pertanyaan bagaimanakah sebaiknya Islam diterima dan diserap di nusantara; apakah melalui pendekatan yang *adaptive* atau *assertive*. Kehadiran Islam di tanah nusantara dihadapi oleh beberapa aspek yang ada lebih awal dan saling bertentangan yaitu aspek Islami-Arabi yang dibawa oleh pedagang Asia Selatan dan Timur Tengah, aspek kompleksitas simbol Austronesian, dan aspek struktur birokratis yang diperkenalkan oleh negara Barat yang dalam hal ini dilakukan oleh VOC Belanda (Gibson 2007: 11). Kedatangan Islam di nusantara menemui proses yang juga dialami oleh dua aliran kepercayaan yang hadir sebelumnya yaitu Budha

dan Hindu. Keduanya sama-sama mengalami proses adaptif dan diffusive. Oleh karena itu, menurut Staquf, perlu ditekankan bahwa belum ada rekapan sejarah yang menyatakan atau mendukung terjadinya pemaksaan implementasi fiqh sebagai "…*comprehensive legal system*…" oleh kerajaan-kerajaan Islam di nusantara (Staquf 2015: 21). Hal ini menandakan bahwa praktik toleransi antara Islam dan ajaran kepercayaan lainnya telah lahir sejak kali pertama penyebaran dan kedatangan Islam di Indonesia. proses diskursif antara Islam, ajaran mistis kepercayaan lokal dan kekuatan kolonial mendorong lahirnya pemahaman dan pelaksanaan ajaran Islam menurut interpretasi lokal (Woodward 2010: 174).

Islam Nusantara: Manifesto dari Kekuasaan dan Pengetahuan

Merujuk pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan nilai toleransi yakni meleburnya ajaran Islam dengan interpretasi lokal yang berupa aliran kepercayaan dan struktur nilai adat istiadat telah lama ada di Indonesia. dengan demikian, maka perlu mempertanyakan mengapa wacana Islam nusantara justru sekarang digaungkan oleh Presiden Jokowi. Sebagai contoh, selama kepemimpinan rezim SBY, telah ada upaya mewacanakan Islam moderat sebagai karakter utama keislaman di Indonesia. Dengan demikian, jika memang wacana tersebut mampu mewakili nilai sejarah yang melekat pada karakter kebangsaan, mengapa wacana ini tidak muncul di rezim sebelumnya.

Sehingga hal ini menimbulkan beberapa pendapat bahwa pertama, menguatnya wacana Islam nusantara didukung oleh kuasa negara yang mampu mengendalikan polemik diskursif yang berkembang di masyarakat. Melalui struktur dan aparat

pemerintahan – meskipun langkah yang dilakukan masih belum masif – negara telah, bagaimanapun, memberikan lebih banyak ruang untuk menyuburkan diskursus Islam nusantara. Usaha yang tersistematis dapat dilihat dari beberapa agenda yang dijalankan bersama oleh aparatur pemerintah yang terkait, *think tank*, akademisi atau cendekiawan, dan organisasi masyarakat Islam. Mengingat nilai strategis yang terdapat dalam wacana Islam nusantara, Jokowi menggandeng tidak hanya anggota kabinetnya, dalam hal ini diwakilkan oleh Kementerian Agama, namun juga organisasi masa berbasiskan Islam terbesar di Indonesia seperti NU. Dalam pembukaan Istighotsah menyambut ramadhan dan pembukaan munas alim ulama NU beberapa bulan yang lalu, NU menegaskan sikapnya untuk terus memperjuangkan dan mengawal model Islam nusantara.[243] Selain itu, gema dari wacana ini juga ditanggapi oleh salah satu jurnal ternama di Indonesia, yaitu *Strategic Review The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs*, yang telah aktif berkontribusi dalam memetakan dan menentukan arah kebijakan Indonesia level kawasan dan internasional. Dalam edisi April-Juni 2015, jurnal ini menjadikan isu Islam Nusantara sebagai fokus dari pembahasan utamanya. Sejalan dengan misi tersebut, Jokowi juga menegaskan keseriusan dalam menguatkan wacana ini sebagaimana yang tampak pada saat membuka Muktamar XIX dan Milad ke-100 Mathla'ul Anwar (MA) di Alun-alun Kota Pandeglang Provinsi Banten beberapa waktu silam. Ditemani oleh beberapa anggota kabinetnya seperti Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama, Tedjo yang merupakan Menko Polhukam, Tjahjo

[243] Dapat dilihat di laporan BBC Indonesia oleh Heyder Affan *Polemik di balik istilah Islam nusantara* http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150614_indonesia_islam_nusantara diakses Rabu 4 November 2015 pukul 16:35 WIB.

Kumolo yang adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial Khafifah Indarparawansa, dan Kepala BIN Sutiyoso.

Pernyataan Jokowi yang menekankan wacana Islam nusantara perlu dilestarikan menandakan wacana tersebut dinilai strategis. Hal ini merupakan tanda yang dapat berarti bahwa Jokowi lebih mengedepankan bangunan berbasiskan komunitas daripada yang berlandaskan ideologis yang berasal dari Timur Tengah. Arah kebijakan politik luar negeri Jokowi memainkan peran yang sangat penting bagi keuntungan harmonisasi politik kawasan. Terlebih lagi bagi Indonesia yang saat ini menjadi salah satu aktor utama di kawasan Asia Tenggara yang sangat majemuk. Indonesia harus berhati-hati dalam menjalankan orientasi politk luar negerinya mengingat jalinan kerjasama dengan negara anggota ASEAN merupakan "…*[t]he primary concern of Indonesia*…" (Sukma 2003: 50). Indonesia telah lama mendahulukan kepentingan politik pragmatis dan stabilitas kawasan di atas kepentingan ideologis milik kelompok tertentu yang menyerap nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat kemajemukan yang merupakan karakter karakter Asia Tenggara.

Refleksi dari argumentasi ini dapat dilihat pada saat Indonesia menyikapi masalah diskriminasi yang mendera kaum Muslim sebagai kelompok minoritas di Filipina Selatan. Pada saat Libya mempertanyakan status penyelesaian krisis yang menimpa Bangsa Moro di Filipina Selatan selama berlangsungnya *The Fifth Islamic Foreign Ministers' Conference* di Kuala Lumpur pada tahun 1974, misalnya, Indonesia bersama Malaysia menegaskan bahwa solusi untuk Bangsa Moro seharusnya disesuaikan dengan "…*framework of sovereignty and the territorial*

integrity of the Philippines" (Sukma 2003: 50). Hal ini semakin memperjelas arah kebijakan politik Indonesia bahwa para elitist Indonesia tidak memberikan ruang bagi *Islamic consideration* dalam kebijakan luar negerinya di ASEAN. Nilai yang ingin ditegaskan adalah bahwa meskipun Indonesia menyuarakan keberpihakannya pada penerapan misi kemanusiaan untuk umat Islam di Asia Tenggara dan belahan dunia lainnya, nilai-nilai kemajemukan adalah faktor determinan yang lebih penting daripada nilai-nilai transedental yang berbau fundamentalisme keagamaan dalam menentukan formula kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, Islam nusantara dianggap cukup representatif dalam menggambarkan cara pandang kehidupan beragama di Indonesia.

Kesimpulan

Dengan demikian makalah ini menggarisbawahi bahwa, pertama, wacana Islam nusantara tidaklah wacana yang bebas nilai dan berdiri sendiri melainkan terdapat unsur kekuasaan yang sangat melekat didalamnya. Kedua, Islam nusantara yang dianggap sebagai salahsatu arah kebijakan politik bagi sebuah rezim sangat penting dilakukan khususnya tentang hal yang berkaitan dengan isu Islam dan modernitas. Terakhir, meski kehadiran wacana Islam nusantara masih baru sesuai dengan usia kepemipinan Jokowi yang relatif masih muda, beberapa usaha telah dilakukan dalam rangka menguatkan polemik tersebut hingga mendorong kepemimpinan karismatik Jokowi dalam menelurkan Islam nusantara sebagai sebuah gagasan baru. Dengan menjadikan wacama Islam nusantara sebagai salah satu prioritas kebijakannya, hal tersebut menegaskan arah kebijakan politik Jokowi di kawasan Asia Tenggara bahwa

orisinalitas nilai dan tradisi toleransi beragama yang melekat di nusantara adalah lebih penting daripada keberpihakan pada poros ideology ekstremis. Dengan demikian, hal tersebut menguatkan bahwa penguatan wacana Islam nusantara menjadi sebuah pengetahuan menandakan adanya relasi yang kuat antara kekuasaan dan pengetahuan.

Daftar Pustaka

Abuza, Zachary (2007), *Political Islam and Violence in Indonesia*. London and New York: Routledge.

Ashley, R.K. (1989) 'Living on Border Lines: Man, Poststructuralism and War', in J. Der. Derian and M.J. Shapiro (eds), *International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics*. Massachusetts.

Ayoob, Mohammed (2008), *The Many Faces of Political Islam. Religion and Politics in the Muslim World*. USA: The University of Michigan Press.

Bond, Christopher, Simons, Lewis (2009), *The Next Front. Southeast Asia and the Road to Global Peace with Islam.* New Jersey, Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Campbell, David (1992). *Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity*. Manchester: Manchester University Press

Devetak, Richard (2005). "Postmodernism", in Burchill, Scott. Et al., *Theories of International Relations*. New York: PALGRAVE MACMILLAN. Pp. 137-159.

Foucault, Michel (1972), *The Archaeology of Knowledge and The Discourse of Language*. USA: Tavistock Publication.

_____(1980), *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Ed. Colin Gordon. USA: The Harvester Press

Gibson, Thomas (2007) *Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia from the 16th to 21st Century*. New York: Palgrave Macmillan.

Gluck, Carol (1985), *Japan's Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period*. Princeton: Princeton University Press

Hooker, M.B. (2003), *Indonesian Islam. Social Change Through Contemporary Fatwa*. Hawaii: University of Hawaii Press

Kant, I. (1970), *Kant's Political Writings*, ed. H. Reiss, trans. H. Nisbet. Cambridge.

Ramage, D.E. (1995) *Politics in Indonesia Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. London and New York: Routledge.

Saleh, Fauzan (2001), *Modern Trends in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia*. Leiden; Boston; Koln: Brill.

Staquf, Yahya Cholil. "How Islam Learned to Adapt in 'Nusantara'", *Strategic Review. The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs*. Vol. 5. No. 2. (April-June 2015), pp. 18-28.

Sukma, Rizal (2003), *Islam in Indonesian Foreign Policy*. London and New York: Routledge

Sylvester, Christine (1994). *Feminist Theory and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Walker, R.B.J (1993). *Inside/Outside: International Relations as Political Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Weber, Cynthia (1995). *Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wirawan, I.B., (2012), *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Woodward, Mark (2010), *Java, Indonesia and Islam*. London and New York: Springer

KAJIAN KOMPARATIF KERANGKA KEAMANAN PANGAN REGIONAL ASEAN DAN UNI EROPA (2007-2015)

Andre Ardi
Dosen Program Studi Hubungan Internasional, FISIP,
Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Abstrak:

Globalisasi telah membuat persoalan keamanan pangan setiap negara menjadi semakin terkait satu dengan yang lain. Itulah sebabnya negara-negara dalam kerangka regional berusaha memperkuat mekanisme keamanan pangan regionalnya. Berangkat dari fakta tersebut penelitian ini berupaya mengkaji secara komparatif keamanan pangan regional pada dua kawasan yaitu ASEAN, melalui *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) dan Uni Eropa, melalui *Common Agricultural Policy* (CAP). Dimensi keamanan pangan regional yang digunakan untuk melihat kedua kasus tersebut adalah: (1)kebijakan perdagangan dan pertanian kawasan; (2)manajemen krisis pangan; dan (3)peran petani dalam kerangka keamanan pangan kawasan. Berdasarkan ketiga dimensi tersebut secara kualitatif kedua kasus dianalisis dan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Hasilnya ditemukan perbedaan yang cukup signifikan dalam pendekatan keamanan pangan di kedua kawasan tersebut. Pada dimensi kebijakan pertanian terlihat ASEAN menggunakan pendekatan yang sangat liberal, sementara EU sangat proteksionis. Selanjutnya dalam manajemen krisis pangan, ASEAN tampaknya belum memiliki mekanisme kawasan untuk mengatasi volatilitas harga, sedangkan EU memiliki mekanisme penanganan baik krisis pasokan maupun harga. Terakhir, dalam dimensi peran petani ASEAN sama sekali tidak memiliki kebijakan untuk membangun kemampuan institusional para petaninya, sedangkan petani EU dari sejak awal telah memiliki kemampuan lobi kebijakan yang kuat.

Kata kunci: keamanan pangan, regionalisme, keamanan pangan regional

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena keamanan pangan tidak dapat dilepaskan dari konteks globalisasi. Masalah liberalisasi perdagangan dan investasi sektor pangan global, misalnya, kerap dikaitkan dengan keterancaman nasib petani dan konsumen pangan lokal, termasuk pula persoalan kesehatan dan lingkungan. Hal ini kemudian membuat pembahasan isu keamanan pangan tidak hanya diangkat pada level global namun juga memunculkan penguatan mekanisme regional dalam menghadapi ancaman ketidakamanan pangan.

Mekanisme regional tersebut secara konkrit terlihat misalnya dalam kerangka keamanan di ASEAN dan Uni Eropa.

Seperti ketika pada tahun 2006-2007 secara mengejutkan dunia menghadapi krisis pangan yang disebabkan kenaikan harga secara dramatis. Peristiwa ini kemudian memicu berbagai kawasan untuk semakin memperkuat mekanisme keamanan pangan regional mereka. Upaya-upaya tersebut terlihat misalnya dengan adanya kebijakan harmonisasi perdagangan pangan dan penyediaan stok pangan pada level kawasan. Meskipun upaya ini kemudian seringkali bertabrakan pada kepentingan nasional untuk menggeser paradigma ketergantungan pangan menjadi swasembada pangan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa regionalisasi keamanan pangan mulai dilakukan di beberapa kawasan (Demeke et al., 2014).

Di kawasan Asia Tenggara misalnya respon terhadap krisis pangan ditunjukkan dengan pembentukan kerangka kerja *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) dan *Strategic Plan of Action on Food Security* (SPA-FS) pada tahun 2008 di Chiang Mai. Pada tahun 2012 ASEAN memformulasikan pula apa yang disebut sebagai *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) yaitu mekanisme cadangan beras ASEAN bersama Cina, Jepang, dan Korea dalam menghadapi situasi darurat pangan. Meskipun revitalisasi koordinasi keamanan pangan ASEAN baru kembali dimulai pasca krisis pangan 2007, namun sebenarnya kerangka kerjasamanya telah ada sejak tahun 1968. Mekanismenya berawal dari kerjasama negara-negara ASEAN pada sektor pertanian terkait dengan produksi dan pasokan pangan (AMAF, 2015).

Sedangkan bagi Uni Eropa, kebijakan pangan merupakan salah satu kebijakan tertua mereka yang dituangkan dalam *the Common Agricultural Policy* (CAP) sejak tahun 1962. Kebijakan yang berangkat dari tujuan untuk melindungi para petani dan konsumen pangan Eropa ini telah beberapa kali mengalami upaya reformasi kebijakan hingga yang terakhir adalah pada tahun 2013. Isu di dalam CAP sejak tahun 1962 mengalami berbagai pergeseran fokus mulai dari semata-mata *food security*, menjadi *competitiveness*, lalu *sustainability*, hingga yang terakhir adalah efisiensi kebijakan (Commission). Ketika terjadi krisis pangan 2007 Uni Eropa

menunjukkan tanggung jawab globalnya sebagai salah satu kekuatan besar dalam pertanian global dengan memberikan bantuan Food Facility sebesar 1 milyar euro kepada negara-negara yang membutuhkan (Commission, 2010).

Paper ini berupaya mengkaji bagaimana kedua model keamanan pangan regional di kedua kawasan tersebut, yaitu ASEAN dan Uni Eropa. Kajian mengenai hal tersebut sangatlah penting mengingat urgensinya formulasi kerangka dan kebijakan keamanan pangan pada level regional dengan tetap memperhatikan keselarasan kepentingan pada level nasional negara-negara anggota. Secara evolusioner kedua model keamanan pangan kawasan ini berkembang dengan pola dan kecepatan integrasi yang relatif berbeda. Dengan perbandingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait model kerangka keamanan pangan regional.

B. Kerangka Teoritis

Pada tahun 1960 hingga tahun 1970-an FAO mendefinisikan keamanan pangan "ketersediaan pasokan makanan pokok yang memadai sepanjang waktu untuk menghindari kelangkaan pangan pada masa gagal panen atau bencana alam yang meluas, keberlanjutan peningkatan produksi dan konsumsi, serta mengurangi fluktuasi produksi dan harga" (Shaw, 2007, p. 150).

Kemudian ditahun 19080-an Amartya Sen yang mengatakan bahwa produksi pangan saja tidaklah cukup, orang membutuhkan akses kepada pangan untuk mendapatkan '*entitlement*' atau hak kepemilikan terhadap pangan tersebut. Menurutnya walaupun tidak ada kelangkaan pangan orang bisa saja mengalami ketidakamanan pangan (UNESCAP, 2009) .

Perkembangan terkini definisi kemanan pangan adalah sebagai mana yang disampaikan oleh *Food and Agricuture Organization* (FAO), yaitu "keamanan pangan sebagai sebuah kondisi dimana semua orang, pada setiap waktu, memiliki akses secara fisik, sosial, dan ekonomi, terhadap pangan secara cukup, aman, dan sehat sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dan pilihan pangan mereka bagi kehidupan yang aktif dan sehat". Sedangkan ketidakamanan atau kerawanan pangan

(*Food Insecurity*) adalah "sebuah kondisi dimana orang tidak memiliki akses terhadap pangan yang memadai secara fisik, sosial, dan ekonomi" (FAO, 2011, p. 8).

Pendekatan keamanan pangan kini yang lebih berorientasi kepada pasar dengan kamuflase keberpihakan kepada konsumen kemudian menjadi pembenaran bagi liberalisme perdagangan dan investasi pangan internasional. Hal ini kemudian menimbulkan keterancaman bagi para petani lokal. Itulah sebabnya kemudian ditahun 1990-an muncul sebuah konsep baru yaitu kedaulatan pangan (*food sovereignty*).

Organisasi Petani Sedunia*La Via Campesina* mengatakan bahwa kedaulatan pangan adalah "hak dari masyarakat untuk memperoleh pangan yang sehat dan sesuai budayanya, yang diproduksi melalui metode berkelanjutan dan hak mereka untuk menentukan pangan serta sistem pertanian mereka sendiri". Serta lebih tegas *La Via Campesina* ditahun 1996 mengatakan bahwa "kedaulatan pangan hak setiap negara untuk mempertahankan dan mengembangkan kapasitasnya dalam memproduksi pangan pokoknya sesuai dengan budaya dan perbedaan cara produksi. Kita memiliki hak untuk memproduksi makanan kita sendiri di dalam wilayah kita sendiri. Kedaulatan pangan adalah prasyarat untuk terciptanya keamanan pangan"(Campesina).

Pada tahun 2002 beberapa organisasi non pemerintah dan pergerakan sosial yang membentuk *International Planning Commitee for Food Security* (IPC) menyampaikan bahwa kedaulatan pangan mencakup empat area prioritas atau pilar, yaitu (Lee, 2007): (1)hak terhadap pangan; (2)akses kepada sumber daya produktif; (3)mengarusutamakan produksi yang bersifat agroekologi; dan (4)perdagangan serta pasar lokal.

Persoalannya baik pendekatan yang berorientasi liberalisasi pangan maupun kemandirian pangan nasional adalah menarik kemudian untuk melihat hubungannya dengan level keamanan pangan secara regional. Terkait dengan istilah ini, region menurut Fawcett (2005) tidak dapat dilihat semata-mata sebagai sebuah teritorial, terminologi ini harus dilihat dalam kaitannya dengan kebersamaan, interaksi, dan kerjasama. Untuk itu regions dapat didefinisikan sebagai sebuah unit atau kelompok, negara-negara, atau teritorial berbasis 'zona', dimana para anggotanya secara

bersama-sama memiliki karakteristik unik yang dapat diidentifikasikan. Karakter inti dari zona tersebut adalah mereka lebih kecil dari sebuah sistem internasional, namun lebih besar dari individu negara ataupun non-negara. Mereka dapat bersifat permanen, temporer, terinstitusionalisasi, ataupun tidak. Dari sini dapat ditarik pendefinisian istilah regionalism yaitu sebuah *policy* atau *project* di mana negara dan non-negara bekerja sama dan mengkoordinasikan strategi di dalam sebuah *region*. Tujuan dari regionalisme adalah untuk mengejar dan mempromosikan sebuah tujuan bersama di dalam satu atau lebih isu. Ruang lingkupnya kemudian bergerak dari mempromosikan rasa *regional awareness* atau *community (soft-regionalism)*, hingga kepada mengkonsolidasikan kelompok regional dan sub-regional yang diformalisasikan melalui kesepatan negara-negara dan organisasi (*hard-regionalism*)

Sayangnya belum terlalu banyak kajian yang membahas topik keamanan pangan regional ini secara teoritis. Beberapa tulisan, misalnya Allan Mathews (2003), mengingatkan pentingnya pembahasan topik ini untuk: (1)memahami dampak potensial dari integrasi perdagangan regional terhadap keamanan pangan; dan (2)kontribusi apa yang dapat diberikan oleh regionalisme terhadap keamanan pangan. Menurutnya program regional terhadap keamanan pangan biasanya akan mengandung tiga komponen: (1)fasilitasi perdagangan; (2)harmonisasi kebijakan pertanian nasional; dan (3)mendukung program khusus nasional untuk keamanan pangan.

Lebih lanjut Matthews mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan korelasi antara regionalisme dengan peningkatan perdagangan intra-regional yang mendorong pertumbuhan ekonomi, maka jelas bahwa hal ini akan mendukung keamanan pangan. Namun tetap dibutuhkan suatu evaluasi spesifik mengenai konsekuensinya terhadap rumah tangga petani berpenghasilan rendah, mengingat mereka tidak akan dapat memanfaatkan peluang meningkatnya akses pasar. Ketika hambatan pada sisi produsen ini teridentifikasi, maka harus ada strategi regional untuk mengatasinya, seperti investasi dan pelatihan. Untuk itu dibutuhkan adanya instrumen finansial keamanan pangan guna membiayai insisiatif-inisiatif melindungi kelompok-

kelompok yang rentan dan membantu mereka mengambil peluang terhadap integrasi regional.

Bagi Matthews, memasukkan isu pertanian ke dalam perdagangan regional akan mendorong tekanan untuk melakukan harmonisasi kebijakan pertanian dengan cara mentransfer tanggung jawab pada level supranasional, regional, atau dengan sekedar mengkoordinasikan kebijakan nasional. Beberapa isu yang dapat dibahas adalah *common external tariff*, subsidi domestik kepada petani, hambatan-hambatan perdagangan, dan mekanisme finansial untuk bantuan.

Terkait dengan level regional dari keamanan pangan, Mlynarska (2011) menyebutkan bahwa ini adalah bagian lima level keamanan pangan yang harus diperhatikan. Kelima level yang dimaksud adalah: keamanan pangan pada level individu, rumah tangga, nasional, regional, dan global. Sedangkan dimensi yang harus diperhatikan dari kelima level itu adalah: (1)ketersediaan fisik dari pangan, yaitu produksi dan distribusi; (2)akses ekonomi kepada pangan, terkait dengan kemiskinan dan harga; (3)akses sosial terhadap pangan, berhubungan dengan individu yang berpotensi kehilangan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi pangan; dan (4)kualitas dan keamanan pangan.

Lalu Mlynarska mencoba untuk membangun peta *food security governance* menjadi tiga kategori, yaitu: (1)*level of governance*; (2)strategi; dan (3)struktur. Namun dewasa ini *food security governance* hanya teridentifikasi pada tiga level saja, yaitu: level global, regional, dan nasional. Level sub-nasional belum terdapat dalam sistem ini. Dengan adanya proses desentralisasi secara global, dalam waktu dekat suara dari aktor sub-nasional kemungkinan akan semakin terdengar. Sedangkan level regional dianggap tidak hanya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan level nasional, namun juga lebih efektif dalam berurusan dengan permasalahan-permasalahan global yang menyentuh komunitas lokal. Munculnya aktor sub-nasional kemudian memunculkan pemain-pemain baru dalam *food security governance*, yaitu *civil societies* dan *private actors*. Pada akhirnya, di setiap level of governance, ada empat strategi keamanan pangan yang dapat diambil: (1)regulasi; (2)penetapan standar; (3)bantuan; dan (4)penyebaran *knowledge*. Sedangkan struktur

pemerintahannya akan melibatkan kolaborasi antara publik-privat-dan non-pemerintah.

Pentingnya peran aktor non-negara dalam persoalan keamanan pangan juga ditunjukkan oleh Paarlberg (2002). Meskipun menurutnya peran negara masih sangat sentral dalam menentukan kebijakan keamanan pangan, namun dalam kondisi dimana pemerintah dianggap tidak dapat memenuhi mandat tersebut maka organisasi non-pemerintah dapat mengisi gap itu. Paarlberg bahkan menunjukkan kuatnya peranan asosiasi-asosiasi petani di negara-negara maju untuk menekan kebijakan pemerintah terutama dalam hal proteksi pangan. Selain itu peran lain dari organisasi non-pemerintah adalah dalam kaitannya dengan bantuan pangan, pembangunan pedesaan, dan *community-building*.

Sedangkan Teng dan Morales (2014) mengkaji kekuatan sistem keamanan pangan regional dengan menggunakan empat faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: (1)faktor pada level pertanian; (2)faktor permintaan dan harga; (3)faktor lingkungan; dan (4)faktor kebijakan serta perdagangan.

Kajian yang mencoba membandingkan antara model regionalisme di ASEAN dan Uni Eropa misalnya dapat dilihat dalam tulisan Murray (2010). Menurut tulisannya Uni Eropa kini dianggap sebagai salah satu bentuk integrasi kawasan paling *advanced* di dunia dan kerapkali digunakan sebagai model regional yang dipertimbangkan, termasuk oleh ASEAN. Murray mencoba melakukan analisis komparatif terhadap integrasi regional di kedua kawasan ini dengan menitikberatkan kepada beberapa faktor-faktor yang dapat diperbandingkan. Beberapa faktor tersebut adalah: (1)struktur institusional; (2)peran dari negara dan kedaulatan; dan (3)interdependensi serta bagaimana mereka menghadapi globalisasi.

Sementara Fort dan Webber (2006) mencoba mengkaji perbandingan regionalisme di antara Uni Eropa dan ASEAN dengan melihat beberapa faktor yang lain. Faktor-faktor tersebut adalah: (1)leadership dan power; (2)kerjasama dan integrasi ekonomi dan moneter; (3)reformasi institusional; (4)enlargement; dan (5)manajemen krisis.

Pada akhirnya paper singkat saya akan mencoba untuk mengkaji perbandingan antara kerangka keamanan pangan regional di ASEAN dan Uni Eropa dengan memperhatikan tiga dimensi saja. Pertama, kebijakan perdagangan dan pertanian kawasan. Pendekatan ini berupaya mengkaji bagaimana kedua kawasan mendamaikan isu kontroversial dalam keamanan pangan yaitu antara perdagangan pangan dan kebijakan pertanian, antara *self-reliance* atau *self-sufficiency*. Kedua, terkait dengan manajemen krisis pangan. Dalam situasi dimana terjadi krisis pangan secara global, regional, maupun nasional, bagaimana mekanisme darurat yang dimiliki oleh kedua kawasan.. Ketiga, terkait dengan peranan yang dimiliki oleh para petani di kedua kawasan dalam turut menentukan kebijakan pangan regional

C. **Metode Penelitian**

Ketiga dimensi pembahasan di atas akan digunakan untuk mengkaji masing-masing model kerangka keamanan pangan di ASEAN dan Uni Eropa. Pembahasan secara secara kolektif (*collective/multiple case studies*) ini bertujuan untuk kemudian menarik pola-pola penting dalam kedua model kerangka keamanan pangan regional.

Penelitian ini akan menelaah dokumen resmi terkait kebijakan pertanian dan perdagangan dari masing-masing kawasan. Selain itu akan digunakan pula laporan-laporan dan data dari lembaga internasional seperti FAO, IFPRI, dan organisasi pertanian lain. Beberapa sumber lain seperti pemberitaan, buku, dan artikel jurnal juga akan dimanfaatkan sebagai sumber data.

C. Kerangka Keamanan Pangan Regional ASEAN

Kerangka keamanan pangan ASEAN berada di bawah koordinasi dari *ASEAN Ministrial Meeting on Agricultural and Forestry* (AMAF). Kerjasamanya telah dimulai ditahun 1968 dengan adanya kerja sama pada sektor produksi dan pasokan pangan. Di tahun 1977 kerjasama ini diperluas hingga ke persoalan pertanian dan kehutanan. Dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN IV tahun 1992 disepakati bahwa harus ada penguatan kerjasama regional di bidang pengembangan, produksi, dan promosi produk pertanian. Maka pada tahun 1993 di Bandar Sri Begawan

ditandatanganilah *Ministrial Understanding* mengenai ASEAN *Cooperation in Food, Agriculture, and Forestry.* Ada tujuh poin yang menjadi mandat dari kerjasama ini: (1)memperkuat keamanan pangan di kawasan; (2)fasilitasi dan promosi perdagangan sektor pertanian dan kehutanan intra dan ekstra ASEAN; (3)Transfer teknologi bagi pengembangan agribisnis dan silvobisnis; (4)pengembangan komunitas pertanian di pedesaan dan sumber daya manusia; (5)melibatkan dan investasi sektor swasta; (6)manajemen dan konservasi sumber daya alam bagi pembangunan berkelanjutan; dan (7)memperkuat kerjasama ASEAN pada isu regional dan internasional (AMAF, 2015).

Ketika terjadi krisis pangan pada tahun 2007-2008, pertemuan AMAF ke-30 di Hanoi 23 Oktober 2008 menetapkan pembentukan *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) dan *Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security* (SPA-FS). Dalam ASEAN Summit ke-14 tahun 2009 di Thailand, para pemimpin negara berkomitmen untuk menjadikan keamanan pangan sebagai sebuah isu permanen dan prioritas tingkat tinggi *("ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry Major Achievements," 2009)*. Dari sini terlihat bahwa situasi krisis ternyata menguatkan proses integrasi yang ada melalui kerja sama keamanan pangan regional ini.

AIFS menyediakan tujuan, sasaran, definisi, guiding reference dan prinsip, serta komponen-komponen yang kemudian rencana tindakan strategis di dalam SPA-FS. Tujuan AIFS adalah memastikan keamanan pangan jangka panjang dan kehidupan petani di kawasan ASEAN. Beberapa sasaran yang harus dicapai guna sampai kepada tujuan ini adalah: (1)peningkatan produksi pangan; (2)mengurangi kerugian pasca panen; (3)pasar dan perdagangan komoditas dan input yang kondusif; (4)stabilitas pangan; (5)ketersediaan dan akses terhadap input pertanian; dan (6)pengaturan bantuan pangan darurat secara regional.

AIFS mendefinisikan pangan identik dengan definisi FAO dan World Food Summit tahun 1996. Dengan demikian dimensi-dimensi intinya adalah ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), dan pemanfaatan (*utilization*). Hanya saja dalam cakupannya AIFS membatasi pada lima komoditas utama adalah: beras, jagung,

kedelai, gula, dan singkong. AIFS memiliki empat komponen inti yang saling berhubungan. Komponen-komponen inilah yang nantinya akan diturunkan menjadi program aksi dan aktifitas di dalam SPA-FS (2009-2013). Komponen-komponen inti dari kerangka AIFS dapat digambarkan sebagai berikut adalah: (*1)Food Security Emergency/shortage relief; (2)sustainable food reade development; (3)Integrated food security information system;* dan *(4)agricultural innovation.*

AIFS dan SPA-FS memiliki program kerja tahap awal selama lima tahun (2009-2013). Dalam pelaksanaannya *ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry* akan berkoordinasi dengan badan sektoral ASEAN terkait dan bertanggung jawab atas seluruh implementasinya. Lembaga pemerintah terkait akan mempesiapkan perencanaan yang lebih detail serta melaksanakannya pada level nasional. Kerangka kerjasama regional ini membuka jalur kerjasama dengan organisasi internasional, lembaga donor, sektor swasta, asosiasi industri, dan berbagai komunitas pada level regional dan nasional.

Pelaksanaan SPA-FS fase I berakhir pada tahun 2013. Namun disepakati kemudian untuk memperpanjang masa berlaku program ini selama satu tahun hingga 2014. Di tahun 2015 telah disepakati pelaksanaan dari fase II AIFS dan SPA-FS. Pada tahap II ini ditambahkan satu sasaran dari AIFS selain enam yang sudah ada sebelumnya yaitu terkait dengan keselamatan pangan, kualitas, dan gizi. Begitu pula komponen di dalam AIFS ditambahkan komponen gizi di samping empat komponen sebelumnya.

Dalam implementasinya AMAF adalah lembaga utama yang bertanggung jawab terhadap SPA-FS dan kini didukungan dari ASEAN *Secretariat*. Sumber daya untuk pelaksanaan untuk pelaksanaan SPA-FS bersumber dari cost-sharing diantara sesama negara ASEAN. Sedangkan sumber dana tambahan akan bersumber dari dukungan finansial antara partner dialog dan lembaga donor. Rentang waktu dari SPA-FS tahap II ini adalah selama lima tahun (2015-2020) dan akan ada review pertengahan periode di tahun 2018.

Secara keamanan pangan FAO (2015) (figur 1) menandai kemajuan yang cukup baik untuk kawasan Asia Tenggara. Dengan menggunakan target kelaparan,

yang diindikatori oleh angka kekurangan gizi (undernourishment) dan kekurangan berat anak (child underweight), FAO mencatat angka penurunan secara drastis. Dalam prediksi FAO, dengan adanya prospek pertumbuhan ekonomi di kawasan ini, progres lebih besar akan sangat mungkin tercapai .

Figur 1 Trend Penurunan Angka Kurang Gizi dan Kurang Berat di Asia Tenggara

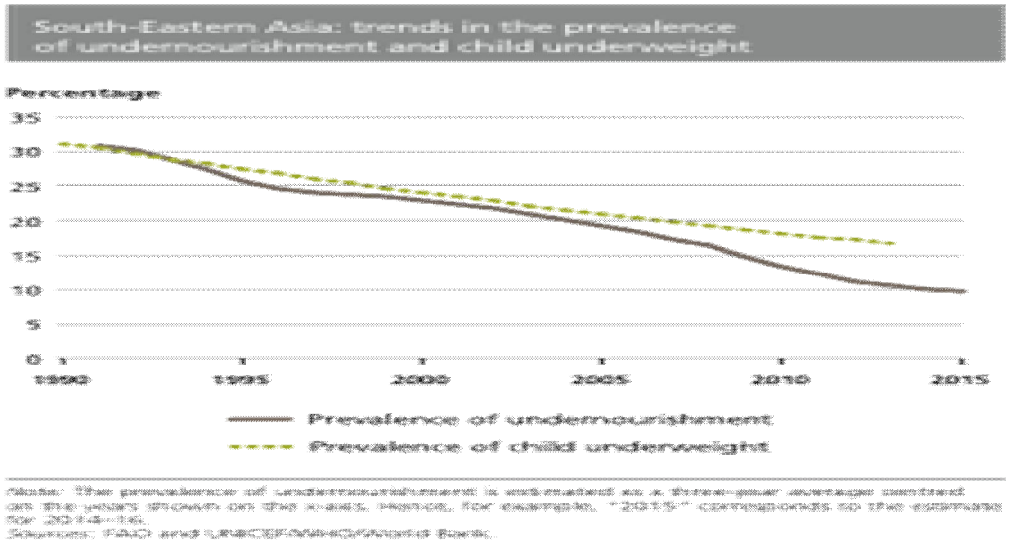

Meski demikian beberapa hal tetap harus dicermati sebagai persoalan kunci dalam sektor keamanan pangan di kawasan ini.

Perdagangan dan kebijakan pertanian

Liberalisme ekonomi adalah inti dari proses integrasi ekonomi di ASEAN. Dalam cita-cita Masyarakat Ekonomi ASEAN pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan manusia adalah suatu mandat yang harus dituntaskan. Momentum penting dari proses ini adalah pada tahun 1992 ketika ASEAN-6 mendeklarasikan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Kawasan perdagangan bebas ini akan mulai berjalan prosesnya pada tahun 2002. Hal tersebut mengindikasikan secara eksplisit bahwa kawasan ini sedang bergerak menuju kepada integrasi ekonomi kawasan. Secara idiologis

nampaknya para pemimpin ASEAN meyakini bahwa interdependensi ekonomi di antara mereka adalah kunci dari stabilitas perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini. Proses integrasi ini diperdalam ketika pada tahun 2003, di dalam Bali Concord II, mereka bersepakat untuk membentuk *ASEAN Economic Community* (AEC) yang bertujuan mentransformasikan ASEAN ke dalam sebuah *single market* pada 2020. Negara-negara ASEAN bahkan tidak ragu-ragu untuk mempercepat proses pembentukan AEC dengan memajukan jadwalnya dari 2020 ke 2015, sebagaimana dinyatakan dalam *ASEAN Economic Ministers Meeting* 2006.

Meskipun perkembangan transformasi ekonomi kawasannya terlihat begitu mengesankan, namun keinginan politik untuk memperdalam integrasi regional ASEAN nampaknya tidak sekuat yang terlihat. Para anggota ASEAN masih sangat terlihat malas untuk mendelegasikan sebagian kedaulatannya kepada institusi regional dalam banyak area kebijakan. Hal ini terindikasikan misalnya saja, meskipun telah mengklaim diri sebagai sebuah pasar tunggal, AEC nampaknya tidak memiliki rencana untuk menetapkan tarif eksternal bersama atau *Common External Tariff* (CET) bagi bukan anggota ASEAN. Padahal CET merupakan salah satu syarat penting *customs union* (Kim, 2011, p. 411). AEC juga tidak memberlakukan pembatasan negosiasi perdagangan negara-negara anggota ASEAN secara individual dengan pihak non anggota atau bahkan menyerahkan negosiasi tersebut secara kolektif kepada institusi regionalnya.

Dalam mekanisme AFTA, pengurangan tarif akan dilakukan secara bertahap melalui *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) hingga 0% - 5%, sebelum akhirnya benar-benar akan dihilangkan dalam *Free Trade Area* (FTA). Pada skema FTA seluruh hambatan tarif dan non tarif di antara anggota, termasuk pembatasan kuantitatif (*quantitative restrictions*) akan dihilangkan, namun anggota akan tetap dapat mempertahankan tarifnya secara individual kepada non-anggota. Skema CEPT mencakup seluruh produk manufaktur dan pertanian yang kemudian akan dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu: (1)*Inclusion List* (IL), yaitu produk-produk yang masuk ke dalam konsesi tarif 0% - 5%; (2)*Temporary Exclusion list* (TEL), adalah produk-produk yang secara temporer akan dikeluarkan dari skema

pengurangan tarif namun secara bertahap akan ditransfer ke IL; (3)*Sensitive List* (SL), adalah produk-produk yang, karena pertimbangan tertentu, tidak dimasukkan ke dalam skema IL; dan (4)*General Exemption List* (GEL), yaitu produk-produk yang sesuai artikel XX GATT dan secara permanen dikeluarkan dari pengurangan tarif karena terkait dengan: keamanan nasional, proteksi moral, kesehatan, perlindungan hewan, tumbuhan, seni, sejarah, dan sebagainya. Dalam CEPT konsesi akan diberikan berdasarkan asas *reciprocal*, produk per produk, basis, dan menurut tingkat kecepatan yang berbeda-beda (ASEAN, 2015).

Meskipun dalam perundingan perdagangan produk pertanian *World Trade Organization* (WTO) mencakup tiga isu utama yaitu: akses pasar, dukungan domestik, dan subsidi ekspor, namun dalam *preferential trade agreement* AFTA hanyalah persoalan akses pasar yang dibicarakan. Persoalan dukungan domestik dan subsidi ekspor jarang disentuh dalam negosiasi karena kompleksitas dan implikasinya. Bahkan AFTA pada awalnya mengeluarkan produk pertanian yang non-proses atau *unprocessed agricultural products* (UAPs) dari liberalisasi tarif, dengan mengizinkannya dimasukkan ke dalam kategori *Sensitive* dan *Highly Sensitive List*. Namun tidak semua UAPs yang diproteksi. Pada tahun 1995 saja, dari total 2.025 tariff lines dari UAPs, lebih dari 50%-nya telah masuk ke dalam Inclusion List, 377 telah masuk TEL, dan 261 adalah SL. Hingga saat ini hanya segelintir *tariff lines* UAPs yang masih masuk *Sensitive List*, sementara sebagian besar telah diliberalisasi atau dalam trek pengurangan tarif 0-5%. Beberapa produk yang masih masuk *sensitive lists*, terutama untuk Indonesia dan Filipina, adalah beras (Pasadilla, 2006).

Dalam kajiannya Pasadila (2006, p. 34) mengatakan bahwa total kenaikan perdagangan intra-ASEAN sebagian besar didorong oleh sektor industri dan bukan oleh sektor pertanian. Menurutnya hal ini dapat dipahami karena: (1)sesama negara ASEAN memproduksi produk pertanian yang sama; dan (2)sejak awal tujuan pembentukan AFTA adalah untuk memfasilitasi perdagangan di sektor manufaktur dan bukan pertanian.

Namun rasio total perdagangan pertanian ASEAN lebih didominasi oleh extra-ASEAN dibandingkan intra-ASEAN (figur 2). Menurut Mangabat dan Natividad (2007) hal ini menunjukkan fakta bahwa: (1)Secara perdagangan ASEAN tergantung kepada pasar eksternal. Hal ini disebabkabkan selain karena kapasitas pasar eksternal yang lebih besar untuk menyerap pasar ASEAN, juga karena hasil dari perjanjian secara bilateral negara-negara ASEAN dengan negara non-anggota; (2)Adanya surplus perdagangan produk pertanian ASEAN dengan pihak luar bermakna bahwa ASEAN adalah basis produksi untuk pasar ini; (3)Meskipun perdagangan ekstra-ASEAN lebih besar daripada intra-ASEAN, namun rasionya menunjukkan trend semakin menurun. Hal ini kemungkinan besar adalah dampak AFTA terhadap perdagangan pertanian, meskipun dampaknya masih marginal.

Figur 2 Grafik Perdagangan Pertanian Intra dan Ekstra ASEAN

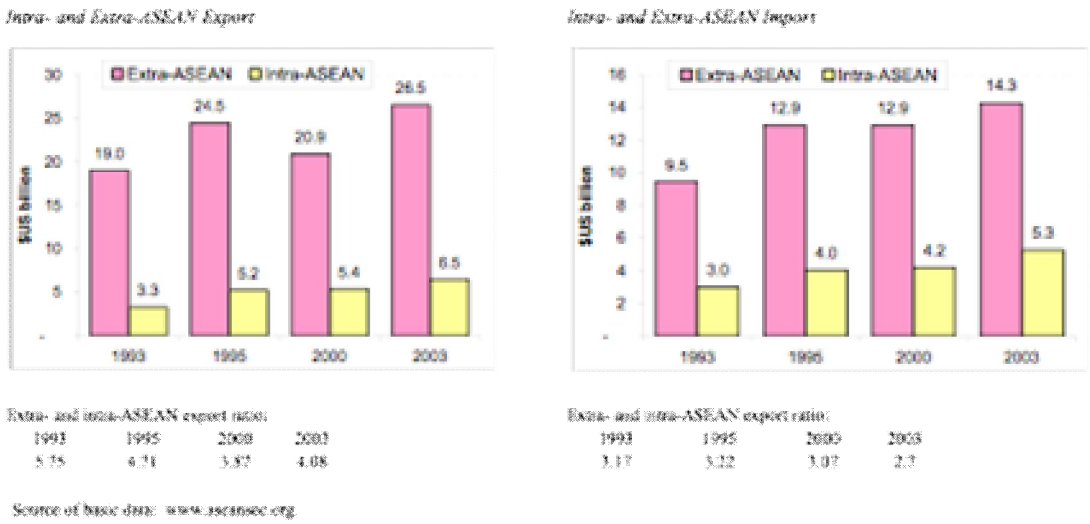

Di dalam kerangka AIFS (2015-2020), perdagangan pangan merupakan komponen kedua, yaitu pengembangan perdagangan pangan berkelanjutan, dengan *strategic thrust-nya* adalah mempromosikan pasar dan perdagangan pangan yang kondusif. Perbedaannya dengan AIFS adalah di dalam AIFS (2015-2020) terlihat rencana program yang lebih detail terkait pengembangan perdagangan pangan kawasan. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam AIFS (2015-2020) adalah A*SEAN*

Members States, ASEAN Food Security Reserve Board (AFRSB), ADB, FAO, dan pihak-pihak lain yang akan ditentukan berikutnya.

Tabel 1 Perbandingan AIFS Untuk Komponen Perdagangan (2009-2013) dan (2015-2020)

	AIFS (2009-2013)	AIFS (2015-2020)
Strategic Thrust 2	Promote conducive Food Market and Trade	
Action Program (objective) 2.1	insisiatif untuk perdagangan pangan berkelanjutan	Perdagangan pangan kawasan mendistribusikan pangan lebih merata dan terjangkau dengan harga lebih stabil
activity 2.1.1	implementasi ASEAN Trade in Good Agreement dalam bidang pangan	Mengadakan Rice (Food) Trade Forum, untuk membahas restriksi perdagangan pangan, fasilitasi, dan lain-lain
activity 2.1.2	Analisis informasi perdagangan pangan	melakukan meeting technical dalam ASEAN Food Security Reserve Board (AFSRB) untuk mendukung Food Trade Forum
activity 2.1.3		Pengumpulan dan analisis data untuk AFSRB
activity 2.1.4		Hasil dari Food Trade Forum akan menjadi rekomendasi untuk AFSRB
activity 2.1.5		Melaksanakan Seafood Forum

	AIFS (2009-2013)	AIFS (2015-2020)
Action Program (objective) 2.2		Meningkatkan kapasitas AFSRB selaku penasehat kebijakan keamanan pangan SOM-AMAF
activity 2.2.1		melaksanakan pembangunan kapasitas AFSRB melalui pelatihan

Dari sini terlihat bahwa AIFS memang bertujuan untuk mendorong liberalisasi pangan lebih dalam. Pada tahap ini pendekatan lebih ditujukan kepada pembukaan akses pasar. Namun tidak terlihat adanya pengaturan atau harmonisasi lebih luas terkait kebijakan dukungan pertanian domestik atau subsidi ekspor bagi produk pertanian. Selain itu kebijakan perdagangan pangan kawasan lebih terlihat *inward-looking* dibandingkan *outward-looking.* Sebagai sebuah *Free Trade Area* dalam bentuk yang longgar, ASEAN terlihat memberikan celah yang luas bagi kekompetitifan perdagangan pangan eksternal masing-masing anggotanya secara individual. Begitu pula dalam kebijakan ini ASEAN tidak terlihat berupaya memberikan proteksi impor produk pangan dari ekstra-ASEAN.

Manajemen Krisis Pangan ASEAN

Di dalam AIFS (2015-2020), manajemen krisis pangan terutama dilakukan dengan menyiapkan cadangan beras regional dalam skema *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR).* Namun sebenarnya model cadangan beras seperti ini bukanlah sesuatu yang baru dalam skema ASEAN. Pada tahun 1979 enam negara ASEAN menyepakati adanya ASEAN Food Security Reserve. Dalam model ini keenam negara ASEAN akan menyediakan cadangan beras nasionalnya untuk kepentingan regional dengan cara mempertahankan level minimum cadangan tertentu. Namun cadangan ini tidak ditunjukkan untuk mengisi defisit pangan berkelanjutan di negara anggota. Defisit semacam itu akan ditutup dengan kebijakan

nasional masing-masing negara, baik melalui impor atau produksi. Cadangan beras ini, yang disebut t*he ASEAN Emergency Rice Reserve* (AERR), dimaksudkan untuk mengatasi persoalan darurat. Total cadangan yang disiapkan adalah 50,000 metrik ton. Mekanisme pelepasan cadangan adalah bila ada satu negara yang membutuhkan dan memenuhi persyaratan bantuan, maka ia akan memberitahukan negara anggota lain dan ASEAN Food Security Reserve Board (Agreement On The ASEAN Food Security Reserve, 1979).

Namun AERR tidak dapat berjalan dengan baik. Setelah 25 tahun beroperasi, total komitmen AERR hanyalah 87.000 ton, separuh dari kebutuhan harian ASEAN. Bahkan ketika terjadi krisis pangan, cadangan tersebut tidak pernah dapat digunakan. Trethewie (2010, p. 5) menyebutkan penyebab kegagalan AERR karena cadangan ini hanya muncul pada saat krisis dan diambil dari cadangan nasional, tidak ada cadangan fisik. Banyak pemerintah yang khawatir negara-negara ASEAN lain akan menutupi kekurangan pasokan dengan menggunakan cadangan ini dan bukan melalui mekanisme impor biasa.

Upaya untuk membangkitkan AERR kemudian dilakukan dengan memperluas keanggotaannya di tahun 2001 dengan mengikutsertakan Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Jepang kemudian berkontribusi sebesar US$ 4,5 juta dalam *ASEAN Cooperation in Food, Agriculture, and Forestry*, dan program cadangan ini disebut *East Asia Emergency Rice Reserve* (EAERR). Tanpa keterlibatn Jepang kemungkinan besar negara-negara ASEAN tidak akan pernah mengevaluasi skema lama AERR atau menyadari arti pentingnya. Bahkan banyak negara ASEAN berpartisipasi dalam EAERR hanya untuk kepentingan diplomasi dan mendapatkan sumber pendanaan Jepang semata. Banyak perubahan yang dilakukan dalam skema EAERR dibandingkan AERR sebelumnya, seperti: cadangan beras di dalam EAERR akan dilepaskan bila 12 bulan tidak digunakan untuk program kemiskinan, perluasan definisi kondisi darurat, dan adanya stok fisik beras. Namun dalam hal pemanfaatan, EAERR tidak lebih baik dari AERR. Penyebabnya adalah sulitnya mengkoordinasikan cadangan serta kemampuan pembiayaan anggota yang berbeda-beda (Trethewie, 2010, p. 6).

Setelah krisis pangan tahum 2007-2008 sebuah skema baru disusun. Program yang disebut *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR) ini dibicarakan pertama kali dalam pertemuan AMAF IX tahun 2009. Kesepakatan APTERR ditandatangani dalam pertemuan AMAF+3 XI tahun 2011 di Jakarta yang menyebutkan bahwa APTERR akan mulai efektif beroperasi pada 2012. Sedangkan pertemuan pertama APTERR dilakukan tahun 2013 di Bangkok, Thailand yang sekaligus menjadi tempat bagi kantor sekretariatnya (APTERR).

Di dalam APTERR stok fisik berasal dari (1)kontribusi cadangan darurat beras nasional yang disisihkan; (2)pengumpulan stok cadangan darurat beras; dan (3)bentuk-bentuk lain, seperti: kontrak berjangka, donasi, dan sebagainya. Jumlah total cadangan rutin APTERR tercatat 787.000 metrik ton. Penggunaan cadangan APTERR akan menggunakan tiga mekanisme (*tier*) ("APTERR Mechanism,"): (1)kontrak spesial khusus antara negara; (2)pinjaman dan hibah darurat; dan (3)donasi beras dalam kondisi darurat akut. Secara umum APTERR memiliki kesamaan dengan EAERR, namun tambahan signifikannya adalah pembentukan sekretariat APTERR. Secara konkrit mekanisme APTERR juga telah beberapa kali digunakan terutama dalam kerangka *tier* tiga. Misalnya pada tahun 2010 dalam bentuk bantuan bencana atau tier tiga dari Thailand kepada Filipina dan Jepang kepada laos, serta mekanisme tier satu dari Vietnam kepada Filipina. Mekanisme tier tiga kembali digunakan pada tahun 2012 untuk bantuan kepada Indonesia dan 2013 bantuan Jepang kepada Filipina. Menurut Trethewie (2010, p. 7) pilihan menggunakan mekanisme regional dibandingkan bilateral menunjukkan bahwa negara-negara di kawasan ASEAN cukup nyaman menggunakan mekanisme APTERR ini. Namun untuk kontrak jangka panjang nampaknya belum terlalu diminati.

Sedangkan Briones (2011) menyebutkan beberapa persoalan yang potensial dihadapi APTERR ke depan, yaitu: (1)terkait persoalan teknis penyaluran cadangan dan penyimpanan; (2)persoalan ekonomi dan finansial, meskipun para anggota telah menyanggupi biaya operasional APTERR, namun pembiayaan program dan operasi

adalah hal lain; dan (3)persoalan legal dan institusional, terkait dengan harmonisasi peraturan di level regional dan nasional, kapasitas organisasi, dan lain sebagainya.

Tabel 2 Perbandingan AIFS Untuk Manajemen Krisis Pangan (2009-2013) dan (2015-2020)

	AIFS (2009-2013)	AIFS (2015-2020)
Strategic Thrust 1	Memperkuat pengaturan keamanan pangan	
Action Program (objective) 1.1	Memperkuat program keamanan pangan nasional	Memfungsikan cadangan pangan regional
activity 1.1.1	Difersifikasi sumber pangan dan inisiatif berbasis komunitas	Melaksanakan *technicalmeeting* untuk implementasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)
activity 1.1.2	Memperkuat pembangunan kapasitas untuk memperkuat program keamanan pangan	Pengumpulan data untuk APTERR
activity 1.1.3	Pertukaran informasi dan pengalaman di antara negara anggota untuk melalui networking dan konsultasi regional	APTERR Council membantu anggota APTERR untuk membentuk mekanisme implementasi
activity 1.1.4	Program bantuan pangan untuk kelompok-kelompok yang rentan	Membangun kapasitas untuk anggota APTERR
activity 1.1.5		Bekerja sama dengan Sekretariat AFSIS dan badan pangan nasional untuk melakukan Food Emergency

	AIFS (2009-2013)	AIFS (2015-2020)
		Monitoring and Information (FEMI)
activity 1.1.6		Melakukan kajian untuk perluasan komoditas pangan

Dalam program AIFS terkait manajemen krisis terjadi pergeseran penekanan dari yang bersifat nasional (2009-2013) menjadi lebih fokus kepada pendekatan regional (2015-2020), dimana APTERR menjadi mekanisme utama dalam manajemen krisis pangan akut kawasan. Hal ini menjadikan rencana kegiatan SPA-FS menjadi lebih terfokus dan jelas, yaitu penguatan mekanisme APTERR. Dalam kasus dimana terjadi kelangkaan pasokan atau stok pangan, mekanisme ini terbukti cukup efektif untuk menjadi pilihan negara-negara kawasan. Namun mengingat persoalan pangan kini bukan lagi semata persoalan pasokan, melainkan juga dapat disebabkan karena persoalan volatilitas harga seperti krisis pangan 2007, menjadi pertanyaan apakah APTERR memiliki kemampuan untuk mengatasi kasus serupa itu. Selain itu apakah ASEAN akan benar-benar memiliki memiliki komitmen terhadap APTERR, mengingat pengalaman cadangan beras sebelumnya.

peranan petani dalam kerangka keamanan pangan ASEAN

ASEAN adalah organisasi regional yang masih sangat bersifat *state-centric*, dimana keputusan tertinggi berada di dalam ASEAN *Summit* yang merupakan pertemuan di tingkat para kepala negara ASEAN. Forum ini bertemu dua kali dalam setahun untuk bermusyawarah, menyediakan panduan kebijakan, dan mengambil keputusan terkait realisasi sasaran-sasaran ASEAN, masalah yang berhubungan dengan kepentingan negara anggota, dan semua isu yang disampaikan oleh *ASEAN Coordinating Council, ASEAN Community Council, dan ASEAN Sectoral Ministrial Bodies* (ASEAN Charter). Di dalam ASEAN Charter, sebagai konstitusi ASEAN,

tidak tergambar secara jelas bagaimana peran aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi ini. *ASEAN Cordinating Council*, yang berfungsi mengkoordinasikan bahan persiapan *ASEAN Summit* serta implementasi hasilnya, berisikan para pejabat pemerintah. Begitu pula dengan *ASEAN Community Council* dan *ASEAN Sectoral Ministrial Bodies*. Singkatnya *Charter* ini kelihatannya gagal merumuskan ASEAN yang *people-centered*.

Hal ini tentu saja berimplikasi pada kebijakan keamanan pangan kawasan ASEAN yang juga terlihat melupakan aktor paling kunci dalam isu ini yaitu petani. Melihat kerangka AIFS dan SPA-FS (2015-2020), tidak terlihat satu pun dari lima komponen, sembilan *strategic thrust*, 18 *output*, 51 *activity* yang menggambarkan upaya untuk memperkuat peran petani dalam konteks keamanan pangan regional. Kata "petani" dalam kerangka program SPA-FS hanya muncul empat kali, yaitu:

> artikel 2.1.3 …*impact assessment of contract growing on small-scale farmers….*
>
> *artikel 4.1.3 Promote cooperation between NARS, IARCS, private sector, and farmer organizations…*
>
> *artikel 4.1.7 Expand and promote farmers' knowledge….*
>
> *artikel 5.1.1 Prepare roadmaps for demand-oriented agri-based and food regional value chains involving organizations of small-scale farmers…*

Bandingkan dengan kemunculan kata "industri" sebanyak 6 kali dalam program ini.

Hal ini memperlihatkan bahwa dalam kerangka tersebut petani seolah-olah hanya merupakan objek dan aset yang tidak memiliki peran baik dalam menentukan nasib mereka sendiri apalagi pada skala menentukan kebijakan di level regional. AIFS dan SPA-FS tidak berupaya memperkuat kemampuan petani secara institusional untuk turut menyusun kebijakan yang jelas-jelas akan mempengaruhi nasib mereka. Dengan demikian bertolak belakanglah program ini dengan tujuannya sendiri "memastikan keamanan pangan dan nutrisi jangka panjang serta kehidupan petani di kawasan ASEAN".

Figur 3 Persentase Petani ASEAN

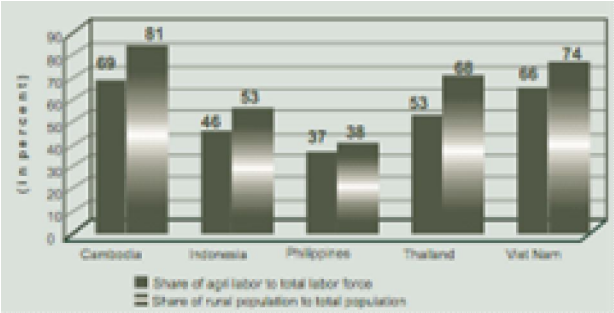

Sumber: AFA diolah dari ASEAN Database

Ironis bahwa dalam kajian yang dilakukan oleh *ASEAN Farmers' Association*(AFA), banyak petani ASEAN mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan perdagangan di negaranya. Serta banyak pula di antara mereka yang tidak mengetahui mengenai World Trade Organization, AFTA, dan kebijakan perdagangan (Cabungcal-Cabiles, 2009, p. 7). Ironis karena karena proporsi petani di negara-negara ASEAN yang cukup signifikan namun tidak memiliki kekuatan politik (lihat figur 3).

D. Kerangka Keamanan Pangan Regional Uni Eropa

Ketika *European Economic Community (EEC)* menetapkan Common Agricultural Policy (CAP) sebagai kerangka keamanan pangannya di tahun 1962, ini menandai awal kesadaran mereka tentang arti penting koordinasi pangan pada tingkat kawasan. Tujuan awal CAP adalah: (1)meningkatkan produktivitas pertanian; (b)memastikan standar hidup yang layak bagi komunitas pertanian; (c)menstabilkan pasar; (d)menjamin ketersediaan pasokan pangan; (e)menjamin harga pasokan tersebut terjangkau oleh masyarakat (A. Massot, 2015).

Dua mekanisme utama digunakan untuk mencapai target ini. Pertama, EEC menetapkan "harga patokan" bersama untuk setiap harga komoditas pertanian utama. Guna menjaga harga patokan ini agar tidak jatuh, setiap produk pangan impor akan dikenakan tarif. Kedua, bila harga komoditas di dalam komunitas tersebut jatuh di

bawah “harga intervensi”, yang biasanya 20 persen di bawah harga patokam, maka badan intervensi pangan nasional akan membeli komoditas tersebut dari pasar sehingga harga akan kembali stabil. Persoalannya adalah biaya yang dikeluarkan untuk CAP sangatlah besar. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, CAP menghabiskan hampir dua pertiga anggaran *Europeran Community* (EC) yang dipungut dari para pembayar pajak. Di samping itu kebijakan ini juga menyebabkan konsumen EC membayar harga lebih mahal dari yang seharusnya (Stead).

Sebagai dampak dari kebijakan harga ini, petani Eropa terdorong untuk meningkatkan produksi yang pada akhirnya jauh melampaui kebutuhan konsumen di pasar EC. EC terpaksa membeli surplus yang sangat besar ini dan menjualnya dengan harga di bawah harga pasaran dunia. EC kemudian mendorong para petaninya untuk mengekspor produk mereka dengan memberikan subsidi ekspor. Sayangnya dampak lain yang muncul adalah timbulnya kerusakan lingkungan akibat para petani EC terdorong untuk meningkatkan produksi dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia. Di samping itu hanya 20 persen petani besar saja yang menikmati 80 persen dana CAP ini. Di luar EC muncul perang dagang dari sesama negara maju dan juga negara berkembang sebagai dampak dari tarif dan subsidi CAP EC (Stead).

Upaya reformasi radikal muncul ditahun 1968 untuk menekan kelebihan produksi dan beban biaya proteksi pertanian CAP. Ditahun 1968 misalnya sempat muncul usulan *Mansholt Plan* yang mendorong diberikannya insentif finansial bagi separuh populasi pertanian agar mau meninggalkan profesi petaninya dan untuk mengalihfungsikan lima juta hektar tanah pertaniannya. Namun gagasan ini gagal karena kuatnya lobi-lobi pertanian. Meski demikian upaya-upaya pembatasan produksi, biasanya melalui kuota, mulai dilakukan di era 1980-an (Stead).

Pada tahun 1992, komplain terhadap CAP memuncak dalam Uruguay *Round* sehingga memunculkan apa yang disebut *MacSharry Reforms*. Reformasi ini merupakan kompromi antara kebijakan lama dengan yang upaya reformasi. Beberapa kebijakannya misalnya perpanjangan masa kuota susu dan pengurangan tingkat harga institusional untuk sereal dan daging sapi, namun sebagai kompensasinya petani diberikan subsidi untuk mengimbangi pendapatan mereka sebelum reformasi dengan

menghitung luas area tanam untuk tanaman spesifik atau jumlah hewan per-kepala. Kebijakan ini semacam insentif bagi petani untuk mengurangi produksinya. Dalam model kebijakan ini terjadi pergeseran dari model 'dukungan pasar' menjadi 'dukungan kepada produser'. Pendanaan juga disediakan untuk pembangunan daerah pedesaan dan bagi petani yang ingin melaksanakan paraktek pertanian ramah lingkungan. Kebijakan ini kemudian menjadi model bagi apa yang disebut dua pilar CAP, yaitu (Cantore et al., 2011): (1)dukungan subsidi bagi petani dan pasar; dan (2)dukungan untuk isu lingkungan dan pembangunan pedesaan.

Pada tahun 2003 reformasi besar-besaran berikutnya dilakukan, setelah adanya tekanan dari para anggota baru Uni Eropa (EU) yang memiliki indsutri pertanian besar dan negara-negara anggota WTO dalam *Doha Round*. Reformasi ini disebut sebagai *Fischler Reforms,* memperkenalkan apa yang disebut sebagai *Single Farm Payment* menggantikan model sebelumnya yang menghitung luas area tanam untuk tanaman tertentu atau jumlah hewan. Dalam subsidi model baru ini subsidi diklaim berdasarkan perubahan skala atau tipe produksi pertanian. Dengan demikian petani EU harus membuat keputusan memproduksi apa berdasarkan permintaan pasar dan biaya produksi. Kebijakan tersebut diharapkan akan mengurangi distorsi terhadap pasar internasional. Namun untuk menerima subsidi ini petani diharuskan memenuhi persyaratan dengan standar yang tinggi seperti perlindungan lingkungan, keselamatan pangan, dan kesejahteraan hewan. Kebijakan ini sering disebut dengan istilah "*decoupling*" atau melepaskan pembayaran subsidi dari kaitan produksi pertanian tertentu. Di dalam kebijakan Single Farm Payment pembayaran dilakukan atas kelayakan penanaman atau perawatan sesuai standar *Good Agriculture and Land Environmental Condition*. Kebijakan ini memungkinkan fleksibilitas petani untuk menanam sesuai permintaan pasar atau bahkan mereka tidak perlu menanam apapun selama mereka dapat memelihara tanah mereka sesuai dengan standar lingkungan EU. Terhadap kedua pilihan tersebut petani EU tetap mendapatkan subsidi (Viaggi et al., 2010).

Pada tahun 2008 EU mengeluarkan kebijakan reformasi lagi yang disebut *Health Check* guna memperkuat reformasi 2003. Dalam *Health Check* reformasi

dilakukan untuk meneruskan kebijakan reformasi sebelumnya dan secara bertahap melepaskan kuota pertanian, terutama produk susu (Cantore et al., 2011).

Secara historis perkembangan CAP dapat dilihat pada tabel di bawah. Di sini dapat dilihat pergeseran paradigma secara cerdas yang dilakukan oleh EU untuk menyesuaikan CAP mereka terhadap tantangan internal maupun eksternal. Namun pada dasarnya dukungan mereka terhadap pertanian tidak pernah berubah. Pergeseran itu dimulai dari awalnya (1962) menekankan kepada keamanan pangan, kemudian setelah 1992 bergeser kepada kekompetitifan, lalu diawal 2000an masuk ke persoalan lingkungan, dan setelah 2003 memberikan penekanan kepada kebijakan efisiensi pasar dan juga penggunaan anggaran.

Figur 4

Kini, sebagai hasil dari reformasi 2013, CAP menekankan pada tiga dimensi, yaitu: (1)*market support*, yaitu penggunaan sejumlah instrumen untuk mengantisipasi berbagai persoalan pada pasar; (2)*income support*, subsidi yang diberikan kepada petani, tidak hanya untuk basic income bagi mereka namun juga terkait dengan pelestarian lingkungan; dan (3)*rural development*, kebijakan kawasan dan nasional guna pembangunan wilayah pedesaan. Untuk pembiayaannya, pada program *market support* dan *income support* (pilar 1) sumbernya berasal dari anggaran EU, sedangkan

rural development (pilar 2) akan berasal program multi-tahun-an dan dibiayai oleh para anggota EU. Anggaran CAP adalah 40 persen dari keseluruhan anggaran EU. Meski demikian EU mengklaim bahwa dalam 30 tahun persentase ini terus menurun dari 75 persen menjadi 30 persen. Pada tahun 2014 anggaran CAP adalah 58 milyar euro ("The Eu's Common Agricultural Policy (Cap): For Our Food, For Our Countryside, For Our Environment," 2014).

Kebijakan Perdagangan Pertanian Uni Eropa

Pada tahun 2000-an EU mengklaim bahwa mereka adalah importir terbesar dunia untuk produk pertaninan negara berkembang. Lebih besar dibandingkan Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang digabungkan. Di bawah kebijakan '*everything but arms*', EU memberikan akses pasar bebas kepada semua negara dalam kategori *least-developed countries* (LDC). Tidak ada negara maju lain yang memberikan keterbukaan, komitmen, dan akses pasar bagi negara berkembang sebesar itu ("The Common Agricultural Policy: A story to be continued," 2012).

Countries	Impor tahun 2001	Ranking
Uni Eropa	37.671	1
Amerika Serikat	24.412	2
Jepang	12.365	3
Kanada	2.304	4
Australia	945	5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1113_en.htm*(Source: UN – Comtrade)*

Tabel 3 Impor Negara Maju Dari Negara Berkembang

Benarkah demikian? sebagian dari klaim tersebut benar. Namun secara strategi kebijakan itu bukan tanpa tujuan yang menguntungkan. Bagi EU perdagangan dunia adalah penggerak utama kemakmuran mereka. EU telah menjadi sangat terintegrasi ke dalam pasar global yang ruang lingkupnya mencakup perdagangan barang, jasa, kekayaan intelektual, dan penanaman modal asing. Strategi perdagangan EU bertujuan mendamaikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kohesi sosial

dan perlindungan lingkungan. Ke-28 negara anggota Uni Eropa (EU) memiliki sebuah pasar tunggal dan perbatasan eksternal tunggal yang merupakan kekuatan perdagangan yang besar di dunia. Secara bersama-sama, ke-28 negara anggota Uni Eropa menguasai lebih dari 20 persen produk domestik bruto dunia dan 19 persen perdagangan dunia (EEAS, 2012). Walaupun hampir 75% dari semua perdagangan pertanian EU dilakukan intra-regional, namun tidak dapat dihindari EU tetap membutuhkan pasar eksternal. Sebagai akibat dari adanya kritik bahwa proteksi pertaniannya menjadi penyebab hilangnya keuntungan negara-negara berkembang, maka EU membuka pasar pertaniannya (European Commission, 2003).

Rata-rata dunia untuk tarif produk pertanian berdasarkan *Most Favoured Nations* (MFN) adalah 15 persen. Jauh lebih tinggi dari produk manufaktur yang sekitar 4,1 persen. Untuk Uni Eropa rata-rata tarif MFN untuk impor pertanian adalah bervariasi antara 30-50 persen. Itulah sebabnya sangat penting bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan fasilitas preferensi perdagangan agar dapat masuk pasar EU. Di bawah mekanisme *General System of Preferences* (GSP) EU berupaya memberikan kemudahan ekspor pertanian ke EU bagi negara-negara berkembang. Skema lama EU memberikan kelayakan bagi 176 negara untuk mendapat fasilitas ini, yaitu (Meijerink dan Achterbosch, 2013, pp. 28-35):

1. GSP standar: mengurangi tarif bagi 66% *tariff lines* untuk 111 negara
2. GSP+ : ditetapkan tahun 2006, tarif 0% untuk 66% *tariff lines* bagi 16 negara karena memenuhi persyaratan khusus EU, seperti lingkungan, HAM, dsb.
3. *Everything But Arms* (EBA): ditetapkan tahun 2001 tarif nol persen bagi semua negara *Least-Developed Countries* (LDC).
4. Pada tahun 2012 EU mengadopsi GSP baru yang mengurangi jumlah negara penerima menjadi hanya 89 negara, 49 di antaranya adalah LDC.

Meskipun EU telah membuka sebagai akses pasarnya, terutama bagi negara-negara berkembang, Namun yang tidak boleh dilupakan adalah ia masih mempertahankan subsidi pertanian, intervensi pasar, maupun kebijakan subsidi

ekspornya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah (Meijerink dan Achterbosch, 2013, pp. 21-27): (1) Direct Transfer atau subsidi langsung untuk petani; (2)Market Measures untuk mempertahankan stabilitas pasar sebagai jaring pengaman bagi petani; (3)Intervensi harga untuk menjaga stabilitas harga; dan (4)subsidi ekspor, meskipun kebijakan ini telah banyak dikurangi oleh EU, namun untuk beberapa produk masih tetap digunakan. Figur 5 di bawah ini menunjukkan bahwa EU tetap melindungi pertaniannya terutama dengan berbagai skema domestik seperti ini. Bahkan kecenderungannya menunjukkan peningkatan.

Figur 5 Perkembangan Subsidi Pertanian EU

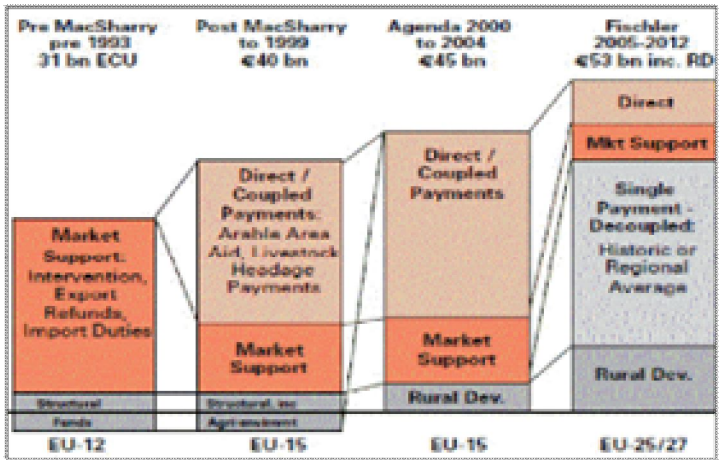

Source: HSBC Forward Planning 2010 (www.hsbc.co.uk/), also summarised in RASE (2010)

Manajemen Krisis Pangan Uni Eropa

Dalam kaitannya dengan penanganan krisis pangan Uni Eropa kelihatannya memiliki dua mekanisme yang berbeda, yaitu: terkait gejolak di pasar dan terkait bantuan darurat. Untuk yang pertama yaitu gejolak di pasar, baik karena faktor harga maupun pasokan, penanganannya berada di bawah CAP. Sedangkan yang kedua terkait bantuan darurat, seperti karena bencana atau perang, ditangani oleh *EU Humanitarian Aid and Civil Protection Department* (ECHO).

Dalam penanganan mengenai gejolak di pasar pertanian EU, maka *Single Common MarketOrganisation* (sCMO) menyediakan kerangka legal bagi instrumen

pasar untuk pasar domestik, perdagangan dengan pihak ketiga, dan peraturan mengenai kompetisi. Tindakan yang dapat dilakukan terdiri dari: (1)bantuan penyimpanan swasta, merupakan lapis pertama dari manajemen pasar; (2)intervensi publik, misalnya untuk sereal, beras, susu bubuk, mentega, dan daging, dimana harga intervensi, mekanisme, dan sebagainya berbeda untuk tiap produk; (3)tindakan intervensi khusus dan tindakan khusus, dapat diterapkan baik oleh negara anggota atau pada level regional untuk kondisi khusus, seperti kenaikan atau penurunan harga secara tiba-tiba; dan (4)kuota produksi untuk menjaga stabilitas harga terutama dari kasus kelebihan produksi. Inti dari kebijakan ini adalah menjaga stabilitas pasar komoditas dan pendapatan petani. Tindakan lain yang dapat dilakukan terutama dalam kasus jatuhnya harga di bawah level tertentu adalah otoritas publik dari negara anggota mengintervensi pasar dengan membeli kelebihan surplus. Stok ini kemudian dapat disimpan hingga harga kembali normal, diekspor ke negara ketiga, atau dibuang dengan cara lain (Meijerink dan Achterbosch, 2013, p. 24).

Sedangkan dalam kasus kondisi darurat kekurangan pangan, baik karena bencana, perang, atau sebab-sebab lain, maka panduannya disediakan oleh ECHO. Bentuk bantuannya keamanan pangannya kemudian dibedakan antara bantuan darurat kemanusiaan dengan bantuan keamanan pangan untuk pembangunan di negara berkembang. Untuk bantuan darurat kemanusiaan, sasarannya adalah (The Eu Explained: Humanitarian Aid And Civil Protection, 2014): (1)menjaga ketersediaan, akses, dan konsumsi makanan yang memadai, aman, bergizi bagi populasi yang terkena krisis kemanusiaan guna menghindari kematian, kekurangan gizi, dan dampak-dampak yang mengancam kelangsungan hidup; (2)untuk melindungi kehidupan dari ancaman krisis, menjaga kerusakan pada saat produksi dan pemasaran pangan, dan menjaga kondisi dari ketergantungan; (3)untuk memperkuat kapasitas sistem bantuan kemanusiaan internasional, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyediaan bantuan pangan.

Anggaran EU untuk tindakan kemanusiaan dan perlindungan hak-hak sipil adalah sekitar 1 milyar Euro pertahun. Di samping anggaran rutin tersebut, dana Cadangan Bantuan Darurat EU juga dapat digunakan untuk mengatasi peristiwa yang

tiba-tiba atau krisis besar baik di wilayah EU maupun di luar EU. Saat ini ECHO menyediakan dana bantuan bagi sekitar 200 organisasi partner di luar EU (ECHO).

Peran Petani Dalam Kerangka Keamanan Pangan EU

Mekanisme pengambilan keputusan dalam CAP menurut *Treaty of Rome* ditentukan oleh: proposal dari *Commission* (eksekutif), pendapat dari *European Parliament* (wakil rakyat EU) dan, bila diperlukan *European Economic and Social Committee*, serta *Council of Minister* (menteri pertanian yang mewakili kepentingan negaranya). Pengambilan keputusan di antara ketiga pihak tadi akan diambil secara *qualified majority*. Sedangkan dalam tahapan pelaksanaannya, CAP yang telah diputuskan akan diimplementasikan oleh *Commission* dengan pengawasan dari *Parliament* dan *Council*. Hal ini secara jelas dicantumkan dalam *Treaty of Lisbon* selaku *Treaty of EU* dan *Treaty of The Functioning of EU*(Albert Massot, 2015).

Selain itu, organisasi profesional dalam EU, diwakili oleh *Committee of Professional Agricultural Organisations* (COPA) dan *General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union* (COGECA), selalu terlibat secara tidak langsung dalam pengambilan keputusan ini melalui *advisory committee*. Akhir-akhir ini bahkan ruang lingkup dari proses konsultasi tersebut diperluas dengan memfasilitasi kelompok dialog warga untuk membantu *Commission* dalam melaksanakan CAP (Albert Massot, 2015).

Lobi petani di dalam EU diwakili oleh dua organisasi besar tersebut yang memiliki sekretariat bersama, yaitu COPA dan COGECA. COPA di bentuk pada tahun 1958 sebagai organisasi pertama yang merepresentasikan para petani di EC. Satu tahun kemudian, pada 1957, kelompok kerja sama di dalam EC membentuk organisasi payung yang bernama COGECA. Sekretariat bersama COPA-COGECA berlokasi di Brussels. Pada awalnya COPA beranggotakan 13 organisasi petani, namun kini ada 60 organisasi dari EU dan 36 organisasi partner dari negara Eropa non-EU. Keanggotaan COPA yang begitu luas membuatnya diakui sebagai organisasi yang mewakili para petani di EU oleh otoritas EU. Sasaran dari COPA adalah: (1)memeriksa semua masalah terkait CAP; (2)mewakili kepentingan sektor pertanian

secara keseluruhan; (3)mencari solusi bersama; dan (4)menjaga dan membangun hubungan dengan otoritas EU serta organisasi representatif lainnya. COPA dipimpin oleh Presidium yang bertemu secara rutin dengan *Commissioner for Agricultural and Rural Development* dan *European Parliament.* Sedangkan pertemuan dengan *Council of Minister* dapat bersifat langsung atau tidak langsung (COPA, 2015).

COGECA merupakan organisasi kerjasama petani UE. Pada saat awal dibentuk tahun 1958 ia hanya beranggotakan 6 organisasi anggota, namun kini ada 35 organisasi anggota, 4 afiliasi, dan 36 anggota partner. Sasaran kerja COGECA adalah: (1)mewakili kepentingan pertanian, kehutanan, dan perikanan EU; (2)mempengaruhi keputusan dan melakukan lobi; (3)mempromosikan peran dari kerjasama pertanian; (4)menyediakan platform bagi organisasi anggota untuk melakukan diskusi politik dan bisnis; (5)mencari solusi bersama; (6)mengkoordinasikan jejaring anggota: (7)melakukan diskusi dengan COPA dan organisasi representasi lain; dan (8)melakukan kajian kepentingan. Sama seperti COPA, COGECA juga dipimpin oleh Presidium (COGECA, 2015).

Dari sini terlihat mengapa petani EU memiliki kemampuan untuk mempengaruhi CAP dengan sangat kuat. Keterwakilan secara institusional membuat mereka memiliki kemampuan bukan hanya lobi tapi juga memaksa otoritas regional untuk menerima posisi dan kepentingan para petani. Sebagai dampaknya meskipun telah beberapa kali mengalami reformasi, namun CAP tetap menjadi kebijakan yang hingga kini memberikan proteksi bagi petani EU.

E. Kesimpulan

Dari uraian mengenai kedua model kerangka keamanan di atas maka dapat diambil perbandingan sebagai berikut:

Dimensi	Kerangka Keamanan Pangan ASEAN	Kerangka Keamanan Pangan EU

Dimensi	Kerangka Keamanan Pangan ASEAN	Kerangka Keamanan Pangan EU
Kebijakan Perdagangan dan Pertanian	-Dalam kerangka ASEAN, perdagangan pangan dari sejak awal memang telah didorong untuk liberal -Namun pendekatan perdagangan regional hanya menekankan kepada pembukaan akses pasar dan tidak menyentuh subsidi domestik atau subsidi ekspor, sehingga masih mungkin disiasati -kebijakan perdagangan lebih berorientasi ke dalam, keluar kawasan sangat longgar	-Kebijakan dan perdagangan pertanian dari sejak awal diproteksi -harmonisasi kebijakan intra dan ekstra regional sangat kuat -Selalu berusaha menyiasati berbagai tantangan dan kritik yang muncul terkait proteksi, namun EU tidak pernah meninggalkan kepentingan petaninya
Manajemen Krisis Pangan	-Penangan krisis pangan berfokus kepada pengadaan cadangan beras kawasan semata -Tidak memiliki mekanisme untuk mengatasi krisis volatilitas harga -punya pengalaman kegagalan dalam mekanisme regional untuk krisis. Rasa memiliki dan kebersamaan relatif lemah	-Memiliki mekanisme intervensi pasar untuk krisis harga dan pasokan -Memiliki pula mekanisme bantuan pangan darurat yang secara kelembagaan sangat mumpuni -telah terbukti komitmen dan implementasinya
Peran Petani	-Petani tidak memiliki peran dalam pengambilan kebijakan pangan AFTA -Petani tidak memiliki kelembagaan yang kuat -Petani hanya sebagai objek dan tidak	-Dari sejak awal petani telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi CAP -Kelembagaan petani EU sangat kuat -Petani selalu punya posisi dalam setiap

Dimensi	Kerangka Keamanan Pangan ASEAN	Kerangka Keamanan Pangan EU
	memiliki kemampuan atau celah untuk menekan otoritas kawasan	kebijakan pangan kawasan dan memiliki kemampuan lobi serta menekan

Berangkat dari kesimpulan tersebut maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk model keamanan pangan regional adalah:

1. Petani merupakan sentral dari kebijakan keamanan pangan baik nasional maupun regional. Untuk itu secara kelembagaan maupun peran ia harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pangan nasional maupun regional.
2. Kebijakan keamanan pangan dan perdagangan pangan regional harus memberikan manfaat tidak hanya kepada konsumen, namun juga petani selaku produsen. Tanpa manfaat ini seharus nya kebijakan tersebut dievaluasi kembali
3. Kebijakan perdagangan pertanian kawasan seharusnya diarahkan kepada daya saing keluar dan ini dilakukan secara terpadu
4. Kebijakan perdagangan pertanian kawasan bila tidak dapat dihindari untuk melakukan pembukaan pasar, pemerintah nasional harus tetap melindungi petani dengan berbagai dukungan domestik. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kemampuan teknik pertanian serta organisasional petani, dan meningkatkan kemampuan daya saing petani.
5. Manajemen krisis pangan kawasan harus memiliki mekanisme dan kemampuan tidak hanya dalam mengatasi ketiadaan pasokan pangan namun juga volatilitas harga.

DAFTAR PUSTAKA

Agreement On The ASEAN Food Security Reserve. (1979). ASEAN.

AMAF. (2015). from http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/overview-12

APTERR. APTERR History. from http://www.apterr.org/index.php/aboutapterr/milestones.html

. APTERR Mechanism. from http://www.apterr.org/index.php/aboutapterr/how-we-work/apterr-mechanism.html#tier-3

ASEAN. (2015). ASEAN Free Trade Area. from http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/publications-2

ASEAN Charter. ASEAN.

. ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry Major Achievements. from http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-cooperation-in-food-agriculture-and-forestry-major-achievements

. ASEAN Cooperation in Food, Agriculture and Forestry Major Achievements. (2009). from http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/item/asean-cooperation-in-food-agriculture-and-forestry-major-achievements

Briones, Roehlano M. (2011). Regional Cooperation for Food Security: The Case of Emergency Rice Reserves in the ASEAN Plus Three: ASEAN Development Bank.

Cabungcal-Cabiles, Minerva. (2009). Farmers Regional Trade Agenda: Farmers Collective Voice on Trade in The ASEAN Region. Quezon: AFA.

Campesina, La Via. La Via Campesina. Retrieved 20-9, 2012, from http://viacampesina.org/en/index.php/organisation-mainmenu-44

Cantore, Nicola; Kennan, Jane; dan Page, Sheila. (2011). CAP reform and development: Introduction, reform options and suggestions for further research: Overseas Development Institute.

COGECA. (2015). from http://www.copa-cogeca.be/CogecaHistory.aspx

Commission, European. Historical Development of CAP.

---. (2010). Food Facility: Interim report on Measures Taken. Brussels: European Commission.

. The common agricultural policy (CAP) and the Treaty. from http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html

. The common agricultural policy (CAP) and the Treaty. (2015). from http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html

. The Common Agricultural Policy: A story to be continued. (2012): European Commission.

COPA. (2015). from http://www.copa-cogeca.be/CopaHistory.aspx

Demeke, Mulat; Spinelli, Adriano; Croce, Stefania; dan Valentina Pernechele, Eugenia Stefanelli, Areej Jafari, Guendalina Pangrazio, Giovanni Carrasco, Barthelemy Lanos, Camille Roux. (2014). *Food and agriculture policy decisions: Trends, emerging issues and policy alignments since the 2007/08 food security crisis*. Rome: FAO.

ECHO. Funding For Humanitarian Aid. from http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-humanitarian-aid_en

EEAS. (2012). from http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/trade_profiles/index_id.htm

The Eu Explained: Humanitarian Aid And Civil Protection. (2014). European Commission.

. The Eu's Common Agricultural Policy (Cap): For Our Food, For Our Countryside, For Our Environment. (2014): European Commission.

. Extra-EU trade in agricultural goods. Retrieved from Statistics Explained. (2015). from http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Extra-EU_trade_in_agricultural_goods

FAO. (2011). Indonesia and FAO Achievements and success stories. Roma: FAO.

---. (2015). The State of Food Insecurity in the World. Rome: FAO.

Fawcett, Louise. (2005). Regionalisme From Historical Perspective. London: Pluto Press.

Fort, Bertrand; dan Webber, Douglas. (2006). Regional Integration in East Asia and Europe Convergence or divergence? London: Routeledge.

Kim, Min-hyung. (2011). Theorizing ASEAN Integration. *Asian Perspective, 35*, 407-435.

Lee, Richard. (2007). Food Security and Food Sovereignty. Center for Rural Economy Discussion Paper Series (University of NewCastle Upon Tyne, 11.

Mangabat, Minda C.; dan Natividad, Antonette P. (2007). Agricultural Trade In The Asean Region: Challenges For Enhancing Cooperation And Integration. *The International Journal of Economic Policy Studies, 2*(4).

Marzeda, Katarzyna; dan Mlynarska. (2011). The Application of the Multi-Level Governance Model outside the EU- context – The Case of Food Security: European Diversity and Autonomy Papers.

Massot, A. (2015).

Massot, Albert. (2015). The common agricultural policy (CAP) and the Treaty. from http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.1.html

Matthews, alan. (2003). Regional Integration and Food Security in Developing Countries. Rome: FAO.

Meijerink, Gerdien; dan Achterbosch, Thom. (2013). CAP and EU Trade Policy Reform: Assessing impact on developing countries. Hague: LEI Wageningen UR.

Murray, Philomena. (2010). Comparative Regional Integration In The Eu And East Asia: Moving Beyond Integration Snobbery. *International Politics, vol. 47, 3-4*, 308-323.

Paarlberg, Robert L. (2002). Governance and Food Security in an Age of Globalization: IFPRI.

Pasadilla, Gloria O. (2006). Preferential Trading Agreements and Agricultural Liberalization in East and Southeast Asia (Vol. Working Paper Series, No. 11 , April 2006): Asia-Pacific Research and Training Network on Trade.

Shaw, D. John. (2007). World Food Security: A History Since 1945. New York: Palgrave Macmillan.

Stead, David R. Common Agricultural Policy. from https://eh.net/encyclopedia/common-agricultural-policy/

Teng, Paul; dan Morales, Maria C.S. (2014). 'Food Security Robustness': A Driver of Enhanced Regional Cooperation? Singapore: RSIS.

Trethewie, Sally. (2010). The ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: Cooperation, Commitment, and Contradiction. Singapore: Centre for Non-Traditional Security (NTS) Studies S. Rajaratnam School of International Studies.

UNESCAP. (2009). Sustainable Agriculture and Food Security in Asia and The Pacific. Bangkok: UNESCAP.

Viaggi, Davide; Raggi, Meri; Gallerani, Vittorio; dan Paloma, Sergio Gomez y. (2010). The Impact of EU Common Agricultural Policy Decoupling on Farm Households: Income vs Investment Effects. *Intereconomics*.

Mengapa identitas kolektif penting bagi ASEAN? Strategi riset konstruktivis dalam menyediakan rekomendasi kebijakan terkait masalah ketiadaan peran ASEAN dalam isu Rohingya

Mohamad Rosyidin
Universitas Diponegoro

Abstrak

Perdebatan mengenai jurang antara teori dan praktik dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung sejak lama. Tulisan ini ingin menguji apakah teori konstruktivis mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam memandu kebijakan negara-negara di ASEAN. Absennya peran ASEAN dalam menangani kasus pengungsi Rohingya pasca konflik sektarian di Myanmar menimbulkan pertanyaan apa yang terjadi dengan organisasi regional itu. Kendati telah memiliki perangkat institusional seperti Piagam ASEAN 2008, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2009, dan Deklarasi HAM 2012, ASEAN sama sekali tidak turun tangan mengatasi persoalan pengungsi Rohingya. Tulisan ini berposisi bahwa konstruktivis bermanfaat bagi kebijakan dalam dua fungsi; diagnosis dan strategis. Konstruktivis berhasil mendiagnosis bahwa absennya peran ASEAN disebabkan oleh ketiadaan identitas kolektif yang mengikat negara-negara anggota. Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki 'komitmen institusi' terhadap institusi-institusi yang mereka buat sendiri. Lebih lanjut, konstruktivis juga memberikan saran strategis bahwa negara-negara anggota ASEAN seharusnya memprioritaskan pada proses membangun identitas kolektif terlebih dahulu sebelum membuat banyak institusi yang pada akhirnya sia-sia belaka.

Kata-kata kunci: teori dan praktik, ASEAN, konstruktivis, identitas kolektif

Pendahuluan

Salah satu isu yang mengemuka terkait krisis pengungsi Rohingya adalah absennya keterlibatan ASEAN dalam menangani permasalahan tersebut. Sebagai sebuah organisasi kerjasama regional ASEAN semestinya melakukan langkah-langkah untuk mengatasi gelombang pengungsi Rohingya yang memasuki perbatasan negara-negara anggota. ASEAN bertanggung jawab karena sudah menyatakan berkomitmen terhadap isu HAM di kawasan seperti tercantum dalam Piagam ASEAN, pendirian AICHR, dan deklarasi-deklarasi yang berisi dukungan terhadap HAM. Namun alih-alih bertanggung jawab, penanganan pengungsi Rohingya justru diambil alih oleh negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Jangankan melakukan tindakan nyata, ASEAN bahkan tidak membahas isu Rohingya dalam KTT ASEAN ke-26 pada 26-28 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah mengatakan bahwa, "Masalah-masalah ekonomi lebih mendesak dibanding isu-isu politik dan keamanan."[244] Upaya penanganan pengungsi tidak melalui upaya kolektif melainkan upaya individual negara-negara anggota. Tanpa bermaksud berlebihan dan *over-generalization*, fakta ini menunjukkan untuk ke sekian kalinya ASEAN gagal dalam menciptakan stabilitas keamanan dan penghormatan terhadap HAM.

Ketiadaan peran ASEAN dalam isu Rohingya menuntut penjelasan sekaligus solusi pemecahan dari sudut pandang akademik ilmu Hubungan Internasional (HI). Studi kasus kegagalan ASEAN sebagai organisasi multilateral setidaknya dapat dibaca dari tiga pendekatan; realis, institusionalis, dan English School. Kaum realis sangat skeptis terhadap segala bentuk kerjasama yang ditujukan untuk kepentingan bersama, apalagi berhubungan dengan isu-isu normatif seperti hak asasi manusia.[245] Hubungan antar negara murni dilandasi oleh logika mementingkan diri sendiri

[244] "KTT ASEAN di Malaysia fokus pada isu ekonomi," *Pikiran Rakyat*, 26 April 2015, http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2015/04/26/325013/ktt-asean-di-malaysia-fokus-pada-isu-ekonomi, [diakses pada 3 Oktober 2015].

[245] Lihat misalnya J. Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions," *International Security*, Vol. 19, No. 3 (1994/1995), pp. 5-49 dan H. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5th edn (New York: Alfred Knopf, 1978).

sehingga realis tidak mampu menyediakan solusi terhadap ASEAN. Berbeda dengan realis, kaum (neoliberal) institusionalis justru memandang kehadiran lembaga multilateral sebagai solusi untuk meminimalisir efek struktur anarki yang membuat hubungan antar negara senantiasa diliputi rasa curiga dan ketidakpercayaan.[246] Kaum institusionalis akan beranggapan bahwa kegagalan ASEAN disebabkan oleh tidak adanya rezim yang memfasilitasi kerjasama antar negara. Klaim ini didukung bukti bahwa hingga kini ASEAN belum memiliki rezim yang secara khusus membahas masalah pengungsi dan pencari suaka. Di lingkup Asia Tenggara, isu-isu tersebut dimasukkan ke dalam isu HAM. Mengacu pada argumentasi ini, kaum institusionalis akan memberikan solusi berupa perlunya ASEAN memiliki rezim yang secara khusus menangani masalah-masalah pengungsi dan pencari suaka. Sementara itu, penganut English School melihat kegagalan ASEAN merupakan akibat dari norma non-intervensi dalam rangka menjaga kepentingan nasional masing-masing negara anggota.[247] Sama halnya dengan realis yang menjunjung tinggi konsep kedaulatan dan kepentingan nasional, English School lemah dalam menyumbangkan strategi bagi bangunan ASEAN.

Tidak ada satupun dari ketiga pendekatan tersebut yang mampu menyediakan kerangka strategis untuk membuat ASEAN menjadi organisasi yang dapat diandalkan dalam menyikapi isu-isu keamanan regional. Realis dan English School cenderung mendukung kepasifan ASEAN. Saran liberal institusionalis tampak masuk akal di sini, namun membentuk rezim pengungsi berpotensi mendapat resistensi dari semua anggota. Myanmar sebagai negara yang dituduh bertanggung jawab dalam kasus Rohingya jelas menolak. Ditambah lagi kecenderungan ASEAN yang gemar menyepakati suatu kerjasama tetapi enggan mengimplementasikannya. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mencoba melihat kegagalan ASEAN dalam isu Rohingya dari

---

[246] Lihat misalnya R. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (New Jersey: Princeton University Press, 1984); R. Axelrod and R. Keohane, "Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions," *World Politics*, Vol. 38, No. 1 (1985), pp. 226-254; R. Keohane and L. Martin, "The Promise of Institutionalist Theory," *International Security*, Vol. 20, No. 1 (1995), pp. 39-51.

[247] Analisis ASEAN dari kacamata English School misalnya S. Narine, "The English School and ASEAN," *The Pacific Review*, Vol. 19, No. 2 (2006), pp. 199-218.

perspektif konstruktivis. Di kalangan akademik HI, konstruktivis cenderung dipandang sebagai perspektif yang hanya berorientasi pada akumulasi pengetahuan (*science for science*) dan kurang menaruh minat pada implikasi teori bagi kebijakan (*science for practice*).[248]

Kontras dengan pendapat itu, tulisan ini berargumen bahwa konstruktivis dapat menjembatani jurang antara teori dan praktik. Menggunakan studi kasus kegagalan ASEAN dalam menyikapi isu Rohingya, konstruktivis tidak hanya mampu menganalisis secara lebih tajam dibandingkan teori-teori lain untuk menjawab mengapa ASEAN seolah-olah tidak berdaya ketika menghadapi fenomena gelombang pengungsi dari Myanmar tetapi juga mampu menyediakan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis tersebut. Dengan kata lain, konstruktivis tidak hanya mampu *mendiagnosis* permasalahan fundamental yang melemahkan efektivitas ASEAN tetapi juga mampu memberikan *strategi* tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu.

Tulisan ini akan terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama mendiskusikan jurang pemisah antara teori dan praktik sebagai salah satu lokus perdebatan akademik studi HI. Adanya jurang pemisah ini disebabkan oleh fakta bahwa para teoritisi HI terlalu nyaman berada di 'menara gading' tanpa mau 'turun ke bawah'. Para teoritisi HI sibuk berkarya untuk kepentingan mereka sendiri tetapi tidak berupaya membuat bagaimana teori-teori mereka bisa bermanfaat bagi pembuat keputusan. Bagian kedua mendiskusikan klaim bahwa konstruktivisme merupakan perspektif yang bermanfaat bagi kebijakan. Klaim ini didukung oleh argumen bahwa konstruktivis menaruh perhatian pada dimensi-dimensi gagasan yang tak kasat mata sebagai struktur yang menjelaskan perilaku aktor-aktor internasional, termasuk organisasi internasional. Konstruktivis percaya bahwa dengan merekayasa dimensi-dimensi non-material ini hubungan internasional bisa dikendalikan. Bagian ketiga adalah studi kasus kegagalan ASEAN dalam isu Rohingya sebagai alat uji apakah

[248] M. Rosyidin, *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2015, hlm. 195.

konstruktivis benar-benar mampu membuktikan janjinya. Bagian ini menganalisis dua hal; kemampuan diagnosis konstruktivis untuk mengidentifikasi masalah dan kemampuan strategis untuk menawarkan solusi praktis. Bagian keempat adalah kesimpulan.

Menjembatani jurang antara teori dan praktik dalam studi HI

Perdebatan antara teori dan praktik ada di semua sektor kehidupan, terlebih lagi kehidupan akademik. Banyak orang mencela aktivitas akademisi yang dianggap membuang-buang waktu mempelajari gagasan abstrak serta menyombongkan segi praktis dari suatu ilmu. Ironisnya, pola pikir picik ini tidak hanya menyerang orang-orang yang berada di luar lingkaran akademik tetapi juga kalangan akademisi itu sendiri. Masih banyak akademisi dari bidang ilmu eksakta yang mengunggulkan ilmu mereka karena dianggap lebih praktikal dibanding ilmu-ilmu sosial yang banyak diisi dengan debat kusir tak berkesudahan. Filsuf ilmu pengetahuan punya nasehat untuk tipe orang-orang seperti ini: "Mereka, para ahli yang berada di bawah tempurung disiplin keilmuannya masing-masing, sebaiknya tengadah ke bintang-bintang dan tercengang: Lho, kok masih ada langit lain di luar tempurung kita."[249] Pola pikir ini ternyata turut menjangkiti akademisi HI sehingga ada lelucon yang mengatakan HI adalah singkatan dari 'Hebat Imajinasinya' karena banyak memikirkan hal-hal abstrak di luar sana. Jika dibiarkan, "agak berbahaya kalau kita berasumsi bahwa teori-teori yang lebih berorientasi terhadap tindakan lebih berguna ketimbang teori-teori yang filosofis sifatnya."[250]

Pandangan bahwa studi HI adalah disiplin ilmu yang mengawang-awang adalah pandangan yang menyesatkan. Jika kita tengok sejarah kelahirannya, studi HI justru sangat berorientasi praktis. Berdirinya Departemen Politik Internasional di

[249] J. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, cet. 16, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 20.
[250] J. Garnett, *Commonsense dan Teori Politik Internasional*, terj. Marcedes Marbun, Jakarta: Pustaka Abardin, 1985, hlm. 52-53.

Aberyswyth University pada 1919 dimaksudkan "*More than just the study of the causes and conditions of war and peace, the study of international relations was, from the outset, guided by a purpose: to develop theories aimed at preventing or eliminating war*."[251] Tidak hanya di Inggris, usaha untuk membuat studi HI bermanfaat untuk kepentingan praktis mengalami perkembangan pesat pada era Perang Dingin ketika Amerika Serikat menggiatkan kegiatan riset untuk mendukung kebijakan luar negerinya. Studi HI di Amerika Serikat berkembang pesat akibat 'berkah imigran', yakni kedatangan ilmuwan-ilmuwan Eropa korban NAZI Jerman seperti Hans Morgenthau, Arnold Wolfers, Klaus Knorr, Karl Deutsch, Ernst Haas, George Liska, Henry Kissinger, Zbiegniew Brzezinski, di antara banyak ilmuwan lainnya. Mereka menawarkan pemikiran yang dibutuhkan pembuat kebijakan luar negeri Amerika dalam rangka konfrontasi melawan Uni Soviet.[252] Hasilnya, banyak bermunculan lembaga-lembaga riset seperti RAND Corporation, CSIS, Brookings Institution, Council of Foreign Relations, dan masih banyak lainnya secara rutin melakukan publikasi sebagai bahan rekomendasi kebijakan luar negeri Amerika. Munculnya fenomena *think-tank* itu mencerminkan usaha menjembatani antara teori dan praktik.

Meskipun usaha-usaha untuk membuat studi HI dapat dipakai untuk kepentingan negara, namun masih saja ada jurang pemisah antara teoritisi dan praktisi. Alexander George, ilmuwan HI Amerika yang bekerja di RAND Corporation dan terkenal dengan karya-karyanya seputar diplomasi dan kebijakan luar negeri, mengakui bahwa jurang antara teoritisi dan praktisi bersumber dari tujuan profesional yang pada dasarnya berbeda; teoritisi ingin mengembangkan pengetahuan sementara praktisi ingin mempengaruhi dan mengendalikan peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi.[253] Perbedaan antara 'dunia pemikiran dan dunia tindakan'[254] juga tak

---

[251] R. Devetak, "An introduction to International Relations: the origins and changing agendas of a discipline," dalam R. Devetak, A. Burke, and J. George (eds.), *An Introduction to International Relations*, 2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 2012, hlm. 11.
[252] S. Hoffman, "An American Social Science: International Relations," *Daedalus*, Vol. 106, No. 3 (1977), hlm. 47-48.
[253] A. George, "The Two Cultures of Academia and Policy-Making: Bridging the Gap," *Political Psychology*, Vol. 15, No. 1 (1994), hlm. 149.

terjembatani lantaran perbedaan persepsi tentang waktu. Bagi akademisi waktu tidak terlalu penting, yang penting adalah kualitasnya. Sebaliknya, bagi praktisi waktu sangat penting sehingga tidak peduli seberapa buruk kualitas suatu laporan kalau disodorkan tepat waktu akan dianggap lebih baik daripada yang datang terlambat.[255]

Perdebatan teori *versus* praktik sebetulnya bukan hal baru dalam ranah disiplin HI. Jauh sebelumnya, teoritisi realis terkemuka Hans Morgenthau sudah menyadari masalah ini. Dalam bukunya yang terbit tahun 1946, Morgenthau mengatakan bahwa "Politik itu seni dan bukan ilmu, sehingga apa yang diperlukan untuk kemajuannya bukanlah rasionalitas ilmuwan melainkan kebajikan dan kekuatan moral seorang negarawan."[256] Dunia politik, termasuk hubungan internasional, menuntut keahlian praktis ketimbang keahlian teoritis tingkat tinggi. Teori yang ideal, lanjut Morgenthau, adalah teori yang tidak hanya berguna untuk memahami dunia tetapi mampu memandu kebijakan.[257] Konsekuensinya, teori-teori HI dituntut mampu menawarkan strategi kebijakan bagi pembuat keputusan.

Untuk memahami tingkat kemanfaatan suatu teori, perlu ada pemisahan antara teori yang relevan bagi kebijakan (*policy-relevant*) dan teori yang berorientasi pada kebijakan (*policy-orientated*).[258] Teori jenis yang pertama merupakan teori yang berguna dalam meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena. Dikatakan 'relevan' karena pengetahuan ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk memahami suatu persoalan sebelum dilakukan tindakan. Alhasil manfaat teori jenis ini bersifat tak langsung. Teori-teori HI kebanyakan termasuk ke dalam teori yang relevan untuk kebijakan. Teori jenis kedua merupakan teori yang memang ditujukan untuk memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah. Teori-teori yang masuk kategori studi strategis adalah contoh teori jenis ini karena lebih bersifat praktis

---

[254] T. Mahnken, "Bridging the Gap Between the World of Ideas and Action," *Orbis*, Vol. 54, No.1 (2008), pp. 4-13.
[255] J. Nye, "Bridging the Gap Between Theory and Policy," *Political Psychology*, Vol. 29, No. 4 (2008), hlm. 598.
[256] H. Morgenthau, *Scientific Man vs Power Politics*, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1946, hlm. 10.
[257] H. Morgenthau, *Dilemmas of Politics*, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1958, hlm. 40.
[258] W. Fox seperti dikutip dalam J. Garnett, *op.cit*., hlm. 53.

ketimbang analitis. Teori penangkalan misalnya, dikembangkan RAND Corporation untuk menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat sejak Perang Dingin sampai dengan pasca 11 September.[259]

Dalam kategorisasi yang kurang lebih sama, Joseph Lepgold dan Miroslav Nincic membedakan antara teori instrumental dan teori kontekstual.[260] Teori instrumental sama pengertiannya dengan teori yang berorientasi kebijakan, sedangkan teori kontekstual sama pengertiannya dengan teori yang relevan bagi kebijakan. Tentang tipologi yang kedua ini menarik dibahas lebih lanjut. Teori kontekstual diartikan sebagai teori yang menyediakan dasar bagi pelaksanaan kebijakan. Ilustrasinya begini, jika kita menginginkan hasil dari tindakan kita sesuai dengan harapan kita maka kita perlu mengetahui apa saja syarat-syarat supaya tindakan kita itu berhasil. Misalnya, kita ingin supaya bantuan sosial yang kita berikan kepada warga kurang mampu tidak mendorong budaya konsumerisme di kalangan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal itu, kita perlu memahami bagaimana pola pikir, kebiasaan, dan budaya masyarakat sasaran. Jadi sebelum tindakan dilakukan faktor-faktor itu wajib diketahui. Dalam konteks kebijakan luar negeri, pemerintah perlu mempertimbangkan faktor apa saja yang dapat menunjang keberhasilan suatu diplomasi. Kebijakan sanksi ekonomi misalnya, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat ketergantungan suatu negara terhadap impor dari negara lain, karakter pemerintah dan masyarakatnya, serta bagaimana pola hubungan internasionalnya supaya sanksi bisa efektif menekan negara tersebut. Pemahaman tentang faktor-faktor ini menjadi ranah kajian akademis.

Stephen Walt menyebutkan empat syarat supaya sebuah teori bermanfaat bagi kebijakan.[261] Syarat pertama adalah kemampuan mendiagnosis. Diagnosis di sini yaitu kemampuan suatu teori untuk mengidentifikasi masalah atau sebab-musabab

---

[259] A. Long, *Deterrence: From Cold War to Long War*, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008.
[260] J. Lepgold and M. Nincic, *Beyond the Ivory Tower: International Relations Theory and the Issue of Policy Relevance*, New York: Columbia University Press, 2001.
[261] S. Walt, "The Relationship Between Theory and Policy in International Relations," *Annual Review of Political Science*, Vol. 8 (2005), pp. 23-48.

terjadinya suatu fenomena. Mengapa konflik etnis terjadi? Mengapa negara tetap melakukan kejahatan perang sekalipun sudah ada hukum perang internasional? Mengapa sanksi ekonomi gagal? Mengapa demokrasi dapat mendorong perdamaian? adalah tipikal pertanyaan-pertanyaan analitis yang menuntut penjelasan secara teoritis. Cara kerjanya persis seperti dokter yang mendiagnosis penyakit pasien untuk selanjutnya dilakukan penanganan. Syarat kedua adalah kemampuan memprediksi. Syarat ini berhubungan dengan syarat yang pertama. Kemampuan prediktif suatu teori berguna sebagai strategi antisipatif terhadap kemungkinan suatu kejadian. Jika dikatakan bahwa kejahatan perang terjadi karena faktor budaya organisasi militer, maka pemerintah perlu melakukan upaya meminimalisasi budaya militer untuk mencegah pelanggaran personil militer terhadap hukum perang. Syarat ketiga adalah kemampuan preskriptif atau menyediakan rekomendasi kebijakan. Syarat ini sudah dijelaskan sebelumnya seperti dalam contoh teori penangkalan. Syarat keempat adalah kemampuan evaluatif yakni kemampuan suatu teori dipakai untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Misalnya kegagalan sanksi ekonomi bisa jadi karena pemerintah tidak mempertimbangkan faktor-faktor domestik negara target. Secara keseluruhan, keempat syarat ini umumnya ada dalam teori-teori HI.

Konstruktivisme sebagai teori yang bermanfaat bagi kebijakan

Salah satu proponen konstruktivisme, Emanuel Adler pernah mengatakan bahwa, “konstruktivisme masih perlu menjembatani antara metafisika dan teori sosial, antara riset dan metodologi, serta antara teori dan praktik.”[262] Tugas menjembatani antara teori dan praktik dalam lokus pemikiran konstruktivisme tidak bisa dikatakan mudah. Hal ini dikarenakan konstruktivis menyibukkan diri dengan perdebatan seputar teori dan metateori. Beberapa isu yang memicu debat panas antara lain posisi epistemologis konstruktivisme yang berada di tengah-tengah antara

[262] E. Adler seperti dikutip dalam M. Rosyidin, ‘The Power of Ideas,’ *op.cit*., hlm. 211.

rasionalisme dan interpretivisme,[263] hubungan antara konstruktivisme dan Teori Kritis,[264] penggunaan metodologi positivisme dalam riset-riset konstruktivis,[265] dukungan terhadap aliran interpretivisme dalam riset-riset konstruktivis,[266] pro-kontra mengenai terciptanya 'Negara Dunia',[267] dan serangan terhadap konstruktivisme aliran moderat.[268] Perdebatan yang mengarah pada bagaimana kontribusi konstruktivisme bagi kepentingan kebijakan dapat dikatakan cukup langka. Satu-satunya kontribusi konstruktivisme di tataran praktis adalah mengusung visi-misi etis tentang hubungan internasional yang ideal.[269]

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, suatu teori yang bermanfaat bagi kebijakan setidaknya harus memiliki dua syarat yakni kemampuan mendiagnosis masalah dan memberikan resep kebijakan. Supaya memenuhi syarat tersebut konstruktivisme harus memiliki seperangkat asumsi dasar yang bisa dipakai untuk memahami politik dunia. Terdapat banyak pendapat tentang asumsi dasar kontruktivisme, namun secara garis besar konstruktivisme mengandung dua premis utama, yaitu: pertama, faktor non-material lebih penting daripada faktor material, dan kedua, tindakan aktor-aktor internasional ditentukan oleh faktor non-material tersebut

---

[263] E. Adler, 'Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics,' *European Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 3 (1997), pp. 319-363.
[264] R. Price and C. Reus-Smit, 'Dangerous Liaison? Critical International Theory and Constructivism,' *European Journal of International Relations*, Vol. 4, No. 3 (1998), pp. 259-294.
[265] D. Dessler, 'Constructivism Within A Positivist Social Science,' *Review of International Studies*, Vol. 25, No. 1 (1999), pp. 123-137 dan D. Desler and J. Owen, 'Constructivism and the Problem of Explanation,' *Perspectives on Politics*, Vol. 3, No. 3 (2005), pp. 597-610.
[266] S. Guzzini, 'A Reconstruction of Constructivism in International Relations,' *European Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2 (2000), pp. 147-182.
[267] A. Wendt, 'Why A World State is Inevitable,' *European Journal of International Relations*, Vol. 9, No. 4 (2003), pp. 491-542 dan V. Shannon, 'Wendt's Violations of the Constructivist Project: Agency and Why A World State is *Not* Inevitable,' *European Journal of International Relations*, Vol. 11, No. 4 (2005), pp. 581-587.
[268] S. Guzzini and A. Leander (eds.), *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and Its Critics*, London: Routledge, 2006.
[269] Karya konstruktivis yang mendiskusikan isu ini misalnya R. Price, *Moral Limit and Possibility in World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

ketimbang faktor material.[270] Faktor non-material yang dimaksud adalah gagasan yang membentuk identitas dan norma serta bahasa yang membentuk realitas.

Kaum rasionalis – realis dan liberal – menaruh kepercayaan pada faktor-faktor material yang dapat dihitung seperti postur pertahanan, sumberdaya, populasi, geografi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Kontras dengan pandangan itu, konstruktivis melihat hal-hal yang bersifat material tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi tindakan negara. Dengan kata lain, makna di balik faktor-faktor itulah yang menentukan. Misalnya, 5 buah senjata nuklir Korea Utara cukup menakutkan bagi Amerika Serikat ketimbang 500 buah senjata nuklir Inggris karena Korea Utara adalah 'musuh' Amerika Serikat sedangkan Inggris adalah 'teman'.[271] Contoh lain misalnya, Irak diinvasi pasukan koalisi pada 2003 bukan semata-mata lantaran secara obyektif mengancam Barat dengan kepemilikan senjata pemusnah massal melainkan karena dilabeli sebagai 'negara jahat' dan 'pendukung terorisme'. Makna realitas obyektif bagi aktor yang terlibat di dalamnya menentukan tindakan. Politik internasional bukan tentang apa yang tampak di kehidupan nyata tetapi apa yang dipikirkan oleh aktor.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa faktor-faktor non-material semacam identitas, norma, dan bahasa dapat dipakai untuk mendiagnosis masalah sebagaimana faktor-faktor material. Sederhananya, jika kaum rasionalis menggunakan faktor material untuk mendiagnosis masalah maka konstruktivis menggunakan faktor non-material. Jika benar bahwa kultur pembuatan kebijakan memprioritaskan pada segi kepraktisan dari suatu teori kita bisa dengan mudah berasumsi bahwa analisis kontruktivis terlalu rumit dan abstrak bagi mereka. Penjelasan rasionalis yang lebih konkret saja jarang diterima, apalagi penjelasan konstruktivis yang metafisis. Lantas, apakah konstruktivis mampu menyodorkan resep kebijakan bagi pemerintah? Jawabannya adalah mampu. Sebagaimana telah

[270] Lihat A. Wendt, *Social Theory of International Politics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, hlm. 1.
[271] Lihat A. Wendt, 'Constructing International Politics,' *International Security*, Vol. 20, No. 1 (1995), hlm. 73.

dikatakan di bagian sebelumnya, kemampuan diagnosis dan preskriptif merupakan dua sisi mata koin. Artinya, jika suatu teori mampu mendiagnosis masalah sudah barang tentu teori tersebut mampu menawarkan resep bagi tindakan konkret.

Kita akan menguji argumen ini dengan mengambil salah satu variabel konstruktivis yakni identitas. Identitas dalam pengertian kontruktivis adalah "...*a property of intentional actors that generates motivational and behavioral dispositions*."[272] Pengaruh identitas ini sangat sentral sekali dalam hubungan antar negara karena identitas akan mendefinisikan apa yang dikehendaki oleh aktor tersebut sehingga menentukan kebijakan apa yang akan diambilnya. Singkatnya, identitas menentukan kepentingan nasional, sementara kepentingan nasional menentukan kebijakan negara. Jadi, kepentingan nasional bukan sesuatu yang sudah jadi dan tinggal dikejar seperti klaim kaum rasionalis.

Kita bisa mengambil contoh peran identitas dalam politik luar negeri Indonesia. Salah satu identitas Indonesia adalah 'pencipta perdamaian' (*peace-maker*). Identitas tersebut membentuk kepentingan nasional Indonesia untuk 'menciptakan dan menjaga perdamaian dunia' sesuai dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 Alinea-4. Kepentingan ini pada gilirannya mendorong pemerintah Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda ke sejumlah kawasan yang dilanda konflik. Contoh lain misalnya keputusan Indonesia abstain dalam sidang di DK PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Iran atas program nuklirnya. Kebijakan itu dipandang konstruktivis mencerminkan identitas Indonesia sebagai 'negara muslim terbesar di dunia' sehingga menciptakan kepentingan untuk 'menjaga solidaritas dengan negara sesama muslim' yakni Iran. Jadi, anggapan bahwa pemikiran konstruktivis terlalu kompleks mengabaikan fakta bahwa faktor-faktor ideasional tersebut dekat dengan pengalaman sehari-hari.

Identitas bukanlah konsep monolitik yang bermakna tunggal. Ada banyak macam identitas. Konstruktivis membuat tipologi identitas ini dalam empat macam

[272] A. Wendt, 'Social Theory of International Politics,' *op.cit*., hlm. 224.

yaitu identitas korporat, tipe, peran, dan kolektif.[273] Identitas korporat adalah atribut-atribut yang menjadi ciri khas suatu negara. Misalnya, Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan. Identitas tipe merujuk pada atribut yang mendefinisikan sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Sistem politik dan pemerintahan dianggap mempengaruhi corak kebijakan luar negeri. Contohnya, Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar di dunia, Arab Saudi adalah negara monarki, Iran adalah negara teokrasi, dan seterusnya. Identitas peran adalah posisi sosial suatu negara. Identitas ini berkaitan dengan kewajiban atau tanggung jawab negara di dalam sistem internasional. Misalnya peran Indonesia sebagai 'pencipta perdamaian', peran Jepang sebagai 'stabilisator' di Asia Timur, peran Australia sebagai 'sherrif' di Asia Pasifik, peran India sebagai 'jembatan antar peradaban', dan seterusnya. Identitas terakhir yaitu identitas kolektif yakni kesamaan pikiran dan perasaan antara satu negara dan negara lain. Meskipun pendukung teori realis percaya bahwa negara bersifat mementingkan diri sendiri, namun kenyataannya banyak negara yang memiliki rasa senasib-sepenanggungan yang menciptakan solidaritas di antara mereka. Ambil contoh hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan Inggris yang dari waktu ke waktu cenderung sepaham satu sama lain dalam menyikapi isu-isu internasional. Pembicaraan selanjutnya akan memfokuskan pada identitas kolektif ini.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai konsep identitas kolektif kita perlu memahami proses terbentuknya identitas. Konstruktivis percaya bahwa identitas adalah entitas yang terkonstruk secara sosial. Artinya, ada proses interaksi sosial yang mendahului keberadaan suatu identitas. Menggunakan teori '*looking glass self*' yang dipinjam dari sosiolog Charles Horton Cooley, Wendt berasumsi bahwa identitas terbentuk melalui serangkaian proses aksi dan reaksi yang melibatkan interpretasi antar aktor. Bayangkan negara A dan B yang saling berinteraksi. Tindakan negara A merupakan *gesture* yang akan ditafsirkan oleh negara B untuk kemudian diberi respon. Selanjutnya, respon negara B merupakan *gesture* yang akan ditafsirkan oleh

[273] A. Wendt, *ibid.*,

negara A. Begitu seterusnya sehingga akan terbentuk intersubyektivitas antara negara A dan B.[274]

Intersubyektivitas pada akhirnya akan menciptakan konsepsi identitas antar kedua negara. Misalnya, bisa jadi negara B menafsirkan *gesture* negara A sebagai sikap permusuhan, begitupun sebaliknya negara A merespon kembali reaksi negara B sebagai sikap permusuhan sehingga terciptalah identitas 'musuh' antara A dan B. Bagaimana jika salah satu pihak menafsirkannya secara berbeda? Jawabannya adalah tidak akan tercipta intersubyektivitas, yang ada hanya subyektivitas negara A dan B. Konstruktivis memiliki pandangan bahwa istilah *inter*-subyektivitas mensyaratkan adanya pemahaman bersama (*shared knowledge*) antar aktor yang terlibat interaksi. Tanpa intersubyektivitas tidak ada interaksi yang bermakna alias absurd. Sebagai contoh, sebuah perkawinan tidak akan bermakna apabila pihak laki-laki tidak menganggap pihak perempuan sebagai 'istri' dan pihak perempuan tidak menganggap pihak laki-laki sebagai 'suami'. Jadi, identitas menentukan suatu hubungan dan hubungan tersebut menentukan identitas (*mutually constituted*).

Identitas kolektif terbentuk melalui proses-proses sosial tersebut. Kesamaan pandangan dan perasaan yang berimplikasi pada kesamaan kepentingan dan tindakan mensyaratkan adanya prakondisi-prakondisi yang memungkinkan hal itu terjadi. Wendt menyebutkan empat variabel yang mendorong terciptanya identitas kolektif antar negara yang Ia sebut sebagai '*master variables*' yakni interdependensi, kesamaan persepsi, homogenisasi, dan prinsip pengekangan diri.[275] Interdependensi merupakan hubungan saling ketergantungan antar negara. Saling ketergantungan ini umumnya merujuk pada hubungan ekonomi dan perdagangan timbal-balik antar negara. Semakin tinggi tingkat interdependensi semakin besar kolektivitas yang terbentuk antar negara. Hampir sama dengan interdependensi, kesamaan persepsi

[274] Lihat A. Wendt, 'Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics,' *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (1992), hlm. 404-406.
[275] A. Wendt, 'Social Theory of International Politics,' *op.cit*., hlm. 343. Lihat juga A. Wendt, 'Collective Identity Formation and the International State,' *The American Political Science Review*, Vol. 88, No. 2 (1994), pp. 384-396.

berkaitan dengan intersubyektivitas antar negara yang mempersepsikan satu sama lain sebagai 'teman'. Seperti halnya sebuah aliansi, nasib satu negara akan ditentukan oleh nasib aliansi secara keseluruhan; "satu untuk semua, semua untuk satu". Kesamaan persepsi akan terlihat manakala suatu kelompok negara dihadapkan pada ancaman; apakah mereka akan mempersepsikannya sebagai ancaman bersama atau ancaman individu. Faktor homogenisasi merujuk pada kesamaan identitas personal antar negara seperti ideologi, karakteristik sosial-budaya yang identik, geografi, dan sebagainya. Negara yang memiliki kemiripan dalam aspek-aspek tersebut cenderung lebih mudah menjalin solidaritas ketimbang dengan negara yang berbeda. Faktor terakhir adalah prinsip menahan diri, yakni sikap tidak mudah menggunakan cara-cara paksaan dan kekerasan bila menghadapi suatu masalah. Menahan diri menjadi variabel penentu apakah ketiga variabel sebelumnya mampu diubah menjadi identitas kolektif. Dengan kata lain, interdependensi, kesamaan persepsi, dan homogenitas merupakan *necessary but not sufficient condition*, sementara pengekangan diri hadir sebagai variabel yang menentukan apakah hubungan antar negara dilandasi oleh identitas kolektif atau bukan.

Implikasi teori proses terbentuknya identitas kolektif ini adalah bahwa hubungan antar negara bersifat dinamis. Dua atau lebih negara yang tadinya saling bermusuhan bisa berubah bersahabat dan sebaliknya. Kuncinya adalah bagaimana negara-negara tersebut mengubah dari hubungan permusuhan menjadi hubungan persahabatan melalui proses-proses yang sudah disebutkan di atas. Untuk melakukannya, keempat syarat di atas wajib ada. Interdependensi saja tidak bisa secara otomatis membuat negara bersahabat. Tengoklah hubungan antara Cina dan Jepang yang selalu diliputi nuansa permusuhan sekalipun keduanya terlibat hubungan saling ketergantungan dalam hal ekonomi dan perdagangan. Tidak usah jauh-jauh, hubungan Indonesia-Malaysia juga kerap diwarnai konflik meskipun fakta menunjukkan tingkat interdependensi keduanya cukup tinggi. Bahkan, kedua negara adalah bangsa serumpun yang secara kultural identik.

Untuk mewujudkan identitas kolektif, negara-negara perlu melakukan strategi-strategi yang meliputi keempat syarat di atas. Mungkin syarat yang relatif sulit diubah hanya homogenitas mengingat hal ini merupakan faktor bawaan alih-alih terbentuk karena proses. Tetapi homogenitas antar negara tidak hanya diindikasikan oleh kesamaan intrinsik yang relatif statis misalnya komposisi etnis, tetapi juga ciri-ciri lain semisal kesamaan ideologi. Jepang dan Australia boleh berbeda secara kultural namun merasa homogen karena sama-sama menganut sistem demokrasi liberal. Konstruktivis dengan demikian menyarankan supaya negara-negara memfokuskan pada proses ini karena identitas kolektif merupakan pondasi bagi terciptanya hubungan internasional yang kondusif. Jadi identitas kolektif bukanlah tujuan melainkan sarana untuk mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan dalam dunia yang anarki.

Konstruktivisme dalam praktik: Strategi membangun identitas kolektif ASEAN

KTT ASEAN ke-26 di Kuala Lumpur Malaysia yang digelar pada 26-28 April 2015 lalu sebenarnya merupakan momentum yang tepat untuk membahas isu Rohingya. Sejak lama isu Rohingya telah menjadi semacam ‘duri dalam daging’ bagi stabilitas kawasan. Oleh sebab itu, KTT ASEAN adalah saat yang ditunggu-tunggu semua pihak untuk membuktikan apakah ASEAN mampu menangani masalah tersebut atau tidak. Namun pada kenyataanya isu Rohingya tidak disinggung sama sekali. KTT ASEAN terkesan mengecilkan arti penting isu keamanan non-tradisional seperti pengungsi. Pertemuan itu hanya menghasilkan deklarasi-deklarasi kerjasama antar anggota terutama dalam isu ekonomi. Salah satu deklarasi yang dihasilkan dalam pertemuan itu adalah ‘*Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centered ASEAN*’. Deklarasi ini mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk memperkuat tiga pilar Komunitas Keamanan ASEAN yakni pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. Ironisnya, kendati deklarasi itu menyatakan bahwa negara-negara anggota “*...need to confront challenges to*

promote peace, security and prosperity in Southeast Asia," tetapi dalam naskah deklarasi tersebut tidak satupun ditemukan kata 'pengungsi'.[276] Padahal isu pengungsi bersinggungan langsung dengan pilar politik-keamanan.

Apatisme ASEAN terhadap isu Rohingya jelas menunjukkan kegagalan organisasi tersebut sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas keamanan kawasan sebagaimana cita-cita Komunitas ASEAN. M. Choirul Anam, Wakil Direktur Human Rights Working Group (HRWG) menilai bahwa, "Kegagalan untuk mengambil tindakan yang bertanggungjawab akan isu Rohingya ini akan merusak proses pembangunan Komunitas ASEAN di tahun 2015."[277] Deklarasi Kuala Lumpur hasil KTT ASEAN ke-26 yang bertajuk '*people-oriented*' dan '*people-centered*' kontras dengan kenyataan yang ada. Dengan label seperti itu, ASEAN semestinya mampu menunjukkan komitmennya terhadap nyawa manusia di kawasan. Faktanya, label tersebut tak lebih dari slogan semata. Apatisme ASEAN, dengan demikian, justru merepresentasikan 'tragedi moral' bagi lembaga itu.[278]

Sebenarnya berdasarkan kenyataan tidak dibahasnya isu Rohingya dalam KTT ASEAN saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ASEAN telah gagal sebagai organisasi regional. Tetapi argumentasi paling kuat bersumber dari dalam tubuh ASEAN sendiri. Terlepas dari fakta bahwa hingga kini ASEAN belum memiliki rezim khusus masalah pengungsi dan pencari suaka, ASEAN telah menunjukkan komitmennya terhadap isu HAM dalam Piagam ASEAN, dibentuknya AICHR, dan deklarasi HAM ASEAN. Piagam ASEAN tahun 2008 merupakan kerangka institusional yang menjadi pondasi terbentuknya Komunitas ASEAN 2015. Dalam naskah deklarasi itu terdapat komitmen negara-negara anggota untuk

[276] Lebih jelasnya lihat "Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centered ASEAN," http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/kuala-lumpur-declaration-on-a-people-oriented-people-centred-asean [diakses 7 Oktober 2015].
[277] "Kasus Rohingya bisa rusak komunitas ASEAN 2015," http://www.beritasatu.com/dunia/63683-kasus-rohingya-bisa-rusak-komunitas-asean-2015.html [diakses 7 Oktober 2015].
[278] M. Davies, "The Rohingya and regional failure," http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2015/05/16/the-rohingya-and-regional-failure/ [diakses 7 Oktober 2015].

"*...respect for and protection of human rights and fundamental freedom*."[279] Sebagai tindak lanjut komitmen ini, pada 2009 ASEAN membentuk lembaga khusus yang menangani isu HAM yakni ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR). AICHR merupakan "*The overarching body with a cross-cutting mandate that handles matters related to human rights cooperations with other ASEAN Bodies, external partners and stakeholders*."[280] Tujuan dibentuknya lembaga ini mencerminkan keinginan ASEAN untuk menciptakan "*...civilized and prosperous ASEAN community*."[281] Ketika isu Rohingya mengemuka, AICHR tidak dapat berbuat apa-apa sehingga salah seorang pengamat Barat mengeritik lembaga itu tak lebih dari 'macan ompong'.[282]

Titik kulminasi komitmen HAM ASEAN terjadi pada 2012 di Phnom Penh, Myanmar, ketika ASEAN mendeklarasikan Deklarasi HAM ASEAN. Sebenarnya agak ironis deklarasi itu dikumandangkan di negara yang sedang disorot dunia internasional akibat pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Namun terlepas dari hal itu, Deklarasi HAM ASEAN ini membuktikan ASEAN telah selangkah lebih maju sekaligus menunjukkan keseriusan ASEAN dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM. Relevansinya dengan kasus Rohingya bisa dilihat dari Pasal 28 di Deklarasi ini yang menyatakan bahwa: "*Every person has the right to an adequate standard of living for himself or herself and his or her family including: a. The right to adequate and affordable food, freedom from hunger and access to safe and nutritious food; b. The right to clothing; c. The right to adequate and affordable housing; d. The right to medical care and necessary social services; e. The right to safe drinking water and sanitation; f. The right to a safe, clean and sustainable environment*."[283] Meskipun cukup gamblang bahwa setiap orang harus dilindungi dan dijamin hak-haknya,

---

[279] ASEAN, *ASEAN Charter*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008, hlm. 2.
[280] ASEAN, *AICHR: What You Need To Know*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2009, hlm. 1.
[281] R. Nasution, 'Waiting for AICHR's optimal performance,' http://www.antaranews.com/en/news/1281435057/waiting-for-aichrs-optimal-performance [diakses 8 Oktober 2015].
[282] J. Bowen, 'Refugee crisis tests limits of Southeast Asian cooperation,' http://theglobalobservatory.org/2015/05/asean-rohingya-refugees-myanmar/ [diakses 7 Oktober 2015].
[283] 'ASEAN Human Rights Declaration,' http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration [diakses 8 Oktober 2015]

ASEAN tidak melakukan langkah konkret untuk membuktikannya. Deklarasi itu tampaknya hanya menjadi seruan bagi negara-negara anggota, bukan sebuah komitmen bersama. Jika tidak, ASEAN seharusnya sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Mengapa institusi-institusi HAM ASEAN seketika lumpuh dalam menyikapi isu Rohingya? Mengapa tidak ada upaya dari negara-negara anggota untuk membentuk rezim yang secara khusus menangani isu pengungsi dan pencari suaka? Premis dasar tulisan ini adalah ketiadaan identitas kolektif antar anggota ASEAN menyebabkan tidak adanya komitmen terhadap institusi yang mereka bangun sendiri. Konstruktivis percaya bahwa keberadaan identitas kolektif merupakan prakondisi bagi kerjasama-kerjasama yang lebih luas, sementara kerjasama-kerjasama itu pada gilirannya akan memperkokoh identitas kolektif antar anggota ASEAN. Jadi ada hubungan timbal-balik (*mutually constituted*) antara identitas kolektif dan praktik kerjasama antar negara anggota.

Identitas kolektif menciptakan solidaritas atau '*community-region*'[284] dimana aktor-aktor internasional di dalam sebuah kawasan memiliki kesamaan persepsi dan kepentingan sehingga melahirkan tindakan bersama. Tindakan kolektif inilah yang mencirikan 'logika komunitas', bukan 'logika anarki' yang cenderung berorientasi pada kepentingan diri sendiri.[285] Logika komunitas akan menuntun pada perilaku-perilaku yang disebut Walter Matlii sebagai 'komitmen institusi', yakni kemauan politik negara-negara anggota suatu organisasi untuk mengimplementasikan kewajiban-kewajiban dalam lembaga.[286] Sederhananya, supaya bisa memainkan perannya di kawasan ASEAN pertama-tama harus membangun identitas kolektif di antara hal-hal lainnya.

---

[284] E. Adler, *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations*, London: Routledge, 2005, hlm. 181.
[285] E. Adler and M. Barnett, 'Security communities in theoretical perspectives,' dalam E. Adler and M. Barnett (eds.), *Security Communities*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
[286] W. Matlii, *The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Kerangka analisis konstruktivis tentang proses terbentuknya identitas kolektif dapat dipakai sebagai 'peta jalan' ASEAN untuk membangun 'pondasi kerjasama' berjangka panjang. Seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, ada empat variabel wajib yakni interdependensi, kesamaan persepsi, homogenitas, dan prinsip pengekangan diri. Kita mulai dari variabel interdependensi terlebih dulu. Interdependensi antar anggota ASEAN terutama dalam hal ekonomi-perdagangan dapat dikatakan cukup tinggi. Indikator kuantitatif seperti jumlah volume perdagangan antar sesama anggota ASEAN hingga saat ini masih yang paling besar di kawasan.

Tabel di bawah ini menunjukkan 10 besar mitra dagang ASEAN dimana posisi pertama diduduki oleh negara-negara ASEAN sendiri, disusul oleh Cina, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal perdagangan, negara-negara ASEAN masih mengandalkan sesama anggota sebagai mitra dagang terpenting. Jadi, syarat interdependensi telah terpenuhi. ASEAN hanya perlu meningkatkan hubungan saling ketergantungan ini di masa yang akan datang.

Tabel 1. Sepuluh negara mitra dagang terpenting ASEAN

Table 20 ASEAN Statistics

Top ten ASEAN trade partner countries/regions, 2014[/p]

as of 17 June 2015

value in US$ million; share in percent

Trade partner country/region[1/]	Value			Share to total ASEAN trade		
	Exports	Imports	Total trade	Exports	Imports	Total trade
ASEAN	329,700.42	278,617.63	608,318.0	25.5	22.5	24.1
China	150,425.25	216,116.37	366,541.6	11.6	17.5	14.5
EU-28	132,484.05	115,847.68	248,331.7	10.2	9.4	9.8
Japan	120,248.92	108,827.27	229,076.2	9.3	8.8	9.1
USA	122,377.23	90,040.99	212,418.2	9.5	7.3	8.4
Korea, Republic of	51,659.07	79,814.77	131,473.8	4.0	6.5	5.2
Taiwan	39,543.73	68,841.91	108,385.6	3.1	5.6	4.3
Hong Kong	85,274.71	14,096.88	99,371.6	6.6	1.1	3.9
Australia	45,345.73	25,027.19	70,372.9	3.5	2.0	2.8
India	43,346.53	24,381.93	67,728.5	3.4	2.0	2.7
Total top ten trade partner countries	1,120,405.6	1,021,612.6	2,142,018.3	86.7	82.6	84.7
Others[2/]	172,228.0	214,671.2	386,899.2	13.3	17.4	15.3
Total	**1,292,633.6**	**1,236,283.8**	**2,528,917.4**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Source: ASEAN Merchandise Trade Statistics Database (compiled/computed from data submission, publications and/or websites of ASEAN Member States' national ASEAN Free Trade Area (AFTA) units, national statistics offices, customs departments/agencies, or central banks)

Notes

/p preliminary data

Some figures may not sum up to totals due to rounding off errors.
1/ identified/ranked based on share of total trade
2/ includes trade of all other countries and those that could not be attributed to specific countries

Sumber: 'Top ten ASEAN trade partner countries,' http://www.asean.org/images/2015/July/external_trade_statistic/table20_asof17June15.pdf [diakses 8 Oktober 2015]

Variabel kedua adalah kesamaan persepsi, terutama kesamaan persepsi dalam hal ancaman di kawasan. Di Asia Tenggara, kesamaan persepsi terhadap ancaman tampaknya masih belum terbentuk. Hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya rasa saling curiga antar anggota ASEAN menyangkut isu keamanan. Berbeda dengan era Perang Dingin ketika ASEAN pertama kali dibentuk, saat ini negara-negara anggota masih mempersepsi satu sama lain sebagai ancaman. Pada era Perang Dingin, ancaman ideologi komunisme mampu mengikat kesadaran negara-negara di kawasan untuk membangun *sense of solidarity*.[287] Pasca Perang Dingin, ASEAN memasukkan kejahatan transnasional sebagai ancaman bersama sehingga pada 1997 lahir Deklarasi tentang Kejahatan Transnasional. Kemudian menyusul peristiwa 11 September, terorisme merupakan ancaman bersama yang harus dihadapi secara kolektif oleh

[287] Lihat A. Acharya, 'Collective identity and conflict management in Southeast Asia,' dalam E. Adler and M. Barnett (eds.), *Security Communities*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Lihat juga ulasan lengkapnya dalam A. Acharya, *Constructing Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order*, London: Routledge, 2001.

ASEAN. Di samping mengancam stabilitas dan perdamaian dunia, ASEAN juga memandang terorisme sebagai "*a direct challenge to the attainment of peace, progress and prosperity of ASEAN and the realization of ASEAN Vision 2020*."[288]

Namun tampaknya persepsi terhadap ancaman bersama hanya terbatas pada ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional yang bersumber dari negara tetap tidak mengalami perubahan, bahkan kecenderungannya semakin meningkat. Buktinya, tensi keamanan di Laut Cina Selatan malah melemahkan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional. Pokok permasalahan yang dihadapi ASEAN dalam isu Laut Cina Selatan adalah mengenai keterlibatan Cina. Di Asia Tenggara ada dua negara yang lebih condong mendukung kehadiran Cina di kawasan yang disengketakan tersebut yakni Malaysia dan Brunei sementara dua negara yaitu Vietnam dan Filipina tegas menolak. Penolakan Filipina semakin memperkeruh keadaan karena secara otomatis mengundang intervensi Amerika Serikat sebagai negara sekutu.

Tidak hanya itu, ASEAN juga terbelah dalam hal manajemen konflik Laut Cina Selatan dimana ada yang meminta supaya Cina dilibatkan dalam perumusan Code of Conduct (CoC) sementara ada yang menolak. Menurut Rizal Sukma, kegagalan ASEAN menyatukan pendapat soal krisis Laut Cina Selatan "...akan melemahkan posisi dan memperburuk citra ASEAN."[289] Silang-pendapat dan insiden-insiden yang kerap mewarnai krisis di kawasan itu sampai memicu perlombaan senjata antar negara-negara ASEAN.[290] Situasi ini mencerminkan situasi

---

[288] S. Pushpanathan, 'ASEAN efforts to combat terrorism,' http://www.asean.org/resources/item/asean-efforts-to-combat-terrorism-by-spushpanathan [diakses 8 Oktober 2015]

[289] R. Sukma, 'ASEAN dan Sengketa Laut China Selatan,' http://internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.China.Selatan [diakses 8 Oktober 2015]

[290] Untuk analisis mengenai isu perlombaan senjata di ASEAN dan implikasinya terhadap upaya membangun Komunitas ASEAN lihat M. Rosyidin, 'ASEAN In(Security) Community? Arms Race and Collective Identity Building in Southeast Asia,' makalah disampaikan dalam *International Conference on ASEAN Studies* (ICONAS), "Inner and Outer Look of Southeast Asia in 2015: Championing ASEAN Community," Universitas Gadjah Mada, 1-2 Oktober 2014.

dilema keamanan yang cukup tinggi di kawasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ASEAN belum memiliki kesamaan persepsi terhadap ancaman tradisional.

Faktor ketiga adalah homogenitas yakni kesamaan unsur-unsur intrinsik antar negara yang berkontribusi terhadap kedekatan hubungan. Meskipun disatukan oleh pengalaman sejarah sebagai bekas jajahan,[291] namun negara-negara ASEAN masih lemah dalam hal komitmen masing-masing negara terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi. Mathew Davies berpendapat bahwa komitmen ASEAN terhadap nilai-nilai HAM ditandai dengan adanya jurang antara identitas dan tindakan ('*action-identity gap*').[292] Negara-negara ASEAN masih menggunakan pola pikir rasionalis bahwa norma hanya bermanfaat apabila dapat dipakai untuk meraih tujuan-tujuan politik. Hal inilah yang menjelaskan kenapa pelanggaran terhadap norma HAM masih kerap terjadi. Badan HAM PBB, Office of the High Commisioner for Human Rights (OHCHR) mencatat bahwa, "*Although Southeast Asia is one of the most ethnically diverse regions in the world, protection mechanisms are not in place to promote and protect the rights of minorities and indigenous peoples*."[293]

Sama halnya, ASEAN juga tidak memiliki kesamaan konsepsi tentang nilai-nilai demokrasi. Meskipun negara-negara ASEAN mulai mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk mengadakan even Bali Democracy Forum setiap tahun, akan tetapi ASEAN tidak memasukkan nilai-nilai liberal demokratik ke dalamnya. Hal ini mengakibatkan ASEAN tidak memiliki konsensus regional menyangkut substansi dari prinsip-prinsip bernegara secara demokratis, penghormatan terhadap supremasi hukum, dan perlindungan terhadap HAM.[294] Sehingga dapat disimpulkan bahwa

---

[291] A. Reid, *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
[292] M. Davies, 'ASEAN and Human Rights Norms: Constructivism, Rational Choice, and the Action-Identity Gap,' *International Relations of the Asia Pacific*, Vol. 13 (2013), pp. 207-231.
[293] 'Human rights context,' http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/SouthEastAsiaSummary0809.aspx [diakses 8 Oktober 2015]
[294] J. Gomez and R. Ramcharan, 'Democracy and Human Rights in Southeast Asia,' *Journal of Current of Southeast Asian Affairs*, Vol. 33, No. 3 (2014), pp. 3-17.

dalam hal kesamaan nilai-nilai yang dianut (*shared values*), ASEAN masih belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Faktor terakhir dan yang paling menentukan adalah prinsip menahan diri. Dibandingkan dengan dua faktor sebelumnya – kesamaan persepsi dan nilai-nilai bersama – negara-negara di Asia Tenggara boleh dikatakan cukup berhasil dalam mencegah konflik bereskalasi menjadi konfrontasi terbuka yang dapat berujung pada perang. Amitav Acharya benar ketika mengatakan bahwa negara-negara ASEAN sejak lama konsisten menerapkan dialog dan kerjasama alih-alih penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa atau konflik.[295] Prinsip non-kekerasan ini barangkali menjadi satu-satunya indikator ASEAN dipandang sebagai sebuah komunitas keamanan dalam pengertian Deutsch-ian yakni "*...there is a real assurance that the members of that community will not fight each other physically, but will settle their disputes in some other way*."[296] Dalam konteks krisis Laut Cina Selatan misalnya, ASEAN sejak lama sepakat untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan melainkan dialog dalam format CoC atau Kode Tata Berperilaku. Kesepakatan ini tercantum dalam Deklarasi CoC pada 2002 yang menyatakan bahwa, "*The Parties undertake to exercise* ***self-restraint*** *in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner*" [cetak tebal dari penulis].[297] Berdasarkan fakta bahwa negara-negara ASEAN menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik menunjukkan bahwa ASEAN telah berhasil mempraktikkan prinsip menahan diri

---

[295] A. Acharya, 'Collective identity and conflict management in Southeast Asia,' dalam E. Adler and M. Barnett (eds.), *op.cit*., dan A. Acharya, 'Constructing Security Community in Southeast Asia,' *op.cit.*,

[296] K. Deutsch, 'Political community and the North Atlantic area,' dalam B. Nelsen and A. Stubb (eds.), *The European Union: Readings on the Theory and Practice of European Integration*, 3rd edn, Boulder, CO: Lynn Rienner, 2003, hlm. 124.

[297] 'Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea,' http://www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea [diakses pada 8 Oktober 2015]

sekalipun rasa saling curiga dan tidak percaya masih meliputi hubungan antar negara di kawasan.

Dari keempat faktor pembangun identitas kolektif di atas, dua faktor – interdependensi dan prinsip menahan diri – dapat dikatakan cukup memadai, sedangkan dua faktor lainnya – kesamaan persepsi dan kesamaan nilai-nilai yang dianut – dapat dikatakan masih sangat kurang. Padahal untuk membangun identitas kolektif yang kokoh keempat syarat tersebut harus terpenuhi. Untuk itu, kedua faktor yang dirasa masih kurang tersebut perlu dibenahi segera. Seperti sudah dikatakan sebelumnya, ASEAN belum memandang negara sebagai ancaman bersama. Meskipun semakin hari ancaman tradisional yang bersumber dari negara semakin tergeser oleh ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan transnasional, degradasi lingkungan, wabah penyakit, dan sebagainya, akan tetapi bagaimanapun ancaman tradisional tidak akan hilang selama negara masih eksis. Untuk menciptakan kesamaan persepsi terhadap ancaman tradisional, kendala utama ada pada dua negara anggota ASEAN yakni Malaysia dan Brunei yang menggunakan strategi *bandwagoning* dalam isu Laut Cina Selatan. Di samping itu, keterlibatan Amerika Serikat di kawasan juga patut dicurigai. Mengubah persepsi dan preferensi kebijakan luar negeri negara-negara memang tidak mudah kendati tidak mustahil dilakukan. Intinya adalah negara-negara ASEAN harus kembali pada sikap awal ASEAN bahwa kehadiran kekuatan-kekuatan adidaya di kawasan adalah sebuah ancaman bagi keamanan regional.

Tugas kedua juga tak kalah beratnya. Dari segi identitas, kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara yang sangat majemuk dalam hal budaya sehingga mustahil diubah. Meskipun demikian, slogan ‘bersatu dalam perbedaan’ atau ‘*unity in diversity*’ perlu dikuatkan dengan cara rekonseptualisasi nilai-nilai demokrasi dan HAM. Secara teori ASEAN sudah mengadopsi nilai-nilai ini, namun secara praktis belum ada kesepakatan dalam penerapannya. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan HAM serta bagaimana memperkuat struktur kelembagaannya baik di tingkat domestik maupun regional perlu menjadi perhatian ASEAN. Bali Democracy Forum

merupakan forum representatif untuk tugas itu. Salah satu kendala terbesar adalah bagaimana membujuk Myanmar untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Sama seperti tugas pertama, tugas menyatukan pendapat dalam hal demokrasi dan HAM juga memerlukan waktu yang tidak sebentar. ASEAN agaknya masih menghadapi kendala internal dalam mewujudkan tujuan ini.

Kesimpulan

Apatisme ASEAN dalam menyikapi isu Rohingya tidak hanya berakar dari norma non-intervensi yang dianut melainkan juga karena tidak terdapat identitas kolektif antar sesama anggota ASEAN. Ketiadaan identitas kolektif menyebabkan negara-negara ASEAN condong pada mengejar kepentingannya sendiri ketimbang bagaimana memanfaatkan ASEAN sebagai instrumen institusional untuk menangani masalah Rohingya sebagai sebuah masalah bersama. Meskipun secara internal ASEAN telah memiliki landasan normatif penegakan HAM semacam Piagam ASEAN 2008, pendirian lembaga khusus AICHR 2009, dan Deklarasi HAM ASEAN 2012, akan tetapi negara-negara anggota terkesan enggan mengimplementasikan norma-norma yang mereka sepakati sendiri. Sehingga tidak mengejutkan jika ASEAN tidak mampu berbuat apa-apa karena tidak adanya komitmen terhadap institusi.

Identifikasi masalah yang timbul dalam sebuah fenomena kerjasama antar negara merupakan salah satu persoalan pokok yang menguras pikiran para ilmuwan HI untuk memecahkannya. Tidak adanya komitmen bersama antar anggota suatu kelompok adalah masalah klasik dalam apa yang disebut Mancur Olson sebagai ‘logika tindakan kolektif’.[298] Berbeda dari kaum rasionalis yang beranggapan bahwa penghalang utama tindakan kolektif adalah prinsip mementingkan diri sendiri yang tercermin dari fenomena ‘penumpang gelap’ (*free rider*), konstruktivis beranggapan

[298] M. Olson, *The Logic of Collective Action: Public Groups and the Theory of Groups*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002.

lebih jauh bahwa problem utama kerjasama antar negara adalah tidak adanya '*sense of community*' antar anggota. Dengan kata lain, jika rasional menganggap sifat mementingkan diri sendiri sebagai suatu hal yang *given*, konstruktivis menganggapnya sebagai produk dari tidak adanya *shared understanding* antar negara. Dengan demikian, konstruktivis melihat bahwa kecenderungan perilaku suatu negara bersifat dinamis sehingga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa konstruktivis berhasil mengidentifikasi masalah yang menyebabkan ketiadaan peran ASEAN dalam menyikapi isu Rohingya. Lemahnya kekompakan negara-negara ASEAN akibat tidak adanya identitas kolektif dapat menjadi penghalang terbesar cita-cita organisasi itu menjadi sebuah komunitas. Untuk kepentingan jangka panjang, ASEAN perlu lebih memfokuskan pada bagaimana membangun identitas kolektif di antara mereka sendiri ketimbang fokus pada kerjasama-kerjasama yang hanya berakhir di meja rapat. Ibarat membangun sebuah rumah, tugas pertama yang sangat penting adalah membangun pondasi yang kokoh untuk menopang rumah tersebut supaya tidak mudah roboh. Empat variabel pembentuk identitas kolektif yakni interdependensi, kesamaan persepsi, kesamaan nilai-nilai yang dianut, serta prinsip menahan diri harus ditingkatkan. Mungkin tugas tersulit ASEAN adalah menyatukan pendapat soal siapa yang harus menjadi musuh bersama serta konsep demokrasi dan HAM seperti apa yang cocok untuk ASEAN. Walaupun sulit, langkah ini harus ditempuh demi terwujudnya sebuah komunitas yang bertindak berdasarkan kolektivitas.

Daftar Pustaka

Acharya, A. (1998) Collective identity and conflict management in Southeast Asia. Dalam Adler, E. and Barnett, M. eds. *Security Communities*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 198-227.

Acharya, A. (2001) *Constructing Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of Regional Order*. London: Routledge.

Adler, E. & Barnett, M. (1998) Security communities in theoretical perspectives. Dalam Adler, E. & Barnett, M. eds. *Security Communities.* Cambridge: Cambridge University Press.

Adler, E. (1997) Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. *European Journal of International Relations*, 3(3), pp. 319-363.

Adler, E. (2005) *Communitarian International Relations: The Epistemic Foundations of International Relations*. London: Routledge.

ASEAN (2002) *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* [online], Association of Southeast Asian Nations. Tersedia dalam: http://www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea [diakses pada 8 Oktober 2015]

ASEAN (2008) *ASEAN Charter.* Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN (2009) *AICHR: What You Need To Know.* Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN (2012) *ASEAN Human Rights Declaration* [online], Association of Southeast Asian Nations. Tersedia dalam: http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/asean-human-rights-declaration [diakses 8 Oktober 2015]

ASEAN (2015) *Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centered ASEAN* [online]. Association of Southeast Asian Nations. Tersedia dalam:

http://www.asean.org/news/asean-statement-communiques/item/kuala-lumpur-declaration-on-a-people-oriented-people-centred-asean [diakses 7 Oktober 2015].

ASEAN (2015) *Top ten ASEAN trade partner countries* [online], Association of Southeast Asian Nations. Tersedia dalam: http://www.asean.org/images/2015/July/external_trade_statistic/table20_asof17June15.pdf [diakses 8 Oktober 2015]

Axelrod, R . & Keohane, R. (1985) Achieving Cooperation Under Anarchy: Strategies and Institutions. *World Politics*, 38(1), pp. 226-254.

Berita Satu (2015) *Kasus Rohingya bisa rusak komunitas ASEAN 2015* [online], Berita Satu. Tersedia dalam: http://www.beritasatu.com/dunia/63683-kasus-rohingya-bisa-rusak-komunitas-asean-2015.html [diakses 7 Oktober 2015].

Bowen, J. (2015) *Refugee crisis tests limits of Southeast Asian cooperation* [online], The Global Observatory. Tersedia dalam: http://theglobalobservatory.org/2015/05/asean-rohingya-refugees-myanmar/ [diakses 7 Oktober 2015].

Davies, M. (2013) ASEAN and Human Rights Norms: Constructivism, Rational Choice, and the Action-Identity Gap. *International Relations of the Asia Pacific*, 13, pp. 207-231.

Davies, M. (2015) *The Rohingya and regional failure* [online]. New Mandala. Tersedia dalam: http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2015/05/16/the-rohingya-and-regional-failure/ [diakses 7 Oktober 2015].

Desler, D & Owen, J. (2005) Constructivism and the Problem of Explanation. *Perspectives on Politics*, 3(3), pp. 597-610.

Dessler, D. (1999) Constructivism Within A Positivist Social Science. *Review of International Studies*, 25(1), pp. 123-137.

Deutsch, K. (2003) Political community and the North Atlantic area. Dalam Nelsen, B. & Stubb, A. eds. *The European Union: Readings on the Theory and Practice of European Integration*, 3rd edn. Boulder, CO: Lynn Rienner, pp. 121-143.

Devetak, R. (2012) An introduction to International Relations: the origins and changing agendas of a discipline. Dalam Devetak, R., Burke, A. & George, J. eds. *An Introduction to International Relations*, 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Garnett, J. (1985) *Commonsense dan Teori Politik Internasional*, terj. Marcedes Marbun. Jakarta: Pustaka Abardin.

George, A. (1994) The Two Cultures of Academia and Policy-Making: Bridging the Gap. *Political Psychology*, 15(1), pp. 143-172.

Gomez, J. & Ramcharan, R. (2014) Democracy and Human Rights in Southeast Asia. *Journal of Current of Southeast Asian Affairs*, 33(3), pp. 3-17.

Guzzini, S. & Leander, A. eds. (2006) *Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and Its Critics*. London: Routledge.

Guzzini, S. (2000) A Reconstruction of Constructivism in International Relations. *European Journal of International Relations*, 6(2), pp. 147-182.

Hoffman, S. (1977) An American Social Science: International Relations. *Daedalus*, 106(3), pp. 41-60.

Keohane, R. & Martin, L. (1995) The Promise of Institutionalist Theory. *International Security*, 20(1), pp. 39-51.

Keohane, R. (1984) *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press.

Lepgold, J. & Nincic, M. (2001) *Beyond the Ivory Tower: International Relations Theory and the Issue of Policy Relevance*. New York: Columbia University Press.

Long, A. (2008) *Deterrence: From Cold War to Long War*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Mahnken, T. (2008) Bridging the Gap Between the World of Ideas and Action. *Orbis*, 54(1), pp. 4-13.

Matlii, W. (1999) *The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mearsheimer, J. (1994/1995) The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19(3), pp. 5-49.

Morgenthau, H. (1946) *Scientific Man vs Power Politics*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Morgenthau, H. (1958) *Dilemmas of Politics.* Chicago, IL: University of Chicago Press.

Morgenthau, H. (1978) *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5th edn. New York: Alfred Knopf.

Narine, S. (2006) The English School and ASEAN. *The Pacific Review*, 19(2), pp. 199-218.

Nasution, R. (2010) Waiting for AICHR's optimal performance [online]. Antara News. Tersedia dalam: http://www.antaranews.com/en/news/1281435057/waiting-for-aichrs-optimal-performance [diakses 8 Oktober 2015].

Nye, J. (2008) Bridging the Gap Between Theory and Policy. *Political Psychology*, 29(4), pp. 593-603.

OHCHR (n.a) *Human rights context* [online], Office of the High Commissioner for Human Rights. Tersedia dalam: http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/SouthEastAsiaSummary0809.aspx [diakses 8 Oktober 2015]

Olson, M. (2002) *The Logic of Collective Action: Public Groups and the Theory of Groups*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Pikiran Rakyat (2015) *KTT ASEAN di Malaysia fokus pada isu ekonomi* [online], Pikiran Rakyat. Tersedia dalam: http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2015/04/26/325013/ktt-asean-di-malaysia-fokus-pada-isu-ekonomi, [diakses pada 3 Oktober 2015].

Price, R. & Reus-Smit, C. (1998) Dangerous Liaison? Critical International Theory and Constructivism. *European Journal of International Relations*, 4(3), pp. 259-294.

Price, R. (2008) *Moral Limit and Possibility in World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pushpanathan, S. (2003) *ASEAN efforts to combat terrorism* [online], Association of Southeast Asian Nations. Tersedia dalam: http://www.asean.org/resources/item/asean-efforts-to-combat-terrorism-by-spushpanathan [diakses 8 Oktober 2015]

Reid, A. (2010) *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rosyidin, M. (2015) *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Rosyidin, M. (Oktober, 2014) ASEAN In(Security) Community? Arms Race and Collective Identity Building in Southeast Asia. *Makalah disampaikan dalam International Conference on ASEAN Studies (ICONAS)*, Yogyakarta.

Shannon, V. (2005) Wendt's Violations of the Constructivist Project: Agency and Why A World State is *Not* Inevitable. *European Journal of International Relations*, 11(4), pp. 581-587.

Sukma, R. (2012) ASEAN dan Sengketa Laut China Selatan [online], Kompas. Tersedia dalam: http://internasional.kompas.com/read/2012/04/11/02542066/ASEAN.dan.Sengketa.Laut.China.Selatan [diakses 8 Oktober 2015]

Suriasumantri, J. (2003) *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, cet. 16. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Walt, S. (2005) The Relationship Between Theory and Policy in International Relations. *Annual Review of Political Science*, 8, pp. 23-48.

Wendt, A. (1992) Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), pp. 391-425.

Wendt, A. (1994) Collective Identity Formation and the International State. *The American Political Science Review*, 88(2), pp. 384-396.

Wendt, A. (1995) Constructing International Politics. *International Security*, 20(1), pp. 71-81.

Wendt, A. (1999) *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Wendt, A. (2003) Why A World State is Inevitable. *European Journal of International Relations*, 9(4), pp. 491-542.

ASEAN, China dan Stabilitas Kawasan

Ignatius Ismanto
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan
Karawaci, Tangerang.

ignatius.ismanto@uph.edu

Pengantar

Sejak Perang Dingin berakhir ASEAN telah memainkan peran yang aktif dalam pembentukan berbagai forum kerjasama regional (ekonomi serta politik dan keamanan) yang melibatkan kepentingan negara-negara besar. Partisipasi keanggotaan ASEAN dalam berbagai forum kerjasama regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar itu umumnya bersifat kolektif, bukan secara individual. Kolektivitas ASEAN dipandang menjadi isu yang penting dalam menghadapi perubahan ekonomi-politik global yang tidak menentu. ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan forum regional yang dibentuk ASEAN pada 1994 dengan melibatkan negara-negara besar yang berpengaruh di Asia Tenggara, seperti: Amerika Serikat, China, Jepang, dan India, khususnya di tengah perubahan ekonomi-politik global yang tidak menentu. Apa yang melatar-belakangi kalangan pemimpin-pemimpin ASEAN dalam pembentukan forum kerjasama regional yang melibatkan sejumlah negara besar itu?

Kalangan pemimpin ASEAN menyadari bahwa pembentukan ASEAN pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencegah dominasi dan intervensi negara-negara besar yang saling bersaing. Namun, satu hal yang penting untuk dicatat bahwa, kebangkitan China sebagai kekuatan global merupakan faktor yang dipandang berpengaruh besar terhadap dinamika hubungan negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara sesungguhnya merupakan kawasan yang telah lama menjadi arena pertarungan kepentingan negara-negara besar. Bahkan, China memandang kawasan Asia Tenggara merupakan isu yang strategis, khususnya dalam meningkatkan pengaruhnya seiring dengan kebangkitan ekonominya. China,

karenanya, sangat berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan ASEAN. Pembentukan forum kerjasama ekonomi regional ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan Regional Cooperation Economic Partnership (RCEP) merupakan isu yang menarik. Bukan tidak mustahil bahwa ACFTA dan RCEP merupakan forum ekonomi yang menjadi instrumen politik bagi China dalam mendukung mewujudkan kepentingan, yaitu meluaskan pengaruh hegemoni di Asia Tenggara.Tulisan dimaksudkan untuk menkaji hubungan ASEAN-China sejak 1990an, serta secara khusus menkaji dimensi politik pembentukan ACFTA dan RCEP (*Regional Cooperation Economic Partnership*) serta pengaruhnya terhadap stabilitas kawasan

ASEAN dan Lingkungan Eksternal yang Berubah

John Ravenhill (dalam Avila, 2001) memperkenalkan istilah *institutional deficit* untuk menggambarkan minimnya kelembagaan kerjasama regional antar negara (baik antar pemerintah maupun antar kalangan masyarakat atau civil society) dalam suatu kawasan tertentu. Konsep itu juga sering dipakai untuk menggambarkan realitas yang dialami negara-negara di kawasan Asia Tengggara, khususnya hingga sebelum Perang Dingin berakhir. Mengapa kawasan itu dicirikan oleh minimnya kelembagaan kerjasama regional? Sejarah perkembangan Asia Tenggara menjelaskan latar belakang rendahnya interaksi negara, atau minimnya kerjasama regional di kawasan itu. Pertama adalah warisan kolonialisme yang dialami oleh sejumlah negara di Asia Tenggara. Bangsa-bangsa Eropa telah lama berkepentingan untuk memperebutkan negara-negara kawasan Asia Tenggara yang kaya akan sumberdaya alam yang melimpah. Kolonialisme menjadi sarana bagi bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber kekayaan alam sejumlah negara Asia Tenggara, seperti: Belanda yang menguasai Indonesia selama 350 tahun, Perancis yang menguasai Vietnam, Inggeris yang menguasai Malaysia, serta Spanyol yang pernah menjajah Philipina. Di samping sumber kekayaan alam, letak geografi yang strategis –juga telah menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang diperebutkan oleh kepentingan negara-negara besar. India dan China, misalnya, telah lama bersaing untuk saling memperebutkan pengaruh di kawasan itu. India dan China menempatkan

kawasan Asia Tenggara sebagai *backyard* dalam menopang kemajuan ekonomi mereka.

Kedua, selama masa Perang Dingin kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara merupakan arena atau ajang persaingan kekuatan global, yaitu antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dan kekuatan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Persaingan dua kekuatan global itu telah menyeret Asia menjadi demikian rentan terhadap konflik. Selama masa Perang Dingin, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dimaksudkan membendung meluasnya pengaruh Komunisme di Asia. Amerika Serikat juga menggunakan instrumen ekonomi untuk mendukung kepentingan geopolitiknya itu. Amerika Serikat menempatkan sejumlah negara di Asia Timur sebagai benteng pertahanan (*bullwark*) dalam membendung meluasnya pengaruh Komunisme itu, seperti: Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hong Kong. Amerika Serikat juga menyalurkan bantuan finansial dalam mendorong kemajuan ekonomi dan industrialiasasi di negara-negara tersebut. Amerika Serikat berpendapat bahwa dengan kekuatan ekonomi yang tangguh, negara-negara itu akan mampu menghadapi meluasnya pengaruh Komunis di kawasan Asia. (Mack dan Ravenhill, 1994: hal. 9). Pembangunan ekonomi dan industrialisasi itu akhir mendorong sejumlah negara Asia Timur berkembang menjadi negara industri baru Asia (*Asia's Newly Industrializing Economies*). Satu hal yang juga berperan penting dalam mendukung kelangsungan industri negara-negara Asia Timur yang berorientasi ekspor adalah kesediaan Amerika Serikat untuk membuka pasar bagi produk ekspor mereka.

Amerika Serikat juga berperan penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat merupakan payung bagi stabilitas keamanan di Asia. Terlebih setelah jatuhnya Vietnam dalam pengaruh Komunis dan kekawatiran terhadap meluasnya pengaruh Komunis di kawasan Asia Tenggara. Pendirian asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada 1967, yang dikenal dengan ASEAN[299], pada hakekatnya juga dimaksudkan untuk mencegah

[299] Keanggotan ASEAN yang didirikan di Bangkok, Thailand awalnya terdiri dari 5 (lima) negara yang ideologi mereka berhalauan anti-Komunis. Kelima negara pendiri ASEAN itu adalah: Thailand,

meluasnya pengaruh Komunis di kawasan itu. Amerika Serikat sangat mendukung institusi regional itu. Bagi kalangan Realist, institusi regional ASEAN dapat dipandang sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mendukung kepentingan geopolitiknya, yaitu menahan meluasnya pengaruh Komunisme di Asia Tenggara[300]. Selama masa Perang Dingin Asia Tenggara, karenanya, menjadi kawasan yang strategis bagi kepentingan Amerika Serikat.

Kepentingan geopolitik Amerika Serikat dalam membendung meluasnya pengaruh Kominisme di Asia itu tentunya harus dibayar dengan harga yang mahal. Amerika Serikat bersedia untuk mengorbankan defisit transaksi berjalan dalam perdagangan internasionalnya, khususnya dengan negara-negara Asia Timur, termasuk Asia Tenggara. Bagaimana prospek stabilitas politik dan keamanan setelah Perang Dingin berakhir? Akankah Amerika Serikat masih bersedia untuk menanggung biaya pertahanan dan keamanan yang demian besar itu. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat melihat bahwa Komunisme tidak lagi menjadi sumber ancaman bagi kepentingan nasional. Penutupan pangkalan militer Amerika Serikat di Subick dan Clark di Philipina merupakan konsekuensi logis dari berakhirnya Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat juga sangat berkepentingan untuk meningkatkan daya saing ekonomi internasionalnya yang sebelumnya telah dikorbankan.

Bagaimanakah prospek stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara akan diwujudkan seiring dengan menurunnya keterlibatan Amerika Serikat setelah Perang Dingin berakhir? Siapakah yang dapat menggantikan peran Amerika Serikat setelah Perang Dingin berakhir? Sejak Perang Dingin berakhir, ASEAN menghadapi lingkungan eksternal yang telah berubah. Pada masa Perang Dingin, struktur kekuasaan dicirikan oleh bi-polar, yaitu persaingan dua kekuatan global dimana Amerika Serikat memainkan peran yang besar dalam mewujudkan stabilitas

---

Malaysia, Singapura, Indonesia dan Philipina. Sejak Perang Dingin berakhir dan isu Komunisme tidak lagi menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan, keanggotaan ASEAN bertambah hingga menjadi 10 negara. Negara anggota ASEAN yang baru itu adalah: Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos, Myanmar (keduanya bergabung menjadi ASEAN pada 23 Juli 1997), dan Kamboja (16 Desember 1998).

[300] Lihat Rudolfo C. Severino, misalnya. (Chia, 2004)

keamanan di Asia dan Asia Tenggara. Setelah Perang Dingin berakhir, struktur kekuasaan dicirikan multi-polar, yaitu munculnya kekuatan-kekuatan baru. Sejumlah negara yang merupakan kekuatan baru dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di Asia, yaitu: China, India, Jepang dan Amerika Serikat. Bagaimana ASEAN menanggapi lingkungan eksteral yang telah berubah itu? ASEAN sejak awal pendiriannya dimaksudkan mencegah intervensi negara-negara besar yang saling bersaing di kawasan Asia Tenggara. Dalam mewujudkan perdamaian, stabilitas keamanan dan kemakmuran kawasan, ASEAN mengandalkan pada prinsip-prinsip yang dibangunnya, yaitu: (i) non-intervensi dan (ii) menghormati kedaulatan masing-masing negara. Prinsip-prinsip yang kini dikenal sebagai ASEAN Way itu tentu akan tetap menjadi acuan yang relevan dalam mewujudkan stabilitas, perdamian serta kemakmuran dalam lingkungan eksternal yang telah berubah itu.

Ada 2 (dua) isu yang menarik bagi ASEAN dalam menanggapi lingkungan eksternalnya yang telah berubah. Pertama, ASEAN dituntut memainkan peran yang semakin aktif dalam menanggapi perubahan ekonomi-politik global yang sifat tidak menentu. Perubahan politik global telah mendorong munculnya kekuatan-kekuatan baru di Asia, khususnya China, India, Jepang dan Amerika Serikat. Stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara akan dipengaruhi oleh interaksi mereka. Peran aktif ASEAN tampak dari inisiatif dan keterlibatan ASEAN dalam pembentukan forum regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar itu. Strategi yang ditempuh oleh ASEAN itu dimaksudkan untuk menghindari dominasi negara-negara besar yang saling bersaing. ASEAN dikenal sebagai arsitek pembangunan regional karena peran aktifnya dalam pembentukan forum kerjasama regional. Namun, perubahan eksternal ASEAN itu tidak berarti melemahkan prinsip-prinsip yang dibangun ASEAN dalam membangun kerjasama regional, termasuk terhadap kebijakan politik luar negeri mereka, yaitu mempertahankan otonomi dan kedaulatan negara (Roy, 2005, hal. 308)

Pembentukan berbagai forum kerjasama regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar itu adalah ASEAN Regional Forum (ARF) yang melibatkan kepentingan negara-negara, seperti: Amerika Serikat, China, India,

Jepang serta Rusia. ASEAN juga mendorong pembentukan ASEAN plus 3 yang melibatkan China, Jepang dan Korea Selatan yaitu pada saat krisis ekonomi menimpa sejumlah negara Asia pada 1997. Di samping itu, ASEAN juga menjalin kerjasama ekonomi regional dengan masing-masing partner strategisnya, seperti: ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) yang ditanda-tangani pada 2004, *ASEAN-South Korea FTA* (AKFTA) yang ditandatangani pada 2006, *ASEAN-Japan Economic Partnership Cooperation* (AJCEP) 2008, serta *ASEAN-Australia & New Zealand FTA* (AANZFTA) dan the ASEAN-India FTA (AIFTA), keduanya ditanda-tangani pada 2009. Dalam KTT ke-19 di Bali, kalangan pemimpin ASEAN sepakat merencanakan pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Satu hal yang penting untuk dicatat bahwa pembentukan forum kerjasama ekonomi regional itu juga dapat menjadi instumen politik untuk mendukung kepentingan ASEAN dalam mewujudkan stabilitas poliitik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Isu kedua yang menarik bagi ASEAN dalam menanggapi lingkungan eksternalnya yang telah berubah yaitu tuntutan atas pentingnya kolektivitas dan sentralitas ASEAN, terlebih dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar yang saling bersaing. Sehubungan dengan itu, pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang akan mulai direalisir sejak akhir 2015 merupakan acuan yang sangat diperlukan dalam mewujudkan gagasan kolektivitas dan sentralitas ASEAN itu.

Kebangkitan China dan Isu Keamanan

Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi global merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perubahan hubungan ASEAN dan China. Selama masa Perang Dingin, hubungan ASEAN-China sangat tidak harmonis dan bersifat konfliktual. Hubungan kedua belah pihak ditandai oleh sikap saling curiga serta rendahnya rasa saling percaya. Persoalan Laut China Selatan menjadi salah satu sumber ketegangan ikut memperburuk hubungan antara China dengan sejumlah negara ASEAN. Hingga sebelum 1990-an tidak pernah ada hubungan formal antara ASEAN sebagai institusi

regional dan China, meskipun sejumlah negara ASEAN secara individual memiliki hubungan diplomatik dengan China[301]. Kebangkitan China sebagai kekuatan global memicu sejumlah pertanyaan yang menarik, khususnya dikaitkan dengan isu stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Apakah kebangkitan China akan mendorong perdamaian dan kemakmuran kawasan, atau sebaliknya kebangkitan China justru akan memicu instabilitas kawasan? Bagaimana respon negara besar lainnya, seperti: Amerika Serikat, Jepang, dan India terhadap kebangkitan China. Respon mereka itu juga akan ikut menentukan isu politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu isu yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah respon Amerika Serikat terhadap kebangkitan China.

Salah satu motivasi yang ditempuh ASEAN dalam membangun forum kerjasama regional yang melibatkan kepentingan negara-negara besar, sebagaimana yang telah dibahas terdahulu, adalah sebagai strategi untuk mencegah dominasi negara-negara besar yang saling bersaing itu. Oleh sebab itu memahami respons Amerika Serikat terhadap kebangkitan China – juga menjadi kajian yang penting dalam merumuskan isu politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu pertanyaan yang sering dipertanyakan seiring dengan respon Amerika Serikat terhadap China adalah apakah kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi global merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dalam mempertahankan status hegemoninya?

Tesis yang dibangun oleh Teori Stabilitas Hegemoni menjelaskan bahwa stabilitas politik regional atau global dimungkinkan oleh munculnya negara hegemonik yang memiliki pengaruh yang dominan serta mampu memainkan peran kepemimpinan regional atau global. Cohn (2008, hal. 57) menguraikan bahwa "*the international economic system is most likely to be open and stable when there is a dominant or hegemonic state that is willing and able to provide leadership and other*

[301] Hubungan diplomatik antara Indonesia dan China, misalnya, mengalami pasang surut (Sukma, 2009) Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan China. Sebaliknya, hubungan Indonesia – China dibekukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto karena dukungan China terhadap perjuangan Partai Komunis Indonesia (PKI), terlebih setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Normalisasi hubungan antara Indonesia dan China dirintis kembali setelah Perang Dingin berakhir.

major state believe the hegemon's policies are relatively beneficial". Dari bangun teori tersebut, ada 3 (tiga) konsep yang penting untuk dibahas, yaitu: (i) negara yang dominan, (ii) kapasitas untuk memainkan peran kepemimpinan (*capacity to provide leadership*) dan (iii) kebijakan yang menguntungkan (*hegemon's policies are beneficial*). Kehadiran suatu negara yang hegemon dan mendominiasi negara-negara lain merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk meraih status hegemoni. Faktor-faktor yang mendorong berkembangnya negara itu menjadi dominan adalah: (i) kekuatan ekonomi, (ii) kekuatan militer, dan (iii) perpaduan kekuatan ekonomi dan militer. Sedangkan kapasitas untuk memainkan peran kepemimpinan dapat ditempuh melalui cara *coersive* atau *benevolent*.

Dari penjelasan di atas, pertumbuhan ekonomi China yang menakjubkan sejak 1990 dan telah mendorong China untuk melakukan modernisasi militernya - merupakan fenomena yang wajar terjadi. Bahkan China, seiring dengan kebangkitan ekonominya itu, sangat berkepentingan untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia. Keterlibatan keanggotaan China dalam berbagai forum kerjasama regional yang dibangun oleh ASEAN sebagaimana telah disebutkan di atas juga menjadi bagian penting bagi China dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Apakah peran kepemimpinan China juga bisa diterima oleh negara-negara berpengaruh lainnya di kawasan Asia – merupakan tantangan bagi China. Hubungan China dan Jepang, misalnya, akankah Jepang menerima kepemimpinan regional China di Asia? Mengingat hubungan China-Jepang selama ini dilatar-belakang oleh sejarah hubungan yang suram. Demikian pula, kepentingan Amerika Serikat untuk mempertahankan status hegemoninya akan sangat berkepentingan untuk mengimbangi meluasnya pengaruh China di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara.

China melihat ASEAN merupakan sarana yang sangat strategis dalam meluaskan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, China sangat berkepentingan untuk menjalin kembali hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sejumlah langkah strategis telah ditempuh China untuk memulihkan hubungan baik itu, yaitu membangun kembali rasa saling percaya (*trust building*) di antara kedua belah pihak. Pertama, China secara aktif telah melakukan pemulihan

hubungan diplomatik dengan sejumlah negara ASEAN, yaitu diawali dengan Singapura pada bulan Oktober 1990 dan dilanjutkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Saw-Swee, Sheng dan Chin, 2005, hal. 1-18). Kedua, China juga telah memberikan bantuan finansial bagi sejumlah negara ASEAN yang mengalami kesulitan ekonomi saat krisis ekonomi menimpa negara-negera di kawasan Asia pada 1997. Bahkan, China juga bersedia untuk tidak melakukan depresiasi mata uangnya, *Renmimbi*, agar tidak memperparah kesulitan ekonomi negara-negara ASEAN yang sedang dilanda krisis ekonomi itu (Alice D. Ba, 2003, hal. 634). Ketiga, China terlibat dalam berbagai forum kerjasama regional yang dibentuk ASEAN. Pada tahun 1994 China mulai terlibat dalam forum konsultasi dengan kalangan pejabat pemerintahan negara-negara ASEAN untuk membicarakan isu politik dan keamanan dan sejak 1996, China bersedia menjadi partner dialog dengan negara-negara ASEAN dengan kesediaan China untuk menghormati prinsip-prinsip kerjasama regional yang dibangun ASEAN[302].

Salah satu isu yang menarik dari kepentingan China dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya adalah gagasan untuk mendukung kerjasama ekonomi regional dengan ASEAN. Kepentingan nasional China dalam kerjasama ekonomi regional ACFTA itu tidak saja kepentingan ekonomi[303] tetapi juga kepentingan geopolitiknya. Dilihat dari dimensi ekonomi, China melihat ASEAN merupakan potensi pasar yang menarik dan sekaligus merupakan potensi bagi penyediaan bahan-bahan baku serta energi yang diperlukan China dalam mendukung kelangsungan pertumbuhan ekonomi serta industrialisasinya. Dilihat dari dimensi politik, China melihat bahwa ACFTA merupakan sarana untuk membangun kembali tumbuhnya rasa saling percaya (*trust building*). Gagasan pembentukan ASEAN-China FTA ini diajukan pada momentum yang sangat tepat, yaitu saat China dan ASEAN melakukan normalisasi hubungan yang sebelumnya, selama kurun waktu yang panjang telah

[302] China merupakan salah satu negara di luar ASEAN yang pertama kali menerima prinsip-prinsip ASEAN dalam mendorong peningkatan kemakmuran dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

[303] Wang dan Tang (20--, hal 52-53) mengidentifikasi bahwa salah satu kepentingan ekonomi China dalam pembentukan ACFTA adalah untuk mengurangi ketergantungan China terhadap pasar ekspor negara-negara maju, terlebih dengan menguatnya kecenderungan sikap proteksionisme mereka.

dibekukan. Dimensi politik lain dari kepentingan China mendukung kerjasama regional itu adalah bahwa ACFTA merupakan sarana yang strategis dalam meningkatkan pengaruhnya di Asia Tenggara (Funabashi dalam Chirathivat, 2005, hal. 253).

China memberikan dukungan tidak saja terhadap ACFTA, tetapi juga terhadap forum kerjasama ekonomi regional yang lebih luas, yaitu *Regional Cooperation Economic Partnership* (RCEP). RCEP ini juga merupakan forum kerjasama ekonomi yang digagas oleh ASEAN dengan melibatkan keanggotan yang lebih luas, yaitu seluruh anggota ASEAN dan 6 negara yang merupakan partner ASEAN (China, Jepang, Korea Selatan, India dan Australia dan Selandia Baru). Keanggotaan ASEAN dalam RCEP, seperti halnya dalam ACFTA, bersifat kolektif. Walau-pun gagasan RCEP ini diajukan oleh ASEAN, China diduga akan memainkan peran yang penting dalam forum kerjasama ini. Forum yang merupakan potensi pasar yang terbesar yang ada selama ini banyak mendapat perhatian dunia. Amerika Serikat tidak menjadi anggota dalam forum itu. Kalangan Realist melihat bahwa RCEP merupakan instrumen bagi China dalam meningkatkan pengaruh serta memainkan peran kepemimpinan di Asia. Pada saat yang sama, RCEP menjadi wahana bagi China dalam melemahkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara.

Kebangkitan China juga telah memicu meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan China di kawasan Asia. Kebijakan China yang sangat agresif dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia memicu kecemasan Amerika Serikat. Gagasan Amerika Serikat untuk melihat kembali pentingnya Asia merupakan respon terhadap kecemasan itu. Kebijakan dalam melihat pentingnya Asia bagi Amerika Serikat itu telah membuka pintu bagi kehadiran kembali Amerika Serikat di kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara. Dengan menggunakan isu perang melawan terorisme global, Amerika Serikat menjalin kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia (Banlaoi, 2003, hal. 101-105. Amerika Serikat juga sangat berkepentingan terhadap penyeselaian konflik laut China Selatan. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia yaitu melalui keterlibatan dalam keanggotaan forum

kerjasama regional yang dibangun ASEAN sekaligus merupakan sarana bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi kembali (rebalancing) pengaruh China. Demikian pula dukungan Amerika Serikat terhadap pembentukan *Trans Pacific Partnership* (TPP) dipandang sebagai instumen ekonomi untuk mendukung agenda politik yaitu mencegah meluasnya pengaruh China di kawasan Asia (Petri dan Plummer, 2012, hal. 2).

Peluang dan Tantangan

Bagaimana ASEAN melihat kebangkitan China sebagai kekuatan global? Dilihat dari aspek kedekatan geografis maupun peningkatan kekuatan (baik ekonomi maupun militer), apakah China merupakan sumber ancaman serius bagi ASEAN? Pada haekatnya ASEAN melihat kebangkitan China sebagai peluang dan sekaligus sebagai ancaman. Sehubungan dengan itu, ASEAN cenderung menggunakan pendekatan ganda dalam menyikapi kebangkitan China sebagai kekuatan global. Dalam menyikapi China sebagai ancaman, ASEAN cenderung mempertahankan kehadiran negara-negara besar lainnya di kawasan Asia Tenggara. Melibatkan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, Jepang dan India dalam forum-forum kerjasama regional yang dibangun oleh ASEAN dipandang sebagai strategi ASEAN dalam menyikapi kecemasan terhadap kebangkitan China (Saw, Sheng dan Chin, 2005, hal. 8). Upaya yang ditempuh ASEAN dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara besar yang berpengaruh di kawasan Asia untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh China di kawasan Asia Tenggara ini dikenal dengan strategi hedging. Sehubungan dengan itu, mempertahankan atau menarik keterlibatan atau kehadirian Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara merupakan aspek yang penting dalam mengimbangi pengaruh China[304]. Strategi ini memiliki unsur *balancing* yang dimaksudkan untuk mencegah dominasi China. Strategi hedging yang ditempuh ASEAN ditempuh dengan mempertahan kehadiran dua kekuatan besar

[304] Respon ASEAN terhadap China ini juga dipengaruhi oleh persaingan antara China sebagai kekuatan global yang berkepentingan untuk meluaskan pengaruhnya dan Amerika Serikat yang berkepentingan untuk memertahankan hegemoninya di kawasan Asia.

yang saling bersaing di Asia Tenggara, dan ASEAN tidak memihak pada salah satu kekuatan yang saling bersaing.

Di samping strategi hedging, Roy (2005, hal 310-312) menjelaskan bahwa ASEAN juga menempuh strategi engagement dalam menyikapi kecemasan dan peluang kebangkitan China. Strategi enggagement ini yang ditempuh ASEAN dimaksudkan untuk menghindari dominasi China di kawasan Asia Tenggara. Stretegi enggagement ditempuh oleh ASEAN dengan menarik keterlibatan keanggotaan China dalam forum bersama-sama dengan negara-negara ASEAN. Menarik keterlibatan China dalam forum keanggotaan bersama-sama dengan ASEAN ini diharapkan dapat membangun rasa saling percaya, mengatasi hubungan yang kurang harmonis serta mendorong keterlibatan China dalam membangun forum-forum kerjasama yang saling menguntungkan.

Namun pada akhirnya, ASEAN yang bersatu yaitu ASEAN yang kuat merupakan prasyarat yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan eksternal yang telah berubah. Bagaimana ASEAN dengan visi yang sama menghadapi kepentingan negara-negara besar yang saling bersaing? Sentralitas dan kolektivitas ASEAN merupakan tantangan internal bagi kalangan ASEAN sendiri. ASEAN Community sebagai suatu gagasan yang hendak direalisir oleh ASEAN pada akhir 2015 merupakan upaya internal ASEAN dalam membangun solidaritas dan kolektivitas ASEAN. Membangun solidaritas ASEAN itu bukan tantangan yang sederhana, terlebih dihadapkan pada persaingan China dan Amerika Serikat dalam memenangkan persaingan dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara yaitu melalui RCEP dan TPP. Dalam forum RCEP yang diduga dapat menjadi instrumen China, keanggotaan ASEAN bersifat kolektif. Sikap kolektif itu sekaligus merupakan nilai (value) yang selama ini selalu ditekankan oleh kalangan pemimpin-pemimpin ASEAN dalam berbagai forum. Sebaliknya, TPP merupakan instrumen Amerika Serikat, dimana keanggotaan ASEAN lebih bersifat individual. Selama ini, tidak seluruh anggota ASEAN menjadi anggota TPP. Sejumlah anggota ASEAN yang menjadi anggota TPP adalah Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam dan Vietnam. Kehadiran TPP sebagai instrumen Amerika Serikat untuk menahan meluasnya

pengaruh China di kawasan Asia Tenggara sekaligus berpotensi melemahkan solidatas ASEAN.

Referensi Pustaka

Avila, John Lawrence A., "EPEC and ASEM Reconciling Two Regional Agenda" in Wilfrido V. Villacorta (ed), *Coalition Building and APEC*, Makati City, Phillipine: Phillipine APEC Studi Center Network (PASCN), Phillipine Institute for Development (PDDS), and Yuchengco Center for East Asia (YCEA), 2001

Ba, Alice D., "ASEAN and China: Renavigating Relation for 21st Century Asia", *Asian Survey*, Vol. XLIII (4), Juli / Agustus 2003

Banlaoi, Rommel C., "Southeast Asian Perspectives on the Rise of China: Regional Security after 9/11" diunggah dari http://www.comw.org/rma/fulltext/0306banlaoi.pdf, pada 30 Oktober 2015, Jam 16.34.

Chirathivat, Suthiphand, "Building ASEAN-China FTA: Opportunities, Modalities and Prospects" dalam Saw Swee Hock, Sheng Lijun dan Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Singapura: ISEAS, 2005.

Petri, Peter A dan Michael G. Plummer, "the Trans Pacific Partnership and Asia Pacific Integration: Policy Implication", *Policy Brief*, 12 (6), Juni 2012.

Roy, Denny, "Southest Asia and China: Balancing or Bandwagoning" *Contemporary Southeast Asia*, Vol 27, (2), 2005.

Saw Swee-Hock, Sheng Lijun dan Chin Kin Wah, "An Overview of ASEAN-China" dalam Saw Swee Hock, Sheng Lijun dan Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Singapura: ISEAS, 2005.

POTENSI PENGARUH ESKALASI KONFLIK INDONESIA – MALAYSIA TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN INTEGRASI REGIONAL ASEAN

Ruli I. Ramadhoan[305]

PENDAHULUAN

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga serumpun Melayu yang sebelum masing-masing menjadi negara berdaulat pernah memiliki gagasan untuk mendirikan negara bersatu Indo-Malay dengan basis identitas bersama etno religius yang dikenal dengan nama "Melayu Raya" (*The Greater Malay*) atau "Indonesia Raya" (*Greater Indonesia*). Gagasan tersebut berasal dari para tokoh nasionalis Indonesia seperti Muhammad Yamin, Mohammad Hatta, Soekarno dan tokoh-tokoh nasionalis dari Semenanjung Melayu antara lain Ibrahim Yaacob, Burhanudin Al-Helmy, Ahmad Boestaman dan Mokhtaruddin Lasso. Dua kelompok nasionalis ini menginginkan untuk menyertakan British Malaya sebagai bagian dari Indonesia yang merdeka.[306] Namun seiring berjalannya proses kolonialisasi Eropa dan perbedaan penjajahan yang dialami oleh dua negara serta pengaruh konstelasi politik internasional masa perang dunia hingga perang dingin telah memisahkan negara serumpun menjadi negara yang terpisah dan berbeda.

Walaupun gagasan tersebut gagal, intensi persekutuan Melayu untuk membentuk negara Indo-Malay bersatu cukup memberikan bukti kedekatan hubungan emosional dan kesadaran identitas bersama antara bangsa Indonesia dan Malaysia. Namun, realitas sejarah yang baik dan hubungan serumpun antara dua negara, ternyata tidak dapat menjamin kenyataan Malaysia dan Indonesia untuk tidak berkonflik setelah masing-masing menjadi negara merdeka. Pengaruh sistem internasional masa perang dingin yang begitu kuat bahkan menjadi awal konflik

---

[305] Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

[306] Joseph Chinyong Liow, *Indonesia - Malaysia Relations: Baggage of "Blood Brotherhood"*, RSIS Commentaries No. 124/2010 dated 28 September 2010. Akses dalam http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1242010.pdf

kedua negara yang berefek lanjut pada konflik-konflik selanjutnya. Dinamika konflik Indonesia dan Malaysia pasca menjadi negara mandiri selalu mengalami pasang surut dari konflik *high politics* hingga konflik *low politics.*

Bentuk konflik *High politics* seperti konfrontasi yang terjadi pada tahun 1963 hingga 1966, isu sengketa teritorial kepulauan Sipadan – Ligitan dan blok Ambalat. Sedangkan konflik – konflik *low politics* yang mewarnai hubungan Malaysia – Indonesia kontemporer seperti isu perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, isu pergeseran patok perbatasan di wilayah Kalimantan yang semakin bergeser ke wilayah Indonesia, isu rekruitmen warga negara Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi Askar Wantaniyah, isu penangkapan petugas Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh Malaysia, dan isu klaim beberapa produk budaya Indonesia oleh Malaysia dan lain sebagainya.[307]

Masalah-masalah tersebut secara fluktuatif mewarnai perjalanan hubungan dua negara, sehingga disadari atau tidak hubungan dua negara ini menjadi sangat sensitif, emosional dan sentimentil karena setiap konflik memanas selalu mendapat respon berlebih pada tingkatan publik masing-masing Negara (eskalasi). Peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia era 1960-an misalnya, telah menjadi awal lahirnya sentimen masyarakat dua negara yang terbawa hingga pada konflik-konflik era 2000-an. Kalimat "Ganyang Malaysia"[308] sebagai idiom politik masa konfrontasi telah menjadi kalimat populer yang selalu direpetisi oleh publik terutama media massa Indonesia apabila tensi hubungan Indonesia-Malaysia memanas, bahkan hingga pertandingan sepak bola setingkat Asia Tenggara AFF.

Sebaliknya di Malaysia, isu yang berhubungan dengan Indonesia menjadi perbincangan hangat publik dan media massa setempat, khususnya terkait tenaga kerja Indonesia (TKI). Perkembangan ekonomi Malaysia yang cukup pesat

---

[307] Ludiro Madu, *Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 2005: Refleksi Teoretis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet*, Jurnal Global Strategis, Tahun 2 No. 1 Januari- Juni tahun 2008, hal. 2

[308] Isu ganyang Malaysia muncul pada era 1960-an ketika Bung Karno mengeluarkan kecaman terhadap Malaysia, karena dianggap sebagai representasi kepentingan Negara-negara maju di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, dan sekutu. Semboyan ganyang Malaysia juga terkait dengan ditetapkannya Malaysia dalam Dewan Keamanan PBB, dari, www.findtoyou.com/ebook/ganyang+Malaysia-page-2.html

menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja di Malaysia semakin meningkat. Sebagian masyarakat kalangan ekonomi rendah asal Indonesia yang melihat sebagai peluang bekerja berbondong-bondong mengadu nasib di sana sebagai tenaga kerja kasar baik legal maupun ilegal. Banyaknya warga Indonesia yang bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia dan berbagai isu negative tentang TKI telah melahirkan isitilah "Indon" yang dalam perspektif publik Indonesia berkonotasi merendahkan.[309] Kalimat tersebut juga digunakan oleh publik Malaysia untuk "menyerang balik" publik Indonesia apabila konflik dua negara kembali meningkat.

Saling "mengejek" antara publik Indonesia–Malaysia ini selalu mewarnai fluktuasi konfliknya. Perang "ejekan" ini pun menjadi semakin ramai seiring dengan perkembangan internet dan media sosial belakangan ini. Bentuk dari perang "ejekan" di media *on line* ini beragam seperti dalam bentuk *meme, bullying quot*, kartun sarkas hingga *hacking* sebagaimana diistilahkan oleh Ludiro Madu sebagai *netwar/ cyberattack/ cyberwar*.[310] Bahkan sasaran atau objek saling *bullying*, *meme* dan *hacking* sampai pada hal-hal sensitif yang berkenaan dengan atribut, simbol dan lambang negara hingga kepala negara.

Fenomena ini apabila dibiarkan berlarut – larut dapat menjadi preseden buruk yang dapat menjauhkan maupun menghalangi munculnya perasaan "kekitaan ASEAN" atau "ASEAN *we feeling*" antara sesama warga dari negara-negara anggota ASEAN, apalagi negara – negara ASEAN sedang dalam proyeksi untuk mengembangkan integrasi ASEAN yang lebih baik dengan basis penyatuan bangsa-bangsa ASEAN melalui *ASEAN Community 2015*.

Tulisan ini ingin mengulas mengenai bagaimana *intersociety conflict* yang merupakan produk eskalasi dari konflik sosial politik level negara (*interstate conflict*) antara Indonesia-Malaysia berpotensi mempengaruhi ataupun memperlambat proses

---

[309] Lihat Abubakar Eby Hara, *Hubungan Malaysia dan Indonesia: Dari Saudara Serumpun ke `Smart Partnership`?* Makalah disampaikan dalam seminar internasional *Indonesia-Malaysia Update 2008,* Kerjasama Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia, dengan Universiti Malaya (UM) Malaysia, Yoyakarta, 27-29 Mei 2008.

[310] Fenomena mengenai perang dunia maya *hactivism*/ *on line war* antara publik Malaysia dan Indonesia dengan fokus penelitian pasca tragedi Ambalat ini sebelumnya pernah diangkat oleh Ludiro Madu yang diterbitkan pada Jurnal Global Strategis Hubungan Internasional Universitas Airlanggga. Baca, Ludiro Madu, *Op.Cit.*, hal. 5.

pembangunan integrasi sosial regional Asia Tenggara yang sedang menjadi program utama ASEAN untuk membentuk *ASEAN Community* 2015.

Regionalisme

Regionalisme berasal dari kata region atau wilayah. Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.[311] Regionalisme merupakan perkembangan integrasi sosial di kawasan yang dihasilkan dari proses interaksi sosial dan ekonomi dalam waktu yang lama.[312]

Sebagai syarat terjadinya regionalisme, Hettne dan Soderbaun mengatakan bahwa kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara-negara dalam satu kawasan. Kedekatan geografis perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama[313] untuk memenuhi syarat terbentuknya satu kawasan secara geografis dan struktural. Terpenuhinya syarat geografis dan struktural dikarenakan bahwa untuk membentuk regionalisme yang kuat dan utuh harus terbentuk kesadaran regional dan identitas yang nantinya akan memberi penekanan *sense of belonging* satu bangsa yang terdiri dari banyak negara dalam satu kawasan.
Ketika negara-negara berkomitmen untuk membentuk kawasan yang bersatu, terdapat konsekwensi yang harus diterima oleh negara-negara tersebut yaitu hilangnya sebahagian kedaulatan dari negara-negara sebagai akibat dari berkurangnya, bahkan hilang batas-batas antara negara *(borderless)*. Dalam hal ini batas-batas *(border)* yang berkurang atau hilang tersebut tidak bersifat georgrafis semata melainkan batas interaksi dalam pengertian hambatan-hambatan yang dapat mengganggu interaksi kerjasama seperti hambatan tarif dan non tarif *(tariff barier and no tariff barier)* dalam perdagangan antara negara dan lain sebagainya.

Para fungsionalis menekankan terbentuknya kawasan bersatu berdasarkan intesitas hubungan yang fungsional antara negara-negara dalam satu kawasan.

[311] Craig A. Snyder, 2008, *Contemporary Security and Strategy*, Palgrave: Macmillan, hal. 228
[312] Lihat, Louis Fawcell, Andrew Hurrell, 2002, *Regionalism in World*, Oxford University Press, hal. 7-36
[313] B. Hettne and Soderbaun. 2002, *Theorizing the Rise of Regionnes"*. London: Routledge, hal. 39

Kawasan yang dapat memulai interaksi antar negara di dalamnya, akan terus berkembang karena efek kerjasama yang bersifat *spillovers* hingga akhirnya tercipta integrasi kawasan.

Hettne membagi tingkatan regionalisme ke dalam lima tahapan yang meningkat secara gradual.[314] Lima tahapan ini menunjukkan kematangan suatu kawasan seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan internasional antar negara di kawasan. Tahapan- tahapan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Simple Geographic Unit of States*. Adapun kriteria dalam tahapan ini antara lain; tidak ada kerjasama dan interaksi rutin antar negara di dalam kawasan, kerjasama terjadi hanya ketika ada ancaman, dan kerjasama tersebut juga berakhir ketika ancaman sudah berakhir, sangat bergantung pada sumber daya pribadi, yakni pada masing-masing negara.
2. *Set of Social Interactions*. Kriteria pada tahapan kedua ini antara lain; dalam kawasan sudah tercipta interaksi antar negara namun hanya diatur norma-norma atau institusi informal.
3. *Collective Defense Organisation*. Syarat pada tahap ketiga ini adalah *pertama*, negara mulai bersekutu dengan negara lain yang memiliki pemikiran yang sama di dalam satu kawasan untuk melawan ancaman bersama tau musuh bersama. *Kedua*, ada perjanjian formal yang mengikat dan mengatur negara-negara dalam satu kawasan. *Ketiga*, ada kombinasi kekuatan, meski bukan berupa penggabungan maupun peleburan.
4. *Security Community*. Pada tahapan ini pembentukan komunitas keamanan terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu; terdapat interaksi antar masyarakat sipil antar negara sudah mulai dikembangkan, tercipta hubungan yang damai antar negara dalam kawasan dan adanya kesepakatan untuk memilih menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah.
5. *Region State*. terbentuknya region state memiliki kriteria *pertama*, *k*awasan sudah memiliki identitas bersama yang berbeda dari kawasan lain. *Kedua*, kawasan memiliki kapabilitas bersama sebagai satu kawasan, dan terakhir kawasan memiliki legitimasi sebagai satu kesatuan regional.

Akselerasi ASEAN dan *ASEAN We Feeling*

Apabila dihubungkan dengan tren politik global dewasa ini dengan pertumbuhan kerjasama ekonomi dan pembentukan blok-blok perdagangan negara-negara berdasarkan kawasan telah ikut meningkatkan kerjasama negara-negara di

[314] B. Hettne B , 1997, *Development, Security and World Order: A Regionalist Approach*, European Journal of Development Research, 9: 83-106 dalam Ukertor Gabriel Moti, *A Review of Regional Approaches In Dealing With Security Issues*, http://www.interesjournals.org/full-articles/a-review-of-regional-approaches-in-dealing-with-security-issues.pdf?view=inline

kawasan Asia Tenggara (ASEAN) ke arah yang lebih baik. ASEAN melakukan perluasan kerjasama dengan mencita-citakan kerjasama yang lebih integratif dan berkesinambungan dengan membentuk *ASEAN Community*.

Keseriusan ASEAN untuk mengembangkan regionalisme yang lebih baik dan matang ditunjukan juga dengan merevisi target Visi ASEAN yang semula dijadwalkan pada tahun 2020 menjadi tahun 2015 yang dikenal dengan *ASEAN Community* 2015 dengan berlandasakan pada tiga pilar kerjasama yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community)*, Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community),* dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community)*.

Peningkatan regionalisme ASEAN tersebut menunjukan evolusi kerjasama yang pada awalnya berbasis negara menjadi kerjasama berbasis bangsa atau komunitas. ASEAN yang awal pendiriannya merupakan forum kerjasama para elit pejabat pemerintah negara-negara Asia Tenggara bermetamorfosis menjadi organisasi yang berbasis pada kepentingan masyarakat ASEAN (*people-centered organization)*.

Oleh karena itu, Sebagai upaya mewujudkan ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada masyarakat (*people centered and people oriented*) *ASEAN Community 2015* memproyeksikan pembangunan kesadaran dan perspektif bersama masyarakat ASEAN melalui *ASEAN Awareness* untuk memperkenalkan dan mendekatkan ASEAN kepada masyarakat. *"Promote ASEAN identity building in support of an ASEAN Community by under taking initiatives and activities to increase the level of ASEAN awareness and "we feeling" among the peoples of ASEAN"*.[315]

Pemahaman tentang seluk beluk ASEAN dan manfaat dari adanya komunitas ASEAN menjadi sangat penting untuk memancing peran aktif masyarakat untuk ikut membangun rasa saling memiliki, perasaan identitas yang sama sebagai masyarakat ASEAN yang satu.

Dalam rangka menyongsong *ASEAN Community 2015*, negara-negara ASEAN sedang melakukan berbagai langkah untuk mempersiapkan diri baik pada

[315] Butir 8 Deklarasi Cebu 13 Januari 2007, *Cebu Declaration toward One Caring and Sharing Community*, Dokumen Departeman Luar Negeri

level negara maupun pada level publik untuk menjaga dari segala kemungkinan yang akan dihadapi dalam rangka *ASEAN Community 2015*. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mempromosikan *ASEAN Awareness* antara lain sosialisasi ASEAN (melalui ASEAN *Goes to School*, seminar-seminar dan ceramah/kuliah umum), kegiatan lomba seperti Seleksi Nasional ASEAN *Anthem*, Pemilihan Duta Muda ASEAN-Indonesia, Lomba Cerpen ASEAN, Lomba Karya Tulis ASEAN, Lomba Lukis ASEAN, dan lain sebagainya, penerbitan buku-buku ASEAN, dialog interaktif dan liputan media, kegiatan festival sepeerti ASEAN *Festival*, festival film ASEAN, festival *rock band* ASEAN, perayaan Hari ASEAN dan lain sebagainya.

Gambaran Singkat Konflik Indonesia-Malaysia

Di tengah perkembangan pesat pembangunan regional ASEAN, masih terdapat banyak persoalan penting yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan instabilitas kawasan, salah satunya berhubungan dengan konflik *High Politic* dan *Low politic*. Isu *high politic* mengenai ketidakjelasan pengaturan perbatasan (*border management)* antara negara ASEAN misalnya, seringkali menjadi pemicu konflik atau sengketa teritorial antara negara anggota. Peta konflik di ASEAN yang berhubungan dengan masalah perbatasan dapat kita telusuri dengan mencermati beberapa sengketa terotorial intra ASEAN antara lain; sengketa Kuil Preah Viar antara Thailand dan Kamboja, sengketa kepulauan Spartly dan Paracel antara Filipina, Vietnam dan Kamboja, sengketa Kepulauan Sipadan-Ligitan dan blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, sengketa Klaim Sabah antara Malaysia dan Filipina dan sengketa-sengketa atau konflik perbatasan yang lain seperti masalah perbatasan antara Singapura dan Malaysia, Singapura dan Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam dan lain sebagainya masih banyak yang belum diselesaikan secara tuntas.[316]

Sementara pada isu-isu *low politic* misalnya persoalan tumpang tindih klaim produk budaya antara negara anggota ASEAN. Dua contoh negara ASEAN yang

[316] Baca The Singapore Institute of International Affairs, 2007, *Regional Integration, Trade and Conflict in Southeast Asia*, Published by International Institute for Sustainable Development (IISD), Canada, hal. 5-7

selalu bermasalah dengan klaim produk budaya adalah Indonesia dan Malaysia. Isu klaim Malaysia terhadap beberapa produk budaya Indonesia antara lain seperti lagu Rasa Sayange, klaim batik Indonesia, alat musik tradisional Angklung, dan kesenian Reog Ponorogo dan lain sebagainya. Klaim produk budaya dan ditambah dengan isu seputar permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kerap kali menjadi pemicu ketegangan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

A. Konflik *High Politics*

Konflik Indonesia dan Malaysia kerap mengalami pasang surut. Selain konflik teritorial juga terdapat banyak konflik non terotorial. Bila ditelusuri lebih jauh, konflik Indonesia dan Malaysia telah terjadi sejak lama yang dikenal dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno. Malaysia oleh Bung Karno dianggap sebagai antek Nekolim yang membawa kepentingan negara-negara kolonial Eropa dan Amerika di kawasan Asia Tenggara[317] sehingga Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB yang diikuti dengan pengiriman sukarelawan dan angkatan perang kelima[318] untuk menggempur Malaysia. Pasca peristiwa tersebut, hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia dibekukan.

Meski pada masa rezim Orde Baru pembekuan diplomatik Idonesia-Malaysia telah dinormalisasi, semenjak peristiwa konfrontasi hubungan dua negara menjadi tidak seramah seperti pada periode kolonial. Masa Orde Baru Indonesia merupakan masa keemasan hubungan yang mesra antara Indonesia-Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari minimnya konflik dan sengketa perbatasan, meskipun ada riak-riak konflik maupun

[317] Istilah yang dilontarkan oleh Bung Karno untuk menggambarkan negara-negara Eropa dan Amerika beserta sekutunya. Oleh Bung Karno Malaysia dinilai sebagai representasi negara-negara neo kolonialisme baru, karena selain memiliki hubungan khusus sebagai bagian dari negara persemakmuran juga dimana Malaysia menjadi tempat untuk memata-matai Indonesia pada masa Demokrasi terpimpin. Malaysia dianggap representasi dari kekuatan kolonialisme dan imprealisme di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia memandang pembentukan federasi Malaysia yang membagi Singapura, Serawak dan Sabah akan mengganggu proyek revolusi Indonesia, karena menurut Bung Karno, pembentukan federasi terssebut bertujuan untuk mengurung Indonesia. Baca, Evi Fitriani (Ed.), 2012, *Hubungan Indonesia-Malaysia Dalam PErspektif Sosial, Budaya, negara dan Media: Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran*, Jakarta: UI Press, hal.20-29.

[318] Angkatan perang kelima adalah angkatan bersenjata (pasukan sukarelawan) bentukan Bung Karno dan PKI untuk melakukan penyerangan kepada Malaysia, *Ibid.*

perbedaan penafsiran mengenai klaim territorial, namun dapat diselesaikan dengan baik dengan menyepakati status Quo atas status wilayah sengketa.[319]

Ibarat bom waktu, dalam dinamika dan perkembangannya, menjelang kejatuhan rezim Orde Baru, persoalan "quo" atas status wilayah sengketa Indonesia-Malaysia mencuat kepermukaan dengan munculnya kembali klaim Malaysia atas beberapa wilayah dan kembali menghangatkan perdebatan tafsir atas status quo sengketa pulau-pulau terdahulu yaitu Sipadan Ligitan. Pada tahun 1997 Malaysia melakukan aksi sepihak membangun fasilitas pariwisata dengan memberikan konsesi pengelolaan pariwisata kepada sejumlah perusahaan swasta serta pendirian instalansi-instalansi listrik di pulau berstatus quo tersebut dengan alasan bahwa status tersebut dipahami sebagai pengakuan kepemilikan pulau tetap menjadi milik Malaysia

Sebaliknya, pihak Indonesia sendiri mengartikan kesepakatan status quo atas pulau tersebut bahwa Sipadan dan Ligitan tetap dalam status wilayah yang disengketakan tanpa status hukum kepemilikan yang jelas dari salah satu negara yang bersengketa yang secara hukum berstatus tidak boleh ditempati selama proses penyelesaian. Indonesia menyatakan keberatan atas aksi unilateral Malaysia yang melanggar kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.[320] Oleh Karena itu, Indonesia mengirim nota protes kepada Kuala Lumpur dan menyerukan agar pembangunan di wilayah sengketa dihentikan.

Setelah melawati periode panjang penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasionl, akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002 diputuskan untuk menyerahkan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia yang menjadi penanda kekalahan Indonesia atas hak kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan.

---

[319] Lihat Keputusan Presiden RI No. 49 tahun 1997 Tentang Pengesahan *Special Agreement for Submission to The International Court of Justice of The Despute Between Indonesia dan Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan*

[320] *Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Antara Indonesia-Malaysia Serta Penyelesaiannya Melalui International Court Of Justice* (ICJ), http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131180- T%2027319-Penyelesaian%20sengketa-Tinjauan%20literatur.pdf

Setelah klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 dimenangkan oleh Malaysia, muncul isu perbatasan lain, yaitu isu perbatasan atas Blok Ambalat yang hingga sekarang masih dalam proses perundingan.

Serupa dengan kasus Sipadan-Ligitan, sengketa blok Ambalat terjadi karena Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki penghitungan wilayah laut yang berbeda yang kemudian membuat tumpang tindih klaim atas wilayah perairan tersebut. Konflik ini mengemuka ketika pemerintah Malaysia melalui perusahaan minyak Petronas, memberikan konsesi minyak kepada perusahaan minyak Shell untuk melakukan eksplorasi minyak di titik ND6 dan ND7 atau yang disebut Blok Ambalat yang terletak di perairan sebelah timur Kalimantan pada tanggal 16 Februari 2005.[321]

Tindakan Malaysia tersebut langsung mendapat reaksi protes dari Indonesia yang merasa keberatan atas klaim tersebut, karena Ambalat berada dalam kedaulatan negara Indonesia. Sebenarnya klaim Malaysia terhadap cadangan minyak di wilayah itu sudah diprotes Indonesia sejak tahun 1980, menyusul diterbitkannya peta wilayah Malaysia pada tahun 1979.[322]

Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa Blok Ambalat (Barat dan Timur) memilki potensi kekayaan minyak mencapai 62 juta barel minyak dan 348 miliar kaki kubik gas bumi. Hal ini merupakan kekayaan alam yang menjadi sangat wajar jika

---

[321] *Shell and Malaysia's National Oil Company sign Production Sharing Contracts for Deepwater Blocks Offshore Sabah*, diakses dari http://www.shell.com/home/content/media/news_and_library/press_releases/2005/Malaysia_contracts_deepwater_blocks_16022005.html. *Shell & Petronas Carigali Awarded Two Ultra-Deepwater Blocks*", PETRONAS, diakses dari https://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=20354

[322] Peta tersebut mengklaim wilayah di Laut Sulawesi sebagai milik Malaysia dengan didasarkan pada kepemilikan negara itu atas pulau Sipadan dan Ligitan. Malaysia beranggapan bahwa dengan dimasukkannya Sipadan dan Ligitan sebagai wilayah kedaulatan Malaysia, secara otomatis perairan di Laut Sulawesi tersebut masuk dalam garis wilayahnya. Indonesia menolak klaim demikian dengan alasan bahwa klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat sejak tahun 1979 yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah negaranya, I Made Andi Arsana, *Penyelesaian Sengketa Ambalatdengan Delimitasi Maritim:Kajian Geospasial Dan Yuridis*, dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010, hal. 53. Akses melalui https://www.academia.edu/332143/Penyelesaian_Sengketa_Ambalat_dengan_Delimitasis. lihat pula *International Boundary Study, Series A: Limits in the Seas*, No. 1 – January 21, 1970, "Indonesia – Malaysia *Continental Shelf Boundary*" (*Country Codes*: ID-MY), *The Geographer, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research*

diperebutkan mengingat kekayaan alam berupakan cadangan minyak yang terdapat didalamnya. Blok Ambalat adalah lahan potensial mengingat cadangan minyak yang banyak didalamnya yang menjanjikan.[323]

Sengketa Ambalat merupakan dampak dari kekalahan Indonesia dalam sengketa perebutan pulau Sipadan dan Ligitan. Ketika Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan, terjadi perubahan titik pangkal koordinat geografis, maka Karang Unarang menjadi pengganti pangkal koordinatnya. Karang Unarang sendiri terletak pada posisi 12 mil di luar batas maritim Malaysia dan 12 mil di selatan Pulau Sipadan, dan batas maritim klaim ini tidak pernah dibicarakan oleh Malaysia ke Indonesia. Dengan dibangunnya mercusuar di atas Karang Unarang dapat menjadi acuan bagi penarikan garis batas maritim laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen.[324]

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah Ambalat melalui jalur politik dan diplomasi dengan mengedepankan cara-cara damai serta sedapat mungkin menghindari cara-cara kekerasan atau militer.
Pendekatan diplomasi menjadi pilihan yang paling rasional mengingat semangat ASEAN dimana apabila ada konflik maka diselesaikan dengan mekanisme ASEAN sendiri yang mementingkan pendekatan diplomasi dari pada pendekatan konflik atau pendekatan militeristik untuk menciptakan *mutual trust* trust dengan sesama negara anggota.

B. Konflik *Low Politics*

Perjalanan hubungan negara rumpun Melayu Indonesia dan Malaysia selain diwarnai oleh konflik *high politics* terkait saling klaim teritorial, juga diliputi oleh berbagai persoalan *low politics* seputar isu tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, masalah

---

[323] http://xa.yimg.com/kq/groups/20920762/635446476/name/MPHI. Lihat juga dalam Ica Wulansari , *Aspek Keamanan dalam Strategi Energi Nasional*, Reporter Radio Republik Indonesia (RRI), Bandung, 2008-2009, https://www.academia.edu/4964277/ASPEK_KEAMANAN_DALAM_STRATEGI_ENERGI_NASIONAL

[324] Arif Havas Oegrosewu, *Batas Laut Indonesia- Malaysia Pasca Sipadan- Ligitan,* diakses melalui : http://www.kompas.co.id/bataslautIndonesiaMalaysia//

lintas batas, perdagangan gelap, *human trafficking, illegal logging dan pergeseran patok perbatasan*, klaim warisan budaya, dan lain sebagainya yang seringkali memicu protes dari pihak Indonesia, baik pemerintah maupun masyarakatnya.

Selama tahun 2007 hingga tahun 2012, pihak Malaysia telah melakukan klaim terhadap tujuh produk warisan budaya Indonesia dan mengakuinya sebagai warisan budaya mereka. Klaim pertama yaitu terhadap kesenian Reog Ponorogo pada bulan November 2007 yang kemudian diikuti setahun setelahnya klaim atas lagu Rasa Sayange dari Kepulauan Maluku pada Desember 2008.[325] Pada bulan Januari 2009 Malaysia kembali mengklaim batik Indonesia, dan isu Tari Pendet yang dijadikan sebagai salah satu ikon dalam iklan pariwisata Malaysia melalui *Discovery Channel* berjudul *enigmatic* Malaysia pada Agustus 2009.[326] Selanjutnya instrumen dan ansambel musik angklung pada Maret 2010 dan klaim Malaysia atas tari tor-tor dan Gondang Sambilan yang merupakan kesenian asli dari Sumatera Utara.[32762]
Berikutnya adalah isu tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan salah satu isu yang sering disoroti oleh media dan surat kabar baik di Indonesia maupun di Malaysia. Indonesia merupakan negara negara yang paling banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke Malaysia yang dari sejarahnya telah dimulai semenjak periode kolonialisme.

Mengenai jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Malaysia, banyak pakar maupun peneliti sebelumnya mencatat dengan jumlah yang beragam berkisar antara 750.000 hingga satu juta orang TKI dimana jumlah tenaga kerja legal lebih sedikit dari jumlah tenaga illegal dan mayoritas bekerja sebagai buruh bangunan, pembantu rumah tangga dan industry manufaktur atau dikenal dengan

---

[325] *2007-2012 Malaysia Klaim 7 Budaya Indonesia, akses melalui* http://www.antaranews.com/berita/317054/2007-2012-Malaysia-klaim-tujuh-budaya- Indonesia

[326] *Malaysia Minta Maaf Soal Tari Pendet, a*kses melalui http://travel.kompas.com/read/2009/08/28/13205335/akhirnya.Malaysia.minta.maaf.soal. pendet

[327]

istilah 3D *(dirty, dangerous, and difficult)*[328] dan buruh tidak terampil karena mayoritas mereka adalah lulusan SMP bahkan tidak sekolah.[329]

Dari banyak sumber media massa Indonesia kasus penganiayaan terhadap TKI kerap terjadi di Malaysia. Menurut Liow, kehadiran tenaga kerja dari Indonesia khususnya tenaga kerja illegal dianggap sebagai sumber ancaman sosial. Hal ini dikarenakan sebagian para pekerja dari Indonesia dianggap merupakan pelaku kriminal di Malaysia, termasuk dianggap mempersempit lapangan kerja bagi penduduk asli Malaysia sendiri.[330]

Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan TKI di Malaysia rentan mengalami kekerasan, tereksploitasi perkerjaan, pelecehan seksual, dan penghinaan dan lain sebagainya. Dari keluhan-keluhan yang diterima KBRI di Malaysia dari 2005 sampai 2007, terdapat ada jenis masalah yang masuk dalam kategori *unhumanity problem*[331]*; pertama*, masalah kekerasan termasuk penganiayaan, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan; *kedua*, masalah hak TKI seperti gaji yang tidak dibayarkan, beban kerja tinggi, tidak adanya hari libur, penipuan, pengusiran hingga penghinaan.

Terhadap proses penyelesaian persoalan-persoalan tersebut, dalam tataran pemerintahan, sebenarnya pemerintah dua negara telah bekerjasama untuk

---

[328] Abubakar Eby Hara, *Op.Cit.*

[329] Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia mncatatat, kira-kira terdapat 2.109.954 tenaga kerja migran yang saat ini bekerja di Malaysia dan 50 persennya adalah TKI. Menurut Tobing, dari jutaan jumlah pekerja asing di Malaysia, lebih kurang 800.000 orang tenaga kerja berasal dari Indonesia. Tobing, Elwin. 2004. *Migrasi Tenaga Ker-ja Global*, www.thenIndonesianinstitute.org, diakses pada 08 Agustus 2010, dalam Rahmadhona Fitri Helmi, *Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia*, Jurnal TINGKAP Vol. IX No. 1 Th. 2013, hal. 49. Joseph Liow dalam sebuah tulisannya mengatakan dari dua juta penduduk asing baik bekerja maupun yang pendatang, mayoritas berasal dari Indonesia dimana sekitar 10% sebagai tenaga kerja pekerja dengan jumlah tenaga kerja legal 750.000 orang dan sebagian besar sebagai pekerja illegal. Joseph Liow, 16 September 2002, *Desecuritising The "Illegal Indonesian Migrant Worker" Problem In Malaysia's Relations With Indonesia*, Institute of Defence and Strategic Studies, NTU, Singapore, hal. 1. Sementara data yang lain menyebutkan lebih dari 70% pekerja illegal di Malaysia berasal dari Indonesia dimana sebagian besar adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian maupun semi ahli yang mayoritas hanya tidak berpendidikan atau hanya lulusan SMP. Dalam Vijayakumari Kanapathy, *Controlling Irregular Migration: The Malaysian Experience*, ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration Working Paper No.14, hal. 2. Lihat pula Lin Mei, *Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China, Working Paper Series*, ICS Working Paper No. 2006-11, Institut Pengajian China Universiti Malaya, hal. 8.

[330] Joseph Liow, *Op. Cit.*, hal. 15.

[331] *Ibid.*

menerapkan penegakkan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap TKI. Dua negara juga telah membentuk *Joint Committee* dan team Satgas untuk menyelesaikan masalah dan perlindungan TKI di Malaysia.[332] Meski demikian, penyelesaian tersebut acap kali terhambat pada masalah teknis pelaksanaan yang sulit dan minimnya *political will* dari kedua belah pihak untuk mencari dan menyelesaikan akar sengketa.

Dalam keadaan yang demikian, terlepas dari optimal atau tidaknya upaya dua negara dalam menyikapi permasalahan penganiayaan TKI, hal tidak dapat dihindari adalah ketika isu merambat pada wilayah publik dua negara yang nota bene cenderung bersifat reaktif dan sporadik. Terkadang, permasalahan akan selesai dengan sendirinya dengan tuntutan agar pemimpin Malaysia meminta maaf atas beberapa masalah yang terjadi kepada public Indonesia sebagaimana tuntutan Indonesia lalu hubungan kedua negara menjadi seperti normal kembali.[333]

Pendekatan "kekeluargaan" versi ASEAN dalam penyelesaian setiap konfliknya ini positif dan konstruktif mendukung proyeksi regionalisme ASEAN, meski sebenarnya tidak menjamin apabila muncul persoalan lain di kemudian hari tidak mendapat reaksi yang sama dari publik, khususnya publik Indonesia sebagai korban, seperti ketika beberapa masalah dengan sumber yang sama seperti penganiayaan terhadap TKI akan kembali mencuat kepermukaan dan kembali menimbulkan emosi dan reaksi yang berlebihan dari publik masing-masing dua negara.

Eskalasi Konflik dan Potensi Hambatan Terhadap Proses Penyatuan Masyarakat ASEAN (*ASEAN COMMUNITY 2015*)

Dinamika hubungan konfliktual antara Indonesia–Malaysia pada dasarnya dipengaruhi tiga faktor yaitu faktor sejarah, media massa dan faktor eskalasi konflik itu sendiri. Ketiga faktor ini saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana uraian sebelumnya, respon berlebih pada tingkatan masyarakat merupakan imbas dari

[332] Yessi Olivia, *Perlindungan TKI Pada Masa Penempatan Studi Kasus : TKI di Malaysia,* (Skripsi Hubungan Internasional, Repository University of Riau), akses melalui http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/4262/4/penelitian%202.pdf

[333] Eby Hara, *Op.Cit.*

sejarah konflik politik pada masa konfrontasi Indonesia–Malaysia yang kemudian melahirkan istilah "Ganyang Malaysia" yang dikumandangkan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1963. Konflik politik pertama Indonesia-Malaysia pada masa perang dingin tersebut telah menjadi sejarah kelam yang mengaburkan kekerabatan emosional dua negara, khususnya pada tingkatan masyarakatnya.

Reproduksi idiom politik "ganyang Malaysia" oleh media massa Indonesia serta repetisi kalimat provokatif tersebut dalam berbagai isu yang berhubungan dengan dua negara telah memunculkan stigma tersendiri bagi masyarakat Indonesia mengenai Malaysia. Bahkan dalam pertandingan olah raga Indonesia-Malaysia sekalipun, media massa masih sering memunculkan istilah tersebut dalam banyak *head line* surat kabar Indonesia dan demikian pula dengan publik Malaysia. Berikut ini contoh surat poster yang menggunakan kalimat ganyang Malaysia.

Gambar 1: Print Screen Contoh Headline Surat Kabar Indonesia[334]

[334] Dari berbagai sumber

Gambar di atas menujukan bagaimana reproduksi dan repetisi kalimat provokatif "ganyang Malaysia" versi berbagai surat kabar Indonesia baik cetak maupun on line dalam pemberitaan pertandingan olah raga sepakbola Indonesia dan Malaysia.

Tidak mengherankan pemeliharaan dan repetisi kalimat "ganyang Malaysia" telah melahirkan stigma negatif yang berujung pada hubungan *chaotic* antara masyarakat dua negara. Reproduksi idiom politik tersebut harus diakui telah menjadi bibit-bibit konflik yang mewarnai perjalanan hubungan Indonesia-Malaysia selanjutnya.

Sebaliknya, reaksi media massa dan publik Malaysia terkait persoalan TKI juga menunjukan pola yang sama dan provokatif. Satu sebutan yang menurut orang-rang Indonesia sangat sarkastis yaitu sebutan "Indon" yang berkonotasi orang Indonesia yang melakukan hal-hal negatif dan melawan hukum. Seperti yang telah ditulis oleh Abu Bakar Eby Hara, sebutan "Indon" kerap muncul di media massa Malaysia, padahal awal penggunaan sebutan "Indon" tidak lebih sebagai akronim yang digunakan oleh media massa Malaysia untuk menyingkat sebutan Indonesia menjadi Indon.[335]

Semenjak fluktuasi konflik Indonesia-Malaysia terjadi konotasi dari kata Indon menjadi bermakna negatif. Tidak jarang pula nada-nada mengejek terhadap Indonesia atau tenaga kerja dari Indonesia terpampang dalam *head line* surat kabar Malaysia. Akibatnya pemberitaan itu telah menciptakan opini negatif di kalangan masyarakat Malaysia terhadap orang Indonesia.[336] Mengutip dari Eby Hara, berikut contoh *head line* Surat Kabar Nasional Malaysia dalam menangapi sebagian besar jumlah tahanan adalah para pekerja termasuk pekerja tanpa izin dari Indonesia; "25.000 Pekerja Indonesia Bawa Penyakit Setiap Tahun" seperti yang diberitakan

---

[335] Seperti yang diklarifikasikan oleh Dato` Zainal Abidin Zain "sebetulnya tidak ada niat langsung dari pihak Malaysia untuk merendahkan WNI dengan perkataan "Indon"... yang menggunakan Indon hanya koran, koran memakai ini karena mereka mau menghemat kata. Pihak Indonesia telah keberatan sejak lama, tapi koran Malaysia tetap melakukan untuk menghemat kata".*Malaysia Sebarkan Keberatan RI Atas Sebutan "Indon",* http://www.antaranews.com/print/63968/Malaysia-sebarkan-keberatan-ri-atas-sebutan- indon. Lihat juga ulasan Abu Bakar Eby Hara, *Op.Cit.*

[336] *Ibid.*

oleh Media Utusan Malaysia, "Pekerja Asing Biadab“, "Mafia Indon Mengganas“ yang diterbitkan oleh Harian Metro Malaysia.[337]

Secara obyektif, karakter media massa Indonesia dan Malaysia sama-sama provokatif dalam pemberintaan isu-isu terkait konflik Malaysia-Indonesia. Fakta sebenarnya, tidak semua tenaga kerja asal Indonesia adalah pelaku kejahatan. *Berita Harian*, 17 November 2007 mengatakan jauh lebih banyak warga Malaysia sendiri yang melakukan kejahatan. Menurut koran tersebut, kejahatan yang dilakukan oleh orang asing kurang dari 3%.[338] Seorang pengamat media dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Nasrullah pun mengatakan bahwa banyak pers Malaysia yang memberitakan pekerja Indonesia terkait dengan kriminalitas dan kericuhan sosial, tapi ternyata kemudian tidak terbukti.[339] Menurut Eby Hara, bahwa pemberitaan heboh dan negatif tentang TKI di Malaysia selebihnya juga dikarenakan kepentingan komersialisasi media massa Malaysia dan juga untuk konsumsi masyarakat lokal Malaysia sendiri.[340]

Saling mengejek dan menghina seperti yang diceritakan diatas tidak berhenti pada ranah domestik masing-masing negara saja, namun berkembang dalam dunia maya seperti media sosial *Facebook, tweeter, blog site* dan sebagainya. Saling berbalas “Meme” sarkastis hingga berujung pada upaya *hacking* antara publik Malaysia dan Indonesia. Perang ejekan dan hinaan hingga saling *hack* (merusak atau mengacaukan situs) melalui media *on line* tersebut oleh Ludiro Madu disebut *Net War* atau *Virtual War*, atau *Internet war*, atau *On Line War* yaitu sebuah migrasi aktifitas sosial politik dari yang semula hanya bersifat *offline* ke *online*. Perpindahan aktivisme dari wilayah *offline* ke *online* ini menurutnya juga terjadi pada masyarakat Indonesia dan Malaysia pasca krisis Ambalat.

Menurut Ludiro Madu, Ambalat *netwar* merupakan fenomena baru dan pertama kalinya “perang” antara kedua Negara bertentangan ini berlangsung di jaringan internet, menggunakan *cyberattacks* berupa pesan dan / atau gambaran, dan

---

[337] Antara News, *Ibid.* Eby Hara, *Ibid.*
[338] Seperti yang dikutip Eby Hara. *Ibid.*
[339] *Ibid.*
[340] *Ibid.*

serangan *online* ditujuknya kepada situs-situs milik kedua belah pihak.[341] Merujuk pada temuan Ludiro, perang ejekan yang berawal dari *Ambalat Net war* tersebut terus berlanjut pada konflik-konflik kecil selanjutnya dengan berbagai bentuk yang merespon setiap isu-isu terkait Indonesia-Malaysia. Konflik Ambalat tahun 2005 telah membuka kembali ruang konflik antara publik dua negara.

Gambar 2. Contoh Perang Meme, Blog Site dan Web Site dari Publik Malaysia ditujukan ke publik Indonesia

[341] Perang ini menggunakan jaringan internet sebagai senjatanya dalam bentuk *cyberattacks* berupa pesan maupun gambar, serta meretas jaringan *online* yang bertujuan untuk mengacaukan dan merusak situs-situs milik kedua belah pihak. Baca, Ludiro Madu, *Op.Cit.*

Gambar 3. Contoh Perang Meme, Blog Site dan Web Site dari Publik Indonesia ditujukan ke Publik Malaysia

Ulasan Abubakar Eby Hara dan Ludiro Madu tentang konflik ranah publik antara Indonesia-Malaysia dalam perspektif penulis merupakan bentuk eskalasi dari konflik *high politic* dan *low politic*. Konflik mengalami eskalasi dari domain negara menjadi domain publik bahkan dari konflik *off line* ke konflik *on line.* Lokus konflik negara melebar pada tingkatan publik ditandai dengan perang di dunia maya antara *hacker* maupun non *hacker* Indonesia dengan Malaysia.

Isu-isu *high politics* maupun *low politics* yang sebenarnya mampu diselesaikan pada level negara mendapat perhatian dan respon berlebih dari publik dua negara. Publik menjadi sangat sensitif dan provokatif, terlebih masyarakat Indonesia. Eskalasi konflik ini menunjukan tidak hanya negara yang menjadi aktor dalam setiap tindakan politik, namun melibatkan reaksi aktif publik yang sangat provokatif.

Isu-isu lain pasca Ambalat seperti klaim Malaysia terhadap beberapa produk budaya Indonesia, isu penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia dan lain-lain kerap memancing respon keras dari publik khususnya Indonesia sebagai negara yang merasa diklaim budayanya. Isu-isu ini seringkali berefek pada kembalinya ingatan masyarakat Indonesia baik pada masa konfrontasi hingga

mengingatkan kekalahan Indonesia dalam konflik Sipadan-Ligitan. Sambutan *framing* dan provokasi istilah "Ganyang Malaysia" oleh media massa semakin menghidupkan dan memelihara sentimen anti Malaysia.

Sentimen anti Malaysia di Indonesia memang marak, ini ditunjukan dengan jumlah pendukung pada situs jejaring sosial seperti *Facebook*. dengan mayoritas pendukung berasal dari generasi muda. Terdapat tiga group Facebook yaitu group "Anti Malaysia (Malingsia)" dengan jumlah anggota sebanyak 317.439 orang, group "Ganyang Malaysia" memiliki 18.821 orang pendukung dan group "we hate Malaysia sebanyak 408.985 orang.[342] Mengutip berita yang dilansir oleh Viva News.com sebanyak 13.000 pengguna internet ikut dalam *on line poling* untuk memilih julukan bagi Malaysia seperti "Malingsia", "Malon", "Malingsia", "Malasya", "Maling Asia", "Crazy Malay" dan "MalingShit" pada sebuah situs dengan alamat www.malingsia.com.

Sentimen anti Malaysia tidak hanya terjadi di dunia maya, namun juga dapat dilihat respon publik Indonesia pasca klaim-klaim sepihak dari Malaysia, baik pasca klaim Ambalat maupun pasca klaim produk budaya dengan cara berdemontrasi di depan kantor Kedutaan Malaysia di Jakarta. Bentuk lain yaitu perilaku konsumen Indonesia yang anti terhadap produk-produk buatan Malaysia. Hasanuddin Ali pendiri Alvara Riset center dan Markplus mengatakan ada sentimen negatif terhadap produk Malaysia yang mengakar kuat pada konsumen Indonesia, mulai dari produk makanan hingga petronas.[343]

Sementara di sisi pemerintah, menanggapi isu-isu yang ada, elit pemerintah kedua negara menunjukan respon negara terkesan biasa. Respon yang biasa inilah yang sebenarnya menjadi pemicu maraknya aktifitas protes di berbagai situs, jejaring sosial dan blog di internet. Minimnya penjelasan dari pemerintah Indonesia maupun perwakilan Malaysia di Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia terhadap isu-isu yang

---

[342] *'We Hate Malaysia' No 1, 'Anti Malaysia' No 2*, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/89802-_we_hate_malaysia__no_1

[343] *Sentimen Konsumen Indonesia Buat Produk Malaysia Tak Laku*, diakses melalui http://www.merdeka.com/uang/sentimen-konsumen-indonesia-buat-produk-malaysia-tak-laku.html

ada membuat publik memilih untuk mengekspresikannya secara *on line*. Publik Malaysia yang merasa tidak terima membalas dengan melakukan hal yang sama sehingga saling konflik antara publik di dunia maya menjadi marak.

Selama ini Isu-isu terkait Indonesia-Malaysia jarang direspon secara serius oleh pemerintah dua negara. Konflik yang muncul tidak sampai mengancam rusaknya hubungan diplomatik yang serius. Hal ini dikarenakan oleh dua hal; *pertama*, konsensus politik yang terbangun pada tingkat elit/ negara melalui ASEAN. Bangunan konsensus politik ASEAN ini melahirkan komitmen dan mekanisme atau cara kerja *ala* ASEAN yang disebut *ASEAN Way*, termasuk di dalamnya mekanisme penyelesaian konflik. *Kedua*, komitmen bersama untuk memajukan regionalisme ASEAN pada level integrasi masyarakat *ASEAN Community* yang terangkum dalam Piagam ASEAN.

Untuk persoalan sengketa wilayah, ASEAN memiliki *code of conduct* tersendiri yang terangkum dalam *ASEAN Charter* yang menegaskan penggunaan cara-cara damai melalui dialog, konsultasi dan negosiasi dalam penyelesaian konflik;[344] *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* dimana *High Council* merekomendasikan resolusi konflik penyelesaian sengketa internal antar negara anggota;[345] dan *ASEAN Regional Forum* (ARF) sebagai forum penyelesaian konflik antara ASEAN dengan negara di luar ASEAN.[346] ASEAN pun melibatkan pihak ketiga seperti Mahkamah Internasional PBB sebagai jalan penyelesaian konflik di kawasan dilakukan.[347]

Terbangunnya iklim hubungan multilateral yang baik di tingkat kawasan serta absennya konflik terbuka *(The absent of war)* di kawasan menjadi bukti kongkrit berjalan lancarnya mekanisme penyelesaian konflik yang telah dibangun oleh ASEAN. Tingginya soliditas dan komitmen negara-negara dalam membangun *trust* antara sesama anggota ASEAN menghadirkan kesamaan perspektif bahwa konflik

---

[344] Lihat, *ASEAN Charter* bab VIII Penyelesaian Sengketa, pasal 22 Prinsip Umum, ayat 1, hal. 24
[345] Lihat, *ASEAN Selayang Pandang*, Edisi 20 tahun 2012, hal 27-28
[346] Lihat, Ibid.
[347] Lihat, *ASEAN Charter* pasal 28 tentang Ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Prosedur Internasional lainnya, hal. 26

bukanlah merupakan prioritas tunggal yang harus dikhawatirkan oleh negara-negara ASEAN.

Meski terdapat komitmen yang baik pada level elit negara-negara ASEAN, namun di sisi lain ASEAN juga memiliki kelemahan dalam proses penyelesaian konflik teritorialnya yang kurang mendapat penekanan serius dan tidak menjadi prioritas penting.

Secara konstitusional aturan-aturan dalam ASEAN hanya sedikit menyinggung solusi mendalam mengenai sengketa perbatasan dan klaim budaya, sehingga membuat proses penyelesaian konflik hanya selesai pada tataran elit politik negara-negara anggota saja. Sedangkan akar penyelesaian konflik tidak disentuh sama sekali. Hal ini dapat menimbulkan kerentanan yang tinggi pada hubungan di kawasan ke depannya yang berpotensi menghambat proses integrasi yang dicita-citakan. Bukan tidak mungkin masalah saling klaim antara negara-negara anggota ASEAN akan timbul kembali dan mengganggu proses penyatuan masyarakat dalam segala aspek, karena kelonggaran sistem penyelesaian konflik membuat negara-negara anggota tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa konflik teritorial bisa dituntaskan hingga ke akar-akarnya.

Persoalan konflik perbatasan menjadi semakin menghawatirkan ketika konflik yang terjadi merembet dan bereskalasi pada tingkatan publiknya, sementara di satu sisi negara tidak mampu menjamin konflik yang seharusnya berada pada lokus negara tidak akan mempengaruhi publik masing-masing negara. Ketika konflik telah merembet pada tingkatan publik maka yang akan muncul kemudian adalah sentimen yang tinggi antara publik dua negara. Hal ini akan menyulitkan dalam membangun kesadaran dan perspektif bersama sebagai masyarakat ASEAN.

Minimnya koordinasi dan komunikasi baik antara ASEAN dengan publik negara-negara anggota, elit pemerintah dengan elemen-elemen masyarakat non elit, khususnya media massa membuat konflik-konflik mengalami eskalasi. ASEAN masih terkesan elitis dan hanya menjadi milik elit negara serta hanya diketahui oleh masyarakat epistemik saja. Fakta menunjukan bahwa ASEAN memang hanya

terwacanakan pada level masyarakat epistemik atau akademisi saja. Pada tingkatan masyarakat non akademis, ASEAN masih sangat awam.

ASEAN terlalu sibuk dengan penataan fungsi kelembagaan khususnya terhadap perluasan persepsi ASEAN terhadap ancaman dengan dimasukannya persoalan seperti hak-hak asasi manusia dan demokrasi, perusakan lingkungan, kejahatan internasional, terorisme, dan lain sebagainya dalam bidang politik. Sementara pada persoalan substansial yang menyangkut perasaan ke-ASEAN-an (*we feeling*) yang masih sangat longgar dalam publik masing-masing ASEAN belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini bisa dilihat dari tipisnya hubungan emosional antara masyarakat ASEAN khususnya Indonesia-Malaysia.

Kemudian belum terkoneksinya secara menyeluruh antara ASEAN dengan media massa di negara-negara ASEAN, maupun antara media massa dengan pemerintah, khuusnya di Indonesia mengenai wacana *ASEAN Community* membuat media menjadi lebih provokatif dalam memberitakan setiap isu yang menyangkut hubungan Indonesia dan Malaysia. Media massa menjadi faktor pendukung terjadinya eskalasi atau melebarnya lokus konflik level negara kepada tingkatan publik dua negara. Seharusnya terbangun komunikasi yang baik antara mereka agar bersinergi antara satu sama lain. Selain itu antara Pers Indonesa dengan Pers Malaysia perlu dibangun perpektif bersama tanpa harus menghilangkan esensi dari kebebasan dan kemandirian pers masing – masing negara itu sendiri.

BAB VI. KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

Ludiro Madu, *Ambalat Netwar antara Indonesia-Malaysia, 2005: Refleksi Teoretis Mengenai Hubungan Internasional di Era Internet*, Jurnal Global Strategis, Tahun 2 No. 1 Januari- Juni tahun 2008

Abubakar Eby Hara, *Hubungan Malaysia dan Indonesia: Dari Saudara Serumpun ke `Smart Partnership`?* Makalah disampaikan dalam seminar internasional *Indonesia-Malaysia Update 2008,* Kerjasama Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia, dengan Universiti Malaya (UM) Malaysia, Yoyakarta, 27-29 Mei 2008.

Craig A. Snyder, 2008, *Contemporary Security and Strategy,* Palgrave: Macmillan.

Louis Fawcell, Andrew Hurrell, 2002, *Regionalism in World,* Oxford University Press.

B. Hettne and Soderbaun. 2002, *Theorizing the Rise of Regionnes"*. London: Routledge.

The Singapore Institute of International Affairs, 2007, *Regional Integration, Trade and Conflict in Southeast Asia*, Published by International Institute for Sustainable Development (IISD), Canada.

Evi Fitriani (Ed.), 2012, *Hubungan Indonesia-Malaysia Dalam PErspektif Sosial, Budaya, negara dan Media: Kasus Perbatasan dan Pekerja Migran*, Jakarta: UI Press.

Keputusan Presiden RI No. 49 tahun 1997 Tentang Pengesahan *Special Agreement for Submission to The International Court of Justice of The Despute Between Indonesia dan Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan*

Rahmadhona Fitri Helmi, *Politik Pemerintah Malaysia dalam Membatasi Kebergantungan pada Pekerja Konstruksi Asing Indonesia,* Jurnal TINGKAP Vol. IX No. 1 Th. 2013

Joseph Liow, 16 September 2002, *Desecuritising The "Illegal Indonesian Migrant Worker" Problem In Malaysia's Relations With Indonesia*, Institute of Defence and Strategic Studies, NTU, Singapore.

Vijayakumari Kanapathy, *Controlling Irregular Migration: The Malaysian Experience,* ILO Asian Regional Programme on Governance of Labour Migration Working Paper No.14.

Lin Mei, *Indonesian Labor Migrants in Malaysia: A Study from China*, *Working Paper Series,* ICS Working Paper No. 2006-11, Institut Pengajian China Universiti Malaya.

ASEAN Charter bab VIII Penyelesaian Sengketa, pasal 22 Prinsip Umum, ayat 1.

ASEAN Selayang Pandang, Edisi 20 tahun 2012

Shell and Malaysia's National Oil Company sign Production Sharing Contracts for Deepwater Blocks Offshore Sabah, diakses dari http://www.shell.com/home/content/media/news_and_library/press_releases/2005/Malay sia_contracts_deepwater_blocks_16022005.html.

Shell & Petronas Carigali Awarded Two Ultra-Deepwater Blocks", PETRONAS, diakses dari https://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=20354

I Made Andi Arsana, *Penyelesaian Sengketa Ambalatdengan Delimitasi Maritim:Kajian Geospasial Dan Yuridis,* dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010, hal. 53. Akses melalui https://www.academia.edu/332143/Penyelesaian_Sengketa_Ambalat_dengan_Delimitasis.

International Boundary Study, Series A: Limits in the Seas, No. 1 – January 21, 1970, "Indonesia – Malaysia *Continental Shelf Boundary*" (*Country Codes*: ID-MY), *The Geographer, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research,* http://xa.yimg.com/kq/groups/20920762/635446476/name/MPHI.

Joseph Chinyong Liow, *Indonesia - Malaysia Relations: Baggage of "Blood Brotherhood"*, RSIS Commentaries No. 124/2010 dated 28 September 2010. Akses dalam http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1242010.pdf

Ica Wulansari , *Aspek Keamanan dalam Strategi Energi Nasional*, Reporter Radio Republik Indonesia (RRI), Bandung, 2008-2009, https://www.academia.edu/4964277/ASPEK_KEAMANAN_DALAM_STRATEGI_ENERGI_NA_SIONAL

Ukertor Gabriel Moti, *A Review of Regional Approaches In Dealing With Security Issues*, http://www.interesjournals.org/full-articles/a-review-of-regional-approaches-in-dealing-with-security-issues.pdf?view=inline

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Antara Indonesia-Malaysia Serta Penyelesaiannya Melalui International Court Of Justice (ICJ), http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131180- T%2027319-Penyelesaian%20sengketa-Tinjauan%20literatur.pdf

Arif Havas Oegrosewu, *Batas Laut Indonesia- Malaysia Pasca Sipadan- Ligitan*, diakses melalui : http://www.kompas.co.id/bataslautIndonesiaMalaysia//

2007-2012 Malaysia Klaim 7 Budaya Indonesia, akses melalui http://www.antaranews.com/berita/317054/2007-2012-Malaysia-klaim-tujuh-budaya-Indonesia

*Malaysia Minta Maaf Soal Tari Pendet, a*kses melalui http://travel.kompas.com/read/2009/08/28/13205335/akhirnya.Malaysia.minta.maaf.soal._pendet

Elwin Tobing, 2004. *Migrasi Tenaga Ker-ja Global,*

www.thenIndonesianinstitute.org

Yessi Olivia, *Perlindungan TKI Pada Masa Penempatan Studi Kasus : TKI di Malaysia*, (Skripsi Hubungan Internasional, Repository University of Riau), akses melalui http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/4262/4/penelitian%202.pdf

Malaysia Sebarkan Keberatan RI Atas Sebutan "Indon", http://www.antaranews.com/print/63968/Malaysia-sebarkan-keberatan-ri-atas-sebutan- indon.

'We Hate Malaysia' No 1, 'Anti Malaysia' No 2, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/89802-_we_hate_malaysia__no_1

Sentimen Konsumen Indonesia Buat Produk Malaysia Tak Laku, diakses melalui http://www.merdeka.com/uang/sentimen-konsumen-indonesia-buat-produk-malaysia-tak-laku.html

Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi di Asia Tenggara

Oleh Melisa Fransiska

A. Pengantar

Akhir tahun 2015 merupakan tahun yang sangat penting untuk Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN karena mereka akan memasuki ASEAN Economic Community atau AEC. ASEAN memutuskan bahwa mereka akan menghapuskan semua pajak atau cukai dari impor dan ekspor antara negara-negara anggota. ASEAN bukan pemain kecil dalam bisnis dunia. Dengan GDP 2,32 trilliun USD, ASEAN merupakan daerah perdagangan bebas ketiga terbesar di dunia.[348] Dengan kekuatan sebesar ini, tentu saja AEC bisa memberikan keuntungan bagi negara-negara anggotanya dengan mewujudkan integrasi ekonomi di negara-negara ASEAN. Namun AEC tidak akan memberikan manfaat terhadap masyarakat ASEAN jika tindak korupsi masih merajalela. Hal ini dikatakan oleh Transparency International, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melawan korupsi. Transparency International memperingatkan kemungkinan akan semakin merajalelanya aksi korupsi di daerah ASEAN.[349] Ini khususnya terjadi karena adanya proyek-proyek baru antar negara-negara Asia Tenggara jika ASEAN Economic Community tercapai. Akan ada banyak penyuapan pejabat publik yang terjadi antar negara, penyelundupan, *traffiking*, dan juga *money laundry*.

Korupsi adalah tindak kejahatan yang memakan korban secara tidak langsung atau dimana dampaknya tidak dapat dirasakan dan terlihat dalam waktu cepat. Namun, dampak korupsi sangat besar dan dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, khususnya ekonomi rakyat kecil. Asia Tenggara yang merupakan salah satu pusat dari masyarakat termiskin di dunia bisa berhasil dalam mewujudkan pertumbuhan

---

[348] "Toward an ASEAN Anti-Corruption Standard?," *conventuslaw.com*, accessed November 14, 2015, http://www.conventuslaw.com/report/toward-an-asean-anti-corruption-standard/.

[349] "ASEAN integration 'risks more corruption'," *todayonline.com*, accessed November 14, 2015, http://www.todayonline.com/business/asean-integration-risks-more-corruption.

berkelanjutan dan bisa menghilangkan ketimpangan pendapatan dengan memberantas korupsi.[350]

Tapi apakah yang dimaksud dengan korupsi? Di dalam makalah ini, ada beberapa definisi yang dapat dipakai untuk mendefinisikan korupsi. Susan Rose-Ackerman berkata bahwa "Korupsi terjadi pada saat pihak swasta dan pihak pemerintah bertemu dan tumpang tindih. Ini berarti penyuapan pejabat publik menjadi salah satu syarat penting dalam mengambil keputusan. Hal ini mendorong pejabat publik untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kerja mereka, dalam hal ini, melayani masyarakat luas, dikarenakan terjadinya pemakaian uang rakyat."[351] Berbeda dengan Rose-Ackerman, Joseph Nye lebih berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan atau *power abuse* yang dilakukan oleh pejabat publik dalam memberi definisi korupsi. Menurut Nye, "Korupsi adalah kelakuan menyimpang dari tugas resmi oleh pejabat publik yang dipicu oleh keuntungan ekonomi pribadi (perseorangan, keluarga dekat, kelompok pribadi) atau perolehan status; atau melanggar peraturan yang bersifat menguntungkan pribadi"[352] Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi sangat dekat dan bersangkutan di setiap aspek kehidupan masyarakat dimana ada anggapan bahwa korupsi 'meresap' di dalam lingkungan pribadi dan publik.[353]

---

[350] "Why ASEAN needs to confront corruption in Southeast Asia," *transparency.org*, accessed November 14, 2015, http://www.transparency.org/news/feature/why_asean_needs_to_confront_corruption_in_southeast_asia.

[351] Susan Rose-Ackerman, "Corruption and Government." *International Peacekeeping* 15, no. 3 (2008): 328.

[352] J.S. Nye, "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis," *The American Political Science Review* 61, No. 2 (1967): 419.

[353] Elisabeth Kramer and Michele Ford, "The Many Faces of Corruption," *Inside Indonesia*, April 2, 2012, accessed April 29, 2012, http://www.insideindonesia.org/stories/the-many-faces-of-corruption-01042897?Itemid=2

Korupsi biasanya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan uang negara namun seperti yang sudah dikatakan Nye, fokusnya bukan hanya penyalahgunaan uang negara namun penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini salah satunya disebut sebagai gratifikasi. Definisi gratifikasi yang diambil dari ACA di Indonesia atau KPK berasal dari Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999:

> "Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjawalan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterimaa di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik."

Jadi, gratifikasi merupakan bentuk korupsi yang juga kadang tidak melibatkan uang tapi juga bisa berupa janji atau melibatkan pemberian fasilitas, hadiah, dan lain-lain dimana akibat yang ditimbulkan adalah kerugian negara atau kerugian terhadap masyarakat luas. Misalnya, ada *tender* untuk mendapatkan proyek negara untuk membangun jembatan di suatu daerah. Karena peserta *tender* yang ikut ada beberapa, mereka harus berkompetisi dan yang menentukan pemenang *tender* pastilah pejabat publik. Seandainya, pejabat publik tersebut menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang menguntungkan pejabat publik dan mengakibatkan pemberi hadiah memenangkan *tender* maka maka hal itu sudah disebut gratifikasi. Dampak negatifnya, masyarakat di daerah dimana jembatan itu akan dibangun tidak mendapatkan perusahaan terbaik yang bisa membangun jembatan itu. Korupsi merusak negara dan merugikan rakyat banyak. Semua negara setuju dengan hal ini.

Pada Konferensi Anti-Korupsi ke-8 yang diikuti oleh 93 negara dan lebih dari 1000 peserta di Lima, Peru, dihasilkanlah Deklarasi Lima yang menyatakan bahwa korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang lemah, merusak demokrasi, menumbangkan asas-asas hukum yang merupakan dasar masyarakat beradab, memperlambat kemajuan, dan mengambil kesempatan masyarakat khususnya yang kurang mampu dalam kompetisi yang bebas dan

terbuka.[354] Jika ASEAN tidak bisa bekerjasama menemukan satu solusi untuk masalah korupsi, dikhawatirkan inegrasi ekonomi di AEC yang akan terjadi justru malah memperburuk masalah korupsi di setiap negara ASEAN.[355] Hal ini dikemukakan oleh Transparency International, sebuah organisasi internasional anti korupsi.

Selain dari dampak negatif yang dialami oleh rakyat kecil, korupsi juga akan merugikan ekonomi negara, karena korupsi merupakan hal terutama yang membuat resah para investor asing di ASEAN.[356] Sebagai contoh, menurut Bank Dunia, Filipina mengalami kerugian negara sebesar 4 milyar US$ pada tahun 2008 karena aksi suap.[357] Oleh karena itu, jika ASEAN menginginkan ASEAN Economic Community (AEC) berjalan baik maka dibutuhkanlah satu komitmen dari negara-negara di ASEAN untuk memberantas korupsi. Khususnya di Indonesia dimana elit politik justru mau melemahkan ACAnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, dan itu menyebabkan keresahan para investor asing. Di Malaysia, Nazir Razak, ketua dari CIMB group juga mengatakan bahwa krisis korupsi di negerinya, merupakan satu *impeachment* atau pemakzulan terhadap investasi asing. Pemerintah Malaysia menghadapi krisis yang memudarkan kepercayaan investor asing dan juga masyarakat Malaysia. Jika investor asing tidak merasa iklim ekonomi di ASEAN bebas dari korupsi maka tidak akan ada investor asing yang akan menanamkan modalnya di ASEAN. Pemerintah harus bisa mendukung gerakan anti korupsi demi pembangunan ekonomi di daerah ini.

---

[354] "Lima Declaration," ucl.ac.uk, accessed November 10, 2015, http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_governance/pdf_trans_corrupt/IACC_TI_Lima_declaration.pdf.

[355] "ASEAN integration 'risks more corruption'," *todayonline.com*, accessed November 14, 2015, http://www.todayonline.com/business/asean-integration-risks-more-corruption.

[356] Naomi Canton, "Experts: Corruption and politics are hampering ASEAN economic integration" *Asia House*, October 13, 2015, accessed Ocober 29, 2015, http://asiahouse.org/corruption-lack-political-leadership-hampering-asean-economic-integration/.

[357] Santosh Digal, "Corruption is a cancer to the countries of South-East Asia," asianews.it, accessed November 8, 2015, http://www.asianews.it/view4print.php?l=en&art=17847.

Pemimpin-pemimpin negara dapat memperkuat gerakan anti-korupsi dengan mendukung anti-corruption agency (ACA) di negaranya masing-masing, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sayangnya, itu saja tidak cukup karena korupsi sudah terlalu berakar dan merajalela di negara-negara ASEAN. Dapat dilihat bahwa Corruption Perception Index (CPI) di negara-negara ASEAN sangat rendah, kecuali Singapura dan Malaysia yang mendapatkan skor di atas 50 (skor tertinggi 100)

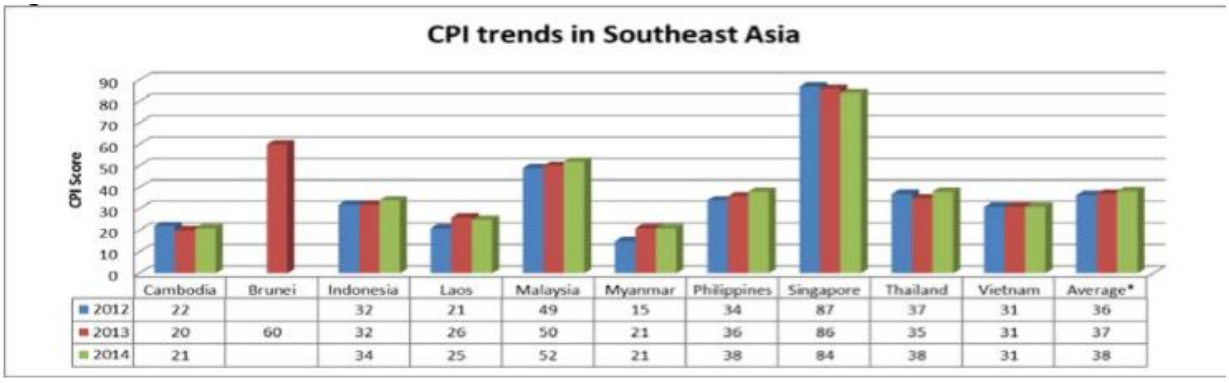

	Cambodia	Brunei	Indonesia	Laos	Malaysia	Myanmar	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam	Average*
2012	22		32	21	49	15	34	87	37	31	36
2013	20	60	32	26	50	21	36	86	35	31	37
2014	21		34	25	52	21	38	84	38	31	38

Tingkat korupsi di ASEAN (tidak termasuk Brunei)[358]

Selain itu, situasi politik di beberapa negara ASEAN tidak kondusif dalam memberantas korupsi.[359] Niat pemerintah memberantas korupsi diragukan. Hal ini bisa dibuktikan dengan perbuatan badan legislatif yang justru mau melemahkan KPK berulang kali dengan mencabut wewenang-wewenang KPK dalam menjalankan tugasnya dan juga beberapa kali berniat mengubah undang-undang KPK. Di Myanmar juga terjadi korupsi di departemen kepolisiannya. Hal ini juga sudah diakui oleh President U Thein Sein pidato kepresidenannya.[360] Korupsi juga sudah

[358] Table is taken from Transparency International.

[359] Muninggar Sri Saraswati, "Government's commitment to fighting corruption questioned," *The Jakarta Post*, August 29, 2004, accessed July 26, 2013, http://www.thejakartapost.com/news/2004/08/29/govt039s-commitment-fighting-corruption-questioned.html.

[360] "The New Light of Myanmar: President U Thein Sein delivers inaugural address to Pyidaungsu Hluttaw," *burmanet.org*, last modified Mar 31, 2011,

merupakan "budaya" di negara ASEAN. Contohnya seperti yang terjadi di Thailand dimana adalah hal biasa untuk memberikan "hadiah" kepada pegawai pemerintah. Hal ini dimaklumkan karena adanya budaya memberi hadiah. Ini tidak dianggap sebagai suap seperti istilah yang dipakai *sin nam jai* atau *gifts of goodwill*. Hal ini tidak dianggap korupsi karena selama tidak merugikan atau menyusahkan orang lain maka ini diterima oleh masyarakat Thailand.[361] Namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, korupsi adalah suatu tindak kriminal atau kejahatan di mana korbannya tidak langsung terlihat. Jadi, hal ini mendorong adanya sikap "menerima" dalam budaya suap. Ini hanya sebagian kecil contoh dari tindak korupsi dan kurangnya penanganan korupsi di negara-negara ASEAN.

Oleh karena kurangnya tindakan pemerintah dalam mendukung aksi anti korupsi, aktor non-negara sangat dibutuhkan dalam membantu memerangi korupsi. Beberapa aktor non-negara adalah organisasi non-profit atau NGO dalam gerakan anti-korupsi, masyarakat luas, dan juga media. Beberapa NGO anti-korupsi adalah Transparency International lokal untuk beberapa negara ASEAN dan Indonesian Corruption Watch di Indonesia. NGO seperti ini jelas membantu gerakan anti korupsi di ASEAN. Masyarakat ASEAN yang sudah tidak tahan dengan tindak korupsi juga akan bergerak dan melawan tindak-tindak korupsi. NGO dan dukungan dari masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam memberantas korupsi. Namun ada satu aktor non-negara lagi yang sangat penting perannya, yaitu Media.

Media yang bebas dari intervensi pihak manapun juga bisa mendukung pemberantasan korupsi di ASEAN yang sudah mengakar dan menjadi "budaya" Makalah ini akan menjelaskan tiga peran media dalam membantu pemberantasan korupsi. Pertama, media yang bebas dan mandiri dapat menjadi partner ACA dalam menjalankan tugasnya. Kedua, media dapat melindungi ACA pada saat terjadi penyerangan atau pelemahan ACA. Ketiga, media dapat menjadi penyambung lidah

---

http://www.burmanet.org/news/2011/03/31/the-new-light-of-myanmar-president-u-thein-sein-delivers-inaugural-address-to-pyidaungsu-hluttaw/.

[361] Jon S. T. Quah, "Curbing Asian Corruption: An Impossible Dream?," *stanford.edu*, accessed August 9, 2015, http://fsi.stanford.edu/sites/default/files/Corruption_article_in_CH.pdf.

masyarakat yang sudah tidak tahan dengan tindak korupsi di negerinya. Dengan tiga peran media ini, pemberantasakn korupsi dapat bekerja dengan baik di negara-negara ASEAN.

B. *Anti-Corruption Agency* di ASEAN dan tantangannya

Pemerintah negara-negara ASEAN sudah menunjukkan komitmen mereka dengan membangun ACA di negaranya. Yang pertama mendirikan ACA adalah Singapore pada tahun 1952 dengan nama Corrupt Practices Investigation Bureau. Diikuti oleh Malaysia dengan Malaysian Anti-Corruption Commission sejak tahun 1967. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan pada tahun 2003. Di Filipina, Office of the Ombudsman merupakan satu ACA yang paling aktif menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Filipina menggunakan strategi *multi agencies* dengan alasan banyaknya kasus korupsi yang harus ditangani, berbeda dengan Malaysia dan Indonesia yang terpusat penangannya pada satu ACA. Kamboja juga sudah memulai pemberantasan korupsi dengan mendirikan Anti Corruption Unit. Thailand mengandalkan National Anti-Corruption Commission untuk menangani kasus korupsi.

ACA terbentuk karena adanya panggilan dari masyarakat yang sudah jenuh dengan korupsi yang terjadi di pemerintahannya. Memang ACA pada dasarnya bertugas untuk menyelesaikan kasus korupsi dengan membawa koruptor-koruptor ke meja hijau. Namun, para ACA ini bisa terseret ke kontroversi politik karena penyelidikan mereka terhadap orang-orang yang berkuasa. Beberapa ACA di Asia Tenggara sering mengalami tekanan dan ancaman karena kasus-kasus besar yang menyeret pejabat-pejabat negara yang berpengaruh. Hal ini menyebabkan pengaruh negatif terhadap kinerja ACA. Contohnya, pada saat awal-awal terbentuknya KPK di Indonesia, KPK dituduh sebagai ACA yang ‘tebang pilih’ yaitu mereka hanya berani mengusut kasus-kasus korupsi yang kecil dan tidak melibatkan pihak yang berkuasa dan punya pengaruh. ACA juga mengalami ancaman dan serangan terhadap

pegawainya seperti yang dialami oleh ACA di Thailand dan juga di Indonesia.[362] Hal lain yang mempengaruhi kinerja ACA di ASEAN juga kurangnya bantuan dan dukungan dari pemerintah secara konkrit. Bahkan ACA selalu mengalami 'serangan' untuk melemahkan atau mengurangi otoritasnya.

Beberapa contoh pelemahan yang krusial dihadapi ACA adalah perubahan undang-undang atau dasar hukum yang memungkinkan ACA untuk bekerja. Ironisnya, pelemahan itu datang sendiri dari badan legislatif yang niscayanya melindungi ACA sebagai satu aktor negara. Contoh pelemahan ACA melalui dasar hukumnya bisa dilihat di Indonesia. KPK di Indonesia sudah mengalami pengajuan 17 *judicial review* oleh DPR.[363] Beberapa contoh perubahan undang-undang yang diingini oleh DPR adalah pencabutan kekuatan KPK dalam wiretapping atau menyadap dan juga kewenangan KPK untuk mengambil alih kasus korupsi yang berjumlah sebesar 1 milyar rupiah. DPR mau mengubah agar KPK hanya menangani kasus yang berjumlah lebih dari 50 milyar dan dengan begitu lingkup penanganan KPK semakin kecil.[364] Dengan semua tantangan yang melanda ACA di ASEAN, dibutuhkan pihak-pihak lain yang bisa membantu ACA bertahan.

C. Media yang ideal

Badan anti-korupsi memang membutuhkan bantuan dari insititusi lainnya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.[365] Aktor-aktor non-negara seperti komunitas masyarakat dan NGO bisa membantu ACA bertahan menghadapi tantangan. Namun, dukungan dari media merupakan kunci dari ini semua. Sayangnya

---

[362] "Fighting corruption: the role of the Anti-Corruption Commission," *tranparency.org*, accessed November 8, 2015, http://www.transparency.org/news/feature/fighting_corruption_the_role_of_the_anti_corruption_commission.

[363] Nita Dian, "Sebuah Ikhtiar Satu Dasarwarsa," Tempo, December 31, 2012-January 6, 2013, 70.

[364] "Lima pasal dalam RUU KPK yang disusun DPR," *bbc.com*, last modified Oct 7, 2015, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151007_indonesia_ruu_kpk_limahal.

[365] Goenawan Mohamad, "Catatan Pinggir: KPK," *Tempo*, October 11, 2009, 130.

tidak asal media bisa membantu ACA. Media tersebut haruslah merupakan media yang ideal, yaitu mandiri dan bebas. Kebebasan press berarti, media bisa melaporkan atau meliput berita-berita tentang korupsi yang melibatkan pihak yang berkuasa dan berpengaruh tanpa adanya ketakutan atau kekhawatiran adanya balasan dari pihak yang dilaporkan. Media yang bebas dan mandiri bisa dengan berani mengekpos kejahatan korupsi dan pada akhirnya hal ini bisa menjadi efek jera terhadap para koruptor.[366]

Sayangnya, di beberapa negara ASEAN, kurangnya kebebasan press sudah lama menjadi isu yang harus dipecahkan. Hal ini biasanya terjadi di masa-masa pemerintahan yang tidak demokratis. Kalau kita lihat pada kasus di Indonesia, kebebasan press yang teredam dialami pada masa Presiden Suharto. Di Filipina, press mengalami tekanan pada masa pemerintahan presiden Marcos. Di Myanmar dengan pemerintahan juntanya sudah pasti memberi keterbatasan terhadap media di negara tersebut. Dengan adanya hukum *Lèse-majesté* di Thailand, media dan juga masyarakat tidak bisa mengkritik keluarga kerajaan. Vietnam yang mempunyai sejarah komunis memiliki peraturan yang ketat mengenai press dan medianya. Karena kebebasan press berkaitan erat dengan demokrasi maka negara yang tidak demokratis biasanya mempunyai kecenderungan untuk mengontrol medianya. Saat ini negara-negara di ASEAN merupakan negara yang tergolong baru dalam meyambut demokrasi, jika dibandingkan dengan negara-negara di barat. Walaupun Piagam ASEAN pada tahun 2008 sudah menyebutkan komitmen para anggotanya untuk menjalankan asas demokrasi, pelaksanaan konsep demokrasi tentu saja tergantung pada negara masing-masing.

Berdasarkan laporan Freedom House, sebuah organisasi yang mengukur kebebasan berpendapat baik melalui media maupun kebebasan berpendapat secara umum, negara-negara di Asia Tenggara masih merupakan negara-negara yang tidak

[366] Philip. B. Heymann, "Democracy and Corruption," 20 Fordham Int'l L.J. 323 (1996-1997), 329.

bebas atau kurang bebas. Di bawah ini daftar negara-negara di Asia Tenggara dan status kebebasan pressnya.[367]

1. Indonesia: Partly Free
2. Thailand: Not Free
3. Myanmar: Not Free
4. Kamboja: Not Free
5. Vietnam: Not Free
6. Filipina: Partly Free
7. Malaysia: Partly Free
8. Singapore: Partly Free
9. Laos: Not Free
10. Brunei Darussalam: Not Free

Jika melihat status kebebasan press di atas, bisa dilihat bahwa negara-negara di ASEAN belum memberikan kebebasan terhadap medianya. Sebagai perbandingan, negara-negara yang tergolong negara maju seperti Australia, Perancis, Jerman, dan Amerika, mendapatkan status Free. Dan negara-negara ini juga mendapatkan skor yang tinggi untuk Corruption Perception Index (CPI) yang mengindikasikan bahwa korupsi di negara tersebut rendah. Kebebasan media berpengaruh penting pada demokrasi dan juga pemberantasan korupsi. Dengan adanya kebebasan media, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang punya pengaruh kuat bisa dilaporkan tanpa adanya ketakutan akan serangan balik atau tekanan terhadap pihak media. Seperti yang ditulis Clay Wescott mengenai pemberantasan korupsi di Asia Tenggara, dikatakan bahwa liberalisasi press dapat memungkinkan para wartawan untuk menulis secara lebih bebas mengenai kelakuan menyimpang pejabat publik.[368]

Pemerintah di Asia Tenggara diharapkan bisa memberikan kebebasan yang lebih terhadap medianya. Sensor yang ketat dan hukum yang membatasi media seharusnya dihapuskan demi tercapainya media yang bebas dan mandiri. Semakin

[367] *Freedomhouse.org*, accessed November 1, 2015, https://freedomhouse.org/regions/asia-pacific.

[368] Clay Wescott, "Combatting Corruption in Southeast Asia," 238.

banyak media yang bebas dan mandiri, kemungkinan untuk menurunnya korupsi semakin besar dan juga akan terjadi kenaikan akuntabilitas dari pemerintah. Seperti yang Di Tella dan Franceschelli katakan, semakin banyaknya wartawan dan media berita maka akan terjadi kenaikan akuntabilitas dari pemerintah atau pemerintah akan lebih bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan.[369] Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan tugasnya mengelola uang negara dan tidak melakukan korupsi ataupun gratifikasi.

Media yang bebas dan mandiri merupakan satu alat yang penting dalam melawan korupsi. Di ASEAN, kebebasan media tidak selalu terjamin dikarenakan rezim-rezim otoriter yang mengontrol media. Seperti yang terjadi di Filipina pada jaman Presiden Marcos, di Indonesia, pada jaman President Soeharto, dan juga militer junta di Myanmar dan juga di Thailand yang saat ini masih berlangsung. Padahal, banyak studi sudah mengungkapkan betapa pentingnya kebebasan media dalam memerangi korupsi dan menaikkan akuntabilitas pemerintah. Dalam studi yang dilakukan oleh Di Tella dan Franceschelli di Argentina, mereka menemukan bahwa dengan adanya lebih banyak "mata" yang mengawasi pemerintah, pejabat pemerintah akan merasakan tekanan untuk menghasilkan performa kerja yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab.[370] Brunetti dan Weder juga mengemukakan bahwa bahwa kebebasan media dapat menjadi kontrol yang kuat dalam melawan korupsi. Dalam studi pada tahun 2003, mereka menemukan bukti adanya keterkaitan antara kebebasan media dan korupsi. Hasil studi mereka di banyak negara membuktikan bahwa ada keterkaitan langsung antara tingginya kebebasan media dengan rendahnya tindak korupsi. Semakin tingginya kebebasan media maka angka korupsi akan semakin rendah.[371]

---

[369] Rafael Di Tella and Ignacio Franceschelli, "Government Advertising and Media Coverage of Corruption Scandals," *American Economic Journal: Applied Economics* 3, no. 4 (2011): 120.
[370] Ibid.

[371] Aymo Brunetti and Beatrice Weder, "A Press is Bad News for Corruption," *Journal of Public Economics* 87 (2003): 1801.

Namun untuk mendapatkan kebebasan media tidaklah mudah karena tantangan-tantangan dari pemerintah khususnya di negara berkembang. Seperti yang sudah disebutkan di atas, rezim-rezim otoriter ada kecenderungan mengontrol media di negaranya. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah tidak membantu media dalam menjalankan peran sesungguhnya, yaitu menyediakan kepada masyarakat luas dengan informasi yang benar dan lepas dari pengaruh atau tekanan manapun. Misalnya pemerintah menyalahgunakan kekuasan dengan bentuk sensor dan intimidasi.[372] Dengan adanya tantangan dan intervensi dari pemerintah, media terhalang untuk melakukan tugasnya secara independen dan lepas dari prasangka.

Selain tantangan dari luar atau dari pemerintah, media juga mendapat tantangan dari dalam. Perusahaan media merupakan bisnis dan mereka dapat beroperasi dengan mengandalkan penjualan produk mereka seperti majalah, koran ataupun berita online yang mengandalkan penjualan iklan. Mereka harus berkompetisi dengan media yang lainnya. Dengan adanya kompetisi bisnis, mereka akan memilih berita yang dapat menarik pembaca. Terkadang berita yang penting dan *newsworthy* dapat terlewatkan dan tidak sampai kepada masyrakat luas. Oleh karena itu, kebebasa media sedikit diragukan dapat membuat media yang lebih baik dan lebih transparan karena media juga dipengaruhi oleh laba bisnis.

Hal lain yang bisa mempengaruhi integritas media adalah pengaruh orang dalam. Menurut Ezki Suyanto, wakil direktur dari Komisi Penyiaran Indonesia dan Abdul Manan, wartawan Tempo, media terutama televisi biasanya dimiliki oleh orang yang berafiliasi dengan partai politik tertentu. Perusahaan media seperti itu biasanya akan *bias* dalam melaporkan berita. Situasi seperti ini dapat mengganggu transparansi dan kualitas berita. Karena alasan-alasan inilah, tidak sembarang media bisa menjadi partner bagi ACA atau gerakan anti-korupsi, melainkan media yang bebas dan mandirilah yang bisa.

[372] Di Tella, "Government Advertising and Media Coverage of Corruption Scandals," 144.

D. Peran Media sebagai aktor non-negara yang membantu memerangi korupsi

Walaupun dengan adanya berbagai tantangan yang dihadapi media, tidak dapat dipungkiri keberadaan media jelas dapat membantu gerakan anti-korupsi. Salah satu yang penting adalah membantu sepak terjang *anti-corruption agencies* (ACA), khususnya ACA di negara-negara ASEAN. Dengan latar belakang politik di ASEAN yang mempunyai sejarah rezim otoriter, gerakan anti-korupsi menghadapi banyak masalah. Berdasarkan piagam ASEAN, para pemimpin ASEAN sudah berkomitmen untuk mengusung demokrasi di pemerintahannya masing-masing. Dan untuk mencapai demokrasi, pemberantasan korupsi adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Ada tiga peran penting yang bisa dilakukan yaitu, (1) pendukung penting untuk peran ACA dalam menjalankan tugasnya, (2) melindungi ACA ketika diserang, (3) penyambung lidah masyarakat yang sudah tidak tahan dengan tindak korupsi di negerinya. Media bisa memberikan dukungan kepada ACA yang sering diserang oleh musuh-musuhnya.

ACA juga mempunyai beberapa kelemahan yang hanya bisa diatasi dengan peran media sebagai *watchdog* (penjaga), untuk para *watchdog*, dalam hal ini ACA. ACA yang didirikan oleh negara atau aktor negara cenderung memiliki kelemahan karena pada akhirnya ACA akan memberi laporan dan mematuhi pemerintahan negara yang mendirikan ACA. Misalnya ACA di Malaysia bertanggungjawab atau melapor kepada pemerintahannya. Sama seperti di Indonesia dimana proses akhir untuk pemilihan kepala ACA masih ditentukan oleh badan legislatif. Sebagai contoh pada pemilihan ketua KPK yang akan datang yang akan berakhir pada pertengahan Desember 2015 ini masih *pending* atau tersangkut pada badan legislatif. Jadi, walaupun banyak ACA diberi kewenangan luas, jika pada akhirnya keputusan masih di tangan badan yang berbeda, maka ACA masih belum bisa efektif.

E. ACA di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan media

Bagian ini akan mendiskusikan hubungan antara media dengan gerakan anti-korupsi khususnya ACA di Indonesia. Walaupun bagian ini berfokus pada Indonesia, penulis percaya hal ini bisa dipakai sebagai contoh untuk situasi ACA yang lain di

ASEAN. Sebagian dari hasil riset berasal dari wawancara dengan penggiat anti-korupsi dan pekerja media yang dilakukan dari Desember 2012 sampai dengan January 2013. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada tiga cara media bisa membantu ACA yaitu pendukung ACA, pelindung ACA dan penyambung lidah bagi masyrakat yang mendukung gerakan anti korupsi. Wawancara ini dilakukan dengan wartawan dari Tempo, Detik, dan Kompas, dan juga aktivis anti-korupsi. Selain dari media, wawancara ini juga mempunyai nara sumber dari pejabat KPK.

Fungsi pertama dari media adalah mendukung ACA. Hal ini bisa dilakukan dengan menulis tentang ACA dan kasus-kasus korupsi secara reguler sehingga masyarakat bisa selalu mendapatkan situasi terbaru. Salah satu narasumber yang sangat setuju dengan pernyataan ini adalah Abdul Manan, salah satu waratwan Tempo. Menurutnya, “Ada komitmen dari press untuk menolong KPK. Setiap kali ada penangkapan, beritanya akan selalu ada di halaman depan.” Sama dengan Dimas Adityo, wartawan di Detik, dia juga mengatakan bahwa “Media telah melakukan kerjanya dalam meliput berita tentang korupsi. Media terus mengejar kasus-kasus korupsi.” Dia melanjutkan dengan memberikan contoh bagaimana media meletakkan seorang hakim di *spotlight* sesudah hakim tersebut memberikan putusan tak bersalah kepada seorang koruptor. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa media sudah efektif dalam peliputan kasus-kasus korupsi dan juga dalam memberikan publik berita-berita terbaru mengenai korupsi sehingga bisa memberikan tekanan terhadap para koruptor. Dimas juga mengatakan bahwa KPK sebagai ACA di Indonesia dan media saling membantu dan saling membutuhkan. Tidak dapat dipungkiri ACA sebagai ujung tombak dalam memberantas korupsi, namun usaha-usaha ini tidak akan berbuah tanpa media yang mempublikasikan sepak terjang ACA. Nur Imam Subono, dosen politik di salah satu universitas di Indonesia, mengatakan bahwa media perlu berfokus untuk menaikkan kesadaran masyarakat mengenai korupsi dan juga berfokus untuk membantu ACA di Indonsesia. Tetapi seperti dikatakan sebelumnya bahwa media juga merupakan bisnis maka terkadang berita yang tidak cukup ‘seksi’ tidak akan diterbitkan. Jadi Nur mengatakan bahwa memang benar media bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai korupsi namun dia berpendapat bahwa tidak semua

media berkomitmen dalam gerakan anti-korupsi karena bukannya menerbitkan berita tentang korupsi beberapa media bisa menerbitkan berita yang mempunyai nilai jual. Budi Setyareso, wartawan di tempo, juga mengatakan hal yang senada. Budi mengatakan bahwa media mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam tugasnya. Namun Budi sama sekali tidak mengecilkan peran media dalam memberantas korupsi. Bahkan dia mengatakan bahwa media dan ACA di di Indonesia melengkapi satu sama lain. Perlu diingat bahwa konsumen berita bukan hanya masyrakat biasa melainkan pejabat-pejabat publik juga. Jadi, menurut Abdul Manan, berita-berita mengenai penangkapan koruptor bisa menjadi efek jera bagi para koruptor lain atau pejabat publik yang sedang berpikir untuk melakukan korupsi. Hal ini bisa menakuti pejabat untuk tidak melakukan korupsi.

Yang kedua, media juga dianggap sebagai partner yang tak ternilai untuk ACA dalam melindungi ACA. Mereka bisa melindungi dan membela ketika ACA diserang oleh musuh-musuhnya. Satu contoh adalah dari Heru Hendratmoko, wartawan dari Kantor Berita 68H, mengatakan bahwa wartawan menggunakan jaringan mereka untuk mengontak teman-teman wartawan yang lain dan juga masyrakat umum untuk membela KPK ketika KPK diserang oleh Kepolisian Indonesia. Para wartawan dan penggiat anti-korupsi membuat barikade untuk menghalangi polisi memasuki kantor KPK dan menangkap penyelidik KPK. Ezki Suyanto, pejabat Komisi Penyiaran Indonesia, mengatakan bahwa media dan publik melindungi KPK. Selain dengan cara mengumpulkan masa pada saat ACA diserang, namun juga menulis tentang penyerangan KPK dari musuh-musuhnya, sehingga itu bisa menimbulkan simpati masyarakat luas. Opini-opini di atas menunjukkan bagaimana media bisa menjadi pendukung besar untuk ACA dalam memberantas korupsi. ACA akan menjadi lebih percaya diri dan semakin kuat dengan dukungan media yang selalu memberikan berita terbaru tentang korupsi kepada masyarakat luas.

Yang terakhir, peran media dalam memberantas korupsi adalah menjadi penyambung lidah masyrakat yang sudah bosan dan tidak tahan dengan korupsi yang melanda negaranya. Agus Sunaryanto yang bekerja di ICW atau Indonesian

Corruption Watch, mengatakan bahwa ICW bekerja sama dengan media untuk menyelidiki kasus korupsi bersama. Ini menunjukkan bagaimana organisasi masyarakat yang mau berjuang melawan koruptor bekerjasama dengan media. Johan Budi, pejabat ACA di Indonesia juga menegaskan bahwa media adalah partner strategis untuk menjadi suara KPK kepada masyrakat dan juga sebaliknya, media bisa menjadi suara masyarakat kepada KPK. Ini artinya adalah publik bisa menggunakan media untuk menunjukkan keprihatinan mereka namun KPK juga bisa memakai media untuk menggaungkan pesan kepada masyarakat tentang anti-korupsi.

Opini-opini dari wartawan yang diwawancarai menunjukkan bahwa KPK hanya mempunyai dua teman, yaitu publik dan media. Kerjasama antara ACA dan media yang bebas bisa meningkatkan kesadaran anti-korupsi (tindak pencegahan) dan menangkap dan menimbulkan efek jera terhadap para koruptor (penegakan hukum). Dimas dari Detik juga mengatakan bahwa ACA di Indonesia "dibesarkan" oleh media. Ini merupakan pernyataan yang sangat kuat mengenai peran media untuk ACA di Indonesia. Johan Budi juga mengatakan bahwa diperlukan badan lain untuk mengawasi ACA karena biasanya ACA diberikan wewenang yang cukup luas. Disinilah peran media diperlukan. Selain itu dia juga mengatakan bahwa publik mendukung KPK melalui media dengan cara menyebarkan informasi yang diperlukan untuk menggerakan masa demi membela KPK.

F. Penutup

Korupsi merusak ekonomi dan merusak moral bangsa. Asean Economic Community yang akan dilakuan oleh ASEAN dapat membuka pintu-pintu baru kepada koruptor-koruptor yang bukan hanya dari negara masing-masing melainkan dari seluruh ASEAN. Untuk menanggulangi hal ini terjadi, Transparency International menyarankan agar ASEAN membentuk ASEAN Integrity Community dimana pemerintah-pemerintah ASEAN akan bekerjasama dalam gerakan anti korupsi yang mengandalkan organisasi pemerintah anti-korupsi (ACA), pelaku bisnis

dan juga kelompok masyarakat.[373] Kelompok masyarakat seperti NGO dan media bisa memainkan peranan besar dalam memerangi korupsi dengan menyediakan sumber-sumber tambahan, memberikan standar baru, membentuk hukum dan kebijakan baru, memonitor strategi yang sedang berjalan dari pemerintah, mengambangkan kesadaran tentang korupsi dan menekan toleransi oleh publik mengenai aksi korupsi.[374] Dalam hal ini, media akan sangat berguna karena media bisa menyebarkan informasi mengenai para koruptor dengan memberi efek jera dan juga menyebarkan informasi mengenai efek negatif korupsi. Selain itu, media menjadi *watchdog* untuk pemerintah dan juga ACA dengan menjaga mereka agar tidak keluar jalur dari kebijakan anti-korupsi.

Aktor anti-negara seperti media bisa sangat membantu dan efektif dalam memerangi korupsi. Transparency International juga menyebutkan bahwa pemerintah sebaiknya mengembangkan standar regional untuk rangka hukum dan juga hukum kebebasan press dan melindungi *whistle-blower*.[375] Transparency International menekankan pentingnya kebebasan press karena mereka tahu bahwa tanpa kebebasan press, aksi anti korupsi sangat sulit untuk dilakukan. Dengan adanya aksi pemberantasan korupsi yang efektif, AEC bisa diwujudkan dan para investor bisa lebih tenang menanamkan modalnya karena alasan terbesar tidak ada orang yang mau berinvestasi di ASEAN adalah sikap yang setengah hati dalam memberantas korupsi di kebanyakan negara-negara ASEAN, kata Danny Quah, Director of the Saw Swee Hock Southeast Asia Centre at LSE in London.[376]

Walaupun negara-negara di ASEAN sekarang masih berjuang untuk melawan korupsi dan masih harus memberikan lebih banyak kebebasan terhadap press demi membantu pemberantasan korupsi, tidak berarti masa depan ASEAN kelam dalam melawan korupsi. Seperti yang disampaikan oleh UNDP (United Nations

---

[373] "ASEAN integration 'risks more corruption'"

[374] "ASEAN Integrity Community: A Vision for Transparent and Accountable Integration," *transparency.org*, accessed November 1, 2015, Transparency+International+ASEAN+Integrity+Community_web.pdf.

[375] "ASEAN integration 'risks more corruption'"

[376] "ASEAN integration 'risks more corruption'"

Development Programme) bahwa komitmen ASEAN bisa dilihat dari alokasi dana untuk kampanye kesadaran anti-korupsi untuk memberi pendidikan terhadap masyrakat akan efek negatif penipuan (*fraud*). Bahkan, penasehat dari UNDP menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, sudah ada peningkatan dari negara-negara anggota untuk melawan korupsi dan peningkatan investasi dalam gerakan atau usaha anti korupsi.[377] Jadi, ASEAN sebenarnya sudah menuju ke arah yang baik dalam penanggulangan korupsi tapi seandainya media di ASEAN semakin diberikan kebebasan dan ruang yang lebih besar untuk meliput dan memberitakan kasus korupsi walaupun menyangkut pejabat atau orang yang berpengaruh di dalam pemerintahan tanpa adanya tekanan ataupun intervensi, maka ASEAN bisa semakin siap untuk memasuki AEC tanpa harus mengkhawatirkan menjadi tak terkendalinya kasus-kasus korupsi.

[377] "UN Agency Praises ASEAN's Efforts In Fighting Corruption," *malaysiandigest.com*, last modified Sept 3, 2015, http://www.malaysiandigest.com/news/567635-un-agency-praises-asean-s-efforts-in-fighting-corruption.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=.

Daftar Pustaka

"ASEAN integration 'risks more corruption'." todayonline.com. Accessed November 14, 2015. http://www.todayonline.com/business/asean-integration-risks-more-corruption.

"ASEAN Integrity Community: A Vision for Transparent and Accountable Integration," *transparency.org*, accessed November 1, 2015, Transparency+International+ASEAN+Integrity+Community_web.pdf.

"Fighting corruption: the role of the Anti-Corruption Commission." *tranparency.org*. Accessed November 8, 2015. http://www.transparency.org/news/feature/fighting_corruption_the_role_of_the_anti_corruption_commission.

"Lima Declaration." *ucl.ac.uk*. Accessed November 10, 2015, http://www.ucl.ac.uk/dpu-projects/drivers_urb_change/urb_governance/pdf_trans_corrupt/IACC_TI_Lima_declaration.pdf.

"Lima pasal dalam RUU KPK yang disusun DPR." *bbc.com*. Last modified Oct 7, 2015. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151007_indonesia_ruu_kpk_limahal.

"The New Light of Myanmar: President U Thein Sein delivers inaugural address to Pyidaungsu Hluttaw." *burmanet.org*. Last modified Mar 31, 2011. http://www.burmanet.org/news/2011/03/31/the-new-light-of-myanmar-president-u-thein-sein-delivers-inaugural-address-to-pyidaungsu-hluttaw/.

"Toward an ASEAN Anti-Corruption Standard?" conventuslaw.com. Accessed November 14, 2015. http://www.conventuslaw.com/report/toward-an-asean-anti-corruption-standard/.

"UN Agency Praises ASEAN's Efforts In Fighting Corruption." *malaysiandigest.com*. Last modified Sept 3, 2015. http://www.malaysiandigest.com/news/567635-un-agency-praises-asean-s-efforts-in-fighting-corruption.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=.

"Why ASEAN needs to confront corruption in Southeast Asia." transparency.org. Accessed November 14, 2015.

http://www.transparency.org/news/feature/why_asean_needs_to_confront_corruption_in_southeast_asia.

Brunetti, Aymo and Beatrice Weder. "A Press is Bad News for Corruption." *Journal of Public Economics* 87 (2003): 1801-1824.

Canton, Naomi. "Experts: Corruption and politics are hampering ASEAN economic integration." *Asia House*, October 13, 2015. Accessed October 29, 2015. http://asiahouse.org/corruption-lack-political-leadership-hampering-asean-economic-integration/.

Clay Wescott, "Combatting Corruption in Southeast Asia," 238.

Di Tella, Rafael and Ignacio Franceschelli. "Government Advertising and Media Coverage of Corruption Scandals." *American Economic Journal: Applied Economics* 3, no. 4 (2011): 119-151.

Dian, Nita "Sebuah Ikhtiar Satu Dasarwarsa." Tempo. December 31, 2012-January 6, 2013.

Digal, Santosh. "Corruption is a cancer to the countries of South-East Asia." *asianews.it*. Accessed November 8, 2015. http://www.asianews.it/view4print.php?l=en&art=17847.

Freedomhouse.org. Accessed November 1, 2015. https://freedomhouse.org/regions/asia-pacific.

Heymann, Philip. B. "Democracy and Corruption." *20 Fordham Int'l L.J*. 323 (1996-1997): 323-346. http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/17/sby039s-inlaw-aulia-pohan-gets-45-years-corruption.html.

Kramer, Elisabeth and Michele Ford. "The Many Faces of Corruption." *Inside Indonesia*. April 2, 2012. Accessed April 29, 2012. http://www.insideindonesia.org/stories/the-many-faces-of-corruption-01042897?Itemid=2.

Mohamad, Goenawan. "Catatan Pinggir: KPK." *Tempo*, October 11, 2009.

Nye, J.S. "Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis." The American Political Science Review 61, No. 2 (1967): 417-427.

Quah, Jon S. T. "Curbing Asian Corruption: An Impossible Dream?." *stanford.edu*. Accessed August 9, 2015. http://fsi.stanford.edu/sites/default/files/Corruption_article_in_CH.pdf.

Rose-Ackerman, Susan. "Corruption and Government." International Peacekeeping 15, no. 3 (2008): 328-343.

Saraswati, Muninggar Sri. "Government's commitment to fighting corruption questioned." *The Jakarta Post*. August 29, 2004. Accessed July 26, 2013, http://www.thejakartapost.com/news/2004/08/29/govt039s-commitment-fighting-corruption-questioned.html.

CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY (CSR):

MENDORONG PERAN STRATEGIS KELOMPOK BISNIS DALAM PENGUATAN PILAR KOMUNITAS SOSIAL-BUDAYA ASEAN

Oleh:

Nurul lsnaeni, Asra Virgianita dan Shofwan Al-Banna Chaeruzard
Departemen Hubungan lnternasional, FISIP Universitas lndonesia

(Makalah disampaikan dalam Konvensi Nasional Asosiasi Hubungan Internasional lndonesia (AlHll) Ke-Vl, 25-28 November 2015, Universitas Mataram, Lombok –NTB)

Abstrak

Pewujudan Masyarakat ASEAN *(ASEAN Community)* yang maju dan sejahtera telah menjadi cita-cita bersama para pemimpin Negara-negara Anggota ASEAN seialan dengan Visi ASEAN 2020. Untuk itu tiga pilar pembangunan telah dicanangkan dalam rangka mencapai visi regional ASEAN tersebut, yaitu Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Namun demlkian, wacana yang berkembang maupun praktek kebijakan yang bergulir sejauh ini cenderung didominasl oleh kepentingan pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN. Sebaliknya, signifikansi pembangunan Komunitas Sosial-Budaya cenderung dinegasikan. Padahal, perspektif tentang Komunitas ASEAN harusnya bersifat *holistic* dan *integrated*, karena pada hakekatnya ketiga pilar itu sama-sama fondasi yang akan dapat saling mempengaruhi kokohnya bangunan Komunitas ASEAN. Apalagi, dengan adanya tekanan global dan tantangan domestik dari kompleksitas persoalan pembangunan yang dihadapi mayoritas negara-negara

anggota ASEAN. Makalah ini akan membahas upaya penguatan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN melalui isu tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) di kalangan pelaku bisnis ASEAN. Tulisan ini berpendapat bahwa isu CSR sangat relevan dan signifikan bagi pencapaian Masyarakat ASEAN, khususnya penguatan pilar Komunitas Sosial Budaya, karena CSR dapat mendorong terwujudnya kemitraan multipihak, akselerasi pembangunan sosial ekonomi dan sosial-budaya dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara anggota ASEAN guna mendukung efisiensi dan efektivitas birokrasi. Analisis makalah ini berbasis pada penggunaan data-data sekunder maupun data primer dari hasil penelitian lapangan di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci

Keberlanjutan, kemitraan, kapasitas institusional, kerangka legal, sinergitas, kesejahteraan sosial, tata kelola, kepemimpinan,

Pendahuluan

Akhir tahun 2015 ini merupakan tenggat waktu bagi dimulainya realisasi kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN *(ASEAN Community*). Pembentukan Masyarakat ASEAN adalah sebuah upaya untuk mewujudkan Visi ASEAN 2020, yaitu terbentuknya masyarakat ASEAN yang maju dan sejahtera. Namun demlkian, wacana yang berkembang maupun praktek kebijakan yang bergulir dalam lima tahun terakhir ini (2009-2015) terkait agenda Masyarakat ASEAN ini cenderung didominasl oleh kepentingan pembangunan pilar pertama saja, yaitu Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN. Sebaliknya, urgensi dan kepentingan

pembangunan pilar ketiga, yaitu Komunitas Sosial-Budaya ASEAN cenderung dinegasikan.

Tampaknya isu pilar ketiga ini *"less sexy"* dibandingkan dengan isu pilar pertama maupun pilar kedua. Padahal, perspektif tentang Komunitas ASEAN harusnya bersifat *holistic* dan *integrated*, karena pada hakekatnya ketiga pilar itu -- baik politik-keamanan, ekonomi serta sosial-budaya – adalah sama pentingnya dan bersifat saling mempengaruhi dalam membentuk Komunitas ASEAN, sebagaimana ditegaskan oleh **Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh** dalam pidato pelantikannya**: *"Our integration would be incomplete without the good work done and to be done in the social and cultural pillar".***[378] Selain itu fakta menunjukkan adanya kompleksitas dan sifat multidimensional dari persoalan-persoalan pembangunan di ASEAN yang *notabene* sebagian besar negara anggotanya masih merupakan negara berkembang, dan menghadapi *"development gap"* yang cukup besar, baik inter-ASEAN maupun di level domestik masing-masing negara.[379] Sebagai negara anggota terbesar di ASEAN, baik dari segi wilayah --mencakup 53% dari territorial ASEAN – dan penduduk –mencakup 43% dari total penduduk ASEAN[380]-- serta memiliki sumberdaya alam yang melimpah dan banyak berfungsi sebagai sokoguru ASEAN, Indonesia sendiri masih mengalami banyak persoalan dengan proses pembangunan nasionalnya, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan,

---

[378] Ibrahim Almuttaqi, "ASEAN's Role in Corporate Social Responsibility", *The Jakarta Post*, 06 November 2015, see http://www.the jakartapost.com/ news/2013/01/29/asean-s-role-corporate-social –responsibility, diakses pada 06/11/2015, pukul19:55WIB.

[379] Lihat Mark McGillvray and David Carpenter (Eds)(2013). *Narrowing the Development Gap in ASEAN: Drivers and Policy Options.* Routledge, London and New York.

[380] Lihat ASEAN Secretariat (2012). *ASEAN Community in Figures, 2011*. ASEAN Secretariat, Jakarta.

disparitas sosial, dan lain sebagainya.[381] Bahkan, berdasarkan Indeks Daya Saing Global Negara-Negara Anggota ASEAN, (2012-2013), tingkat daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand serta Brunei Darussalam[382].

Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN pada dasarnya memberikan ruang dimana aktor negara dan aktor non-negara di kawasan dapat bersinergi secara lebih luas dan secara lebih intensif, karena jangkauan dari 34 agenda kerja pada pilar ketiga ini dapat merengkuh kepentingan banyak kelompok dalam masyarakat di kawasan ini, termasuk mereka yang berada di akar rumput *(grass-roots level)* dan cenderung dimarjinalkan, seperti perempuan, pekerja migran serta *indigenous people*. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa penguatan pilar ketiga ini justru akan dapat berkontribusi kepada penguatan pilar pertama maupun kedua. Mekanisme kerja dalam implementasi agenda penguatan Komunitas Sosial Budaya ASEAN potensial mendorong terbangunnya *multi-stakeholders partnership* ataupun *cross-sector partnership,* bukan sekedar *public private partnership* yang notabene banyak dilakukan dalam penguatan pilar Komunitas Ekonomi ASEAN.

Kemitraan multipihak memastikan kehadiran masyarakat sipil di dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya, sementara kemitraan jenis kedua hanya terfokus pada kerjasama bilateral antara sektor pubik (pemerintah) dan sektor swasta (bisnis). Bila kemitraan multipihak dapat berkembang di berbagai ranah kerjasama

[381]Lihat misalnya Budy P Resosudarmo dan Frank Jotzo (2009). *Working With Nature Against Poverty: Development, Resources and the Environment in Eastern Indonesia*. ISEAS, Singapura.

[382] Lihat World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2012/2013.*

pembangunan, termasuk sosial-budaya, dan memungkinkan adanya mekanisme kontrol dari masyarakat sipil, maka kemitraan publik-privat cenderung berkisar di area pembangunan yang bersifat ekonomis, khususnya infrastruktur publik dan cenderung lemah dalam kontrol pihak ketiga. Kerjasama di bidang infrastruktur cenderung bersifat bisnis-komersial, didorong oleh adanya keterbatasan dana pemerintah di satu sisi sementara ada kekuatan dalam penyediaan jasa keahlian dan teknologi termasuk keuangan oleh pihak swasta --baik swasta asing maupun nasional. Oleh karena itu menjadi sangat mendesak tentang perlunya ASEAN membangun *platform* kerjasama yang bersifat kelembagaan untuk mendorong berbagai inisiatif untuk penguatan Pilar Ketiga dari Masyarakat ASEAN ini.

Dalam konteks pembangunan pilar ketiga ini khususnya dalam mendorong pencapaian agenda keberlanjutan *(sustainability)* dan kesejahteraan sosial *(social welfare),* sektor bisnis dapat dikatakan tetap berpotensi menjadi aktor yang punya peran penting, meskipun partisipasi dari sektor masyarakat sipil dan pemerintah juga tetap ikut mempengaruhi. Proyeksi ini berangkat dari fakta yang berkembang sejauh ini dimana praktek kebijakan yang mengemuka ke masyarakat luas diarahkan untuk mendorong sektor bisnis ini berperan secara lebih progresif untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan. Serupa dengan yang terjadi di tingkat global, sektor bisnis dianggap sebagai *"engine of growth"* melalui peran dan fungsi yang dimainkannya melalui intensitas (baca: liberalisasi) perdagangan -- baik barang maupun jasa -- serta investasi. Dalam kaitan ini maka isu tentang tanggungjawab sosial perusahaan *(Corporate Social Responsibuility)* merupakan isu yang relevan dan signifikan untuk didiskusikan.

Ada beberapa pertimbangan tentang relevansi isu CSR dalam konteks penguatan pilar ketiga Komunitas ASEAN ini dikemukakan. **Pertama**, bahwa cetak biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN sesungguhnya sudah mengadopsi tujuan-tujuan strategis CSR yaitu ***"to ensure that Corporate Social Responsibility (CSR) is incorporated in the corporate agenda and to contribute towards sustainable socio-economic in ASEAN Member Countries"*** (untuk memastikan bahwa TanggungJawab Sosial Perusahaan merupakan bagian tak terpisahkan dalam agenda-agenda korporasi dan untuk berkontribusi kepada pencapaian pembangunanan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara anggota ASEAN.

Kedua, bahwa integrasi ekonomi yang dikembangkan dalam Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN, lalu lintas perdagangan barang, jasa, investasi, modal dan para pekerja terampil akan membentuk pasar tunggal ASEAN dan basis produksi di kesepuluh negara angota ASEAN. Dengan total potensi sekitar 600 juta konsumen dan 3 triliun GDP secara keseluruhan, maka jelas dibutuhkan sebuah kerangka institusional yang jelas untuk mendorong praktek bisnis yang bertanggungjawab di kawasan ASEAN ini agar pertumbuhan ekonomi tidak tergerus oleh biaya-biaya sosial, kehancuran budaya lokal dan kerusakan lingkungan ekologis, hal mana kerap terjadi sebagai akibat lemahnya kapasitas institusional negara dan ketiadaan visi tentang pembangunan yang berkelanjutan *(sustainable development)*

Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah pacu industrialisasi dan modernisasi di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN masih mengandalkan sumber-sumber daya alam sebagai komoditi utama dalam struktur perekonomiannya, khususnya perdagangan luar negerinya. Sementara itu bisnis di sektor ekstraktif

cenderung berpotensi melakukan banyak praktek-praktek yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan maupun masyarakat lokal. Selain itu, bisnis di sektor ini juga telah mempekerjakan pekerja migrant dalam jumlah yang cukup signifikan. Contoh paling nyata dan mudah adalah, sektor perkebunan ataupun kehutanan. Dengan adanya integrasi ekonomi ASEAN, maka para pelaku bisnis di sektor ekstraktif ini akan berhadapan dengan tantangan untuk mengintegrasikan norma-norma standar bisnis global yang harus menghargai isu-isu perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan kelestraian lingkungan, termasuk agenda pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dalam praktek bisnis mereka sehari-hari.[383]

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk membahas lebih jauh mengapa isu tentang CSR relevan dan signifikan untuk dicermati dalam konteks penguatan pilar Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dan bagaimana pembentukan *CSR ASEAN Network* dapat berkontribusi dalam agenda strategis ini. Tulisan ini juga berpendapat bahwa isu CSR penting bagi ASEAN, bukan saja untuk memastikan bahwa praktek bisnis di ASEAN dalam era Komunitas ASEAN akan lebih bertanggungjawab sesuai dengan norma-norma internasional yang berlaku, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap tiga hal penting: (1) CSR dapat mendorong kemitraan multipihak antara berbagal aktor di sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil, baik di tingkat lokal, nasional naupun regional sekaligus; (2) CSR dapat mengakselerasi pembangunan sosial ekonomi dan soslal-budaya yang berbasis di masyarakat lokal di setiap Negara Anggota ASEAN; (3)

[383] Rajesh Chhabara (2015), "Asia Column: Responsible Business in ASEAN, lihat http://www.ethicalcorp.com/ business-strategy/asia-column-responsible-business-in-asean, diakses 30/07/2015, pukul 11:00 WIB.

CSR dapat menstimulasi pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara anggota ASEAN guna mendukung efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Melalui tulisan ini diharapkan adanya pemahaman yang lebih komprehensif tentang agenda dan tujuan Komunitas ASEAN, bahwa semua pilar adalah sama pentingnya untuk dikaji dan diperkuat keberadaannya. Juga bahwa kelompok bisnis adalah aktor yang punya peran bermata dua, yaitu dapat berperan positif karena mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di satu sisi, tetapi juga dapat berperan negatif karena mendorong kerusakan lingkungan dan permasalahan sosial bila praktek bisnis mereka tidak mengacu pada paradigma pembangunan berkelanjutan, tetapi semata-mata mengedepankan prinsip liberalisme dengan ideologi pasar bebas dan kapitalismenya. Struktur pembahasan akan diawali dengan menjelaskan apa yang menjadi tujuan, elemen dan prioritas dari Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pada bagian selanjutnya akan didiskusikan ataupun dianalisis lebih jauh isu yang dikemukakan dalam rumusan pertanyaan utama dari tulisan ini. Pembahasan akan diikuti dengan bagaimana praktek CSR dapat berkontribusi secara positif terhadap tiga agenda besar di atas, yaitu *multistakeholders partnership, socio-economi development acceleration* dan *good governance*. Bagian akhir dari tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan.

Pembahasan

ASCC: Tujuan, Elemen dan Prioritas.

Komunitas Sosial Budaya ASEAN *(ASEAN Socio Cultural Community,* selanjutnya ditulis *ASCC)* memiliki tujuan utama untuk merealisasikan Komunitas

ASEAN yang berbasis pada manusia dan tanggungjawab sosial yang memiliki semangat solidaritas dan persatuan dengan adanya suatu identitas bersama serta membangun masyarakat yang saling peduli dan berbagi dimana kesejahateraan dan kualitas hidup manusia meningkat.

ASCC terdiri dari enam elemen dan masing-masing elemen mempunyai sejumlah agenda ataupun program kerja. Secara logis, setiap agenda dalam proses pelaksanaan maupun pencapaian tujuannya akan memiliki implikasi masing-masing, baik yang bersifat tantangan (peluang) maupun hambatan. Secara lebih lengkap berikut penjelasan tentang keenam elemen ASCC.[384] Pertama, adalah ***Human Development (A)***, ASEAN berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas dari manusia-manusianya dengan memberikan akses dan kesempatan yang setara untuk membangun. Ada enam program yang dicanangkan untuk untuk mewujudkan agenda pertama ini, diantaranya adalah pengembangan pendidikan yang berkualitas, pengembangan sistem informasi dan teknologi yang mendorong inovasi dan perkembangan iptek serta penguatan ketrampilan kewirausahaan kepada kelompok-kelompok marjinal, seperti perempuan, para penyandang cacat, orang lanjut usia dan pemuda, serta pengembangan kapasitas pelayanan publik.

Elemen kedua, tentang ***Social Welfare and Protection (B),*** mencanangkan tujuan ASEAN untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat ASEAN melalui peningkatan dan perlindungan sosial. Ada tujuh program yang

[384] Lihat ASEAN Secretariat (2009). *ASEAN Socio Cultural Community Blue Print*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

diagendakan, yaitu pengentasan kemiskinan, pengembangan jaring pengaman sosial, penguatan keamanan dan ketahanan pangan, pemberian akses kepada fasilitas kesehatan dan gaya hidup yang sehat, peningkatan kapabilitas untuk mencegah penyakit menular, pemberantasan obat-obat berbahaya dan terlarang, pembangunan masyarakat yang punya daya tahan terhadap bencana.

Pada elemen ketiga yaitu ***Social Justice and Rights (C),*** ASEAN berkomitmen untuk mempromosikan keadilan sosial dan mengarusutamakan HAM ke dalam kebijakan dan semua aspek kehidupan, temasuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok minoritas dan termarjinalkan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang cacat dan para pekerja migrant. Terkait agenda ini ada tiga program yang dicanangkan, yaitu mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan kepada kelompok-kelompok minoritas, perlindungan hak para pekerja migrant dan **mempromosikan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR)**

Elemen keempat, yakni ***Ensuring Environmental Sustainability (D)***, ASEAN ingin mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di seluruh kawasan, dengan mempromosikan lingkungan yang bersih dan hijau, melestarikan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mengelola dengan bijak sumber-sumber daya alam yang terbaharukan (seperti: hutan, air, tanah) maupun tidak terbaharukan (seperti: energi fosil). Dalam tujuan ini terdapat sebelas program, antara lain terdiri dari: merespon isu-isu lingkungan hidup global, mengelola dan mencegah polusi lingkungan lintas batas (yaitu asap dan limbah berbahaya), mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui edukasi dan partisipasi publik, mempromosikan teknologi ramah lingkungan,

mempromosikan standar hidup yang berkualitas di kawasan urban (kota), mengharmonisasikan database dan kebijakan lingkungan, mempromosikan pemanfaatan yang berkelanjutan dari ekosistem kawasan pesisir dan kelautan, mempromosikan manajemen lestari dari sumber-sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, mempromosikan manajemen sumber daya hutan, pertanian dan lingkungan yang berkelanjutan, merespon perubahan iklim dan berbagai dampaknya, serta mempromosikan manajemen hutan yang lestari (SFM)

Elemen kelima adalah ***Building the ASEAN Identity (E),*** yaiu bahwa ASEAN akan mengarusutamakan dan mempromosikan kesadaran yang lebih luas dan nilai-nilai bersama *(common values)* dalam semangat persatuan dan keberagaman di setiap tingkatan dalam masyarakat. Terdapat empat agenda dalam tujuan ini, yaitu mempromosikan kesadaran tentang ke-ASEAN-an dan rasa memiliki sebagai bagian dari komunitas, menjaga sekaligus mempromosikan warisan budata ASEAN, mempromosikan kreativitas dan industri budaya, mengikutsertakan seluruh komunitas.

Elemen keenam adalah ***Narrowing the Development* Gap *(F).*** Tujuan strategis dari elemen terakhir ini adalah mengurangi *gap* pembangunan, khususnya pembangunan sosial di antara negara-negara ASEAN-6 dan kelompok negara anggota CLMV dan dalam ASEAN sendiri dimana kantong-kantong kemiskinan dan keterbelakangan berada.

CSR dan ASCC: Peran Strategis Kelompok Bisnis

Sebelum membahas lebih jauh mengapa CSR penting dan signifikan dalam penguatan ASCC dan implikasinya terhadap peran kelompok bisnis di ASEAN, tentunya penting memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan CSR? Menurut definisi *World Business Council on Sustainable Development (WBCSD)*, CSR adalah ***"the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development, while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the environment and local communities at large".*** Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kelompok bisnis mempunyai tanggungjawab moral dan etis untuk mendukung proses pembangunan yang tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melestarikan lingkungan. Dengan kata lain, praktek bisnis yang bertanggungjawab ini menjadi landasan penting bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)*.

CSR sebagai gagasan tentang praktek bisnis yang bertanggungjawab ini pada dasarnya telah berkembang cukup pesat di tingkat global. Berbagai upaya mengembangkan standarisasi internasional maupun memberikan pedoman internasional telah dilakukan untuk mengarusutamakan CSR ini. Misalnya saja, ISO 14001 yang mengontrol manajemen lingkungan dalam setiap tahapan proses produksi manufaktur. Lalu juga ada *"UN Global Compact"*, sebuah inisiatif dari PBB untuk memberikan panduan bisnis terkait empat area isu utama, yaitu lingkungan, perburuhan/pekerja, anti-korupsi dan hak asasi manusia. Selain itu terdapat pula *GRI (Global Reporting Initiative,* yang mengeluarkan panduan tentang pelaporan yang

berkelanjutan *(sustainability report).* Di berbagai negara, model pelaporan ini kemudian menjadi persyaratan bagi korporasi yang akan masuk ke dalam pasar bursa untuk mendapatkan dana-dana publik. Banyak perusahaan kini juga merujuk pada ISO 26000, yaitu sebuah panduan tentang tanggungjawab sosial yang lebih luas, mencakup tujuh area isu, yaitu: tata kelola organisasi, perlindungan lingkungan, praktek ketenagakerjaan, hak asasi manusia, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, praktek bisnis yang jujur, serta isu terkait konsumen.

Bila CSR telah menjadi isu penting di level global, tentu pertanyannya bagaimana di tingkat regional ASEAN? Apa pentingnya CSR dikontekstualisasikan dalam pencapaian Visi ASEAN 2020? Pertama-tama tentunya merujuk kepada cetak biru Masyarakat ASEAN, khususnya dalam ASCC, yang secara nyata telah memasukkan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) sebagai salah satu dari 34 agenda strategisnya. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, CSR telah menjadi agenda strategis dari elemen *Social and Justice Rights* (Point C.3). Secara eksplisit CSR dinyatakan dengan: ***"Promoting Corporate Social Responsibility".*** Bila dipahami bahwa tujuan esensial dari CSR adalah lingkungan yang sehat atau lestari, masyarakat yang sejahtera dan ekonomi yang kuat[385] maka dapat dikatakan bahwa CSR sangat relevan dengan tujuan dan hampir semua elemen dan agenda-agenda strategis dari ASCC. Bukan hanya itu, CSR juga akan menentukan kualitas

[385] Tujuan CSR yang mencakup tiga aspek penting yang bersifat *integrated* ini sering dimaknai dengan istilah keberlanjutan *(sustainability).* Tujuan CSR pada dasarnya sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang digagas oleh Komisi Bruntland dalam Laporannya yang terkenal dengan *"Our Common Future"*. Karena CSR harus dilakukan sendiri oleh perusahaan, bukan dialihkan ke pihak ketiga, maka dapat dikatakan bahwa korporasi punya peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan CSR harus dilakukan Lihat Maria R. NIndita Radyati (2014), *Sustainable Business dan Corporate Social Reponsibility (CSR).* Center for Entrepereneurship, Change and Third Sector (CECT) Universitas Trisakti, Jakarta.

pencapaian pilar Komunitas Ekonomi ASEAN, karena CSR dalam praktek bisnis global dewasa ini, termasuk di Asia Pasifik.[386]

Secara fundamental gagasan tentang CSR pada dasarnya telah membalikkan argument klasik Milton Friedman yang mengatakan bahwa *"the business of business is business"*. Menurut Salim esensi bisnis sesungguhnya adalah *"to raise sustainability and humanity"*[387]. Bagi negara-negara berkembang sebagaimana di ASEAN, pandangan Salim lebih relevan ketimbang pandangan Friedman karena bisnis berkembang di tengah dinamika masyarakat dan ditopang oleh lingkungan ekologis yang berfungsi penting sebagai penyedia sumber daya alam *(natural resources)* untuk proses industrialisasi, baik yang terbaharukan *(renewable resources)* seperti hutan, air, tanah, dan keankeragaman hayati di darat dan lautan maupun yang tidak terbaharukan *(non-renewable resources) s*eperti minyak bumi, gas dan batubara. Selain itu lingkungan ekologis juga berfungsi sebagai media daur ulang alamiah bagi limbah-limbah dari proses produksi/ industrialisasi *(natural sinks)*. Oleh karena itu kesepakatan dunia melalui ISO 26000 adalah bahwa ruang lingkup CSR mencakup kegiatan dari hulu ke hilir dan CSR harus diperlakukan sebagai kebijakan utama atau strategis perusahaan, dan bukan sebaliknya diperlakukan sebagai "kebijakan residu", yakni alokasi sisa laba. Dengan demikian

[386] Lihat Jalal, "Berdiri di Pundak Raksasa CSR", Laporan Khusus dalam Bisnis & CSR: Guide to Sustainability, Oktober-November 2011, hlm. 8-36.

[387] Emil Salim adalah salah satu tokoh lingkungan hidup Indonesia yang menjadi anggota Komisi Bruntlanda. Pernyataan ini dikutip dalam Iwan Jaya Azis, dkk (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim.* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

melalui CSR diharapkan perusahaan dapat menciptakan nilai, meningkatkan kebahagiaan *(well-being)* dan menciptakan perubahan yang inovatif.[388]

Dengan demikian mengarustamakan CSR bukan hanya sebagai wacana *(ideas, values dan norms)* tetapi juga kebijakan publik *(public policy)* dan instrumen legal adalah agenda yang mendesak sekaligus strategis bagi ASEAN, karena *de facto* praktek bisnis yang berkembang di ASEAN sejauh ini telah erat dengan berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal maupun perusakan lingkungan.[389] Menurut laporan Komnas HAM di Indonesia tercatat bahwa dalam periode Januari-November 2012, terdapat 1.009 kasus dari 5.422 kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan, yang berhubungan erat dengan isu-isu yang menjadi perhatian CSR, yaitu perselisihan perburuhan, perselisihan hak kepemilikan/ penggunaan tanah serta kerusakan lingkungan hidup.[390] Di Malaysia, meskipun praktek CSR mulai berkembang luas, para aktivis masih mengkritisi akan banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM oleh korporasi yang bergerak di sektor perkebunan, terutama terkait hak kepemikikan tanah *(land rights)* maupun hak-hak lainnya dari masyarakat lokal *(indigenous people)*.[391]

Dengan struktur perekonomian negara-negara anggota ASEAN pada umumnya yang masih bergantung pada industrialisasi dan komoditi ekspor berbasis sumber daya alam, maka sulit untuk menghindari terjadinya kehancuran lingkungan tanpa adanya kejelasan persepsi dan kerangka regulasi tentang praktek CSR. Kasus bencana

---

[388] Lihat Maria R. Nindita Radyati, *Op.Cit.*
[389] Lihat Ibrahim Almuttaqi, *Op.Cit.*
[390] Lihat Ibrahim Almuttaqi, *Ibid.*
[391] Hasil wawancara dengan Dr. Dennyson, peneliti senior di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan aktivis Malaysian Global Movement on Justice and Transformation di Malaysia. Wawancara dilakukan pada 13 September 2015 di Kuala Lumpur.

asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia, pada hakekatnya merupakan contoh nyata dari lemahnya komitmen dan lemahnya penegakan hukum untuk mendukung praktek bisnis yang bertanggungjawab di industri kehutanan dan kelapa sawit.[392] Di Indonesia, sektor pertambangan juga merupakan area bisnis yang sangat rentan dengan terjadinya penghancuran lingkungan ekologis maupun pelanggaran HAM masyarakat lokal.[393] Padahal, saat ini di sektor energi Indonesia, terdapat lebih dari 230 perusahaan kontraktor yang bergerak di industri minyak, dimana 170 di antaranya terlibat dalam kegiatan ekplorasi. Chevron, Conoco-Phillips, Exxon Mobil, British Petroleum (BP), Total dan CNOOC adalah sebagian dari perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs) dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Cina yang menjadi pemain utama dalam bisnis eksplorasi minyak di Indonesia.[394] Sementara itu, industri otomotif Indonesiapun dikuasai oleh banyak MNCs, khususnya perusahaan-perusahaan dari Jepang, seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi, Honda. Mereka menguasai 98,5 persen dari total produksi mobil di Indonesia. Padahal, program-program CSR mereka di bidang perlindungan

---

[392] Rajesh Chchabara, "Asia Column: Responsible Business in ASEAN", 4 Maret 2015, diakses dari http://www.ethicalcorp. com/business-strategy/asiacolumn-responsbile-bussinessin-in-asean.

[393] "Indonesia dalam Penghancuran: Hutan Rusak karena Sawit dan Tambang Ilegal. *KOMPAS*, 24 Februari 2010. Lihat juga Nurul Isnaeni, "Freeport dalam Wacana Environmental Security", *Papua Review*, Januari-Maret 2013.

[394] Norton Rose Group, Indonesian Energy Report 2010, hal.13. diakses dari http://www.nortonrosefullbright.com/knowledge/publications/29072/indonesian-energy-report. Dikutip kembali dari Nurul Isnaeni, Asra Virgianita dan Shofwan Al-Banna, "Mapping Corporate Social Responsibility Governance in ASEAN Member Countries (Indonesia-Singapura-Malaysia), *Conference Paper*, Presented at Biannual International Conference of Indonesian Politics and Governance (BICOPIG), 3 November 2015, Kampus FISIP UI-Depok.

lingkungan kuantitas dan kualitasnya belum sebanding dengan keuntungan bisnis yang mereka peroleh.[395]

Relevansi CSR dalam konteks *ASEAN Community* diyakini akan semakin menguat dengan adanya agenda integrasi ekonomi kawasan. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN akan mendorong mobilitas jasa, tenaga kerja, investasi dan modal yang semakin kuat di kawasan. Secara logis arus modal, investasi, dan tenaga kerja trampil, akan bergerak dari negara-negara anggota ASEAN yang kuat secara sosial-ekonomi, yaitu Singapura, Thailand dan Malaysia ke negara-negara anggota ASEAN yang lemah secara sosial ekonomi, seperti Kamboja, Laos dan Myanmar. Kondisi ini akan memberikan tantangan dalam hal penegakan standar norma internasional untuk perlindungan tenaga kerja ataupun buruh migran, sebagaimana telah dikumandangkan antara lain oleh *UN Global Compact, ISO 26000*. Misalnya saja tidak akan mempekerjakan buruh di bawah umur, menghindari perlakuan diskriminatif terkait upah serta fasilitas standar kesehatan dan keselamatan kerja. Sejauhmana pemerintah dan para pelaku bisnis di ASEAN dapat memenuhi *(compliance)* dengan aturan-aturan dalam panduan global tersebut.[396]

Dengan demikian jelas bahwa adanya relevansi yang kuat antara CSR dan ASCC akan berimplikasi pada peran kelompok bisnis. Peran kelompok bisnis, khususnya mereka yang merupakan pemain global dan regional, jelas bukan sekedar diharapkan dapat menjadi *engine of growth* untuk mendukung pilar Masyarakat

[395] Lihat Nurul Isnaeni dan Dani Setiawan, "Praktek CSR Perusahaan Multinasional Jepang di Indonesia untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Perudahaan Otomotif Toyota (TMMIN)". *Indonesian Journal of Japanese Studies*, December 2011, Pusat Studi Jepang – Universitas Indonesia (PSJ-UI), Depok.

[396] Chchabara, *Op.Cit.*

Ekonomi ASEAN (AEC), tetapi juga menjadi kontributor penting dalam memperkuat pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASCC), khususnya agenda yang terkait dengan social welfare dan environmental sustainability. Status sebagai negara berkembang bagi kebanyakan negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yang membutuhkan kehadiran investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, dan fakta bahwa kebanyakan negara-negara ini adalah *"pollution heaven"*, yaitu negara-negara yang lemah dalam kerangka regulasi dan penegakan hukum lingkungan, tentunya akan menjadi tantangan tersendiri buat mekanisme dan kebijakan regional ASEAN.

Oleh karena itu sangat perlu diagendakan sejumlah agenda aksi terkait praktek CSR di negara-negara anggota ASEAN. Berikut adalah beberapa usulan yang sangat mungkin:

(1) Membangun sebuah model kebijakan publik tentang CSR sekaligus kerangka legal-institusional yang menjadi referensi bagi pengimplementasian CSR di negara-negara anggota ASEAN

(2) Mengikutsertakan sektor swasta untuk mendukung berbagai aktivitas di berbagai program kerja yang terkait dengan pembangunan sosial-ekonomi di negara-negara anggota ASEAN, baik yang diinisiasi oleh pemerintah, masyarakat sipil, kelompok bisnis sendiri, maupun organisasi-organisasi ataupun di tingkat regional, seperti ASEAN Foundation, CSR ASEAN Network

(3) Mendukung adopsi dan implementasi standar internasional tentang CSR dengan menyelaraskan pada konteks lokal negara-negara anggota ASEAN.

(4) Meningkatkan kesadaran tentang CSR di ASEAN untuk menuju relasi yang bekelanjutan antara aktivitas komersial dan komunitas dimana mereka belokasi, khususnya mendukung pembangunan berbasis komunitas.

Yang perlu dicatat terkait usulan ini adalah perlunya ASEAN mengimplementasikan CSR di seluruh (sepuluh) negara anggotanya dengan koheren, terkoordinasi dan berkelanjutan. Pendekatan yang holistik dalam melihat CSR akan mendorong praktek CSR *beyond simple compliance* dan bahkan mendorong perubahan yang lebih fundamental terhadap filosofis, kebijakan, strategi dan standar prosedur pelaksanaan (SOP) dari sebuah perusahaan. Lebih dari itu praktek CSR juga tidak akan lagi salah kaprah, sekedar menyisihkan keuntungan untuk kegiatan charity, tetapi justru menjadi bagian integral dalam strategi bisnis perusahaan yang dapat bersinergi dengan agenda pembangunan pemerintah sehingga dapat mendukung penguatan Pilar ASCC.

Signifikansi CSR dalam Penguatan Pilar ASCC: Studi Kasus CSR di Surabaya dan Riau

Ada tiga penjelasan yang dapat diberikan terkait signifikansi dari CSR dalam upaya memperkuat pilar ASC. CSR dapat mendorong kemitraan multipihak *(multistakeholder partnership)* antara berbagal aktor di sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil, baik di tingkat lokal, nasional maupun regional sekaligus; (2) CSR dapat mengakselerasi pembangunan sosial ekonomi dan soslal-budaya yang berbasis di masyarakat lokal di setiap Negara Anggota ASEAN; (3) CSR dapat

menstimulasi pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* di negara-negara anggota ASEAN guna mendukung efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Penjelasan untuk ketiga aspek penting tersebut *to some extent* dapat dibuktikan dengan praktek CSR yang berkembang di Kota Surabaya, Indonesia[397] dan praktek CSR yang dikembangkan oleh Riau Pulp di Kabupaten Pangkalan Kerinci, Riau.[398] Selama sepuluh tahun terakhir, (2005-2015) praktek CSR di kota ini telah berjalan sinergis di lima area pembangunan, yaitu (1) peningkatan kualitas pendidikan; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; (3) pengembangan Usaha Skala Mikro – Kecil; (4) Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan; (5) peningkatan kualitas pelayanan publik. Bukti kebermanfaatan CSR dalam mendorong tercapainya tiga tujuan strategis di atas secara mudah dapat dilihat dari adanya pengakuan (baca: penghargaan) masyarakat luas, baik dari tingkat nasional, regional maupun dunia internasional. Untuk tingkat nasional misalnya adalah Penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup hampir setiap tahun. Penghargaan paling mutakhir di tingkat nasional adalah terpilihnya Surabaya sebagai Kota Cerdas. Penghargaan ini merupakan inisiatif dari Masyarakat Sipil (KOMPAS dan ITB). Sementara itu untuk tingkat regional ASEAN antara lain adalah terpilihnya Surabaya sebagai *Sustainable Cities*. Untuk tingkat internasional penghargaan yang diterima

[397] Untuk rekam jejak dari sisi korporasi yang terlibat, lIhat Fajar Ramdhani, dkk (2010). *Inspirasi dari Jawa Timur: Sebuah Perjalanan Menuju Surabaya Bersih dan Hijau.* Unilever, Jakarta. Dari sisi Pemerintah Kota, lihat Nurul Isnaeni (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Global & Strategis*, Januari-Juni 2013; Juga lihat Kementarian KLH dan PPSL-UI "Model CSR Bidang Lingkungan, dan untuk lebih jauh tentang Surabaya sendiri, lihat http://www.surabaya.lh.co.id.

[398] Untuk ulasan komprehensif lihat Tirta Mursitama, M. Fadhil Hasan dan Iman Y. Fakhrudin (2011). *Corporate Social Responsibility di Indonesia, Teori dan Implementasi: Studi Kasus Community Development Riau Pulp*. Institute for Development of Econpmics and Finance (INDEF), Jakarta.

adalah *UN-Habitat 100 Best Practices* tahun 2008 dan terpilihnya Walikota Tri Rismaharini sebagai salah satu dari Tiga Walikota Terbaik Dunia.

Salah satu program pembangunan yang dianggap nyata keberhasilannya, karena adanya indikator yang jelas, adalah program pengelolaan sampah kota berkelanjutan. Manajemen sampah perkotaan oleh UN Habitat telah dinyatakan sebagai salah satu dari lima permasalahan tersulit yang harus dihadapi oleh para pemerintahan kota di seluruh dunia, karena faktor tekanan pertambahan penduduk, industrailisasi, modernisasi dan urbanisasi plus isu perubahan iklim, sementara Pemerintah Kota di negara-negara berkembang umumnya banyak terkendala dengan masalah rendahnya kapasitas institusional, minimnya SDM dan terbatasnya fasilitas infrastruktur. Surabaya pun menghadapi tantangan pembangunan ini sejak tahun 1999, dan sejak tahun 2001 mencoba mengatasinya dengan pendekatan holistic dan partisipatoris secara konsisten. Namun demikian sejak tahun 2005 ketika program CSR Unilever Peduli bersinergi dengan Pemerintah Kota dan berbagai pemangku kepentingan kota lainnya, termasuk jaringan kelompok akar rumput dari masyarakat lokal di kapung-kampung kota Surabaya dalam sebuah program *"Surabaya Green and Clean"*, kemajuan pesat dalam pemecahan masalah manajemen sampah kota dapat dicapai, dan perubahan nyata itu terjadi sehingga pengakuan nasional maupun internasional pun berdatangan.

Capaian Surabaya tersebut tanpa adanya kemitraan strategis dari seluruh pemangku kepentingan kota dan kepemimpinan kota yang visioner. CSR telah mendorong terciptanya sinergitas dari berbagai *"best-practices"* para aktor yang

terlibat, bukan saja pemerintah kotanya (walikota dan jajaran birokrasinya), para korporasi yang menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di Surabaya, baik dari kalangan MNCs (Unilever, Carefour, Danamon), BUMN (Pertamina, Telkom, Mandiri) maupun BUMD (Bank Jatim), termasuk swasta nasional, seperti Jawa Pos. Tentu saja tak ketinggalan adalah kalangan masyarakat sipil, mulai dari NGO lokal (Pusdakota, Bangun Pertiwi, EcoTown), lalu juga kalangan Perguruan Tinggi (UNESA, ITS, UNAIR, UBAYA, PETRA).

Sementara itu untuk kasus Riau Pulp, praktek CSR yang dilakukan berhasil membawa implikasi positif setelah melakukan pendekatan transformative dan partisipatoris, dan tidak lagi berbasis pada pendekatan kedermawanan semata *(charity)*. Keberhasilan Riau Pulp untuk mengelola CSR yang memberi kebermanfaatan luas bagi masyarakat Pangkalan Kerinci, tidak lepas dari dukungan *top management* Riau Pulp dan dukungan seluruh pemangku kepentingan eskternal Riau Pulp di masyarakat, baik Pemerintah Daerahnya maupun berbagai komponen dari masyarakat lokalnya.

Dalam konteks ini kiranya perlu dicatat pembentukan *CSR ASEAN Nertwork* (CAN) yang didirikan pada tahun 2011, dan mendapat dukungan penuh dari ASEAN Foundation serta berbagai kalangan bisnis dan masyarakat sipil di sejumlah negara ASEAN.[399] Di Indonesia sendiri, Indonesian Business Link (IBL) dan Yayasan Unilever Peduli (Uli Peduli) adalah partisipan yang aktif dalam jaringan ini. CAN didirikan dengan tujuan untuk memperkuat jeiaring kerja yang mendorong pertukaran *(mutual exchange)* secara cepat dan transparan aneka pengalaman "*best practices*"

[399] Lihat http://www.aseanfoundation.org. Lihat juga *IBL Newsletter*, September – Oktober 2015.

dari setiap Negara Anggota ASEAN terkait praktek-praktek CSR yang bersinergi dengan agenda pembangunan nasional masing-masing negara-negara anggota ASEAN. CAN juga dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas institusional para pelaku bisnis di ASEAN untuk mengadopsi norma-norma internasional tentang CSR.

Kesimpulan

Secara mudah dapat dikatakan bahwa, mengingat relevansi dan signifikansi yang sangat jelas bagi pencapaian Visi ASEAN 2020, CSR sangat perlu diinkorporasikan ke dalam strategi bisnis perusahaan-perusahaan di ASEAN dan menjadi agenda pembangunan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Terlepas dari perdebatan konseptual tentang CSR itu sendiri dan fakta bahwa praktek CSR di negara-negara anggota ASEAN, termasuk di Indonesia dan Malaysia, umumnya masih bersifat *charity*, namun CSR sebagai gagasan maupun agenda kebijakan publik akan semakin penting dan mendesak untuk diformulasikan dan diimplementasikan dengan benar dalam rangka menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. Untuk itu hal-hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya mensosialisasikan persepsi yang benar tentang CSR di komunitas bisnis ASEAN, pengembangan dan penguatan sistem tata kelola CSR ASEAN, termasuk pengembangan kapasitas institusional dari pemerintah negara anggota ASEAN yang berfungsi dan berperan penting sebagai regulator maupun fasilitator dalam pengembangan praktek bisnis yang bertanggungjawab. *Last but not least* adalah partisipasi penuh masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat lokal. *****

Daftar Referensi

ASEAN Secretariat (2012). *ASEAN Community in Figures, 2011*. ASEAN Secretariat, Jakarta

ASEAN Secretariat (2009). *ASEAN Socio Cultural Community Blue Print*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Budy P Resosudarmo dan Frank Jotzo (2009). *Working With Nature Against Poverty: Development, Resources and the Environment in Eastern Indonesia*. ISEAS, Singapura.

Fajar Ramdhani, dkk (2010). *Inspirasi dari Jawa Timur: Sebuah Perjalanan Menuju Surabaya Bersih dan Hijau.* Unilever, Jakarta.

Ibrahim Almuttaqi, "ASEAN's Role in Corporate Social Responsibility", *The Jakarta Post*, 06 November 2015, see http://www.the jakartapost.com/ news/2013/01/29/asean-s-role-corporate-social –responsibility, diakses pada 06/11/2015, pukul19:55WIB.

Iwan Jaya Azis, dkk (2010). *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim.* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

_____"Indonesia dalam Penghancuran: Hutan Rusak karena Sawit dan Tambang Ilegal. *KOMPAS,* 24 Februari 2010.

Jalal, "Berdiri di Pundak Raksasa CSR", Laporan Khusus dalam *Bisnis & CSR: Guide to Sustainability,* Oktober-November 2011.

Http://www.aseanfoundation.org

Http://www.surabaya.lh.go.id

IBL Newsletter, July-August 205

IBL Newsletter, September-October 2015

Mark McGillvray dan David Carpenter (Eds)(2013). *Narrowing the Development Gap in ASEAN: Drivers and Policy Options.* Routledge, London and New York.

Maria R. NIndita Radyati (2014), *Sustainable Business dan Corporate Social Reponsibility (CSR).* Center for Entrepereneurship, Change and Third Sector (CECT) Universitas Trisakti, Jakarta.

Norton Rose Group, Indonesian Energy Report 2010, hal.13. diakses dari http://www.nortonrosefullbright.com/knowledge/publications/29072/indonesian-energy-report

Nurul Isnaeni, "Freeport dalam Wacana Environmental Security", *Papua Review*, Januari-Maret 2013.

Nurul Isnaeni (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Global & Strategis*, Januari-Juni 2013

Nurul Isnaeni dan Dani Setiawan, "Praktek CSR Perusahaan Multinasional Jepang di Indonesia untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Perudahaan Otomotif Toyota (TMMIN)". *Indonesian Journal of Japanese Studies*, December 2013, Pusat Studi Jepang – Universitas Indonesia (PSJ-UI), Depok.

Nurul Isnaeni, Asra Virgianita dan Shofwan Al-Banna, "Mapping Corporate Social Responsibility Governance in ASEAN Member Countries (Indonesia-Singapura-Malaysia), *Conference Paper*, Presented at Biannual International Conference of Indonesian Politics and Governance (BICOPIG), 3 November 2015, Kampus FISIP UI-Depok.

Jo Kumala Dewi, dkk. *Model Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan*. Kementerian KLH dan PPSL-UI, Jakarta.

Rajesh Chhabara (2015), "Asia Column: Responsible Business in ASEAN, lihat http://www. ethicalcorp.com/ business-strategy/asia-column-responsible-business-in-asean, diakses 30/07/2015, pukul 11:00 WIB.

Tirta Mursitama, M. Fadhil Hasan dan Iman Y. Fakhrudin (2011). *Corporate Social Responsibility di Indonesia, Teori dan Implementasi: Studi Kasus Community Development Riau Pulp*. Institute for Development of Econpmics and Finance (INDEF), Jakarta.

World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2012/2013*.

Politik Kesadaran sebagai Penentu Keberhasilan Pendekatan *ASEAN Way* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Di Asia Tenggara

(Flavianus D.Melsasail – Universitas Kristen Satya Wacana)

Abstrak

Keberhasilan ASEAN dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Asia Tenggara, tidak lepas dari pendekatan *ASEAN Way* yang dibakukan dalam prinsip dan norma dan menjadi ciri ASEAN. Namun dicermati lebih jauh ASEAN Way memiliki makna yang lebih fundamental yakni sebagai modal sosial dan identitas membentuk kesadaran negara anggota sebagai bagian dari komunitas yang disebut dengan ASEAN. Kesadaran ini lah yang menjadi penentu keberhasilan pendekatan *ASEAN Way* menyelesaikan persoalan tradisional dan non tradisional di Asia Tenggara.

Kata Kunci: Norma, ASEAN Way, Modal Sosial, Kesadaran

Pendahuluan

Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi antitesis bagi para akademisi yang skeptis pada ASEAN terutama mereka yang menekankan kritiknya pada perbedaan identitas antara 10 negara anggota ASEAN atau mereka yang melihat bahwa organisasi regional belumlah dibutuhkan karena perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara, apalagi bagi mereka yang fokus pada perselisihan antara negara anggota sebagai hal yang seringkali terjadi. Faktanya ASEAN kini berkibar dengan ide agar Asia Tenggara lebih terintegasi seperti rencana pasar dan

basis produksi tunggal melalui MEA, rencana pembentukan komunitas keamanan ASEAN (ASC) dan komunitas sosial-budaya ASEAN (ASCC). Ide-ide pembentukan masyarakat yang terintegrasi secara langsung menjadikan perbedaan identitas bukan sebagai sandungan sekaligus membuktikan bahwa masing-masing negara anggota memiliki kepentingan serupa dan mampu mengesampingkan perselisihan diantaranya.

Memang butuh lebih dari 40 tahun bagi ASEAN untuk sampai pada rencana terkoneksinya negara-negara anggota sebagai satu kesatuan, waktu yang lama untuk rencana pengintegasian. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu terjadi, pertama karena ASEAN dengan komposisi 10 negara baru terjadi pada tahun 1999 ditandai dengan masuknya Kamboja sebagai anggota terakhir. Selain memiliki tujuan sebagaimana tertulis dalam deklarasi bangkok, ASEAN pun memiliki misi lain yakni mempersatukan seluruh negara di Asia Tenggara- berdasarkan kewilayahan dan keluar dari permasalahan yang membelitnya (Alice D.Ba 2009,45). Ini menjadi akhir dari upaya mempersatukan negara-negara Asia Tenggara yang menjadi "impian" para *foundingfather* ASEAN, seperti dikatakan oleh Ali Alatas

"*When (ASEAN becomes10), the vision of our founding fathers will have been realized. Then we will have succed in redressing five dark centuries during which a fragmented Southeast Asia all to often served as the cockpit of internecine strife and proxywars, abetted and manipulated by extra-regional power" (Ali Alatas dalam Alice D.Ba 2009, 103)*

Kedua, Berakhirnya perang dingin sebagai awal munculnya era ekonomi global yang kompetitif sebagai momentum evaluasi diri. Keruntuhan Uni Sovyet dianggap

sebagai kemenangan liberalisme[400] yang sejak itu membuat dunia mulai secara intensif berbicara tentang keterikatan ekonomi dan tantangan kompetitifnya (Alice D. Ba 2009,104). Negara-negara di Asia Tenggara tidak lepas dari diskusi dan tantangan itu, hal inilah yang memaksa ASEAN harus melihat kembali dirinya dan meyesuaikannya dengan tantangan jaman. Ketiga, interaksi antar negara-negara di ASEAN yang pasang surut. Tidak dipungkiri lagi bahwa negara-negara ASEAN sering terlibat perselisihan satu sama lain, Sebut saja Thailand-Kamboja terkait perbatasan Preah Vihear, perang Vietnam-Kamboja tahun 1977-1979, sengketa perbatasan Singapura-Malaysia terkait pulau disekitar kedua negara dan sengketa budaya serta perbatasan Indonesia-Malaysia adalah segelintir contoh konflik yang melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Perselisihan yang terjadi tentu saja menjadi sandungan bagi integrasi, oleh karenanya butuh pendekatan dan waktu lebih lama untuk membangun kepercayaan satu dan lainnya dalam rangka membentuk satu kesatuan yang lebih utuh. Hal-hal inilah yang menyebabkan ASEAN membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun mimpi tentang integrasi satu wilayah yang sebut sebagai Asia Tenggara.

Melihat kembali keberhasilan negara-negara di Asia Tenggara membentuk satu komunitas terintegrasi sekaligus mematahkan argumen skeptis tentang ASEAN, tentu tidak lepas dari norma yang disepakati bersama seluruh anggota. Norma yang berlaku berpengaruh terhadap perilaku negara-negara anggota dan interaksinya satu sama lain baik dalam kegiatan kerjasama maupun penyelesaian konflik. Dengan kata lain,

[400] Lihat Francis Fukuyama “The End of History and The Last Man”

normalah yang menjadi dasar keberhasilan ASEAN menjadi lebih terintegrasi sekaligus penyelesaian berbagai konflik di Asia Tenggara.

Norma ASEAN dikenal juga dengan *ASEAN Way*[401]. Kata *ASEAN Way* menunjukan bahwa norma yang berlaku di ASEAN adalah norma khusus yang menjadi ciri pendekatan ASEAN dan berbeda dari norma yang dimilliki oleh organisasi serupa di dunia (Amitav Acharya 2009,78). *ASEAN Way* memberikan penekanan pada musyawarah sebagai prinsip yang digunakan dalam proses pengambilan kebijakan, juga prinsip non-intervensi terhadap permasalahan domestik masing-masing negara anggota. Penekanan di atas secara tidak langsung menciptakan satu mekanisme sekaligus pedoman perilaku interaksi antar negara-negara di Asia Tenggara. Inilah yang menjadi kunci bagi keberhasilan ASEAN.

Melalui *ASEAN way* sebagai ciri ASEAN, negara-negara di Asia Tenggara kemudian menyadiri dirinya bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang lebih besar. Kesadaran ini terkonstruksi baik pada mereka karena negara-negara di Asia Tenggara akhirnya harus mengacu pada norma ASEAN dalam proses interaksinya satu sama lain. *ASEAN Way* pada akhirnya "menciptakan" kesadaran tiap negara di Asia Tenggara sebagai anggota komunitas, dengan kata lain muncul kesadaran akan satu identitas yakni "satu asia tenggara".

Kesadaran sebagai bagian dari komunitas yang besar bukan lah sesuatu yang natural, melainkan melalui proses panjang yang sangat dinamis. Kesadaran ini juga bukan terjadi karena proses waktu begitu saja, tetapi merupakan hasil kesepakatan

[401] ASEAN Way digunakan untuk menyebut pendekatan ASEAN berdasarkan norma-norma yang berlaku di ASEAN, sehingga norma ASEAN diasosiasikan sebagai ASEAN Way (Amitav Acharya 2009). ASEAN Way sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Jendral Ali Moertopo, namun baru setelah

kebijakan bersama. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kesadaran sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar adalah sesuatu yang dibentuk berdasarkan gambaran ideal para pengambil kebijakan dan disesuaikan dengan kondisi aktual. Sebagai contoh, pada saat terbentuk tidak ada yang membayangkan bahwa ASEAN akan memiliki pasar tunggal. Kebijakan pembentukan ASEAN pada saat itu hanya bertujuan membangun kerjasama ekonomi antar negara di kawasan ditengah pertarungan dualisme ideologi dunia. Namun kini, Kerjasama ekonomi menjadi lebih masif melalui ide pasar tunggal seiring respon terhadap meluasnya ide globalisasi. Respon berbeda terhadap tantangan jaman diberikan oleh pengambil kebijakan sekaligus juga memperkuat kesadaran sebagai sesama anggota ASEAN. Inilah yang saya sebut sebagai politik kesadaran, karena kesadaran ASEAN yang mengikat negara anggota terjadi karena sebuah proses politik yang membangunnya.

Tulisan ini akan menjelaskan bahwa kesadaran sebagai anggota ASEAN tidak terbentuk begitu saja melainkan hasil dari proses politik yang dinamis para pengambil kebijakan. Untuk menjelaskannya tulisan ini akan terlebih dahulu membahas bahwa ASEAN Way merupakan sebuah modal sosial bagi terbentuknya kesadaran bersama sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana norma berdampak pada perilaku negara, membantu negara meninjau kembali kepentingannya dan penjelasan norma ASEAN sebagai identitas ASEAN. Bagian berikutnya akan membahas tentang kemunculan kesadaran ASEAN yang terbentuk melalui norma dan dinamika yang terjadi di ASEAN.

Norma

Keberhasilan ASEAN menjadi lebih terintegrasi dan keluar dari permasalahan yang menjadi batu sandungan tidak lepas dari keberadaan norma sebagai perangkat yang mengatur dinamika di dalamnya. Untuk melihat bagaimana norma ASEAN bisa secara efektif membangun kesadaran, maka kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan norma.

Norma merupakan standar perilaku yang berlaku di seluruh komunitas masyarakat. Frederich Kratochwil beranggapan bahwa norma merupakan standar perilaku yang di definisikan dalam kerangka hak dan kewajiban (1989,59). Norma menjadi dasar perilaku bagi anggota dalam satu masyarakat atau komunitas tertentu. Perilaku anggota komunitas dikatakan normal apabila sesuai dengan norma, dan dikatakan tidak normal apabila tidak sesuai dengan norma. Norma sekaligus menjadi legitimasi perilaku anggota masyarakat kepada anggota lainnya.

Organisasi internasional sebagai bentuk struktur masyarakat yang lebih besar juga memiliki norma yang mengatur perilaku anggotanya. Pemaknaan terhadap norma sebagai dasar perilaku aktor hubungan internasional mendapat perhatian khusus dari para penstudi hubungan dengan spesialisasi tertentu seperti *neo-liberal institutionalism* dan *constructivist.* Khususnya bagi para pemikir *constructivist* norma tidak hanya merupakan hal yang menentukan dan mengatur perilaku aktor tetapi juga mendefinisikan serta membentuk satu identitas (Peter J.Katzenstein, 1996, 5). Norma memiliki pengaruhnya sendiri terhadap perilaku negara dan berguna membantu negara dalam rangka menentukan kembali kepentingannya serta membentuk kepentingan juga identitas bersama.

Merujuk pada beberapa penjelasan di atas maka, kita dapat simpulkan bahwa norma menjadi standar perilaku komunitas masyarakat; norma mempengaruhi negara dalam melihat kembali kepentingannya; norma membentuk identitas komunitas masyarakat. Dalam konteks ASEAN, maka kita bisa memahami bahwa norma berlaku sebagai pengatur interaksi negara-negara anggotanya; norma berlaku membantu negara anggota ASEAN melihat kembali kepentingannya dan menempatkan ASEAN sendiri sebagai prioritas kepentingan masing-masing; dan yang paling penting bahwa norma ASEAN membentuk identitas bersama sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar.

Norma ASEAN Sebagai Dasar Perilaku

Sama seperti halnya organisasi regional lain, interaksi antar negara anggota ASEAN diatur oleh norma. Namun berbeda dengan organisasi regional lain, karena ASEAN memiliki ciri khasnya sendiri sehingga diasosiasikan sebagai *ASEAN Way*. Merujuk kepada sejarah perkembangan norma yang sejalan dengan sejarah ASEAN, kekhasan ASEAN dapat di bagi menjadi dua tahap sehingga kemudian dikenal sebagai *ASEAN Way*. Pertama era kemunculan, pada era ini dimulai dengan tahun di mana ASEAN berdiri ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi bangkok pada tahun 1967. Dalam Dalam Deklarasi Bangkok dijelaskan juga norma-norma yang berlaku mengatur hubungan antar negara anggota. Antara lain: penolakan terhadap penggunaan kekuatan dalam penyelesaian masalah, prinsip regional otonom yang berarti ASEAN memiliki sikap untuk menentukan kebijakan terkait persoalan global, prinsip non interfensi yang mengharuskan negara anggota ASEAN tidak ikut serta

secara langsung terlibat dalam persoalan negara anggota lainnya dan menghormati kedaulatan negara.

Tahap kedua era perkembangan, era ini ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan jumlah anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Pada tahap ini ide pembentukan regional yang bersifat tidak terlalu formal (*informality*), terbukan dan menekankan konsultasi yang intensif dalam kerjasama dan penyelesaian konflik dikemukakan (Lee Kim Chew dalam Acharya 2009, 78). Kunci dari ide ini ada pada musyawarah dan mufakat sebagai mekanisme pengambilan kebijakan bersama. Herbert Feith menjelaskan bahwa musyawarah dan mufakat sebagai keadaan di mana terdapat kesaling pahaman antara para peserta untuk tidak memaksakan kehendaknya dan mempertimbangkan pandangannya sebelum menyimpulkan (Herbert Feith 1962,40). Dengan penambahan ide tentang *informality*, keterbukaan dan pengintensifan konsultasi sekaligus melengkapi ciri pandekatan *ASEAN Way*.

Norma Sebagai Alat Meninjau Kembali Kepentingan Negara Anggota

Negara tidak lepas dari kepentingan, oleh karena itu analisis terhadap kebijakan suatu negara ditekankan pada apa yang menjadi kepentingan negara itu. Kepentingan nasional secara luas didefinisikan sebagai kebutuhan suatu negara dan negara berkepentingan dalam pemenuhannya. Hans Morgenthau menggambarkan kepentingan nasional sebagai kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budaya dari gangguan negara lain (1951). Untuk mendefinisikan kepentingan nasional, suatu negara perlu mempertimbangkan kembali hubungannya dengan negara lain karena menurut

George Kennan kepentingan nasional tidak terpisah dari lingkungan pergaulan antar bangsa (1951). Dengan kata lain kebijakan negara pasti menggambarkan kepentingan nasionalnya dan dalam rangka pemenuhannya negara perlu memperhatikan dan meninjau kembali hubungannya dengan negara lainnya.

ASEAN merupakan salah satu kepentingan negara anggota. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tujuan ASEAN sebagaimana tertuang dalam *Bangkok Declaration*, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan perdamaian, dan kerjasama dengan organisasi regional lainnya (Bangkok Declaration, 1967). Ada setidaknya 2 alasan bagi negara anggota untuk menempatkan bahwa ASEAN menjadi salah satu kepentingan mereka. Pertama, melalui norma ASEAN negara anggota dapat memenuhi kebutuhan akan kerjasama regional tanpa intervensi. Sejak berakhirnya perang dingin, dunia masuk dalam era ekonomi kompetitif yang memaksa negara menyusun ulang strategi ekonomi mereka. Sementara kedaulatan negara tetaplah menjadi prioritas setiap negara. Prinsip *non-interference* menjamin kedua hal tersebut dapat terlaksana. Negara anggota tetap dapat bekerjasama sebagai jawaban dari tantangan global, namun kedaulatan tidak terganggu karena intervensi kepentingan yang berlebihan. Kedua, norma ASEAN menjamin kedudukan yang setara bagi setiap negara tanpa melihat kesenjangan yang ada dalam hal merumuskan kebijakan bersama. Melalui norma ini negara anggota memiliki peluang lebih besar dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam negerinya lewat skema kerjasama negara ASEAN.

Norma ASEAN Sebagai Identitas

Identitas ASEAN dicirikan lewat pendekatan norma yang berlaku (*ASEAN Way*) di Asia Tenggara. Para pemimpin negara di Asia Tenggara menggambarkannya sebagai proses interaksi antar negara sekaligus membedakannya dengan barat. Identitas yang terbangun adalah identitas yang mengacu pada norma ASEAN untuk membedakannya dengan organisasi lainnya.

Secara teoritis identitas berangkat dari sejumlah asumsi yang bersifat umum antara lain, pertama bahwa setiap anggota kelompok berusaha untuk merawat atau meninggalkan keegoisannya dan berusaha membentuk konsep diri yang positif, kedua, kelompok dan anggotanya berasosiasi terhadap nilai positif atau negatif. Dari kedua asumsi tersebut maka secara tidak langsung membuat anggota kelompok berusahan untuk merawat identitas diri yang mereka bangun. Di samping itu, kesepakatan membentuk norma menjadi penting karena merepresentasikan persepsi yang positif terhadap apa yang dibentuknya. Dalam hal ini, ASEAN dan norma ASEAN merupakan hasil kesepakatan para anggotanya dan mereka memiliki tanggung jawab untuk tetap mempertahankan apa yang sudah mereka sepakati bersama.

***ASEAN Way* sebagai Modal Sosial Komunitas ASEAN**

Cara pendekatan paling tepat untuk melihat apakah *ASEAN Way* sebagai sebuah pendekatan negara dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian masalah di Asia Tenggara dan membentuk kerjasama antar anggota, adalah dengan memahami

terlebih dahulu konsep modal sosial (*Social Capital*). Ini menjadi penting mengingat ASEAN Way merupakan sebuah produk dari sebuah komunitas.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, modal sosial didefinisikan sebagai

> *"the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possessions of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words to membership of a group – which provides each of it's members with the backing of the collectivity-owned capital, a "credential" which entitles them to credit, in the various senses of the word." (*Bourdieu, 1986: 248)

Definisi tersebut menunjukan bahwa, modal sosial adalah kesatuan dari seluruh aksi masyarakat termasuk di dalamnya interaksi yang sudah diatur dalam sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dilegitimasikan dan kemudian ditaati seluruh anggota masyarakat.

Sejalan dengan pendapat Bourdieu, Ichiro Kawachi memberikan penekankan pada hubungan antar individu dan keanggotaannya dalam sebuah komunitas. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa modal sosial menggambarkan kemampuan sosial termasuk di dalamnya norma, hubungan masyarakat, kepercayaan dan hubungan timbal balik (Kawachi, 1999). Dalam konsepsinya ini, modal sosial dekat dan erat kaitannya dengan afiliasi antar masyarakat dalam sebuah kebudayaan tertentu dan tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Sebagai bagian dari budaya, relasi masyarakat harus mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan, ketentuan dan aturan kebudayaan itu. Dalam konteks Asia Tenggara, *ASEAN Way* merupakan dasar dan modal sosial bersama negara-negara anggota sehingga harus dijalankan oleh seluruh anggotanya.

Dalam pandangan James Coleman, modal sosial dimaksudkan sebagai entitas di mana terdapat struktur sosial dan memfasilitasi tindakan-tindakan dari aktor tersebut. modal sosial juga diamini sebagai sesuatu yang produktif dan membuat sesuatu yang mungkin menjadi pasti, serta yang tidak ada menjadi bukan hal yang tidak mungkin (Coleman, 1988: 98). Ini menyatakan bahwa modal sosial merupakan wadah para anggota komunitas untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya.

Lantas bagaimana budaya sebagai modal sosial dapat berlaku efektif di masyarakat? Robert Putnam menjelaskan bahwa semua bentuk budaya sebagai modal sosial berjalan berdasarkan pirinsip *Trust* (kepercayaan). *Trust/*percaya pada komposisi budayaadalah cara paling tepat bagi seseorang dalam mengantisipasi reaksi individu/kelompok yang berbeda dari ekspektasinya. Dalam situasi di mana seseorang tidak memiliki ekspektasi terhadap reaksi individu atau masyarakat maka seseorang tersebut perlu melihat pola yang sudah pernah ada sebelumnya, dan hal ini tidak akan berhasil tanpa percaya pola yang sudah pernah ada tersebut (Martti Siisiäinen, 2000:4).

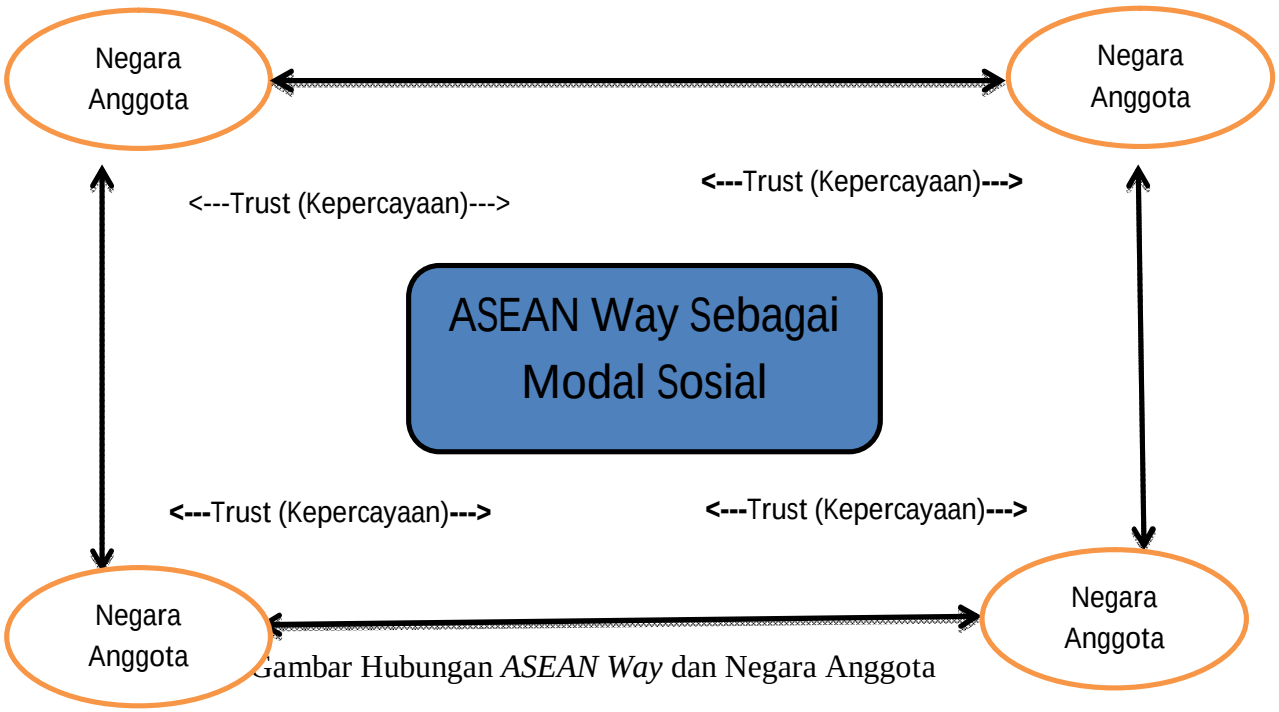

Gambar Hubungan *ASEAN Way* dan Negara Anggota

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa *ASEAN Way* merupakan produk dari sekumpulan negara yang diikat dalam sebuah rasa saling percaya. Melalui *ASEAN Way* inilah, perilaku negara diatur sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan bersama. Norma yang termuat dalam ide *ASEAN Way* inilah yang disebut sebagai modal sosial.

Melalui berbagai pendapat mengenai modal sosial di atas, dapat diambil setidaknya terdapat tiga hal yang penting yang menjadi acuan untuk menjelaskan pola hubungan negara anggota dengan *ASEAN Way*, yaitu:

- ***Collective Action*** : tindakan kolektif yang menjadi bentuk dari ekspresi *ASEAN Way*
- **Aturan hubungan antar anggota:** di dalam modal sosial terdapat aturan yang mengatur relasi antar anggota ASEAN

- **Produktifivitas:** modal sosial sebagai hal yang mendorong terciptanya masyarakat ASEAN yang produktif.

Ketiga hal penting tersebut, kemudian diikat dalam prinsip *trust* sebagai dasar hubungan antar masyarakat (individu-individu; individu-kelompok; kelompok-kelompok) dalam sebuah kebudayaan. Melalui pendekatan inilah, ASEAN Way dijelaskan sebagai budaya (modal sosial) yang efektif untuk mendorong kerjasama dan penyelesaian berbagai persoal di Asia Tenggara.

Kemunculan Kesadaran ASEAN

Kesadaran sebagai satu bagian komunitas yang lebih besar bukanlah sesuatu yang natural mengingat keragaman yang ada di ASEAN. Secara etnis, negara-negara di ASEAN berbeda satu sama lainnya. di wilayah daratan Asia Tenggara terdapat setidaknya tiga etnis dan bahasa berbeda, kelompok *Austro-Asiatic* mencakup Kamboja dan Vietnam, kelompok Tibeto-Burman di Myanmar, dan penutur Tai di Thailand dan Laos. Sementara di wilayah maritim (laut) mayoritas etnis berasal dari migran Austronesia yang datang dari Tiongkok-Taiwan sekitar tahun 1500 tahun S.M. Dilihat dari agama, wilayah daratan didominasi oleh Budha yang mencakup Thailand, Myanmar, Kamboja dan Laos, sementara di wilayah laut mayoritas penduduk beragama Islam (Donald Weatherbee 2009, 11-12). Melihat perbedaan tersebut kita sadari bahwa kesadaran ASEAN bukan lah hal yang natural.

Satu-satunya persamaan diantara perbedaan itu adalah mereka berada dalam satu wilayah yang sama yakni Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan terma yang

digunakan untuk menyebut wilayah paling tenggara benua Asia. Secara geografis Asia Tenggara berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah timur, Australia di sebelah tenggara, India dan Teluk Bengal di barat daya dan Samudra Hindia di sebelah selatan (Donald Weatherbee 2009, 9).Walau demikian, persamaan dalam satu wilayah merupakan syarat mutlak pembentukan satu organisasi regional. ASEAN dalam hal ini hanya didirikan berdasarkan kesamaan wilayah tanpa kesamaan nilai yang mengikat antar negara anggotanya.

Sacara historis, terma Asia Tenggara di bentuk oleh barat atas dasar kepentingan mereka terhadap konfrontasinya dengan Jepang pada Perang Dunia ke-2. Konsep "Asia Tenggara" tercatat pertama kali ada pada tahun 1943 ketika dibentuk Komando Asia Tenggara (Southeast Asia Command-SEAC), kemudian konsep tersebut semakin dikenal seiring penyebutan Asia Tenggara dalam berbagai literatur barat yang merujuk wilayah itu[402]. Orang-orang di wilayah yang disebut Asia Tenggara sendiri tidak mengetahui penyebutan itu mengingat pada masa Perang Dunia ke 2, hampir seluruh negara di kawasan itu belum lah merdeka dari penjajahan barat (kecuali Thailand). Hal-hal ini menjelaskan bahwa istilah "Asia Tenggara" merupakan warisan kolonial.

Sebenarnya ASEAN sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah organisasi regional. Hanya melalui kesamaan wilayah dan kesepakatan bersama antar negara wilayah tersebut sudah cukup bagi pembentukan suatu organisasi regional. Aturan yang mengatur perilaku antar negara anggota pun sebenarnya merupakan hal yang

[402] Beberapa literatur yang menyebut Asia Tenggara antara lain *at war with Asia, Democracy, The Quiet American.*

bersifat normatif sebagai kelengkapan pembentukan organisasi. Namun, para *founding fathers* ASEAN memiliki visi yang jauh ke depan dengan harapan ASEAN menjadi satu kesatuan yang lebih terintegrasi dengan identitas yang jelas "Satu Asia Tenggara".

Para pemimpin ASEAN memiliki semangat agar masyarakat ASEAN bisa lebih terintegrasi satu dengan yang lainnya. Tommy Koh seorang diplomat asal Singapura pernah menyampaikan

"**Our leaders said that politically it is good for us to be united as one family. Never mind if economic levels are different comparedto the richer countries . . . We are more driven by sentiment, by politics, than by logic and economics"**

Pernyataan di atas merupakan gambaran semangat untuk membentuk satu organisasi regional yang di didasarkan pada semangat kebersamaanmelalui mekanisme politik untuk mencapai keuntungan atau kesejahteraan bersama.

Kesadaran sebagai bagian dari komunitas ASEAN bukanlah kesadaran yang *given* atau terbentuk begitu saja melainkan terbentuk berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, makna Asia Tenggara yang berubah dari waktu ke waktu. Seperti sudah disampaikan di atas bahwa sebelum ASEAN terbentuk, Asia Tenggara hanyalah istilah yang dibuat oleh barat merujuk pada wilayah di sebelah tenggara benua Asia. Dalam pemahaman ini, Asia Tenggara tidak bermakna apapun selain wilayah. Bagi pihak luar (barat), pemaknaan wilayah sebagai wilayah strategis sebagai pangkalan utama terkait konfrontasinya dengan Jepang pada perang dunia ke-

2. Sedangkan bagi *in-group* (Asia Tenggara itu sendiri) wilayah tidak berati sama sekali mengingat negara-negara Asia Tenggara pada saat itu belum merdeka dari penjajah (kecuali Thailand).

Asia Tenggara mulai dimaknai oleh *in-group* sesaat setelah mereka memperoleh kemerdekaannya. Pemaknaan itu dimulai dengan kerjasama antar negara kawasan melalui berbagai skema semisal Maphilindo (Malaysia-Philipina-Indonesia) dan ASA (Association of Southeast Asia) yang menjadi cikal bakal ASEAN. Kerjasama tersebut dibentuk karena beberapa alasan, yakni solidaritas antar negara yang baru merdeka. Hal ini berkaitan juga dengan semangat yang dibawa pada Konfrensi Asia Afrika untuk tidak terlibat dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Alasan lain yakni kepentingan negara-negara kawasan untuk meningkatkan kemampuan sektor ekonominya. Pada bagian ini, pemaknaan Asia Tenggara hanya terbatas pada solidaritas negara kawasan sebagai negara yang baru merdeka dan menyusun rencana peningkatan kemampuan ekonominya.

Berdasarkan semangat solidaritas dan munculnya kepentingan ekonomi yang serupa, membuat negara-negara di Asia Tenggara mulai membicarakan satu kerjasama yang bersifat kewilayahan. Wilayah dan negara di kawasan Asia Tenggara tidak lagi dimaknai sebagai tempat keberadaan mereka tetapi juga sebagai partner yang dapat diajak bekerjasama demi kepentingan bersama. Pada bagian ini pemaknaan *in-group* terhadap Asia Tenggara berubah menjadi lebih mendalam dengan dibentuknya ASEAN dan memuat aturan bersama yang perlu dipatuhi oleh anggotanya.

Dengan dibentuknya ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional dan memuat aturan serta norma bersama semakin mempererat hubungan satu sama lain sekaligus memperdalam pemaknaan terhadap Asia Tenggara. Asia Tenggara tidak lagi hanya dianggap sebagai batasan geografis begitu saja tetapi sudah muncul sebagai identitas bersama. Hal ini tersirat dalam pernyataan Abdullah Ahmad Badawi pada pertemuan ke tujuh forum Asia Tenggara. Beliau menyatakan bahwa

> *"ASEAN by definition is an association of Southeast Asian Nations.. ASEAN belongs to Southeast Asia. It exist to cooperatively promote the interest of Southeast Asians.. We must draw the line somewhere. I suggest we hold the line in Southeast Asia, which is what the Association of Southeast Asian Nations is about anyway. Identity, if we temper with it, or blur its lines, then we run risk of loosing ourselves, and our commitment to the identity. In this case it is ASEAN that is at risk"* (Badawi dalam Alice D.Ba 2009, 127).

Pada hal ini, Kesadaran sebagai bagian dari komunitas sudah muncul sehingga negara anggota dapat merumuskan kebijakan yang berdampak minimal pada negara lain di kawasannya. Pemaknaan terhadap wilayah Asia Tenggara sudah berubah seiring berjalannya waktu. Dari tidak berarti apa pun berubah menjadi identitas bersama.

Kedua, Perubahan tantangan ekonomi dan politik. Setelah perang dunia berakhir dunia dihadapkan pada persoalan yang lebih kompleks. Di sektor ekonomi banyak negara miskin bermunculan (karena baru merdeka). Di sektor politik kontestasi ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet menjadikan hubungan antar negara menjadi sangat rumit. Negara di Asia Tenggara tidak lepas dari tantangan ini.

Di sektor ekonomi, karena banyak negara di Asia Tenggara baru saja merdeka maka banyak negara Asia Tenggara masuk dalam kategori miskin. Tantangan mereka

tentu saja memperbaiki sektor ekonomi agar mampu sejahtera. Sebagai negara baru merdeka, negara-negara Asia Tenggara memilih untuk membangun kerjasama satu sama lain demi meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pendirian ASEAN pun tidak lepas dari kepentingan itu sebagaimana tertuang dalam *Bangkok Declaration.* Hanya saja tantangannya kemudian berbeda seiring berjalannya waktu. Pada masa awal,kerjasama ekonomi hanya sebatas kerjasama ekonomi yang lumrah dilakukan seperti perdangangan tanpa ada pembahasan aturan ekonomi yang lebih terintegrasi. Namun kini, dunia yang dihadapkan pada globalisasi menuntut keterhubungan antar negara yang intens. Hal ini menciptakan pasar yang luas, namun dapat menjadi masalah bagi negara-negara yang belum siap dari sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan sumber daya alam. Menjawab tantangan baru ini, ASEAN menjadi semakin erat satu dan lainnya dalam rangka menahan intervensi ekonomi dari negara bahkan regional lain. Di tengah situasi di mana negara-negara Asia Tenggara berhadapan pada posisi demikian, pilihan untuk memperkuat kerjasama sektor ekonomi dan melakukan pembahasan aturan ekonomi regional menjadi pilihan paling rasional yang bisa dilakukan demi menahan pengaruh ekonomi dari luar. Kebutuhan itu kemudian membuat ASEAN menekankan pada memaksimalisasi pasar dan investasi melalui regionalisme.

Di sektor politik, perubahan konstelasi kekuatan dunia yang terpusat pada pertarungan ideoologi liberal dan komunis pada saat itu menciptakan situasi yang sulit bagi Asia Tenggara. Hal ini terjadi karena ada beberapa negara yang berada di kawasan berhaluan ideologi komunis. Perbedaan ideologi menyebebkan penolakan dari sesama negara Asia Tenggara, sebagai contoh penolakan Thailand terhadap

Vietnam dan ditakutkan hal semacam itu akan merusak stabilitas kawasan. Namun demikian, ASEAN akhirnya menemukan arahnya untuk menghargai perbedaan sehingga perselisihan dapat di atasi. Penghargaan terhadap perbedaan ini pula yang membawa ASEAN dapat mengatasi persoalan lain seperti perbedaan budaya, agama, politik dll. Dengan munculnya penghargaan dan penerimaan sesama anggota ASEAN, semakin memperkuat identitas dan kesadaran sebagai bagian yang lebih besar.

Simpulan

Kesadaran sebagai bagian dari komunitas muncul berkat satu proses politik di mana para pengambil kebijakan mencoba mengarahkan kebijakan ASEAN pada satu gagasan ideal yakni “Satu Asia Tenggara” lewat norma sebagai modalnya. Dimulai dengan pemaknaan terhadap Asia Tenggara dan tantangan ekonomi politik global, ASEAN akhirnya menemukan jalannya untuk memperkuat identitas dan menciptakan kesadaran antar negara anggota. Sementara persoalan-persoalan yang dihadapi malah semakin memperkuat identitas Asia Tenggara, karena semakin persoalan muncul para pengambil kebijakan pun akan membuat keputusan yang didasarkan pada nilai dan norma yang dipercaya oleh negara anggota ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Acharya, Amitav.2009. *Constucting A Security Community in Southeast Asia.* New York: Routledge

Ba, Alice D.2009. (Re)Negotiating East and Southeast Asia. Stanford: Standford University Press.

Bourdieu, Piere.1986.*The forms of capital*" Westport Connecticut: Greenwood press,

Coleman, James.1998.*Social Capital in the Creation of Human Capital*. American Journal of Sociology 1988.

Feith, Herbert. 1962. *The decline of constitutional Democracy in indonesia*. Iticha, New York: Cornell University Press

Hogg, Michael & Dominic Abrams.1988. *Social identification*, New York: Routledge

Katzenstein, Peter J.1996. *Cultural Norms adn National Security: Police and Military in Post War Japan*. Ithaca, New York: Cornell University Press

Kawachi, Ichiro.1999.*Social capital and community effects on population and individual health"*, New York: Annals of the New York Academy of Sciences

Kennan, George. 1951. *American Diplomacy 1900-1950.*Chicago: Chicago University Press

Kratochwill, Friedrich. *1989. Rules, norms, and decision: on the condition of practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs.* Cambridge : Cambridge University Press

Morgenthau, Hans J.1951. *In Defense of Teh national interest: critical axamination of american foreign policy*. New York :University Press of america

Siisiäinen, Martti**.**2002.*Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam***".** Paper presented at ISTR Fourth International Conference "The Third Sector: For What and for Whom?", Dublin: Trinity College.

Weatherbee, Donald E. 2009.*International Relations in Southeast Asia*. Lanham (Maryland): Rowmandan Littlefield Publishers

www.polity.co.uk/global/whatisglobalization.asp

Bangkok Declaration 1967.pdf

LEGALISASI PERJANJIAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TAHUN 2015

Imelda M.J. Sianipar

Universitas Kristen Indonesia

imelda.sianipar@uki.ac.id

Abstrak

Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 merupakan sebuah kesepakatan dari sepuluh negara anggota ASEAN yang tertuang dalam deklarasi ASEAN Concord II yang ditandatangani pada 7 Oktober 2003 di Bali dan deklarasi Cebu yang ditandatangani pada 13 Januari 2007 di Filipina. Penandatangan deklarasi tersebut, merupakan suatu titik awal bagi negara-negara ASEAN untuk lebih memperat integrasi ASEAN. Tulisan ini akan menganalisis karakteristik perjanjian-perjanjian yang mendasari pembentukan MEA tersebut dilihat dari dimensi obligasi, presisi dan delegasinya. Tulisan ini berargumen bahwa legalisasi perjanjian pembentukan MEA masih lemah. Karenanya, sangatlah penting untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan muncul akibat perjanjian yang lemah tersebut agar harapan kesepuluh negara ASEAN untuk semakin terintegrasi dapat terwujud.

Keywords: legalisasi, deklarasi ASEAN Concord II, deklarasi Cebu, ASEAN, MEA

Pendahuluan

Ide awal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berasal dari sebuah kesepakatan para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-5 di Kuala Lumpur bulan Desember 1997. Para pemimpin memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.[403] Selanjutnya pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, 7 Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyepakati bahwa MEA merupakan tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2020. Selain MEA, komunitas Keamanan ASEAN dan komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari komunitas ASEAN yang akan dibentuk. Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.[404] Hal tersebut tertuang dalam sebuah Deklarasi ASEAN Concord II atau yang dikenal dengan Bali Concord II. Seperti yang dinyatakan dalam deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) bahwa masyarakat ekonomi ASEAN merupakan realisasi dari tujuan akhir ekonomi ASEAN yaitu menciptakan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang melalui aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja, serta aliran

[403] *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint)*, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, 2009, hal. 2-3.
[404] Ibid

modal yang lebih bebas pada tahun 2020. Dengan adanya deklarasi tersebut, negara-negara ASEAN dengan jelas mengarah pada integrasi ekonomi yang lebih dalam.[405]

Para pemimpin ASEAN menyadari bahwa ketergantungan negara-negara anggota ASEAN di kawasan dan dengan kawasan lain di dunia semakin meningkat.[406] Para pemimpin ASEAN juga melihat peningkatan kekuatan Cina dan India di kawasan Asia dan melemahnya peran Amerika Serikat. Hal tersebut kemudian mendorong para pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan MEA yang ditargetkan tahun 2020 menjadi tahun 2015. Kesepakatan para pemimpin ASEAN tersebut dituangkan dalam Deklarasi Cebu yang ditandatangani pada 13 Januari 2007. Para pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.[407]

Penandatangan Deklarasi ASEAN Concord II dan Deklarasi Cebu menjadi titik awal bagi negara-negara ASEAN untuk lebih memperat integrasi ASEAN. Artikel ini akan menganalisis karakteristik perjanjian yang menjadi dasar pembentukan MEA tersebut yaitu Deklarasi ASEAN Concord II dan Deklarasi Cebu dilihat dari dimensi obligasi, presisi dan delegasi. Artikel ini berargumen bahwa legalisasi perjanjian pembentukan MEA masih lemah. Karenanya, para pemimpin ASEAN perlu

---

[405] Hadi Soesastro, *An ASEAN Economic Community and ASEAN+3: How Do They Fit Together?*, Canberra: Pacific Economic Paper No. 338. 2003.hal. 1.
[406] *Cebu Declaration on The Acceleration of The Establishment of an ASEAN Community By 2015,*13 Januari 2007. http://www.aseansec.org.
[407] Ibid.

mengantisipasi masalah-masalah yang akan muncul akibat perjanjian yang lemah tersebut agar dapat mewujudkan ASEAN yang lebih terintegrasi.

Definisi legalisasi

Legalisasi merupakan sebuah konsep dalam hubungan internasional yang dikembangkan untuk menjelaskan kegunaan dan konsekuensi hukum dalam politik internasional.[408] Kenneth W. Abbott, dkk mendefinisikan legalisasi sebagai *a particular set of characteristics that institutions may (or may not) possess.*[409] Karakteristik tersebut meliputi tiga dimensi yaitu obligasi, presisi dan delegasi. Obligasi berarti negara atau pihak yang berjanji diikat oleh aturan atau komitmen. Dengan demikian, negara atau pihak yang berjanji memiliki kewajiban untuk tunduk pada aturan atau komitmen yang telah disepakati. Presisi berarti bahwa aturan-aturan tersebut jelas, menegaskan perilaku yang diwajibkan, diwewenangkan dan di larang oleh aturan-aturan tersebut. Sedangkan delegasi berarti adanya pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan dan menerapkan aturan; menyelesaikan konflik atau perselisihan dan membuat aturan-aturan baru.[410]

Dimensi obligasi, presisi dan delegasi dari suatu aturan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jika dimensi obligasi, presisi dan delegasinya tinggi maka legalisasi aturan tersebut tinggi (*hard legalization*). Jika dimensi obligasi, presisi dan

[408] Michael Ewing-Chow dan Tan Hsien-Li, *The Role of the Rule of Law in ASEAN Integration*, European University Intitute, Robert Schuman Centre For Advanced Studies, Italy: 2012, hal. 23.
[409]Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, *The Concept of Legalization* dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter, International Organization, Volume 54, Number 3, Summer 2000, hal, 401.
[410] Ibid.

delegasinya rendah maka legalisasi aturan tersebut rendah (*soft legalization*). Jika salah satu dari dimensi obligasi, presisi dan delegasinya tinggi atau rendah maka legalisasi dari aturan tersebut sedang (*medium legalization*).[411] Gambar 1 dibawah ini memperlihatkan masing-masing elemen dari legalisasi. Masing-masing elemen ditampilkan dari bentuk yang paling lemah yang terletak di sebelah kiri hingga ke bentuk yang paling kuat yang terletak di sebelah kanan gambar.

Gambar 1. Dimensi Legalisasi[412]

Obligation	Expressly non legal norm	↔	Binding rule (*jus cogens*)
Precision	Vague Principles	↔	Precise highly elaborated rule
Delegation	Diplomacy	↔	International Court organization, domestic application

[411] Ibid.,402.
[412]Ibid.,404

Menurut Abbot dan Snidal, para pihak termasuk negara memiliki berbagai pertimbangan yang mengarahkan mereka untuk menyepakati aturan yang bersifat *hard law* dan *soft law.* Istilah *hard law* digunakan untuk menyebut aturan yang memiliki kekuatan mengikat yang jelas dan memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menginterpretasikan dan mengimplementasikan aturan tersebut.[413] Abbot dan Snidal mengamati bahwa baik *hard law* dan soft law, keduanya memiliki keuntungan dan kerugian. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyepakati aturan yang bersifat *hard law* adalah mengurangi biaya transaksi, memperkuat kredibilitas komitmen, memperluas strategi politik dan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam perjanjian yang tidak lengkap. Sedangkan kerugian dari *hard law* yaitu terbatasnya keleluasaan aktor untuk bertindak dan bahkan membatasi kedaulatan.[414] Akibat dari terlalu ketat dan kakunya aturan yang bersifat *hard law* maka para pihak/negara lebih menyukai perjanjian yang bersifat *soft law.* Adapun keuntungan dari *soft law* adalah mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi-pertemuan, mempelajari isu- tawar menawar-dan lain-lain, tidak mempengaruhi kedaulatan, memberikan sejumlah alternatif menarik untuk

[413]Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal, *Hard and Soft Law in International Governance,* dalam Judith Goldstein et al., Op.Cit.,hal. 421.
[414] Ibid.422.

mengantisipasi ketidakpastian.[415] Sementara itu kelemahan dari *soft law* adalah sulitnya memegang komitmen negara/para aktor untuk taat pada peraturan.[416]

Pada umumnya para pihak/negara lebih suka mengikatkan diri pada perjanjian yang bersifat *soft law* dibandingkan *hard law*. Hal ini dikarenakan *soft law* dianggap lebih banyak memberi ruang gerak bagi negara dibandingkan *hard law*. Terlebih bila menyangkut dengan kedaulatan negara.

Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN

MEA merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inistiatif yang telah ada dan insiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Untuk membentuk MEA, ASEAN harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.[417]

MEA akan membentuk ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi serta menjadikan ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan langkah-langkah dan mekanisme baru untuk memperkuat implementasi insiatif-inisiatif ekonomi yang telah ada; mempercepat integrasi kawasan dalam sector-sektor prioritas; mempermudah pergerakan paar pelaku usaha tenaga kerja terampil dan

[415] Ibid, 434-444
[416] Ibid,446
[417] *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN,* Op., Cit. hal. 2-3.

berbakat dan memperkuat mekanisme institusi ASEAN. Sebagai langkah awal menuju MEA, ASEAN telah mengimplementasikan berbagai rekomendasi High Level Task Force (HLTF) on ASEAN Economic Integration sebagaimana tertera dalam Bali Conocrd II.

Pada saat bersamaan, MEA juga akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos , Myanmar, dan Vietnam (CLMV) melalui *initiative for ASEAN Integration* (IAI) dan berbagai inisiatif regional lainnya. Kerjasama di bidang lainnya juga akan dilakukan seperti pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM; pengakuan kualifikasi profesi, konsultasi secara erat mengenai kebijakan makroekonomi dan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, penguatan infrastruktur dan hubungan komunikasi, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, pengintegrasian industri di seluruh kawasan untuk mendorong pemberdayaan kawasan, dan peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam pembentukan MEA.

Berdasarkan hal diatas dan mengingat pentingnya perdagangan ASEAN dengan negara lain di luar kawasan, serta perlunya komunitas ASEAN untuk tetap berwawasan keluar maka MEA memiliki empat karaktersitik utama sebagai berikut:[418]

1. **Pasar tunggal dan basis produksi**. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis

[418] *Ibid.*

produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu Priority Integration Services (PIS) dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

2. **Kawasan Ekonomi yang Kompetitif.** Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: penguatan kebijakan persaingan usaha, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pembangunan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.
3. **Pembangunan Ekonomi yang setara.** MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan inisiatif integrasi ASEAN. Pengembangan UKM bertujuan untuk (a) mempercepat pengembangan UKM dan mengoptimalkan keanekaragaman di negara-negara anggota ASEAN. (b) meningkatkan daya saing dan dinamika UKM ASEAN dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pasar, pengembangan SDM, keterampilan, pendanaan dan teknologi. (c) memperkuat daya saing UKM ASEAN dalam mengatasi kesulitan ekonomi makro dan keuangan, serta tantangan dalam iklim perdagangan yang lebih bebas. (d) meningkatkan konstribusi UKM dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan pembangunan ASEAN sebagai satu kawasan. Sedangkan inisiatif integrasi ASEAN (IAI) dilakukan melalui kerjasama teknik dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mempercepat integrasi ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN yang masih tertinggal (CLMV) sehingga manfaat dari integrasi dapat

dinikmati secara merata. IAI meliputi bidang-bidang prioritas yaitu infrastruktur, SDM, TIK, Peningkatan kapasitas integrasi ekonomi kawasan, energi, iklim, investasi, pariwisata, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Bagi negara-negara CLMV, perlu mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, investasi asing dan domestic, partisipasi sektor swasta.

4. **Integrasi ke dalam Ekonomi Global.** ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang menglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global (global supply chain), serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA. Aturan dan ketentuan internasional harus dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan MEA. Untuk itu ASEAN perlu meninjau kembali komitmen-komitmen FTA/CEP yang telah terbentuk antara lain seperti ASEAN-China FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-Australia Selandia Baru FTA, ASEAN-Jepang CEP dan ASEAN-Korea FTA.

Mengapa ASEAN memilih Deklarasi ?

Deklarasi merupakan sebuah dokumen yang menyatakan persetujuan resmi tentang standard-standard tertentu namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Menurut Miles Kahler, deklarasi merupakan sebuah bentuk perjanjian yang sering digunakan

oleh negara-negara ASEAN. Sudah menjadi ciri khas bagi negara-negara di kawasan Asia baik Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan bahkan Asia Pasifik bahwa mereka lebih menyukai aturan- aturan yang bersifat longgar.[419] Hasil pengamatan Kahler terhadap tiga institusi yang ada di kawasan Asia yaitu ASEAN, ARF dan APEC membuktikan hal tersebut. Paling tidak ada tiga alasan yang menyebabkan negara-negara di kawasan Asia lebih menyukai aturan-aturan yang longgar. *Pertama,* telah tersedianya aturan alternatif di luar deklarasi ASEAN sehingga tuntutan untuk memiliki aturan yang lebih mengikat jadi rendah. Misalnya saja World Trade Organization (WTO). Negara-negara ASEAN merupakan anggota WTO. Ketika terjadi perselisihan dagang, mereka lebih suka menyelesaikannya dengan menggunakan mekanisme WTO daripada ASEAN. Hal ini pernah terjadi ketika Singapura berselisih dengan Malaysia terkait produk kimia pada tahun 2003. Singapura melaporkan Malaysia kepada WTO dan mencari penyelesaiannya di WTO.[420]

Kedua, negara-negara ASEAN yakin bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah mereka dengan cara-cara ASEAN. Prinsip ini dikenal dengan *ASEAN Way* yang mengedepankan keharmonisan, konsensus dan pertemuan-pertemuan informal dalam menyelesaikan persoalan yang muncul. Bagi negara-negara ASEAN, prinsip penyelesaian masalah dengan gaya ASEAN harus tetap dipertahankan. Hal tersebutlah yang membedakan ASEAN dengan institusi lain yang merupakan ciptaan barat. ASEAN sendiri sudah merupakan implementasi dari pemikiran barat karenanya

[419] Miles Kahler, *Legalization as Strategy: The Asia-Pacific Case* dalam Judith Goldstein et al., Op.Cit.,hal. 549-550.
[420] Ibid., hal. 565.

perlu menambahkan sesuatu yang merupakan ciri khas pemikiran timur yang dikenal dengan *ASEAN Way*.

Ketiga, politik domestik negara-negara ASEAN yang menyebabkan sulitnya membuat aturan yang lebih mengikat di kawasan. Kecuali Thailand, negara-negara ASEAN memiliki pengalaman historis yang sama yaitu pernah mengalami masa penjajahan. Trauma akan penjajahan ini membuat para pemimpin ASEAN tidak menginginkan adanya aturan yang terlalu membatasi prilaku negara. Kedaulatan adalah di atas segala-galanya. Selain memiliki pengalaman historis yang sama, keanekaragaman sistem politik di ASEAN mempersulit negara-negara di ASEAN untuk berada dalam satu aturan yang mengikat terlalu kuat.[421] Filipina merupakan negara yang menerapkan sistem politik yang demokratis. Malaysia dan Singapura memiliki sistem politik yang demokratis namun pada prakteknya didominasi oleh satu partai dominan. Barisan Nasional telah mendominasi Malaysia dan Partai Aksi Rakyat telah menjadikan Singapura seperti negara dengan sistem satu partai. Sistem politik Indonesia telah mengalami beberapa fase. Setelah mengalami demokrasi parlementer pada awal 1950, sistem politik Indonesia berubah menjadi otoriter dibawah demokrasi terpimpin pada masa kepemimpinan Soekarno. Selanjutnya pada 1965-1998, Indonesia dikuasai oleh rezim Soeharto yang memiliki gaya kepemimpinan otoritarianisme yang anti komunis dan pro-militer. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mulai mengarah pada demokrasi. Thailand didominasi oleh rezim militer dan mulai mengarah pada demokrasi sejak awal 1990. Kamboja dibawah kepemimpinan Hun Sen mengadopsi sistem demokrasi namun

[421] Ibid, 559-561

pada prakteknya bersikap otoriter. Vietnam dan Laos menerapkan sistem komunis yang otoriter. Myanmar merupakan negara yang didominasi oleh rezim militer dan Brunai Darussalam merupakan negara yang menerapkan sistem kesultanan.[422]

Legalisasi Deklarasi ASEAN Concord II dan Deklarasi Cebu

Melihat isi dari Deklarasi ASEAN Concord II dan Deklarasi Cebu dapat dikatakan bahwa memiliki deklarasi tersebut memiliki tingkat obligasi tinggi. Hal tersebut terlihat pada pernyataan berikut ini yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN Concord II: *"ASEAN shall continue its efforts to ensure closer and mutually beneficial integration among its member states and among their peoples, and to promote regional peace and stability, security, development and prosperity with a view to realizing an ASEAN Community that is open, dynamic and resilent.*[423] Sementara pada Dekarasi Cebu, terdapat juga pernyataan yang mewajibkan para anggotanya untuk untuk menaati isi deklarasi yaitu "*ASEAN'S strong commitment towards accelerating the establishment of an ASEAN Community by 2015 along the lines of ASEAN Vision 2020 and the Declaration of ASEAN Concord II, in the three pillars of the ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community and ASEAN Socio-Cultural Community"*.

Dilihat dari dimensi presisi, Deklarasi ASEAN Concord II memiliki tingkat presisi yang lebih kuat bila dibandingkan dengan Deklaarsi Cebu. Kata-kata yang digunakan pada Deklarasi ASEAN Concord II cukup jelas dan tidak multitafsir.

[422] Derek McDougal, *Asia Pacific in World Politics*, Boulder: Lynne Rienner Publishers,2007, hal. 19
[423] *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II),* 7 Oktober, 2003, http://www.aseansec.org.

Contohnya adalah pada bagian B paragraph 3 dinyatakan bahwa ASEAN akan mempercepat integrasi regional pada sektor-sektor prioritas *(…accelerate regional integration in the priority sectors*). Kata "sektor-sektor prioritas" akan menjadi multitafsir atau ambigu bila tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan sektor-sektor prioritas tersebut. Penjelasan mengenai sektor-sektor prioritas tersebut dapat dilihat pada annex dari Deklarasi tersebut. Pada bagian II yaitu New Initiatives and Measures disebutkan bahwa terdapat 11 sektor prioritas yang akan dikoordinir oleh negara-negara ASEAN yaitu (i) Indonesia : Produk berbasis Kayu dan Otomotif; (ii) Malaysia : Produk berbasis karet; Tekstil dan pakaian; Myanmar ; Produk berbasis pertanian dan perikanan; (iv) Filipina : elektronik; (v) Singapura : e-ASEAN dan layanan kesehatan; dan (vi) Thailand : Perjalanan Udara dan Pariwisata. Sementara itu, Deklarasi Cebu memiliki presisi yang rendah karena masih terdapat kata-kata yang bersifat ambigu. Misalnya adalah pernyataan berikut ini *"ASEAN's strong determination to accelerate the full implementation of the ASEAN Community's programme areas, measures and principles, with appropriate flexibility"*. Penggunaan kata "appropriate flexibility" akan memberikan peluang bagi masing-masing anggota untuk menetapkan standard sesuai dengan pemahaman dan kepentingan masing-masing anggota.

Dimensi terakhir yaitu delegasi. Baik Deklarasi ASEAN Concord II maupun Deklarasi Cebu memiliki tingkat delegasi yang rendah. ASEAN memang telah memiliki ASEAN Dispute Settlement Body (ASEAN DSM) seperti yang dimiliki oleh WTO. Namun, efektifitas lembaga tersebut belum pernah terbukti. Hal ini terjadi karena etika ASEAN yang mengedepankan consensus dalam diskusi dan pembuatan

keputusan.[424] Bahkan negara-negara ASEAN belum pernah ada yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa dibawah ASEAN DSM.[425]

Masalah yang perlu diantisipasi

Banyak komentator berpendapat bahwa ASEAN tidak mungkin mencapai visi ambisiusnya yaitu mendirikan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 tanpa melakukan perubahan-perubahan radikal. Menurut John Ravenhill, paling tidak ASEAN perlu melakukan tiga perubahan radikal pada tiga hal yaitu budaya, institusi dan prosedur pembuatan keputusan.[426] Perubahan dalam hal budaya yang dimaksud oleh Ravenhill adalah bahwa ASEAN perlu secara sukarela berkomitmen dan patuh terhadap kewajiban yang telah disepakati oleh negara-negara anggota. Konsekuensi dari perjanjian yang memiliki tingkat obligasi yang rendah adalah peluang dari negara-negara anggota untuk melanggar komitmennya. Hal inilah yang terjadi pada AFTA. Obligasi yang rendah menyebabkan perjanjian tersebut gagal memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh investor asing.

Perubahan kedua adalah terkait dengan institusi. ASEAN memerlukan pihak ketiga yang kuat yang diberikan wewenang untuk mengimplementasikan, menerjemahkan dan menerapkan aturan; memecahkan perselisihan dan mungkin membuat aturan-aturan baru. Dispute Settlement Mechanism (DSM) hanya akan efektif jika para anggota telah jelas dengan apa yang telah disetujui. Negara-negara

[424] Frank Frost, *ASEAN's regional cooperation and multilateral relations: recent developments and Australia's interests,* Foreign Affairs, Defence and Security Section, 9 October 2008, no. 12, 2008–09, hal.11
[425] Michael Ewing-Chow dan Tan Hsien-Li, Op.cit., hal. 23.
[426] John Ravenhill, *Fighting Irrelevance: An economic community 'with ASEAN Characteristics',* Canberra: RSPAS, 2007, hal. 17.

ASEAN seringkali membuat perjanjian yang memiliki tingkat presisi rendah. Misalnya saja perjanjian tentang penghapusan semua tariff. Semua negara telah setuju dengan penghapusan semua tariff tanpa lebih dulu membuat spesifikasi. Kurangnya spesifikasi pada perjanjian ASEAN dan kegagalan negara-negara anggota melihat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sebagai kewajiban yang mengikat menyebabkan ASEAN seringkali gagal mencapai tujuannya. Kegagalan negara-negara ASEAN untuk menghormati komitmen yang telah mereka buat juga mereflesikan kurangnya efektifitas monitoring di ASEAN.

Bidang utama lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah prosedur pembuatan keputusan. Sejak ASEAN berdiri pada tahun 1967, pembuatan keputusan yang diterapkan adalah melalui konsensus. Situasi pada saat itu memang mengharuskan hal tersebut karena masing-masing negara anggota ASEAN masih saling curiga sehingga consensus menjadi penting dalam rangka pembangunan kepercayaan. Namun pada saat keputusan butuh dibuat dan diimplementasikan dengan cepat untuk memastikan bahwa pasar ASEAN yang terintegrasi tetap kompetitif maka konsensus menjadi kurang efektif.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa Deklarasi ASEAN Concord II termasuk dalam kategori legalisasi sedang dimana obligasi tinggi, presisi tinggi dan delegasi rendah. Demikian pula halnya dengan Deklarasi Cebu yang termasuk dalam kategori legalisasi sedang dengan karakteristik obligasi tinggi, presisi rendah dan delegasi rendah. Kegagalan ASEAN mengadopsi perjanjian yang memiliki legalisasi kuat

tentu saja memunculkan beberapa masalah yaitu adanya peluang bagi negara-negara anggota untuk melanggar isi perjanjian sehingga visi para pemimpin ASEAN yaitu mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN yang terintegrasi tidak terwujud. Untuk mengatasi hal tersebut, paling tidak ada tiga hal yang perlu dilakukan. Ravenhill menyarankan dilakukannya perubahan radikal terkait budaya, institusi dan prosedur pembuatan keputusan.

Daftar Pustaka

Abbot, Kenneth W. Abbott & Snidal, Duncan Snidal. 2000, *Hard and Soft Law in International Governance* dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter (eds) , *International Organization*, Volume 54, Number 3, Summer.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community Blueprint). 2009. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. Departmen Luar Negeri RI.

Cebu Declaration on The Acceleration of The Establishment of an ASEAN Community By 2015. 2007. http://www.aseansec.org.

Chow, Michael Ewing & Li, Tan Hsien. 2012. The Role of the Rule of Law in ASEAN Integration, European University Intitute, Robert Schuman Centre For Advanced Studies, Italy.

Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II). 2003. http://www.aseansec.org.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Departemen Luar Negeri RI, 2009.

Frost, Frank. 2008. *ASEAN's regional cooperation and multilateral relations: recent developments and Australia's interests*, Foreign Affairs, Defence and Security Section, 9 October 2008, no. 12.

Kahler, Miles. 2000. *Legalization as Strategy: The Asia-Pacific Case.* dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter (eds) , *International Organization*, Volume 54, Number 3, Summer.

Kenneth W. Abbott, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, 2000. *The Concept of Legalization* dalam Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter (eds) , *International Organization*, Volume 54, Number 3, Summer.

McDougal, Derek. 2007. *Asia Pacific in World Politics,* Boulder: Lynne Rienner Publishers

Ravenhill, John. 2007. *Fighting Irrelevance: An economic community 'with ASEAN Characteristics'*, Canberra: RSPAS, 2007, hal. 17.

Soesastro, Hadi, 2003, *An ASEAN Economic Community and ASEAN+3: How Do They Fit Together?,* Canberra: Pacific Economic Paper No. 338.

"Beyond ASEAN Economic Community": Meninjau Hubungan Perdagangan ASEAN dan Amerika Latin Sebagai Mitra Baru (Studi Kasus Indonesia terhadap Chile, Meksiko dan Peru)[427]

Fredy B.L. Tobing, Asra Virgianita, Erwin Indrajaja, Maisa Yudono

Staf Pengajar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI

Abstract

Kajian kerjasama ekonomi di ASEAN dalam beberapa beberapa dekade terakhir, didominasi oleh studi tentang prospek dan tantangan kerjasama dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kajian terhadap peluang kerjasama dengan kawasan lainnya *(cross regionalism)* khususnya hubungan ASEAN dengan kawasan Amerika Latin, masih sangat minim. Secara umum, studi tentang hubungan Indonesia dan Amerika Latin tidak begitu banyak mendapatkan perhatian khusus bagi para studi hubungan internasional. Satu hal yang menjadi penyebab adalah pandangan terhadap kawasan Amerika Latin sebagai mitra yang tidak signifikan karena jarak yang jauh *(conditions of separateness)*. Artikel ini berargumentasi bahwa dinamika internasional telah membuka kesempatan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang lebih luas antar ASEAN dan Amerika Latin sebagai sebagai mitra baru, khususnya bagi Indonesia. Hal ini didasari fakta bahwa negara-negara Amerika Latin khususnya Chile, Peru dan Meksiko kini mengalami perkembangan yang signifikan

[427] Artikel ini merupakan hasil penelitian yang di danai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia dalam skema Revitalisasi Pusat Riset *Centre for International Relations Studies* (CIReS) FISIP UI tahun 2014.

baik secara politik dan ekonomi, serta tumbuh menjadi *middle income countries*. Selain itu, identitas sebagai negara dunia ketiga *(third world countries)*, seharusnnya menjadi faktor poltik yang mendorong terbangunnya hubungan ekonomi yang lebih erat. Namun demikian, dalam kasus Indonesia, ditemukan beberapa hambatan dalam meningkatkan kerjasama ekonomi khususnya di bidang perdagangan dengan ketiga negara tersebut yaitu *political will*, hambatan mental *(mental blocks)*,dan kurangnya pemahaman karakter bisnis masing-masing negara. Memahami hambatan tersebut, artikel ini menempatkan pentingnya maksimalisasi skema kemitraan antara aktor negara dan non negara dalam kegiatan diplomasi ekonomi *(multitrack diplomacy)* dan pemanfaatan forum kerjasama di berbagai level *(multilevel diplomacy)* sebagai solusi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dengan ketiga negara tersebut, sehingga dapat menjadi *hub* untuk memperkuat hubungan ekonomi di kedua kawasan.

Keywords: ASEAN, Indonesia, Amerika Latin, Diplomasi Ekonomi, Aktor non negara, *Multitrack dan Multilevel diplomacy*

I. Pendahuluan

Perubahan politik internasional memberikan makna baru dalam hubungan Indonesia dan negara-negara Amerika Latin. Kejatuhan blok Soviet mendorong perubahan dalam hubungan tersebut, dimana dimensi ekonomi semakin mendominasi hubungan diplomatik negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Begitupun yang terjadi dengan arah kerjasama di ASEAN yang awalnya merupakan kerjasama politik, kemudian mengarahkan kerjasama di ASEAN pada bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi di ASEAN di awali dengan ide terbentuknya ASEAN

Free Trade Area hingg kemudian disepakati kerjasama yang lebih intensif melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibawah payung pembentukan Masyrakat ASEAN.

Implementasi MEA disepakati untuk dimulai pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam lima tahun terakhir ini, semua negara berbenah untuk memanfaatkan pasar ASEAN. Tulisan-tulisan akademik dan *policy paper* juga dipenuhi analisis tentang peluang dan tantangan dalam menghadapi MEA. Hiruk pikuk persiapan menghadapi MEA memadati program-program pemerintah (terutama Indonesia). Kondisi ini menunjukkan isu MEA menjadi isu utama saat ini di ASEAN.

Terlepas dari pentingnya implementasi MEA, artikel ini berargumentasi bahwa pada saat yang bersamaan negara-negara ASEAN perlu melihat jauh ke depan terkait hubungan ASEAN dengan kawasan lainnya, terutama kawasan Amerika Latin didasari oleh empat alasan. Pertama, bahwa terjadi perubahan arah dinamika internasional saat ini ke negara-negara berkembang sehingga kerjasama-kerjasama yang ada dapat merangkul negara-negara berkembang dari kawasan lainnya sebagai mitra baru. Kedua, MEA merupakan sebuah upaya integrasi ekonomi yang diharapkan pada akhirnya dapat memperkuat basis produksi dan menjadi *single market* sehingga perhatian terhadap kawasan lainnya pentng untuk dapat dimanfaatkan dalam hal diversifikasi pasar, akses perdagangan dan investasi. Ketiga, negara-negara dikawasan Amerika Latin dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Keempat, berdasarkan struktur internasional, negara-negara di kawasan ASEAN dan Amerika Latin memiliki status sebagai negara berkembang, sehingga seyogyanya kerjasama terjalin lebih erat diantara dua kawasan

tersebut, Namun dalam kenyataannya situasi dan kondisi menunjukkan fakta yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, artikel ini mencoba memaparkan kondisi hubungan perdagangan ASEAN dengan Amerika Latin, yang kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisis hubungan perdagangan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN dengan negara di kawasan Amerika Latin khususnya dengan Chile, Meksiko dan Peru. Analisis akan difokuskan pada hambatan dan peluang penguatan hubungan perdagangan Indonesia dengan ketiga negara tersebut yang pada akhirnya memberikan peluang untuk membawa hubungan yang lebih erat antar kawasan. Bagian akhir berisi kesimpulan yang akan memberikan penekanan pada perlunya memaksimalkan multitrack diplomacy dan multilevel diplomacy untuk peningkatan hubungan perdagangan ASEAN dengan kawasan Amerika Latin sebagai mitra baru.

Multitrack diplomacy yakni kerangka kerja diplomasi yang memrefleksikan berbagai macam kegiatan yang berkontribusi dalam terciptanya situasi dan kondisi yang damai serta terciptanya upaya-upaya untuk mencapainya. [428] Hubungan antar negara tidak lepas dari upaya diplomasi yang dilakukan oleh wakil resmi dari pemerintah (*first track)*, namun dengan seiring perkembangan lingkungan

[428] *Second track diplomacy* menurut Joseph Monteville merupakan metodologi diplomasi diluar daripada sistem resmi pemerintah yang dilakukan oleh penduduk atau group non-formal, dari Diamond, Dr, Louise. McDonald, John, *"Multi-Track Diplomacy, United States of America"*, Kumarian Press, hal. 1-2. Lihat juga McDONALD, John W. (2012). "The Institute for Multi-Track Diplomacy" [online profile]. *Journal of Conflictology*. Vol. 3, Iss. 2, pp. 66-70. Campus for Peace, UOC.

internasional aktor di ranah *second track diplomacy* [429] semakin penting dalam memupuk hubungan antara kedua masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Susan Strange menyebutkan bahwa aktor non negara khususnya korporasi memiliki peran dalam perkembangan diplomasi ekonomi.[430] Dalam kaitan dengan pemanfaatan aktor non negara, Susan Strange (1992)[431] dan Saner & Yiu (2003)[432] yang menekankan unsur-unsur baru dalam memaksimalkan diplomasi ekonomi meliputi perlunya membangun hubungan yang bersifat partnership ataupun aliansi tidak hanya antara pemerintah dan perusahaan (*state-firm diplomacy*) namun juga antara perusahaan itu sendiri (*firm-firm diplomacy*). Sedangkan *multilevel diplomacy* secara sederhana dapat diartikan sebagai diplomasi ataupun interaksi yang dilakukan di berbagai tingkatan baik di level bilatral, regional, prulilateral dan multilateral dengan tujuan ataupun motivasi tertentu.[433] Multilevel diplomasi diharapkan memberi ruang kesempatan untuk kerjasama yang lebih luas dari berbagai dimensi dan aktor.

II. Hubungan ASEAN dan Amerika Latin

Inisiasi terhadap peningkatan hubungan perdagangan kawasan ASEAN dan Amerika Latin telah dimulai sejak tahun 1980. Tulisan Vicuña dan Reutter memperlihatkan data rendahnya perdagangan Chile misalnya dengan lima negara

[429] *Ibid.*
[430] Susan Strange, State, Firms and Diplomacy, *International Affairs*, Vol. 68 No. 1, Jan, 1992
[431] Susan Strange, State, *Ibid.*
[432] Raymod Saner and Lichia Yiu, International Economic Diplomacy: Mutations in Post Modern Times, 2003.
[433] Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*, Ashgate Publishing Company, USA, October 2007, hlm. 131-133.

ASEAN di tahun 1980. Di antara empat negara ASEAN lain (Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia), Indonesia menempati urutan terbawah (kelima) dalam kegiatan impor dengan Chile, namun Indonesia berada di urutan ketiga sebagai eksportir terbesar ke Chile.[434]

Tabel 1 Perdagangan Chile-ASEAN Tahun 1983 (Juta USD)

Negara ASEAN	Impor dari Chile ke ASEAN	Ekspor dari Chile ke ASEAN	Total
Singapura	9.2	3.4	13.1
Malaysia	9.2	0.59	9.8
Filipina	2.6	4.2	6.8
Thailand	3.2	1.3	4.6
Indonesia	0.28	2.5	2.7
	24.98	11.9	37

Sumber: *Chilean economic office for the ASEAN countries, Singapore* dalam Francisco Orrego Vicuña & R. Juan Reutter. "Latin Aamericas Trade Relations with the ASEAN Countries: Prospects for Interaction". Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). 1983, hal. 64.

[434] Francisco Orrego Vicuña & R. Juan Reutter. "Latin Aamericas Trade Relations with the ASEAN Countries: Prospects for Interaction". Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). 1983, hal. 64.

Tulisan Vicula dan Reutter merupakan salah satu tulisan yang mengawali wacana tentang prospek kerjasama diantara dua kawasan. Sayangnya, tidak banyak scholar yang membahas lebih lanjut mengenai prospek kerjasama tersebut dikarenakan pandangan pesimis terhadap peningkatan hubungan perdagangan dua kawasan yang terhalang oleh kendala jarak dan bahasa. Vicuña dan Reutter berpendapat, bahwa hambatan perdagangan Amerika Latin dan ASEAN di tahun 1980-an adalah masalah logistik (informasi, transportasi, jasa pengiriman yang tidak memadai). Banyak pengamat mengidentifikasi, bahwa logistik adalah kunci untuk memahami rendahnya volume perdagangan negara-negara kawasan Amerika Latin dan ASEAN.

Memasuki tahun 2000, perdagangan antara negara-negara di dua kawasan tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2013, total perdagangan antara dua kawasan mengalami peningkatan 900% (lihat tabel 2). Dari lima negara utama ASEAN tercatat Singapura dan Thailand memiliki total perdagangan terbesar dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia dan Philipina. Melihat lonjakan perdagangan yang terjadi diantara dua kawasan tersebut, dapat diartikan bahwa intensitas perdagangan antara dua kawasan tersebut menunjukkan indikasi positif. Hal ini sekaligus berarti terdapat potensi untuk memperluas dan memperdalam interaksi antara dua kawasan, khususnya bagi ASEAN dalam upaya membangun *hub* di kawasan Amerika Latin untuk melakukan diversifikasi pasar.

Tabel 2 Total Perdagangan Lima Negara Utama ASEAN dengan Kawasan Amerika Latin

Negara	Tahun	
	2000	2013
Indonesia	131,883,011	8,194,795,120
Malaysia	1,605,973,266	8,406,552,160
Philipina	408,125,725	1,478,315,141
Thailand	1,606,138,144	11,515,960,201
Singapura	2,205,579,827	15,434,126,335
Total	**5,957,699,973**	**45,029,748,957**

Sumber: Data BPS, diolah oleh penulis

Namun demikian, partner utama perdagangan dari kelima negara ASEAN tersebut terhadap Amerika Latin masih dikuasai oleh Brazil, Argentina, dan Meksiko. Negara di kawasanAmerika Latin lainnya seperti Chile, Peru, Kolombia, dan Ekuador

masih memiliki porsi yang tidak begitu signifikan dalam hubungan perdagangan dua kawasan tersebut. Namun demikian data memperlihatkan bahwa terjadi kecenderungan positif intensitas perdagangan antar negara-negara ASEAN dengan negara-negara tersebut. Contohnya dengan Peru, total perdagangan ASEAN terhadap Peru meningkat 100% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011.

Tabel 3 Perdagangan Peru-ASEAN 2011-2012 (Dalam USD)

Negara	Ekspor		Impor	
	2011	2012	2011	2012
Brunei Darussalam	-	-	15.698,6	749,0
Indonesia	60.982.007,0	101.357.427,0	219.140.854,0	245.124.210,0
Kambodja	222.950,3	101.032,8	3.782.775,7	4.539.912,1
Myanmar	2.655.596,0	317.422,0	221.436,3	227.258,2
Malaysia	6.546.858,4	23.160.707,4	206.119.681,3	207.024.514,9
Filipina	109.743.278,4	55.195.215,4	22.886.227,1	27.496.419,2
Singapu	7.932.58	21.231.6	50.565.86	59.960.77

ra	7,3	82,8	3,6	1,8
Thailand	264.800.074,6	233.402.691,6	442.272.613,9	452.132.981,4
Vietnam	77.783.160,7	90.349.686,7	102.324.260,5	113.116.528,1
Total	**531.506.999,3**	**525.081.662,0**	**1.047.255.209,2**	**1.109.508.189,4**

Sumber: Data diolah penulis dari UNCOMTRADE

Berdasarkan tabel di atas, Thaland dan Filipina mengungguli perdagangan bilateral dengan Peru. Pada tahun 2011, Filipina mampu mengekspor sebesar USD 109.743.278,4 dan pada tahun yang sama, Thailand juga memiliki nilai ekspor yang besar, yaitu USD 264.800.074,6. Sementara Indonesia berada di peringkat keempat setelah Vietnam, dengan total ekspor sebesar USD 60.982.007,0. Namun pada tahun 2012, Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspor hingga mencapai USD 101.357.427,0. Ketika Indonesia meningkatkan nilai perdagangan dengan Peru pada tahun 2012, nilai perdagangan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand dan Filipina justru menurun. Bahkan nilai ekspor Filipina turun 50% menjadi USD 55.195.215,4. Begitu juga dengan nilai ekspor Thailand yang mengalami penurunan hingga mencapai nominal USD 233.402.691,6. Fakta diatas mengindikasikan dua hal, pertama, tidak stabilnya perdagangan yang terjadi, dan kedua, peluang kerjasama masih terbuka lebar bagi negara-negardi dua kawasan tersebut,

Lebih jauh penting juga untuk melihat perdagangan negara di Asia khususnya China dengan kawasan Amerika Latin. China sebagai aktor baru dalam hubungan ekonomi dengan negara Amerika Latin mampu menempatkan posisinya sebagai mitra ekonomi yang strategis bagi negara Amerika Latin, khususnya setelah kesepakatan pembentukan APEC. Tabel 2 memperlihatkan nilai impor negara-negara di kawasan Amerika Latin ke China, dengan Chile menduduki pisisi pertama diikuti oleh Brazil dan Argentina. Sebaliknya, China menjadi tujuan ekspor utama bagai negara-negara di kawasan Amerika Latin. Data WTO juga mencatat bahwa mitra dagang dari negara APEC yang berasal dari Asia hanya Jepang yang berada di peringkat ke-4, itupun terbatas pada hubungan Jepang dengan Chile. Berikut data tentang kiprah China yang diolah dari data WTO.

Tabel 4 Nilai Impor China dengan Negara-Negara di Kawasan Amerika Latin

o	Negara	Peringkat (2011)	Nilai (juta USD)
	Argentina	3	7.4
	Brazil	2	17.3
	Bolivia	Under top 5	n/a
	Chile	1	22.8

	Kolombia	4	3.5
	Ekuador	Under top 5	n/a
	Meksiko	4	1.7
	Peru	2	15.3
	Venezuela	2	0.5
0	Uruguay	4	4.3
1	Paraguay	Under top 5	n/a

Sumber : Diolah oleh Penulis dari stat.wto.org/CountryProfiles diakses tanggal 23 April 2014.

Sementara itu jika dilihat pada kesepakatan yang dilakukan antar kawasan, tercatat bahwa pada periode 1991-1999 kesepakatan baik investasi, perdagangan maupun kerjasama lainnya antara kawasan Amerika Latin, dalam hal ini Chile, dengan Asia Timur dan Tenggara masih didominasi oleh negara-negara di Asia Timur. [435] Jumlah kesepakatan dagang Asia Timur (Korea, Jepang, Cina) dengan Chile lebih besar daripada Asia Tenggara (Malaysia, Filipina, Indonesia) dengan Chile pada periode 1991-1999. Ketiga negara Asia Timur di atas memiliki 9

[435] Jörg Faust. "Latin America, Chile and East Asia: Policy-Networks and Successful Diversification". Journal of Latin American Studies,Vol. 36, No. 4 (Nov., 2004), hal. 752.

kesepakatan dengan Chile, sementara ketiga negara Asia Tenggara di atas hanya memiliki 7 kesepakatan dengan Chile. Sementara Indonesia hanya memiliki dua kesepakatan dagang dengan Chile.

Adapun dalam hal kesepakatan FTA, tercatat pada tahun 2001 hanya Korea, Jepang dan Singapura yang memiliki perjanjian FTA dengan Chile, sementara negara-negara ASEAN lainnya terfokus perjanjian investasi. [436] Adapun perbincangan di level pemerintah tentang perlunya membangun hubungan antar kedua kawasan baru dimulai pada tahun 2009. Kemudian dilanjutkan pada upaya pembentukan *ASEAN-Amerika Latin Business Forum* yang diinisiasi pada tahun 2012. Sebelumnya juga sudah dinisiasi *Forum for East Asia–Latin America Cooperation* (FEALAC) dan *ASEAN-MERCOSUR Forum*. Negara-negara di kawasan Amerika Latin, khususnya Meksiko, Chile, Meksiko dan Peru juga menginisiasi pembentukan Aliansi Pasifik (*Pacific Alliance)* yang dapat dijadika *hub* bagi negara-negara ASEAN untuk memasuki pasar Amerika Latin.[437] Perlu juga dicatat bahwa Chile memiliki 22 FTA, 9 diantaranya berkaitan dengan 60 negara termasuk EU, US, China, Jepang dan Korea. Sementara Kolombia memiliki 12 FTA meliputi 30 negara, Meksiko memiliki 12 FTA dengan 44 negara temasuk US, EU dan China. Adapun Peru memiliki 15 FTA dengan 50 negara.

Dinamika-dinamika yang digambarkan diatas memberikan penekanan tentang potensi dan perlunya membangun kerjasama ekonomi khususnya perdagangan dan investasi antara kawasan ASEAN dan Amerika Latin. Kawasan Amerika Latin yang

---

[436] *Loc.Cit.*
[437] Lebih lanjut tentang Aliansi Pasifik. M. Angeles Villarreal, *The Pacific Alliance: A Trade Integration Innitiative in Latin America*, Congressional Research Service, 2 Oktober 20014.

mengalami pertumbuhan yang dinamis dan aktifnya upaya-upaya kerjasama perdagangan yang dilakukan dengan negara-negara di Asia, dapat menjadi pilihan untuk kawasan ASEAN dalam melakukan diversifikasi pasar. Hal ini khususnya terkait dengan salah satu tujuan MEA yaitu menjadi basis produksi, sehingga diperlukan pembukaan pasar diluar ASEAN yang akan dapat memaksimalkan manfaat MEA.

III. Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Chile, Meksiko dan Peru:Tinjauan Kasus

Bagian ini akan memberikan gambaran tentang hubungan perdagangan yang terjalin antara Indonesia sebagai salah satu negara dengan pasar dan potensi terbesar di ASEAN dengan Chile, Meksiko dan Peru sebagai negara-negara yang berada di kawasan Amerika Latin dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Seperti yang dijelaskan diawal, secara politik, negara-negara ASEAN dan kawasan Amerika Latin memiliki atribut politik yang sama sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan emosional antara kedua kawasan. Hal yang menarik untuk ditelaah adalah hubungan politik yang baik ini tidak diimbangi dengan hubungan ekonomi yang erat baik dalam skema regional maupun bilateral.Padahal kerjasama ekonomi dan perdagangan memasuki era 1990an hingga saat ini menjadi salah satu katalisator utama dalam memperdalam dan meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Sayangnya sampai saat ini hubungan ekonomi Indonesia dan Negara-negara Amerika Latin belum menunjukkan angka yang signifikan.

Berdasarkan grafik 1, nilai perdagangan Indonesia dengan kawasan Amerika Latin periode 1999-2013, hanya sekitar 1,4%-2,3% dari total perdagangan Indonesia dengan Dunia. Persentase terendah berada pada tahun 2003 dan tertinggi berada pada tahun 2013. Jika dilihat pertumbuhan nilai total perdagangan selama 15 tahun terakhir, rata-rata persentase mengalami kenaikan 8%-72% terhadap masing-masing negara Amerika Latin. Adapun rerata persentase pertumbuhan terendah adalah Chile, dan tertinggi adalah Ekuador. Rerata persentase pertumbuhan tertinggi lebih dikarenakan nilai perdagangan Indonesia-Paraguay yang sangat fluktuatif, tidak seperti nilai perdagangan pada umumnya antara Indonesia dengan Negara-negara Amerika Latin yang cenderung stabil. Sedangkan Meksiko dan Peru periode 1999-2013 secara berurutan yaitu 14%, dan 16%.

Poin utama yang bisa dilihat dari dari data ini, Indonesia belum melihat negara-negara Amerika Latin, terutama Chile, Meksiko dan Peru sebagai mitra strategis. Hal ini diperkuat data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada tahun 2011 terdapat 20 negara tujuan ekspor Indonesia, dalam daftar tersebut hanya Brasil sebagai negara tujuan ekspor Indonesia yang berasal dari kawasan Amerika Latin dengan nilai ekspor pada tahun 2010 mencapai USD1,4 miliar dan tahun 2011 USD 1,6 [438] miliar sementara negara-negara kawasan Amerika Latin seperti Chile, Meksiko dan Peru tidak terdapat dalam daftar tersebut, padahal ketiga negara tersebut termasuk negara yang mengalami perkembangan yang dinamis dan masuk sebagai anggota APEC.

[438] http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?ekspordiakses tanggal 5 Maret 2014 pukul 14.00 WIB.

Grafik 1. Total Perdagangan Indonesia terhadap Negara-negara Amerika Latin, 1999-2013 (dalam US$)

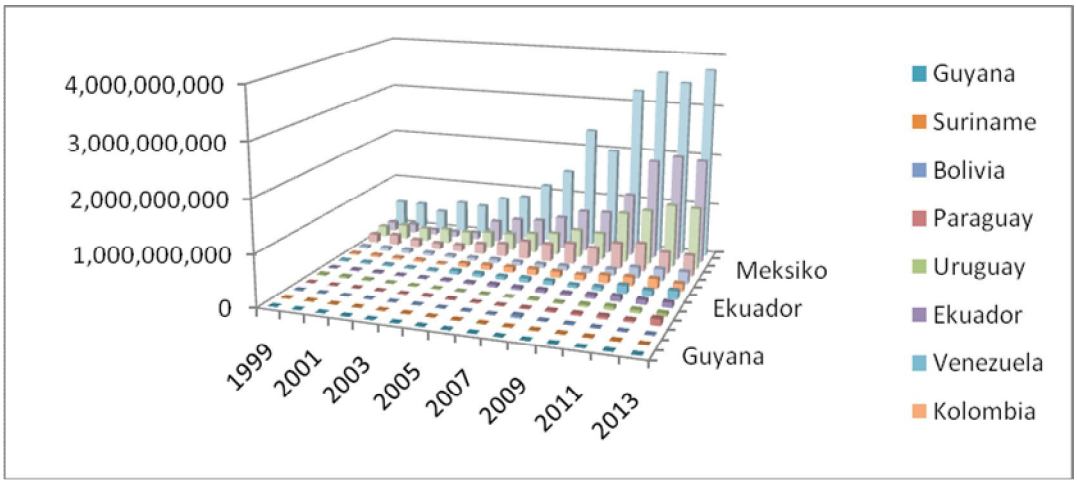

Sumber : Data diolah tim peneliti dari situs www.comtrade.un.org

Upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan dagang antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut bukannya tidak ada. Chile, misalnya, telah mengusulkan dibentuknya perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang selesai dikonsepkan pada 11 Desember 2009.[439] Chile mendeklarasikan keinginannya untuk membentuk hubungan FTA dengan Indonesia di sela-sela pertemuan APEC di Honolulu, Amerika Serikat pada 10 November 2011. Misi Dagang Indonesia juga mengadakan seminar ekonomi di Chile Maret 2012.[440] Selain itu, dalam rangka

[439] Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, "Economic Affairs", Kementerial Luar Negeri, diakses pada 1 Agustus 2014 pukul 12.00 WIB, http://www.kemlu.go.id/santiago/Pages/Divisions.aspx?IDP=2&l=id.
[440] *Ibid.*

meningkatkan promosi produk Indonesia telah dibangun juga *Trade Promotion Center* di Santiago.

Adapun dalam hal ekspor-impor, tabel 6 memperlihatkan kondisi perdagangan secara umum desifit terhadap Indonesia sampai tahun 2012. Nilai total perdagangan juga tidak cukup besar, dan ini mengindikasikan masih terbukanya peluang untuk memaksimalkan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Chile. Adapun untuk tahun 2014 berdasarkan Laporan ITPC Chile, total perdagangan Indonesia-Chile pada periode Januari-Maret 2014 mencapai USD87,9 juta, naik USD1,6 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar USD 86,3 juta. Ekspor Chile ke Indonesia pada periode yang sama mencapai USD42,7 juta turun sebesar 2,7 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara impor Chile dari Indonesia pada periode tersebut mencapai USD 45,2 naik sebesar USD 4,3 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Hal ini berarti neraca perdagangan Indonesia-Chile tercatat surplus bagi perdagangan Indonesia sebesar USD 2,5 juta pada periode tersebut.[441]

Tabel 6. Ekspor Impor Indonesia-Chile (Dalam USD)

Tahun	**Total Ekspor**	**Total Impor**	**Neraca Perdagangan**
1999	73.656 2	88.932 2	-15.276
2000	84.734	109.02	-24.2913

[441] Laporan ITPC Santiago, Chile, April 2014.

	7	6	
2001	85.1378	57.0269	28.1109
2002	65.9563	52.0951	13.8612
2003	67.8341	62.0929	5.7412
2004	90.7636	110.474	-19.7104
2005	113.839	135.612	-21.773
2006	152.801	197.945	-45.144
2007	135.442	202.632	-67.19
2008	128.293	274.276	-145.983
2009	166.698	189.212	-22.514
2010	192.652	309.055	-116.403
2011	213.96	372.26	-158.295

	7	2	
2012	175.347	206.641	-31.294
Total Ekspor/Impor Keseluruhan	5.959.866	4.708.606	-620.1604

Sumber: Data-data dihimpun dari situs UNCOMTRADE

Sedangkan untuk komoditas, berdasarkan data uncomtrade Indonesia memiliki keunggulan dalam hal mengekspor produk kayu, tekstil, kapas, kertas, dan katun. Hal ini dapat dilihat dari ekspor produk kayu dan tekstil Indonesia terhadap Chile pada tahun 2013-2014, yaitu USD 61.735.643. Namun impor terhadap produk tersebut juga tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada produk buah dan sayuran. Produk-produk tersebut diekspor ke Chile dalam jumlah USD 15.446.098. Namun Indonesia juga memiliki *demand* yang tinggi terhadap produk tersebut, yaitu USD 1.585.115. Sementara nilai ekspor produk olahan karet, pupuk, produk kimia, garam, dan sulfur masih 3 kali lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekspor produk kayu dan tekstil. [442]

Nilai ekspor produk kimia berbanding terbalik dengan nilai impornya. Indonesia mengimpor produk kimia hingga USD 117.904.238. Kemudian Indonesia juga melakukan ekspor produk besi, baja, dan elektronik ke Chile hingga sebesar

[442] Data dapat diakses di situs uncomtrade.

USD 56.172.903. Pada tahun 2013-2014, Chile memiliki *demand* yang tinggi produk-produk tersebut. Namun pada tahun yang sama, Indonesia juga mengimpor produk besi dan elektronik dalam jumlah besar hingga mencapai USD 52.762.710.[443]

Indonesia-Meksiko

Berbeda dengan ekspor impor Indonesia dengan Chile, data uncomtrade menyebutkan bahwa nilai ekspor impor Indonesia dengan Meksiko jauh lebih besar. Misalnya ekspor Indonesia pada produk karet, kimia, pupuk, produk farmasi, sabun, perekat, garam, dan sulfur mencapai USD 202.589.574. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kapabilitas yang baik dalam mengolah bahan-bahan kimia, sehingga memiliki pangsa pasar yang luas di Meksiko. Produk-produk kimia juga merupakan produk yang paling tinggi nilai ekspornya dibandingkan dengan komoditas lain. Sementara impor yang dilakukan hanya USD. 62.963.747. Nilai impor tersebut merupakan sepertiga dari total ekspor produk kimia pada tahun 2013-2014. Kemudian komoditas besi, baja, perahu, mesin, *nuclear reactors*, dan peralatan optik menempati urutan kedua setelah produk kimia. Hal ini dapat dicermati melalui jumlah ekspor Indonesia ke Meksiko yang mencapai USD 188.592.460. Namun komoditas besi dan elektronik merupakan komoditas dengan nilai impor tertinggi sepanjang tahun 2013-2014, yaitu USD 418.669.159.[444] Dalam hal elektronik, Meksiko memiliki kredibilitas dan kapabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua negara Amerika Latin lainnya, yaitu Chile dan Peru.

---

[443] *Ibid.*
[444] *Ibid.*

Sementara komoditas hewan laut tidak mendapatkan konsumen yang besar di Meksiko, sama halnya dengan di Chile. Berbeda dengan komoditas hewan laut, produk-produk buah dan sayur masih lebih diminati oleh masyarakat Meksiko. Indonesia mampu mengekspor produk buah dan sayur, produk getah, kanji, dan kakao dalam kuantitas besar mencapai USD 64.554.278. Begitupun *demand* Meksiko terhadap produk kayu dan olahannya, serta tekstil Indonesia juga tinggi.

Dalam hal volume perdagangan Indonesia-Meksiko, sejak tahun 2002-2009, menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai total perdagangan dan posisi Indonesia tetap surplus terhadap Meksiko (lihat tabel 7). Besarnya nilai surplus Indonesia menunjukkan kebutuhan Meksiko terhadap produk-produk Indonesia.[445] Walau data tersebut memperlihatkan besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam memaksimalkan keuntungan dengan Meksiko, akan tetapi posisi Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya masih tertinggal. Tercatat Indonesia hanya menempati posisi ke-5 dalam hal total perdagangan (USD 775.981 di tahun 2009) diikuti oleh Vietnam di posisi ke-6. Sedangkan Malaysia merupakan mitra dagang Meksiko terbesar di ASEAN dengan total perdagangan sebesar USD 4.171.221.[446]

Tabel 7 Volume Perdagangan Indonesia-Meksiko (Dalam USD)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca

[445] "Indonesia dan Meksiko Tingkatkan Kerjasama Bilateral," Lihat pula Dokumen Perjanjian Resmi, Protokol Baru Pada Persetujuan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Meksiko Serikat, 14. Lihat juga Laporan ITPC Meksiko tahun 2012.
[446] Laporan ITPC Meksiko tahun 2012.

			perdagangan
2002	527.070	16.949	510.121
2003	448.251	25.305	422.946
2004	613.859	26.536	587.393
2005	653.670	66.277	587.393
2006	812.487	46.328	766.159
2007	886.354	42.814	843.540
2008	958.347	63.310	895.037
2009	853.625	77.644	775.981

Sumber: www. Economic-snci.gob.mx. Kementerian Ekonomi Meksiko dengan data dari Bank Sentral, dalam Laporan Tahunan ITPC Meksiko City, 2009.

Masih rendahnya nilai perdagangan Meksiko disebabkan oleh beberapa hal. Dari perspektif pemerintah Indonesia, letak geografis yang jauh merupakan hambatan utama yang harus diatasi. Namun bagi Meksiko hambatan tersebut bukanlah hambatan utama. Hambatan berikutnya adalah Amerika Latin (termasuk Meksiko) belum menjadi pasar prioritas untuk produk Indonesia (walaupun potensial),[447] sehingga nilai perdagangan Indonesia-Meksiko belum mampu menyamai nilai perdagangan Indonesia dengan mitra dagang tradisional, seperti Eropa dan Amerika Serikat.

[447] Hasil FGD tanggal 5 September 2014, FISIP Univesitas Indonesia..

Sementara itu, Pemerintah Meksiko menilai bahwa regulasi eskpor-impor dan infrastruktur pelabuhan yang belum memadai di Indonesia sebagai hambatan utama. Selain itu, komoditas impor utama untuk pembangunan sektoral yang dibutuhkan oleh Meksiko, seperti di bidang manufaktur, otomotif, elektronik, dan pesawat terbang belum dapat disediakan oleh Indonesia. Lebih jauh, rendahnya nilai perdagangan Indonesia-Meksiko juga disebabkan oleh pergeseran integrasi ekonomi Meksiko yang cenderung tertarik untuk berinvestasi pada sektor-sektor tertentu dengan negara-negara lain yang jauh lebih terbuka sistem perdagangannya. Indonesia sejauh ini dinilai belum sepenuhnya terbuka dan masih bersifat proteksionis terhadap investasi asing.[448] Jika dicermati, penilaian tersebut dapat dilihat sebagai refleksi atas persoalan pembelian saham Cemex di PT. Semen Gresik Tbk yang kemudian ingin dibeli kembali *(buy back)* oleh Pemerintah Indonesia.[449] Ketidakjelasan sikap dan aturan dalam kasus Cemex ini kelihatanya menjadi "lampu kuning" bagi Pemerintah Meksiko dalam setiap langkah-langkah kerjasama yang akan dilakukan dengan Indonesia.

Sementara itu perlu dicatat, bahwa hubungan dagang antara negara ASEAN lainnya, seperti Philipina, Thailand, dan Malaysia jauh lebih besar dibanding dengan Indonesia. Dalam kasus Philipina, faktor sejarah dan kultural menjadi alasan utama eratnya hubungan perdagangan Meksiko-Philipina. Di samping itu, pihak Meksiko berargumen bahwa "jaminan" atas kerjasama yang disepakati melalui penerapan

[448] Wawancara dengan Perwakilan dari Kedutaan Meksiko di Indonesia, 9 Oktober 2014.

[449] Sikap hati-hati Pemerintah Meksiko ini dikenal dengan istilah "Cemex Phobia." Lebih jauh tentang proyek tersebut dapat dilihat di: csis.or.id/post/kasus-cemex-dan-posisi-awal diakses pada tanggal 12 Juli 2014. Lihat juga: PT Rajawali Segera Temui Menneg BUMN untuk Selesaikan Cemex, *Antara News*, 26 Mei 2014, www.antaranes.com/berita/34482/pt-rajawali-segera-temu-menneg-bumn-untukselesaika-cemex diakses pada tanggal 12 Juli 2014.

regulasi yang transparan di Philipina menjadi pendorong perdagangan yang lebih intensif. Adapun besarnya perdagangan Meksiko dengan Malaysia dan Thailand, lebih ditekankan pada argumen bahwa kedua negara ini menyediakan komponen *auto industry* yang juga menjadi kebutuhan Meksiko dalam menciptakan *value chain*.[450]

Namun pada tahun 2013, bersamaan dengan pelaksanaan Pertemuan APEC di Bali, pemerintah Indonesia dan Meksiko sepakat untuk mempererat hubungan di antara kedua negara. Ada beberapa kesepakatan yang ditandatangani, yaitu Kesepakatan Pelayanan Udara, Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak.[451] Beberapa kerjasama yang disepakati, yaitu seperti kerjasama kesehatan antara Kementerian Kesehatan RI dan Meksiko, kesepakatan kerjasama pariwisata antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI dan Kementerian Pariwisata Meksiko, serta kerjasama Kredit Ekspor antara Indonesia Eximbank dan BANCOMEX.[452]

Indonesia-Peru

Jika diperhatikan dengan seksama, nilai ekspor Indonesia ke Peru dan impor Indonesia dari Peru tidak berbeda jauh (tabel 8). Total ekspor Indonesia ke Peru adalah USD 4.665.545, sementara total impor Indonesia dari Peru berjumlah USD 3.884.733.[453] Sementara itu, berdasarkan data uncomtrade hubungan perdagangan

---

[450] Wawancara dengan Perwakilan dari Kedutaan Meksiko di Indonesia, 9 Oktober 2014.
[451] "Beberapa Kesepakatan Kerjasama Indonesia-Meksiko," http://www.antaranews.com/berita/399288/beberapa-kesepakatan-kerjasama-indonesia-meksiko diakses pada tanggal 4 Agustus 2014
[452] *Ibid.*
[453] http://statistics.apec.org/index.php/bilateral_linkage/bld_result/28 diakses tanggal 23 September 2014.

Indonesia-Peru dari tahun 1999-2014 masih berada dalam posisi surplus bagi Indonesia. Adapun, berdasarkan nilai rata-rata perimbangan perdagangan Indonesia-Peru dari tahun 1999-2014 maka setiap tahunnya nilai perdagangan mencapai USD 24.683.397. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan nilai perimbangan perdagangan Indonesia dengan Chile, dimana Indonesia berada dalam posisi defisit sebesar USD 43.160.736.

Tabel 8. Ekspor Barang Indonesia ke Peru Periode 1999-2014 (Dalam USD)

Tahun	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
1999	19.460.264	26.449.254	-6.988.990
2000	21.603.096	41.092.934	-19.489.838
2001	21.220.538	45.604.922	-24.384.384
2002	25.102.620	27.840.149	-2.737.529
2003	22.192.315	19.495.548	2.696.767

2004	23.205.186	25.755.719	-2.550.533
2005	27.838.842	36.442.210	-8.603.368
2006	34.399.610	31.175.268	3.224.342
2007	42.145.377	27.971.510	14.173.867
2008	49.850.677	36.180.569	13.670.108
2009	51.171.515	36.472.281	14.699.234
2010	94.180.797	31.457.237	62.723.560
2011	159.888.339	51.388.623	108.499.716
2012	159.888.339	72.678.999	87.209.340
2013	178.450.734	51.801.152	126.649.582
2014 *	30.159.034	4.016.561	26.142.473

ket: (*) Nilai ekspor tahun 2014 adalah data sampai bulan Januari

Sumber: Diolah oleh Penulis dari: http://comtrade.un.org/

Dari sisi komoditas, Indonesia memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya sebagai andalan dalam kerjasama dagang dengan Peru. Hal ini dapat diperhatikan dari produk-produk yang diekspor oleh Indonesia pada tahun 2013-2014. Kategori produk olahan kayu, tekstil, kertas, kapas/katun, alas kaki, serta barang pecah belah merupakan produk utama yang diekspor pada tahun 2013-2014. Total ekspor produk-produk tersebut mencapai USD 61.982.105. Kemudian Indonesia juga mengekspor produk kimia, karet, pupuk, sabun, pelumas, lilin, dan plastik dalam jumlah besar, yaitu USD 20.112.647. Selain itu, produk olahan tumbuhan (nabati), buah, dan sayur-sayuran juga memiliki konsumen tersendiri di Peru, dengan jumlah ekspor sebesar USD 12.516.923.

Keberagaman hayati (biodiversitas) menjadi hal yang sangat krusial bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih belum optimal dalam mengolah *raw material* menjadi produk *high economic value*. Tidak mengherankan jika nilai ekspor produk elektronik, besi, baja, kapal, dan peralatan optik merupakan produk yang rendah nilai ekspornya dibandingkan produk lainnya, yaitu USD 3.264.069. Indonesia masih belum memiliki teknologi yang modern dan *sophisticated* untuk menciptakan produk elektronik yang berkualitas tinggi, seperti negara-negara industri lainnya.

Selain produk elektronik, produk olahan hasil laut juga memiliki nilai ekspor yang rendah, bahkan yang terendah di antara semua produk. Indonesia memiliki

beragam jenis ikan dan hewan laut, namun produk-produk olahan laut tidak bisa diekspor dalam kuantitas besar ke Peru. Hal ini mungkin disebabkan oleh minimnya standardisasi internasional yang dimiliki Indonesia atas produk-produk tersebut. Proliferasi penggunaan bahan pengawet pada produk olahan hewan laut dengan kadar tinggi menyebabkan produk-produk tersebut tidak diizinkan untuk diekspor ke negara mitra dagang. Sesuai dengan aturan perdagangan internasional, bahwa *non-tariff barriers* berlaku pada barang-barang yang tidak berstandar internasional. Namun tidak tertutup kemungkinan dikarenakan oleh kultur masyarakat Amerika Latin termasuk Peru yang lebih gemar mengonsumsi daging daripada ikan.

Dari sisi jumlah produk eskpor Indonesia, terlihat produk Indonesia semakin hari semakin banyak yang diekspor ke Peru. Terjadi peningkatan sekitar 100% dari tahun 2001 yang hanya 91 produk, menjadi 182 jenis produk di tahun 2012 dan 177 pada tahun 2013. Adapun produk yang prospektif dan dapat dikatakan berdaya saing tinggi dalam hubungan perdagangan Indonesia-Peru antara lain:rotan, *brazil nut cashew*, kelapa, dan ikan hidup.[454]

Dalam hal investasi, Perusahaan *Multi National Company* (MNC) dari Peru yaitu AJE Group telah beinvestasi di Indonesia sejak tahun 2010 yang bergerak dibidang produksi minuman bersoda dengan merk “Big Cola”. Total investasi awal yang ditanamkan sebesar USD 35 juta dan menyerap tenaga kerja domestik kurang

[454] Analisis daya saing dilakukan dengan menggunakan metode Revealed Cooperative Advantage (RCA). Lebih lanjut baca, Dewi Setyawati, “Produk Ekspor Prospektif Indonesia ke Peru dan Faktor Penetu Aliran Perdagangannya ke Amerika Selatan,” *Tesis,*Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2015,hlm 27-30.

lebih 250 orang.[455] Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, total nilai investasi AJE Group bertambah menjadi USD 160 juta atau sebesar kurang kebih 6 kali lipat dari investasi awal.[456]Investasi tersebut salah satunya diarahkan untuk pengembangan pabrik di Kawasan Industri Delta Silikon Dua di Cikarang dan Surabaya. Dengan pembangunan pabrik tersebut, ada sekitar 1500 orang tenaga kerja domestik diserap oleh perusahaan AJE Group ini.[457]

Keberhasilan AJE Group ini ternyata tidak berjalan timbal balik terhadap investasi Indonesia di Peru. Tercatat hingga tahun 2015, belum ada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Peru. Pada tahun 2013 salah satu perusahaan Indonesia PT.Widayakarya telah melakukan kunjungan bisnis ke Peru untuk melihat peluang investasi dalam bidang jasa konstruksi.[458] Namun hingga saat ini belum ada kelanjutan dan langkah kongkrit dari kunjungan tersebut.

Berdasarkan data perimbangan perdagangan, nilai impor Indonesia dari Chile, cenderung defisit bagi Indonesia kecuali pada tahun 2001, 2002, dan 2012. Begitupun dengan Peru yang sejak tahun 1999-2002 mengalami defisit. Keadaan ini mengalami perubahan surplus setelah tahun 2003 hingga sekarang. Sedangkan Meksiko sejak tahun 1999 hingga sekarang menunjukkan kecenderungan surplus. Pada tahun 2010 surplus Indonesia dalam hubungan perdagagngan dengan Meksiko mencapai USD 500 juta, namun pada tahun 2011 hingga sekarang menunjukkan kecenderungan surplus yang menurun. Adapun dari total perdagangan Indonesia dengan ketiga

[455] Paparan Bapak Yosef Berty Fernandez, Duta Besar RI untuk Peru Periode 2010-2014, *Focus Group Discussion*, FISIP, Universitas Indonesia, 5 September 2014.
[456] *Ibid.*
[457] Dari 1500 tenaga kerja, hanya ada 16 orang tenaga kerja asing yang berasal dari Peru, Spanyol dan Meksiko. *Ibid.*
[458] *Ibid.*

negara tersebut, memperlihatkan bahwa volume perdagangan antara Indonesia-Meksiko tiga kali lebih besar dari Chile dan enam kali lebih besar dari Peru.

Berdasarkan komoditas, perdagangan dengan Chile lebih berfokus pada produk kimia, produk farmasi, garam, sulfur, tanah, bebatuan, kapur, gips, semen, karet, pupuk, plastik, sabun, lilin, pelumas, bahan peledak, korek api, parfum, dan penyegar aromatik. Perdagangan Indonesia dengan Meksiko lebih berfokus pada komoditas besi, baja, alumunium, alat pemotong logam, *nuclear reactor*, *boiler*, peralatan mesin, peralatan elektronik, kendaraan yang tidak menggunakan lintasan (*railway* dan *tramway*, kapal, perahu, peralatan optik, foto, teknik, dan peralatan yang dibutuhkan dalam bidang medis. Dalam hal ini, terlihat bahwa Meksiko jauh lebih unggul dalam hal teknologi dibandingkan dengan kedua negara Amerika Latin lainnya, yaitu Chile dan Peru. Berbeda dengan Meksiko yang memiliki kualitas dalam hal teknologi, perdagangan Indonesia dengan Peru lebih diprioritaskan pada komoditas buah-buahan, sayuran dan sejenisnya, serta produk olahannya.

Grafik 2 Neraca Perdagangan Indonesia-CMP (USD)

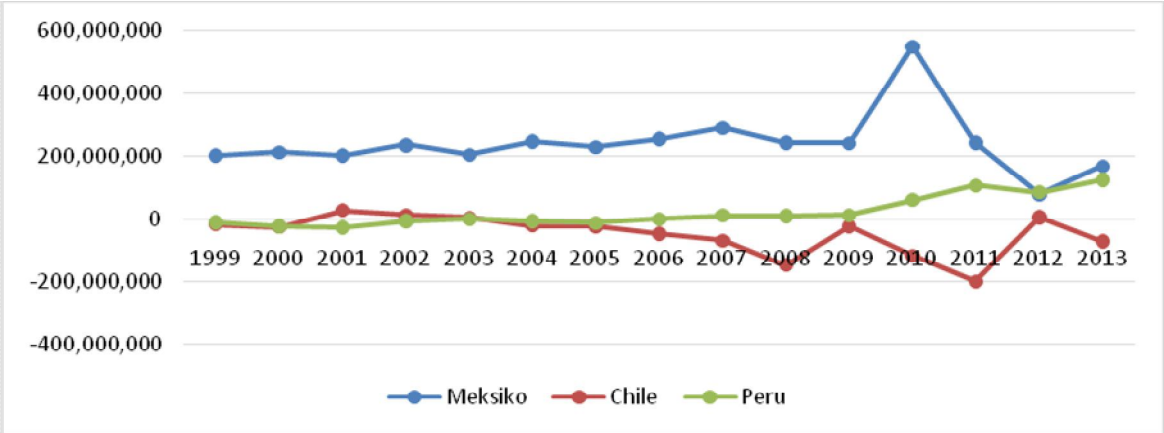

Sumber: Diolah dari data comtrade.un.org

Selain itu, jika dikaitkan dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh ketiga negara dalam rangka memperkuat hubungan dengan Indonesia, Chile dan Peru terlihat lebih agresif dalam mengupayakan hubungan yang lebih dekat dengan Indonesia. Sementara Meksiko terkesan berhati-hati dalam membangun hubungan dagang dengan Indonesia yang lebih intensif. Dengan Chile misalnya, menurut laporan ITPC Santiago, Chile, ITPC pada tahun 2014 telah menginisasi pertemuan dengan pengusaha Chile yaitu importir HERTZ yang merupakan perusahaan importir suku cadang mobil Pihak HERTZ pada tahun 2013 telah melakukan kunjugan ke Astraotopart dan melakukan hubungan dagang dengan pembelian aksesoris mobil. Pada pertemuan tersebut ITPC juga menawarkan produk ban mobil yang diproduksi oleh PT Gajah Tunggal. Pada tahun yang sama juga,ITPC bersama kedutaan RI mengadakan pertemuan dengan Perusahaan PDVyang berminat menjajaki kerjasama dalam hal impor margarin dan *palm oil* yang selama ini mereka lakukan dengan Perusahaan Singapura. Juga dilakukan pertemuan dengan PT Fexa internasional yang bergerak dibidang importitr ikan tuna. Upaya-upaya ini tentu saja memberikan sinyal positif bagi kedua negara dalam meningkatkan hubungan dagang.

Dari penjabaran di atas, terungkap bahwa dibandingkan Chile dan Peru, hubungan perdagangan Indonesia-Meksiko nampaknya lebih kuat. Hal ini menarik dicermati, mengingat inisistaif-inisiatif tidak begitu banyak dilakukan oleh kedua negara. Data memmperlihatkan bahwa total perdagangan kedua negara semakin meningkat, bahkan pada tahun 2013, berada jauh diatas Chile dan Peru.

Salah satu faktor pendukung hubungan yang lebih erat ini adalah keterlibatan aktor non-negara melalui kerjasama-kerjasama yang dilakukan. Kerjasama kelompok non-negara seperti kelompok bisnis, misalnya KADIN dan CEMAI, Garuda dan AeroMeksiko serta kerjasama perbankan dalam kredit ekspor oleh Indonesia Eximbank dan BANCOMEX telah mendorong hubungan perdagangan kedua negara yang lebih erat. Walau demikian, seperti yang sudah disampaikan diatas, "Cemex Phobia" menjadi salah satu ganjalan dalam hubungan Indonesia-Meksiko.

Dalam konteks hubungan dengan Indonesia merupakan bagian kawasan Asia, keinginan Meksiko untuk menjadi *hub* membuka peluang bagi kedua negara membangun dan memperluas kerjasama-kerjasama perdagangan yang lebih intensif. Posisi Indonesia sebagai *leader* dan pasar potensial di kawasan ASEAN, menjadi pendorong karena Meksiko dapat memanfaatkan posisi Indonesia tersebut (begitupun sebaliknya). Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi hubungan dagang antara Meksiko dan Indonesia termasuk negara-negara ASEAN lainnya baik dalam skema kerjasama bilateral maupun regional.

Adapun dalam kaitan dengan Chile, terlihat upaya agresif dari Chile untuk melakukan kerjasama perdagangan yang lebih erat dan komprehensif. Selain itu, dengan nilai total perdagangan bilateral antara Indonesia dan Chile yang terus meningkat sejak tahun 1999, hal ini menandakan hubungan perdagangan Indonesia dan Chile yang terus menguat. Namun dalam perimbangan eskpor-impor Indonesia-Chile, Indonesia mengalami defisit perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang diimpor oleh Indonesia dari Chile, dan sekaligus ketergantungan Indonesia terhadap komoditas yang diimpor dari Chile.

Hal senada juga terjadi antara Indonesia dan Peru. Peru memandang Indoensia sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk yang dihasilkannya. Sebaliknya, Indonesia memandang Peru sebagai pasar alternatif.[459] Langkah konkret juga dilakukan Pemerintah Peru dalam membuka hubungan juga dilakukan dengan rencana pembukaan perwakilan perdagangan Peru di Jakarta tahun 2015. Secara politik pun Peru menempatkan Indonesia sebagai negara yang penting di kawasan, khususnya terkait peran Indonesia di G-20, G-15, ASEAN, dan berbagai organisasi internasional. Peru juga menempatkan Indonesia sebagai negara yang diprioritaskan selain China, Korea Selatan, Jepang dan India. Bahkan dalam kurun waktu 2010-2013, terjadi peningkatan intensitas pertemuan/kunjungan di tingkat Kepala Pemerintahan dan pejabat tinggi negara lainnya. Pemerintah Peru juga merencanakan penambahan jumlah staf diplomatik di Kedutaan Peru di Jakarta. Hal ini menunjukkan *political will* yang positif dalam rangka mempererat hubungan Indonesia-Peru, dan kawasan ASEAN secara umum.

IV. Kesimpulan

Dari analisis keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa terdapat potensi dan prsopek kerjasama yang positif dalam hubungan perdagangan antara ASEAN dan Amerika Latin. Termasuk juga Indonesia dengan Chile, Meksiko dan Peru. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang menjadi catatan dalam upaya meningkatkan hubungan lebih erat. Pertama, bahwa baik ASEAN maupun Amerika Latin masih sangat mengandalkan pasar/mitra dagang tradisional. Negara-negara di kawasan

[459] *Ibid.*

Amerika Latin, khususnya Chile, Meksiko, dan Peru tidak tercatat sebagai salah satu negara tujuan utama ekspor dan asal impor untuk Indonesia.

Kedua, hubungan perdagangan yang terbangun selama ini belum bersifat seimbang diantara negara-negara baik di ASEAN maupun Amerika Latin. Di ASEAN, didominasi oleh Singapura, Thailand dan Malaysia, sementara di Kawasan Amerika Latin , Brazil, Argentina dan Meksiko menjadi negara yang mendominasi nilai perdagangan antara kedua kawasan. Ketiga, pemahaman tentang karakter perdagangan antarnegara yang masih lemah. Hal ini mungkin disebabkan oleh orientasi yang masih kuat terhdap pasar tradisional, sehingga kurang termotivasi untuk mendalami karakter perdagangan masing-masing negara.

Keempat, perdagangan yang masih rendah juga mengindikasikan belum maksimalnya pemanfaatan forum-forum kerjasama baik yang disepakati secara bilateral maupun multilateral. Forum APEC dan FEALAC misalnya belum secara maksimal dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan bisnis baik dalam hal perluasan pasar maupun investasi. Maraknya kerjasama-kerjasama regional yang disepakati seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mencari dan memperkuat hubungan dengan pasar ataupun mitra baru.

Terkait dengan hal tersebut, diplomasi menjadi salah satu kunci dalam membangun hubungan yang erat, baik dalam konteks multilevel maupun *multitrack diplomacy*. Diplomasi yang dimaksud di sini tidak hanya berkutat pada aktor negara (G to G) yang selama ini dipandang sebagai *business as usual*. Akan tetapi memaksimalkan juga peran aktor non-negara yang mempunyai ruang gerak yang

lebih fleksibel, misalnya antara *business to business* (B to B) atau dalam konteks lebih luas yaitu *people to people* (P to P).

DAFTAR PUSTAKA

Byane, Nicholas and Stephen Woolcock, *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*, Ashgate Publishing Company, USA, October 2007, hlm. 131-133.

Diamond, Dr, Louise. McDonald, John, *"Multi-Track Diplomacy, United States of America"*, Kumarian Press.

Dokumen Perjanjian Resmi, Protokol Baru Pada Persetujuan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Meksiko Serikat..

Faust, Jörg. "Latin America, "Chile and East Asia: Policy-Networks and Successful Diversification". *Journal of Latin American Studies,*Vol. 36, No. 4 (Nov., 2004

Laporan ITPC Meksiko tahun 2012.

Laporan ITPC Santiago, Chile, April 2014.

McDONALD, John W. (2012). "The Institute for Multi-Track Diplomacy" [online profile]. *Journal of Conflictology*. Vol. 3, Iss. 2, pp. 66-70. Campus for Peace, UOC.

Setyawati, Dewi. "Produk Ekspor Prospektif Indonesia ke Peru dan Faktor Penetu Aliran Perdagangannya ke Amerika Selatan," *Tesis,*Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Strange, Susan. State, Firms and Diplomacy, *International Affairs,* Vol. 68 No. 1, Jan, 1992

Saner, Raymond and Lichia Yiu, International Economic Diplomacy: Mutations in Post Modern Times, 2003.

Vicuña, Francisco Orrego & R. Juan Reutter. "Latin Aamericas Trade Relations with the ASEAN Countries: Prospects for Interaction". Southeast Asian Affairs, utheast Asian Affairs, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS). 1983

Villareal,M. Angeles. *The Pacific Alliance: A Trade Integration Innitiative in Latin America*, Congressional Research Service, 2 Oktober 2014.

Sumber Internet & Wawancara:

www.antaranes.com/berita/34482/pt-rajawali-segera-temu-menneg-bumn-untukselesaika-cemex diakses pada tanggal 12 Juli 2014

http://www.antaranews.com/berita/399288/beberapa-kesepakatan-kerjasama-indonesia-meksiko diakses pada tanggal 4 Agustus 2014

http://csis.or.id/post/kasus-cemex-dan-posisi-awal diakses pada tanggal 12 Juli 2014.

http://stats.wto.org/CountryProfiles diakses tanggal 23 April 2014.

http://www.kemlu.go.id/santiago/Pages/Divisions.aspx?IDP=2&l=id. diakses pada 1 Agustus 2014 pukul 12.00 WIB,

http://www.kemenperin.go.id/statistik/negara.php?ekspordiakses tanggal 5 Maret 2014 pukul 14.00 WIB.

http://statistics.apec.org/index.php/bilateral_linkage/bld_result/28 diakses tanggal 23 September 2014.

Wawancara dengan Perwakilan dari Kedutaan Meksiko di Indonesia, 9 Oktober 2014.

Focus Group Discussion, FISIP, Universitas Indonesia, 5 September 2014.

.

FREE FLOW OF LABOR IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015: INDONESIAN PERSPECTIVE

Susy Tekunan

UniversitasPelitaHarapan

Jl. M.H. Thamrin Boulevard, Tangerang, Banten

susy.tekunan@uph.edu

Abstrak

Border regulation is one of the intricate coordination expected in the ASEAN Economic Community (AEC) will be launched at the end of 2015. One of liberalizations in the regional integration is the increased mobility of labor, specifically for the skilled labor. This research started from the curious expectation of the border control mechanism between Indonesia and Malaysia especially within the framework of AEC at the end of 2015. The qualitative research is mostly descriptive in finding the mechanism of free flow of skilled labor for AEC through ASEAN organization website, literature on AEC and labor mobility as well as interview with the Indonesian Directorate of ASEAN Economic Cooperation. This research will also look into the comparison of labor mobility within regional integration framework, especially in the EU. I find that ASEAN economic integration is a long process and the official launch of AEC in December will not widen the borders between countries. Labor mobility in the AEC framework is coordinated through immigration regulations for foreign labors and mutual recognition agreement in certain professions and will not have significant changes especially in the beginning of the AEC launch.

ASEAN member countries are very timid in allowing workers from the region into their countries because of the lack of commitment to materialize the long-term vision of regional integration that may require the sacrifice of national interest of each member country. The liberalism idea remains executed in the framework of realism and guided by the short-term political motivation. Another determining factor is the ASEAN Way or the consensus decision making implemented by the regional organization that lengthen agreement and coordination processes.

Keywords:

ASEAN, perbatasan, tenagakerja, politik, regionalisme

Background

The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) formed in 1967 has mainly maintain its initial mission to maintain security and stability in the region. The regional integration that puts forth the principle of non-interference between its ten member countries is known to implement the ASEAN Way or consensus seeking decision making process. I have argued in the previous paper that this consensus seeking method is one of the keys to achieve the main objective of the ASEAN formation that is to maintain peace and stability in the region.[460] Members of ASEAN are interested in increasing the collaboration to include economic cooperation that started with preferential tariff agreement that started in 1993 with the tariff cutting exercise with the average tariffof 12.6% for ASEAN 6 countries and has improved to

[460] ASEAN Way, the way to regional peace. Susy Tekunan. 2014.

the average of 1.53% under the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme.[461] While the lowering of tariff continues to spread and impacted the flow of goods and trade in ASEAN, the benefit of ASEAN Free Trade Area (AFTA) for the member countries remains a question since each member countries maintain list of goods that are still being protected and thus excluded from the CEPT Inclusion List.

Despite of the questionable benefit of the regional free trade collaboration, ASEAN continues to initiate further collaboration with long-term strategic planning. In December 1995, the economic ministers of ASEAN member countries signed the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) as an effort to increase economic cooperation through exchange of services among ASEAN countries. The agreement dated 20 years from now has been the foundational framework for the mechanism of free flow of skilled labor under the economic pillar of the ASEAN Economic Community (AEC). At the Bali Summit in 2003, the AEC that includes three pillars: (1) politics and security, (2) Economic, and (3) Social Culture was termed as the goal of regional economic cooperation to be achieved in 2020 and was revised to 2015 at the next meeting. AEC has four main goals:

1. Toward a single market and production base (flow of trade for goods, services, investment, skilled labor and capital);
2. Toward the creation of regional economic community with high competitive ability (regional competition policy, IPRs action plan, development

[461] ASEAN Free Trade Area (AFTA Council). ASEAN Website. http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-trade-area-afta-council

infrastructure, energy cooperation, taxation and small and medium businesses);

3. Toward a region with equitable economic development through the development of small and medium size business and initiative programs for ASEAN Integration;
4. Toward full integration in the approach of global economy. With coherent approach in the external economic relations and push toward the collaboration in the global supply network.

The original January 2015 deadline was postponed to the end of January due to the lack of readiness amongst the ASEAN member countries. Despite of this one year additional time, it remains unclear whether there has been enough preparation to embrace a single market and production base of the regional integration. The goal of this regional integration is clear that ASEAN can compete globally as a unit instead of individual countries. With over 600 million people in ASEAN combined, the integration offers one of the largest production and market in the world. ASEAN Economic Community aims to achieve Single Market and Production Base, Competitive Economic Region, Equitable Economic Development, Integration into the Global Economy. This paper focuses on the combined points under the Single Market and Production Base target, which are the Free Flow of Services and Free Flow Skilled Labor which have some overlap in action and practices. The reason that I focus on the point of Free Flow of Skilled Labor is due to the initial ignorance on the difference that the looming deadline of the AEC will bring.

The possibility that all borders will be opened wide to welcome citizens from any ASEAN country members into each other territories; including Singapore, the relatively more developed country yet one of the smallest,would potentially create havoc and migration problems. This wrong conception apparently is not uncommon since the socialization of AEC practice has not reached the desired level to educate the members of society in ASEAN countries. The low level of awareness may be apparent from the comment made by the Vice-Chairman of Thailand's Board of Trade, Dr. JingjaiHanchalash, during the economic leadership forum in Bangkok is very low that even the Board of Trade of Thailand in June 2015. Dr. Jingjai said, "The major problem would be the free movement of labour. This is going to be a big problem for Thailand and other ASEAN nations… When we start the AEC next year, I don't think the problem will only be for Thailand but also the nine other countries because we're not used to this kindof free movement." The statement was related to the large number of illegal migration and recent Rohingya refugees' issues at the Andaman Sea.[462]

This paper tries to provide the adequate explanation of the event unfolding with the upcoming official launch of ASEAN Economic Community in December 2015 especially for the point of free flow of labor and services. At the end of the paper, I hope to offer a structural overview of the mechanism of free flow of labor mostly from the Indonesian's perspective and the projected benefit and challenges for Indonesia. Comparative perspective of free flow of labor model from other regional

[462]PichayadaPromchertchoo. 2015. Free Labour Movement could pose Problem for ASEAN Economic Community. http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/free-labour-movement/1950482.html

integration will be presented mainly from previous research work done by the Swiss National Centre of Competence in Research. Lastly, I aim to provide recommendations for theIndonesian government and key stakeholders in embracing the ASEAN regional integration.

Literature Review

Research workon this topic remains very limited thus explains the misunderstandingregarding the impact of AEC official launch in December 2015. The discussion on the free flow of labor mainly very technical on the institutions or regional agreement and the basic mechanism of the practice. Two important work that briefly discuss the free flow of labor or professionals are research by Asian Development Bank that look at the overall integration management and dedicated 4 page out of 158 for the free flow of skilled labor under the subheading of "Free Mobility of Professionals." This work is helpful in providing insights into the mobility of professionals and the comparative models in other regionalism. Similarly the Swiss National Centre of Competence in Research published a working paper on "ASEAN Economic Community: what model of labor mobility?" that mainly provides more thorough model of labor mobility in three regional integrations such as NAFTA, EU and MERCOSUR. This paper will fill the gap that there is no discussion on the progress of the mechanism and the implementation of certifications procedure. This paper will take the Indonesian perspective as the country with the largest population in the region. A closer look into the mobility of skilled labor and its impact to Indonesia and aspects of ASEAN integration.

Free Flow of Skilled Labor

According to the ASEAN Economic Community Blueprint it is "Allowing for managed mobility or facilitated entry for the movement of natural persons engaged in trade in goods, services, and investments, according to the prevailing regulations of the receiving country." While the definition does not provide clear distinction between the types of skill included in this point, it refers to WTO provision under General Agreement of Trades in Services (GATS) mode 4 on movement of natural persons (MNP).[463] MNP includes business visitors, trade and investors, intra-corporate transferees and professionals. Unskilled or low-skilled labors are not included in the AEC integration program despite of the intense flow among the ASEAN member countries. The focus of recent regional integration is on creating an agreement to manage the flow of professionals that includes doctors, nurses, lawyers, accountants, engineers and other professionals.

The exchange of professionals has been implemented under the WTO provision since all members of ASEAN are also members of WTO and the movement of natural persons is included in the mode 4 of GATS agreement. The four modes are:

Mode	Type of Presence	Services Flow
1	Cross Border	The services cross the border independent

[463] Chia Siow Yue. 2011. Free Flow of Skilled Labor in the AEC, in Urata. S. and M. Okabe (eds). Toward a Competitive ASEAN Single Market: Sectoral Analysis. ERIA Research Project Report 2010-03. Pp 205-279. Jakarta: ERIA

	Supply	of the suppliers or consumers
2	Consumption Abroad	The consumers cross border to consume services
3	Commercial Presence	The suppliers establish local offices or subsidiary supplies
4	Movement of Natural Persons	The suppliers are physically present in the country on a temporary basis

Source: Measuring GATS Mode 4 Trade Flows. Staff Working Paper ERSD-2008-05

The free flow of skilled labor is considered as part of the movement of natural persons that present in the country temporarily to provide service. The movement of natural persons have occurred even before ASEAN Economic Community was in conception. Intra-corporate transferees (ICT) has allowed professionals within a company move between countries within or beyond ASEAN. There are large number of multinational corporations brings their own expert and professionals for the higher level management to the host countries. The settings will continues except that under AFAS and AEC there is an effort to standardize skills and competencies to simplify transfers of professionals through the Mutual Recognition Arrangements (MRA). I will talk more about MRA in the next section. MNP agreement still mainly restricts flow of natural persons with the nationality requirements and no access to employment market, citizenship or permanent entry. MNP agreement mainly applies

to business visitors, contractual service suppliers and professionals from ASEAN companies to work temporarily in other ASEAN countries.[464]

There are limited exemptions regarding the provisions that some individual countries adopt beyond WTO/ GATS specifications for example regarding low/ semi-skilled level jobs in Indonesia are reserved to Indonesians except for certain exceptions for citizens from Malaysia, Brunei, Singapore, Papua New Guinea and Australia.[465] In preserving each national economic interests, ASEAN member countries have only been hovering around the WTO/GATS provisions.

The Mechanism

It is established that due to the limited provisions under the scheme for the free flow of skilled labor, the physical borders of ASEAN countries will not be affected with the official launch of AEC in December 2015. Since professionals who work in different ASEAN countries are present mainly through the intra-corporate transfers and still have to follow the restrictions applied to foreign nationals, there will not be immediate significant changes in the labor force. In this case,in order to facilitate free flow of skilled labor and services as part of the AEC, ASEAN countries work on mutual recognition arrangement (MRA). ASEAN members are working on several MRAs to support integration through mutual recognition of certification of professional services and licensing. The MRA provide standardization of professional

[464] Sarah Huelser and Adam Heal. 2004. *Moving Freely? Labour Mobility in ASEAN*. Policy Brief Asia Pacific Research and Training Network on Trade. Brief no. 40.
[465] Flavia Jurje and Sandra Lavenex. 2015. ASEAN Economic Community: What Model for Labour Mobility? Swiss National Centre of Competence in Research Working Paper No 2015/02.

competencies but unlike in other economic integration such as EU or Australia- New Zealand economic relations, ASEAN MRAs remain constrained by immigration regulations and market demands. ASEAN foreign workers have to follow the visa regulations despite of holding certification under MRA. Currently there are eight professional sectors that are covered by ASEAN MRA.

MRA	Signed Location	Signed Year
Engineering Services	Malaysia	2005
Nursing	Philippines	2006
Architectural	Singapore	2007
Surveying Qualifications	Singapore	2007
Accountancy	Thailand	2009
Medical Practitioners	Thailand	2009
Dental Practitioners	Thailand	2009
Tourism Professionals	Thailand	2012

Table 2: ASEAN Mutural Recognition Arrangements (MRAs) Source: http://www.asean.org/archive/Publication-Integration-in-Services.pdf

Each MRA contains specific regulations that only relevant to the professionals of the sector. For example, MRA on architectural services allows ASEAN architects to work in collaboration with local licensed architect or in independent practice. A Registered Foreign Architect may work in ASEAN countries other than his/ her origin while following the immigration regulation concerning foreign national. With the standard certification, ASEAN professionals may not freely move around but they

will be recognized as having the approved standard as other professionals in the same field and thus will be able to perform their skills in countries with the MRA. For example, an ASEAN Architect is an architect or practitioner who is a national of an ASEAN member countries and has the qualification and experience consistent with the local regulation of the host country and has applied to be listed in the ASEAN Architect Registrar (AAR). The main qualification is educational attainment in the accredited architecture program and registered in the national certification body.[466]

ASEAN Architect who is interested in working outside of his/her home country should became a Registered Foreign Architect, may work in most ASEAN countries after applying to the Professional Regulatory Authority (PRA) in the host country and must work in collaboration with designated architect in the country. ASEAN Architects are not allowed to work in other ASEAN countries as an independent practitioner.[467]Except for the Tourism professionals, all the professions certifications are mandated in order to perform services in ASEAN countries due to the accountability attached to the services products.

ASEAN member states are making progress in different stages of the implementation for the MRA. MRAs on engineering and architectural services are the ones ready with the ASEAN regional registration mechanism with regional bodies representing each profession. The ASEAN Architect Council and ASEAN Chartered Professional Engineer has the secretariats in the Philippines for a 2 year period. The

[466] Assessment Statement for ASEAN Architect
http://www.aseanarchitectcouncil.org/pdf/thailand_aaa.pdf
[467] Assessment Statement for ASEAN Architect
http://www.aseanarchitectcouncil.org/pdf/thailand_aaa.pdf

MRAs are the end result of the completion for the progress for standardization in professional services. In order to ensure broader standardization, the ASEAN countries have to start from the educational foundation. The national standard of curriculum has been socialized to universities and the curriculum framework is arranged through the association of field of study in each national setting. The emphasis is that the implementation of free flow of skilled labor is a long process toward a more integrated and thus a competitive ASEAN.

Country	**Certified Engineer/ ACPEs**	**Certified Architect/ AAs**
Brunei	2	1
Cambodia	-	-
Indonesia	596	84
Laos	3	6
Malaysia	228	35
Myanmar	133	12
Philippines	119	53
Singapore	230	74
Thailand	65	11
Vietnam	134	9
Total	1510	285

Table 3: Number of Certified Engineers and Architects in each ASEAN member countries. Source: Coordinating Committee on Service - 81. June 2015

The agreement between ASEAN member countries in the MRAs are further materialized in architecture and engineering sectors. Professionals from these two sectors are able to move more freely due to the mutual agreement of ASEAN certification standard. The other 6 professions are still working on achieving the regional standards. The regional standardization works very closely with the national certification bodies that qualify to provide accountable evaluation on the capacities and qualification of the professionals. Architects and engineers in ASEAN countries have registered in the ASEAN certification program that more than 15 hundreds engineers and almost 300 architects are registered and thus qualified to move relatively more freely in the ASEAN framework of AEC.

Indonesia leads in number for each of the two certified professionals in engineering and architectural services. While Indonesia is the largest country by far in terms of population among the ASEAN countries, it is expected to have the highest number of professionals registered and it should have even higher number of professionals in each field. The socialization of the certification program and process of taking the certification should reach more people related to the field as well as conveying the necessity of registration and education standardization to all key stakeholders.

MRAs implementations varied from different professions. ASEAN architects and engineers who are interested in obtaining regional standard certification must first hold professional license issued by the national professional licensing body (Badan Nasional SertifikasiProfesi). The BSNP was founded in 2005 as a response to better equip Indonesian professionals to have standard national certifications. Through

accreditation, BNSP oversees professional certification unit/ LembagaSertifikasiProfesi (LSP) all over Indonesia that conduct tests and produce certificate of competence for professionals. In 2014, there are 130 LSPs accredited by the BSNP.[468] The certificates will be reviewed and if approved by the regional secretariat, the professional will be allowed to work in other ASEAN countries to deliver the service. Language requirements in certain professions such as passing the national nursing licensing exam in Thai or Indonesian language remains a barrier for the flow of professionals in this sector.

Challenges and Opportunities for Indonesia

The Directorate for ASEAN Economic Cooperation works together with other governmental ministries to socialize and establish the necessary mechanism to realize ASEAN Economic Community by December 31st 2015. In particular, the governmental unit formed under the Ministry of Foreign Affairs, focuses on the preparation of the economic pillar in AEC. The collaboration between several ministries such as ministry of education, labor, trade and investment materializes in several initiatives to increase awareness and facilitate the implementation of the integrated regional community.

Regional integration brings significant benefits for the member countries to increase their competitiveness and bargaining power in the world. However, it also comes with certain challenges mostly comes with liberalization and protection for domestic production or labor force. Focusing on the free flow of skilled labor through

[468]Sekilas BNSP. http://www.bnsp.go.id/read/16/sekilas-bnsp.html

the Indonesian perspectives, there are several immediate challenges that have been part of the consideration in the negotiations with other ASEAN countries. According to the 2013 data from the national center of statistics (BPS), Indonesia has a productive demographic with 121.19 million workers with 5.29% unemployment rate. The level of education in Indonesia is relatively low with 47.9% of the people have elementary school or lower degree. Since the provision of free flow of skilled labor does not include lower skilled labor, the majority of Indonesian workers will not be affected by this initiative and remains to work within the country or continue to work in the region through the existing mechanism of workers agencies representatives under bilateral agreements.

Liberalizing migrant workers in ASEAN arguably will deliver significant benefit to the involving countries. The exclusion of the lower skilled workers from the AEC is criticized by Orbeta in the discussion paper series in 2013. He argues that due to the majority of migrant workers are lower skilled workers, ASEAN will enjoy more benefit with provision to include lower skilled workers. Indonesia for example is one of the nine major global worker – sending countries in Asia. The country sends 54% of the migrant to other ASEAN countries. The official number of migrant workers from Indonesia is also much lower than the real number due to the high volume of irregular migrants and undocumented workers from the country.[469]

The argument for exclusion of lower skilled-workers in the provision of free flow of labor within AEC is mainly to protect the majority of workers, particularly in

[469]AnicetoOrbeta. 2013. Enhancing Labor Mibility in ASEAN: Focus on Lower-Skilled Workers. Philippine Institute for Development Studies. Discussion Paper Series No. 2013 - 17

Indonesia, from competition of workers from other ASEAN countries. With clear and well-managed mechanism, liberalizing labor movement that includes lower-skilled workers is beneficial for the region but due to the complexity and the current limited capacity, the ASEAN countries are leaving the lower-skilled workers movement to bilateral agreements.

Freer trade and regional integration will create the needs to increase migration in the region and since the majority of migrant workers is lower skilled labor, AEC may see more benefit in managing the mobility of lower skilled labor.[470] Certain ASEAN countries such as Thailand is predicted to experience workers' shortage in 2020 and will greatly benefit from regional workers mobility. Regulation and enforcement of lower skilled workers mobility will contribute to the reduction of human trafficking predatory practices between ASEAN countries.

Repeated Game and the Principle of Reciprocity

There are several impediments to the free flow of skilled labor in AEC provision. While it is a step toward a more competitive regional integration and a positive move on a liberal sense, the collaboration between countries is fairly limited and lacks serious long-term commitment. ASEAN intra-regional commitment is on overall much more conservative compared to the external agreements both between ASEAN as a whole with other countries or ASEAN members in various bilateral FTAs. For instance, Singapore has numerous generous labor mobility commitments with developed countries such as the US, New Zealand, Korea, Japan and the EU.

[470]NCRR Working Paper pp. 10

One of the main concern that set apart ASEAN with other regional integration framework, especially to EU, is the lack of supra-national body that look at the integration as a unit and seek a common interest. It is worth noting that even in EU where the workers' mobility is highly liberalized, the intra-EU mobility remains low and this is due to the cultural and language barrier in the 28 EU states. Economic development in different ASEAN countries varies greatly with Singapore leading far ahead of other ASEAN states, especially the last 4 members. This is not unlike EU, with Germany and UK as the highest hourly income countries in the region compare to the lowest income, Bulgaria and Romania.[471] The comparison of level of commitments in trade agreements is compiled by Jurje and Lavenex in their working paper for the NCRR in 2015.

Categories	**ASEAN (internal)**	**ASEAN (external)**	**EU (external)**	**NAFTA (internal)7**	**MERCOSUR (internal)8**	**MERCOSUR (external)**
SE/IP Independent Professionals			Up to 6 months, in any 12-months (ENTs)		1year, renewable (indef. for duration of working contract in Argentina)	1year, renewable for the period of working contract

[471] John Hurley. 2014. Labour Mobility Within The EU: The Real Picture. Social Europe. http://www.socialeurope.eu/2014/11/labour-mobility-within-eu-real-picture/

CSS ContractualService Supplier	Vietnam: up to 90 days Cambodia: up to max 5 years (professional experience required)	90 days (e.g. FTA with Republic of Korea; FTA with China), up to 12 months (in AANFTA)	Up to 6 months, in any 12 months period; (professional experience required)		1-2 years, renewable (indefinitely for the duration of working contract in Argentina)	1 year, renewable for the period of working contract
ICT Intra-Corporate Tranferees	2 up to 5/8 years, often subject to ENTs (Economic Needs Tests)	1 up to 14 years (for executives in the AANFTA)	Managers, specialists: up to 3/5 years Graduate trainees: 1 year	3 up to 7 years	1-2 years, renewable (indefinitely for the duration of working contract in Argentina)	1-3 years renewable (in Argentina for duration working contract)
BV Business Visitors	60 up to 120 days	1 up to 12 months	Up to 90 days in any 12 month period	6 up to 12 months	Up to 180 days (permanent residence in Brazil for	Up to 180 days

					investments > USD 30,000)	
Investors		Up to 1 year (AANZFTA FTA)	Yes	Yes	Yes	Yes
Professionals	8 professions under MRAs (mobility as ICTs)	Yes, in some FTAs	Sectoral commitments (e.g. CARIFORUM)	Approx. 70 sectors	Selected professions/technical activities	
Others		Installer - up to 3 months (AANFTA, China)	Installer - up to 90 days		Graduate trainees, students - 1 year	Graduate trainees
Recognition of qualifications	Selected professions, subject to domestic legislation	Selected professions (e.g. Japan-Singapore FTA, Ch.	Selected professions, domestic legislation	Selected professions	Domestic legislation	Domestic legislation

		9, art. 93)				
Social rights	No binding commitments	Yes, selected (e.g. AANZFTA)	Yes, selected	Yes (NAACL)	Yes	
Visa/ immigration requirements	Domestic regulations	Domestic regulations	Domestic regulations	TN-visa facilitation, dom. regulations	Domestic regulations	Domestic legislation
Numerical quotas	Yes	No mention	Should not maintain (exception CARIFORUM FTA)	Removed in 2004	No mention	No mention

Table 4 Mobility Commitments in Trade Agreements: ASEAN, EU, NAFTA, MERCOSUR). Source: NCRR Working Paper by Jurie and Lavenex (2015).

The commitments in different regionalisms varied but are comparable especially between ASEAN and MERCOSUR. NAFTA, simply a Free Trade Area. The concern and protection for the local workers limits the liberalization of workers mobility in the regional discussion. Countries with a large number of lower skilled

workers are reluctant to open their door expecting that flood of incoming workers from other member countries will create higher unemployment to the local workers. In fact, study of the impact of GATS Mode 4 in European Union (EU) suggests that workers mobility does contribute to risen unemployment rate for the receiving countries, for example in Ireland in 2005 – 2007, due to the influx of regional workers. The impact of unemployment will only be temporary since the workers influx will contribute to higher productivity and increase demand for a larger workforce. The study also suggests that receiving countries benefit from the influx of labor since as it contributes to the country output.[472] Using statistical data, the study suggests that the macro-economic impact from the workers mobility and thus the population shifts mostly benefit, albeit small, certain countries in the EU such as Ireland and the UK. On the other hand, the impact to the sending countries are quite significant with lower GDP due to population loss. Certain ASEAN member countries like Singapore and Thailand have predicted the benefit of labor influx into the country due to the decrease of productive labor force.

The EU is not a model to follow for ASEAN. It has been struggling with its regionalism idea and face serious economic challenges and uneven performances among the member countries. It is also worth noting that the EU labor mobility often means labor immigrations that is very distant from the ASEAN model for temporary workers. Despite of this important differences, the study for the overall impact of

[472]Tatiana Fic et al., Labour Mobility Within The EU – The Impact of Enlargement and Transitional Arrangements (NIESR Discussion Paper No. 379: National Institute of Economic and Social Research, August 2011), http://www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/050811_152043.pdf.

labor mobility may reflect the possibility for the ASEAN member countries to consider the benefit of welcoming labor, lower or higher skilled, into their countries. In the economic sense, the joined market and production of the regional ASEAN promises strength for the overall region and the increase of GDP in certain countries will lift the rest of the region. The market demand may also contribute to the leveling of employment in the region that with higher demand of workers will attract labor from the region to maintain productivity and preventing labor shortage and wage increase. In reality, even some EU members impose on restriction on the labors' mobility within the approved time limit if the country is facing a “serious disturbances of its labor market.” While any country can argue the terms of “serious disturbances”, based on the past data, it is difficult to argue the negative impact of workers' influx.

ASEAN with its unique agreement of each member maintaining their sovereignty, leave rooms for each state to keep their national interest as priority and any commitment for concession demands reciprocity. The problem with this approach is the lack of unified vision that each will be willing to let go of their short-term gain in order to achieve a common goal that will eventually benefit each member. EU is hardly a success story in terms of regional integration, and it is prudence for ASEAN to step with caution but the lack of commitment beyond what has already been agreed through GATS mode 4, demonstrates extreme timidity in moving in as an integrated region. The implementation of MRAs in AEC is one way to ensure that workers across region will at least have equivalent qualification to perform in their

field.[473]Indonesia, for one, as the host of ASEAN secretariat is trying to maintain influence and perceive the integration as realist instead of liberalist. The rule and moves for zero-sum game continues to lead negotiations and discussions while commitment toward integration is a liberal initiative. The discrepancies can serve as a signal for the culture of ASEAN to avoid stepping on each other's toes and keep the original objective of the regional cooperation as the priority principle: maintaining peace and stability in the region. Despite of having more cooperative pillars, ASEAN stays faithful to the very purpose of its existence and taking careful steps that are hopefully in the right direction. With the recently established infrastructures, ASEAN Economic Community is ready to be launched and it will not bring chaos or a long exodus or migrant flooding to Indonesia. AEC is a long process that hopefully will bring about positive regional changes over a long period of time.

Conclusion

The implementation of Free Flow of Skilled Labor in the ASEAN Economic Community setting is guided by the Mutual Recognition Agreements (MRAs) between ASEAN member countries. When AEC launch in December 2015, there will not be observable changes at the borders of ASEAN countries in terms of migrant working influx, instead the flow of professionals will be mostly influence those who work in the 8 professional sectors agreed under the MRAs. ASEAN countries have concluded the mutual agreement on two sectors while working on the other 6 to agree

[473]Eliseo Zuniga, *Labor Mobility Within ASEAN Economic Communityy*, (AmCham HR Commitee Breakfast Meeting: Quisumbing Torres, 2015).

on the recognition standards and procedure as well as setting up the secretariats for ASEAN certification in one of the ASEAN member countries.

The provision does not include lower or unskilled workers despite of the existing arguments of potential benefits for the inclusion, especially for certain ASEAN members.[474] Unlike the supranational setting of the EU, AEC focuses on single market and production while maintaining each member's sovereignty that each member state negotiates and prioritizes the national interests. This arrangement allows countries to maintain their function for the citizens such as industry protection or subsidizing firms. Political leaders are not willing to let go of the very power, despite of the potential benefit that might be delivered to all members of the integration community, mostly due to the association of such power to political gain. Without such power, voters have less motivation to vote for certain political candidates while voting for the supranational government will deliver uncertain benefit.

The paper finds that ASEAN member states in their attempt to realize the regional integration, remain in the realism perspective and have not been able to reach a working mechanism that will deliver greater benefit for the region. The agreement to increase the flow of skilled labor for the AEC is still around the periphery of GATS mode 4 agreement and the progress of signing the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) has been very slow. The main issue in progressing in agreements as a commitment for regional integration remains in the

[474]AnicetoOrbeta. 2013. Enhancing Labor Mibility in ASEAN: Focus on Lower-Skilled Workers. Philippine Institute for Development Studies. Discussion Paper Series No. 2013 - 17

ruling arrangement for countries' relations in ASEAN. Aside from maintaining countries' sovereignty in the region, the organization also adopts the consensus decision making process that often requires lengthy and deliberate negotiations to achieve agreements. This contributes to the slow progress in the regional agreements and challenges in realizing programs for collaborations except for maintaining regional peace and stability.

Many university students and politically aware citizens are conscious of the AEC initiatives, albeit to a very limited extent. Despite of efforts towardAEC socialization through mass media and educational institutions, most Indonesians are not aware of the impact of AEC to them especially in regards to the labor force. This lack of awareness is partly due to the complexity of the mechanism for labor and the lack of intensity and clear interpretation from the officials.[475] AEC is expected to bring stronger and more competitive ASEAN as a region. With the restrictions and extreme timidity from the negotiating parties, it will be less like a regional integration and we have doubt that it will deliver the expected benefits for the citizens of the region, especially in the upcoming lustrum. It will be interesting to observe the impact of AEC in the next decade to study the number of high-skilled labor migrants among ASEAN countries since in the most liberalized labor market integration of the EU, the flow of migrant labor is very dismal.[476]AEC will achieve its potentials and deliver the expected benefits as a regional integration when the member countries are ready and willing to commit to the regional goal as an integrated unit instead of

[475]Apa yang HarusAndaKetahuiTentangMasyarkatEkonomi ASEAN. BBC Indonesia. 2014 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec
[476]Tatiana Fic et al., Labour Mobility Within The EU.

staying in the short-term national and political interest that limit the maximum potential of the intended integration.

Bibliography

"ASEAN Free Trade Area (AFTA Council)." Accessed 7 November 2015. http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-free-trade-area-afta-council.

"ASSESSMENT STATEMENT FOR ASEAN ARCHITECT." Accessed 7 October 2015. http://www.aseanarchitectcouncil.org/pdf/thailand_aaa.pdf.

BBC. "Apa Yang HarusAndaKetahuiTentangMasyarakatEkonomiAsean - BBC Indonesia." *BBC Indonesia*. BBC Indonesia, August 27, 2014. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerja_aec.

Fic, Tatiana, Dawn Holland, Pawel Paluchowski, Ana Rincon-Aznar, and Lucy Stokes. *LABOUR MOBILITY WITHIN THE EU – THE IMPACT OF ENLARGEMENT AND TRANSITIONAL ARRANGEMENTS*. NIESR Discussion Paper No. 379: National Institute of Economic and Social Research, August 2011. http://www.niesr.ac.uk/sites/default/files/publications/050811_152043.pdf.

Firoozi, Fathall. "Policy Toward International Capital and Labor Flows under Free Trade and Complete Specialization." *Journal of Economic Integration* 9, no. 3 (March 15, 1994): 312–15. doi:10.11130/jei.1994.9.3.312.

Glencross, Andrew. *Politics of European Integration: Political Union or a House Divided?* United Kingdom: Wiley-Blackwell (an imprint of John Wiley & Sons Ltd), 2014.

Gunasekaran, S., and Gerard Sullivan. “Cross‐Border Labour Flows In Southeast Asia: Patterns and Prospects.” *Southeast Asian Affairs 1990* 1990, no. 1 (January 1990): 46–70. doi:10.1355/seaa90c.

Hadi, Suprayoga. “Isu - IsuStrategisPengelolaanKawasanPerbatasan.” *Tabloid Diplomasi*, September 15, 2010.

Huelser, Sarah, and Adam Heal. “Policy Brief Asia Pacific Research and Training Network on Trade.” *Policy Brief Asia Pacific Research and Training Network on Trade* 40 (June 2014).

Hurley, John, John HurleyJohn, Harold James, Robert Reich, Angus Deaton, Yanis Varoufakis, Paul Mason, Robert Putnam, Renaud Thillaye, and John Weeks. “Books.” *Blogs*. Social Europe, November 12, 2014. http://www.socialeurope.eu/2014/11/labour-mobility-within-eu-real-picture/.

Jurje, Flavia and Sandra Lavenex. ". ASEAN Economic Community: What Model for Labour Mobility?" Swiss National Centre of Competence in Research Working Paper 2 (January 2005).

Lord, Montague, and PawatTangtrongjita. Special Border Economic Zone (SBEZ) in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Denmark: MPRA Paper, January 3, 2015. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/61060/.

Orbeta, Aniceto. “Enhancing Labor Mibility in ASEAN: Focus on Lower-Skilled Workers.” *Philippine Institute for Development Studies.* 17 (February 2013).

RencanaStrategis (Renstra) KementrianLuarNegeriTahun 2015 - 2019, 2015.

Secretariat, ASEAN. *ASEAN Economic Community Blueprint*. Jakarta, Indonesia: Association of Southeast Asian Nations, 2008.

Setiawan, Lingga. Implementation of Free Flow of Skilled Labor iAEC in Indonesia, October 27, 2015.

Sholeh. "Persiapan Indonesia DalamMenghadapi AEC (ASEAN Economic Community) 2015." *eJournalIlmuHubunganInternasional* 1, no. 2 (2013): 509–22.

Siow Yue, Chia. "Http://www.eria.org/", March 2011. http://www.eria.org/publications/research_project_reports/images/pdf/y2010/no3/Chapter4.pdf.

Tarmansyah, Drs. Umar S. *Potensi Dan NilaiStrategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalah Dan Solusinya*. PusatPenelitianDepartemenPertahanan: BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, n.d. Accessed 20 September 2015.

Tekunan, Susy. "The ASEAN Way: The Way to Regional Peace?" *JurnalHubunganInternaisonal*3, no. 2 (October 2, 2014).

Xianbai, Ji, and The Diplomat. "Why the ASEAN Economic Community Will Struggle." *The Diplomat*, September 24, 2014. http://thediplomat.com/2014/09/why-the-asean-economic-community-will-struggle/.

Zuniga, Eliseo. Labor Mobility Within ASEAN Economic Communityy. *AmCham HR Commitee Breakfast Meeting*: Quisumbing Torres, 2015.

Topik : Membangun dan memperkuat jejaring kerja antara Prodi Hi di ASEAN dan Mitra.

Peran ASEAN University Network (AUN) dalam Memajukan Kolaborasi Perguruan Tinggi Regional.

Ratih Indraswari
Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Abstrak

ASCC (*ASEAN Socio Cultural Community*)melihat bahwa pendidikan merupakan prasyarat penting dari komunitas regional yang berbasis pada semangat pembangunan manusia yang menyeluruh. Sebagai bagian dari roda ASEAN, perguruan tinggi memiliki kontribusi penting dalam upaya untuk mendorong penciptaan integrasi regional, utamanya melaluiinvestasi kognitif dan pengembangan kapasitas mahasiswa. Oleh sebab itu, kolaborasi lembaga pendidikan tinggi nasional dari negara anggota akan memberikan kontribusi positif terhadap proses integrasi regional. Pengarustutamaan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan telah dibahas dalam cetak biru ASCC yang menekankan peningkatan kerjasama pendidikan di berbagai tingkat. Termasuk didalamnya ialah kerjasama dengan institusi regional melaluiASEAN University Network. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dari AUN (ASEAN University Network) sebagai lembaga regional yang diamanatkan untuk membantu peningkatan koloborasi perguruan tinggi kawasan melalui AUN Thematic Networks. Diharapkan penelitian ini dapat mengidentifikasikan bidang bidang kerjasama potential yang dapat diadopsi oleh perguruan tinggi nasional baik untuk tujuan memperkuat kolaborasi nasional maupun untuk mendukung integrasi regional.

Kata kunci : ASCC, AUN, Perguruan Tinggi, Intergrasi Regional, ASEAN.

Pendahuluan

Terkait dengan proyek integrasi regional, ASEAN kerap dikritik sebagai suatu komunitas elit. Kerjasama ASEAN hanya dirasakan pada tingkatelit dan belum sepenuhnya bermanfaat bagi kalangan masyarakat pada tingkat akar rumput (*grassroots society*). Hal ini berhubungan dengan fondasi ASEANyang bertujan untuk membentuk komunitas yang berorientasikan masyarakat (*people-centered community*), dimana integrasi regional difokuskan untuk berada dalam tataran masyarakat.

Sebagai bagian dari badan ASEAN, AUN memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan kerjasama pendidikan regional dalam tingkat perguruan tinggi. AUN tidak terlepas dari kritik serupa dimana manfaat dari kerjasama pendidikan regional yang dipayungi oleh AUN belum dapat secara merata dirasakan oleh aktor pendidikan nasional negara anggota ASEAN. AUN masih tetap melegalkan kerjasama elit yang terefleksikan melalui komposisi anggota tetap yang terbatas. Hingga saat ini universitas yang menjadi negara anggota berjumlah 30 universitas dari 10 negara anggota ASEAN. Perwakilan universitas yang menjadi anggota tetap AUN tidak merefleksikan profil quantitas dan qualitas dari setiap negara anggota.

Dalam kerangka kerangka kerjasama pendidikanAUN yang terbatas,tulisan ini kemudian mencoba menggarisbawahi hubungan antara perguruan tinggi dengan integrasi regional. Secara lebih mendetail menjawabapa yang dapat diraih oleh perguruan tinggi dari kerangka kerjasama regional yang ditawarkan AUN dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia, serta apa yang kemudian dapat dikontribusikan olehperguruan tinggi di Indonesia terhadap proses integrasi regional.

Dalam menjawab hal tersebut, tulisan ini akan dikategorisasikan kedalam beberapa bagian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta analisis dokumen resmi yang dikeluarkan oleh AUN dengan pembatasan kinerja organisasi pada periode 2013-2015. Fokus penelitian akan dititikberatkan pada AUN Thematic Networks serta korelasinya terhadap pandangan dimana mahasiswa sebagai penerima manfaat dari kerangka kerjasama regional tersebut. Hal ini ditindaklanjuti dengan

asumsi bahwa melalui fasilitasi perguruan tinggi, mahasiswa dapat berkontribusi terhadap integrasi regional khususnya melalui pembentukan '*we-feeling'* antar masyarakat ASEAN. Pembentukan '*we-feeling'* tersebut diargumentasikan dapat dipupuk melalui kegiatan pertukaran serta *exposure* terhadap budaya lain.

Paper dibagi dalam beberapa sub-bab. Sub-bab pertama akan membahas mandatASEAN dalam bidang pendidikan yang menelatarbelakangi dukungan dalam kerjama pendidikan regional. Sub-bab kedua akan melihat profil AUN sebagai badan ASEAN yang berfokuspada fasilitasi kerjasama pendidikan serta program kerja terkait dalam mendukung interaksi antar institusi pendidikan regional.Sub-bab ketiga akan menjelaskan pendekatan teoritis yang melihat bagimana kegiatan pertukaran pelajar berkolerasi terhadap pembentukan '*we-feeling'*berdasarkan adanya *mutual understanding*. Sub-bab keempat akan mengidentifikasi kegiatan dan kerjasama pendidikan regional yang dipayungi oleh AUN Thematic Networks berserta model managemen dan membership yang tersedia. Sub-bab kelima akan melihat AUN ACTS sebagai skema regional yang berpotensi untuk mendukungativitas *student mobility*. Paper ini akan ditutup oleh saran akanlangkah-langkah yang dapat diambil oleh institusi perguruan tinggi dalam mengoptimalisasikan kerangka regional AUN.

Mandat ASEAN

Pentingnya kolaborasi pendidikantelah diatur dalam dokumen resmi ASEANsejak pembentukan *ASEAN Declaration* tahun 1967. Tertuang dalam *Bangkok Declaration*[477] tujuan dari ASEANmeliputi *active collaboration and mutual assistance on matters of common interest* (2), *provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational* (3), *promote South-East Asian studies* (6) *and maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes* (7).

Dalam perkembangannya, dokumen pembentukan ASEAN diterjemahkan ke dalam rencana baru yang mengikutsertakan pendidikan sebagai salah satu pondasi

[477] "Bangkok Declaration", *Association of South East Asian Nations*, diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/index.php/news/item/the-ASEAN-declaration-bangkok-declaration

utama dalam mencapai pembangunan regional. Diantaranya adalah melalui *ASEAN Vision 2020, ASEAN Charter, ASCC Blue Print* dan *ASEAN Education Work Plan*.

ASEAN Vision 2020[478] dibentuk sebagai upaya untuk menyambut perkembangan dunia di abad ke-21. Visi tersebut mengindikasikan terciptanya ASEAN sebagai *A Community of Caring Societies*. Komunitas ini menginginkan terciptanya sebuah identitas regional bersama dengan karakter ASEANyang terbuka, dimana masyarakat memiliki akses terhadap pembangunan manusia yang inklusif dan menyeluruh. Pembangunan manusia dapat didukung melalui pembentukan kerjasama regional dalam bidang pendidikan.

ASEAN Charter[479] kembali menegaskan pentingnya pendidikan demi tercapainya pembangunan sumber daya manusia regional. Disebutkan dalam artikel 1 paragraf 10, dimana salah satu tujuan dari ASEAN ialah '*to develop human resources through closer cooperation in education and life-long learning, and in science and technology, for the empowerment of the peoples of ASEAN and for the strengthening of ASEAN Community*'.

Keinginan serupa tertuang dialam ASCC dimana telah disebutkan dalam *the Road Map for An ASEAN Community* (2009-2015), bahwa pendidikan menjadi ranah dari pilar ASCC, walaupun dalam pengimplementasiannya pendidikan turut pula memberikan kontribusi bagi pilar ASPC dan AEC. Tujuan utama dari ASCC ialah '*to contribute in realizing an ASEAN Community that is people-centred…*'[480]. Hal ini menunjukkan bahwa *people centrality* di dalam mekanisme kerja ASEAN menjadi bagian penting dari sebuah komunitas social-budaya. ASCC memiliki karakteristik di enam bidang utama[481]. Karakteristik terkait pendidikan erat dengan Pembangunan

---

[478] "ASEAN Vision 2020", *Association of South East Asian Nations* , diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/news/item/ASEAN-vision-2020

[479] "ASEAN Charter", *Association of South East Asian Nations,* diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf

[480] "The ASEAN Socio Cultural Community Blueprint", *Association of South East Asian Nations, diakses pda 10 November 2015,* http://www.ASEAN.org/archive/5187-19.pdf

[481] Karakteristik lainnya mencakup; (i) Kesejahteraan sosial dan perlindungan (*Social welfare and protection*), dimana ASEAN berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat ASEAN melalui pemberantasan kemiskinan, memastikan kesejahteraan sosial dan perlindungan, membangun lingkungan yang aman dan bebas dari nargoba, meningkatkan ketahanan bencana, serta pembangunan program kesehatan, (ii) Keadilah sosial dan hak masyarakat (*Social Justice and Rights*). ASEAN untuk memastikan keadilan sosial diberlakukan dalam kebijakan di setiap sector kehidupan, termasuk didalamanya adalah kesejahteraan bagi

Manusia (*Human development*), dimana termasuk di dalamnya adalah prioritas untuk meningkatkan pendidikan, dengan menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan, serta meningkatkan kesadaran pemuda ASEAN melalui pendidikan dan aktivitas unntuk membangun identitas ASEAN berdasarkan pertemanan dan kerja sama.

Secara lebih mendetail, posisi pendidikan diatur di dalam *ASEAN Education Work Plan*[482] yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan dasar dari pembangunan. Institusi perguruan tinggi diharapkan memiliki karakter pendidikan, pembelajaran dan penelitian yang bertaraf internasional. *ASEAN 5-year WEP* diantaranya memberikan kerangka trajektori *ASEAN Program* diantaranya meliputi peningkatan kesadaran identitas regional, pendukungan program mobilitas regional, internasionalisasi pendidikan, peningkatan kualitas performa pendidikan, serta dukungan terhadap badan sectoral ASEANlainnya yang menggeluti bidang pendidikan. Melalui *ASEAN 5 year WEP* program ini,ASCC seiring dengan berlakunya integrasi regional mengindikasikan dukungan atas terciptanya mobilisasi masyarakat ASEAN yang bersifat lintas batas negara. Perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung fenomena tersebut melalui konsepsi '*internalization (regionalization) of student's mobility'*.

---

komnitas kurang beruntung, rentan, dan termarginalisasi seperti perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan mereka dengan dengan keterbatasan, serta pekerja migran, (iii) Menjamin keberlangsungan lingkungan (*Ensuring Environmental Sustainability*). ASEAN bekerjasama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sekaligus mempromosikan lingkungan hijau dan bersih dengan melindungi sumber daya alam. Hal ini termasuk konservasi tanah, air, mineral, energi, biodiversitas, hutan, sumber daya pantai dan laut, serta peningkatan kualitas air dan udara di kawasan ASEAN. ASEAN pun akan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan, (iv) Membangun identitas ASEAN (*Building the ASEAN Identity*). Identitas ASEAN sebgai basis dari kepentingan regional Asia Tenggara, yang merupakan nilai, persinalitas, nilai, dan kepercayaan kolektif, sekaligus aspirasi sebagai suatu komunitas ASEAN. ASEAN akan mempromosikan kesadaran dan nilai kolektif dalam semangat persatuan dan keberagaman di setiap tingkat masyarakat dan (v) Menyempitkan ketimpangan pembangunan (*Narrowing the Development Gaps*). Dua karakterisitic ASCC terakhir bersinggungan langsung terhadap isu kerjasama pendidikan regional dan keterkaitannya terhadap proses integrasi dan *human development*.

[482] Di dalam *ASEAN Education Work Plan,* kerjasama regional di dalam bidang pendidikan di dinaungi oleh AUN dan SEAMEO. AUN menangani promosi pembangunan sumber daya manusia di dalam kerangka perguruan tinggi di negara anggota ASEAN dan negara mitra dialog. Sementara SEAMEO berfungsi untuk mempromosikan kerjasama di bidang pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan di Asia Tenggara pada semua tingkat; pendidikan dasar hingga universitas.

Pendekatan Teoritis

Skema *student mobility* dapat mendukung penciptaan *we-feeling* melalui pembangunan *mutual understanding*. Pendekatan yang menjelaskan korelasi antara exposure pendidikan dan mutual exchanges didasarkan pada kegiatan pertukaran pendidikan dapat dilihat dari argument Jemma Purdey. Pada intinya argument tersebut menyimpulkan bahwa pengalaman pribadi mahasiswa/mahasiswi yang mengikuti pertukaran akan menghasilkan suatu persepsi terhadap negara yang akan mempengaruhi perilaku mahasiswa tersebut terhadap wacana akan integrasi regional. Persepsi positif akan mengembangkan hubungan yang konstruktif; meningkatkan pengertian dan toleransi akan perbedaan yang ada. Hal ini kemudian dapat menjadi fondasi terciptanya 'we feeling'

Purdey menggunakan pendekatan *'life stories'* untuk menekankan hubungan antara pengalaman pertukaran pelajar dan persepsi, pendapat, dan perasaan dari pelajar terhadap negara penerima (*host countries)*. Dalam risetnya, Purdey memberikan beberapa indikator untuk mengukur dampak dari program pertukaran pelajar terhadap pembentukan persepsi positif. Untuk mendorong terciptanya hubungan positif dari pelajar terhadap negara penerima, Purdey menggarisbawahi dua pertanyaan utama.

Pertanyaan pertama bergantung pada motivasi personal dari pemegang, sangat penting untuk mempertimbangkan perspective pemegang terhadap pendidikan internasional(regional), prioritas kehidupan mereka, dan motivasi untuk mencai pengetahuan dan ambisi yang lebih baik, serta tingkat keterbukaan terhadap nilai dan norma baru. Terlebih lagi, pada bagian ini Purdey mengingatkan bahwa pengetahuan awal mengenai negara penerima dinilai menguntungkan untuk menjamin persepsi yang positif sebelum keberangkatan. Pengetahuan ini bertambah seiring jumlah orang yang mendapat kesempatan untuk belajar di negara penerima dan mereka yang telah menginformasikan ulang dan menyebarkan informasi ini pada calon pemegang beasiswa lainnya. Diindikasikan bahwa semakin tinggi pengalaman positif pemegang

terhadap negara pemerima, semakin tinggi pula tingkat ketertarikan pada negara tersebut.

Pertanyaan kedua merujuk pada tingkat situasi yang mengubah kehidupan pemerima selama mereka menjalani periode basiswa. Riset menunjukkan hasil pada tingkat kultural atau pengalaman hidup antarapelajar dipengaruhi oleh seberapa besar pelajar terekspos pada struktur sosial. Diantaranya tipe pertemanan yang dibangun para pelajar dengan masyarkat local dapat mendefinisikan tingkat penetrasi mereka ke dalam struktur sosial negara penerima, sehingga ekspsur terhadap nilai, budaya dan norma local semakin meningkat.

ASEAN University Network[483]

AUN dibentuk pada tahun 1992 dengan tujuan "to *hasten the solidarity and development of a regional identity through the promotion of human resource development so as to further strengthen the existing network of leading universities and institutions of higher learning in the region*." Tujuan tersebut kemudian dicetuskan ke dalam *the 4th ASEAN Summit* yang berujung pada pembentukan *ASEAN University Network* padaNovember 1995 melalui pendandatanganan Charter oleh menteri khusus untuk pendidikan tingkat tinggi dari enam negara dengan sebelas universitas awal.

Pada pertemuan pertama AUN, November 1996, *AUN Board of Trustees* berkumpul dan mencanangkan kerangka kerja dalam empat area prioritas meliputi; *student and faculty exchanges, ASEAN studies, information networking,* dan *collaborative research*. Ketika *ASEAN Charter* ditandatangani di tahun 2007, AUN menjadi *key implementing agency*ASEAN dalam hal sosio-kultural. Aktivitas AUN terbagi menjadi lima area meliputi (i) *Youth Mobility*, (ii) *Academic Collaboration*, (iii) *Standards, Mechanisms, Systems and Policies of Higher Education Collaboration*, (iv) *Courses and Programmes Development* dan (v) *Regional and Global Policy Platforms.* Dengan obyektif utama yaitu; (i) *To strengthen exisiting*

[483] "Our History", *ASEAN University Network*, diakses pada 10 November 2015, http://www.aunsec.org/ourhistory.php

network of cooperationamong universities in ASEAN, (ii) To promote collaborative study, research and educational programme on the priority areas identified by ASEAN, (iii) To promote cooperation and solidarity amongst scholars, academicians and researchers in the ASEAN Member States dan (iv) To serve as the policy oriented body in higher education in ASEAN region.

Dalam pencapaian obyektif tersebut AUN memiliki struktur yang terbagi dalam tiga kategori utama.

- Kategori pertama adalah *policy-making bodies* beranggotakan; 10 representatif universitas dari setiap negara, Sekretaris General ASEAN, Chairperson dari AUN Board of Trustee (yang dipegang oleh Secretary General of the Office of the Higher Education Commission Thailand), Director SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization) dan Executive Director dari AUN Secretariat.
- Katagori kedua *coordinating dan monitoring bodies* yang dilakukan oleh AUN Secretariat. AUN Secretariat memiliki fungsi planning, organizing, coordinating dan evaluating program dan aktivitas yang berada dalam kerangka AUN. Secretariat juga ditugaskan untuk pembentukan ide dan inovasi serta resource mobilization (sourcing and generating funds).
- Kategori ketiga adalah *implementing bodies* yang terdiri dari 30 universitas anggota dengan tugas untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang dipayungi oleh AUN.

Tabel 1 Universitas Anggota AUN

Negara	Member universitas
Brunei	Universitas Brunei Darussalam
Kamboja	Royal University of Phnom Penh, Royal University of Law and Economics
Indonesia	Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga
Laos	National University of Laos
Malaysia	Universiti Malaya, UniversitiSains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia
Myanmar	Yangon Institute of Economics, University of Yangon, University of Mandalay

Filipina	De La Salle University, University of the Phillipines, Ateneo de Manila University
Singapura	National University of Singapore, Nanyang Technological University, Singapore Management University
Thailand	Chulalongkorn University, Burapha University, Mahidol University, Chiang Mai University, Prince of Songkla University
	Cietnam National University (Hanoi), Vietnam National University (Ho Chi Minh), Can Tho University

Sumber: Website AUN (http://www.aunsec.org/aunmemberuniversities.php)

Dalam level regional, AUN bekerjasama dengan ASEAN Secretariat dalam pelaporan kegiatan serta pengajuan inisiatif bagi kerjasama intra maupun inter regional di bidang pendidikan. AUN berpartisipasi di dalam SOM–ED (Senoir Official Meeting on Education)[484] dan ASED (ASEAN Education Minister Meeting)[485]. Selain itu AUN juga melaporkan aktivitas pendidikan ke ASCC-SOCA (ASEAN Socil Cultural Community Council)[486] dan ACC (ASEAN Coordinating Council)[487] melalui ASEAN Secretariat[488].

AUN Program

Sebagai sebuah institusi regional yang berupaya untuk mengedapankan kerjasama regional,AUN memiliki kekurangan utama, yaitu terbatasnya jumlah universitas yang menjadi anggota AUN. Kritik terhadap pendekatan elitist tersebut didasarkan pada argumen bahwa kerjasama regional pendidikan agar menjadi efektif haruslah bersifat inklusif, sehingga semua aktor institusi pendidikan dapat mengambil

[484] Merupakan sebuah ajang pertemuan antar *Senior Officials* dari kesepuluh negara anggota ASEAN.

[485] ASED merupakan ajang dimana mentri pendidikan dari setiap negara anggota ASEAN berkumpul dan membahas peningkatan kerjasama dalam bidang pendidikan. ASED juga menerima laporan dari SOMED terkait implementasi serta kerja sama program pendidikan ("ASEAN Education Ministers Meeting", *Asociation of Southeast Asian Nations*, diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/communities/ASEAN-socio-cultural-community/category/ASEAN-education-ministers-meeting-ased)

[486] ASCC-SOCA merupakan salah satu dari pilar komunitas ASEAN yang berujuan untuk merealisasikan komunitas yang berbasis masyarakat dan meningkatkan solidaritas serta kesatuan masyarakat negara anggota ASEAN. ASCC menekankan pada pembentukan identitas bersama dan pembangunan masyarakat yang peduli, inklusif, dan sejahtera ("ASEAN Socio – Cultural", *Asociation of Southeast Asian Nations*, diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/communities/ASEAN-socio-cultural-community)

[487] ASEAN Coordinating Council terdiri dari para Menteri Luar Negeri ASEAN yang bertemu setidaknya dua tahun sekali untuk mengkoordinasikan isu-isu ASEAN. ("ASEAN Coordinating Council", *Asociation of Southeast Asian Nations*, diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/ASEAN/ASEAN-structure/ASEAN-coordinating-council)

[488] 2014-2015 AUN Annual Report

manfaat dari kerangka ASEAN dan selanjutnya berkontribusi terhadap AUN dan integrasi ASEAN.

Namun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa komposisi terbatas anggota AUN didasarkan pada kebutuhan praktis. Deputy *Executive Director AUN*[489] menyadari bahwa keterbatasan inidapat dilihat melalui pendekataan pendanaandan pendekatan praktikal. Pendanaan AUN yang terbatas megakibatkan banyaknya programme yang dilakukan bersifat *cost-sharingbased*. Utamanya bagi kegiatan *non-academic exchange,* dimana penyelenggaraan dilakukan sepenuhnya oleh universitas negara anggota yang mengajukan diri sebagai *host university*. Pendekatan *cost-sharing based system* menjustifikasi minimnya jumlah universitas anggota untuk memastikan setiap *host university*dapat menanggung beban yang harus dikeluarkan terkait pengadaan aktivitas tersebut. *Resource mobilization* menjadi bagian penting dalam penyelenggaran aktivitas dan program AUN melalui kerjasama dengan universitas anggota, *ASEAN bodies*, pemerintah negara anggota dan lembaga donor lainnya seperti ADB dan EU.

Sementara itu terkait dengan pendekatan praktikal, AUN Secretariat melihat bahwa bidang pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan banyak mengadopsi mekanisme yang mengharuskan adanya perbaikan berkala sebelum suatu program dapat diimplementasikan secara umum. Pendekatan *pilot project* yang diadopsi oleh AUN mengindikasikan efektivitas kelompok kecil dalam tahap persiapan, sebelum nantinya dapat didistribusikan secara meluas.

Berkaca pada keterbatasan institutional yang dimiliki, AUN Secretariat mencoba merangkul berbagai kegiatan melalui skema spesifik yang disebut dengan AUN Thematic Network. AUN Thematic Network berfokus pada pengimplementasian konsentrasi subyek akademis yang memberikan ruang besar untuk kolaborasi regional yang lebih efektif dan effisien yang berdasarkan pada kepentingan dan tema keilmuan yang spesifik.

[489] Wawancara dengan AUN Deputy Executive Director, Dr. Choltis Dhirathiti

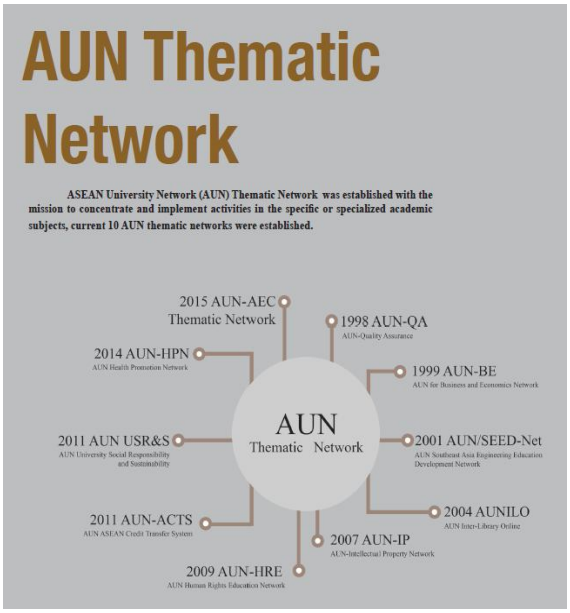

Model yang diadosp dalam AUN Thematic Program mengadopsi dua indikator utama. *Membership Condition* menunjukkan komposisi keanggotaan dari tiap-tiap AUN Thematic program. Indikator ini meliputi Exclusive/Semi-Exclusive/Inclusive. Sementara *Management Conditions* menunjukan mekanisme pengorganisasian kegiatan termasuk persiapan materi, pendanaan serta evaluasi. Indikator ini meliputi Full Autonomous /Semi Autonomous.

AUN Thematic Networks

Tabel dibawah menganalisa AUN Thematic Network beserta karakteristik yang ditonjolkan dari setiap program. Selain mengidentifikasikan aktivitas dan tujuan dari AUN Thematic Network, dapat pula dilihat model yang diadopsi oleh program terkait. Indikator penting yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penyesuaian kinerja dan aktivitas perguruan tinggi nasional terhadap kerangka kerjasama regional ialah terkait dengan *membership conditions;*Inclusive mengartikan program tersebut dapat diakses oleh universitas non anggota serta mitra lainnya, Semi Exclusive mengindikasikan moderasi keanggotaan tergantung pada prasyarat setiap program yang dibutuhkan dan Exclusive mengartikan terbatasnya akses terhadap proses tersebut. Sementara untuk indikator *management conditions* akan membantu untuk

menganalisa bentuk manajemen yang terdesentralisasi di sekretariat universitas (semi autonomous) atau terpusat pada Secretariat AUN (full autonomous).

Tabel 2. AUN Thematic Networks

Program	Secretariat	Latar belakang	Model	Anggota	Keterangan
AUN QA	AUN Secretariat	AUN-QA memastikan standar kualitas pendidikan yang diimplentasikan AUN tetap pada standar yang tinggi, mengingat sistem pendidikan yang mulai terinternasonalisasi	Inclusive – full autonomous	Universitas anggota AUN, *associate* dari AUN-QA, bahkan universitas non-anggota dari AUN.	Mengatasi ketimpangan pembangunan dan kualitas pendidikan yang terjadi di Negara ASEAN khususnya di CMLV
AUN HRE[490]	Mahidol University	AUN HRE bertujuan untuk memperkuat hubungan negara-negara ASEAN dalam sektor HAM, baik dalam bidang pembelajaran ilmu, maupun peningkatan kesadaran terhadap perlindungan HAM	Semi Exclusive – Full Autonomous	30 universitas anggota di ASEAN dan 22 anggota SHEARN	Kerjasama AUN HRE dan SEAHRN dalam hibah SIDA memfokuskan pada kerjasama riset, pendidikan dan *capacity building.*
AUNIP[491]	Chulalangkorn University	Menciptakan *Intellectual Property network* yang efektif antar universitas regional AEAN, yang dapat digunakan sebagai sumber daya pendidikan, riset dan pembuatan kebijakan.	Exclusive – Semi Autonomou	Universitas anggota dan universitas mitra	Bekerjasama dengan badan paten internasional diantaranya dalam kerangka ECAP, EU, EPO, USPTO
AUN BE[492]	Universitas Gadjah Mada	Menginternasinalisasi dan meningkatkan kualitas lulusan program bisnis.	Inclusive – semi atutonomous	Universitas negara anggota ASEAN dan mitra university, termasuk juga universitas non-ASEAN.	Universitas Non ASEAN meliputi Tingkok, Jepang, Korea, Perancis, Jerman dan Belanda.
AUNILO[493]	Universiti Sains	Berperan untuk menyebarkan informasi	Exclusive – Full	Representasi dari universitas	Utamanya *capacity building* bagi

[490] "AUN-HRE (ASEAN University Network – Human Rights Education)", *SHAPESEA*, diakses pada 10 November 2015, http://shapesea.com/members1/aun-ASEAN-university-network/
[491] "AUNIP", *ASEAN Unversity Network*, diakses pada 10 November 2015, http://www.aunsec.org/aunip.php
[492] "AGBEP", *ASEAN Unversity Network*, diakses pada 10 November 2015, http://www.aunsec.org/agbep.php

	Malaysia	melalui ICT dalam bidang pendidikan.	Autonomous	anggota, AUNILO Secretariat, dan AUN Sekretariat	*library staffs*, kualitas manajemen perpustakaan dan informasi online.
AUN USR&S [494]	Universiti Kebangsaan Malaysia	Kesadaran mengenai the university's social responsibility and sustainability dengan menekankan pada 4 faktor utama yaitu, Higher Education Mission, Community Involvement, Campus Life, University Governance and Administration.	Inclusive – Full Autonomous	Konferensi dapat dihadiri publik dari berbagai universitas, bahkan universitas non-anggota, representasi *foundation*, organisasi, industry, dan LSM.	Program Asia Engage,
AUN/SEED-Net[495]	Chulalangkorn University	Bertujuan untuk mengingkatkan sumber daya manusia dalam bidang permesinan (*engineering*).	Semi Exclusive - Full Autonomous	19 institusi anggota dari ASEAN, 11 Support Universities dari Jepang.	Termasuk meningkatkan kolaborasi antara universitas dan industry (U-I), Training, Grant dan Scholarship. SEED Net menghasilkan ASEAN Engineering Journal.
ACTS[496]	Universitas Indonesia	Bertujuan untuk memfasilitasi proses pertukaran pelajar dengan memastikan pemindahan kredit akademik.	Semi Inclusive – Semi Autonomeus	Universitas anggota yang terdaftar dalam proses ACTS, serta universitas parter dari ACTS+3	Terbatasnya universitas yang dapat ikut dalam program student mobility. Kurangnya tingkat promosi dan sosialisasi ACTS pada masyarakat luas.
AUNHPN [497]	Mahidol University	Meningkatkan peran unversitas dalam mempromosikan kesehatan pada masyarakat, terutama	Exclusive – Full Autonomous	Universitas anggota AUN dan mitra University	*Officially launched in 2014*

[493] "AUNILO", *ASEAN University Network*, diakses pada 2 November 2015http://www.aunsec.org/aunilo.php

[494] "AUNUSR&S", *ASEAN University Network*, diakses pada 13 November 2015http://www.aunsec.org/aunusrs.php

[495]"AUN SEED Net / JICA", *ASEAN University Network*, diakses pada 1 November 2015 http://www.aunsec.org/aunseednet.php

[496]"AUN-ACTS", *Asean University Network*, diakes pada 15 November 2015, http://www.aunsec.org/aunacts.php

[497] "AUN Health Promotion", *ASEAN University Network*, diakses pada 2 November 2015, http://www.aunsec.org/aunhealth.php

		dalam jenjang pendidikan tinggi.			

ACTS untuk mendukung Student Mobility

Kegiatan dari *ASEAN University Network* meliputi tiga target utama yaitu mahasiswa, tenaga pengajar dan institusi perguruan tinggi baik dari negara anggota ASEAN sendiri ataupun dengan negara mitraASEAN. Dalam tulisan ini mahasiswa menjadi fokus penting bagi tulisan inidalam menganalisis kontribusi perguruan tinggi terhadap integrasi regional. Dukungan institusi perguruan tinggi terhadap skema mobilitas siswa regional dalam kaitannya dengan komunitas ASEAN memiliki arti penting diantaranya;

1. Mobilisasi membantu meningkatkan kualitas pendidikan regional melalui kerjasama lintas batas negaraantar institusi perguruan tinggi yang mengedepankan pertukaran pengetahuan, ide, dan teknologi.
2. Mobilisasi pendidikan akan membantu menyiapkan generasi muda ASEAN terhadap kesempatan yang datang seiring dengan terbukanya pasar tenaga kerja ASEAN. Dan sebaliknya, mobilisasi pendidikan juga akan membantu lulusan dalam mengatasi tantangan serta hambatan dalam persaingan regional melalui peningkatan keahlian.
3. Mobilisasi mahasiswa akan mendukung terciptanya sebuah identitas regional, sebab mobilisasi memberikan ruang interaksi bagi berbagai perbedaan di kawasan Asia Tenggara. Dengan semakin tingginya tingkat sosialisasi generasi muda terhadap budaya negara Asia Tenggara lainnya, maka semakin besar pula tingkat toleransi mereka terhadap sesama negara ASEAN.

Bertolak dari upaya untuk mendukung mobilisasi mahasiswa perbedaan dalam berbagai sistem kredit akademis di negara-negara ASEAN merupakan salah satu tantangan untuk kebebasan mobilitas siswa di kawasan ini. AUN ACTS bertujuan

untuk memfasilitasi program pembelajaran mahasiswa ASEAN secara regional dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan program pertukaran pelajar, sekaligus mendapatkan kredit akademik dari proses pembelajaran tersebut di universitas penerima. ACTS terbuka bagi program sarjana dan pascasarjana. Program pembelajaran ACTS berorientasikan pada siswa dan akan mempertimbangkan sistem kredit nasional yang ada dalam proses konversi kredit, periode studi, dan hasil pembelajaran. Pelajar dapat berpartisipasi dalam program ACTS selama satu hingga dua semester akademik, atau periode yang lebih singkat seperti semester musim panas dsb. Sistem nasional tidak perlu mengalami reformasi atau perubahan karena ACTS akan meggunakan *grading scales* dalam menentukan nilai akhir. ACTS juga kemudian menyediakan daftar pembelajaran yang tersedia, berikut cara pendaftaran secara *online*. AUN-ACTS juga menawarkan sejumlah beasiswa berdasarkan masing-masing universitas. Beasiswa tersebut diantaranya termasuk biaya pesawat, biaya hidup, asuransi perjalanan dan kesehatan, serta biaya akomodasi. Partisipan disarankan untuk berkonsultasi dengan universitasnya masing-masing terkait beasiswa[498]. Sistem pemindahan kredit ini diatur dari sekretariat ACTS yang bertempatkan di Universitas Indonesia, Indonesia sejak 2010[499].

Pembahasan mengenai evaluasi dan perbaikan AUN-ACTS dilakukan pada *AUN-ACTS Steering Committee Meeting* yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh anggota sekretarian AUN-ACTS, representasi universitas AUN, serta representasi universitas mitra. Skala ACTS semakin bertambah setiap tahunnya. Dalam pertemuan ini, didiskusikan rekomendasi kebijakan dari petemuan ASEAN+3, SOM-ED, dan SOM-ED+3[500].

Seperti yang telah disetujui di *5th AUN-ACTS Steering Committee Meeting* di Penang pada Maret 2015 lalu[501], sistem ACTS tidak hanya akan terbuka untuk universitas AUN, tetapi juga universitas mitra. Hingga saat ini telah terdapat 32

[498]"AUN ACTS Student Award", *ASEANCredit Transfer System,* diakes pada 16 November 2015, http://apps.acts.ui.ac.id/index.php/home/contact/99

[499] "AUN-ACTS", *Asean University Network,* diakes pada 15 November 2015, http://www.aunsec.org/aunacts.php

[500]*Annual Report 2013 – 2014,* 2014, halaman 107, Bangkok: The Office of AUN Secretariat

[501]*ASEAN Credit Transfer System,* diakses pada 16 November 2015 http://acts.ui.ac.id/

univeritas yang berpartisipasi dalam program ACTS dari kesepuluh negara ASEAN dan universitas mitra yang berasal dari ASEAN +3[502].

Program AUN ACTS memberikan kerangka acuan akademis yang memfasilitasi proses *student mobility*, namun kelemahan dari ACTS terdapat pada terbatasnya aksesbagi universitas non–anggota AUN di negara ASEAN. Pada pertemuan the *5th AUN-ACTS Steering Committee Meeting* di Hanoi April 2015 lalu,salah satu agenda yang dibahas terkait *membership conditions* ialah 'promotion' dan 'expansion' dari ACTS, walaupun belum secara eksplisit dijabarkan apakah 'enlargament' hanya terbatas pada mitra universitas atau inklusif mencakup setiap universitas di ASEAN.

Kesimpulan

Institusi perguruan tinggi memiliki andil besar dalam mendukung integrasi regional melalui pendukungan aktivitas *student's mobility.*Dari kerangka AUN Thematic Network yang ada, perguruan tinggi di Indonesia dapat meraih manfaat dalam upaya mendukung regional mobilization melalui program ACTS. Namun tidak dapat dihindarkan bahwa program ACTS masih belum dapat dijangkau oleh universitas di luar anggota AUN. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa perguruan tinggi nasional tidak dapat mengambil kesempatan dari kerangka kerjasama regional yang ditawarkan oleh AUN. Beberapa model dari AUN Thematic Program dapat menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk mengkonsolidasikan kegiatannya ataupun untuk membentuk network nasional serupa yang terafiliasi dengan badan regional.

[502] Op. Cit., *Annual Report 2013 – 2014*

Daftar Pustaka

AGBEP. ASEAN Unversity Network http://www.aunsec.org/agbep.php

Annual Report 2014 – 2015, 2014, Bangkok: The Office of AUN Secretariat

Annual Report 2013 – 2014, 2014, Bangkok: The Office of AUN Secretariat

ASEAN Charter. Association of South East Asian Nations http://www.ASEAN.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf

*ASEAN Credit Transfer System*http://acts.ui.ac.id/

ASEAN Education Ministers Meeting. Asociation of Southeast Asian Nations http://www.ASEAN.org/communities/ASEAN-socio-cultural-community/category/ASEAN-education-ministers-meeting-ased

ASEAN Socio – Cultural. Asociation of Southeast Asian Nations http://www.ASEAN.org/communities/ASEAN-socio-cultural-community

ASEAN Vision 2020. Association of South East Asian Nations http://www.ASEAN.org/news/item/ASEAN-vision-2020

AUN-HRE (ASEAN University Network – Human Rights Education) SHAPESEA. http://shapesea.com/members1/aun-ASEAN-university-network/

AUN-ACTS. ASEAN University Network http://www.aunsec.org/aunacts.php

AUNIP. ASEAN Unversity Network http://www.aunsec.org/aunip.php

AUN Health Promotion. ASEAN University Network http://www.aunsec.org/aunhealth.php

Bangkok Declaration. Association of South East Asian Nations. Diakses pada 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/index.php/news/item/the-ASEAN-declaration-bangkok-declaration

The ASEAN Socio Cultural Community Blueprint. Association of South East Asian Nations. Diakses pda 10 November 2015, http://www.ASEAN.org/archive/5187-19.pdf

Our History. ASEAN University Network. Diakses pada 10 November 2015, http://www.aunsec.org/ourhistory.php

Peran Perguruan Tinggi di ASEAN dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015

Penulis : 1. Dwi Nur L.Fithriya,M.A

2. Harits Dwi W. M.A

Universitas Respati Yogyakarta

Abstrak

Perguruan tinggi merupakan salah satu aktor yang memiliki posisi strategis dalam mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015. Jika dilihat dari fungsinya, seharusnya perguruan tinggi bisa membangun dan memperkuat jejaring kerja antara perguruan tinggi di ASEAN, tetapi pada kenyataanya hal tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Penulis berargumen bahwa kerjasama antara Perguruan Tinggi di ASEAN akan meningkatkan serta menguatkan rasa “kekitaan” yang dimiliki oleh anggota ASEAN yang akan memudahkan dalam mensoisalisasikan Masyarakat ASEAN 2015. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana persiapan perguruan tinggi dalam mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015 melalui Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Penulis menggunakan konsep sinergisitas, regionalisme dan komunitas untuk melihat bagaimana peranperguruantinggi dalam mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015.

Key Words : Perguruan Tinggi, Masyarakat ASEAN 2015, Konsep Sinergisitas, regionalisme dan komunitas, ASCC

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah mewarnai perkembangan di segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi suatu negara. Di sisi lain dampak dari globalisasi dapat menciptakan tatanan baru di suatu wilayah atau *region*. Kondisi ini membuka ruang bagi setiap individu untuk terlibat di berbagai negara. Keterlibatan individu atau kelompok tidak ada lagi batas-batas yang melekat diantara mereka. Oleh karena itu, adanya pergerakan individu atau kelompok lintas batas yang begitu cepat memberikan dampak terhadap pembangunan di suatu Negara.

Pergerakan individu atau kelompok lintas batas tersebut dapat dilihat dengan adanya pembentukan komunitas ASEAN yang telah dirintis sejak tanggal 7 Oktober 2003 pada saat Bali *Concord II* melalui *Declaration of ASEAN Concord II*. Agenda ini terselenggara di Bali pada Pertemuan Puncak ASEAN Ke-9. Dalam pertemuan tersebut telah disepakti tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).

Setelah pertemuan Bali berakhir dilanjutkan dengan pertemuan di Cebu, Filipina, pada tanggal 12-13 Januari 2007 merupakan momentum dalam perjalanan komunitas ASEAN. Dalam pertemuan ini seluruh pemimpin ASEAN memutuskan untuk sepakat dan berkomitmen dalam mewujudkan komunitas ASEAN (ASEAN *Community*). Komunitas ASEAN memiliki peran yang sangat signifikan bagi negara-

negara anggota. Dimana, perkembangan ASEAN sejak empat dasawarsa terakhir telah memberikan kontribusi bagi kemajuan kawasan. Pekembangan ini tidak terlepas oleh keinginan masing-masing negara di kawasan dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan di suatu negara mendapat predikat baik apabila suatu negara tersebut memiliki kualitas sumber daya manusia atau *human development index* yang tinggi. Keterkaitan sumber daya manusia ini memiliki korelasi dengan salah satu program dari ASEAN *Social Cultural Community* (ASCC) yang terkait dengan *human development*. Terdapat enam program pada ASEAN *Socio-Cultural Community* Blueprint (ASCCB), yaitu :

a. *Human Development*
b. *Social Welfare and Protection*
c. *Social Justice and Right*
d. *Ensuring Environment Sustainability*
e. *Building the ASEAN Identity*
f. *Narrowing the Development Gap*[503]

Enam program diatas memiliki arti bagi masyarakat ASEAN pada khususnya dalam memberi motivasi kepada seluruh elemen atau stakeholder untuk melaksanakan pasal 1 ayat 13 Piagam ASEAN yaitu "*to promote a people-oriented ASEAN in which all sector or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*". Pasal tersebut

[503]CPF Luhuma,dkk, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI, hal.10

memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat di negara-negara ASEAN. Kondisi ini memerlukan suatu situasi yang kondusif dalam menjalankan program-program ASCCB. Sehingga komunitas keamanan ASEAN dan komunitas ekonomi ASEAN mendukung agenda yang dijalankan oleh komunitas sosial dan budaya. Tanpa dukungan dari kedua komunitas ASEAN tersebut tidak akan terjadi sebuah integrasi di kawasan Asia Tenggara.

Dalam mewujudkan "mimpi" tersebut, pelaksanaan pilar pertama *ASEAN Community* 2015 (yakni dimensi ekonomi) adalah semakin bebas dan terbukanya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal pada tahun 2015 kedepan. Hal ini sesuai dengan tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN *Vision* 2020 yang berbunyi :

" …. to create a stable, prosperous, and highly competitive ASEAN Economic region inwhich there is a free flow of goods, service, investment, skilled labour,and free flow ofcapital, equitable economic, development and reduced poverty and socio economicdisparities in year 2020." Visi ASEAN tersebut yang awalnya akan dicanangkan pada tahun 2020, dipercepat lima tahun, menjadi tahun 2015, sehingga muncul kesepakatan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 *(ASEAN Community 2015)*.

Berbicara mengenai komunitas Negara ASEAN, di Asia Tenggara masih terdapat beberapa negara yang berstatus sebagai negara berkembang, salah satu permasalahannya yaitu pembangunan manusia (*human development*). Kondisi ini menjadi tantangan bagi beberapa aktor yang terlibat atau fokus dalam permasalahan pembangunan manusia (*human development*). Permasalahan pembangunan manusia

(*human development*) dapat diatasi melalui suatu pendekatan yaitu dibidang pendidikan. Pendidikan ini tidak hanya terbatas dalam masalah pendidikan yang bersifat *hard skill* akan tetapi juga dilihat dari sisi *soft skill*. Dalam mengimplementasikan pogram-program pemberdayaan dibutuhkan suatu sinergisitas dengan berbagai pihak, dengan harapan seluruh aktor pemerintah maupun non-pemerintah dapat menyatukan tujuannya khususnya dalam bidang pembangunan manusia.

Pada saat ini perkembangan dalam hubungan internasional sudah semakin kompleks seiring arus globalisasi. Salah satu forum seperti ASEAN menjadi salah satu pintu masuk untuk melakukan kerjasama dengan sebuah negara. Hubungan internasional memiliki daya tawar yang tinggi di suatu kawasan khususnya Indonesia. Negara ini memiliki potensi yang dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu, demografis, geografis, ekonomis maupun politis di kawasan Asia Tenggara.

Melihat pemaparan diatas, maka dalam makalah ini penulis akan fokus dalam menyampaikan gagasannya melalui aspek komunitas sosial budaya ASEAN (ASCC) yang merupakan salah satu program dari ASEAN *Socio-Cultural Community* Blueprint (ASCCB). Aspek komunitas sosial budaya ASEAN (ASCC) memiliki peran yang signifikan dalam hal mensosialisasikan MEA. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan antar jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimaksudkan sosialisasi antar jajaran pemerintah disini adalah upaya untuk penyesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah agar kedepannya selaras dengan visi dan misi terbentuknya ASEAN Community. Sementara sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan segenap masyarakat, adalah dalam upaya memberikan

gambaran yang menyeluruh dan pemahaman yang cukup mengenai ASEAN, sehingga dengan demikian dapat menggugah *we feeling* masyarakat terhadap ASEAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015?

C. LANDASAN KONSEPTUAL

Untuk melihat permasalahan diatas, penulis menggunakan landasan konseptual berupa **Teori Sinergisitas, Konsep Regionalisme dan Komunitas.**

Menurut teori sinergisitas yang di sampaikan oleh *Stoner* (1986), bahwa hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi yang dihadapkan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerja sama tersebut, sebagai berikut:

1. *Defensive*. Tingkat kerja sama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif defensif.
2. *Respectful*. Dengan kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai.
3. *Sinergistic*. Dengan kerja sama yang tinggi dan saling mempercayai akan menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergisitas yang berarti kerja

sama yang terjalin akan menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak

James A. F. Stoner and Charles Wankel (1986), menyampaikan bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

Melihat pemaparan teori diatas, bisa dijelaskan bahwa kerjasama antar perguruan tinggi di ASEAN dalam rangka mensosialisasikan MEA dapat dilakukan dan dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapkan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Tingkat kerjasama yang terbaik antar perguruan tinggi di ASEAN harus memegang prinsip sinergistik yaitu dengan adanya kerjasama yang tinggi antar perguruan tinggi, saling mempercayai dan terpadu sehingga masing-masing perguruan tinggi mampu menghasilkan keluaran yang lebih besar. Keluaran yang dimaksud disini yaitu membawa visi untuk mensosialisasikan MEA dari perguruan tinggi yang ada di ASEAN.

Di dalam studi hubungan internasional, *regionalism* sangat erat hubungannya dengan studi kawasan *(area studies)*. Menurut Mansbaach, *region* atau kawasan adalah pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan interdependensi dalam bidang ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi, serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Lebih lanjut, Rudy menambahkan bahwa hal terpenting darikajian regionalism adalah meninjau derajat keeratan *(level of cohesion)*, struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan politik *(structure of relations)* dalam suatu kawasan, serta rasa

kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerjasama regional tersebut. Hurrel lebih dalam menambahkan bahwa proses menuju regionalism memiliki beberapa tahapan diantaranya :

Proses pertama adalah proses kesadaran dan identitas regional. Pada tataran ini, kesadaran regional merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat, misalnya sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau agama. Adakalanya kesadaran regional ini juga bersifat eksternal, teruta mamisalnya menyangkut masalah ancaman keamanan. Kedua, proses regionalism lebih dalam terikat lagi kedalam bentuk kerjasama regional antarnegara. Kerjasama disini bias memiliki tujuan yang sangat luas. Di satusisi, kerjasama bias menjadi sarana dalam merespon berbagai tantangan eksternal, disisi lain kerjasama bias dikembangkan guna menjamin tercapainya berbagai tujuan, nilai bersama atau sekedar untuk memecahkan masalah bersama.

Terdapat dua premis dasar untuk memahami regionalisme, yakni pertama, regionalisme dipandang sebagai tanggapan terhadap globalisasi. Kedua, regionalism dipandang sebagai produk dari dinamika internal suatu kawasan, berikut motivasi dan strategi-strategi dari aktor-aktor regional. Berkaitan dengan premis pertama diatas, Masahiro dan Cheng Guan menyepakati bahwasannyar egionalism hadir sebagai hasil dari suatu proses globalisasi yang menyeruakkan kecenderungan homogenisasi. Bagaimana proses globalisasi telah memberikan suatu efek terhadap terciptanya respon regional. Masahiro dan Cheng Guan juga menyarankan untuk tidak melihat regionalism sebagai apriori, tetapi lebih kepada pembentukan secarasosial.

Senada dengan konsep regionalisme, penulis juga berkenan untuk memberikan sedikit rujukan tentang makna komunitas, sebagai konsep turunan dari regionalisme.

Dalam studi Hubungan Internasional, konsep komunitas sering kali dipinjam guna membantu memahami kerjasama multilateral oleh sejumlah Negara dalam suatu kawasan tertentu. Kendati terkadang terkesan dipaksakan, namun model komunitas harus diakui sangat membantu dalam upaya kita memahami kerjasama multilateral Negara-negara dalam sebuah region Hubungan internasional kontemporer diwarnai dengan munculnya aneka pelaku dalam ranah internasional. Tidak hanya aktor konvensional: Negara, bermacam organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah, baik perusahaan multinational maupun beragam kelompok kepentingan dan penekan bahkan individu telah terhubung dalam jejaring yang teramat rumit, kait terkait dengan sangat erat, berjalin berkelindan dengan sangat akut, bahkan saling tergantung satu sama lain. Setting global inilah yang kerapkali disebut sebagai pola : *complex interdependency*.

Terdapat beragam pemahaman terhadap komunitas. Para ilmuan seperti Ferdinand Tonnies, Robert D. Putnam , McMillan, Chavis dan masih banyak lainya memberikan beragam definisi tentang komunitas dengan penekanan yang beragam .

Smith, M. K. (2001), dengan sangat kreatif telah melakukan eksplorasi terhadap konsep tersebut, menurutnya sedikitnya terdapat 3 cara dalam memahami masyarakat, yaitu: pertama: *place*, memahaminya dari sisi teretorial, tempat, geografis ataupun wilayah, kedua: *interest*, yakni meneropongnya dari kesamaan kepentingan, fokus, minat serta karakteristik umum, selain tempat dan ketiga: *communion*, yakni persekutuan, kelompok, kebersamaan.

Di sisi lain Gusfield (1975) dalam Capece, Guendalina et all. (2009) mensyaratkan adanya dua dimensi dalam suatu komunitas, yaitu dimensi *teretorial* (kedekatan secara fisik, karena hidup dalam teretori yang sama) dan dimensi *relation* (hubungan). Kendati secara fisik mereka tidak bertemu, namun ketika terdapat hubungan diantara mereka, maka saat itu jugadapat dikategorikan sebagai komunitas. Sekelompok ilmuan yang kendati mereka secara fisik berada dalam tempat yang berbeda dan jauh namun ketika terjadi interaksi diantara mereka, kemudian dalam benak mereka terdapat presepsi dan keyakinan bahwa mereka senasib, satu visi, sepenangungan, memiliki kualitas hubungan yang tinggi dan memiliki interest yang sama maka itu juga disebut komunitas. Contoh lain yang paling mudah ditunjuk adalah komunitas blogger di internet. Dimensi teretorial, mensyaratkan adanya kedekatan dan interaksi secara fisik, sementara dimensi hubungan (relation) tidak selamanya demikian. Dalam banyak kasus, kedekatan dan berbagai wilayah tidak dapat dengan sendirinya merupakan suatu komunitas, karena itu dimensi relasional juga sangat esensial.

Menurut Emmanuel Adler dan Michael Barnett (1998), komunitas memiliki tiga karakteristik, yakni; (1) para anggota komunitas berbagi identitas-identitas, nilai-nilai dan pengertian-pengertian. (2) mereka yang berada dalam komunitas memiliki hubungan langsung, interaksi yang terjadi bukan secara tidak langsung dan pada domain-domain khusus yang terisolasi, melainkan hubungan-hubungan tatap muka dan dalam berbagai keadaan atau tatacara. (3) komunitas menunjukkan resiprositas yang mengekspresikan derajat tertentu kepentingan jangka panjang dan mungkin bahkan bersifat mementingkan orang lain *(altruism)*; kepentingan jangka panjang

didorong oleh pengetahuan dengan siapa seseorang berinteraksi, dan altruism dapat dipahami sebagai suatu rasa kewajiban serta tanggungjawab. Dari paparan diatas, dapat dipahami bahwa dalam sebuah komunitas, sekalipun dalam interaksinya yang semakin kuat, terdapat nilai-nilai dan pengertian serta kebersamaan, tetapi tetap saja dalam tingkah lakua nggotanya masih ada yang didasari oleh kepentingannya sendiri.

Perbedaan kepentingan antar Negara anggota yang berbeda sudah pasti menimbulkan gesekan dan rivalitas dalam komunitas tersebut. Kedua, selama negara–Negara anggota tersebut belum memiliki *sense of community*, maka proses penyatuan Negara anggota tersebut dalam komunitas akan susah terwujud. *Sense of community* disini adalah suatu perasaan bahwa paraanggotanya mempunyai rasa memiliki, satu perasaan dimana para anggota peduli satu sama lain, berbagi kepercayaan bahwa kebutuhana nggotanya dapat dipenuhi melalui komitmen mereka untuk bersama.

BAB II

PEMBAHASAN

A. ASEAN Social Cultural Community (ASCC)

Dalam aspek sosial-budaya, yang diperlukan untuk pengembangan rasa kebersamaan dan solidaritas, termasuk didalamnya pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Harapannya, ketika tingkat SDM masyarakat ASEAN sudah setara *(equal)*, akan semakin mempercepat integrasi ekonomi sebagai pilar utama *ASEAN Community*. Hal ini sesuai dengan pemikiran Menko Kesra, Agung Laksono yang mengusulkan tentang peningkatan kerjasama Negara ASEAN di

bidang pendidikan. Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama siswa dan mahasiswa di kawasan ASEAN.

Pilar ketiga dalam Komunitas ASEAN 2015 *(ASEAN Community 2015)* adalah Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN *(ASEAN Socio-cultural Community).* Roadmap ASEAN *Socio-cultural Community* terkandung enam program kerja yang harus diwujudkan oleh semua Negara ASEAN, yakni; *human development, socialwelfare and protection, social justice and rights, ensuring environmental sustainability,narrowing the development GAP and building the ASEAN identity*.

Dalam aspek komunitas sosial budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan mampu menopang *ASEAN Community 2015*. Sebelumnya, pada tahun 1995, ASEAN memiliki jaringan pendidikan tinggi, yakni *ASEAN University Network* (AUN). AUN sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN pada tahun 1992 silam di Hanoi. *Hanoi Plan of Action* menyatakan untuk memperkuat ASEAN University Network (AUN) dan mentransformasikan ke dalam ASEAN *University*.[504] Latar belakang pendirian AUN ini tidak lain adalah untuk mempercepat solidaritas danpengembangan identitas regional melalui promosi pengembangan sumber daya manusia dengan jalan penguatan jaringan yang sudah ada di tingkat universitas dan institusi pendidikan unggulan di kawasan. Pendidikan menjadi salah satu langkah utama yang dilakukan oleh aktor-aktor dari perguruan tinggi yang tergabung dalam ASEAN *University Network* (AUN). Pembentukan jaringan ini

[504]C.P.F.Luhuma, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2011, hal.16

dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui jaringan dengan beberapa unversitas di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi hasil dari jaringan ini tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat karena kondisi ini melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang berkecimpung dalam dunia akademis. Aktor-aktor yang dimaksud disini yaitu perguruan tinggi atau universitas dan tenaga pengajar setungkat perguruan tinggi atau dosen.

Peran perguruan tinggi disini diharapkan mampu menjalankan aktifitasnya dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di dalam negeri ataupun di luar negeri khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara pertukaran dosen, penelitian bersama dan bisa juga dengan mengadakan seminar di universitas-universitas dalam satu kawasan. Disisi lain, perguruan tinggi, dosen atau akademisi tersebut dapat melibatkan mahasiswa contohnya dengan kegiatan kunjungan ke kampus-kampus di Asia Tenggara, pertukaran pelajar dan bahkan dapat dilakukan berbagai perlombaan ataupun kejuaraan yang bisa diikuti mahasiswa yang ada di tingkat Asia Tenggara. Hal ini pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970-an dengan mengirimkan guru ke Malaysia. Pengiriman guru ke negeri Jiran memiliki makna bahwa pembangunan di bidang pendidikan sangat penting, karena pendidikan dapat dijadikan sebuah parameter dari keberhasilan sebuah bangsa.

B. ASEAN University Network (AUN) dan Peran Perguruan Tinggi

Peran Perguruan Tinggi dalam penarapan MEA tidak bisa dipandang sebelah mata. Baik tidaknya daya saing bangsa, akan sangat bergantung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya dihasilkan oleh Perguruan Tinggi. Apalagi, untuk

menghasilkan kualitas produk yang bisa bersaing dalam menghadapi MEA, akan sangat ditentukan dari kreatifitas serta inovasi dari produk itu sendiri, dan seluruhnya dilakukan oleh SDM yang ada. Peran strategis ini harus mampu diemban dengan sebaik-baiknya oleh Perguruan Tinggi.[505]

Salah satu peran strategis Perguruan Tinggi bias dilakukan melalui pendidikan antar Universitas di Asia Tenggara (*from campus to campus*), dengan demikian ASEAN dapat menerapkan visi dan misinya yang salah satunya meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Anggota dari AUN adalah Universitas atau perguruan tingi yang ada di negara anggota ASEAN. Daftar gambar di bawah ini merupakan universitas yang tergabung di AUN.

[505]http://gorontalopost.com/2015/03/20/kampus-punya-peran-dalam-hadapi-mea/, diakses pada 30 oktober 2015

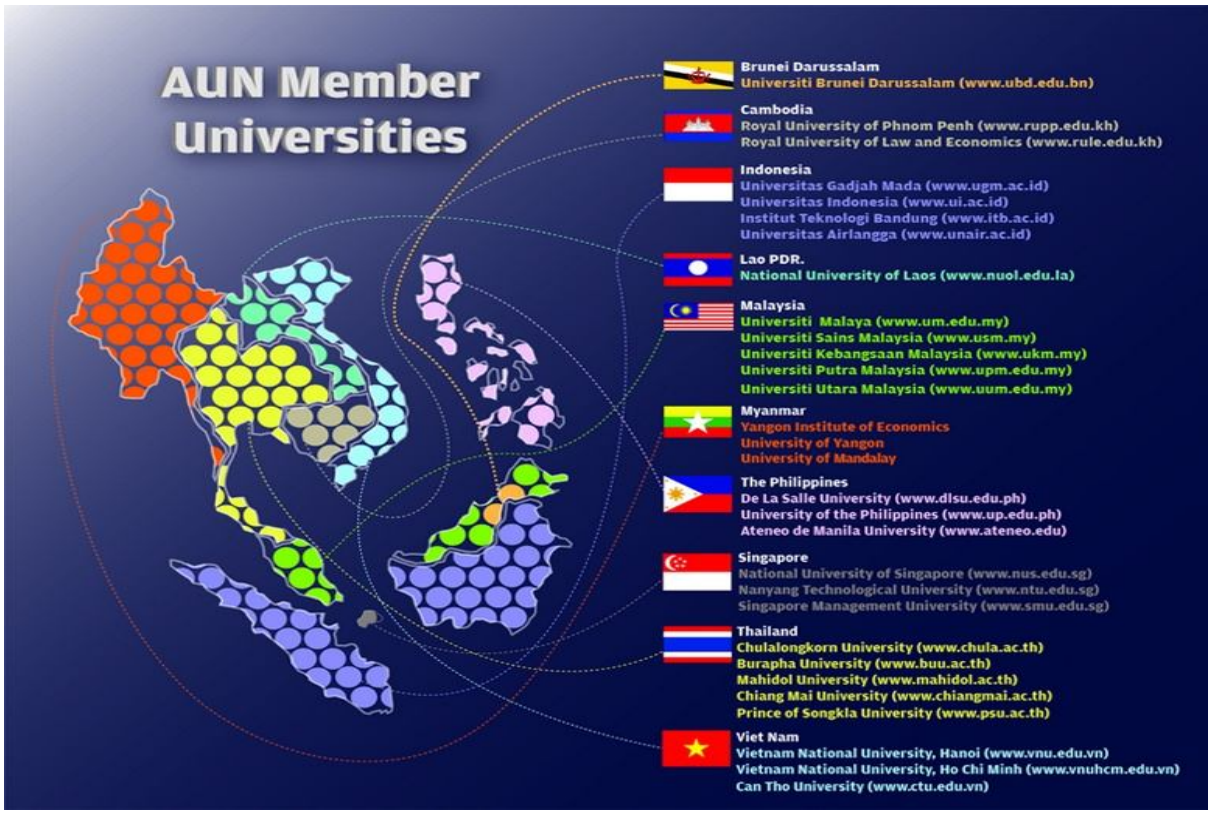

Gambar 2.1.Sumber :http://www.aunsec.org/aunmemberuniversities.php

Dari data diatas dapat memberi gambaran mengenai perguruan tinggi atau universitas yang tergabung dalam AUN. Beberapa aktor ini dilakukan oleh perwakilan universitas yang ada di negaranya masing-masing. Perguruan tinggi mempunyai tanggungjawab untuk menghasilkan insan cerdas dan kreatif yang berdaya saing serta pengembangan ilmu pengetahuan untuk melakukan inovasi, pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

Lebih lanjut, harus diakui bahwa tidak semua perguruan tinggi dapat melaksanakan tanggungjawab ini karena menghadapi persoalan internal dan

eksternal. Perguruan tinggi Indonesia tidak akan bisa melaksanakan dan mengemban tugas tersebut tanpa dukungan penuh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). seharusnya para akademisi lebih meningkatkan kegiatan *research* dan inovasi untuk mendukung perumusan kebijakan, program dan aktivitas dibidang keahlian sendiri atau lintas disiplin ilmu. Serta menjalin *networking* dan *join research* dengan mitra akademisi dari perguruan tinggi di negara ASEAN lainnya agar lebih memahami apa saja bentuk perkembangan yang terjadi di negara lain.[506]

Sehingga dapat disadari, bahwa pendidikan khususnya pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembentukan Masyarakat ASEAN dan dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk menghadapi integrasi regional di ASEAN. SDM Indonesia di nilai belum sepenuhnya siap menghadapi *Asean Economic Community*, sehingga SDM Indonesia harus di asah dan di perkuat melalui keterampilan. Dikarenakan, tenaga kerja terlatih jauh lebih utama dibandingkan dengan tenaga kerja terdidik. SDM terdidik tanpa disertai dengan kompetisi yang memadai dapat dikalahkan oleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih.

Saat ini lembaga pendidikan perguruan tinggi didorong untuk dapat menghasilkan lulusan berkualitas Internasional yang dilengkapi dengan keterampilan profesional, keterampilan bahasa dan keterampilan antar budaya. Hal tersebutdapat dilihat dari program-program yang diadakan oleh AUN salah satunya ASEAN Youth yang mulai diadakan sejak tahun 2007. Program tersebut mendapat apresiasi yang cukup bagus dari para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di ASEAN.

[506]http://www.unand.ac.id/id/berita/universitas/2861-unand-adakan-sosialisasi-edukasi-publik-masyarakat-ekonomi-asean-2015, diakses pada 30 oktober 2015

Pada tahun 1996 bulan november merupakan pertemuan pengawas dewan AUN, diantara prioritas yang dibahas terdapat empat bidang yaitu, pertukaran fakultas dan mahasiswa, penelitian dalam bidang ASEAN, jaringan informasi dan penelitian bersama di tingkat ASEAN.

Beberapa tahun sesudahnya, ketika Piagam ASEAN ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN pada tahun 2007, AUN memiliki tugas sebagai salah satu kunci pelaksana dari portofolio sosial budaya ASEAN. AUN melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama pendidikan perguruan tinggi dan pengembangan untuk meningkatkan integrasi regional dalam mencapai standar global. Kegiatan yang dilakukan AUN pada saat ini dapat dikategorisasikan ke dalam lima bidang mencakup : (1) pertukaran pelajar, (2) kolaborasi akademik, (3) membuat standard, mekanisme, sistem dan kolaborasi kebijakan pendidikan tinggi, (4) program pelatihan dan pengembangan, (5) membentuk *platform* daerah dan kebijakan global.[507]

Hal tersebut diatas merupakan salah satu bagian dari liberalisasi pendidikan yang membuka kesempatan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk menyambut mahasiswa asing terutama dari negara-negara anggota ASEAN. Namun pada dasarnya institusi pendidikan tinggi harus meningkatkan kulaitas fakultas, kurikulum dan fasilitasnya untuk memenuhi standar internasional. Selain itu, pendidikan tinggi juga dituntut dapat mengembangkan keterampilan baik dengan kerja sama dengan institusi atau pihak lain maupun dengan pengembangan unit kegiatan mahasiswa.Sehingga diharapkan dapat tercipta SDM yang terdidik dengan

[507]http://www.aunsec.org/ourhistory.php, diakses pada tanggal 30 November 2015

keterampilan yang terlatih. Dengan bergabungnya Indonesia nanti sebagai anggota Masyarakat ASEAN 2015, akan banyak perubahan yang dialami Indonesia.[508]

BAB III

KESIMPULAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki kekuatan dalam menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN. Hal ini memberikan pengaruh positif demi meningkatkan produktifitas di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat perguruan tinggi. Masyarakat ASEAN dapat menggunakan pendekatan tiga pilar komunitas yang dimiliki. Tiga pilar ini diantaranya komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi, komunitas sosial dan budaya ASEAN. Ketiga pilar tersebut menjadi suatu tujuan dalam terbentuknya suatu kawasan yang kuat. Diawali dari salah satu program dari ASEAN *Social Cultural Community* (ASCC) yang terkait dengan *human development*, yang mana terdapat enam program pada ASEAN *Socio-Cultural Community* Blueprint (ASCCB). Aspek komunitas sosial budaya ASEAN (ASCC) memiliki peran yang signifikan dalam hal mensosialisasikan MEA. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan antar jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang dimaksudkan sosialisasi antar jajaran pemerintah disini adalah upaya untuk penyesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah agar kedepannya selaras dengan visi dan misi terbentuknya ASEAN

[508] http://unihaz.ac.id/id/page/peran-dan-strategi-pendidikan-tinggi-dalam-menghadapi-aec-2015, diaksespada 30 November 2015

Community. Sementara sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan segenap masyarakat, adalah dalam upaya memberikan gambaran yang menyeluruh dan pemahaman yang cukup mengenai ASEAN, sehingga dengan demikian dapat menggugah *we feeling* masyarakat terhadap ASEAN.Konsep sinergisitas, regionalisme dan komunitas disini digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunitas perguruan tinggi berfungsi untuk mensosialisasikan MEA 2015.

Dalam aspek komunitas sosial budaya, terdapat aspek pendidikan yang diharapkan mampu menopang *ASEAN Community 2015*. Sebelumnya, pada tahun 1995, ASEAN memiliki jaringan pendidikan tinggi, yakni *ASEAN University Network* (AUN). AUN sebagai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ke-4 ASEAN pada tahun 1992 silam di Hanoi. *Hanoi Plan of Action* menyatakan untuk memperkuat ASEAN University Network (AUN) dan mentransformasikan ke dalam ASEAN *University*.

Fungsi AUN ini tidak lain adalah untuk mempercepat solidaritas danpengembangan identitas regional melalui promosi pengembangan sumber daya manusia dengan jalan penguatan jaringan yang sudah ada di tingkat universitas dan institusi pendidikan unggulan di kawasan. Pendidikan menjadi salah satu langkah utama yang dilakukan oleh aktor-aktor dari perguruan tinggi yang tergabung dalam ASEAN *University Network* (AUN) untuk mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015. Pembentukan jaringan ini dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui jaringan dengan beberapa unversitas di kawasan Asia Tenggara. AUN melaksanakan program dan kegiatan untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama pendidikan perguruan tinggi dan pengembangan untuk meningkatkan integrasi regional dalam

mencapai standar global. Kegiatan yang dilakukan AUN pada saat ini dapat dikategorisasikan ke dalam lima bidang mencakup : (1) pertukaran pelajar, (2) kolaborasi akademik, (3) membuat standard, mekanisme, sistem dan kolaborasi kebijakan pendidikan tinggi, (4) program pelatihan dan pengembangan, (5) membentuk *platform* daerah dan kebijakan global. Akan tetapi hasil dari jaringan ini tidak bisa dihasilkan dalam waktu yang cepat karena kondisi ini melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang berkecimpung dalam dunia akademis. Aktor-aktor yang dimaksud disini yaitu perguruan tinggi atau universitas dan tenaga pengajar setingkat perguruan tinggi atau dosen yang diharapkan bisa mensosialisasikan Masyarakat ASEAN 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Capece, Guendalina Att all. 2009. “Online Communities Serving Territorial Communities: The M8 Case Study”. 9th Global Conference on Business & Economics (October 16-17, 2009 Cambridge University, UK) hal 7.

CPF Luhuma,dkk, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI

C.P.F.Luhuma, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2011, hal.16

Stoner, J. A. F. and Charles Wankel. 1986. *Management.* 3 d, Prentice Hall, International Inc. London.

Jurnal :

Smith, M. K. (2001) 'Community' in *the encyclopedia of informal education*,http://www.infed.org/community/community.htm.,

Emmanuel Adler and Michael Barnett, Security Communities (1998),http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Adler_Barnett_1998.pdf

Internet :

http://indonesia2013.com/2011/04/setiap-bangsa-memiliki-ciri-ciri-yang.html, diakses pada 29 oktober 2015

http://gorontalopost.com/2015/03/20/kampus-punya-peran-dalam-hadapi-mea/, diakses pada 30 oktober 2015

http://www.unand.ac.id/id/berita/universitas/2861-unand-adakan-sosialisasi-edukasi-publik-masyarakat-ekonomi-asean-2015, diakses pada 30 oktober 2015

http://www.aunsec.org/ourhistory.php, diakses pada tanggal 30 November 2015

http://unihaz.ac.id/id/page/peran-dan-strategi-pendidikan-tinggi-dalam-menghadapi-aec-2015, diaksespada 30 November 2015

http://www.aunsec.org/aunmemberuniversities.php

Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Intelektual dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN

Diansari Solihah Amini, S.IP, M.A
(dian_amini@yahoo.co.id)

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Respati Yogyakarta

ABSTRAK

Dalam penulisan yang berjudul Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Intelektual dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN ini, penulis memfokuskan pada pendapat Foucault mengenai *knowledge is power*. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengikat dan mempengaruhi pihak lain, sementara itu pengetahuan merupakan alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih besar. Dengan menggunakan relasi antara kekuasaan dan pengetahuan tersebut, penulis menguraikan bahwa sebagai institusi pendidikan yang bersifat legal formal, maka Perguruan Tinggi dengan kewenangannya memiliki kemampuan untuk mengikat, mempengaruhi dan mempunyai posisi strategis dalam berbagai lapisan masyarakat untuk turut serta berupaya mewujudkan agenda negara dengan mendasarkan pada pengetahuan sebagai sumber kekuasaannya. Perguruan Tinggi secara *legitimate* dapat berperan sebagai agen intelektual di bawah kontrol negara melalui berbagai bentuk pemikiran dan kegiatan akademis yang ditujukan untuk melaksanakan sosialisasi Masyarakat ASEAN kepada masyarakat.

***Keywords* : pengetahuan, kekuasaan, institusi pendidikan, agen intelektual, sosialisasi masyarakat**

Pendahuluan

Pelaksanaan *ASEAN Community*/Komunitas ASEAN tinggal menunggu waktu. Tentunya banyak yang harus dipersiapkan oleh masing – masing negara anggota, termasuk Indonesia. Sosialisasi tentang Masyarakat ASEAN kepada

masyarakat sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak yang terkait dengan agenda besar dari organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini. Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyebaran pengetahuan mengenai Masyarakat ASEAN adalah Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi diharapkan dapat berperan sebagai aktor strategis dalam pelaksanaan sosialisasi Masyarakat ASEAN. Kedudukan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki posisi penting dalam masyarakat menjadikan Peguruan Tinggi dapat memposisikan dirinya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan Tridharma kepada masyarakat, yang tidak hanya bertanggungjawab terhadap pendidikan generasi muda yang berstatus sebagai mahasiswa tetapi juga berkontribusi kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya.

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[509] Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.[510] Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[511] Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.[512] Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.[513]

Dengan demikian, Tridharma merupakan kewajiban dari Perguruan Tinggi sebagai badan Pendidikan Tinggi yang telah diberikan ijin dan disahkan oleh negara untuk melaksanakan pendidikan dalam lingkungan masyarakat. Melalui Tridharma,

[509] UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9
[510] *Ibid.*, Ayat 10
[511] *Ibid.*, Ayat 11
[512] *Ibid.*, Ayat 12
[513] *Ibid.*, Ayat 13

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kemudian dikembangkan oleh sivitas akademika. Hal ini juga merupakan sebuah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi sehingga dapat tumbuh menjadi agen yang berperan besar terhadap perubahan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, maka Perguruan Tinggi yang terdiri dari sivitas akademika tidak diragukan lagi kapasitasnya untuk disebut sebagai agen intelektual dan agen perubahan.

Terkait dengan pelaksanaan Komunitas ASEAN pada akhir tahun 2015, maka sosialisasi Masyarakat ASEAN merupakan salah satu agenda negara yang dapat dimanfaatkan oleh Perguruan Tinggi sebagai pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dapat mendorong Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan untuk turut berperan mencapai terwujudnya agenda negara mensosialisasikan Masyarakat ASEAN kepada masyarakat. Posisi Perguruan Tinggi sebagai agen intelektual tentu akan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat karena Perguruan Tinggi memiliki kedudukan penting dan terpercaya di lingkungan masyarakat sebagai pusat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Relasi antara Pengetahuan dan Kekuasaan

Michel Foucault memperkenalkan tentang kaitan antara wacana, pengetahuan dan kekuasaan. Hal tersebut menggambarkan hubungan yang erat antara bahasa dan realitas. Bahasa di sini berarti adalah wacana yang merupakan pengetahuan yang terstruktur. Menurut Foucault, berbicara tentang wacana, berarti berbicara tentang aturan-aturan, praktik-praktik yang menghasilkan pernyataan-pernyataan yang bermakna pada satu rentang historis tertentu. Wacana menurut Foucault berkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan Foucault berbeda dengan konsep kekuasaan yang telah ada sebelumnya. Kekuasaan bukanlah struktur politis seperti

pemerintah atau kelompok-kelompok sosial yang dominan. Kekuasaan bukanlah raja yang absolut atau tuan tanah yang tiranik.[514]

Berdasarkan argumen Foucault, mekanisme kekuasaan berlaku dalam konteks yang berbeda dimana dominasi dan otonomi berinteraksi. Foucault berpendapat bahwa mekanisme kekuasaan dalam diri individu sendiri tidak pernah dianalisis.[515] Dalam pandangan Foucault, disatu sisi, kekuasaan memiliki beberapa aspek. Kekuasaan bukan hanya instrumen untuk mempengaruhi kesadaran manusia dan untuk mereproduksi ideologi represif.[516] Foucault mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui.[517] Ciri-ciri tersebut memang tidak menjelaskan "apa itu kekuasaan?", tetapi Foucault lebih tertarik untuk melihat bagaimana kekuasaan dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran dan juga kekuasaan yang berfungsi dalam bidang-bidang tertentu. Kekuasaan Foucault bukanlah milik tetapi strategi. Dalam hal ini Foucault tidak memisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.[518]

Rezim wacana sangat berperan di dunia ilmiah atau dunia kaum intelektual, karena inti dari rezim wacana adalah rezim kebenaran. Rezim kebenaran dan kekuasaan simbolik memiliki legitimasi untuk menentukan yang benar dan yang salah, yang tabu dan yang pantas, yang gila dan yang normal. Menurut Foucault,

---

[514] Donny Gahral Adian. *Menabur Kuasa Menuai Wacana*. BASIS nomor 01-02, Tahun ke-51, Januari-Februari 2002 dalam Suma Riella Rusdiarti. 2008. Tugas Sintesis. *Struktur dan Sifatnya Dalam Pemikiran Michel Foucault*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. hal. 3.

[515] Michel Foucault. 1980. *Truth and Power* dalam C. Gordon (ed.) *Power/Knowledge*. New York : Pantheon. hal. 116 dalam Wang. *Power/Knowledge for Curriculum Theory*. University of Hawaii. hal. 6

[516] Wang, *Ibid.*

[517] Haryatmoko. *Kekuasaan melahirkan Antikekuasaan. Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault* dalam BASIS nomor 01-02, Tahun ke-51, Januari-Februari 2002 dalam Rusdiarti, hal. 4

[518] Rusdiarti, *Ibid.*

dunia intelektual sebenarnya bukanlah ruang ilmiah yang bertujuan utama pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi dunia ilmiah adalah dunia pertarungan wacana alias pertarungan kebenaran.[519]

Pengetahuan menimbulkan kekuasaan, demikian juga sebaliknya, kekuasaan menimbulkan pengetahuan. Wacana mengenai kekuasaan yang ada dalam pengetahuan ini yang kemudian dijabarkan oleh Foucault sebagai kekuasaan yang dibentuk menjadi "kebenaran". Pengetahuan merupakan sebuah bentuk yang dilanggengkan oleh pihak yang berkuasa untuk melegalkan kekuasaannya sebagai kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat. Melalui pengetahuan, masyarakat akan percaya dan tunduk patuh dengan apa yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa. Kekuasaan semacam ini tidak bersifat represif, tetapi tercermin dari dalam diri manusia sendiri, terlepas dari sadar atau tidaknya manusia tesebut pada kepatuhannya terhadap pengetahuan yang dia percayai sebagai sebuah kebenaran.

Dalam pandangan Foucault, efek kekuasaan tidak seharusnya selalu dikategorikan dalam istilah yang bernilai negatif. Sebaliknya, kekuasaan menghasilkan realitas; menghasilkan kewenangan terhadap maksud/tujuan dan ritual kebenaran. Individu dan pengetahuan yang dapat diperoleh sebagai hasil dari kekuasaan tersebut.[520]

Ideologi, menurut Foucault, bisa menjadi salah satu elemen dari mekanisme kekuasaan, tapi hal tersebut bukanlah merupakan keharusan dalam mekanisme ini. Sebaliknya, "pengetahuan" harus dilihat sebagai dasar dari pelaksanaan kekuasaan. Mengenai pendidikan, Foucault tidak setuju dengan ide bahwa semua praktik pendidikan didasari oleh ideologi dari minoritas, atau ide bahwa pendidikan berideologi bebas.[521] Lebih jauh dalam bidang pendidikan, Foucault menunjukkan bahwa buku pelajaran berorientasi politik, produk material yang mewakili cara

---

[519] Rusdiarti, hal. 4-5.
[520] Michel Foucault. 1991/1975. *Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan trans)* London: Penguin. hal. 194 dalam Wang, hal. 6.
[521] Wang, hal. 7

istimewa untuk melihat hal-hal, istimewa dalam pengertian untuk melihat arti kekuasaan, posisi, tradisi, dan sebagainya.[522]

Dengan demikian, pendidikan menurut Foucault merupakan sesuatu aktifitas yang dibentuk dengan berdasarkan pada kekuasaan. Pendidikan berisikan tentang beragam pengetahuan yang mengarahkan cara berpikir dan berperilaku bagi setiap individu. Hal ini yang akan mempengaruhi kelanggengan dari kekuasaan yang dibangun karena pihak yang berkuasa dapat menempatkan kepentingannya di dalam nilai – nilai yang tertuang dalam pendidikan tersebut. Pendidikan secara disadari ataupun tidak, mempunyai efek mengikat bagi setiap individu yang memperoleh pendidikan yang dimaksud. Nilai – nilai yang terkandung dalam pendidikan akan dilaksanakan secara berkelanjutan yang kelak berpotensi dipercaya sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Perguruan Tinggi sebagai aktor yang menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat dapat dikategorikan sebagai pihak yang berkuasa jika ditinjau dari relasi antara pengetahuan dan kekuasaan menurut Foucault. Ilmu pengetahuan dilihat sebagai sebuah kebenaran oleh masyarakat, sementara aktor yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya adalah Perguruan Tinggi. Dengan demikian, Perguruan Tinggi dapat disebut sebagai aktor yang juga memiliki kekuasaan, karena Perguruan Tinggi memiliki posisi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan untuk kemudian bisa diterima masyarakat sehingga layak untuk dipercaya dan diikuti sebagai tolok ukur bagi pemikiran dan perilaku masyarakat atas sebuah pemahaman mengenai “kebenaran”. Melalui cara – cara tersebut, Perguruan Tinggi memiliki kedudukan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai institusi pendidikan yang *legitimate* dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai agen perubahan dan agen intelektual dalam masyarakat.

[522] Wang, hal. 3

Dengan demikian, pemahaman mengenai "kebenaran" ini melekat pada hampir seluruh institusi pendidikan termasuk juga Perguruan Tinggi sebagai aktor yang dapat mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Melalui institusi pendidikan, masyarakat akan lebih mudah menerima pengetahuan yang dilegitimasi sebagai sebuah kebenaran karena institusi pendidikan merupakan pihak yang netral dan terpercaya serta terlepas dari kepentingan politis untuk mampu membuktikan secara logis mengenai perkembangan dan pengembangan pengetahuan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah ilmu yang dapat dibuktikan secara empiris.

ASEAN *Community* sebagai Agenda Besar Negara-negara ASEAN Di Penghujung Tahun 2015

Komunitas ASEAN merupakan sebuah kondisi yang dicita – citakan oleh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan sebuah bentuk integrasi regional di kawasan Asia Tenggara. Berawal dari Deklarasi Bangkok 1967 dan kemudian melalui serangkaian kerjasama yang intensif dalam bidang – bidang ekonomi, keamanan, pendidikan, sosial dan budaya serta berbagai tahapan kesepakatan yang telah dilalui, realisasi Komunitas ASEAN adalah proses yang telah, sedang dan akan terus diupayakan oleh segenap anggota ASEAN secara berkelanjutan, bahkan setelah diberlakukan pada tahun 2015. Ide membentuk Komunitas ASEAN tidak datang begitu saja secara tiba – tiba, akan tetapi dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang mendorong agenda pembentukan integrasi regional tersebut.

Komunitas ASEAN bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan damai, stabil, makmur yang dipersatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli. Selain itu, Komunitas ASEAN dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional.

Pembentukan Komunitas ASEAN yang didasarkan pada ketiga pilar mempunyai masing – masing tujuan antara lain : 1) Komunitas Politik dan Keamanan bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan dan juga dalam tataran internasional secara lebih luas. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka, yang berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama;[523] 2) Komunitas Ekonomi ASEAN bertujuan untuk mewujudkan integrasi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan;[524] 3) Komunitas Sosial Budaya bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan kesetiakawanan sosial yang tinggi sehingga warga ASEAN akan berkembang menjadi komunitas yang saling peduli dan berbagi. Dengan demikian, masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota sehingga dapat saling menghargai identitas nasional masing – masing dengan tetap berlandaskan pada rasa ke-kita-an *(we feeling)* sebagai sebuah kesatuan.[525]

Jika Komunitas ASEAN benar – benar direalisasikan dan berjalan dengan lancar, besar kemungkinan untuk meredam potensi konflik antar anggotanya. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dipadu dengan kondisi keamanan yang terjamin serta posisi politik yang dapat diperhitungkan dalam kancah internasional menjadikan setiap negara anggota terfokus pada pembangunan seluruh sektor secara berkelanjutan. Apalagi jika rasa ke-kita-an *(we feeling)* telah mengakar kuat dalam diri masyarakat ASEAN, tentu potensi konflik akan semakin berkurang.

Dalam rangka mencapai ASEAN *Community* 2015, sejumlah langkah – langkah diinisiasikan oleh negara anggota ASEAN, termasuk ASEAN

---

[523] *ASEAN Selayang Pandang Edisi ke 20*. 2012. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. hal. 11-12.
[524] *Ibid*., hal. 30.
[525] *Ibid*., hal. 54.

Connnectivity/Konektivitas ASEAN. ASEAN *Connectivity* merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas/keterhubungan antara masing – masing negara anggota. Menuju ASEAN *Community* 2015 tentunya diperlukan konektivitas yang sangat erat diantara segenap elemen, tidak hanya level negara akan tetapi mulai dari *stakeholders* hingga *grassroot*. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam KTT ASEAN Ke-17 di Hanoi, Vietnam, pada 28 Oktober 2010 para pemimpin ASEAN telah berhasil mencapai kesepakatan dan mengadopsi *Master Plan of ASEAN Connectivity* (MPAC) yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempersempit kesenjangan pembangunan dengan meningkatkan keterkaitan fisik, kelembagaan dan hubungan antara manusia *(physical, institutional, and people-to-people linkages)* di kawasan Asia Tenggara.

Sebagai tahapan fundamental dalam mewujudkan Komunitas ASEAN yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan keterhubungan di antara negara-negara ASEAN dengan sesama anggota dan dengan dunia internasional, MPAC sebagai dokumen strategis dan rencana aksi bertujuan untuk menjadi acuan rencana aksi pelaksanaan dalam tiga pilar ASEAN *Connectivity*, yakni pembangunan infrastruktur fisik *(physical connectivity)*, kelembagaan, mekanisme, dan proses yang efektif *(institutional connectivity)*, dan penguatan antar-penduduk yang ditandai dengan peningkatan mobilitas masyarakat ASEAN *(people-to-people connectivity)*. Konektivitas ASEAN akan sangat membantu dalam mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, memfasilitasi pasar tunggal dan jaringan produksi yang lebih terintegrasi, mendorong perdagangan antar-kawasan, menarik lebih banyak penanaman modal, serta mempromosikan dan memperkuat ikatan-ikatan budaya dan historis yang dimiliki oleh masing-masing negara.[526] Skema tentang gagasan ASEAN *Connectivity* dan kaitannya dengan ASEAN *Community* dapat dilihat pada gambar berikut:

[526] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6033&Itemid=29 diakses 20 Oktober 2013

Gambar 1 : Keterkaitan Asean *Connectivity* dan Asean *Community*[527]

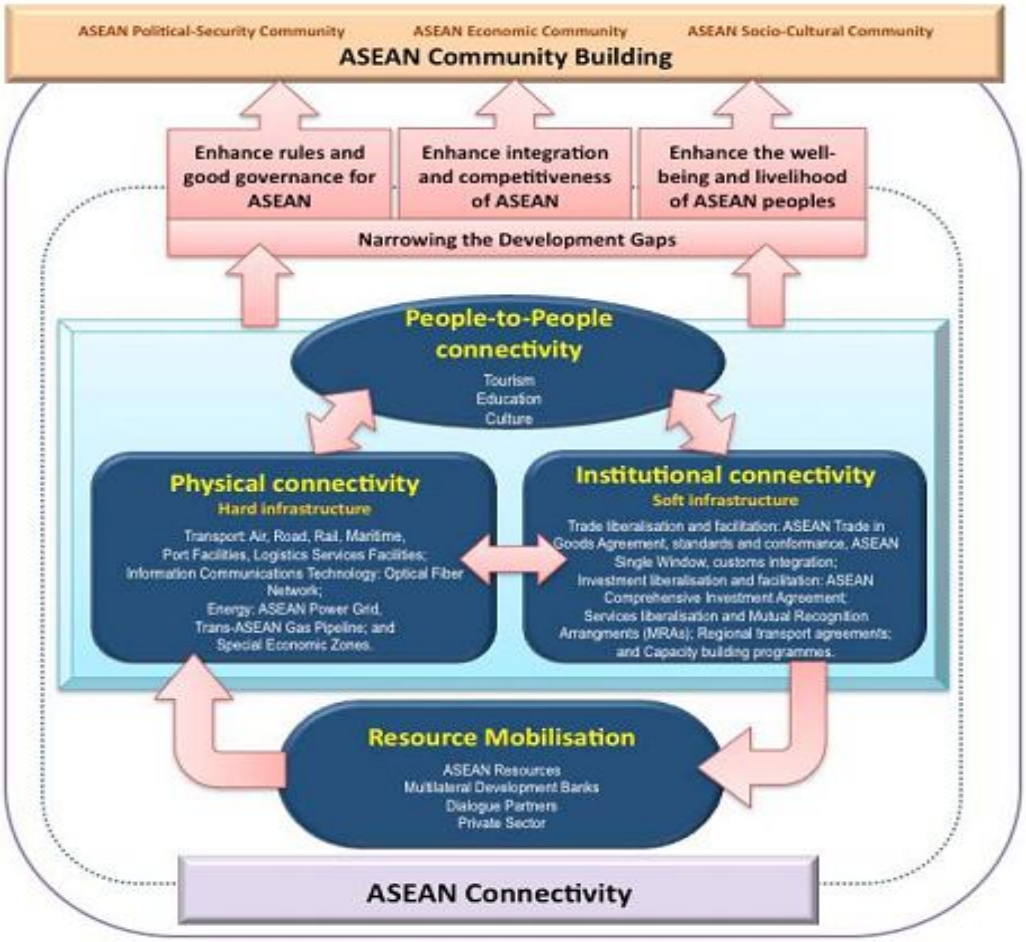

Source: Modified from ERIA

Konektivitas ASEAN dapat dicapai dengan meningkatkan konektivitas fisik dan konektivitas kelembagaan sehingga mengurangi biaya investasi dan perdagangan internasional barang dan jasa, termasuk biaya *link* jaringan dan biaya *set-up* jaringan. Peningkatan konektivitas fisik dan kelembagaan dapat berkontribusi pada penyempitan kesenjangan pembangunan dengan memperluas batas-batas produksi/distribusi jaringan dan menambah *people-to-people connectivity*, yang selanjutnya akan memelihara rasa kebersamaan di ASEAN. Dengan penyempitan

[527] *Master Plan on Asean Connectivity*. May 2013. Jakarta: ASEAN Secretariat. hal. 3.

kesenjangan pembangunan, salah satunya dapat meningkatkan integrasi dan daya saing ASEAN.[528]

Peran Perguruan Tinggi Dalam Mensosialisasikan Masyarakat ASEAN

Sesuai dengan skema ASEAN *Connectivity* tersebut, keterhubungan antar masyarakat ASEAN (*people to people connectivity*) dapat diupayakan oleh semua pihak, baik individu maupun institusi, termasuk Perguruan Tinggi. Seperti yang telah dijabarkan pada skema sebelumnya, bidang pendidikan merupakan salah satu instrumen dalam *people to people connectivity* yang dapat dilakukan untuk menghubungkan antara negara anggota ASEAN disamping bidang pariwisata dan budaya. Hal ini dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi sebagai agen intelektual yang kelak akan mempermudah sosialisasi Masyarakat ASEAN dan dapat berkontribusi dalam menjalin kerjasama antara negara anggota ASEAN.

Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan yang *legitimate* mempunyai posisi yang strategis untuk menjalankan perannya sebagai agen intelektual dalam melaksanakan sosialisasi Masyarakat ASEAN. Sesuai dengan konsep "*Knowledge is Power"* yang dikemukakan oleh Foucault, maka Perguruan Tinggi mempunyai kekuasaan sebagai perpanjangan tangan dari negara untuk mensosialisasikan Masyarakat ASEAN sebagai sebuah pengetahuan yang nantinya dapat dikonstruksikan kepada masyarakat sebagai suatu yang bernilai baik dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh sepuluh (10) negara untuk membentuk Komunitas ASEAN sebagai agenda besar yang dapat menyatukan negara anggota ASEAN dalam sebuah integrasi regional yang saling menguntungkan baik bagi negara ataupun masyarakat yang bersangkutan.

Kekuasaan bersifat mengikat dan mempengaruhi pihak lain sebagai sasaran dari kekuasaan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Foucault, kekuasaan

[528] *Master Plan on ASEAN Connectivity*, hal. 2-3.

tidak bersifat represif, tetapi justru telah tertanam dalam diri manusia tanpa disadari, sementara itu pengetahuan merupakan alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih besar. Perguruan Tinggi dengan kewenangannya memiliki kemampuan untuk mengikat, mempengaruhi dan mempunyai posisi strategis dalam berbagai lapisan masyarakat untuk membangun suatu opini publik bahkan membangun pengetahuan sebagai suatu nilai yang diyakini menuju kebenaran. Dalam hal ini, nilai ke-kita-an (*we feeling*) merupakan nilai yang mengandung kebaikan secara moral bagi terbangunnya Komunitas ASEAN. Nilai tersebut menjadi dasar bagi pembangunan kultural dalam rangka proses integrasi ASEAN.

Perguruan Tinggi dapat turut serta berupaya mewujudkan agenda negara dengan mendasarkan pada pengetahuan sebagai sumber kekuasaannya. Dalam hal ini, Perguruan Tinggi dapat mensosialisasikan Masyarakat ASEAN dengan membentuk nilai moral dan kebaikan yang terkandung dalam pilar – pilar Komunitas ASEAN. Nilai ini yang kemudian disebarkan kepada berbagai lapisan masyarakat sebagai suatu pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya untuk negara, tetapi juga masyarakat. Dengan menggunakan pengetahuan mengenai Komunitas ASEAN, maka Perguruan Tinggi sebagai institusi *legitimate* dan bebas dari unsur – unsur politis serta terpercaya secara akademis dapat diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. Dengan demikian, Perguruan Tinggi tidak hanya berperan sebagai agen intelektual namun juga berperilaku sebagai aktor yang turut “berkuasa” di bawah kontrol negara.

Adapun yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk turut membantu mewujudkan agenda besar di penghujung tahun 2015 tersebut melalui berbagai program yang dapat dilaksanakan antara lain dapat dikategorikan sesuai dengan kegiatan Tridharma yang menjadi kewajiban Perguruan Tinggi. Beberapa hal yang dapat diupayakan dalam rangka mensosialisasikan Masyarakat ASEAN yaitu melalui :

1. Penelitian

Dalam bidang penelitian, Komunitas ASEAN merupakan pokok kajian yang dapat diteliti, baik secara studi lapangan ataupun studi analitis. Selain itu, keterhubungan *people to people* antara negara anggota dapat mendorong para peneliti untuk berkolaborasi bersama menghasilkan karya ilmiah antar institusi pendidikan yang beranggotakan masyarakat negara – negara anggota. Dengan demikian, masyarakat antar negara dapat menjalin kerjasama yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga regional.

2. Pengabdian kepada masyarakat

   Komunitas ASEAN merupakan salah satu tema yang sering menjadi dasar bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam beberapa tahun ini. Upaya untuk mensosialisasikan Komunitas ASEAN telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk sivitas akademika ketika melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai Komunitas ASEAN tentunya harus diiringi dengan pengetahuan yang cukup mengenai sejarah, dasar dan proses pembentukannya, karena dengan cara tersebut, rasa ke-kita-an atau *we feeling* dapat lebih mudah terbangun di kalangan masyarakat.

3. Pembelajaran

   Dalam bidang pembelajaran, pengetahuan mengenai ASEAN dan seluruh agendanya yang terkait dapat diberikan dalam bentuk sebuah matakuliah khusus ataupun berupa materi yang dimasukkan kedalam beberapa matakuliah tertentu. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat bahwa sampai saat ini Komunitas ASEAN masih jarang disosialisasikan secara massif oleh pemerintah kepada masyarakat, bahkan di tingkat institusi pendidikan pun tidak banyak yang mengenal tentang Komunitas ASEAN secara mendalam. Oleh karena itulah, matakuliah mengenai ASEAN patut untuk diberikan oleh Perguruan Tinggi dengan memasukkannya ke dalam kurikulum agar

dapat dipahami dan dihayati secara berkelanjutan oleh sivitas akademika.

Beberapa hal tersebut juga dapat dilakukan di institusi pendidikan yang lain, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah karena kelak Komunitas ASEAN akan berdampak langsung pada sistem sosial masyarakat, tidak hanya mengacu kepada tiga (3) pilar yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang berpengaruh pada kesiapan masyarakat untuk menghadapi Komunitas ASEAN. Diharapkan sebagai agen intelektual dan agen perubahan, institusi pendidikan yang beranggotakan sivitas akademika dapat melakukan beberapa program dan kegiatan yang nantinya dapat membantu masyarakat umum dalam memahami, menghayati dan mempersiapkan diri untuk menyambut komunitas ASEAN.

Terkait dengan kurikulum, Pemerintah juga harus mendukung upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan karena peraturan tentang pemberlakuan kurikulum juga merupakan kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tanpa dukungan legal dalam bentuk peraturan resmi dari pemerintah, segala upaya tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, institusi pendidikan harus mempunyai dasar aturan hukum yang jelas mengenai berbagai kegiatan akademis yang melibatkan unsur kajian dan materi terkait komunitas ASEAN.

Kurikulum menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh institusi pendidikan, yang akan berdampak pada pengetahuan yang akan diperoleh siswa ataupun mahasiswa. Pengetahuan ini selanjutnya akan membentuk pola pikir dan pola perilaku dari siswa/mahasiswa tersebut. Jika kurikulum mengenai Komunitas ASEAN telah dilegalkan melalui Undang – Undang atau peraturan resmi dari Pemerintah, maka setiap Perguruan Tinggi maupun institusi pendidikan yang lain dapat dengan mudah untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat dengan mensosialisasikan pengetahuan terkait dengan Komunitas ASEAN yang sarat akan nilai – nilai moral yang menjadi dasar berpikir dan berperilaku bagi keterhubungan

antara berbagai aktor, baik negara ataupun individu yang berasal dari masing – masing negara anggota ASEAN.

Seperti pendapat yang telah dipaparkan oleh Foucault, kekuasaan tidak hanya bermakna negatif, tetapi juga dapat bernilai positif. Kekuasaan semacam ini dapat dimiliki oleh negara dengan mengoptimalkan peranan dari aktor lain, dalam hal ini Perguruan Tinggi. Melalui bidang pendidikan, pengetahuan lambat laun akan dianggap sebuah nilai yang mengandung unsur kebenaran dan kemudian melanggengkan "kekuasaan" dalam artian positif, yaitu demi tercapainya kepentingan negara dalam rangka mewujudkan agenda bersama diantara negara – negara anggota ASEAN menuju proses integrasi regional Asia Tenggara melalui ASEAN *Community*.

Bibliografi

Rusdiarti, Suma Riella. 2008. Tugas Sintesis. *Struktur dan Sifatnya Dalam Pemikiran Michel Foucault*. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Wang. *Power/Knowledge for Curriculum Theory*. University of Hawaii.

ASEAN Selayang Pandang Edisi ke 20. 2012. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.

Master Plan on Asean Connectivity. May 2013. Jakarta: ASEAN Secretariat.

UU No. 12 Tahun 2012

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6033&Itemid=29

Analisa eksistensi dan kedaulatan negara dalam dinamika hubungan Masyarakat Ekonomi ASEAN

(Sebuah kajian berbasis *Complexity Theory*)

Dr. Tatok Djoko Sudiarto, MIB & Emil Radhiansyah, M.Si

(Universitas Paramadina, Jakarta)

Cendekiawan dalam Hubungan Internasional melihat interaksi yang terjadi antar negara merupakan suatu bentuk hubungan yang didasarkan kepada adanya kepentingan yang dimiliki dan setiap negara berusaha untuk memenuhinya melalui kerjasama atau konflik. Penelaahan terhadap hal ini adalah bahwa untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam kerangka kerjasama negara-negara tersebut menyamakan visi dan misinya untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang saling bertentangan, namun bila tidak terelakkan maka konflik menjadi salah satu jalan bagi tercapainya kepentingan nasional tersebut. Bagi kalangan post-positivist melihat bahwa berkembangnya bentuk hubungan antar negara terjadi sebagai akibat interaksi yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara dengan berlandaskan pada situasi dan kondisi domestik, yang membentuk identitas negara.terbentuknya identitas negara tersebut menentukan tarik menarik kepentingan antar negara yang pada akhirnya menghasilkan identifikasi terhadap kesamaan identitas. Manuel Delanda melihat bahwa dunia internasional diibaratkan merupakan organisme dalam ilmu biologi. Organisme tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda manjadi predator satu sama lain namun dalam suatu lingkungan (organ) yang sama organisme justru saling melengkapi dan bertindak sebagai satu kesatuan

sehingga bagi Delanda, fungsi dari institusi sosial adalah bekerja dalam suatu bentuk harmoni untuk kepentingan bersama masyarakatnya.

ASEAN walaupun merupakan bentuk dari Organisasi Internasional regional dalam sebuah struktur masyarakat ia berfungsi sebagaimana yang disebut oleh Delanda yaitu Institusi Sosial. Penelitian ini hendak melihat bentuk hubungan yang terjadi dalam ASEAN dalam mencapai kepentingannya yang dicantumkan dalam suatu Komunitas yang terdiri dari tiga pilar, ASEAN *Political Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio Cultural Community* (ASCC). Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat berjalan berkesinambungan yang dimulai dengan pilar AEC pada akhir 2015. Dihadapkan pada kompetisi ekonomi global, melalui regionalime ASEAN diharapkan menjadi semakin kuat, namun tantangan yang dihadapi merujuk terhadap bentuk pengambilan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan domestik semakin menguat. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan suatu pertanyaan mampukah struktur yang dibangun ASEAN melalui tiga pilarnya bekerja dalam harmonisasi.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dicoba untuk meninjau dari suatu bentuk hubungan kompleksitas atau lebih dikenal melalupi teori kompleksitas (*ComplexitiyTheory*). Hubungan antar negara anggota ASEAN yang merupakan unit-unit mandiri menciptakan suatu struktur dimana mereka disatukan dan bagaikan roda gigi yang merupakan rotor bagi satu sama lain namun pada suatu sirkumstansi tertentu tetap bergerak dalam unit –unit yang mandiri. Eksistensi aktor non negara (NGO, *mini company*, individu, dan lain-lain) menjadi pelengkap dinamis pola

hubungan masyarakat. Dengan tidak adanya pihak yang mengikrarkan sebagai pihak terkuat maka pola hubungan diisi oleh proses saling bersinergi atau mempertimbangkan kekuatan lain. Hasil yang diharapkandari analisa ini adalah posisi dan kedaulatan negara dalam hubungan dinamika kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN perlu direposisi dan mengadopsi paradigma baru demi terjaganya sinergitas antar aktor demi tujuan bersama yang diharapkan

Kata Kunci : ASEAN *Community*, *Complexity Theory*, ASEAN *Economic Community*, Kompetisi.

Pendahuluan

Perubahan pada kondisi internal dan eksternal ASEAN membutuhkan perubahan yang signifikan pada pola hubungan antar pemerintahan negara-negara ASEAN dan juga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di tiap-tiap negara ASEAN dan juga akan melebar dengan dibukanya sekat negara saat AEC dibuka di tahun ini. Pembukaan sekat antar negara akan memberikan dampak yang besar terhadap pola hubungan antar negara, negara dengan masyarkat dan juga masyarakat dengan masyarakat kawasan regional ini. Dinamika internal dan eksternal menjadi stimulus bagi keterbukaan baru antar elemen untuk tidak berhenti belajar (learning process) dan saling menghargai tanpa merasa lebih mendominasi karena tidak ada yang memiliki kekuatan absolut penentu suatu keputusan.

Teori kompleksitas dibawa untuk menganalisa fenomena saling menyadari potensi kekuatan tiap elemen sistem sehingga potensi dominasi terlihat semakin meluntur.Dinamika yang disadari semakin berkembang pada internal elemen yang

ada pada sistem dan juga dinamika hubungan antar elemen sistem membuat kajian ini menarik untuk diangkat dalam suatu diskusi.

Teori Kompleksitas (complexity theory)

Teori kompleksitas menawarkan cara baru berpikir tentang beberapa dilema klasik dalam ilmu sosial, khususnya, terlibat dengan ketegangan antara pencarian teori umum dan keinginan untuk pemahaman kontekstual dan spesifik (Calhoun 1998; Griffin 1993; Haydu 1998; Kiser 1996 ; Kiser dan Hechter 1991), yang terletak di jantung ketegangan antara realis (Archer 1995; Bhaskar 1997; Byrne 1998; Sayer 1992; Somers 1998) dan pendekatan post modern (Cilliers 1998; DeLanda 2000; Lyotard 1978). Teori kompleksitas menawarkan satu set baru alat konseptual untuk membantu menjelaskan keragaman dan perubahan modernitas kontemporer menjalani globalisasi. Ini merupakan tantangan untuk bentuk-bentuk tradisional lebih dari teorisasi dalam sosiologi dan menawarkan cara-cara baru berpikir tentang kesenjangan beragam dan perubahan sosial di era global.Teori kompleksitas menghadapi tantangan postmodern untuk metanarratives modernis dalam mengatasi masalah keragaman dan kompleksitas yang lebih memadai dan merespon tanpa menyerah pencarian untuk menjelaskan sebab-akibat dan menganalisanya.

Penting untuk perkembangan teoritis adalah memikirkan kembali konsep sistem, menolak asumsi lama tentang keseimbangan dalam mendukung analisis proses dinamis dari sistem yang jauh dari keseimbangan, serta menentukan hubungan dari suatu sistem dengan lingkungannya. Dengan demikian menyediakan wahana baru untuk pertanyaan empiris dalam keragaman dan perubahan sosial.

Dalam hal ini, teori kompleksitas memiliki banyak persamaan dengan perkembangan realisme dalam pemikiran sosiologis (Archer 1995; Bhaskar 1979, 1989, 1997; Sayer 1992). Berbagi keprihatinan dengan proses 'munculnya' dan dari tingkat yang berbeda juga mode abstraksi. Teori kompleksitas menawarkan cara melebihi polarisasi dengan perkembangan kedalaman ontologis yang tidak mengorbankan kekuatan yang lebih riil. Ini memfasilitasi pengembangan beberapa kekhawatiran sosiologi klasik, seperti menggabungkan pemahaman dari kedua struktur individu dan sosial, yang tidak menyangkal signifikansi dari refleksivitas diri dari subjek manusia sementara belum teorisasi perubahan totalitas sosial.

Dalam konteks analisis empiris dari interkoneksi skala besar yang terlibat dalam proses globalisasi, kebutuhan teoritis ini menjadi lebih jelas. Teori kompleksitas menawarkan perkembangan baru dalam konseptualisasi dan teorisasi sistem. Namun, munculnya kekhawatiran dengan proses global telah menyebabkan kebangkitan minat dalam proses skala besar, dan ketimpangan bersama perbedaan, untuk memahami makna dan implikasi dari globalisasi (Benhabib 1999; Castells 1996, 1997, 1998). Dalam konteks baru ini, saatnya untuk berpikir lagi tentang kosakata konsep tersedia untuk teori sosial untuk mengatasi masalah pada skala besar, tingkat sistemik dan global.Dalam konteks ini bahwa penyelidikan relevansi dan kegunaan dari konsep yang dikembangkan dalam teori kompleksitas menjadi sangat relevan (Urry 2003). Dengan demikian tepat waktu untuk menyelidiki kemajuan yang telah terjadi dalam teori kompleksitas dalam disiplin lain untuk melihat apakah dan jika demikian bagaimana ini mungkin membantu pengembangan berpikir dalam sosiologi.

Teori kompleksitas bukan pemikiran tunggal yang koheren namun didasari oleh berbagai tradisi dan pendekatan yang berbeda. Salah satu perbedaan utama adalah sejauh mana program penelitian tradisional ilmiah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi janji teori kompleksitas, seperti yang disarankan dalam sekolah Santa Fe, atau sejauh mana implikasi dari non-linearitas dan unknowability memerlukan framing epistemologis baru dari usaha ilmiah, seperti yang disarankan oleh Prigogine. Perbedaan ini sejajar dalam interpretasi yang berbeda dari teori kompleksitas dalam sosiologi, antara, di satu sisi, Byrne (1998) yang berpendapat untuk kompatibilitas yang melekat dari teori kompleksitas dan realisme, dan di sisi lain, Cilliers (1998) yang berpendapat untuk kompatibilitas yang melekat dari teori kompleksitas dan postmodernisme. Atau, seperti yang dikatakan di sini, teori kompleksitas melampaui polaritas tua tersebut. Teori kompleksitas telah menginspirasi dua cara utama mengatasi isu perubahan dan keanekaragaman. Yang pertama melibatkan konsep co-evolusi sistem adaptif kompleks, di mana konsep co-evolusi menggantikan setiap gagasan sederhana dari dampak directional tunggal.Yang kedua melibatkan gagasan saltation, tiba-tiba, titik balik penting, di mana perubahan kecil, dalam konteks sistem yang kompleks, menimbulkan bifurcations dan jalan baru pembangunan yang mandiri. Ini dapat dipahami baik sebagai bersaing rekening perubahan, mencerminkan ketegangan antara berbagai cabang kompleksitas dan teori chaos, yang pertama terkait dengan pemikiran Santa Fe dan yang kedua dengan pemikiran Prigogine.

Sebuah kondisi dari inti teori kompleksitas adalah strategi analitik anti-reduksionis sehingga lebih baik membuat konsep secara bersamaan dinamis dan sistematis antar-hubungan antara fenomena.Namun beberapa fitur dari konsep sistem, terutama yang dari sistematis dan diri mereproduksi antar-hubungan, tetap sangat diperlukan untuk semua jenis sosiologi.Bahkan ketika konsepsi sistemik tidak termasuk eksplisit, mereka sering diselundupkan ke dalam analisis.Teoritikal baru dari sistem dalam teori kompleksitas radikal mengubah konsep yang membuatnya berlaku untuk paling dinamis dan tidak merata mengubah fenomena. Beberapa perubahan ini adalah hasil dari konseptualisasi ulang cukup sederhana, seperti mengganti konsepsi bagian dan keseluruhan dengan gagasan bahwa setiap sistem mengambil semua sistem lain sebagai lingkungannya, sementara yang lain konsepsi yang lebih kompleks dari hubungan antara sistem.

Konsep sistem merupakan pusat perkembangan terakhir dalam teori kompleksitas. Dalam disiplin biologi, terutama melalui karya Maturana dan Varela (1980), cybernetics, matematika dan komputasi, pengembangan konsep sistem telah berjalan dengan cepat dengan serangkaian mendalam ulang konstruksi dari gagasan. Sebaliknya, di Sosiologi, penggunaan konsep sistem telah tetapi sedikit dikembangkan dalam tiga dekade terakhir dan penggunaannya marjinal dan kontroversial dalam disiplin kontemporer. Sementara banyak dari yang lamabentuk sistem berpikir memang memiliki masalah serius, kemajuan baru dalam teori kompleksitas menyediakan alat dengan yang ini dapat diatasi.Sebuah kerja konsep sistem dalam teori sosial dalam terang teori kompleksitas baru adalah penting.Sebuah konsep revisi sistem sangat diperlukan untuk proyek sosiologis, secara umum, dan

analisis globalisasi, khususnya. Namun demikian, ada isu-isu penting dalam penerjemahan dan penerapan konsep sistem antar disiplin ilmu yang berbeda yang harus hati-hati ditangani, daripada mengandaikan bahwa penerapan konsep adalah sama dalam konteks yang berbeda.

Konsep sistem yang dibutuhkan dalam analisis sosiologis karena berbagai alasan, termasuk membuat rasa lebih baik dari hubungan antara berbagai tingkat fenomena, misalnya, dalam kaitannya dengan pengertian tentang kemunculan dan jalur ketergantungan. Secara khusus, analisis globalisasi mengharuskan pertanyaan dari systemness ditangani karena peristiwa di salah satu bagian dari dunia mempengaruhi orang-orang di negara lain. Untuk memahami globalisasi perlu ada beberapa konsepsi interkoneksi sistematis aktual atau potensial di tingkat global.

Dalam ilmu-ilmu kompleksitas telah bekerja sangat luas pada pengembangan konsep sistem, sementara di Sosiologi selama tiga dekade terakhir hanya sedikit kerja telah dilakukan mengembangkan konsep.Hal ini setidaknya sebagian sebagai akibat dari penolakan tajam dari kedua Parsons struktural-fungsionalisme dan Marxisme, yang masing-masing telah memberikan kontribusi pemikiran sistem berbasis Sosiologi. Dalam hujan kritik dari 'meta-narasi' (Lyotard 1978), dan pergantian untuk kerangka postmodernis acuan, ada sedikit antusiasme dalam arus utama disiplin untuk pengembangan konsep sistem.

Teori kompleksitas memungkinkan kita untuk mengembangkan kekuatan sosiologi klasik.Untuk mengejar pengembangan lebih lanjut dari konsep sistem di Sosiologi hal ini berguna untuk memeriksa secara singkat penggunaan tradisional dalam Sosiologi klasik.Hal ini memungkinkan posisi yang lebih baik dari inovasi

dalam konsep sistem diinformasikan oleh teori kompleksitas dalam kaitannya dengan sekolah-sekolah utama pemikiran dalam Sosiologi.

Ada dua fitur yang saling terkait kunci dari konsepsi baru dari sistem yang berangkat dari bentuk yang lebih tua dari sistem teorisasi yang penting: pertama, sifat sistem sebagai diri-mengorganisir bersama-sama dengan perbedaan sistem / lingkungan; dan kedua proses perubahan berbagai dikonseptualisasikan sebagai non-linear, sebagai co-evolusi sistem adaptif kompleks dalam mengubah lanskap kebugaran, ketergantungan jalan dan saltation, diselingi kesetimbangan dan gelombang.

Bahwa sistem adalah self-reproduksi adalah definisi dari sistem.Awal bekerja di teori kompleksitas pada konseptualisasi sistem sebagai mengorganisir diri terinspirasi oleh karya Maturana dan Varela (1980). Dalam proses self-reproduction system dipandang sebagai self-organizing dan self-definition. Sistem ini memiliki proses internal yang secara internal terhubung dan mereproduksi sistem. Fitur ini disebut autopoietic oleh Maturana dan Varela (1980). Autopoiesis adalah jaringan proses, di mana masing-masing komponen berpartisipasi dalam produksi atau transformasi komponen lain dalam jaringan. Dengan cara ini seluruh jaringan terus kembali membuat sendiri. Sistem ini diproduksi oleh komponen dan pada gilirannya menghasilkan komponen-komponen.Ini termasuk penciptaan batas yang menentukan domain operasi jaringan dan dengan demikian mendefinisikan sistem sebagai unit (Maturana dan Varela 1980). Bahwa sistem self-reproduction dan mengorganisir diri adalah kunci untuk banyak perkembangan analitik berdasarkan empiris terkait dengan

teori kompleksitas dari biologi (Kaufmann 1993, 1995) untuk ilmu politik (Jervis (1997) untuk studi hukum (Teubner 1997).

Salah satu kontribusi penting dari teori kompleksitas adalah perbedaan utama antara sistem dan lingkungannya.Perbedaan ini dikembangkan oleh Bertalanffy (1968) dan Luhmann (1995), adalah umum di teori kompleksitas (Capra 1997).Gagasan dgn sederhana memfasilitasi theorisation lebih halus dan fleksibel dengan teori sistem baru.

Teori kompleksitas dapat digunakan untuk membingkai kembali agen perubahan sosial. Beberapa agen konvensional perubahan sosial menggunakan gagasan sederhana dari kekuatan sosial yang berdampak pada entitas sosial lain. Dalam teori kompleksitas, konsep co-evolusi menggantikan gagasan dari suatu entitas memiliki dampak sederhana pada entitas lain. Karena setiap sistem dipahami untuk mengambil semua sistem lain sebagai lingkungannya, sistem co-evolusi karena mereka secara kompleks beradaptasi dengan lingkungan mereka (Kaufmann 1993, 1995). Ini adalah 'sistem adaptif kompleks'. Konsep Autopoiesis penting untuk memahami cara bahwa sistem terlihat untuk bersama-berevolusi dan beradaptasi satu sama lain, bukan satu hanya berdampak pada yang lain (Maturana dan Varela 1980). Karena setiap sistem memiliki sistem internal, dampak awal setiap akan memiliki efek yang kompleks pada hubungan internal dari sistem lainnya. Maka respon sistem tidak mungkin sederhana.

Proses interaksi antara sistem dan lingkungannya melibatkan seleksi dan temporalitas (Luhmann 1995). Ini melibatkan seleksi, dalam sistem harus mengenali yang fenomena, dari suatu range, harus merespons. Ini melibatkan temporalitas,

karena proses perubahan membutuhkan waktu. Co-evolusi tidak seketika, tetapi sebuah proses yang berlangsung dari waktu ke waktu. Proses internal harus menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal. Perbedaan temporal perubahan dalam sistem sebagai akibat dari interaksi mereka bukan hanya bisa dihindari, tetapi merupakan kunci untuk memahami sifat perubahan sosial.

Implikasi dari konsep evolusi sistem adaptif kompleks untuk penelitian empiris termasuk penting untuk melihat interaksi antara entitas, dan tidak menganggap arah satu arah kausalitas. Selanjutnya, ada kemungkinan bahwa kedua (atau beberapa) dari entitas tersebut akan berubah selama interaksi mereka, sehingga membutuhkan apresiasi kompleks objek yang diteliti.

ASEAN Economy Community

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang dilihat dari rentang geografi terdiri dari 11 (sebelas) negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Laos, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor Leste, Vietnam. Perkembangan hubungan yang dinamis dalam isu-isu internasional dan regional terjadi antar negara dalam kawasan ini pasca perang Dunia II dan selama Perang Dingin dengan terbentuknya organisasi-organisasi regional antara lain Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau lazim dikenal sebagai ASEAN (Association of Southeast Asia Nation). Pada masa terbentuknya asosiasi ini hanya beranggotakan 5 (lima) negara saja yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Pasca Perang Dingin dinamisasi perkembangan hubungan internasional semakin meningkat, kemenangan Amerika Serikat membuat perubahan wajah dalam sistem internasional

yang sebelumnya Bipolar menjadi Unipolar. Kemenangan yang ditunjukkan dengan runtuhnya tembok Berlin pada 10 November 1989 seolah ditafsirkan oleh Amerika Serikat untuk menyebarkan dan memaksakan gagasannya mengenai dunia baru yang berlandaskan gagasan liberalisme dengan globalisasi dan gagasan demokrasinya.

Gelombang demokrasi yang dilancarkan secara massif oleh negara-negara penganut paham liberal dengan Amerika Serikat sebagai aktor utama di dunia internasional menemukan momen-nya di Asia Tenggara pada tahun 1998. Latar belakang krisis moneter yang melanda Thailand berimbas negative terhadap Indonesia yang memang selama 32 tahun menjalankan pemerintahan semi-demokratis Otoriter. Terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran yang melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia yang menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahan dan politik dengan tuntutan utama pada masa itu adalah turunnya Presiden Soeharto. Proses demokratisasi di Asia Tenggara sebenarnya sudah berjalan juga di Myanmar dengan Aung San Suu Kyi sebagai pendorong utama terjadinya perubahan dinegara *Sleeping Budha* tersebut. Namun usahanya untuk meruntuhkan pemerintahan rezim militer menemui hambatan karena kuatnya rezim dalam mengontrol masyarakat sipil dan ditambah dengan masih berjalannya efek “Perang Dingin” di kawasan Asia Tenggara. Gerakan demonstrasi pun meluas ke Malaysia pada tahun 1999 dan setelahnya yang menuntut bersihnya pemerintahan dari sifat-sifat Nepotisme, Kolusi dan Korupsi. Di Thailand dan Philipina gelombang demonstrasi terjadi sebagai akibat terjadinya kudeta yang dilakukan oleh pihak militer terhadap pemerintahan yang sedang berjalan dengan alasan menstabilkan situasi nasional sebagai akibat kekisruhan politik yang terjadi diantara elit. Di

Thailand muncul kelompok kaus merah yang menuntut dikembalikannya kekuasaan pemerintahan kepada Thaksin Shinawatra sebagai Perdana Menteri terpilih dan menuntaskan masa kepemimpinannya, sementara kelompok kaus kuning menuntut agar Thaksin dan kroninya dijatuhi hukuman yang berat sebagai akibat praktik korupsi yang dilakukan dan diduga menimbulkan kerugian terhadap negara dan hilangnya sebagian kedaulatan negara dengan dijualnya Telekom Thailand ke perusahaan swasta asal Malaysia. Sementara di Filipina naiknya Gloria Macapagal Arroyo sebagai Presiden setelah militer menarik dukungan dari Presiden terpilih dengan alasan mendukung gerakan rakyat yang menuntut bersihnya pemerintahan dari praktik korupsi yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan Filipina, aksi ini menimbulkan gesekan militer dalam skala kecil pada saat seorang perwira muda dan bawahannya membelot dari perintah dan melakukan penyanderaan di sebuah hotel di Manila.

Gerakan demonstrasi sebagai bentuk semakin menguatnya gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat merupakan menandakan bentuk nyata bahwa gelombang demokrasi sudah menyentuh kawasan Asia Tenggara, tidak hanya di Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina, bahkan di Viet Nam dan Singapura pun terjadi dengan alasan-alasan yang berbeda. Namun perubahan yang dirasakan di Asia Tenggara tidak hanya berhenti dengan eksisnya demokratisasi.Perkembangan sistem ekonomi internasional melalui gelombang globalisasi pun tidak luput menyentuh kawasan ini. Tumbuhnya kawasan Eropa dengan munculnya Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi baru pada tahun 1993 dan diluncurkannya Zona Euro pada 1999 menandakan dimulainya era baru dalam lalu lintas barang, jasa, orang dan investasi.

Lahirnya keuntungan yang didapatkan dengan terintegrasinya negara-negara anggota Uni Eropa dalam pilar Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya telah memperkuat persaingan ekonomi internasional. Bagi sebagian kalangan kehadiran Uni Eropa tidaklah terlalu mengejutkan namun kehadirannya justru memecut kompetisi di benua lain, Asia salah satunya. Jepang yang dikenal sebagai pemimpin ekonomi di Asia melalui jajaran *Flying Geese*-nya perlahan digeser dengan kehadiran India, Tiongkok dan Korea Selatan. Pada akhirnya Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi yang mampu menandingi kekuatan Amerika Serikat dan Uni Eropa melalui kebijakan-kebijakan ekonominya yang massif di Asia, Pasifik dan Afrika.

Asia Tenggara melihat keajaiban globalisasi yang ditenggarai dengan perkembangan kerjasama ekonomi dalam bentuk munculnya pasar bebas disikapi dengan meningkatkan hubungan kerjasama dalam konteks ASEAN. Melalui kesepakatan dalam Deklarasi Bali ASEAN Concord II, negara-negara anggota ASEAN bertekad dalam mengintensifkan kerjasama yang lebih erat melalui pembentukan komunitas secara terpadu dalam bidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan integrasi kawasan. Dalam hal ini negara-negara anggota ASEAN pun sepakat menentukan sentralitas ASEAN sebagai soko guru kebijakan kawasan untuk menghadapi persaingan ekonomi internasional dalam bentuk Pasar Bebas. Walaupun demikian bukan berarti integrasi negara-negara Asia Tenggara dalam ASEAN dapat dinyatakan selesai, justru tantangan ASEAN sebagai sentralitas hubungan antar negara anggota baru dimulai. Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia, kelesuan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa pada krisis ekonomi di tahun 2008, serta kelesuan dalam

APEC justru menumbuhkan semangat baru dalam pembentukan sebuah pasar bebas di kawasan Pasifik yaitu dengan dibentuknya Trans Pacific Partnership (TPP) dimana beberapa anggotanya justru adalah negara-negara anggota ASEAN.

ASEAN *Community* atau Komunitas ASEAN yang terdiri atas Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (ASEAN *Political-Security Community* / APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community* / AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN *Socio Culture Community* / ASCC) merupakan suatu komunitas yang dibentuk sebagai dasar adanya kepentingan bersama serta kondisi saling ketergantungan yang terjadi antar rakyat dan negara-negara anggota ASEAN. Kesenjangan pembangunan yang terjadi di antara negara-negara ASEAN sebagai akibat tidak meratanya pembangunan ekonomi yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan dan rendahnya tingkat kelayakan hidup masyarakat ASEAN ditengah-tengah laju kompetisi ekonomi global.Kondisi tersebut menjadikan negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memajukan berjalannya Komunitas ASEAN utamanya Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) pada tahun 2015.

Tujuan dibentuknya AEC dalam Piagam ASEAN dinyatakan sebagai suatu usaha untuk menciptakan suatu basis produksi dan pasar tunggal yang stabil dan makmur, kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi. Selain itu juga untuk membangun kawasan dengan tingkat kompetisi ekonomi yang tinggi namun adil .Melalui AEC diharapkan arus lalu lintas barang, jasa dan investasi dapat terfasilitasi dengan baik dan berjalan dengan efektif.Dengan dibebaskannya arus modal yang lebih luas maka pergerakan yang dimaksudkan sebelumnya membawa dampak terhadap pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat serta buruh

dalam ruang lingkup kawasan. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya kesepakatan bersama pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand mengenai

1. ASEAN Trade in Goods Agreement.
2. The Protocol to Implement 7th Package of Services Commitment.
3. ASEAN Comprehensive Investment Agreement

Implikasi lain yang ditimbulkan dari kesepakatan ini adalah bahwa pergerakan barang dan jasa serta investasi membawa pengaruh terhadap bagaimana mereka disalurkan. Oleh karenanya diperlukan separangkat aturan untuk menjaga sisi *fairness* yang hendak dicapai dalam AEC antara lain disetujuinya pengurangan tariff terhadap barang-barang hasil produksi ekspor hingga mencapai nol persen agar kompetisi yang terjadi memberikan keuntungan dan sehat. Selain itu juga perlu diatur mengenai tata cara masuknya barang ekspor ke suatu negara melalui suatu kebijakan ASEAN *Single Window* dan pengenaan pajak dan bea terhadap distribusi barang, serta terhadap pengelolaan fasilitas perdagangan. Bebasnya arus lalu lintas barang dan jasa serta modal dikhawatirkan terjadinya praktik pencurian terhadap hak intelektual, oleh karenanya negara-negara ASEAN menyepakati dalam cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community *Blue Print*) akan pentingnya perlindungan terhadap hak intelektual. Hal ini sebenarnya pengejawantahan kesepakatan bersama dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) mengenai komitmen perlindungan hak intelektual dalam TRIPs.Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga peran pro-aktif ASEAN dalam hubungan dan kerjasama dengan para mitra

eksternal dan sekaligus menjaga peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan dan inklusif.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan kesejahteraan yang terjadi dalam masyarakat negara-negara anggota ASEAN, komunitas ekonomi yang digagas mendorong tampilnya keunikan-keunikan lokal dari produksi barang dan jasa berupa Usaha Kecil dan Menengah (*Small Medium Entreprise* / SME).Gagasan ini merupakan langkah berani ASEAN untuk mendorong persaingan yang sehat antara pengusaha dengan modal besar dan kecil, bahwa dalam hubungan produksi, distribusi dan pemasaran keduanya memiliki tingkat ketergantungan dalam derajat tertentu.

AEC dan Perubahan Kepemimpinan ASEAN

Kepemimpinan adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai jenis fundamental berbeda dari tindakan. Ini adalah kompetensi teknis dan hasil pencapaian, bekerja dengan dan melalui orang, memastikan bahwa organisasi ini sejalan dengan lingkungan, dan memastikan ada kepatuhan yang sesuai dan konsisten dengan tujuan organisasi, prinsip-prinsip dan norma-norma, antara lain.

Ada tiga faktor yang kita perlu mempertimbangkan ketika kita melihat sebuah model kepemimpinan yang cocok untuk ASEAN. Pertama adalah gaya pemimpin karena akan menjadi tindakan dibuktikan pertama terhadap stakeholders mereka, organisasi, lingkungan, dan sebagainya. Ini merupakan juga variabel perilaku yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Kedua adalah faktor kontingensi, yang menentukan perilaku atau gaya pemimpin. Beberapa situasi atau kondisi akan meningkatkan hasil yang diinginkan dan lain-lain dapat menghambat hasil yang diharapkan. Dengan

demikian, faktor kontingensi mempengaruhi kekuatan, kualitas dan keberhasilan suatu perilaku tertentu atau gaya. Ketiga, akan menjadi tujuan kinerja, yang dapat mencakup efisiensi kerja sama regional, kepuasan dan pengembangan masyarakat, keberpihakan eksternal yang efektif dan perubahan organisasi untuk memenuhi tantangan yang muncul atau mengubah lingkungan. Ini akan menentukan sifat kepemimpinan yang diperlukan, dan gaya dan perilaku yang diperlukan.

Perkembangan dan prestasi dari para pemimpin ASEAN periode 1967-1990 adalah bahwa ASEAN dipimpin oleh pemimpin yang telah menyaksikan beberapa peristiwa besar antara lain:

- "Perang Dingin" era,
- "Big Power" persaingan,
- pemberontakan komunis,
- kerusuhan rasial,
- dan ketegangan antar negara.

Dengan demikian, gaya kepemimpinan dan manajemen mereka lebih berwibawa, direktif dan rasional. Peran pemerintah dalam perumusan pengambilan keputusan dan kebijakan dominan di ASEAN. Paling sering, pemerintah memainkan peran kunci dalam membentuk kerja sama regional daripada pemangku kepentingan lainnya, meskipun intelektual, bisnis dan organisasi masyarakat sipil memiliki jaringan informal atau formal mereka sendiri.

Dalam sebagian besar kasus, inisiatif dan perkembangan seperti berasal dari proses top down memperkuat gaya otoritatif dan direktif kepemimpinan didasarkan pada tidak tertulis ASEAN tujuan, prinsip-prinsip dan norma-norma. Perilaku kepemimpinan yang lebih berorientasi tugas dan organisasi di alam.Sifat kepemimpinan umum yang dipamerkan adalah kepercayaan diri, ketegasan, ketahanan, integritas pribadi, dan kesediaan untuk memikul tanggung jawab.

Orientasi baru dari Komunitas ASEAN dan sistem aturan baru berbasis menyiratkan bahwa ASEAN juga harus memperbaharui gaya kepemimpinannya, pendekatan dan perilaku berdasarkan persyaratan bagi pembangunan masyarakat serta lingkungan global dan regional yang terus berubah.

Krisis global saat ini juga telah memfokuskan perhatian pada Asia Timur sebagai mesin pertumbuhan bagi dunia di masa mendatang.Ini termasuk ASEAN, China, India dan Jepang. Dengan populasi mereka dikombinasikan besar (populasi muda dari sudut pandang India), akumulasi cadangan, potensi konsumsi domestik segmen menengah dan menengah ke bawah mereka penduduk dan integrasi jaringan produksi di Asia Timur, Asia Timur bisa membuat perbedaan kunci ke dunia dan pertumbuhan regional.

Pada saat yang sama, isu-isu yang wilayah ini bergulat dengan lebih transnasional daripada nasional di alam. Tapi isu transnasional seperti memiliki bantalan penting pada ketahanan nasional dan kesejahteraan.Isu-isu ini meliputi krisis keuangan dan ekonomi yang sedang berlangsung, perubahan iklim, makanan dan keamanan energi, pelebaran kesenjangan pembangunan, dan kemiskinan.Tidak ada satu negara pun bisa mengatasi masalah secara sepihak dan karena itu kerjasama,

keterlibatan dan respon kolektif yang diperlukan untuk mengatasi masalah secara efektif baik di perspektif regional dan global.

Dalam kasus krisis keuangan saat ini, ASEAN harus mengkoordinasikan kebijakan stimulasi fiskal untuk memastikan bahwa tidak ada arus besar modal. Pada saat yang sama, daerah bersama-sama dengan mitranya China, Jepang dan Korea Selatan akan segera meluncurkan Chiang Mai Initiative Multilateralisation yang akan berfungsi sebagai penyangga ke negara-negara menghadapi masalah neraca pembayaran. Di bidang perdagangan, Negara-negara Anggota ASEAN berkomitmen untuk menghindari kecenderungan proteksionis seperti langkah-langkah melihat ke dalam dapat mengakibatkan pembalasan dari negara-negara anggota lainnya dan oleh karena itu menghambat Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membayangkan aliran bebas barang di kawasan ini pada tahun 2015 . Wilayah ini memiliki sekarang rencana strategis untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan dan keamanan energi karena itu memperkuat ketahanan daerah lebih lanjut harus krisis makanan atau energi terjadi di masa depan. Beberapa skema sekarang di tempat juga untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN, yang meliputi Inisiatif Integrasi ASEAN, Cekungan Pengembangan Kerjasama ASEAN-Mekong dan wilayah pertumbuhan sub-regional lainnya.

Dimensi perubahan lain dalam ASEAN adalah keterlibatan para pemangku kepentingan lainnya, bukan hanya pemerintah, terutama dalam arena non-politik dan keamanan. Sektor swasta semakin menjadi mitra aktif pemerintah dalam inisiatif integrasi ekonomi ASEAN dari perdagangan, investasi, ketahanan pangan, manajemen bencana, lingkungan, antara lain. Partisipasi seperti kekuatan lanjut

ASEAN sebagai keterlibatan rakyat sangat penting untuk pembangunan masyarakat dan keberlanjutan jangka panjang dan pengembangan Komunitas ASEAN.

Mengingat perubahan atas dan perkembangan, gaya kepemimpinan akan harus lebih akomodatif dan partisipatif agak bahwa gaya otoritatif dan direktif kepemimpinan masa lalu. Ini membutuhkan lebih dari perilaku berorientasi tugas dan harus menyerap perilaku seperti konsultasi, serba cepat membangun konsensus, mengelola konflik, memotivasi stakeholder, mengikuti prosedur aturan berbasis, dan memastikan pelaksanaan tepat waktu komitmen.

Dalam cahaya di atas, gambar dari kepemimpinan daerah, terlepas dari tingkat dan sektor, harus sesuai dengan persyaratan baru dari Komunitas ASEAN. Pertama, ia harus memiliki pemahaman yang baik dari sejarah, prinsip-prinsip, norma dan tujuan dari ASEAN dan tantangan yang ASEAN sebagai Komunitas menghadapi dan akan menghadapi di masa depan. Kedua, ia harus menjadi pembangun konsensus yang sensitif terhadap kepentingan berbagai negara anggota. Ketiga, ia harus menjadi pemikir strategis yang mampu rencana untuk mengatasi masalah atau mendukung inisiatif baru menarik-up. Keempat, ia harus mampu berkomunikasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di ASEAN untuk memenangkan kepercayaan dan dukungan. Kelima, ia harus mampu melaksanakan rencana tersebut dengan cara yang menentukan serta dengan memobilisasi sumber daya yang diperlukan. Keenam, ia harus mampu masalah-menembak, dan mengarahkan rencana untuk arah dan tujuan yang sah harus itu akan terpengaruh dengan cara apapun. Ketujuh, ia harus pragmatis dan harus memantau dan mengevaluasi dampak dari rencana dan mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan hasil terbaik bagi ASEAN, jika perlu. Kedelapan, ia

harus mampu mengkomunikasikan hasil, dan manfaat bagi pemangku kepentingan dan dalam proses memfasilitasi buy-in untuk integrasi ASEAN dan pembangunan komunitas upaya. Sebagai imbalannya, ia harus mencari umpan balik dan memasukkan masukan yang konstruktif dalam kebijakan ASEAN.

Agar pemimpin regional untuk mencapai di atas, ia harus memiliki kualitas berikut: kepercayaan diri, ketegasan, ketahanan, energi, motivasi untuk mencapai, kesediaan untuk menerima tanggung jawab, integritas pribadi, moralitas yang tinggi, dan kematangan emosional. Lebih penting lagi, ia harus memiliki gairah untuk dan keyakinan di ASEAN dan empati bagi rakyat ASEAN.

Ini membutuhkan lebih banyak orang perilaku berorientasi dari pemimpin masa depan. Mereka harus berkonsultasi lebih, merencanakan dan mengatur sumber daya, mengembangkan kompetensi teknis dan analitis, keterampilan sosial, memotivasi stakeholder, mengelola harapan dan konflik serta perubahan karena perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal perilaku organisasi, harus ada lebih pemindaian lingkungan untuk terus diperbarui dari perubahan, kemampuan perencanaan strategis untuk mengarahkan ASEAN ke Vantage posisi dalam isu-isu dan peluang, kemampuan untuk artikel visi yang meyakinkan dan misi, keterampilan tepat untuk jaringan dan kemitraan, dan kemampuan pengambilan keputusan lebih cepat.

Dalam hal pengembangan dan evaluasi para pemimpin masa depan ASEAN, kita perlu berinvestasi dalam belajar yang lebih berkelanjutan, berbagi pengalaman dan ide-ide, pelatihan dan pendidikan ditargetkan berdasarkan kebutuhan. Demikian pula, evaluasi pemimpin masa depan harus didasarkan pada kinerja teknis mereka, kinerja pemangku kepentingan mereka, keselarasan organisasi untuk perubahan

lingkungan dan mentalitas layanan dengan fokus etis karena kita sedang membangun sebuah masyarakat ASEAN.

Masa depan ASEAN terletak pada kepemimpinan dapat memberikan untuk integrasi internal, arsitektur berkembang Asia Timur serta perannya dalam urusan global. Gaya kepemimpinan, pendekatan dan perilaku harus dibentuk oleh kebutuhan Komunitas ASEAN dan lingkungan regional dan global berubah. Jika kepemimpinan ASEAN Indeks akan dikembangkan harus mencerminkan persyaratan kepemimpinan untuk ASEAN baru. Ini tidak berarti kita harus menyerah gaya, pendekatan dan perilaku yang telah ditandai masa lalu memberikan kontribusi bagi keberhasilan ASEAN tetapi memodifikasi dan memperbarui mereka untuk perubahan zaman dan terbuka untuk menerima pendekatan baru. Kepemimpinan ASEAN harus gesit dan mulai mengadopsi "berpikir regional, bertindak ASEAN" kebijakan untuk regionalisme berakar kuat di Asia Tenggara dan menyebar sayapnya ke seluruh Asia Timur.Komunitas ASEAN adalah primer untuk ini untuk direalisasikan.

Penutup

Perubahan lingkungan internal dan eksternal pada masyarakat ASEAN dan juga dicanangkannya AEC membuat regional ini semakin dinamis. Kedinamisan masing-masing elemen masyarakatnya tidak boleh diremehkan oleh kekuatan-kekuatan lain. Semua level kekuatan dari masing-masing kekuatan elemen akan saling menghitung potensi kekuatan elemen lain dalam proses pembuatan keputusan.

Teori kompleksitas mewadahi analisa pergerakan yang berbasis sistem dan lingkungan dengan menimbang semua elemen yang dipunyai sistem tersebut sebagai basis analisanya.Kepemimpinan ASEAN diharapkan mengakomodir seluruh elemen yang ada dalam sistem tanpa menafikan peran dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan yang terjadi.

Bibliography

ASEAN. (2009). *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015.* Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretary. (2005, March 03). Retrieved from www.asean.org: http://www.asean.org/resources/2012-02-10-08-47-56/speeches-statements-of-the-former-secretaries-general-of-asean/item/leadership-in-asia-after-tsunami

ASEAN Secretary. (2009). *Implementing The Roadmap For An ASEAN Community 2015.* Jakarta: ASEAN Secretariat.

Pushpanathan. (2009, September 30). Creating an Effective and Viable-ASEAN LEadership Model for The 21st Century . *ASEAN LEadership Model to Strengthen ASEAN Community in The Context of Regionla Resilience.* Jakarta: Lemhannas. Retrieved 2015, from www.asean.org: http://www.asean.org/news/item/creating-an-effective-and-viable-asean-leadership-model-for-21st-century-by-s-pushpanathan-deputy-secretary-general-of-asean-for-asean-economic-community-2

Walby, S. (2013). Complexity Theory, Globalisation and Diversity. *Conference of the British Sociological Association.* United Kingdom: University of York.

Yong, O. K. (2012, February 10). Leadership Challenges in the 21st Century Southeast Asia Regional Integration Competitiveness and Community Building. Retrieved from www.asean.org: http://www.asean.org/resouces/2012-02-10-08-47-56/speeches-statement-of-the-former-secretaris-general-of-asean/item/leadership-challenges-in-the-21st-century-southeast-asia-regional-integration-competitiveness-and-community-building

TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF INDONESIA DALAM RELASI KUASA PENGETAHUAN GLOBAL DAN KONSTRUKSI MASYARAKAT ASEAN 2015

Oleh: Virtuous Setyaka
Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas, Padang

Abstrak

Jika setiap ilmu pengetahuan adalah produk berpikir rasional setiap manusia, maka semua ilmu pengetahuan adalah produk yang diciptakan dari sejarah dan dialektika yang material (*historical and dialectical materialism*) dalam kehidupan sosial. Jika dan hanya jika manusia berpikir rasional dalam sejarah dan dialektika sosial yang material sajalah maka ilmu pengetahuan diproduksi dan direproduksi oleh manusia. Dari sini perlu untuk membedakan yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dengan yang bukan (yaitu pengetahuan saja?), yang disebut berpikir rasional dengan yang bukan (yaitu irasional belaka?), yang disebut sejarah dan dialektika material dengan yang bukan (yaitu ideasional?). Abstraksi dari berpikir rasional dalam menghadapi sejarah dan dialektika material kemudian disebut sebagai tindakan objektif dan apalagi ketika disetujui atau disepakati oleh manusia lainnya. Proses tersebut akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai teori, dan kumpulan dari teori-teori itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Indonesia adalah sebuah entitas bangsa yang tidak hanya berinteraksi dengan bangsa lainnya (dan harus dilihat dalam konteks yang relasional), tetapi tentu saja dalam sejarah dan dialektika materialnya terdapat manusia-manusia yang berpikir rasional dan memproduksi ilmu pengetahuan. Maka sudah semestinya dan sebagai sebuah keniscayaan sejarah bahwa Indonesia memproduksi teori-teori dalam interaksi dan relasi sosialnya di antara bangsa-bangsa lainnya di dunia. Jika tidak, dalam konteks relasi kuasa pengetahuan maka ilmu pengetahuan –dalam hal ini Hubungan Internasional- yang dipelajari dan dipraktikkan hanyalah hegemoni –dan didominasi oleh- bangsa-bangsa lainnya. Itulah yang kemudian disebut sebagai Ilmu Hubungan Internasional berperspektif Indonesia menjadi penting dan harus ada. Artikel ini akan membahas tentang: (1) apakah HI berperspektif Indonesia? (2) mengapa HI berperspektif Indonesia (harus) ada? (3) bagaimana HI berpersepektif Indonesia ada? Dan (4) bagaimana mengkonstruksi Masyarakat ASEAN 2015 yang berkeindonesiaan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, secara akademik, diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan HI berperspektif Indonesia -bukan hanya sebagai salah satu pilihan (*alternative*) dari bahkan- menjadi kontra hegemoni (*hegemony counter*) terhadap, perspektif HI tradisional yang hegemonik bahkan dominatif. Sedang kontribusi secara praktik, setidaknya, adalah menyediakan kerangka berpikir yang berkeindonesiaan terutama bagi Bangsa Indonesia sendiri dalam dinamika hubungan internasional. Dan dalam konteks Masyarakat ASEAN 2015 maka, mampu berkontribusi dalam mengkonstruksi masyarakat kawasan sesuai dengan karakter kebudayaan masyarakat tersebut khususnya Indonesia karena kita berkepentingan sekali untuk itu.

Kata kunci: relasi kuasa pengetahuan, materialisme historis, dialektika material, Indonesia, Masyarakat ASEAN 2015

Teori (ciptaan manusia) selalu ada limitasi, bukan Ayat (ciptaan Tuhan) tanpa cacat.
Keduanya dikritik dan diperdebatkan untuk pemahaman dan panduan tindakan, bagi manusia yang berpikir.

To speak a true word is to transform the world[529].
-Paulo Freire

A culture of domination demands of all its citizens self-negation.
The more marginalized, the more intense the demand.
-Bell Hooks (Gloria Jean Watkins)

PENDAHULUAN

Ilmu Sosial pada dasarnya adalah pengetahuan yang diciptakan oleh manusia untuk memahami relasi sosial manusia dan selanjutnya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu Sosial pada tahapan selanjutnya tidak hanya dibatasi untuk memahami relasi sosial sebagai relasi manusia dengan manusia saja, namun juga relasi manusia dengan alam semesta. Ilmu Sosial pada akhirnya menjadi pengetahuan tentang dinamika kehidupan manusia dalam berrelasi dengan siapa dan apa saja, bukan hanya sesama manusia dalam membentuk masyarakat.

Ilmu Sosial sebagai pengetahuan dilandasi dengan filosofi atau filsafat yang melengkapinya. Di dalam filsafat ilmu sosial ada (1) teori pengetahuan atau epistemologi, (2) ontologi, (3) logika dan (4) etika dan moral[530]. Dalam teori pengetahuan atau epistemologi, ada dua cara pandang dominan yakni rasionalisme dan empirisisme. Ilmu Hubungan Internasional adalah turunan dari Ilmu Sosial dalam konteks relasi sosial yang dijelaskannya secara umum, dan lebih khusus adalah

[529] Dikutip dari McLaren, Peter (tanpa tahun), *Critical Theory in Education: Power, Politics and Liberation,*
EDU 284, Los Angeles: Graduate School of Education and Information Studies, University of California. H. 2-3.
[530] Benton, Ted and Ian Craib (2001), *Philosophy of Social Science, The Philosophical Foundations of Social Thought,* New York: Palgrave, h. 3-7.

turunan Ilmu Politik (yang juga bagian dari Ilmu Sosial) dalam konteks relasi kuasa atau kekuasaan yang struktural dalam dinamika sosial.

Teori Hubungan Internasional menjadi muara pengetahuan dalam Ilmu Hubungan Internasional yang diciptakan[531] atau dirumuskan para pembelajar atau penstudi dinamika hubungan internasional. Muara pengetahuan yang dimaksud adalah titik pencapaian puncak dalam membaca atau mempelajari dinamika yang dirumuskan untuk kemudian menjadi titik pijak dalam tindakan manusia sebagai aktor dalam hubungan internasional sekaligus agen ketika tindakan tersebut disertai dengan nilai-nilai yang diketahui dan diyakini kebenarannya. Dengan demikian maka teori berguna sebagai panduan dalam kehidupan sosial atau dinamika internasional sebagai bagian dari kultur atau kebudayaan.

Dalam relasi sosial dalam konteks kultural, terjadi relasi kuasa antar manusia di dalam masyarakat yang membentuk struktur kekuasaan atau struktural. Sebagaimana kutipan dari Bell Hooks (nama pena dari seorang penulis perempuan bernama Gloria Jean Waktins), sebuah kultur dominasi menuntut semua warganya untuk menegasikan diri mereka sendiri, maka semakin terpinggirkannya warga maka semakin intens tuntutan tersebut bisa dirasakan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami kemudian bahwa pengetahuan, khususnya teori, akhirnya tidak hanya sekedar panduan dalam tindakan. Lebih dari itu, teori bisa menjadi panduan dalam tindakan kekuasaan. Oleh sebab itu, mengatakan kata yang benar adalah untuk mentransformasi atau merubah dunia, sebagaimana kutipan dari Paulo Freire, dan itu tidak mudah karena berhadapan dengan kekuasaan dalam relasi sosial secara keseluruhan.

Jika setiap ilmu pengetahuan adalah produk berpikir rasional setiap manusia, maka semua ilmu pengetahuan adalah produk yang diciptakan dari sejarah dan dialektika yang material (*historical and dialectical materialism*) dalam kehidupan sosial. Jika dan hanya jika manusia berpikir rasional dalam sejarah dan dialektika sosial yang material sajalah maka ilmu pengetahuan diproduksi dan direproduksi oleh

[531] Setiap yang diciptakan Tuhan disebut sebagai yang natural, sedangkan setiap yang diciptakan manusia adalah yang kultural.

manusia. Dari sini perlu untuk membedakan yang disebut sebagai ilmu pengetahuan dengan yang bukan (yaitu pengetahuan saja?), yang disebut berpikir rasional dengan yang bukan (yaitu irasional belaka?), yang disebut sejarah dan dialektika material dengan yang bukan (yaitu ideasional?). Abstraksi dari berpikir rasional dalam menghadapi sejarah dan dialektika material kemudian disebut sebagai tindakan objektif dan apalagi ketika disetujui atau disepakati oleh manusia lainnya. Proses tersebut akhirnya menghasilkan apa yang disebut sebagai teori, dan kumpulan dari teori-teori itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan.

Indonesia adalah sebuah entitas bangsa yang tidak hanya berinteraksi dengan bangsa lainnya (dan harus dilihat dalam konteks yang relasional), tetapi tentu saja dalam sejarah dan dialektika materialnya terdapat manusia-manusia yang berpikir rasional dan memproduksi ilmu pengetahuan. Maka sudah semestinya dan sebagai sebuah keniscayaan sejarah bahwa Indonesia memproduksi teori-teori dalam interaksi dan relasi sosialnya di antara bangsa-bangsa lainnya di dunia. Jika tidak, dalam konteks relasi kuasa pengetahuan maka ilmu pengetahuan –dalam hal ini Hubungan Internasional- yang dipelajari dan dipraktikkan hanyalah hegemoni –dan didominasi oleh- bangsa-bangsa lainnya. Itulah yang kemudian disebut sebagai Ilmu Hubungan Internasional berperspektif Indonesia menjadi penting dan harus ada.

Paper ini akan membahas tentang: (1) apakah HI berperspektif Indonesia? (2) mengapa HI berperspektif Indonesia (harus) ada? (3) bagaimana HI berpersepektif Indonesia ada? Dan (4) bagaimana mengkonstruksi Masyarakat ASEAN 2015 yang berkeindonesiaan? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, secara akademik, diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan HI berperspektif Indonesia -bukan hanya sebagai salah satu pilihan (*alternative*) dari bahkan- menjadi kontra hegemoni (*hegemony counter*) terhadap, perspektif HI tradisional yang hegemonik bahkan dominatif. Sedang kontribusi secara praktik, setidaknya, adalah menyediakan kerangka berpikir yang berkeindonesiaan terutama bagi Bangsa Indonesia sendiri dalam dinamika hubungan internasional. Dan dalam konteks Masyarakat ASEAN 2015 maka, mampu berkontribusi dalam mengkonstruksi

masyarakat kawasan sesuai dengan karakter kebudayaan masyarakat tersebut khususnya Indonesia karena kita berkepentingan sekali untuk itu.

METODE

Dalam paper ini, meskipun mendiskusikan tentang THI Indonesia, namun akan dipengaruhi oleh cara yang digunakan oleh Cox dan logika berpikir penulis untuk mengungkapkan sumber kekuatan dalam relasi kuasa pengetahuan global dalam THI yang selama ini ada di dunia. Untuk itu, akan dipaparkan terlebih dahulu konsep-konsep mengenai Relasi Kuasa Pengetahuan Global,
Materialisme Historis dalam Hubungan Internasional, Dialektika Material dalam Hubungan Internasional dan Masyarakat ASEAN 2015.

Relasi kuasa pengetahuan global dapat dipahami dengan sederhana bahwa dalam perspektif yang strukturalis, tatanan dunia kemudian disebut sebagai struktur sosial yang hirarkis. Di dalam struktur sosial tersebut maka seluruh tindakan atau aktivitas aktor dengan nilai yang diyakini mereka (kemudian disebut sebagai agen) dalam berhubungan internasional, akan terhubung satu dengan yang lainnya dan disebut sebagai relasi sosial. Relasi sosial secara spesifik dapat dipahami di dalamnya terdapat relasi ekonomi (terkait dengan aktivitas produksi) dan relasi politik (terkait dengan aktivitas kekuasaan).

Hubungan Internasional adalah bidang studi yang bersangkutan dengan hubungan timbal balik antara negara-negara di zaman di mana negara, sering disebut sebagai negara-bangsa, adalah agregasi utama kekuasaan politik. Mendiskusikan Materialisme Historis dan Dialektika Material dalam Hubungan Internasional tidak bisa dilepaskan dari kajian HI Marxis. Muhammad Firman Eko Putra (2015) menuliskan bahwa usai Perang Dingin, Marxisme sebagai ilmu mulai diterima dan diakui sebagai perspektif dalam kajian HI. Para Sarjana HI dari University of Sussex mengenalkan Materialisme Historis ke dalam ilmu HI. Mereka menamai kelompoknya sebagai Marxisme Politik *(Political Marxism).* Proyek teoritisasi HI Marxis dimulai oleh Fred Halliday dan Justin Rosenberg (1994). Keduanya berupaya mempertemukan metode materialisme historis Marx dengan studi Hubungan

Internasional. Upaya ini diteruskan Van der Pijl, Benno Teske dan Hannes Larcher. Obyek kajian mereka terpusat pada hubungan antara pranata kapitalisme, negara, dan sistem antar negara. Kalangan sarjana Marxisme Politik berupaya melanjutkan rintisan para pendahulunya dengan berupaya merangkai teori mengenai politik dan HI dari karya-karya Marx dan Engels yang tercerai berai. Soalnya, Marx dan Engels belum sempat secara sistematis menjawab pertanyaan ihwal dimensi ruang dan interaksi sosial antar ruang (Soell 1972; Harvey 2001)[532]

Sedangkan menurut Robert W. Cox, HI yang bersangkutan dengan hubungan timbal balik antara negara-bangsa sebagai agregasi utama kekuasaan politik, berkaitan dengan hasil dari perang dan damai, serta memiliki kepentingan praktis. Cox menuliskan pemikirannya dengan caranya (yang kemudian dikenal dengan Coxian Critical Theory/CCT atau Teori Kritis Coxian/TKC) karena bertujuan untuk mengungkap sumber fundamental dari hubungan internasional kontemporer - kekuatan yang memberi tatanan dunia kontemporer, dan tatanan abad ke-19 yang tumbuh dengan bentuk yang spesifik[533]. Cox adalah seorang Pemikir HI yang dipengaruhi oleh Marxis Italia Antonio Gramsci yang seorang Materialis Historis, dan melihat transformasi sosial global yang problematik karena adanya hegemoni. Pemikiran tersebut kontradiktif dengan hegemoni arus utama dalam HI yang dikembangkan dengan teori politik yang statis, konsepsi ahistoris yang abstrak tentang negara dan dibawa menjadi validitas universal ala Keohane (1984), Waltz (1979) dan sebagainya. Jika hegemoni dalam perspektif arus utama menjadi pemecahan masalah bagi pemeliharaan relasi kuasa sosial (demi stabilitas dan perdamaian semu- *penulis*), Teori Kritis menggunakan teori hegemoni secara

11.1 [532] Muhammad Firman Eko Putra (2015), *Negara, Kapitalisme, dan Hubungan Internasional dalam Political Marxism*, http://indoprogress.com/2015/05/negara-kapitalisme-dan-hubungan-internasional-dalam-political-marxism/, diakses 28/10/2015, 10:49.

[533] Murphy, Craig N. (2008), *Preface* dalam Anthony Leysens, *The Critical Theory of Robert W. Cox: Fugitive or Guru?*, New York: Palgrave Macmilan, h. x.

langsung untuk memperhatikan sekaligus mempertanyakan persebaran tatanan dunia[534].

TKC secara spesifik mengkritik tentang bagaimana eksistensi tatanan sosial atau dunia mengada, bagaimana norma-norma, institusi-institusi atau praktik-praktik muncul, dan kekuatan-kekuatan apa yang berpotensi dan memungkinkan untuk mengemansipasi melalui perubahan atau transformasi pada tatanan dunia yang menyebar. TKC juga mengembangkan sebuah teori dialektik dari sejarah yang fokus tidak hanya dibatasi pada masa lalu tapi dengan proses berkelanjutan dari sejarah perubahan dan dengan mengeksplorasi potensi bagi bentuk-bentuk alternatif dari pembangunan. Hegemoni dalam TKC fokus pada interaksi antar bagian-bagian dari proses, terutama terbit dari kemungkinan-kemungkinan dialektik dari perubahan di dalam bidang produksi dan karakter eksploitatif relasi sosial, bukan sebagai esensi-esensi ahistoris tak-berubah tapi sebagai krasi keberlanjutan dari bentuk-bentuk baru[535].

HI sebagai ilmu pengetahuan dalam dinamika hubungan internasional artinya sebuah produk yang dihasilkan dari relasi sosial dalam struktur global. Untuk memahami relasi sosial dalam struktur global, Cox menjelaskan dengan sederhana keterkaitan dan keterikatan antara relasi sosial produksi, bentuk-bentuk negara dan tatanan-tatanan dunia. Secara skematik dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

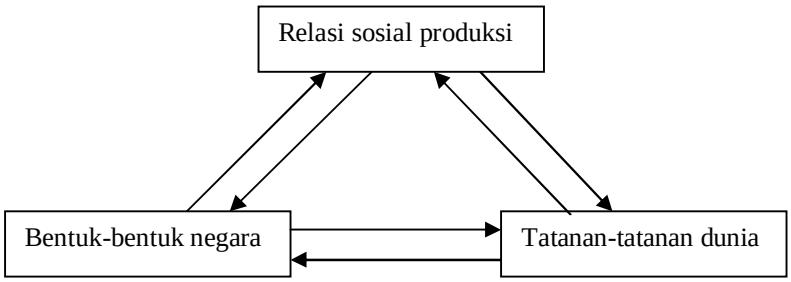

[534] Bieler, Andreas dan Adam David Morton (2004), *A Critical Theory Route To Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International relations*, Jurnal Capital & Class 2004 28:85. DOI: 10.1177/030981680408200106.
[535] *Ibid.*

"Produksi … dipahami dalam arti luas. Tidak dibatasi pada produksi barang-barang fisik yang digunakan atau dikonsumsi. Meliputi produksi dan reproduksi pengetahuan dan relasi sosial, moral dan institusi yang memprasyaratkan produksi barang fisik (Cox 1989:39)[536]*."*

Pada konteks produksi yang demikianlah maka dapat dipahami bahwa pengetahuan dan atau ilmu, sesungguhnya hasil dari produksi dan terus direproduksi. Keberadaan pengetahuan atau ilmu bukan semata-mata sebagai produk alam atau natural atau seutuhnya jatuh dari langit sebagai wahyu dari Tuhan. Dan ini menegaskan sekaligus menjelaskan mengapa Tuhan menyuruh hamba-hamba-Nya berpikir dan berikhtiar untuk menghadapi dan menyelesaikan beragam persoalan dalam kehidupan manusia di dunia. Bagaimana produksi dan reproduksi pengetahuan itu terjadi? Hal tersebut terjadi dengan adanya dialektika antara ide, kapabilitas material dan intitusi yang ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat.

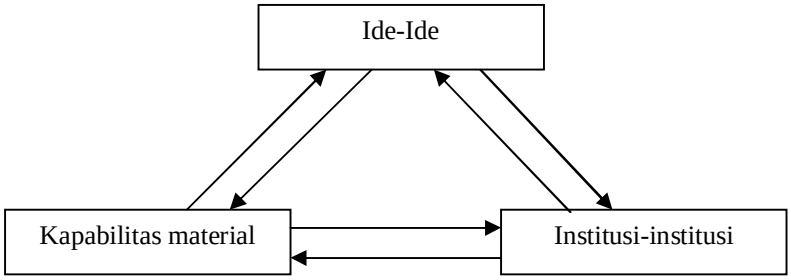

Dalam cara pandang sebagai pendekatan ala TKC, maka unit analisis yang dapat dipahami adalah masyarakat, bukan negara atau aktor internasional lainnya. Sedangkan tingkat analisisnya adalah multitingkat atau *multilevel* yaitu lokal, nasional dan internasional dengan kata lain adalah global. Unit analisis masyarakat digunakan untuk mengabstraksikan bahwa setiap individu manusia berrelasi dengan individu manusia lainnya. Sulit untuk memisahkan eksistensi individu dengan individu lainnya, karena itulah dalam perspektif ini, unit analisis dalam pendekatan

[536]*Ibid*.

ini sesungguhnya ‘relasi sosial-relasi sosial’ yang ada dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebutlah keberadaan ide-ide, kapabilitas material dan institusi berrelasi dan berinteraksi secara dialektis. Di dalam dialektika tersebut tentu saja berada dalam rentang waktu yang panjang dari masa lalu hingga masa kini atau kontemporer (dan disebut sebagai sejarah atau *history*) sehingga akan berpengaruh pada bahkan menentukan masa depan.

Ide-ide lahir dari realitas material untuk memanfaatkan kapabilitas material yang ada dan kemudian memadukannya dengan institusi-institusi maka akan menghasilkan sesuatu atau produk. Demikian juga pada langkah berikutnya yang disebut sebagai menghasilkan ulang atau reproduksi. Teori HI Indonesia lahir dari dinamika yang terbentuk dari dialektika gagasan-gagasan yang muncul dari realitas sosial material yang ada di masyarakat Indonesia, bukan dari masyarakat non Indonesia. Gagasan-gagasan tersebut kemudian dikelola dengan kapabilitas-kapabilitas material yang dimiliki dan dikuasi oleh para ilmuwan atau akademisi HI Indonesia dan berdialektika dengan institusi-institusi sosial yang ada di Indonesia. Hal yang sedemikian terjadi dalam struktur sosial di tingkat lokal. Maka akan terbentuklah HI Indonesia sebagai pengetahuan atau ilmu yang merupakan salah satu instrumen atau sarana dalam kekuatan sosial (*social force*) yang mempengaruhi dinamika bernegara-bangsa dan membentuk Indonesia sedemikan rupa (di dalam struktur nasional) sebelum akhirnya berdinamika dalam struktur internasional secara global.

Tentu saja, di dalam setiap tingkat struktur atau *level of structure* tersebut, terjadi kontestasi antar kekuatan-kekuatan (*contestation of forces*) yang akhirnya meniscayakan bentuk-bentuk dominasi atau hegemoni pengetahuan. Dominasi atau hegemoni pengetahuan akan sejalan dengan donimasi atau hegemoni kekuasan dalam relasi kekuasaan dalam struktur politik dan pengetahuan.

DISKUSI

Struktur global yang ada dalam dinamika internasional sampai saat ini merepresentasikan donimasi atau hegemoni kekuasaan politik (sebagai dinamika hubungan internasional) dan pengetahuan (perspektif dan teori-teori HI). Hal tersebut dapat dipahami dengan mempelajari sejarah dinamika hubungan internasional sejak pertama kalinya hubungan internasional ada di dunia. Kemudian dinamika hubungan internasional tersebut melahirkan ilmu HI sebagai pengetahuan yang dipelajari di seluruh dunia.

Teori-teori HI berperspektif Indonesia adalah HI yang dikonstruksi dari relasi sosial produksi pengetahuan yang ada dan berkembang di dan dari Indonesia. Kemudian, HI berperspektif Indonesia (harus) ada karena masyarakat di dalam negara-bangsa Indonesia adalah manusia-manusia yang juga perlu bahkan harus setara sejajar dengan manusia-manusia di dalam masyarakat dan negara-bangsa lainnya di dunia. Akhirnya, bagaimana HI berpersepektif Indonesia (meng)ada?

Bagaimana mengkonstruksi Masyarakat ASEAN 2015 yang berkeindonesiaan? Dalam salah satu edisi media publikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemeneterian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), *headline*-nya "ASEAN adalah kita"[537]. Siapakah kita? Indonesia? ASEAN? Terutama ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan di hadapan motto yang menjadi tujuan ASEAN: *One Vision, One Identity, One Community.* Logika berpikir yang sederhana akan menjawab dan membahasnya dengan 'konsensus' di antara keseluruhan negara-bangsa yang menjadi bagian dari ASEAN. Sesederhana itukah?

Sementara itu, Indonesia menjadi negara yang sangat memperhatikan dinamika kawasan kontemporer terutama pada agenda-agenda Pembangunan Masyarakat ASEAN. Dalam rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-48 atau 48th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) tanggal 3-6 Agustus 2015 di Kuala Lumpur, Indonesia mengangkat tiga isu utama: (1) mendorong perlindungan buruh

[537] Direktorat Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Masyarakat ASEAN*, Edisi 9, September 2015.

migrant, pembentukan ASEAN Declaration on the Promotion and Protection of Migrant Workers, serta ASEAN Committee on Migrant Workers (ACMW); (2) memajukan kerja sama maritime, terkait Statement on Enhancing Maritime Cooperation in the Asia Pacific dalam konteks East Asia Summit (EAS); dan (3) konsep arsitektur keamanan regional Asia Pasifik yang menekankan pada sentralitas ASEAN[538]. Apakah itu semua diterima begitu saja oleh keseluruhan negara-bangsa anggota ASEAN?

Faktanya, tidak akan pernah ada negara-bangsa yang begitu saja akan menyerahkan kedaulatannya dan tunduk patuh mengorbankan kepentingan nasional masing-masing. Maka yang terjadi adalah upaya-upaya untuk mengendurkan kepentingan nasional masing-masing demi integrasi di tingkat kawasan. Meskipun demikan, kontestasi kepentingan-kepentingan yang kemudian secara *normative* disebut sebagai prinsip-prinsip nasional tersebut harus diletakkan posisinya di bawah prinsip-prinsip regional. Maka yang regional tersebut kemudian dijadikan sebagai visi, identitas dan komunitas yang disebut sebagai Masyarakat ASEAN. Maka, siapakah yang akhirnya menentukan kesatuan dalam Masyarakat ASEAN tersebut? Sederhananya adalah yang mampu mendominasi atau setidaknya menghegemoni di tingkat kawasan.

Untuk itu, perlu melihat kembali distribusi kekuasaan dalam relasi kekuasaan dan pengetahuan di ASEAN. Untuk itu perlu melihat berbagai gambaran tentang situasi dan kondisi riil yang ada dalam struktur ASEAN. *Pertama*, dilihat dari keanggotaan negara-negara ASEAN. *Kedua*, perekonomian negara-negara ASEAN. *Ketiga*, indeks pembangunan manusia negara-negara di ASEAN. *Keempat*¸ demokrasi di negara-negara ASEAN. *Kelima*, keterlibatan masyarakat sipil khususnya para intelektual dan akademisi di negara-negara ASEAN. Berikut ini adalah gambaran singkat negara-negara anggota ASEAN:

[538] Dit. Polkam ASEAN, "48th ASEAN Ministerial Meeting, Antara Kepentingan Nasional, Integrasi Kawasan, dan Semakin Dekatnya Masyarakat ASEAN 2015", dalam *Masyarakat ASEAN*, Edisi 9, September 2015, h. 35-36.

Negara Anggota ASEAN

No	Negara	Kepala Negara	Kepala Pemerintahan	Ibukota	Bahasa	Mata Uang	Laman Kemenlu
1	Brunei Darussalam	Sultan Hassanal Bolkiah	Sultan Hassanal Bolkiah	Bandar Seri Begawan	Malay, English	B$ (Brunei Dollar)	www.mfa.gov.bn
2	1.1 Cambodia	King Norodom Sihamoni	Prime Minister Hun Sen	Phnom Penh	Khmer	Riel	www.mfaic.gov.kh
3	2.1 Indonesia	President Joko Widodo	President Joko Widodo	Jakarta	Indonesian	Rupiah	www.kemlu.go.id
4	3.1 Lao PDR	President Choummaly Sayasone	Prime Minister Thongsing Thammavong	Vientiane	Lao	Kip	www.mofa.gov.la
5	4.1 Malaysia	King Abdul Halim Mu'adzam Shah	Mohd Najib bin Tun Abdul Razak	Kuala Lumpur	Malay, English, Chinese, Tamil	Ringgit	www.kln.gov.my
6	5.1 Myanmar	President Thein Sein	President Thein Sein	Nay Pyi	Myanmar	Kyat	www.mofa.gov.mm

				Taw			
7	6.1 Philippines	President Benigno S. Aquino III	President Benigno S. Aquino III	Manila	Filipino, English, Spanish	Peso	www.dfa.gov.ph
8	7.1 Singapore 8.1	President Tony Tan Keng Yam	Prime Minister Lee Hsien Loong	Singapore	English, Malay, Mandarin, Tamil	S$ (Singapore Dollar)	www.mfa.gov.sg
9	9.1 Thailand 10.1	King Bhumibol Adulyadej	Prime Minister General Prayut Chan-o-cha	Bangkok	Thai	Baht	www.mfa.go.th
10	11.1 Viet Nam 12.1	President Truong Tan Sang	Prime Minister Nguyen Tan Dung	Ha Noi	Vietnamese	Dong	www.mofa.gov.vn

Sumber: http://www.asean.org/asean/asean-member-states

Dari 10 negara-bangsa anggota ASEAN tersebut, berikut ini adalah enam besar negara ASEAN dengan perekonomian yang lebih besar dibanding dengan empat negara lainnya:

Perekonomian Enam Besar Negara ASEAN

Negara	GDP (2015) (miliaran dolar AS)	GDP (PPP 2015) (miliaran dolar AS)	GDP (PPP Per Capita) (dolar AS)
Indonesia	$914.973	$2,744.414	$10,759.175
Thailand	$397.475	$1,054.996	$15,319.514
Malaysia	$375.633	$800.169	$25,833.204
Philippines	$330.259	$751.770	$7,412.236
Singapore	$320.245	$467.162	$84,821.401
Vietnam	$204.539	$547.934	$5,983.238

Sumber: "World Economic Outlook Database, October 2014; Report for Selected Countries and Subjects".*International Monetary Fund (IMF)*. IMF. Retrieved12 May 2015 dan https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations

Perekoniman negara berperan besar dalam stabilitas politik dan dinamika sosial yang ada di setiap negara. Perekonomian yang mengalami krisis akan berlanjut dengan krisis stabilitas politik dan krisis sosial ke dalam, dan tentu juga akan berpengaruh ke luar negara tersebut. Dalam perspektif TKC kemudian memunculkan pertanyaan tentang distribusi perekonomian tersebut dalam relasi sosial produksi dalam masyarakat. Apakah perekonomian di suatu negara tersebut terdistribusi secara merata dan berkeadilan sosial? Jika pertumbuhan ekonomi tidak menyejahterakan seluruh komponen masyarakat, artinya tidak merata dan tidak adil secara sosial, maka bekonsekuensi pada kegaduhan yang akan mengancam stabilitas politik dalam dinamika sosial bernegara. Jika hampir di setiap negara mengalami destabilisasi politik dan krisis sosial, maka akan mempengaruhi stabilitas politik dan dinamika politik di kawasan. Maka perlu selanjutnya memeriksa bagaimana distribusi perekonomian berpengaruh pada pembangunan manusia.

Perkonomian yang menyejahterakan keseluruhan komponen masyarakat secara merata dan adil secara sosial akan berdampak secara langsung pada peningkatan kualitas dalam pembangunan manusia. Salah satu komponen dari masyarakat adalah para intelektual-akademisi, khususnya intelektual-akademi Hubungan Internasional. Berikut ini adalah indeks pembangunan manusia negara-negara di ASEAN:

Indeks Pembangunan Manusia ASEAN

Negara	IPM (2013)	
Singapore	0.901	Sangat tinggi
Brunei	0.852	Sangat tinggi
Malaysia	0.773	Tinggi
Thailand	0.722	Tinggi
Indonesia	0.684	Menengah
ASEAN	0.669	Menengah
Philippines	0.660	Menengah
Vietnam	0.638	Menengah
Cambodia	0.584	Menengah
Laos	0.569	Menengah
Myanmar	0.524	Rendah

Sumber: Malik, Khalid (2014). *Human Development Report 2014* (PDF). New York: United Nations Development Programme (UNDP). pp. 160–162. ISBN 978-92-1-056659-9. Retrieved 10 May 2015 dan https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations

Pembangunan manusia yang baik akan berdampak pada kesadaran politik dan aktivitas berpolitik yang baik. Jika politik yang baik ukurannya adalah demokrasi, maka diyakini bahwa kesadaran politik yang baik akan berdampak pada demokratisasi dengan baik. Namun sebaliknya, perkonomian yang buruk, dan pembangunan kualitas manusia yang rendah, akan berdampak pada demokrasi yang buruk. Apalagi jika segelintir elit berkuasa justru memanfaatkannya untuk kepentingan mereka saja. Untuk itu perlu untuk memeriksa demokrasi dan kualitas demokrasi di setiap negara di ASEAN. Para intelektual-akademisi, khususnya intelektual-akademi Hubungan Internasional punya peran yang signifikan dalam terlibat dalam upaya-upaya mendukung demokratisasi di setiap negara di ASEAN. Berikut ini adalah indeks demokrasi negara-negara di ASEAN:

Indeks Demokrasi Negara ASEAN (2014)

No.	Peringkat	Skor	Negara	Kategori
1	49	6,95	Indonesia	demokrasi cacat
2	53	6,77	Filipina	demokrasi cacat
3	65	6,49	Malaysia	demokrasi cacat
4	76	6,03	Singapura	demokrasi cacat
5	93	5.39	Thailand	rezim campuran
6	-	4.78	Kamboja	-
7	130	3,41	Vietnam	rezim otoriter
8	-	3.05	Myanmar	-
9	157	2.21	Laos	rezim otoriter
10	-	-	Brunei	-

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index#Democracy_index_by_country_.282014.29 http://www.sudestada.com.uy/Content/Articles/421a313a-d58f-462e-9b24-2504a37f6b56/Democracy-index-2014.pdf

Namun hasil itu mungkin akan berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh lembaga lain, jika sebelumnya adalah ideks demokrasi, berikut ini adalah ranking atau peringkat demokrasi tiga negara di ASEAN yang dianalisis dari tahun 2008 sampai 2014:

Perbandingan Ranking Demokrasi 2008-2014

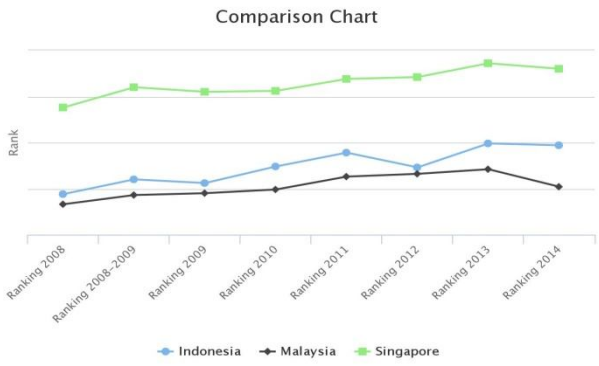

Sumber: http://democracyranking.org/?page_id=14

Sampai sejuh ini, ketika penelitian dilakukan, poin-poin tentang, *pertama*, keanggotaan negara-negara ASEAN. *Kedua*, perekonomian negara-negara ASEAN. *Ketiga*, indeks pembangunan manusia negara-negara di ASEAN. Dan *keempat*¸ demokrasi di negara-negara ASEAN dapat ditemukan dengan mudah datanya. Namun untuk yang *kelima*, yaitu keterlibatan masyarakat sipil khususnya para intelektual dan akademisi di negara-negara ASEAN masih relatif tidak mudah untuk ditemukan. Namun berikut ini dapat menjadi salah satu informasi berharga terkait dengan keterlibatan para intelektual atau akademisi Indonesia dalam mempengaruhi konstalasi dan dinamika politik di kawasan Asia Tenggara khususnya melalui ASEAN.

Hizkia Yosie Polimpung menulis tentang *Keterlibatan Akademik-Intelektual dalam Modus Kepemerintahan Neoliberal (Kasus Integrasi Keamanan ASEAN).* Menurut Hizkia, kondisi keamanan Asia Tenggara yang relatif damai, terlalu dibesar-besarkan bahkan disepakati tanpa dipertanyakan kembali. Dalam studi yang

dilakukannya, Hizkia bermaksud untuk memproblematisasi kondisi damai dengan mengkaitkannya dengan studi kepemerintahan. Dan mengeksplisitkan strategi depolitisasi kaum akademik-intelektual tersebut dalam proses integrasi keamana Asia Tenggara melalui ASEAN Political-Security Community (APSC). Pada bagian kesimpulan, Hizkia mendiskusikan implikasinya bagi studi HI Indonesia dan eksistensi Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)[539].

Lembaga Ketahan Nasional (Lemhannas) memaparkan bahwa tantangan yang dihadapi internal Indonesia dalam mewujudkan *ASEAN Leadership* guna mewujudkan *ASEAN Community 2015* memerlukan prasyarat kondisi yang harus dipenuhi yaitu; (1) Politik domestik telah berjalan sesuai dengan nilai dan norma universal; (2) Kondisi keamanan yang kondusif, damai, stabil, mandiri; (3) Terbangunnya masyarakat yang terbuka bagi pergaulan dunia. Untuk konsolidasi internal Indonesia, terdapat beberapa prasyarat yang perlu mendapatkan perhatian. *Pertama*, perlu disusun *Grand Design* Nasional Pelaksanaan *Blue Print Road Map to ASEAN Community* 2015 yang berisi persiapan dan implementasi *ground works* dan infrastruktur ASEAN dengan standar yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia. Penyusunannya harus melibatkan partisipasi dan bekerja sama dengan berbagai *stakeholders:* akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil. *Kedua*, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga, pemda dan pemangku kepentingan lain dalam pelaksanaan *Blue Print Road Map to ASEAN Community 2015* dan diintegrasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah. Kenyataannya, saat ini Pemerintah belum mempersiapkan secara komprehensif dan sistematis materi terkait bagaimana melaksanakan Blue Print Road Map to ASEAN Community 2015 dalam suatu Grand Design Nasional pelaksanaan Piagam ASEAN dan cetak birunya. Pemerintah belum juga secara komprehensif dan terintegrasi menyiapkan strategi

[539] Dapat diakses dari https://www.academia.edu/2543455/Keterlibatan_Akademik-Intelektual_dalam_Modus_Kepemerintahan_Neoliberal_Kasus_Integrasi_Keamanan_ASEAN_

komunikasi untuk mensosialisasikan substansi dan tanggung jawab masing-masing pihak kepada seluruh pemangku kepentingan di Indonesia[540].

Sedangkan dalam "Lokakarya Regional mengenai Treaty of Amity and Cooperation (TAC)"[541] yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, di Yogyakarta pada Rabu 16 September 2015. Lokakarya tersebut dihadiri oleh para perwakilan negara-negara ASEAN serta para akademisi, dan dimaksudkan sebagai ajang diskusi dan tukar pikiran terkait berbagai aspek dari TAC sebagai perjanjian yang menjadi landasan kerja sama dan persahabatan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Pembicara dan moderator pada lokakarya ini berasal dari perwakilan negara-negara ASEAN dan akademisi/universitas di Indonesia. Selain untuk membahas berbagai aspek TAC, lokakarya juga ditujukan sebagai implementasi dari Langkah aksi Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, khususnya butir A.2.2 yang mengamanatkan untuk: (a) menilai perkembangan penerapan TAC; (b) mengeksplorasi cara-cara untuk memperbaiki mekanismenya; dan (c) mencari cara untuk mengulangi kesuksesan TAC di kawasan yang lebih luas. Hasil dari lokakarya selain menjadi referensi pembahasan TAC ke depan, juga akan disampaikan kepada Sekretariat ASEAN sebagai laporan implementasi cetak biru

---

[540] ASEAN Leadership Guna Mewujudkan ASEAN Community dalam Rangka Ketahanan Regional, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 15, Mei 2013, diakses melalui http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi15/jurnal%20edisi%2015_materi%207.pdf, 30/10/2015, 11:22.

[541] TAC merupakan dokumen perjanjian di antara negara-negara di Asia Tenggara yang ditandatangani pada tahun 1976. Perjanjian tersebut bertujuan "untuk mempromosikan perdamaian abadi, persahabatan, dan kerja sama masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap penguatan, solidaritas dan hubungan yang lebih erat". Lebih lanjut, TAC merupakan dokumen ASEAN yang pertama kali mengikat negara-negara Anggota ASEAN secara hukum untuk bekerja sama di seluruh bidang, termasuk bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, ilmu pengetahuan, dan administrasi, dalam rangka mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Hasilnya, ASEAN telah berhasil mentransformasi dirinya dari kawasan pertikaian antar-negara dan terpecah oleh pemisahan Barat-Timur menjadi kawasan yang terus terlibat dalam pembangunan masyarakat. Dalam melaksanakan hubungan antar-pemerintahan, negara anggota ASEAN merujuk pada Prinsip yang tertuang dalam Pasal 2 TAC, yakni prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, tidak mencampuri urusan dalam negeri, penolakan terhadap penggunaan kekerasan dan mendorong kerja sama. TAC merupakan landasan terpenting dalam Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN. Secara khusus, prinsip-prinsip yang tertuang di dalam TAC telah menjadi dasar dan rujukan di dalam Piagam ASEAN (Pasal 2 Piagam ASEAN). Sumber: http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=20bde399-067d-4f89-b5f5-02ce46056cb4, diakses 10/10/2015, 10:49.

Masyarakat Politik Keamanan ASEAN oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan Masyarakat ASEAN, khususnya Masyarakat Politik dan Keamanan[542].

PENUTUP

Indonesia sebagai negara sangat aktif dalam berupaya untuk mendominasi atau setidaknya menghegemoni ASEAN. Hal tersebut tentu saja juga melibatkan para intelektual atau akdemisi. Misalnya adalah dalam "Lokakarya Regional mengenai Treaty of Amity and Cooperation (TAC)" tersebut. Namun tentu yang lebih besar adalah keterlibatan para interlektual-akademisi HI Indonesia dalam konstruksi Masyarakat ASEAN. Secara sederhana dapat dijelaskan dalam penggambaran berikut ini:

Peran Intelektual-Akademisi HI Indonesia dalam Konstruksi Masyarakat ASEAN

Negara Indonesia sebagai Anggota ASEAN		
Perekonomian Indonesia	Kesejahteraan Perekonomian Intelektual-Akademisi Hubungan Internasional Indonesia	↓
Pembangunan Manusia Indonesia	Pembangunan (Kapabilitas dan Kapasitas) Para Intelektual-Akademisi Hubungan Internasional Indonesia	
Demokratisasi di Indonesia	Peran Intelektual-Akademisi Hubungan Internasional Indonesia dalam Demokratisasi di Indonesia	
Keterlibatan Masyarakat Sipil (Intelektual-Akademisi HI) Indonesia dalam Konstruksi Masyarakat ASEAN		

Penerapan TKC dalam analisis peran intelektual-akademisi HI Indonesia dalam relasi kuasa pengetahuan global dan konstruksi Masyarakat ASEAN adalah sebagai berikut:

[542] http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=20bde399-067d-4f89-b5f5-02ce46056cb4, diakses 10/10/2015, 10:49.

Pertama, ide-ide atau gagasan-gagasan yang dikembangkan para intelektual-akademisi HI Indonesia untuk memutuskan bahkan melawan dominasi atau hegemoni kuasa pengetahuan HI global yang tidak relevan untuk memajukan Indonesia khususnya dalam dinamika kawasan di Asia Tenggara dalam wadah ASEAN. Dengan demikian maka konstruksi Masyarakat ASEAN adalah ASEAN yang penuh keindonesiaan. *Kedua,* ide-ide atau gagasan-gagasan tersebut tidak akan mungkin diwujudkan dengan kapabilitas material yang sangat terbatas bahkan kurang dari kepemilikan para intelektual-akademisi HI Indonesia. Kapabilitas material tersebut diantaranya yang penting dan utama adalah kesejahteraan ekonomi yang memadai, dengan demikian para intelektual-akademisi HI Indonesia akan mampu membangun kualitas diri mereka. Selanjutnya adalah kebebasan akademik dalam struktur dan sistem politik yang demokratis. *Ketiga,*kesejahteraan ekonomi, pembangunan kualitas diri dan kebebasan akademik tersebut harus diwadahi dalam ruang institusional baik di dalam kampus dan juga di dalam negara secara keseluruhan. Dan AIHII adalah salah satu ruang yang semestinya juga mengkonstruksi hal-hal yang dibutuhkan tersebut.

Dengan demikian maka para intelektual-akademisi HI Indonesia sebagai salah satu komponen dari masyarakat sipil di Indonesia akan mampu membangun kekuatan sosial yang selanjutnya akan mampu mempengaruhi bahkan membangun pembentukan negara-bangsa yang lebih baik. Jika bentuk negara-bangsa Indonesia didukung oleh para intelektual-akademisi yang juga menjadi representasi bagi kesluruhan masyarakat sipil di Indonesia, maka dominasi atau hegemoni Indonesia di ASEAN khususnya dalam Masyarakat ASEAN akan lebih kuat dan lebih baik. Apalagi jika itu dimaksudkan untuk kesejahteraan ekonomi, demokrasi politik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam Masyarakat ASEAN.

REFERENSI

Buku:

Benton, Ted and Ian Craib (2001), *Philosophy of Social Science, The Philosophical Foundations of Social Thought,* New York: Palgrave.

Murphy, Craig N. (2008), *Preface* dalam Anthony Leysens, *The Critical Theory of Robert W. Cox: Fugitive or Guru?*, New York: Palgrave Macmilan.

Jurnal:

Bieler, Andreas dan Adam David Morton (2004), *A Critical Theory Route To Hegemony, World Order and Historical Change: Neo-Gramscian Perspectives in International relations,* Jurnal Capital & Class 2004 28:85. DOI: 10.1177/030981680408200106.

Majalah:

Direktorat Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Masyarakat ASEAN*, Edisi 9, September 2015.

Situs Internet:

http://indoprogress.com/2015/05/negara-kapitalisme-dan-hubungan-internasional-dalam-political-marxism/

https://www.academia.edu/2543455/Keterlibatan_Akademik-Intelektual_dalam_Modus_Kepemerintahan_Neoliberal_Kasus_Integrasi_Keamanan_ASEAN_

http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi15/jurnal%20edisi%2015_materi%207.pdf.

http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=20bde399-067d-4f89-b5f5-02ce46056cb4.

Lain-lain:

McLaren, Peter (tanpa tahun), *Critical Theory in Education: Power, Politics and Liberation,*

EDU 284, Los Angeles: Graduate School of Education and Information Studies, University of California.

rangga.adityaelias@gmail.com

mursitama@yahoo.com

Makalah Vennas VI AIHII (Virtuous-UNAND).

THIIndonesia_Virtuous_UNAND

NORM LIFE CYCLE: KONTRIBUSI KONSTRUKTIVISME DALAM PEMBENTUKAN IDENTITAS ASEAN UNTUK MEMPERKUAT ASEAN

Oleh :
Yusran dan Afri Asnelly

Abstraksi

ASEAN Community yang rencananya akan diimplemetasikan pada akhir 2015 masih menghadapi beberapa persoalan mendasar, diantaranya mengenai identitas ASEAN. Padahal, identitas merupakan elemen penting dalam menopang ekualitas berdirinya pilar *ASEAN Sosio-Cultural Community* disamping dua pilar lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan teori *Norm Life Cycle* yang terdapat dalam Konstruktivisme HI sebagai pendekatan yang dapat memberikan solusi dalam persoalan membangun identitas ASEAN. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan telaah terhadap teori, untuk membangun Identitas ASEAN melalui *Norm Life Cycle* akan melalui tiga tahapan penting yaitu *Norm Emergence*, *Norm Cascade*, dan *Internalization*. Sebelum memasuki tahap-tahap yang akan dilalui dalam *Norm Life Cycle* terlebih dahulu diadakan identifikasi terhadap komponen-komponen yang diperlukan dalam pembentukan identitas. Selanjutnya dengan berlandaskan pada teori *Norm Life Cycle* diajukan kerangka kerja yang akan dilalui ASEAN dalam pembentukan identitas. Setelah itu dilakukan penetapan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh setiap perangkat *Norm Life Cycle*. Sehingga, dengan mengaktualisasikan *Norm Life Cycle* dapat membantu ASEAN dalam membentuk dan memperkuat identitas dan sebagai bentuk kontribusi Studi HI dalam menyambut *ASEAN Community* 2015.

Key words: *ASEAN Community*, *ASEAN Sosio-Cultural Community*, Konstruktivisme, *Norm Life Cycle*, dan Identitas ASEAN.

"... the ASCC is the weakest pillar of the ASEAN Community
and is more an aspiration than an objective.
Therefore, extra attention should be devoted to make progress in this field
as it underpins the establishment of an ASEAN Community."
(Cuyvers dan Tummers, 2007: 18-19).

A. Pendahuluan

Performa Uni Eropa ternyata menjadi stimulan efektif dalam memunculkan integrasi baru di kawasan lainnya. Kawasan Asia Tenggara ikut larut dalam inklinasi ini. Melalui pengesahan *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 ASEAN (*Assosoation of Shouth East Asian Nations*) berkomitmen mengintegrasikan diri dengan membentuk Komunitas ASEAN yang akan diimplementasikan akhir tahun 2015. Meskipun menyadari secara fundamental kontur – ekonomi, politik dan sosial-budaya – negara-negara di ASEAN berbeda dengan Eropa, mereka tetap meneruskan pretensinya untuk berintegrasi. Preskripsi ini secara otomatis mengkondusikan "pekerjaan rumah" yang cukup berat bagi ASEAN.

Komunitas ASEAN didirikan atas tiga pilar: Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*/AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Sosio-Cultural Community/*ASSC) (Keng, 2009: 2). Ekspektasi ASEAN ketiga pilar itu dapat menopang Komunitas ASEAN. Namun sayang hingga saat ini ekualitas ketiga pilar tersebut masih dipersoalkan, sehingga mustahil untuk mengharapkan ASEAN dapat berdiri dengan kokoh.

ASCC adalah pilar paling lemah bila dibandingkan dengan dua pilar lainnya (Cuyvers dan Tummers, 2007: 18-19). Kontraproduktif dengan AEC yang tampak telah dipersiapkan dengan matang meskipun berjalan diantara tingginya disparitas ekonomi negara anggota ASEAN. Jika kondisi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan Komunitas ASEAN ke depan tidak lebih dari pragmatisme ekonomi politik negara anggota di kawasan yang mengatasnamakan solidaritas dalam satu komunitas belaka. Salah satu yang melemahkan pilar ASCC adalah polemik seputar identitas ASEAN.

Pembentukan identitas ASEAN adalah salah satu diantara deretan panjang pekerjaan yang harus diselesaikan ASEAN dalam waktu dekat. Pembentukan

identitas ASEAN hingga saat ini masih berada dalam problematika karena tiadanya kesepahaman mengenai identitas ASEAN yang dimaksud. Padahal identitas ASEAN sangat penting bagi eksistensi Komunitas ASEAN karena menjadi bagian esensial dalam menopang berdirinya pilar ASCC. Oleh karena itu penstudi Hubungan Internasional (HI) seyogianya mampu menelaah problematika pembentukan identitas ASEAN dan menemukan solusinya.

Pada prinsipnya kajian HI berkembang dalam ritme yang dinamis. Kondisi ini memuculkan spasi yang memungkinkan bagi perkembangan diskursus keilmuan tersebut. Interval pemikiran yang ekstensif begitu ramah terhadap hadirnya perspektif-perspektif baru. Mereka mendapat porsi tersendiri tanpa mensubstitusi ataupun mengeliminir perspektif yang telah ada sebelumnya. Selama prasyarat keilmuan secara empiris, ontologis dan epitemologisnya terpenuhi, perspektif baru dapat berkembang dengan baik dan bisa memberikan kontribusi dalam menelaah persoalan HI secara kontekstual.

Kemunculan konstruktivisme sebagai perspektif yang relatif anyar dalam studi HI adalah indikasi yang merepresentasikan dinamika dalam kajian HI. Ketidakpuasan para penstudi HI terhadap perspektif-perspektif yang pernah ada sebelumnya serta peliknya persoalan dalam kajian HI yang sulit dianalisis melalui perspektif lama, juga turut memotivasi kemunculan prespektif baru. Perkembangan konstruktivisme memiliki urgensi yang tinggi dalam kajian HI karena menurut Bilad (2011 : 66), konstruktivisme lahir sebagai pembaharuan atas paradigma-paradigma lama dan merangkul aspek-aspek moderat dua paradigma sebelumnya yang berseteru, rasionalis-positivis dan reflektivis-pospositivis (Bilad : 2011 , 66).

Dalam konstruktivisme, kepentingan dan identitas tidaklah sesuatu yang ditetapkan atau diberikan, tetapi muncul dan berubah melalui proses interaksi timbal balik dan sosialisasi (Acharya, 2007 : 14). Dengan demikian dalam konstruktivisme ada peluang untuk membentuk konstruksi sosial. Konstruksi sosial ini erat kaitannya dengan pembentukan identitas ASEAN yang mustahil muncul secara *given* tanpa adanya konstruksi.

Salah satu kontribusi substantif konstruktivisme dalam konstruksi sosial adalah teori *Norm Life Cycle* (NLC) atau Siklus Hidup Norma. NLC adalah model ataupun formulasi yang dapat membantu untuk menjelaskan konstruksi sosial dalam konstruktivisme (Rouleau, 2008: 3). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa NLC adalah berupa pola yang bekerja dalam suatu sistem untuk tujuan mengkonstruksi norma ataupun identitas pada suatu lingkungan sosial tertentu.

Problematika pembentukan identitas ASEAN yang hingga saat ini masih dalam ruang kontestasi membutuhkan pendekatan relevan, yang setidaknya mampu mendireksikan ataupun mereferensikan pembentukan konstruksi sosial. Konstruktivisme dan NLC tampaknya dapat direkomendasikan sebagai skema bagi ASEAN dalam pembentukan identitas, karena pembentukan identitas ASEAN pada dasarnya adalah upaya melakukan konstruksi sosial. Artinya, konstruktivisme melalui teori NLC-nya memiliki signifikasi dalam pembentukan identitas ASEAN. Pembentukan identitas ASEAN penting untuk diarusutamakan agar Komunitas ASEAN ke depan tidak hanya sekedar pragmatisme ekonomi politik bagi anggotanya semata. Oleh karena itu mengaktualisasikan NLC dalam pembentukan identitas ASEAN sangat menarik untuk dikaji. Sehingga tulisan ini akan fokus untuk melihat bagaimana ASEAN dapat menggunakan NLC dalam pembentukan identitas ASEAN.

B. Problematika dalam Pembentukan Identitas ASEAN

Kompleksitas dalam pembentukan identitas ASEAN berhubungan dengan problematika yang dihadapi dalam pembentukan identitas tersebut. Setidaknya ada beberapa problematika yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Disorganisasi koordinasi lintas sektoral

Sehubungan dengan kondisi ini Kesavapany dan Hew (2007) yang dikutip oleh L. Cuyvers dan R. Tummers, dalam “The Road to ASEAN Community”, *CAS Discussion Paper* No. 57 mengungkapkan bahwa:

> *After all, economic and security cooperation is very difficult without any ASEAN socio-cultural awareness. Unlike the AEC and the ASC, which*

> *are directed by Economic and Foreign Ministers, the leadership of the ASCC stays ambiguous. A lot of the ASCC objectives are addressed by other ASEAN sectors or overlap with plans of the ASC. Consequently, the challenge in realizing the ASCC lies in formulating more specific targets and in improving inter-sectoral coordination.*

Dari kajian tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran sosial-budaya dalam integrasi di ASEAN masih rendah. Kondisi itu berakibat pada kurang fokusnya instrumen penyelenggara integrasi baik organisasi ASEAN maupun pemerintah negara anggota terhadap pilar ASCC yang memayungi persoalan identitas di bidang sosial-budaya. Rendahnya kesadaran ini tentunya berimbas pula pada minimnya upaya untuk membentuk identitas ASEAN.

Secara organisasi AEC dan APSC lebih terorganisir dengan baik dan diarahkan oleh Menteri Ekonomi dan Menteri Luar Negeri. Sementara ASCC diorganisir dalam ambuguitas sehingga terjadi tumpang tindih rencana aksi ASCC dengan pilar lainnya. Kondisi ini tentunya membutuhkan peningkatan koordinasi lintas sektoral yang berpihak pada penyempurnaan ASCC. Dengan demikian, disorganisasi kordinasi lintas sektoral yang melemahkan pilar ASCC menyumbang problematika terhadap sulitnya pembentukan identitas ASEAN.

b. *Blueprint* dengan *Action Plan* pilar ASCC yang belum integral

Blueprint ASCC terdiri dari: a) *human developmen;* b) *social welfare and protection sosial justice and rights;* c) *ensuring environmental sustainability;* d) *building the ASEAN identity;* dan e) *narrowing the development goal* (Redaksi, 2012: 89-90). Sedangkan *Action Plan* yang disepakati Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane terdiri dari: a) untuk membangun sebuah komunitas masyarakat peduli; b) mengelola dampak sosial dari integrasi ekonomi; c) meningkatkan kelestarian lingkungan; dan d) untuk memperkuat dasar-dasar kohesi sosial daerah (Cuyvers dan Tummers, 2007: 18-19).

Jika diperhatikan, dari lima poin *Blueprint* ASCC di atas poin d berbunyi membangun identitas ASEAN. Akan tetapi dalam empat poin *Action Plan* yang ditetapkan, belum ada poin yang menyentuh identitas ASEAN tersebut. Kondisi ini

seharusnya mendapat perhatian serius karena berhubungan dengan kelemahan dokumen resmi sebuah organisasi legal di tingkat regional. Fakta ini sekaligus menunjukkan adanya koneksi yang terputus diantara keduanya karena *Action Plan* yang disusun belum integral tersebab masih ada poin *Blueprint* yang belum dijelaskan dalam *Action Plan*. Oleh karena itu evaluasi terhadap keduanya adalah hal terpenting yang harus dilakukan ASEAN.

c. *Blueprint* yang belum mengejawantahkan identitas ASEAN

Dalam *Blueprint* ASCC yang dipublikasikan oleh *Public Outreach and Civil Siciety Division* Sekretariat ASEAN, identitas ASEAN berbunyi:

> *The ASEAN identity is the basis of Southeast Asia's regional interests. It is our collective personality, norms, values and beliefs as well as aspirations, as one ASEAN community. ASEAN will mainstream and promote greater awareness and common values in the spirit of unity in diversity at all levels of society* (2009: 20).

Defenisi yang disebutkan dalam dokumen resmi ASEAN tersebut hanya menjelaskan ASEAN sebagai sebuah entitas sosio-kultural. Belum tampak adanya penjelasan yang kongkrit mengenai apa *collective personality*-nya, apa normanya, apa common *values*-nya, dan lain sebagainya yang bisa memperkuat pemahaman terhadap identitas ASEAN yang dimaksudkan. Seperti yang dipublikasikan Jurnal Kajian Lemhanas RI (2012) yang mengatakan bahwa khusus terkait dengan ASCC, sampai sejauh ini *Action Plan* tentang bagaimana penyatuan ataupun pemaknaan dari '*building the ASEAN identity*' belum ada. Untuk itu perlu ada semacam evaluasi terhadap *Action Plan* tersebut (Lemhanas RI, 2012 : 90-91).

Jika dikritisi lebih intensif lagi kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pemaknaan terhadap identitas ASEAN dalam *Blueprint* tersebut, sehingga belum mampu untuk mengejawantahkan secara jelas bentuk identitas ASEAN yang dimaksud. Jika dianalogikan seperti sebuah kemasan tanpa isi, ataupun figura tanpa gambar. Sehingga rasional pula jika muncul sintesa bahwa identitas ASEAN masih

lemah dalam pemaknaan secara harfiah dan belum memiliki bentuk yang konkrit.

d. Disparitas sosial-budaya di ASEAN

Terlepas dari beberapa persoalan teknis yang disebutkan sebelumnya, sesungguhnya ASEAN juga memiliki problematika yang substansial dalam pembentukan identitasnya. Tingginya disparitas sosial-budaya atau dengan kata lain ragam kemajemukan sosial-budaya yang terdapat di negara anggota ASEAN juga menyulitkan pembentukan identitas ASEAN. Jonsson (2008) menyebutkan faktor kemajemukan sosial-budaya sebagai kendala terbesar dalam pembentukan identitas ASEAN. Yaakub (2013) juga mengkaji bahwa faktor keberagaman budaya dan bahasa menyulitkan pembentukan identitas ASEAN.

Disparitas sosial-budaya menjadi kendala yang terbesar karena akan berhubungan dengan egosentris masing-masing negara. Diantara sepuluh negara anggota tentunya akan sulit untuk memilih dan menentukan sosial-budaya negara mana yang akan diadopsi untuk membentuk identitas. Jika semua negara ingin menjadikan sosial-budaya negaranya sebagai identitas ASEAN, bagaimana pula cara untuk mengakomodirnya. Akan banyak persoalan dan perdebatan yang muncul. Problematika inilah yang tampaknya hingga saat ini menyulitkan ASEAN dalam membentuk identitas ASEAN pada pilar sosial-budaya.

Problematika dalam pembentukan identitas ASEAN di atas memang cukup rumit untuk diatasi. Sungguhpun demikian, mencari solusi atas keseluruhan problematika tersebut adalah pekerjaan mendesak mengingat implementasi Komunitas ASEAN yang tidak dapat menunggu lagi. Kalaupun ASEAN mengimplementasikan Komunitas ASEAN tanpa adanya kesepahaman dan wujud konkrit identitas ASEAN, maka niscaya perjalanan Komunitas ASEAN ke depan akan kehilangan esensi dalam membangun solidaritas dan hanya akan menjadi area pragmatisme ekonomi politik semata. Oleh karena itu yang dibutuhkan ASEAN saat ini adalah tingginya tingkat keseriusan organisasi dan negara anggota untuk

pembentukan identitas ASEAN. Disamping itu, ASEAN juga membutuhkan formulasi yang tepat sebagai arahan dalam pembentukan identitas ASEAN.

C. Konstruktivisme sebagai Alternatif

Berbagai problematika dalam pembentukan identitas ASEAN di atas terutama tingginya disparitas sosial-budaya di ASEAN menggambarkan cukup sulitnya membentuk identitas ASEAN. Meskipun sulit, bukan berarti tidak bisa ataupun mustahil dilakukan. Pada dasarnya pembentukan identitas berhubungan dengan konstruksi sosial. Oleh karena itu pembentukan identitas ASEAN butuh pendekatan ataupun perspektif yang mengkaji tentang konstruksi sosial.

Diantara beberapa perspektif yang mendominasi kajian HI, konstruktivisme dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembentukan identitas ASEAN karena konstruktivisme berbicara tentang konstruksi sosial. Konstruktivisme termasuk perspektif yang relatif baru dalam HI. Maja Zehfuss mengatakan bahwa konstruktivisme muncul sebagai kutub yang berbeda pada dua perdebatan besar sebelumnya, menantang asumsi dalam rasionalisme, dan gagasan partikular yang sebelumnya tidak pernah berubah dalam realitas politik internasional (Zehfuzz : 2002 , 3-4).

Konstruktivisme memang menentang asumsi dalam rasionalisme. Akan tetapi, secara epistemologis terdapat persamaan. Menurut Bilad, secara epistimologis konstruktivisme memiliki banyak persamaan dengan pospositivis sehingga dalam konteks ini konstruktivisme berada dalam satu barisan anti-positivisme. Sedangkan secara ontologis, paradigma ini menawarkan gagasan dasar bahwa struktur internasional adalah sebuah konstruksi sosial. Ia terbangun oleh praktek intersubjektif antar aktor yang kemudian terjadi hubungan saling mempengaruhi antara struktur dan aktor-aktor penciptanya (Bilad : 2011, 66).

Banyak pemikir HI yang memberikan penjelasan tentang konstruktivisme. Alexander Wendt menyatakan bahwa konstruktivis berpikir tentang bagimana membuat hubungan sosial. Konstruktivis berpikir bahwa kepentingan negara dalam bagian penting dibangun oleh struktur sistemik, tidak eksogen kepada mereka; ini

mengarah ke kemasyarakatan dan bukan strukturalisme mikro-ekonomi (Wendt : 1995, 73-74). Konstruktivisme adalah pendekatan dalam hubungan internasional yang memfokuskan pada interaksi sosial agen atau aktor dalam politik dunia (Griffiths dan Solomon : 2009, 123).

Dalam konstruktivisme, struktur sosial merupakan bagian yang penting. Wendt menjelaskan struktur sosial memiliki tiga unsur: saling berbagi ilmu pengetahuan; sumber daya material; dan praktek. Pertama, struktur sosial didefinisikan, sebagian, oleh pemahaman bersama, harapan, atau pengetahuan. Ini membentuk situasi dan sifat aktor dalam hubungan mereka, apakah kerjasama atau konfliktual. Kedua, struktur sosial termasuk sumber daya material seperti emas dan tank. Konstruktivis berpendapat bahwa sumber daya materi hanya memperoleh makna bagi tindakan manusia melalui struktur dalam berbagi pengetahuan dimana mereka ditanamkan. Konstruktivisme sesuai dengan perubahan kekuatan material dalam mempengaruhi hubungan sosial selama efek tersebut dapat ditunjukkan untuk mengandaikan hubungan sosial yang masih lebih dalam. Ketiga, struktur sosial yang ada, tidak dalam kepala aktor maupun dalam kemampuan materi, tetapi dalam praktek. Struktur sosial hanya ada dalam proses (Wendt : 1995, 73-74).

Dari beberapa penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa konstruktivisme merupakan alternatif utama dalam mengkaji konstruksi sosial dalam masyarakat di berbagai level. Pada level yang sederhana, melalui analisis norma dan identitas, konstruktivisme dapat menelaah tindakan masyarakat terhadap isu tertentu. Melalui konstruktivisme juga dapat dikaji munculnya kebijakan luar negeri yang berbasis pada norma dan identitas suatu negara-bangsa. Di tingkat regional, konstruktivisme juga dapat memberikan pengkajian tentang terbangunnya regionalisme dan integrasi. Sedangkan di level internasional yang lebih luas, konstruktivisme juga dapat mengkaji munculnya norma-norma baru yang berlaku dalam sistem internasional, dan lain sebagainya.

Menurut Sterling-Folker yang dikutip oleh Andrew Ossie Carr, konstruksi sosial terjadi melalui proses berkelanjutan yang berubah dan mengalir dengan agen yang mempengaruhi struktur mereka beroperasi. Carr juga mengutip Boekle,

Rittberger dan Wagner, yang mengkaji bahwa dalam melakukan konstruksi sosial, konstruktivis berpendapat bahwa pelaku membuat keputusan berdasarkan norma-norma dan aturan tentang latar belakang faktor subjektif, pengalaman sejarah-budaya dan keterlibatan dalam kelembagaan. Konstruktivis juga mengajukan pembuatan keputusan dalam konstruksi sosial yang berdasarkan pada pentingnya komunikasi, dan logika persuasif dalam pengambilan keputusan. Menurut Carr, artinya, mereka dibimbing oleh harapan bersama secara sosial dalam perilaku (Carr : 2012, 22).

Dari kajian Carr yang mengutip beberapa kajian lain tersebut bisa dipahami bahwa konstruksi sosial dapat dilakukan melalui proses yang berdasarkan pada kepentingan dan harapan bersama pada agen yang menjadi aktor dalam suatu lingkungan komunitas. Komunitas yang dimaksud bisa saja pada level terendah dalam kelompok individu, masyarakat di suatu negara, negara, regional, dan sistem internasional. Komunikasi dan logika persuasif menjadi hal penting dalam proses konstruksi yang dilakukan.

Dimasukkannya pembentukan identitas ASEAN ke dalam *Blueprint* pilar ASCC menunjukkan bahwa sesungguhnya anggota ASEAN memiliki sebentuk harapan bersama agar dapat membentuk atau menciptakan suatu identitas ASEAN. Harapan bersama itu tentunya dengan keyakinan bahwa dengan terintegrasinya masyarakat ASEAN dalam sebuah identitas ASEAN yang dihargai bersama, dapat medukung kesuksesan Komunitas ASEAN di masa yang akan datang. Harapan bersama itu adalah modalitas yang signifikan untuk mempertanyakan komitmen ASEAN dalam membentuk identitas, sekaligus sebagai kekuatan yang mendorong perilaku dalam upaya pembentukan identitas ASEAN. Harapan bersama tersebut dapat diposisikan *key point* dalam konstruksi sosial yang dimaksudkan dalam konstruktivisme. Dengan demikian, konstruktivisme dapat menjadi perspektif alternatif utama dalam melakukan konstruksi sosial untuk tujuan pembentukan identitas ASEAN.

D. *Norm Life Cycle* dalam Konstruktivisme

Semenjak masuk ke dalam barisan perspektif pada kajian HI, konstruktivisme terus mengalami dinamika. Karena relatif baru, konstruktivisme masih memiliki kelemahan. Mark Rouleau mengatakan bahwa konstruktivisme memiliki sejumlah kelemahan yang berasal dari perkembangan elektik paradigma selama dua dekade terakhir. Konstruktivisme muncul dalam kantong ilmu hubungan internasional terutama melalui tantangan independen dari neo-realis dan neo-liberal. Kurangnya sinkronisasi meninggalkan konstruktivisme tanpa kerangka kesatuan tunggal. Akibatnya, perbedaan muncul dalam penafsiran paradigma dan terminologi tersebut. Untuk para kritikus, hal ini bisa berpengaruh pada rumitnya komunikasi penelitian konstruktivis. Komunikasi lebih dikaburkan oleh kurangnya formalisme dalam konstruktivisme (Rouleau : 2008, 3).

Kurangnya kerangka formal untuk mekanisme kausal, telah membuat konstruktivis berjuang untuk menyusun gambaran yang tidak kontroversial dari peran norma dalam hubungan internasional. Diantara konstruktivis yang berjuang untuk menyusun kerangka formal guna menjawab pandangan yang melemahkan konstruktivisme itu adalah Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink. Menurut kajian Mark Rouleau, Finnemore dan Sikkink telah menciptakan kerangka konstruktivis singkat yang dikenal sebagai *Norm Life Cycle* (NLC) untuk mengatasi masalah kelemahan konstruktivisme ini. NLC adalah kontribusi penting untuk literatur konstruktivis karena memberikan definisi formal dari pengaruh makro norma pada aktor, berusaha untuk mempertahankan penerimaan sosial. Hal tersebut telah dilakukan dengan membingkai munculnya dan evolusi pada norma-norma dalam jalur tiga-tahap perkembangan norma. Jalur ini dimulai dengan *norm entrepreneurship*, mengarah pada pembentukan massa kritis pada pengikut, dan berakhir dengan penguatan norma yang menghasilkan internalisasi norma. Kerangka NLC menambahkan level ketepatan (ketelitian) yang diperlukan pada konstruktivis (Rouleau : 2008, 3).

Dalam tulisan Rouleau (2008: 4) disebutkan bahwa Hoffmann (2002) melihat potensi besar dalam kerangka NLC, walaupun menurutnya perlu adanya peningkatan-

peningkatan. Hoffman kemudian mengembangkan model NLC Finnemore dan Sikkink. Karyanya menarik teori kompleksitas untuk menghasilkan skema pengambilan keputusan adaptif yang bisa memecahkan masalah ini. Karena menurut Hoffmann NLC tidak memiliki sarana yang cukup untuk mengeksplorasi validitas asumsi teoritis, maka Hoffmann menggunakan eksperimen berbasis agen untuk menguji dan kemudian mendukung validasi model NLC verbal milik Finnemore dan Sikkink ini. Tulisan tersebut menegaskan munculnya NLC memiliki signifikansi tersendiri terhadap konstruktivisme karena memiliki potensi besar dalam memperkuat posisi konstruktivisme sebagai bagian dari barisan paradigma dalam ilmu HI. Sehingga akurasi konstruktivisme tidak lagi dipertanyakan (Rouleau : 2008, 4).

Dari penjelasan tersebut diketauhi bahwa konstrutivisme pada awalnya memiliki sejumlah kelemahan. Kurangnya sinkronisasi dan formalisme membuat konstruktivisme memperoleh kritik yang melemahkan. Tetapi kelemahan itu membuat para pemikir konstruktivis berjuang untuk menemukan kerangka formal sebagai jawaban terhadap kritikan dan sekaligus upaya untuk semakin menyempurnakan konstruktivisme dalam HI. Pemikiran Finnemore dan Sikkink menjadi kontribusi penting bagi konstruktivisme karena berhasil menjawab kritik melalui teori *Norm Life Cycle* (NLC).

Norm Life Cycle (NLC) atau Siklus Hidup Norma adalah model ataupun formulasi yang dapat membantu untuk menjelaskan konstruksi sosial dalam konstruktivisme. NLC adalah kontribusi penting untuk literatur konstruktivis karena memberikan definisi formal dari pengaruh makro norma pada aktor, dan berusaha untuk mempertahankan penerimaan sosial (Rouleau 2008: 3). Dari kajian Rouleau ini ditemukan gambaran bahwa NLC adalah berupa pola yang bekerja dalam suatu sistem untuk tujuan mengkonstruksi norma ataupun identitas pada suatu lingkungan sosial tertentu. Dengan demikian, NLC dapat diajukan sebagai model ataupun formulasi yang dapat membantu untuk menjelaskan konstruksi sosial dalam konstruktivisme.

Dalam publikasinya, inovator NLC Finnemore dan Sikkink (1998: 896-905) memberikan pola dasar sebagai kerangka kerja dalam siklus hidup norma (NLC) yang melalui tiga tahapan proses, seperti gambar berikut:

Gambar 1
Tahapan NLC

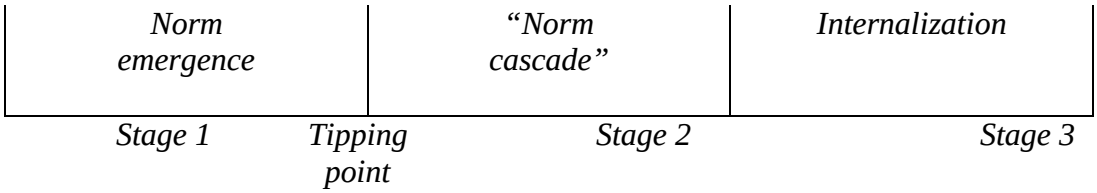

Sumber: Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, (1998), "International Norm Dynamics and Political Change", *International Organization*, Vol. 52, No. 4, edisi International Organization at Fifty:Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn), hlm. 896.

Gambar di atas adalah tahapan secara garis besar yang akan dilalui dalam pembentukan norma pada NLC. Tahapan dan instrumen dalam NLC yang lebih lengkap adalah seperti berikut:

Tabel 1
Stages of Norms

	Stage 1 *Norm emergence*	*Stage 2* *Norm cascade*	*Stage 3* *Internalization*
Actors	*Norm entrepreneurs with organizational platforms*	*States, international organizations, networks*	*Law, professions, bureaucracy*
Motives	*Altruism, empathy, ideational, commitment*	*Legitimacy, reputation, esteem*	*Conformity*
Dominant mechanisms	*Persuasion*	*Socialization, institutionalization, demonstration*	*Habit, institutionalization*

Sumber: Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, International Norm Dynamics and Political Change, International Organization, Vol. 52, No. 4, International

Organization at Fifty: Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn, 1998), hlm. 898.

Dalam pembentukan norma atau identitas, tahapan pertama menurut Finnemore dan Sikkink (1998: 896-905) adalah asal usul atau munculnya norma. Meskipun sedikit pekerjaan teoritis yang berfokus pada "pembangunan norma" perhitungan asal norma di kebanyakan studi menekankan pada manusia sebagai agen, ketidakpastian, kejadian yang kebetulan, dan peristiwa yang menguntungkan, menggunakan proses pelacakan atau geneologi sebagai metode. Generalisasi dari perhitungan tersebut menghasilkan dua elemen yang secara bersama bisa menciptakan kesuksesan dalam memunculkan norma baru, yaitu *norm entrepreneurs* (pengusaha norma) dan platform organisasi yang digunakan oleh *norm entrepreneurs*.

Pada tahap pertama ini *norm entrepreneurs* yang bekerja dalam platform organisasinya berupaya untuk mencari dan mencapai *tipping* atau *threshold point* (titik puncak). Suatu norma dapat dikatakan mencapai ambang batas atau titik puncak setelah *norm entrepreneurs* berhasil membujuk massa kritis negara untuk menjadi para pemimpin yang mengadopsi norma-norma baru.

Tahapan kedua adalah "penjalaran" atau "pengaliran" atau "penularan" norma. Setelah mencapai *tipping* atau *threshold point* akan terjadi sedikit perubahan normatif tanpa gerakan domestik yang signifikan dalam mendukung perubahan tersebut. Setelah titik puncak tercapai, akan dimulai terjadinya dinamika yang berbeda. Lebih banyak negara yang mengadopsi norma baru tersebut, lebih cepat pula terjadinya perubahan, bahkan tanpa tekanan domestik. Studi empiris menunjukkan bahwa, pada titik ini efek percontohan internasional atau regional atau "penularan" terjadi dimana pengaruh norma internasional dan transnasional menjadi lebih penting daripada politik dalam negeri untuk menciptakan perubahan norma. Penularan adalah metafora yang terlalu pasif, Finnemore dan Sikkink berpendapat bahwa mekanisme utama untuk mempromosikan penjalaran atau pengaliran norma adalah proses sosialisasi aktif yang dimaksudkan untuk mendorong pengikut norma.

Sosialisasi adalah mekanisme dominan dalam penjalaran norma. Melalui mekanisme mana para pemimpin norma membujuk orang lain untuk mematuhi? Apa sosialisasi yang dilakukan? Apa motif yang mendorong negara-negara yang menentang norma mematuhi dengan cepat? Negara-negara mematuhi norma-norma dalam tahap dua untuk alasan yang berhubungan dengan identitas mereka sebagai anggota masyarakat internasional. Pengakuan bahwa identitas negara secara fundamental dibentuk oleh perilaku negara, dan bahwa identitas negara pada gilirannya dibentuk oleh budaya. Identitas seseorang sebagai anggota dari kategori sosial tertentu, dan sebagai bagian dari kategori pengertian itu adalah bahwa semua anggota mengikuti norma-norma tertentu.

Tahapan ketiga adalah internalisasi. Pada penjalaran norma yang ekstrim, norma dapat menjadi begitu diterima secara luas karena mereka diinternalisasi oleh aktor-aktor dan mencapai sebentuk "taken-for-granted" (dianggap biasa) yang hampir secara otomatis akan membuat kesesuaian dengan norma baru. Dalam hal ini tidak terjadi kontroversi, sehingga keadaan ini cenderung diabaikan oleh ilmuwan politik. Akan tetapi dalam situasi yang terjadi kontroversi, sering kali dibutuhkan agen yang *powerful* dan dapat menembus sasaran norma untuk menginternalisasikan norma-norma di antara anggota mereka.

Pelatihan profesional dapat dilakukan tidak lebih dari sekedar mentransfer pengetahuan teknis. Mereka secara aaktif harus mensosialisasikan masyarakat untuk menghargai hal-hal tertentu di atas yang lain, seperti hal nya kemunculan norma baru tersebut. Dalam hal ini birokrasi negara dan organisasi internasional menjadi bagian yang penting untuk diberdayagunakan dalam internaslisasi yang dilakukan. Sejumlah studi empiris telah mendokumentasikan bahwa internalisasi norma yang diselenggarakan oleh para profesional menentukan kebijakan.

Dengan memahami NLC di atas, memunculkan gagasan untuk mengaplikasikan teori tersebut pada kasus ASEAN. Pembentukan identitas ASEAN mau tidak mau harus diakui sebagai kebutuhan vital dalam berintegrasi. Mengacuhkan persoalan identitas ini sama saja dengan mengikis proses integrasi yang sedang berlangsung. Karena hanya melalui identitas sosial-budaya masyarakat

ASEAN dapat menemukan rasa ke-kita-an nya. Rasa ini akan menjadi material utama untuk membangun solidaritas masyarakat di segala lapisan. Dengan solidaritas tersebut ASEAN ke depan tidak hanya sekedar media untuk menjalankan pragmatisme ekonomi dan politik di kawasan saja.

Belum terbentuknya identitas ASEAN hingga saat ini secara harfiah dalam tulisan maupun secara konkrit bisa jadi karena selama ini ASEAN belum menggunakan model ataupun formulasi yang mendukung. Konstruktivisme telah membuka ruang yang lebar bagi konstruksi sosial, dimana sejatinya pembentukan identitas ASEAN adalah sebentuk konstruksi sosial yang harus dilakukan di lingkungan ASEAN. Lebih jauh lagi, upaya penyempurnaan konstruktivisme telah memunculkan teori NLC yang menggambarkan model ataupun formulasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk membentuk norma dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam hal ini, membentuk identitas ASEAN dengan kata lain adalah membentuk norma di bidang sosial-budaya dalam rangka memperkuat pilar ASCC. Hanya dengan upaya mencapai ekualitas pilar ASCC dengan dua pilar lainnya, ASEAN dapat diperkuat.

E. Pembentukan Identitas ASEAN dalam Konteks *Norm Life Cycle* sebagai Kontribusi Konstrukvisme untuk Pengutan ASEAN

Dari penjelasan singkat tentang NLC di atas, diketahui dengan jelas bahwa NLC dalam konstruktivisme dapat menjadi alternatif utama untuk melakukan konstruksi sosial. Konstruksi sosial dalam upaya pembentukan identitas ASEAN bisa dicoba dilakukan melalui penerapan kerangka NLC. Dengan demikian tulisan ini mengajukan bahwa NLC dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembentukan identitas ASEAN di tengah tingginya disparitas sosial-budaya diantara negara anggotanya. Berdasarkan analisis mendalam terhadap teori NLC, berikut ini penulis mengajukan beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh ASEAN dalam menggunakan NLC sebagai acuan formulasi untuk pembentukan identitas ASEAN.

a. Identifikasi komponen yang diperlukan dalam pembentukan identitas ASEAN dengan kerangka NLC

Agar ASEAN dapat menngunakan NLC dalam pembentukan identitas ASEAN, langkah pertama yang diperlukan adalah identifikasi komponen. Dengan menghimpun dan mengolah data-data dari berbagai sumber yang berbicara tentang NLC, penulis mengidentifikasi komponen-komponen yang dibutuhkan ASEAN untuk membangun norma ataupun identitas ASEAN di bidang sosial-budaya dalam kerangka NLC. Komponen-komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Agen adalah instrumen yang menerjemahkan ide-ide ke dalam struktur normatif (Payne : 2001, 36-71). Agen adalah dinamis, seperti keinginan mereka, tindakan, dan bahkan persepsi dipengaruhi oleh perubahan (kadang-kadang lambat) konteks, dimana mereka bisa menemukan dirinya sendiri (lingkungan intersubjektif mereka membentuk mereka) (Hoffmann : 2003, 44). Dalam hal ini agen dapat juga dikatakan sebagai aktor. Dalam pembentukan identitas ASEAN, negara dan seluruh anggota masyarakat ASEAN di berbagai unsur dan laposan dapat berfungsi sebagai agen.
2. Identitas Kolektif (makna kolektif). Identitas kolektif (makna kolektif) bisa dilihat sebagai ketergantungan kolektif dalam bagaimana kepentingan didefinisikan. *Self-interest* dan *collective interest* dikonseptualisasikan sebagai efek jangkauan dan aturan dalam identitas sosial yang melibatkan sebuah identifikasi (Zehfuss : 2002, 15). Oleh karena itu ketertarikan utama konstruktivis adalah pada bagaimana aktor politik menghasilkan pemahaman intersubjektif yang mendasari norma-norma. Perhatian besar diarahkan pada komunikasi, terutama pada pesan yang persuasif, yang diupayakan, dengan defenisi, untuk mengubah pilihan aktor dalam tantangan saat ini, atau untuk membuat makna kolektif yang baru (Payne : 2001, 36-71). Identitas kolektif menganggap hubungan antara *Self* dan *Other* untuk kesimpulan logisnya, identifikasi. Aktor yang memiliki identitas kolektif mendefinisikan kepentingan mereka pada level agregasi tertinggi, berdasarkan rasa solidaritas, komunitas, dan loyalitas. Identitas kolektif mengacu pada identifikasi positif

sebagai sesuatu yang kognitif dan bagian dari upaya untuk mencapai kesejahteraan (Zehfuss : 2002, 15).

Bagi ASEAN, penemuan identitas kolektif bisa jadi akan menjadi persoalan yang sangat sulit. Hal itu disebabkan oleh tingginya disparitas dan besarnya kemajemukan sosial budaya yang terdapat di ASEAN. Kendati sulit, dengan kerjasama yang solid dari seluruh anggota ASEAN penemuan identitas kolektif ini tentu dapat dilakukan. Akan tetapi tulisan ini tidak membahas mengenai cara yang dapat dilakukan ASEAN dalam mencari dan merumuskan gagasan ideasional, karena tulisan ini lebih fokus pada taha-tahap yang dapat dilalui ASEAN untuk membentuk identitas ASEAN.

3. Persuasi. Memang, persuasi dianggap sebagai mekanisme terpusat yang penting untuk membangun dan merekonstruksi fakta sosial. Klaim normatif akan menjadi kuat dan bertahan dengan bersikap persuasif. Lebih luas lagi, persuasi adalah ‘proses’ dimana tindakan agen menjadi struktur sosial, ide menjadi norma, dan subjektif menjadi intersubjektif (Payne : 2001, 36-71).
4. *Framing*. *Norm entrepreneur* harus mengidentifikasi dan mengadvokasi norma secara retoris untuk tujuan mendorong penerimaan yang lebih luas. Persuasi bukan satu-satunya cara untuk mempromosikan norma, dengan aktor juga menggunakan kekuatan material untuk membantu penyebaran norma tapi persuasi adalah yang pertama dan elemen penting dari strategi sosialisasi yang lebih luas (Carr : 2012, 40-42). Sebuah *frame* adalah perangkat persuasif yang digunakan untuk ‘memperbaiki arti, mengatur pengalaman’, peringatan kepada yang lain bahwa kepentingan mereka dan mungkin identitas mereka dipertaruhkan, dan mengusulkan solusi untuk masalah yang sedang dihadapi. Untuk tujuan pembangunan norma, *frame* memberikan penafsiran tunggal dari situasi tertentu dan kemudian menunjukkan perilaku yang sesuai untuk konteks itu. *Frame* merupakan modal dasar untuk membangun resonansi norma secara luas, dan dengan demikian mereka berfungsi sebagai perintah normatif yang sah (Payne : 2001, 36-71).

5. Intersubjektifitas. Pemahaman intersubjektifitas membentuk sketsa struktur ideasional yang sesuai dan yang tidak sesuai setidaknya dalam artian yang tidak langsung. Batas-batas antara yang sesuai dan yang tidak sesuai tidak ditentang lagi. Struktur ideasional membuat gagasan dan identifikasi masalah mudah untuk diidentifikasi. Gagasan yang dimaksud disini hanyalah apa yang dianggap pantas dan tidak pantas tergantung norma-norma dan identitas tertentu yang merupakan sketsa dari layak atau tidaknya (Bucher : 2007, 18-19). Perilaku dipengaruhi oleh intersubjektifitas, dan bukan aspek materi. Struktur intersubjektifitas dibentuk oleh *collective meanings*. Aktor memperoleh identitas dari pemahaman dan harapan tertentu tentang diri dengan berpartisipasi dalam *collective meanings*. Hubungan antara konsepsi *self* dan *other* menempatkan identitas sebagai inti pada pendekatan. '*Culture of anarchy*' tergantung bagaimana identitas dapat didefinisikan (Wendt: 1995, 73-74).
6. Struktur juga dinamis sebagai aturan permainan dan lembaga yang dipakai hanya oleh tindakan dan interaksi pada agen (Hoffmann : 2003, 44). Struktur ideasional adalah perangkat tertentu untuk mengesahkan norma dan identitas. Struktur ideasional mendukung norma-noma atau identitas tertentu. Ini juga berarti bahwa norma-norma dan identitas lainnya dapat diklasifikasikan sebagai tidak patut atau tidak sah. Struktur ideasional tidak hanya menentukan apa yang tepat atau diterima saat itu, tetapi juga harus menunjukkan apa yang pantas dan tidak dapat diterima.hal ini tergambar dalam batasan yang jelas untuk konstruksi identitas dan struktur ideasional pada umumnya. Ketika ruang normatif dibangun, maka ada kemungkinan untuk mengidentifikasi apa yang ada di luar ruang ini (yang berada di luar (others/outside) (Bucher : 2007, 18-20).
7. Strategi sosialisasi. Dalam rangka untuk membujuk aktor-aktor lain untuk mendukung norma tertentu, pengusaha norma harus mengembangkan strategi sosialisasi yang menggabungkan pengungkit kekuatan material, strategis, hukum dan politik manuver (Nagtzaam 2009: 67). Sosialisasi ini, bukan

tentang perubahan pemaksaan dalam perilaku tetapi proses dimana norma diinternalisasikan negara yang berasal dari tempat lain dalam sistem internasional (Alderson 2001: 416). Karena itu strategi sosialisasi adalah salah satu yang berusaha untuk mendorong perilaku adaptif di mana praktik-praktik lokal yang dibuat konsisten dengan ide eksternal (Acharya 2010: 19).

8. Stigmatisasi. Stigmatisasi membantu memperjelas batas-batas perilaku yang dapat diterima identitas dan konsekuensi dari ketidaksesuaian. Stigmatisasi adalah proses pemahaman yang memberikan pelajaran tentang apa yag dimaksud oleh norma, seberapa jauh norma itu akan berkembang. Stigmatisasi berperan sebagai the norm-breaker yang memperkuat pengertian normalitas, yang mengacu pada dua hal, yakni aspirasi masa depan dan situasi factual saat ini. stigmatisasi dapat dilakukan dimana tidak ada ancaman internal atau eksternal yang mengancam stabilitas masyarakat dalam waktu dekat. Dengan demikian, pada tingkat yang paling dasar, stigma membantu dunia tetap bersatu (Adler : 2014, 8).
9. *Norm entrepreneurs*. Pengusaha norma mencoba untuk meyakinkan massa kritis negara (pemimpin norma) untuk merangkul norma-norma baru. Pengusaha norma yang sangat penting bagi mereka membawa masalah menjadi perhatian para pemimpin negara dan menyajikan alasan untuk menjelaskan mengapa mengadopsi norma melegitimasi atau delegitimasi perilaku tertentu yang bisa membantu memecahkan masalah yang dirasakan, sehingga meningkatkan atau menurunkan kemungkinan bahwa perilaku ini akan terjadi (Finnemore dan Sikkink : 1998, 896).
10. Gagasan Ideasional. Komitmen ataupun gagasan ideasional adalah motivasi utama ketika *norm entrepreneurs* mempromosikan norma atau gagasan karena mereka percaya pada cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma, meskipun mengejar norma mungkin tidak berpengaruh pada kesejahteraan mereka (Finnemore dan Sikkink : 1998, 896).

Beberapa komponen di atas menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas dengan menggunakan kerangka NLC. Agar dapat menjadikan NLC sebagai

acuan, ASEAN harus bisa memunculkan dan menciptakan komponen-komponen tersebut agar dapat tempatkan pada kerangka kerja NLC.

b. Kerangka kerja NLC dalam pembentukan identitas ASEAN

Setelah mengidentifikasi komponen-komponen yang diperlukan dalam membangun norma untuk tujuan pembentukan identitas ASEAN, penulis selanjutnya mengajukan kerangka kerja. Kerangka kerja ini diperoleh melalui analisis yang mendalam terhadap teori NLC. Untuk tujuan pembentukan identitas ASEAN dalam konteks teori NLC, penulis mengajukan kerangka kerja sebagai berikut:

Bagan 2
Formulasi Kerangka Kerja NLC dalam Pembentukan Identitas ASEAN

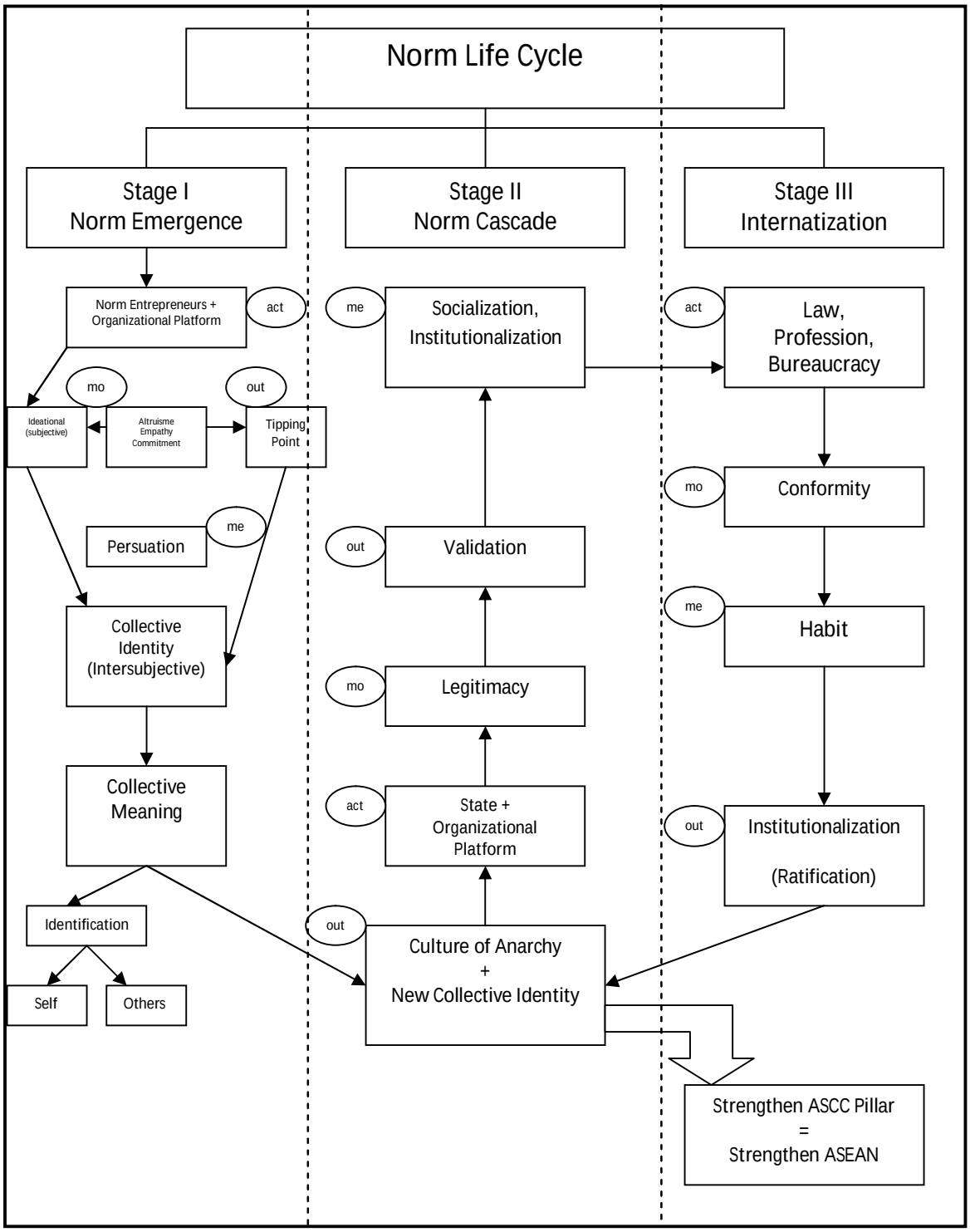

Keterangan:
act: Actors mo: Motives me: Mechanisms out: Outcome
Sumber: Diolah oleh Penulis dari berbagai sumber

Bagan di atas adalah formulasi yang dapat digunakan negara ASEAN dalam pembentukan identitas ASEAN dalam konteks NLC. Bermula dari tahap pertama yaitu memunculkan norma. Pada tahap ini aktor yang bekerja adalah *Norm Entrepreneurs* yang bekerjasama dengan Platform Organisasi yaitu ASEAN. *Norm Entrepreneurs* akan berusaha untuk mencari gagasan ideasional diantara kemajemukan negara anggota ASEAN agar dapat menemukan satu titik yang bisa dijadikan sebagai *tipping point* sebagai 'embrio' identitas atau norma yang akan dibawa pada tahap selanjutnya. *Norm Entrepreneurs* adalah komponen terpenting dalam tahap ini dan bisa dibentuk melalui kesepakatan bersama dalam ASEAN.

Tahapan ini merupakan tahap yang paling sulit dibandingkan dengan tahap yang kedua dan ketiga, karena upaya untuk menemukan gagasan ideasional cenderung sensitif memicu terjadinya perselisihan. Kesulitan utama yang akan dihadapi *Norm Entrepeneurs* dalam tahapan *Norm emergence* adalah upaya mencari idea tau gagasan ideasional. Sehingga, mencari dan menemukan gagasan ideasional adalah sebagai motif pada tahap pertama ini. *Norm Entrepeneurs* harus mencari gagasan ideasional dari beragam budaya negara ASEAN yang dapat merepresentasikan kepentingan seluruh negara ASEAN sehingga bisa mencapai *tipping point.* Gagasan ideasional akan berhubungan langsung dengan tindakan *Norm Entrepeneurs* sebagai pelaku. Dalam fase ini, sifat gagasan ideasional masih subjektif. Disinilah kondisi yang sangat rentan perdebatan, karena masing-masing negara ASEAN akan berupaya mengangkat dan menonjolkan gagasan budayanya masing-masing untuk diajukan sebagai gagasan ideasional yang akan dibawa pada tahap selanjutnya.

Tindakan dan logika persuasi merupakan mekanisme yang sangat dibutuhkan dalam fase ini, karena pada tahap inilah gagasan ideasional akan dilebur untuk menemukan satu *tipping point* agar bisa diubah menjadi menjadi identitas kolektif. Pada fase ini pula, mekanisme persuasi sangat dibutuhkan untuk merubah subjektifitas menjadi intersubjektifitas setelah *tipping point* ditemukan dan disetujui untuk dibawa ke tahap selanjutnya sebagai identitas kolektif.

Identitas kolektif yang telah terbentuk dari kesepakatan tentang gagasan ideasional memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan intersubjektifitas. Identitas kolektif yang telah melalui proses identifikasi dan yang telah terbangun dalam suatu intersubjektifitas akan keluar dan bergeser istilah menjadi *Collective Meaning*. Di dalam hubungan saling mempengaruhi tersebut juga akan melibatkan proses identifikasi. Hasilnya adalah *framing* terhadap *Self* dan *Others*. Terbentuknya intersubjektifitas akan mempengaruhi perilaku negara dan masyarakat ASEAN. Intersubjektifitas adalah modal penting yang akan dibawa dalam membentuk struktur ideasional. Hasil dari proses yang berlangsung pada tahap pertama adalah *Culture of anarchy* dan Identitas kolektif baru yang akan dibawa pada tahap yang selanjutnya.

Culture of anarchy dan Identitas kolektif telah menjadi hasil akhir dari tahap pertama yang sekaligus juga sebagai dasar keberlangsung siklus pada tahap kedua. Jika pada tahap pertama *Norm Entrepreneur* dan Organisasi ASEAN sebagai aktornya, maka pada tahap kedua ini aktornya adalah ASEAN sebagai platform organisasi dan sepuluh negara anggota ASEAN. Dua aktor ini sangat dibutuhkan untuk proses legitimasi *Culture of anarchy* dan Identitas kolektif yang telah terbentuk pada tahap pertama. Tapi *Culture of anarchy* dan Identitas kolektif pada tahap ini belumlah sempurna karena harus melalui proses-proses pada tahapan penjalaran norma di tahap kedua ini. oleh karena itu, motivasi pada tahap ini adalah mengupayakan legitimasi terhadap *Culture of anarchy* dan Identitas kolektif. Legitimasi itu akan menghasilkan Validasi yang semakin memperkuat *Culture of anarchy* dan Identitas kolektif yang baru dalam Komunitas ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara anggota tersebut. Setelah validasi dilakukan, mekanisme sosialisasi dan institusionalisi menjadi tindakan penting karena akan dibawa pada tahapan selanjutnya yaitu internalisasi identitas/norma baru tersebut.

Pada tahap ketiga ini selain ASEAN secara organisasi dan sepuluh negara anggota sebagai aktor, aktor lain yang dapat membantu dalam tahap ini adalah perangkat hukum, kaum profesional dan birokrasi. Dengan kerjasama yang terkordinasi, aktor pada tahap ini akan menginternalisasi norma dengan motivasi mengutamakan kenyamanan. Pada saat yang bersamaan mekanisme mebangun dan

menumbuhkan kebiasaan adalah hal pokok yang harus dilakukan. Hasil selanjutnya dari mekanisme dan koordinasi pada tahap ini adalah dilakukannya institusionalisasi akhir yang berupa ratifikasi sebagai bentuk penguatan secara sah pemberlakukan identitas atau norma baru dalam Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Oleh karena itu, tahapan ketiga ini sekaligus adalah sebagai tahapan memperkuat identitas atau norma baru di ASEAN. Dengan ratifikasi yang dilakukan, *Culture of anarchy* dan Identitas kolektif yang baru resmi dan sah berlaku dalam Komunitas ASEAN. Dengan terbentuknya identitas dan diperkuatnya identitas tersebut pada tahap internalisasi, maka akan memberikan kontribusi penting bagi upaya penguatan pilar ASCC.

c. Aktualisasi NLC dalam tindakan pembentukan identitas ASEAN

Berdasarkan bagan formulasi kerangka kerja NLC dalam pembentukan identitas ASEAN di atas, melalui telaah terhadap teori NLC penulis selanjutnya menyusun beberapa perangkat dan tindakan-tindakan yang mungkin untuk dilakukan dalam proses pembentukan identitas ASEAN. Tahap dan perangkat diperoleh berdasarkan pemikiran NLC Finnemore dan Sikkink, sedangkan tindakan diperoleh berdasarkan hasil analisis penulis.

Tabel 2.2
Tahap, Perangkat, dan Tindakan

Tahap	Perangkat	Tindakan
NLC tahap I (*Norm Emergence*)	1. *Norm entrepreneurs*	a. Penunjukan *Norm Entrepreneurs* b. Persetujuan bersama negara anggota ASEAN c. Legitimasi *Norm Entrepreneurs* d. Pengorganisasian *Norm Entrepreneurs* e. Penetapan agenda kerja *Norm Entrepreneurs* berbasis persuasi

	2. *Organizational platforms*	a. Mendorong penunjukan *Norm Entrepreneurs* b. Mengakomodasi persetujuan bersama negara anggota ASEAN, peresmian dan pengorganisasian *Norm Entrepreneurs* c. Memantau kinerja *Norm Entrepreneurs* untuk memastikannya bekerja sesuai agenda
	3. *Norm entrepreneurs* + *Organizational platforms* untuk merumuskan *Tipping point*	a. Seleksi gagasan ideasional yang direkomendasikan oleh negara anggota atau yang dimunculkan oleh *Norm Entrepreneurs* setelah melakukan penelusuran yang mendalam b. Penetapan gagasan ideasional yang berbasis perilaku yang diarahkan oleh pilihan atau kebiasaan yang berlaku umum dan dapat diterima oleh seluruh negara anggota ASEAN c. Komitmen negara anggota mengdopsi gagasan ideasional
NLC tahap II (Norm Cascade)	1. *States*	a. Mengadopsi dengan cepat tanpa tekanan domestik b. Koordinasi dengan organisasi regional (ASEAN) c. Melibatkan sanjungan atau kecaman diplomatik d. Persiapan materi sanksi dan insentif e. Sosialisasi melalui mekanisme formal negara f. *Peer presure* melalui

		legitimasi, persetujuan dan penghargaan g. Legitimasi di tingkat domestik melalui institusi politik
	2. *Networks in regional organization*	a. Sosialisasi regional b. Menjadi agen dan memperluas jaringan agen selain negara
NLC tahap II (*Internalization*)	1. *Professions*	a. Kontribusi dan konsolidasi b. Internalisasi melalui kalangan profesi kepada anggotanya
	2. *Bureaucracy*	a. Aktualisasi dalam keseharian sehingga menjadi perilaku dan kebiasaan b. Perubahan prosedur normatif c. Membentuk proses politik baru

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan Telaah Teori *Norm Life Cycle*

Sinerji antara tahapan NLC, perangkat yang bekerja, dan tindakan yang harus dilakukan seperti yang diajukan pada tabel di atas merupakan sebentuk formulasi langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh ASEAN untuk membentuk dan memperkuat identitas ASEAN terkait pilar ASCC. Dengan mengikuti tahap demi tahap seperti formulasi yang diajukan bisa jadi suatu saat nanti ASEAN berhasil dalam membentuk dan memperkuat identitas sosial-budayanya. Pembentukan identitas ASEAN akan berkontribusi penting dalam upaya penyeimbangan pilar-pilar Komunitas ASEAN. Pada gilirannya ekualitas ketiga pilar akan memperkuat organisasi ASEAN saat ini dan di masa yang akan datang.

F. Kesimpulan

Implementasi Komunitas ASEAN sudah di depan mata, meskipun sadar akan kekurangan yang terdapat disana-sini. Ketiga pilar yang masih berdiri dalam posisi timpang akan berbanding lurus dengan rapuhnya bangunan integrasi ASEAN. Pilar AEC dan APSC tampak lebih menonjol dan jauh meninggalkan kesiapan ASCC. Agar Komunitas ASEAN ke depan tidak hanya sekedar wahana pragmatisme ekonomi politik semata, maka menciptakan ekualitas diantara ketiga pilar komunitas tidak dapat ditawar lagi. Meningkatkan kesiapan pilar ASCC sama artinya dengan upaya menguatkan ASEAN saat ini dan di masa yang akan datang.

Memang tidak mudah membentuk identitas ASEAN di tengah tingginya level kemajemukan di ASEAN. Kendati demikian disparitas sosial-budaya tidak sepatutnya menjadi kegamangan dalam bertindak untuk pembentukan identitas ASEAN. Agar tidak menguap dalam kontestasi, ASEAN butuh *goodwill*, tindakan nyata, dan formulasi yang tepat sebagai arahan dalam pembentukan identitas ASEAN. Pembentukan identitas sosial tidak mustahil, karena secara mendasar pembentukan identitas ASEAN adalah bentuk dari konstruksi sosial. Hadirnya konstruktivisme dalam HI memunculkan peluang tersendiri dalam pembentukan identitas ASEAN karena perspektif ini berbicara tentang konstruksi sosial. Terlebih lagi dengan munculnya formulasi NLC oleh pemikir konstruktivis yang semakin memperjelas arahan untuk kebutuhan pembentukan identitas.

Berdasarkan pemahaman tentang konstruksi sosial dalam konstruktivisme dan pendalaman terhadap teori NLC yang menjadi bagian penting dalam konstruktivisme, penulis mencoba mengajukan formulasi tindakan yang dapat dilakukan ASEAN dalam upaya pembentukan identitas ASEAN. Secara fundamental pembentukan identitas ASEAN memerlukan upaya yang integral dengan logika persuasif sebagai motivasi utama. Pembentukan identitas ASEAN tidak bisa dipaksakan karena akan berbenturan dengan prinsip non-intervensi. Akan tetapi jika memang ASEAN memiliki keinginan, harapan dan tujuan bersama dalam cita-cita integrasinya, pembentukan identitas ASEAN bukanlah perkara sulit.

Tahapan pertama, ASEAN harus menunjuk *Norm Entrepreneur* yang bekerja pada platform organisasi dengan melakukan tindakan-tindakan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal yang krusial adalah menemukan *tipping point* gagasan ideasional yang akan menjadi embrio dalam pembentukan identitas ASEAN. Tahap pertama (*norm emergence*) ini peranan vital berada pada negara anggota, sekretariat organisasi dan *norm entrepreneur*. Setelah melalui tahap pertama, pembentukan identitas ASEAN akan melalui tahap kedua (*norm cascade*). Selain negara, jaringan organisasi di tingkat regional mendapat posisi penting. Mengakomodasi dan mensosialisasikan identitas baru di tingkat domestik negara anggota dan lintas negara di tingkat regional adalah tindakan utama untuk penjalaran identitas ASEAN. Selanjutnya pada tahap ketiga kalang profesi dan birokrasi dapat menjadi bagian penting dalam melakukan tindakan. Konsolidasi, aktualisasi, perubahan prosedur normatif yang mendukung eksistensi identitas ASEAN yang baru merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan pada tahap internalisasi.

Pada akhirnya, *goodwill* menjadi *keyword* dalam pembentukan identitas ASEAN. Sinergi antara negara anggota dengan organisasi yang menjadi perangkat sekretariat harus didefinisikan kembali terkait tujuan pembentukan identitas ASEAN. Selain itu peran seluruh masyarakat ASEAN akan menjadi pendorong utama dalam kesuksesan pembentukan identita ASEAN pada setiap tahapannya.

Referensi

Acharya, Amitav, (2007) "Theoretical Perspectives on International Relations in Asia", *Draft Paper for the Conference on International Relations in Asia: The New Regional System*," George Washington University, 27-29 September 2007.

Adler-Nissen, Rebecca (2014), "Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms and Order in International Society", *International Organization,* Vol. 68, No. 1.

Bernd, Bucher, (2007), "The False Promise of Constructivist Optimism", tulisan disampaikan pada *Standing Group on International Relations (ECPR) Sixth Pan-European Conference on International Relations Making Sense of a Pluralist*, World University of Turin, Italy ,12-15 September 2007.

Carr, Andrew, Ossie, (2012), "Australian as A Midle Power Norm Entrepreneur in the Asia Pacific", *Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Government University of Canberra.*

G.
H. El Bilad, Cecep, Zakarias, (2011), "Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma", *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2.

Finnemore, Martha dan Sikkink, Kathryn, (1998), "International Norm Dynamics and Political Change", *International Organization*, Vol. 52, No. 4, edisi International Organization at Fifty:Exploration and Contestation in the Study of World Politics (Autumn).

Griffiths, Martin, Steven C. Roach, M. Scott Solomon (ed.) (2009), *Fifty Key Thinkers in International Relations*, Second Edition, USA and Canada: Routledge.

Hoffmann, Matthew J., (2003), "Constructing a Complex World: The Frontiers of International Relations Theory and Foreign Policy-Making, *Asian Journal of Political Science*, Vol. 11, No. 2.

I.
Payne, Rodger A., (2001), "Persuasion, Frames and Norm Construction", *European Journal of International Relations,* SAGE Publications and ECPR, Vol. 7 No. 1.

Rouleau, Mark, (2008), "International Norm Complexity: Modeling the Evolution of Norms, Communities, and Action in the European Union", *Presentation to the*

DIMETIC Maastricht Session, Center for Social Complexity, George Mason University, 16 October 2008.

Wendt, Alexander, Constructing International Politics, *International Security*, Vol. 20, No. 1. (Summer, 1995).

Zehfuss, Maja, (2002), *Constructivisme in International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press.

Posisi ASEAN dan Diplomasi Indonesia Terkait Isu Palestina

Eva Mushoffa
(Dosen Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Abstrak

Pada Joint Communique ke 48 pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur, 4 Agustus 2015 kembali menegaskan posisi ASEAN dalam mendukung negara merdeka Palestina dan solusi dua negara Palestina dan Israel untuk hidup berdampingan secara damai. ASEAN menekankan upaya negosiasi perdamaian dalam mengatasi konflik kedua negara. Acharya (2011) melihat ASEAN memperkokoh perannya dalam perdamaian dan strabilitas global termasuk dalam konflik Palestina-Israel dengan mengutamakan dialog dan negosiasi. Demikian juga, peran diplomasi Indonesia dalam mendukung negara merdeka Palestina di ASEAN sangat kuat. Komitmen Indonesia dilakukan tidak hanya pada level diplomasi internasional tetapi juga melalui program *capacity building* yang menargetkan aparatur negara dan pemerintah dan masyarakat sipil Palestina.

Artikel ini berargumen, bahwa peningkatan diplomasi Indonesia dalam mendukung berdirinya negara Palestina akan memperbesar kapasitas Indonesia untuk mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya meningkatkan dukungan bagi berdirinya negara Palestina. Artikel ini berdasarkan penelitian untuk peningkatan program pendampingan capacity building on Palestine Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. dalam memainkan peran strategis di ASEAN terkait isu Palestina. Penelitian dilakukan pada Juli hingga Oktober 2015.

Kata Kunci: ASEAN, Indonesia, Palestina, Perdamaian, Diplomasi

Pendahuluan

Konflik Palestina-Israel telah menjadi salah satu konflik terbesar yang menyedot perhatian dunia internasional sejak berakhirnya perang Dunia Kedua. Konflik ini berkembang melibatkan dimensi yang kompleks dan aktor-aktor yang beragam di level regional maupun internasional.

Konflik yang dipicu oleh berdirinya negara Israel di Palestina pada 14 Mei 1948 ini telah mengakibatkan banyak perubahan penting di Palestina, diantaranya: terbaginya wilayah teritori Palestina, gelombang diaspora bangsa Palestina ke negara-negara sekitar dan instabilitas keamanan terutama di sepanjang garis

perbatasan. Hingga sekarang ketegangan di wilayah ini masih bisa dirasakan akibat persoalan-persoalan besar yang masih tersisa; antara lain nasib bangsa Palestina dan pendudukan Israel atas wilayah Tepi Barat dan Gaza yang diperuntukkan bagi bangsa Palestina berdasarkan resolusi DK PBB 242(Smith, 2009; Halliday, 2005).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusi damai bagi penyelesaian konflik ini. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi di tahun 1976 yang menyetujui 'solusi dua negara' (*two state solution*). Sejumlah perjanjian dan pembicaraan damai seperti Perjanjian Camp David (1979), Pembicaraan Damai Madrid (1991), Perjanjian Oslo I (1993), Oslo II (1995), pembicaraan Camp David (2000) (Smith, 2009), hingga Rencana Damai yang diajukan pimpinan otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang dikenal dengan Abbas *Peace Plan* (Kuttab, 2014) tak kunjung menghasilkan realisasi berdirinya negara Palestina yang berdaulat.

Di antara faktor yang menyebabkan kegagalan dari proses penyelesaian damai tersebut adalah masih berlanjutnya proyek pembangunan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat (Shlaim, 2009) serta lemahnya diplomasi internasional dan kapasitas otoritas Palestina yang diakibatkan oleh faksi-faksi yang timbul di dalam tubuh bangsa Palestina (Melhem, 2015).

Terkait dengan hal ini, munculnya Fatah yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO dan Hamas sebagai dua agensi yang mengatas-namakan bangsa Palestina, menambah kompleks penyelesaian konflik ini. Kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan pandangan tentang bagaimana negara dan pemerintahan Palestina akan dibentuk. Perkembangan terupdate dari kasus ini telah menghasilkan kesepakan terbentuknya pemerintahan konsensus (*consensus government*) di Palestina yang di lantik pada 2 Juni 2014. Pemerintahan konsensus yang terdiri atas perwakilan PLO dan Hamas ini bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan presiden Pemilu legislatif di tahun 2015 (Aljazeera, 2015). Namun demikian, baik PLO maupun Hamas dari waktu ke waktu masih saling menyimpan kecurigaan satu sama lain yang semakin menghambat proses perdamaian (Melhem, 2015).

Penyelesaian jalan damai konflik Palestina-Israel yang berorientasi kepada realisasi pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat membutuhkan peran

mediasi internasional, terutama untuk membantu rekonsiliasi kelompok-kelompok yang terlibat baik secara internal maupun external. Hal ini akan mempermudah jalan bagi terbentuknya negara Palestina.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki *concern* yang sangat besar atas pencarian solusi damai di Palestina.
Secara umum, walaupun arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak memberi perhatian yang besar atas dinamika politik di Timur Tengah (Suryadinata, 1995; Leifer, 1983a; Sukma, 2003), namun pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus bagi konflik Palestina.

Kedutaan Besar Palestina di Indonesia pertama kali dibuka pada tahun 1989, setelah sebelumnya presiden Soeharto menyatakan dukungan Indonesia atas berdirinya negara Palestina saat menerima kunjungan pimpinan PLO Yasser Arafat di tahun 1987. Dukungan ini dibarengi dengan sikap tegas Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, selama Israel belum menyelesaikan sengketa yang terjadi di tanah Palestina.

Tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk keaktifan menyuarakan perdamaian dan berdirinya negara Palestina di forum internasional, dukungan Indonesia juga semakin nyata ketika pemerintah Indonesia mengundang Menteri Luar Negeri negara-negara Asia dan Afrika dalam konferensi NASSP (*New Asia Africa Strategic Partnership*) di tahun 2008 yang secara khusus mencanangkan pembangunan kapasitas bagi Palestina (*Capacity Building for Palestine*). Program ini memiliki tujuan untuk melengkapi bantuan financial maupun proses politik menuju terbentuknya negara Palestina (Kementerian luar Negeri Republik Indonesia, 2009).

Sementara itu, ASEAN juga telah menunjukkan perkembangan penting terkait dengan isu Palestina. Pada 4 Agustus 2015 silam, Pada Joint Communique ke 48, pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur kembali menegaskan posisi ASEAN dalam mendukung negara merdeka Palestina dan solusi dua negara Palestina dan Israel untuk hidup berdampingan secara damai. Ini merupakan sikap yang lebih tegas yang dibuat dalam forum ASEAN tentang

penyelesaian konflik Palestina. Sebelumnya agenda penyelesaian konflik Palestina tidak menjadi prioritas utama di ASEAN.

Dalam konteks ini bagaimanapun peran Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi penting di ASEAN memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membuat sebuah Konsensus terkait sikap ASEAN dalam penyelesaian konflik Palestina. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengulas peningkatan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian konflik Palestina dan pengaruhnya dalam memperbesar kapasitas Indonesia untuk mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya meningkatkan dukungan bagi berdirinya negara Palestina.

Artikel ini akan dibagi menjadi beberapa sub-topik. Bagian pertama akan menjelaskan tentang peningkatan diplomasi Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina. Selanjutnya artikel ini akan membahas tentang Sikap ASEAN dalam penyelesaian konflik Palestina dan perkembangan terakhir terkait terkait sikap ASEAN dalam menyikapi konflik tersebut. Bagian terakhir akan menganalisa usaha Indonesia dan kapasitas yang dimilikinya dalam mendorong lahirnya konsensus di kalangan negara-negara ASEAN untuk memberi dukungan penuh bagi berdirinya negara Palestina.

Peningkatan Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Palestina

Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menuntut penghapusan segala bentuk penjajahan/kolonialisme dari muka bumi. Karena itu dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ditujukan untuk membantu bangsa Palestina merebut kembali hak-haknya yang telah dirampas oleh Israel (Sihbudi, 1997, h.122).

Dalam memberikan dukungan untuk Palestina, Indonesia merujuk kepada penyelesaian konflik *two state solution* yang dilandasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 242 tahun 1967 dan no. 338 tahun 1973 (Diplomasi, 2010). Semangat salam resolusi tersebut, menekankan hak rakyat Palestina untuk

mendirikan sebuah negara yang bebas merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur dan hidup secara damai berdampingan dengan negara lainnya (Diplomasi, 2010, h. 5).

Selain itu, tidak mudah bagi Indonesia untuk menutup mata atas persoalan yang terkait dengan Palestina. Mayoritas penduduk Muslim di Indonesia tidak memandang konflik Palestina-Israel sebagai konflik bilateral kedua pihak ataupun konflik Timur Tengah secara lebih luas. Tetapi, sebagian besar dari mereka masih mengaitkan konflik Palestina dengan kontrol Israel atas salah satu tempat suci ummat Islam, yaitu al-Quds/ Masjid al-Aqsha. Sehingga, konflik Palestina-Israel yang melibatkan ketidak-jelasan status tempat suci ummat Islam tersebut dianggap menjadi bagian dari persoalan seluruh ummat Islam di dunia (Sukma, 2003, h.54).

Secara umum, Muslim di Indonesia juga sangat antusias mengikuti berbagai peristiwa yang terjadi di Timur Tengah. hal ini disebabkan oleh persamaan kultural dan historis. Secara kultural, mayoritas penduduk Indonesia dan penduduk Timur Tengah sama-sama memeluk agama Islam. Sedangkan secara historis, sudah terjalin kontak yang sangat lama antara penduduk Indonesia dan penduduk Timur Tengah. negara-negara di Timur Tengah juga memainkan peranan penting di awal kemerdekaan Indonesia, sebagai pihak yang pertama kali memberikan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia (Sihbudi, 1997, h. 122).

Di tahun 2012, Indonesia juga berperan sebagai sebagai co-sponsor pengajuan resolusi peningkatan status Palestina dari sekadar sebagai entitas pemantau yang diwakili Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menjadi negara pemantau nonanggota (*nonmember observer state*). Komitmen ini terlihat dalam kehadiran langsung Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, sebagai perwakilan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada 29 September 2012. KehadiTidak hanya hadir secara langsung dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia juga aktif melobi beberapa negara yang belum menentukan sikap saat itu, untuk berpartisipasi memberikan suara (Harian Kompas, 2012). Satu tahun sebelumnya, Indonesia juga aktif memberi dukungan bagi Palestina untuk secara resmi menjadi anggota penuh UNESCO

(Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB) yang ke-195 (Antaranews, 2011).

Di tahun 2015, Indonesia juga memberi suara mendukung Resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sejak tanggal 10 September 2015 secara mutlak memperbolehkan Palestina dan Takhta Suci Vatikan mengibarkan bendera masing-masing di markas PBB. Ini menjadi poin penting yang semakin memberikan akses yang luas bagi bangsa Palestina dengan posisi yang semakin sejajar untuk mendapat dukungan yang lebih luas dalam forum internasional (Kompas, 2015)

Menariknya, dukungan Indonesia bagi Palestina juga dibarengi dengan sikap tegas pemerintah Indonesia untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sejak lama wacana pembukaan hubungan dilpomasi dengan Israel bergulir dalam media nasional maupun internasional. Publik Indonesia bereaksi keras menggelar demontsrtasi apel anti-Israel di masjid al-Azhar Jakarta yang dihadiri sekitar 15.000 orang, atas pemberitaan di tahun 1993 ketika Menhakam saat itu Edi Sudrajat dan Menlu Alatas mengindikasikan kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, jika negara-negara Arab juga sudah melakukan hal tersebut. hal ini didasari atas perkembangan solusi jalan damai bagi konflik Palestina saat itu yang menghasilkan *"the Declaration of Principles on interim Self-government Arrangements*" atau "deklarasi Prinsip" antara PLO dan Israel pada perjanjian Oslo I (Sihbudi, 1997 h. 132). Wacana pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel juga mencuat dalam wacana nasional di masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid dan mendapat reaksi publik yang keras. Karena itu Walaupun telah terjalin hubungan dagang yang cukup intensif antara Indonesia dan Israel, namun hubungan resmi dalam bentuk hubungan doplomatik antara Indonesia dan Israel hingga saat ini belum bisa direalisasikan.

Capacity Building on Palestine

Capacity Building on Palestine merupakan program yang digagas Indonesia dalam forum New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) yang melengkapi bantuan financial maupun proses politik menuju terbentuknya negara Palestina (Kementerian luar Negeri Republik Indonesia, 2009). Program ini pertama kali diluncurkan dalam Peringatan Konferensi Asia Afrika di tahun 2005. Dalam konferensi ini, Indonesia bersama dengan partisipan dari negara-negara yang hadir sepakat untuk mengadakan program pelatihan bagi 10,000 warga Palestina dari tahun 2008 hingga 2013 (Kementerian luar Negeri Republik Indonesia, 2009).

Secara bilateral, Indonesia juga menargetkan pelatihan bagi 1000 warga Palestina. Selama tahun 2010 Indonesia telah menyelenggarakan lebih dari 30 program pelatihan yang diikuti 126 warga Palestina. Program-program pelatihan ini antara lain meliputi pelatihan penyelamatan dalam kebakaran, Manajemen Siklus Proyek, Pengarus-utamaan Gender, Manajeman Sumber Daya Mineral dan Batu Bara, Managemen Arsip, Penyimpanan Dokumen dan Pembangunan Kapasitas industry tekstil dan sejumlah pelatihan diplomatik dan protokol yang diselenggarakan berbagai kementerian (Kementerian luar Negeri Republik Indonesia, 2010).

Matrix on capacity Building Projects for Palestine in the Framework of NAASP (2008-2010)

No	Period	Program	Organizer	Total Participants
1	15th April – 19th April 2008	Business Incubator Small and Medium Enterprises	Technical Cooperation (MFA), ASTRA, BPPT	8 persons
2	21st April – 25th April 2008	International Workshop on Women Empowerment in Economic Development	Technical Cooperation (MFA) and Women Empowerment Ministry	4 persons
3	23rd-27th June 2008	International Training Program on Microfinance for Asian – African countries	Technical Cooperation,(MFA)	1 person
4	16th June – 25th July 2008	Diplomatic Training Program for Palestinian Diplomats	Center for Training and Education(MFA)	9 persons
5	19th -27th August 2008	Training on Integrated Neo Natal and Child Health	Technical Cooperation (MFA)	3 persons
6	28th Oct – 31 Oct 2008	Democratization and Good Governance Training	Technical Cooperation, (MFA)	4 Persons
7	19th October – 29th November 2008	Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities	Training on Vocational Rehabilitation for Persons with Disabilities Ministry of Health	2 persons
8	18th – 19th November 2008	Asia Africa Conference on Open Source	BPPT	1 person
9	23rd – 28th March 2009	International Training Workshop on Women Empowerment in IT	Technical Cooperation (MFA) and Women Empowerment Ministry	2 persons

Komitmen Indonesia dalam mendukung realisasi pendirian negara Palestina semakin kuat dengan diagendakannya *Declaration on Palestine* pada Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 dan Peringatan NASSP (*New Asia Africa Strategic Partnership*) ke-10 yang berlangsung pada 19-24 April 2015. Diantara poin penting yang telah didiskusikan dalam forum ini adalah dukungan secara konsisten terhadap pendirian negara Palestina dan hak-hak dasar warga Palestina (NASSPConference, 2015).

ASEAN dan Konflik Palestina

Langkah ASEAN untuk membuat sebuah *joint communiqué* pada Agustus 2015 silam yang antara lain memuat pernyataan sikap tentang penyelesaian konflik Palestina adalah sebuah perubahan sikap yang sangat penting. Pada *joint communiqué* tersebut dinyatakan dengan jelas: “We reiterated ASEAN’s support for the legitimate

right of the Palestinian people for an independent state of Palestine and a two-State solution where Palestine and Israel live side-by-side in peace" [kami menyatakan kembali dukungan ASEAN bagi hak legitimate rakyat Palestina untuk mendirikan negara Palestina dan solusi dua negara dimana Palestina dan Israel hidup berdampingan dengan damai] (Palatino, 2014). Ini merupakan pernyataan resmi pertama ASEAN sebagai forum regional untuk memberi dukungan bagi pendirian negara Palestina sejak deklarasi unilateral pendirian negara Palestina dikumandangkan di tahun 1988.

Sebelumnya, sikap ASEAN terkait penyelesaian konflik Palestina terbilang sangat lemah. Penyelesaian konflik Palestina belum menjadi agenda prioritas ASEAN.Di tahun 2010 saat negara-negara Amerika Selatan bergabung bersama 100 negara lain untuk memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina berdasarkan batas sebelum tahun 1967, para pemimpin ASEAN hanya mampu mengeluarkan pernyataan yang menegaskan Palestina dan Israel untuk "live side-by-side in peace"[hidup berdampingan dengan damai]. Hal ini disebabkan olehsikap negara-negara ASEAN masih terbelah menjadi beberapa blok. Beberapa negara memberi dukungan penuh untuk pendirian negara Palestina, sementara sebagian lainnya menginginkan hubungan bilateral dengan Israel (The Jakarta Post, 2010). Dalam hal ini, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam telah memberikan pengakuan atas negara Palestina sejak tahun 1988 dan menolak untuk membangun hubungan bilateral dengan Israel. sementara, Vietnam, Filipina, Kamboja dan Laos Juga telah mengakui negara Palestina, tetapi juga memiliki hubungan bilateral dengan Israel (The Jakarta Post, 2010).

Secara umum, bagi mayoritas negara-negara anggota ASEAN konflik di Timur Tengah memang masih menjadi isu yang tidak lebih penting jika dibandingkan dengan penyelesaian konflik dan reformasi politik di Myanmar (The Jakarta Post, 2010). Persoalan lain yang mencegah hadirnya konsensus ASEAN terkait konflik Palestina adalah perbedaan pandangan dikalangan negara-negara anggotanya dalam menyikapi hubungan dengan dua pihak yang berkonflik; Palestina dan Israel. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei

Darussalam telah lama memberikan dukungan penuh bagi pendirian negara Palestina dan menolak pembukaan hubungan diplomatic dengan negara Israel. Sementara negara-negara anggota lainnya juga memberikan dukungan terhadap negara Palestina tetapi memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Peningkatan Diplomasi Indonesia untuk Palestina dan Sikap ASEAN terkait Isu Palestina

Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang banyak memberi perhatian dan komitmen untuk mendukung cita-cita pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Komitmen ini telihat dari peningkatan diplomasi yang dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun kalangan kelompok masyarakat selama lebih dari dua dekade yang secara sukarela menggalang bebagai usaha untuk memperkuat posisi bangsa Palestina di kalangan internasional. Sebagai salah satu negara yang sangat berpengaruh di ASEAN, sikap Indonesia terhadap Palestina berpotensi untuk memperkuat dukungan ASEAN sebagai institusi dan negara-negara ASEAN lainnya secara bilateral untuk Palestina.

Ada beberapa alasan mengapa suara Indonesia secara bilateral bisa memberi pengaruh positif dalam memperkuat sikap ASEAN terhadap Palestina. Pertama, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara *founding father* yang telah memperlihatkan kepemimpinan yang kuat di ASEAN. Kepemimpinan Indonesia sangat kuat terlihat selama Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan di bawah pemerintahan Orde Baru. Namun demikian, posisi Indonesia sempat dipertanyakan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1997. Akan tetapi, dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kuat, Indonesia berhasil memperlihatkan penguatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Indonesia kembali menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat di Asia Tenggara.

Dalam kaitannya dengan tradisi kepemimpinan di ASEAN, terlihat bahwa jika negara-negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim yang signifikan seperti Indonesia, Amalysia dan Brunei Darussalam memimpin ASEAN, maka isu-isu yang

berhubungan dengan dunia Islam dan Timur-Tengah, Asia Barat dan Afrika mendapat porsi yang cukup besar dalam *joint communiqué* yang dihasilkan oleh ASEAN. Misalnya di tahun 1982, ASEAN mengeluarkan pernyataan yang mengecam agresi Israel ke Lebanon, menyerukan genjatan senjata serta penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon. Di tahun 1984, Indonesia berhasil memasukkan poin tentang hak bangsa Palestina yang tidak terpisahkan (Inalienable rights of the Palestinian people (Chongkittavorn, 2011). Poin yang sama juga ditekankan dalam *joint communiqué* ditahun selanjutnya yang dipertegas dengan tuntutan untuk segera merealisasikan hak bangsa Palestina untuk merdeka. Sikap ASEAN terhadap Palestina juga mengalami perkembangan di tahun 1990an dan puncaknya adalah di tahun 1997, ketika hak legitimate dan kepentingan semua pihak termasuk Palestina kembali ditegaskan dalam joint communiqué yang dibuat oleh ASEAN. Insiden penyerangan Israel atas kapal Mavi Marmara yang mengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza juga turut menjadi perhatian khusus ASEAN di tahun 2010. Menarik juga untuk diperhatikan, bahwa suara Indonesia bersama negara-negara lain yang memberi dukungan penuh untuk Palestina telah menyebabkan hubungan ASEAN sebagai institusi dan Israel tidak banyak mengalami perkembangan (Chongkittavorn, 2011). Selain itu, posisi Indonesia di dalam beberapa organisasi regional lainnya seperti dalam non-alignment movement (NAM), G-20 dan New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) juga semakin memperkuat potensi kepemimpinan Indonesia di ASEAN.

Dukungan untuk Palestina tidak hanya menjadi agenda penting pemerintah Indonesia, tetapi isu ini juga telah menjadi perhatian publik. Indonesia. Mayoritas penduduk Muslim Indonesia memberi simpati terhadap perjuangan Palestina yang terlihat dengan usaha-usaha sukarela yang digalang untuk memberi bantuan kemanusiaan. Dua organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dikenal sangat dekat dengan bangsa Palestina. Suara masyarakat NU untuk Palestina direalisasikan dalam sebuah misi perdamaian khusus untuk Palestina. NU Jawa Timur bahkan secara khusus mengeluarkan kebijakan 3-D untuk Palestina, yaitu dilpomasi, dana dan doa. Muhammadiyah juga tidak ketinggalan. Ormas ini

secara khusus mendirikan 'Prakarsa Persahabatan Indonesia Palestina' (PPIP) yang juga aktif mengalang dukungan dana melalui kegiatan amal. Beberapa lembaga filantropi yang ada di Indonesia seperti Dhompet Du'afa dan MER-C Indonesia juga aktif mensponsori bantuan sosial kemanusian seperti pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Dukungan negara lain atas kepemimpinan Indonesia dalam mengawal isu Palestina turut memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Jepang misalnya menjadi salah satu negara yang mendorong Indonesia untuk lebih intensif memberikan dukungan bagi Palestina. Secara, Jepang mengirim utusan ke Jakarta pada 3 September 2009, 15 Oktober 2009 dan 26 Januari 2009. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut duta besar H.E. Yutaka Limura menyampaikan proposal yang meminta partisipasi aktif Indonesia dalam *like-minded East Asian Countries*, untuk menggalang dukungan dari Kawasan Asia Timur dalam proses Perdamaian Palestina. Secara spesifik proposal ini meminta Indonesia untuk melibatkan negara-negara di Asia Timur yang selama ini belum banyak terlibat, dalam proses perdamaian di Timur Tengah (Diplomasi, 2010, h. 5).

Dalam pertemuan selanjutnya di Tokyo ditahun 2010, pemerintah Jepang mendorong upaya mediasi Indonesia untuk Palestina yang lebih intensif guna mendapat perhatian internasional. Pemerintah Jepang secara spesifik juga menawarkan kerjasama dalam proyek yang bersifat *multi-track* yang melibatkan unsur pemerintah maupun swasta dengan pendekatan yang bersifat bilateral dan multi-lateral. Untuk tujuan-tujuan tersebut, pemerintah Jepang secara spesifik menawarkan kantor JICA di Ramallah. Pemerintah Jepang juga menekankan 'posisi khusus' Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, yang memiliki poetensi besar menjadi mediator dalam proses perdamaian di Timur Tengah (Diplomasi, 2010, h. 10).

Kesimpulan dan Saran

Indonesia telah memperlihatkan dukungan yang bertambah untuk perjuangan bangsa Palestina dalam beberapa dekade terakhir. Dukungan ini tidak hanya datang

dari pemerintah Indonesia, tetapi juga dari kalangan unsur non-pemerintah seperti ormas dan lembaga filantropi.

Landasan keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina tidak terlepas dari pandangan bangsa Indonesia yang terefleksi dalam konstutusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan dukungan atas pengahapusan segala bentuk penjajahan di dunia. Dalam konteks ini pendudukan Israel atas wilayah Gaza, Tepi Barat dan Jerussalem Timur yang seharusnya menjadi tempat berdirinya negara Palestina berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 242 tahun 1967 dan no. 338 tahun 1973 merupakan pelanggaran Hak Azazi Manusia dan kejahatan kemanusiaan.

Dukungan Indonesia atas pendirian negra Palestina merujuk kepada *two state solution* (Solusi dua negara) yang menyetujui pemisahan Palestina atas Israel serta mengakui kedua negara serta pihak-pihak lain yang terlibat untuk hidup berdampingan secara damai. Namun demikian, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel, selama pemerintah Israel masih menduduki wilayah-wilayah yang seharusnya diperuntukkan bagi negara Palestina. Sikap ini juag mendapat dukungan mayoritas Muslim di Indonesia.

Dukungan pemerintah Indonesia semakin jelas terlihat dalam inisiasi program *Capacity Building on Palestine* yang digagas dalam framework New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP) di tahun 2008. Dalam program ini, Indonesia bersama negara-negara Asia dan Afrika menargetkan program-program training dan workshop bagi 10.000 masyarakat Palestina untuk peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan program-program yang mendukung realisasi berdirinya negara Palestina yang merdeka. Komitmen *capacity building on Palestine* ini kembali diperpanjang untuk periode 2014-2019 dalam peringatan 60 tahun Deklarasi Asia-Afrika dan 10 tahun NAASP yang dilaksanakan pada bulan April 2015 silam.

Artikel ini berargumen bahwa peningkatan diplomasi Indonesia dalam mendukung berdirinya negara Palestina akan memperbesar kapasitas Indonesia untuk mendorong ASEAN dan negara-negara anggotanya meningkatkan dukungan bagi berdirinya negara Palestina. Selama ini ASEAN belum memperlihatkan sikap yang

tegas terkait dukungan bagi pendirian negara Palestina yang merdeka. Sikap ASEAN ini tidak terlepas dari pecahnya suara negara-negara ASEAN dalam menyikapi konflik Palestina. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam sejak lama memberikan dukungan penuh atas cita-cita berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Sikap ini dipertegas dengan tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi, sebagian negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapore, Filipina dan Thailand telah menjalin hubugan diplomatik dengan Israel dan masih memandang penting hubungan dengan Israel. Namun demikian perubahan sikap ASEAN dalam menyikapi persoalan Palestina semakin menunjukkan kearah yang lebih positif mendukung kemerdekaan Palestina. Poin ini kembali diperlihatkan ASEAN dalam join communiqué yang dikeluarkan pada Agustus 2015.

Artikel ini berpandangan bahwa peningkatan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia berpotensi untuk memberi pengaruh positif di ASEAN yang akan mendorong sikap negara-negara ASEAN dan Sikap ASEAN sebagai institusi untuk meningkatkan dukungan bagi cita-cita pendirian negara Palestina yang merdeka. Hal ini dilandasi atas tiga alasan utama. Pertama, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis di ASEAN. Sebagai salah satu *founding fathers* Indonesia memiliki kapasitas *leadership* yang telah teruji di ASEAN. Potensi kepemimpinan ini juga bertambah kuat dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum lain seperti NAM, G-20 dan NAASP. Kedua, Indonesia memiliki kelompok masyarakat sipil (NGO) seperti ormas-ormas Islam dan lembaga filantropi yang sangat dinamis. Kelompok-kelompok ini menjadi bagian penting dari diplomasi public Indonesia di level internasional. Kelompok-kelempok ini secara sukarela juga turut menggalang dukungan bagi Palestina. Ketiga Indonesia juga mendapat dukungan dari negara-negara lain di luar ASEAN untuk terlibat aktif dalam perdamaian di Timur Tengah.

Daftar Pustaka

Aljazeera (2015) *Palestinians form consensus government.* Tersedia: http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/palestinians-set-swear-unity-government-20146281348223961.html (Diakses 1 April 2015)

Antaranews (2011) *Indonesia dukung Palestina jadi anggota penuh UNESCO*, tersedia di http://www.antaranews.com/berita/283586/indonesia-dukung-palestina-jadi-anggota-penuh-unesco (diakses 2 Januari 2015).

Daoud Kuttab (2014) Will Abbas carry out threats if his peace plan is rejected?, Tersedia: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/09/palestinian-president-abbas-threat-icc-peace-plan.html#ixzz3XiUNDaUF (Diakses 1 April 2015)

Diplomasi (2010) 'RI Tegaskan dukungan untuk kemerdekaan Palestina', tersedia di: (diakses, 12 Januari 2015).

Fred H alliday, *The Middle East in International Relations: Power, Politics and Ideology*, Cambridge University Press (2005)

Harian Kompas (2012) *Indonesia Perjuangkan Status Palestina di PBB*, tersedia di: http://internasional.kompas.com/read/2012/11/29/06033919/Indonesia.Perjuangkan.Status.Palestina.di.PBB (diakses 2 Januari 2015).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2009) Presiden Palestina Berterimakasih Atas Program Capacity Building for Palestine, Tersedia www.kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=692&lb (Diakses 2 Januari 2015)

Kompas (2015) *Bendera Palestina boleh berkibar di markas PBB.* Tersedia di: http://print.kompas.com/baca/2015/09/11/Bendera-Palestina-Boleh-Berkibar-di-Markas-PBB (diakses 15 September 2015)

Leifer, Michael. (1983a). *Indonesia's foreign policy*. London: Allen & Unwin.

Leifer, Michael. (1983b). The Islamic factor in Indonesia's foreign policy: A case of functional ambiguity. In Adeed Dawisha (ed.), *Islam in foreign policy* (pp.144–158). Cambridge: Cambridge University Press.

Leifer, Michael. (2005). Indonesia's foreign policy: Change and continuity. In Chin Kin Wah & Leo Suryadinata (eds.), *Michael Leifer: Selected works on Southeast Asia* (pp.592–602). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Leo Suryadinata, "Islam and Suharto's foreign policy: Indonesia, the Middle East and Bosnia," *Asian Survey*, Vol. XXXV, No.3 (1995): 291–303.

Louise Fawcett (ed), *International Relations of the Middle East*, Second Edition, Oxford University Press (2009)

Melhem, A. (2015) *The deepening rift between Fatah, Hamas.* Tersedia: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/palestine-hamas-fatah-plo-accusations.html (Diakses 1 April 2015)

Palatino, Mong (2014) 'ASEAN's Joint Communique: It's Not Just About China or the South China Sea', (Tersedia http://thediplomat.com/2015/08/aseans-joint-communique-its-not-just-about-china-or-the-south-china-sea/ , diakses 1 April 2015)

Raymond Hinnebusch and Anoushiravan Ehteshami (eds), *The Foreign Policies of Middle East States*, Lynne Rienner Publishers (2001)

Sihbudi, R. (1997) *Indonesia Timur Tengah: Masalah dan prospek*, Jakarta: Gema Insani Press.

Sukma, Rizal. (2003). *Islam in Indonesian Foreign Policy*, London: RoutledgeCurzon.

The Jakarta Post (2011) 'Palestine issue still low on ASEAN Agenda' (Terdesia di: http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/08/palestine-issue-still-low-asean-agenda.html , (diakses 12 February 2015).